



PROFIL KESEHATAN INDONESIA **2025**





PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2026**

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

000.000

Ind

p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia 2025.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2026

1. Judul I. HEALTH STATISTICS
II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950

Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168

Fax no: 62-21-5277168

E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id

Website: <http://www.kemkes/go.id>

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E, M.A, Ph.D
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Eko Sulistijo, S.H., M.T
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Editor

Farida Sibuea, SKM, MScPH

Anggota

Evida Veronika Manullang, S.Si, MKM; **Arif Budiarto**, S.Kom, M.Kom; **Eka Satriani Sakti**, SKM, MKM; **Wardah**, SKM, MKM; dr. **Yoeyoen Aryantin Indrayani**; **Khairani**, SKM, MKM; **Intan Suryantisa Indah**, SKM, MKM; **Muhammad Syauqi Fadhil**, S.T

Kontributor

Eksternal

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Badan Pusat Statistik; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Internal

First Noel Reynald Pardede, S.Akun (Biro Keuangan dan BMN); Yulius Widiyantoro (Biro Perencanaan); Arnia Dian Kusuma Devi, SKM (Pusat Pembiayaan Kesehatan); Dian Eka Musthofa (Pusat Krisis Kesehatan); Fauzan Abdul Lathief, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan); Aryo Genta, S.Farm, Apt. (Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan); Wirda Supriyandi S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan); Shifa Zakia, SKM (Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan); dr. Yunita Rina Sari, MKM (Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga); Muhammad Rifki Setiawan, S.Kom (Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer); Euis Daniati, A.Md (Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer); Muslimah, SKM, MKM; Muhammad Afrizal (Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan); Abuchori, SKM; Thomas Aquinaldo Maruli Sody, SKM (Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan); Bella Agustina Noor Artiarini, SKM; Sulistyo, SKM, M.Epid; Deny Fattah, SKM; Dr. Agus Handito, SKM, M.Epid; Riskha Tiara Puspawati, SKM; drh. Maya Esrawati; Sabrina Shifa Salsabila Utami, SKM; Medita Ervianti, SKM; Anggun Lathifah Asmi, SKM; Yatinawati, SKM, M.Epid; Yayuk Agustin Hapsari, SKM (Direktorat Penyakit Menular); Ridho Ichsan Syaini, SKM, M.Epid (Direktorat Penyakit Tidak Menular); Yulfi Prabawati Suminar, SE (Direktorat Kesehatan Lingkungan); Retno Ambarwati, SKM, MKM (Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan); Ardhea Pramesti Ningrum, S.Farm (Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi); Febri Iqbal, S.T (Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi); Setditjen. Kesehatan Primer dan Komunitas; Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas; Setditjen Penanggulangan Penyakit; Direktorat Imunisasi; Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 dapat diterbitkan secara resmi sebagai wujud keterbukaan dan transparansi informasi publik.

Profil Kesehatan Indonesia merupakan publikasi tahunan strategis yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesehatan masyarakat, capaian pembangunan kesehatan, serta perkembangan berbagai program kesehatan di Indonesia. Dokumen ini menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat nasional maupun daerah.

Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 dilaksanakan secara terstruktur, akuntabel, dan kolaboratif. Publikasi ini menghimpun data rutin Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta institusi strategis seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Seluruh data yang terkumpul melalui proses pengolahan dan analisis mendalam untuk menjamin akurasi serta validitas informasi. Selain itu, guna memperkaya substansi dan menyelaraskan interpretasi data, diselenggarakan serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) bersama unit utama Kemenkes, kementerian/lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Seiring meningkatnya kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), penguatan tata kelola data kesehatan terus diakselerasi. Langkah transformatif dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi interoperabilitas sistem informasi, serta peningkatan kapasitas pengelola data di setiap lini guna menghasilkan data yang presisi, konsisten, dan terintegrasi secara optimal.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta terima kasih atas kontribusi aktif dari pihak yang terlibat dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia ini. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif guna menyempurnakan kualitas penerbitan profil kesehatan di masa mendatang. Semoga Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pembangunan kesehatan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2026

Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA





MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 dapat diterbitkan sebagai salah satu sumber informasi kesehatan nasional yang penting dan strategis.

Pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dalam upaya tersebut, data dan informasi kesehatan memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, menentukan prioritas, dan mengukur capaian pembangunan kesehatan secara objektif.

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai berbagai perkembangan sektor kesehatan selama satu tahun terakhir. Publikasi ini menunjukkan upaya yang terus dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sumber daya kesehatan, serta mendorong transformasi sistem kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahun 2025 juga menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi pembangunan kesehatan jangka panjang. Berbagai agenda strategis terus dilaksanakan untuk mendukung terciptanya layanan kesehatan yang lebih merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari penguatan pelayanan promotif dan preventif, sehingga masyarakat dapat mengenali faktor risiko kesehatan lebih dini dan memperoleh intervensi yang tepat. Di saat yang sama, transformasi digital kesehatan terus didorong untuk memperkuat keterpaduan layanan dan meningkatkan kualitas data kesehatan guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan berbasis bukti.

Dalam konteks tersebut, Profil Kesehatan Indonesia tidak hanya menjadi dokumentasi capaian pembangunan kesehatan, tetapi juga menjadi sumber informasi penting dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan di berbagai tingkatan.

Saya meyakini bahwa pembangunan kesehatan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang didukung oleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat budaya pemanfaatan data dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penyusunan program kesehatan.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kementerian/lembaga, mitra pembangunan, serta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan penyusunan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025.

Semoga publikasi ini dapat dimanfaatkan secara luas dan menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan kesehatan menuju Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera.

Jakarta, Juli 2026

Menteri Kesehatan

BUDI G. SADIKIN



DAFTAR GAMBAR, ISI, DAN LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	PROPORSI PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2025	1
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (JIWA) TAHUN 2025	2
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT PULAU TAHUN 2025	3
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2025	4
GAMBAR 1.5	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2020-2025	6
GAMBAR 1.6	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	8
GAMBAR 1.7	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2025	10
GAMBAR 1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI (%) TAHUN 2025	12
GAMBAR 1.9	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2021-2025	13
GAMBAR 1.10	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2023-2025	14
GAMBAR 1.11	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2021-2025	15
GAMBAR 1.12	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2021-2025	16
GAMBAR 1.13	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2022-2025	17
GAMBAR 1.14	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	18

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021-2025	20
GAMBAR 2.2	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2025	22
GAMBAR 2.3	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	23
GAMBAR 2.4	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	26
GAMBAR 2.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	27
GAMBAR 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	28
GAMBAR 2.7	KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	30
GAMBAR 2.8	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2025	31
GAMBAR 2.9	JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	32

GAMBAR 2.10	JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	33
GAMBAR 2.11	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER (TPMD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	35
GAMBAR 2.12	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI (TPMDG) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	36
GAMBAR 2.13	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	37
GAMBAR 2.14	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN TAHUN 2025	38
GAMBAR 2.15	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	39
GAMBAR 2.16	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2021-2025	41
GAMBAR 2.17	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2025	42
GAMBAR 2.18	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2021-2025	43
GAMBAR 2.19	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	44
GAMBAR 2.20	PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	45
GAMBAR 2.21	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG TERKONEKSI DENGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	46
GAMBAR 2.22	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IMUNISASI RUTIN LENGKAP TAHUN 2025	48
GAMBAR 2.23	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	50
GAMBAR 2.24	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 75% PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	52

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	55
GAMBAR 3.2	PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2025	56
GAMBAR 3.3	JUMLAH 9 JENIS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025	57
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	58
GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2025	59
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2025	60
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2025	61

GAMBAR 3.8	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025	62
GAMBAR 3.9	PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025	63
GAMBAR 3.10	DISTRIBUSI JUMLAH SDM KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025	64
GAMBAR 3.11	SEBARAN JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2025	64
GAMBAR 3.12	JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2025	65
GAMBAR 3.13	JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025	66
GAMBAR 3.14	JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	67
GAMBAR 3.15	JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2025	67
GAMBAR 3.16	JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR PER PROVINSI AKTIF PER 31 DESEMBER 2025	68
GAMBAR 3.17	PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025	69
GAMBAR 3.18	PROPORSI PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS MENURUT REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2025	71
GAMBAR 3.19	PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2025	72
GAMBAR 3.20	PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP DI INDONESIA MENURUT REGIONAL TAHUN 2025	73
GAMBAR 3.21	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	75
GAMBAR 3.22	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	76
GAMBAR 3.23	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	77
GAMBAR 3.24	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	78

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2021-2025	81
GAMBAR 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2025	82
GAMBAR 4.3	PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2025	83
GAMBAR 4.4	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2025	83

GAMBAR 4.5	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	84
GAMBAR 4.6	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	85
GAMBAR 4.7	PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	89
GAMBAR 4.8	PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI INDONESIA TAHUN 2018-2025	91
GAMBAR 4.9	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	92
GAMBAR 4.10	TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2025	93
GAMBAR 4.11	ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	94
GAMBAR 4.12	JUMLAH FKTP BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2025	95
GAMBAR 4.13	PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA DENGAN BPJS DI INDONESIA TAHUN 2025	95
GAMBAR 4.14	JUMLAH FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2029-2025	95
GAMBAR 4.15	JUMLAH FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	95
GAMBAR 4.16	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2025	96
GAMBAR 4.17	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	96
GAMBAR 4.18	PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2025	98
GAMBAR 4.19	BEBAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	98

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991-2020	102
GAMBAR 5.2	JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2021-2025	103
GAMBAR 5.3	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA TAHUN 2025	103
GAMBAR 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	105
GAMBAR 5.5	CAKUPAN IMUNISASI TETANUS TOXOID 2+ (T2+) PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2025	107
GAMBAR 5.6	CAKUPAN PEMBERIAN SUPLEMENTASI GIZI (TABLET TAMBAH DARAH/TTD DAN MULTIPLE MICRONUTRIENTS SUPPLEMENT/MMS) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	108
GAMBAR 5.7	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	109

GAMBAR 5.8	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	111
GAMBAR 5.9	PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	112
GAMBAR 5.10	PERSENTASE PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2025	113
GAMBAR 5.11	PERSENTASE PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2025	114
GAMBAR 5.12	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	115
GAMBAR 5.13	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	116
GAMBAR 5.14	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	117
GAMBAR 5.15	PERSENTASE IBU HAMIL POSITIF SIFILIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	118
GAMBAR 5.16	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2025	119
GAMBAR 5.17	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2025	120
GAMBAR 5.18	PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2025	121
GAMBAR 5.19	PENYEBAB KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2025	122
GAMBAR 5.20	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI INDONESIA TAHUN 2020-2025	123
GAMBAR 5.21	CAKUPAN KUNJUNGAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2025	124
GAMBAR 5.22	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	125
GAMBAR 5.23	BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	127
GAMBAR 5.24	BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	128
GAMBAR 5.25	BALITA DILAYANI STIMULASI, DETEKSI, DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	129
GAMBAR 5.26	BALITA DILAYANI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	130
GAMBAR 5.27	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2021-2025	132
GAMBAR 5.28	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	134
GAMBAR 5.29	ANGKA DROP OUT (DO) IMUNISASI PADA BAYI TAHUN 2022-2025	135
GAMBAR 5.30	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB 4 DAN CAMPAK RUBELLA 2 PADA ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	136
GAMBAR 5.31	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2025	138

GAMBAR 5.32	PERSENTASE UNDERWEIGHT (BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG) PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	139
GAMBAR 5.33	PERSENTASE STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	140
GAMBAR 5.34	PERSENTASE WASTING (GIZI KURANG DAN GIZI BURUK) PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	141
GAMBAR 5.35	PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (STUNTING) DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG (WASTING) PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2024	142
GAMBAR 5.36	CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSUI DINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	144
GAMBAR 5.37	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	145
GAMBAR 5.38	PERSENTASE BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	147
GAMBAR 5.39	CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	148
GAMBAR 5.40	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	150
GAMBAR 5.41	CAKUPAN IBU HAMIL RISIKO KURANG ENERGI KRONIK (KEK) MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	151
GAMBAR 5.42	CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	152

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1	KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2025	155
GAMBAR 6.2	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	156
GAMBAR 6.3	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	157
GAMBAR 6.4	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	158
GAMBAR 6.5	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	159
GAMBAR 6.6	JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	160
GAMBAR 6.7	PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2025	161
GAMBAR 6.8	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2025	161
GAMBAR 6.9	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	162
GAMBAR 6.10	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	163

GAMBAR 6.11	PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	164
GAMBAR 6.12	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	165
GAMBAR 6.13	PROPORSI BALITA PADA KASUS DIARE YANG DILAYANI DI FASILITAS KESEHATAN (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	167
GAMBAR 6.14	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2016-2025	168
GAMBAR 6.15	PREVALENSI KUSTA PER 10.0000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	169
GAMBAR 6.16	PETA ELIMINASI KUSTA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2025	170
GAMBAR 6.17	ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	170
GAMBAR 6.18	ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2025	171
GAMBAR 6.19	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	172
GAMBAR 6.20	CAKUPAN RFT KUSTA PB MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	173
GAMBAR 6.21	CAKUPAN RFT KUSTA MB MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	174
GAMBAR 6.22	SEBARAN KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI TAHUN 2024-2025	177
GAMBAR 6.23	PROPORSI KASUS TETANUS NEONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2025	178
GAMBAR 6.24	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2023-2025	179
GAMBAR 6.25	PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2024-2025	180
GAMBAR 6.26	PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2025	181
GAMBAR 6.27	PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI DI INDONESIA TAHUN 2025	182
GAMBAR 6.28	SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2024-2025	183
GAMBAR 6.29	KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2025	184
GAMBAR 6.30	NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2025	186
GAMBAR 6.31	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	187
GAMBAR 6.32	JUMLAH KASUS PERTUSIS YANG DILAPORKAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	188
GAMBAR 6.33	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	190
GAMBAR 6.34	ANGKA KESAKITAN (INCIDENCE RATE/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	191

GAMBAR 6.35	CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	192
GAMBAR 6.36	CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	193
GAMBAR 6.37	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	194
GAMBAR 6.38	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	195
GAMBAR 6.39	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	197
GAMBAR 6.40	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2025	198
GAMBAR 6.41	ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARASITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA 2016-2025	199
GAMBAR 6.42	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	200
GAMBAR 6.43	PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	201
GAMBAR 6.44	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	202
GAMBAR 6.45	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	203
GAMBAR 6.46	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIASIS BERHASIL ELIMINASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	204
GAMBAR 6.47	CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2015-2024	205
GAMBAR 6.48	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	206
GAMBAR 6.49	PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR DI INDONESIA TAHUN 2025	207
GAMBAR 6.50	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2025	208
GAMBAR 6.51	PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2025	208
GAMBAR 6.52	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2016-2025	209
GAMBAR 6.53	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2024-2025	209
GAMBAR 6.54	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON ALERT TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2025	211
GAMBAR 6.55	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON <24 JAM MINIMAL 80% TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2025	212
GAMBAR 6.56	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM DI $\geq 80\%$ PUSKESMAS pada MINIMAL 20% KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2025	217
GAMBAR 6.57	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DI INDONESIA TAHUN 2023-2025	218
GAMBAR 6.58	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS) DI INDONESIA TAHUN 2023-2025	219
GAMBAR 6.59	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2025	220

GAMBAR 6.60	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2025	221
GAMBAR 6.61	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2025	222
GAMBAR 6.62	PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING GANGGUAN INDERA PENGLIHATAN TAHUN 2025	223
GAMBAR 6.63	PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING GANGGUAN INDERA PENDENGARAN TAHUN 2025	224
GAMBAR 6.64	PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI OBESITAS TAHUN 2025	226
GAMBAR 6.65	PROPORSI PENDUDUK USIA >18 TAHUN YANG OBESITAS BERDASARKAN HASIL DETEKSI DINI TAHUN 2025	227
GAMBAR 6.66	PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	229
GAMBAR 6.67	JUMLAH ORANG YANG MENJADI FIRST AIDER PERTOLONGAN PERTAMA PADA LUKA PSIKOLOGIS (P3LP) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	231
GAMBAR 6.68	PERSENTASE PUSKESMAS DAN KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI LAYANAN REHABILITASI MEDIS NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	233
GAMBAR 6.69	PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI MEDIS DI FASYANKES IPWL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025	235
GAMBAR 6.70	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2025	236
GAMBAR 6.71	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2025	237
GAMBAR 6.72	JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2025	237
GAMBAR 6.73	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	238

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	KUALITAS AIR MINUM PADA SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	244
GAMBAR 7.2	KUALITAS AIR MINUM DALAM SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (SKRT) MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	246
GAMBAR 7.3	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	247
GAMBAR 7.4	PERSENTASE KEPALA KELUARGA (KK) DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	250

GAMBAR 7.5	PERSENTASE DESA/KELURAHAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	251
GAMBAR 7.6	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2023-2025	252
GAMBAR 7.7	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	253
GAMBAR 7.8	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MEMENUHI SYARAT IKL DAN UJI KUALITAS LINGKUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	255
GAMBAR 7.9	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) SIAP SAJI YANG MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	258
GAMBAR 7.10	PERSENTASE HASIL PENGUKURAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	260
GAMBAR 7.11	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2023-2025	262
GAMBAR 7.12	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	263
GAMBAR 7.13	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	265
GAMBAR 7.14	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN FASYANKES YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN LINGKUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	267
GAMBAR 7.15	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE KESEHATAN (PEMBUDAYAAN GERMAS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025	269

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025	5
TABEL 1.2	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG) TAHUN 2022-2025	11

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

TABEL 2.1	PERSYARATAN PENETAPAN KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS	25
TABEL 2.2	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2021-2025	41

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2014-2024	88
TABEL 4.2	PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMENT KEPESEERTAAN DI INDONESIA TAHUN 2024-2025	97
TABEL 4.3	JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROFIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2025	99

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2025	239

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

TABEL 7.1	PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2025	248

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	xv
Daftar Isi.....	xvi
Daftar Lampiran	xix
BAB I. DEMOGRAFI.....	1
A. KEADAAN PENDUDUK	1
B. KEADAAN EKONOMI	6
C. KEADAAN PENDIDIKAN	13
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	16
BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM	20
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	21
1. Akreditasi Puskesmas.....	24
2. Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Kesehatan (9 Nakes) Sesuai dengan Standar	26
3. Pelayanan Kesehatan Tradisional.....	29
B. KLINIK, PRAKTIK MANDIRI TENAGA MEDIS, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM	31
1. Klinik	31
2. Praktik Mandiri Tenaga Medis.....	34
3. Unit Tranfusi Darah	36
C. LABORATORIUM KESEHATAN	38
D. RUMAH SAKIT.....	40
1. Jenis Rumah Sakit.....	40
2. Tipe Rumah Sakit	42
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit.....	42
4. Akreditasi Rumah Sakit	44
5. Fasilitas Kesehatan Yang Terkoneksi Dengan Sistem Informasi Kesehatan	45
E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN	47
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	47
F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	49
1. Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	49
G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	50
BAB III. SDM KESEHATAN	54
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN	54
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas.....	56
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	62
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal.....	63
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN	65
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN	68
1. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	68

2. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	70
3. Penugasan Tenaga Khusus Residen	71
4. Program Internship Dokter	72
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	73
1. Jumlah Lulusan Poltekkes	74
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi	76
BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN	80
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	80
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024	83
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN	86
1. Total Belanja Kesehatan/ <i>Total Health Expenditure</i> (THE)	87
2. Jaminan Kesehatan	89
BAB V. KESEHATAN KELUARGA	101
A. KESEHATAN IBU	101
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	104
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)	106
3. Pemberian Suplementasi Gizi (Tablet Tambah Darah/TTD dan Multiple Micronutrient Suplement/MMS) pada Ibu Hamil I.	107
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	109
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	110
6. Pelayanan Kontrasepsi	111
8. Pemeriksaan HIV, Hepatitis B, dan Sifilis pada Ibu Hamil	114
B. KESEHATAN ANAK	119
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari)	122
2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah	126
3. Imunisasi	131
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	138
C. GIZI	138
1. Status Gizi Balita	138
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi	143
BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT	154
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	154
1. Tuberkulosis	154
2. HIV dan AIDS	159
3. Pneumonia	162
4. Hepatitis	164
5. Diare	166
6. Kusta	168
B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)	175
1. Tetanus Neonatorum	176
2. Campak	178
3. Difteri	182
4. Polio dan <i>Acute Flaccid Paralysis (APF)</i> /Lumpuh Layu Akut	185
5. Pertusis	187

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS	189
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)	189
2. Chikungunya	194
3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya	195
4. Malaria	196
5. Filariasis	202
6. Rabies	206
7. Leptospirosis	208
D. SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING	210
1. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons	210
2. Situasi Penyakit Infeksi Emerging	213
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR	214
1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di > 80% Puskesmas	216
2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara	217
3. Pengendalian Konsumsi Tembakau	220
4. Deteksi Dini Gangguan Indera	222
5. Deteksi Dini Obesitas	225
F. KESEHATAN JIWA & NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)	227
1. Pelayanan Kesehatan Jiwa	228
2. Pelayanan Rehabilitasi Medis pada Penyalahguna NAPZA	231
G. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA	235
BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN	241
A. AIR MINUM	242
1. Kualitas Air Minum Pada Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	242
2. Kualitas Air Minum Dalam Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (Surveilans Kamrt) Memenuhi Syarat	245
3. Akses Terhadap Air Minum Layak	247
B. SANITASI	248
1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	248
2. Akses Terhadap Sanitasi Layak	252
C. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR	253
D. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)	256
E. PENGUKURAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG	259
F. PERUMAHAN	261
G. KABUPATEN/KOTA SEHAT	264
H. FASYANKES YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN LINGKUNGAN	266
I. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)	268
Daftar Pustaka	272
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1.1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025
LAMPIRAN 1.3	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024-2025
LAMPIRAN 1.4	JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025
LAMPIRAN 1.5	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2016-2025
LAMPIRAN 1.6	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2025
LAMPIRAN 1.7	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 1.8	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2025
LAMPIRAN 1.9	RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL, 2025
LAMPIRAN 1.10	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 1.11	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 1.12	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021 - 2025
LAMPIRAN 1.13	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 1.14	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2025
LAMPIRAN 1.15	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025
LAMPIRAN 1.16	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2025
LAMPIRAN 1.17	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2025
LAMPIRAN 1.18	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024-2025

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 2.1	JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2021 - 2025
LAMPIRAN 2.2	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2021 - 2025
LAMPIRAN 2.3	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.4	AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.7	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.8	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.9	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.10	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.11	JUMLAH UNIT PENGELOLA DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.12	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.13	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.14	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2024 - 2025
LAMPIRAN 2.15	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.16	AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.17	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG TERKONEKSI DENGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.18	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IMUNISASI RUTIN LENGKAP TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.19	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 2.20	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 75% POSYANDU SIKLUS HIDUP YANG AKTIF

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 3.1	JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.2	JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.3	JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025

LAMPIRAN 3.4	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.5	KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.6	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.7	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA MEDIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.8	JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.9	JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 3.10	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN PERIODE I-II TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.11	JUMLAH PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN PERIODE I SAMPAI DENGAN II MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.12	JUMLAH DOKTER INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.13	JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.14	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.15	JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.16	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.17	JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.18	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.19	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.20	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.21	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.22	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.23	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.24	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.25	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.26	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025

LAMPIRAN 3.27	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.28	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.29	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.30	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.31	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.32	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.33	JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.34	JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.35	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.36	JUMLAH LULUSAN PROGRAM MAGISTER(S2 DAN S2 TERAPAN) POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.37	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 3.38	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI TERKAIT KESEHATAN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2024

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2025
LAMPIRAN 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025
LAMPIRAN 4.3	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2024
LAMPIRAN 4.4	ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 4.5	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025
LAMPIRAN 4.6	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 4.7	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 4.8	FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 4.9	FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 5.1	JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.2	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 5.3	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.5	CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (IBU HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.6	PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.7	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.8	PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.9	PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TTD DAN IBU HAMIL MENDAPAT SUPLEMENTASI GIZI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.10	PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KEK & RISIKO KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.11	JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.12	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.13	CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.14	PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.15	PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.16	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.17	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.18	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.19	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.20	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.21	CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.22	CAKUPAN IMUNISASI PADA BAYI (SURVIVING INFANT) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.23	CAKUPAN IMUNISASI BAYI LENGKAP DAN IMUNISASI 14 ANTIGEN MENCAPAI TARGET MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.24	CAKUPAN IMUNISASI ANTIGEN BARU MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025

LAMPIRAN 5.25	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.26	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.27	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.28	JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.29	STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.30	TATALAKSANA MASALAH GIZI PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.31	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.32	CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.33	PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.34	CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.35	PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 5.36	CAKUPAN IBU HAMIL MENGIKUTI KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 6.1	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN TREATMENT COVERAGE MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.2	PERSENTASE KASUS TUBERKULOSIS SENSITIF OBAT (SO) MENDAPAT PENGobatan DAN CAKUPAN KONTAK SERUMAH MENDAPAT TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TPT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.3	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.4	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2024
LAMPIRAN 6.5	ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGobatan LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGobatan TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.6	PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.7	JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.8	JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025

LAMPIRAN 6.9	PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.10	JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.11	JUMLAH KEMATIAN PADA KASUS AIDS YANG DITEMUKAN PADA TAHUN YANG SAMA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.12	JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025
LAMPIRAN 6.13	JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.14	KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.15	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.16	KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.17	KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.18	JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.19	PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.20	KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.21	JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.22	JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.23	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.24	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.25	JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.26	KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI TARGET KINERJA SURVEILANS PD3I MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.27	KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.28	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 6.29	KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.30	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.31	ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2025

LAMPIRAN 6.32	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.33	JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.34	SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023-2025
LAMPIRAN 6.35	JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025
LAMPIRAN 6.36	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.37	SITUASI PENYAKIT INFEKSI POTENSI KLB DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.38	SITUASI PENYAKIT EMERGING DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.39	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.40	JUMLAH PENDUDUK YANG DIDETEKSI DINI DIABETES MELITUS (DM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.41	PERSENTASE DIABETES MELITUS DALAM PENGENDALIAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.42	PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.43	REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.44	KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.45	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.46	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI $\geq 80\%$ PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.47	DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA (SKRINING PTM PRIORITAS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.48	PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.49	JUMLAH ORANG YANG MENJADI FIRST AIDER PERTOLONGAN PERTAMA PADA LUKA PSIKOLOGIS (P3LP) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.50	LAYANAN REHABILITASI MEDIS PENYALAHGUNAAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.51	JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.52	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.53	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 6.54	JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 7.1	KUALITAS AIR MINUM PADA SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.2	KUALITAS AIR MINUM DALAM SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (SURVEILANS KAMRT) MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.3	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023-2025
LAMPIRAN 7.4	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.5	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA//KELURAHAN SNAITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.6	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023-2025
LAMPIRAN 7.7	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MEMENUHI SYARAT IKL DAN UJI KUALITAS LINGKUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.8	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN SIAP SAJI MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.9	PERSENTASE HASIL PENGUKURAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.10	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023-2025
LAMPIRAN 7.11	JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.12	JUMLAH FASYANKES YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN LINGKUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025
LAMPIRAN 7.13	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE KESEHATAN (PEMBUDAYAAN GERMAS) TAHUN 2025

BAB I. DEMOGRAFI



BAB I. DEMOGRAFI

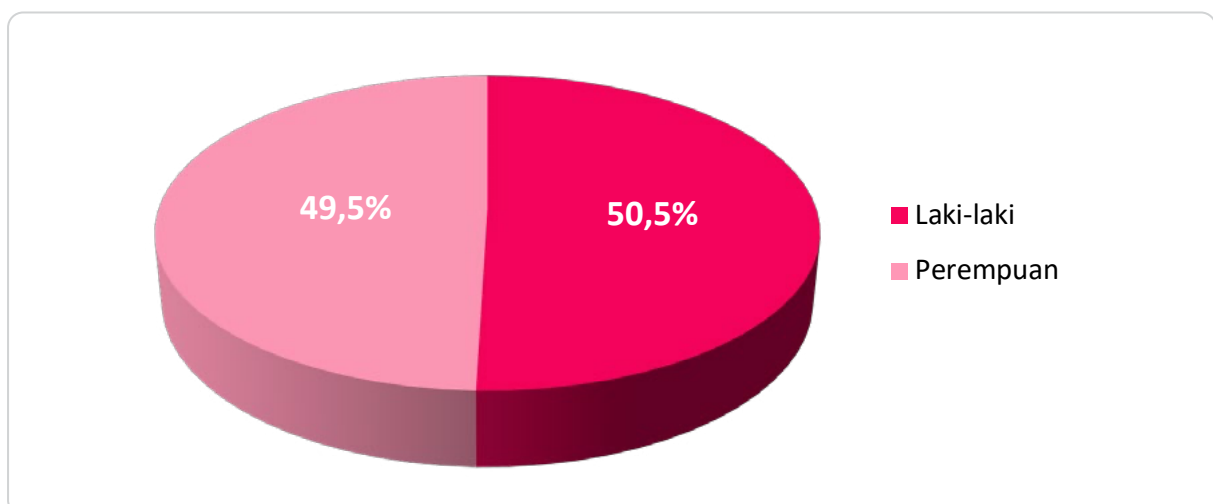
Secara astronomis Indonesia yang berada di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), yang menunjukkan negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia, serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.380 pulau, dengan luas wilayah sebesar 1.890.179,784 km². Banyaknya pulau yang ada di Indonesia dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa, menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerintah untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Secara administratif, Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, dengan total 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. Daerah kabupaten dan kota yang terbagi menjadi 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Daerah kecamatan dibagi menjadi kelurahan dan desa, dengan total 8.496 kelurahan dan 75.266 desa di seluruh Indonesia (data selengkapnya di Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 284.438.782 jiwa yang terdiri dari 143.547.955 jiwa penduduk laki-laki dan 140.890.827 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 menunjukkan proporsi penduduk di Indonesia tahun 2025 menurut jenis kelamin. Proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama besar, hanya terpaut 0,5% lebih banyak laki-laki.

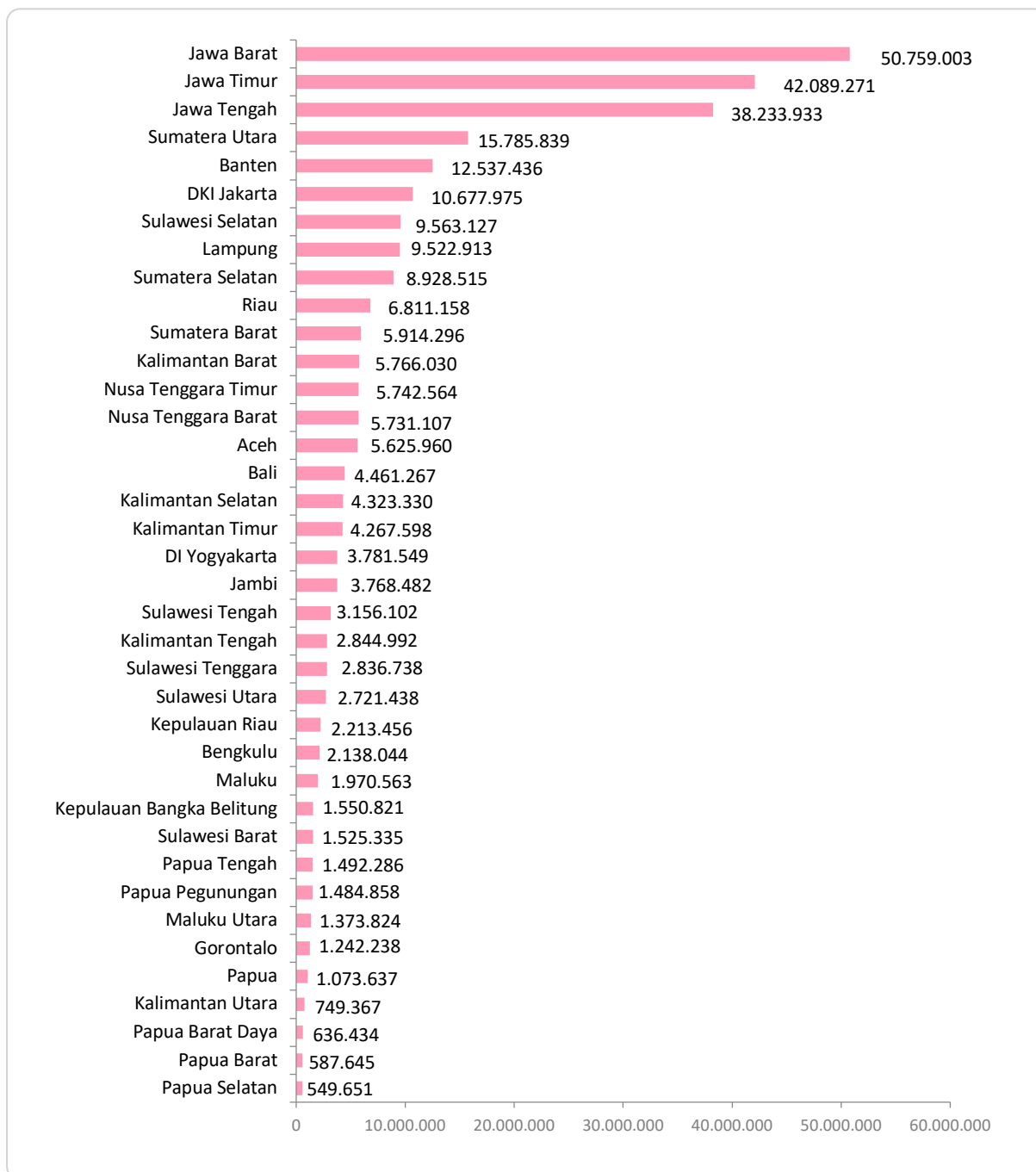
GAMBAR 1.1
PROPORSI PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2025



Sumber: Kementerian dalam Negeri, 2025

Jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Selatan. Secara rincian data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (JIWA)
TAHUN 2025

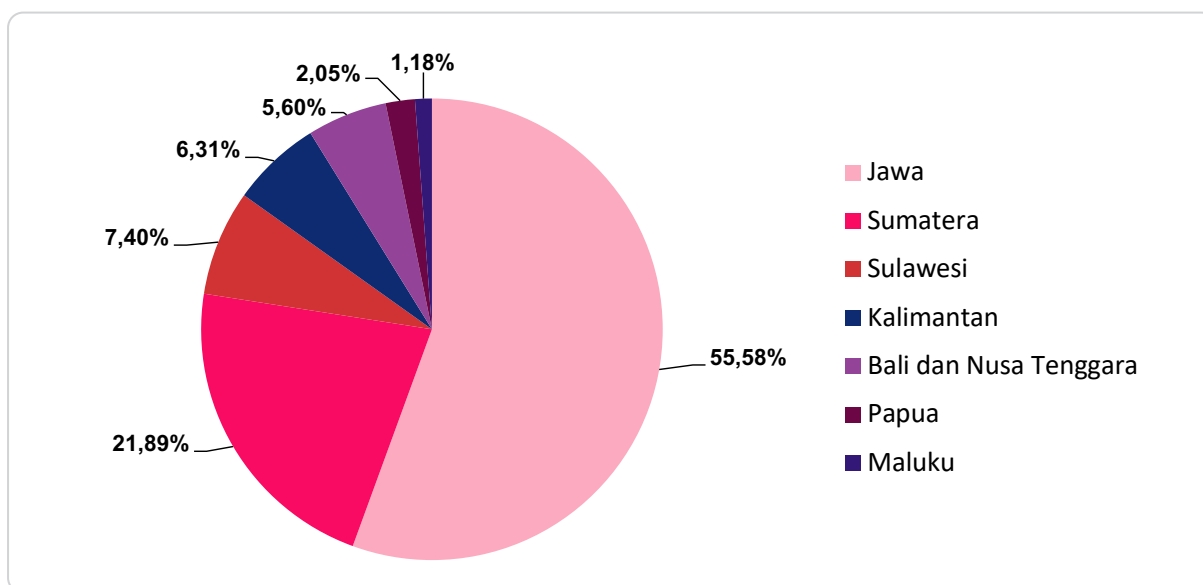


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Pulau berpenduduk adalah pulau dimana ada penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada wilayah administrasi dan berdomisili diantaranya melakukan aktivitas pelayanan publik dan keamanan seperti penjaga mercusuar dan satuan tugas pengamanan. Tahun 2024 Indonesia memiliki 17.380 pulau dengan 1.562 pulau berpenghuni. Jumlah tersebut

menunjukkan adanya penambahan 63 pulau dari tahun 2023 yang tercatat memiliki 17.374 pulau. Populasi penduduk terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 55,58%, sementara untuk populasi penduduk terkecil berada di pulau Maluku yaitu sebesar 1,18%. Data mengenai persebaran populasi penduduk per pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3.

GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT PULAU
TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, pusat pemerintahan, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2025 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yaitu sebanyak 150,48 jiwa/km². Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi (16.141 jiwa/km²). Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Papua Selatan yaitu 5 jiwa/km². Data kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

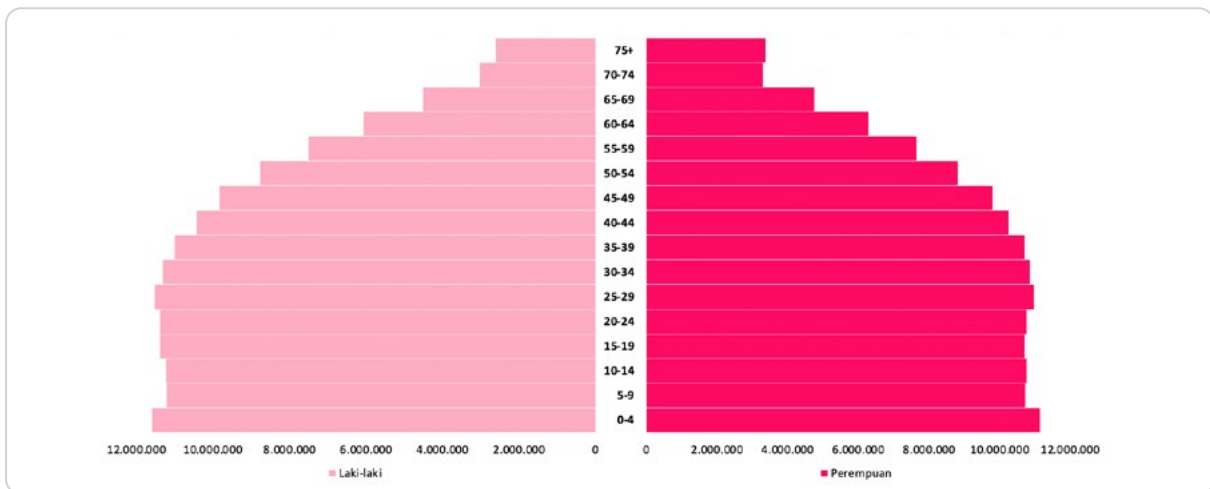
Beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang masih jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) sosialisasi program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

Piramida penduduk adalah grafik demografi yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan komposisi umur-jenis kelamin suatu populasi. Piramida penduduk menyajikan jumlah atau persentase penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu penduduk menurut kelompok umur. Bentuk piramida pada titik waktu tertentu menunjukkan tahapan transisi demografi yang dialami suatu populasi.

Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usia di atasnya. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek menunjukkan bahwa angka kematian yang masih tinggi pada penduduk lanjut usia.

GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS 2025

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 45,02%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Indonesia yang berusia produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 45 orang yang tidak produktif. Angka ini masih sama dengan angka tahun sebelumnya. Dalam menanggapi kondisi ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya menekan jumlah kelahiran untuk mengurangi angka beban ketergantungan dan mengupayakan program kesehatan untuk usia pra lansia sehingga tidak menjadi beban saat mencapai usia lansia.

Tabel 1.1 menyajikan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan digunakan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.a-c.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Jumlah Penduduk	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Bayi	0 tahun	2.383.058	2.285.839	4.668.897
2	Jumlah Batita	0 – 2 tahun	7.043.844	6.766.858	13.810.702
3	Jumlah Anak Balita	1 – 4 tahun	9.223.377	8.860.295	18.083.672
4	Jumlah Balita	0 – 4 tahun	11.606.435	11.146.134	22.752.569
5	Jumlah Anak Prasekolah	5 – 6 tahun	4.506.042	4.309.197	8.815.239
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 tahun	2.242.017	2.140.754	4.382.771
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 tahun	13.453.178	12.880.674	26.333.852
8	Jumlah Penduduk Usia Muda	< 15 tahun	34.081.727	32.642.429	66.724.156
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif	15 – 64 tahun	99.302.729	96.828.588	196.131.317
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 tahun	10.163.499	11.419.810	21.583.309
11	Jumlah Wanita Usia Subur	15 – 49 tahun	-	74.064.614	74.064.614
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi	15 – 39 tahun	-	54.023.506	54.023.410

Sumber: Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan, Kepmenkes HK.01.07/Menkes/140/2024

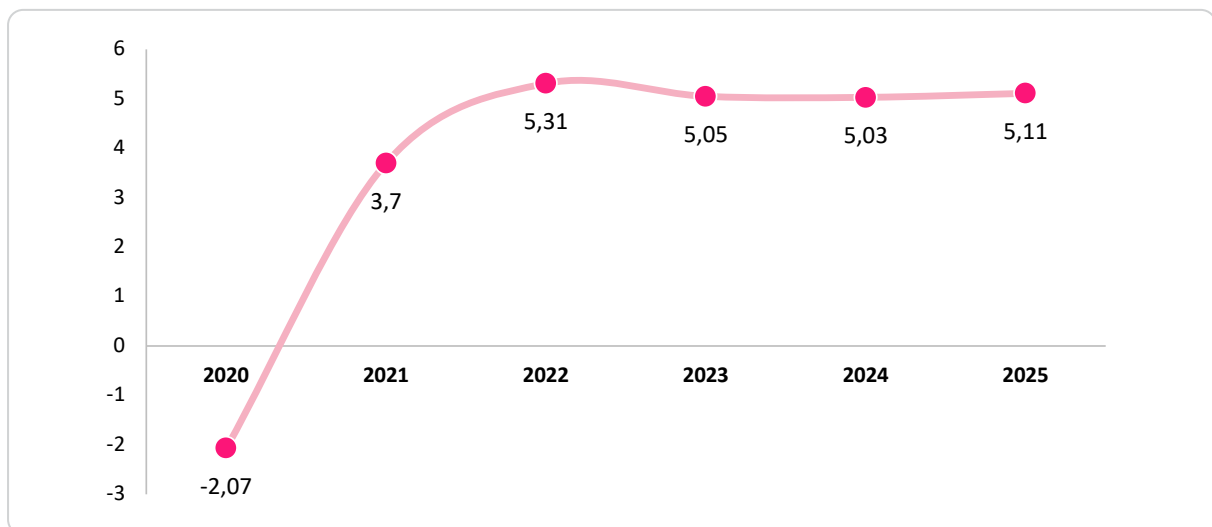
B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau US\$5.083,4.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2024 yaitu sebesar 5,03%. Sumber pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terdapat pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,93% diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,10%, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,98%. Pada triwulan IV tahun 2025 ekonomi Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% dibanding terhadap triwulan IV tahun 2024.

GAMBAR 1.5
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
TAHUN 2020 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

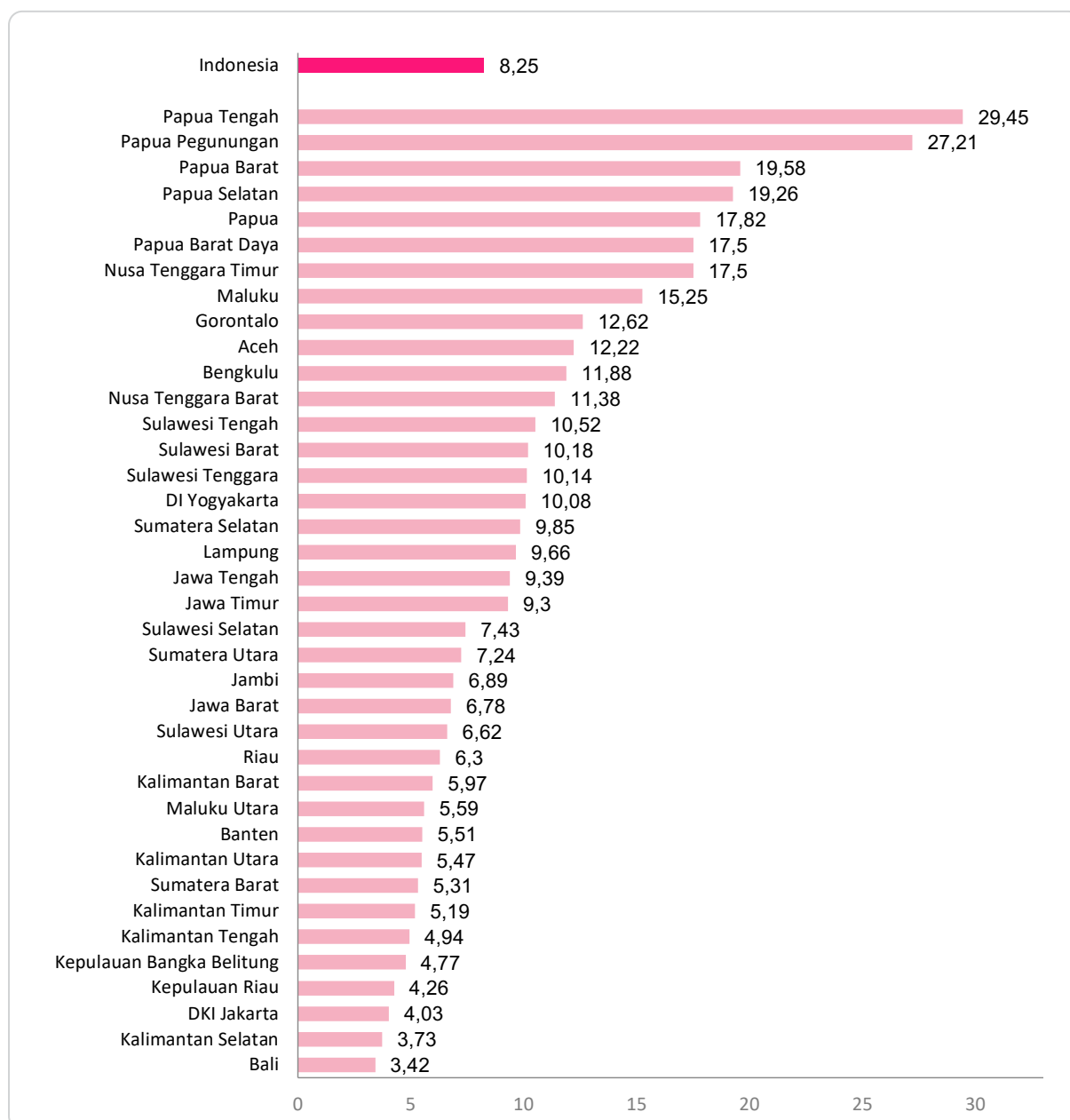
Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang. Jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 700 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat sebesar 8,25%, berkurang 0,32% poin terhadap 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024 - September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan masing-masing berkurang sebesar 460 ribu orang untuk perkotaan dan 1,4 juta orang untuk perdesaan. Persentase kemiskinan di perkotaan berkurang dari 7,09% menjadi 6,60%. Persentase kemiskinan di perdesaan juga mengalami penurunan dari 11,79% menjadi 10,72%. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.a dan 3.b.

Secara spasial provinsi di Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian Indonesia selama tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 57,02%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,12%, Pulau Kalimantan sebesar 8,24%, Pulau Sulawesi sebesar 7,12%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,81%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,69%.

GAMBAR 1.6
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari Gambar 1.6, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025, persentase kemiskinan secara umum di Indonesia yaitu sebesar 8,25%, menurun 0,32% dari tahun 2024. Persentase kemiskinan terendah yaitu di Provinsi Bali sebesar 3,42%, sementara tertinggi yaitu di Provinsi Papua Tengah yang pada 2025 mencapai angka sebesar 29,45%.

Jumlah penduduk miskin di tahun 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 6,60% sedangkan untuk penduduk miskin perdesaan sebesar 10,72%.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

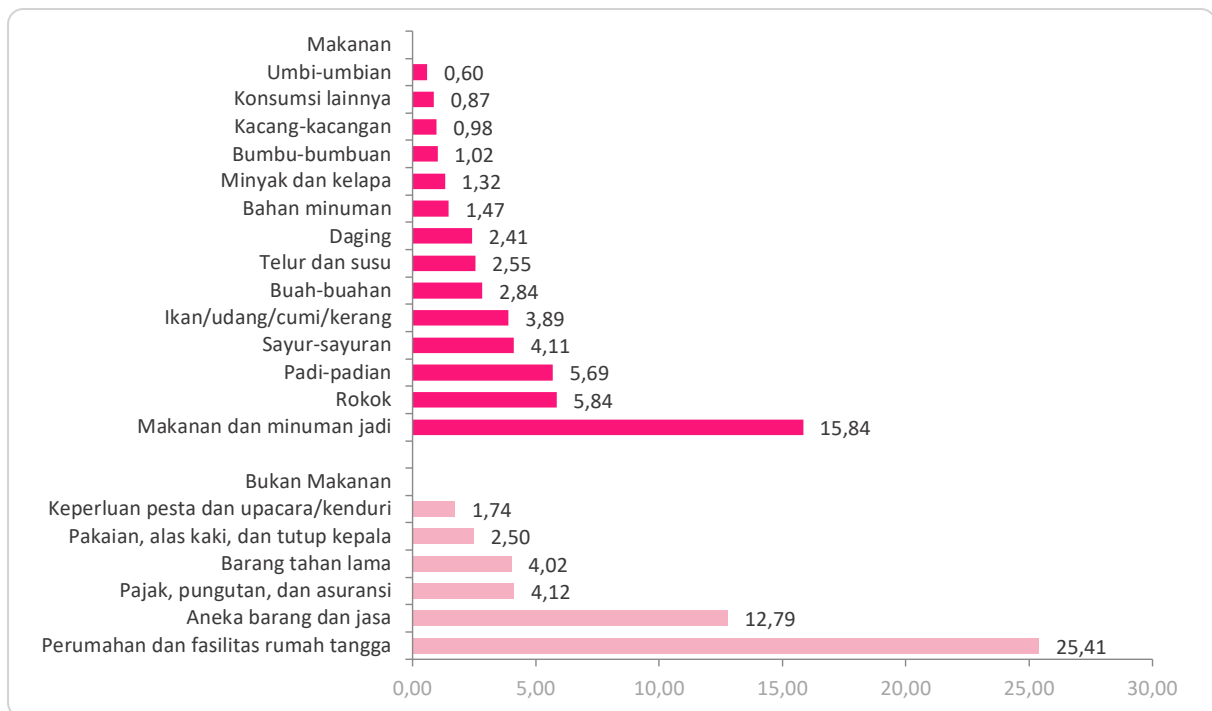
Pada periode Maret 2025 – September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2025 sebesar 1,290, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,365. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,30, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,32.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini atau Koefisien Gini/(Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang mengukur derajat ketidakmerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat ketimpangan pendapatan merata sempurna yang artinya setiap orang/kelompok menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan timpang sempurna yang artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

Pada tahun 2025, gini ratio sudah mengalami penurunan menjadi 0,363. Bahkan, angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang 2021 - 2025. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada tahun 2025 sudah semakin membaik. Rincian mengenai Indeks Gini selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.d.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.7
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2025, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan hampir sama besar, yaitu 49,42% untuk pengeluaran makanan dan 50,58% untuk pengeluaran bukan makanan. Dari Gambar 1.7 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 25,41%, makanan dan minuman sebesar 15,84% dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa 12,79%.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar Rp641.443,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp478.955,00 (74,67%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp162.488,00 (25,33 %).

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, yang juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Dalam dimensi sosial, pekerjaan memberikan identitas, stabilitas, serta kesempatan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Secara ekonomi, ketenagakerjaan juga mempengaruhi perekonomian, seperti pendapatan, konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama satu tahun dan atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja (BPS, 2025). Penduduk usia kerja adalah

penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2025 mencatat jumlah 154,00 juta orang, naik 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024, dan bertambah 0,95 juta orang dibandingkan Februari 2025. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 146,54 juta penduduk bekerja, bertambah sebanyak 1,90 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2024 (144,64 juta orang). TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan kerja) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada Agustus 2025, TPAK tercatat sebesar 70,59 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 70 hingga 71 orang yang termasuk angkatan kerja. TPAK Agustus 2025 sedikit menurun dibandingkan Februari 2025 (70,60 persen), begitu pula jika dibandingkan Agustus 2024 (70,63 persen).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 mencapai 4,85 persen. TPT Agustus 2025 mengalami peningkatan 0,09 persen poin dibandingkan Februari 2025, namun mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2024 (BPS, 2025).

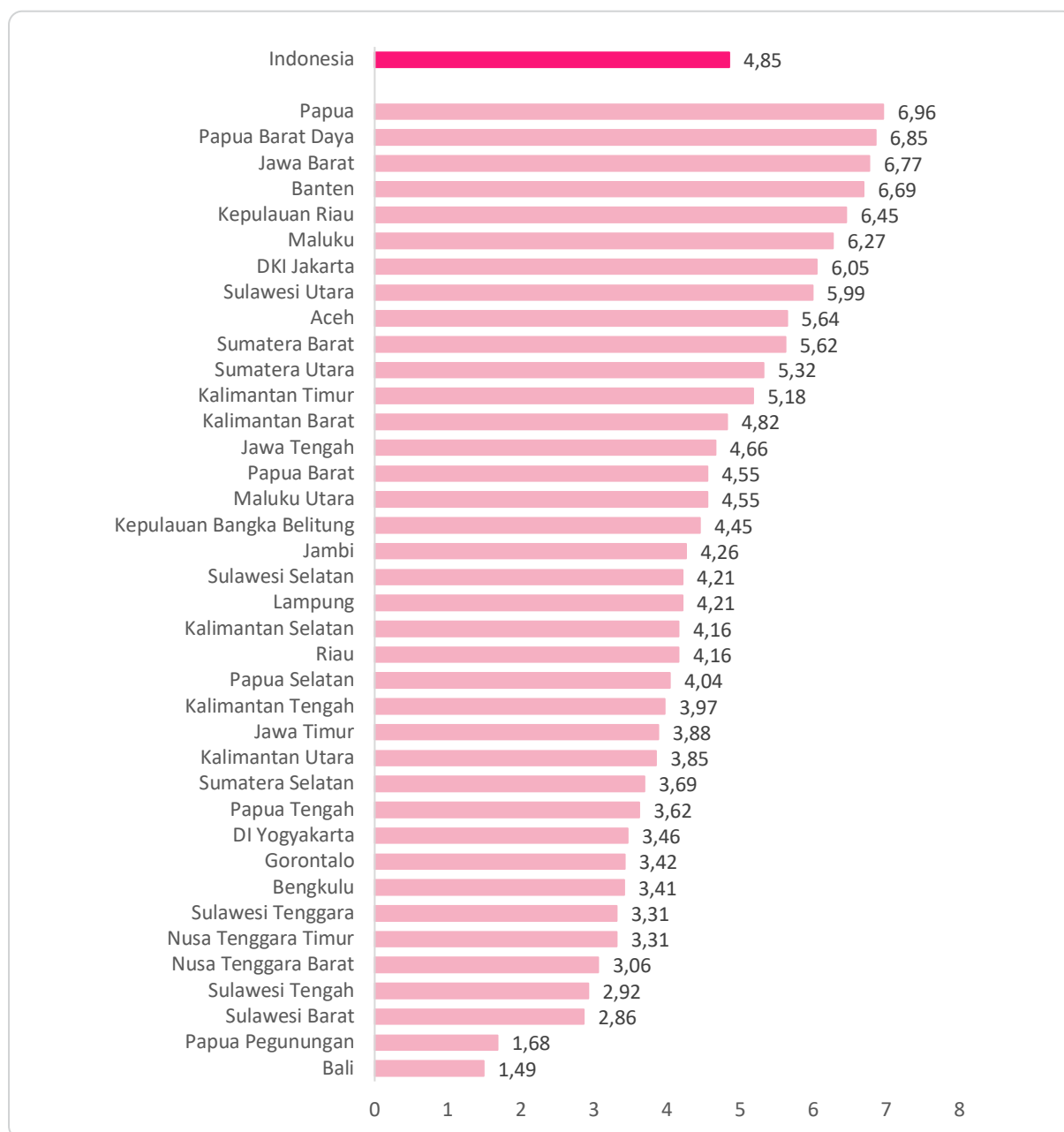
TABEL 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG)
TAHUN 2022-2025

Angkatan Kerja	2022		2023		2024		2025	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	144,01	143,72	146,62	147,71	149,37	152,11	153,05	154,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,06	68,63	69,30	69,48	69,80	70,63	70,60	70,59
Jumlah Penduduk yang Bekerja	135,61	135,30	138,63	139,85	142,18	144,62	145,77	146,54
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,83	5,86	5,45	5,32	4,82	4,91	4,76	4,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan pada periode tahun 2022-2025, dimana pada periode Agustus 2022 TPT tercatat sebesar 5,86% turun menjadi 4,85% pada Agustus 2025. TPT pada tahun 2025 sebesar 4,85% artinya dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, adalah Papua (6,96%), Papua Barat Daya (6,85%), dan Jawa Barat (6,77%). Tingginya TPT diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk namun tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

GAMBAR 1.8
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI (%)
TAHUN 2025



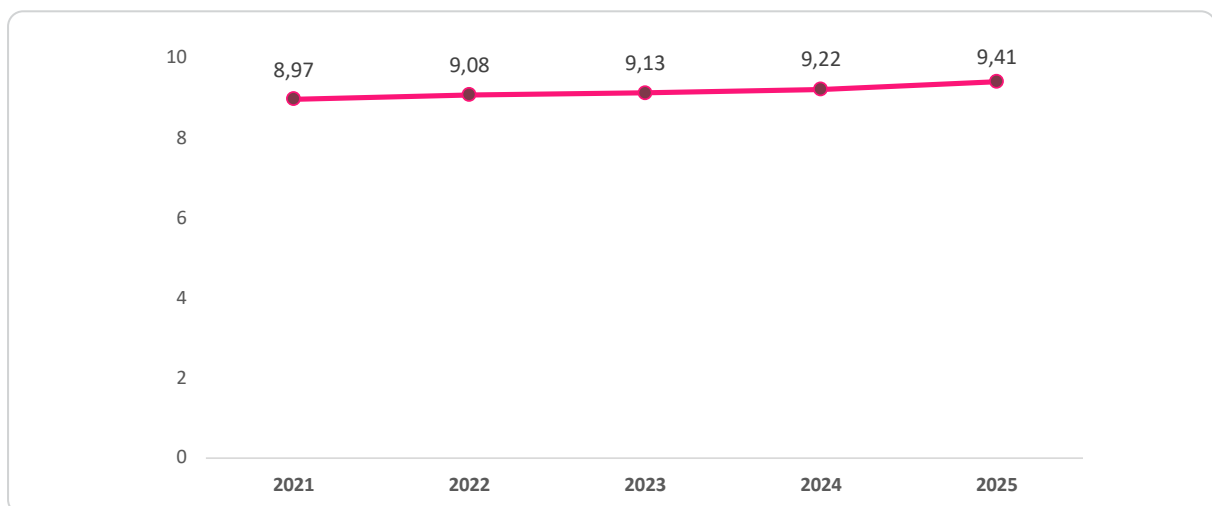
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM tangguh yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2025, RLS penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 9,41 tahun atau setara kelas 3 SMP/Sederajat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin dibanding tahun sebelumnya.

GAMBAR 1.9
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2021 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

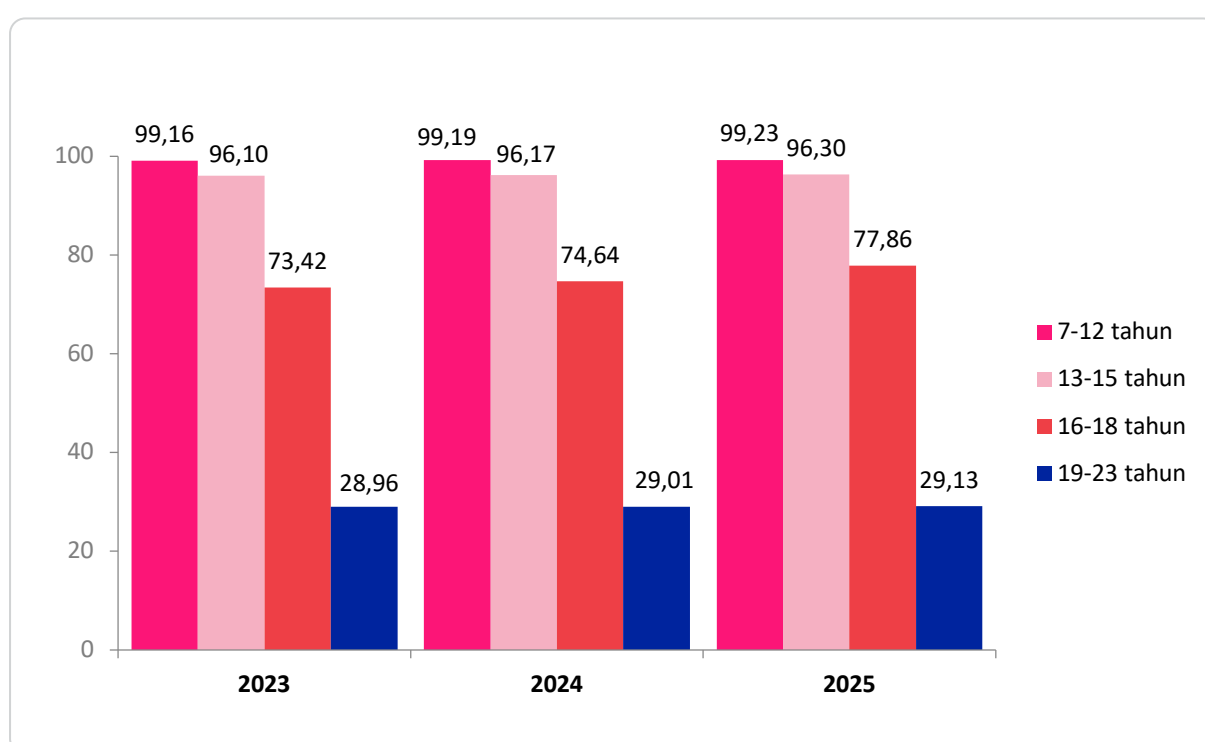
Jika dilihat per provinsi, RLS yang paling rendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan (4,76 tahun) dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (11,58 tahun). Terdapat 28 provinsi (73,68%) yang sudah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.11.

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Capaian pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) terendah terjadi pada kelompok umur 15 tahun ke atas. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025, AMH laki-laki yang berusia >15 tahun (98,18%) lebih tinggi daripada AMH perempuan (96,03%). Secara rinci, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 1.12.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang pendidikan adalah partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Harapannya semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-23 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.10
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
TAHUN 2023 – 2025



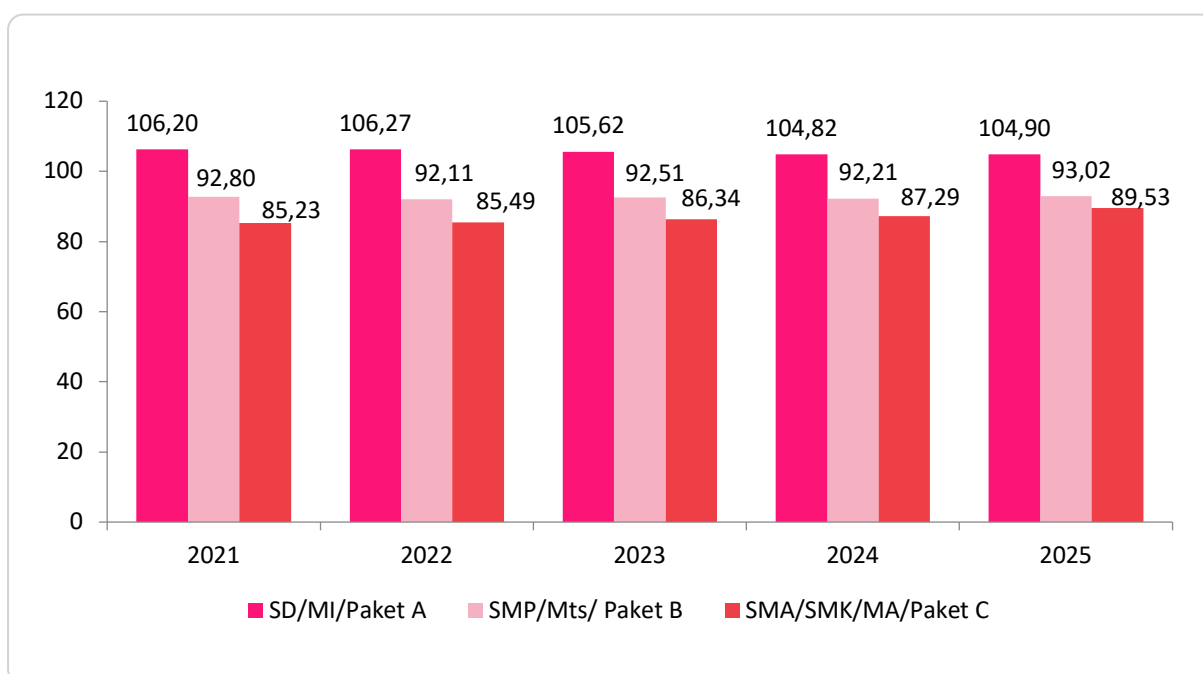
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Nilai APK (Gambar 1.12) untuk SD/MI tahun 2021-2025 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/ sederajat). Meski demikian, dari tahun ke tahun nilainya semakin turun mendekati 100%, hal ini berarti penduduk yang bersekolah di SD/ sederajat semakin banyak yang sesuai dengan peruntukan umurnya. Secara lengkap, nilai APK per jenjang Pendidikan per provinsi ini dapat dilihat pada lampiran 1.14.

Secara umum APK penduduk perempuan pada jenjang sekolah yang lebih tinggi lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2025 terdapat pada Lampiran 1.15.

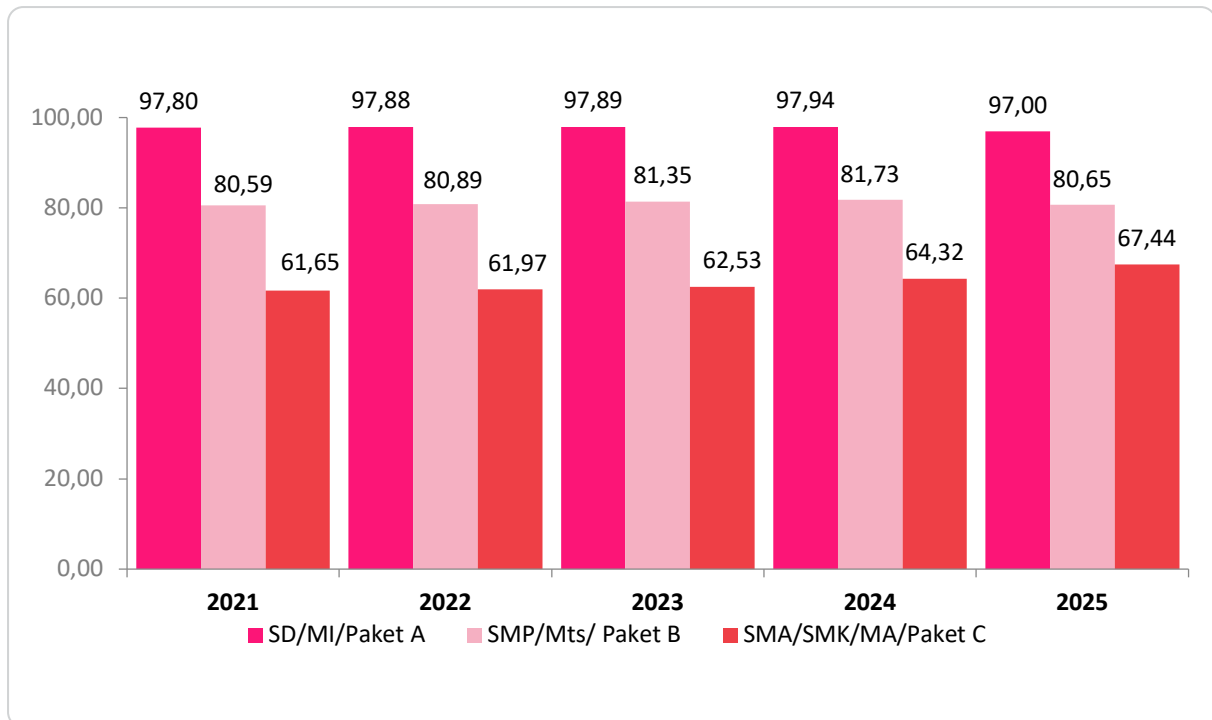
GAMBAR 1.11
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR
TAHUN 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persentase. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 1.13.

GAMBAR 1.12
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2021 – 2025



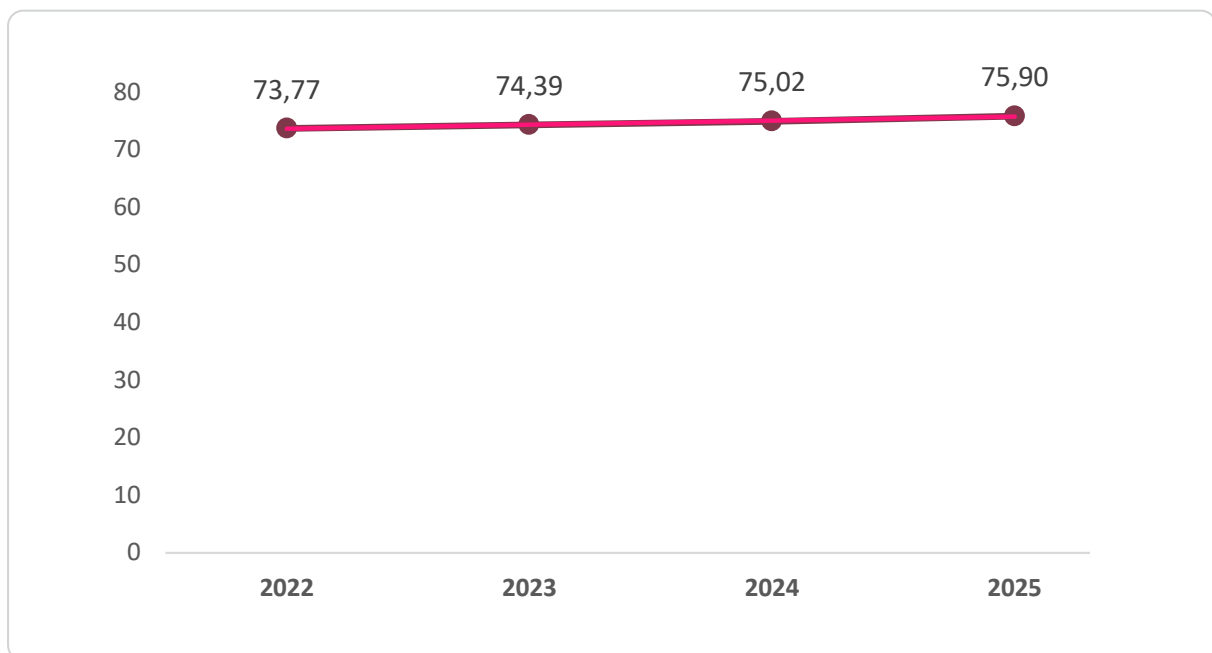
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah/negara. IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; dan (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu wilayah dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,02. Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 sebesar 74,47 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun tahun pada 2025 meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,21 tahun menjadi 13,30 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,22 tahun, dari 8,85 tahun menjadi 9,07 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat 461 ribu rupiah (BPS, 2026).

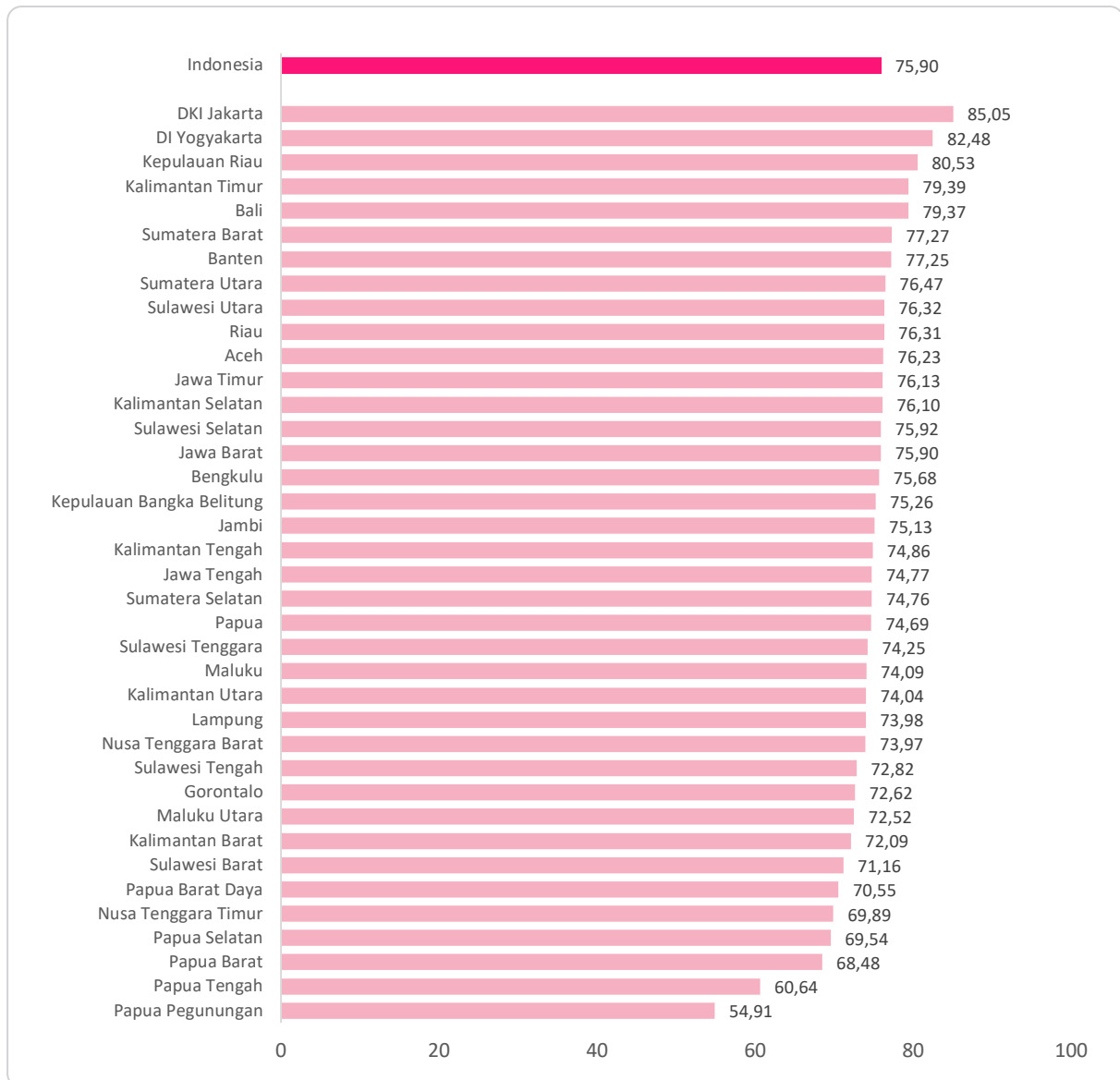
GAMBAR 1.13
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2022 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (85,05). Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian, serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 1.18.

GAMBAR 1.14
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

BAB II.

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM



BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini membahas kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik, dan tempat praktik mandiri tenaga medis; Laboratorium Kesehatan; Unit Transfusi Darah; Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus; serta sarana kefarmasian dan alat kesehatan. Selain itu, bab ini juga mengulas perkembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat agar berperan aktif dalam upaya kesehatan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang mampu mengenali, mengatasi, dan menjaga kesehatan lingkungannya secara mandiri.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan pembinaan dari sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan pengenalan kondisi desa/kelurahan, survei mawas diri, musyawarah desa/kelurahan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, serta pembinaan kelestarian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat didukung oleh kader dan tenaga pendamping yang berperan sebagai penggerak, fasilitator, serta penghubung dengan berbagai sumber daya yang diperlukan.

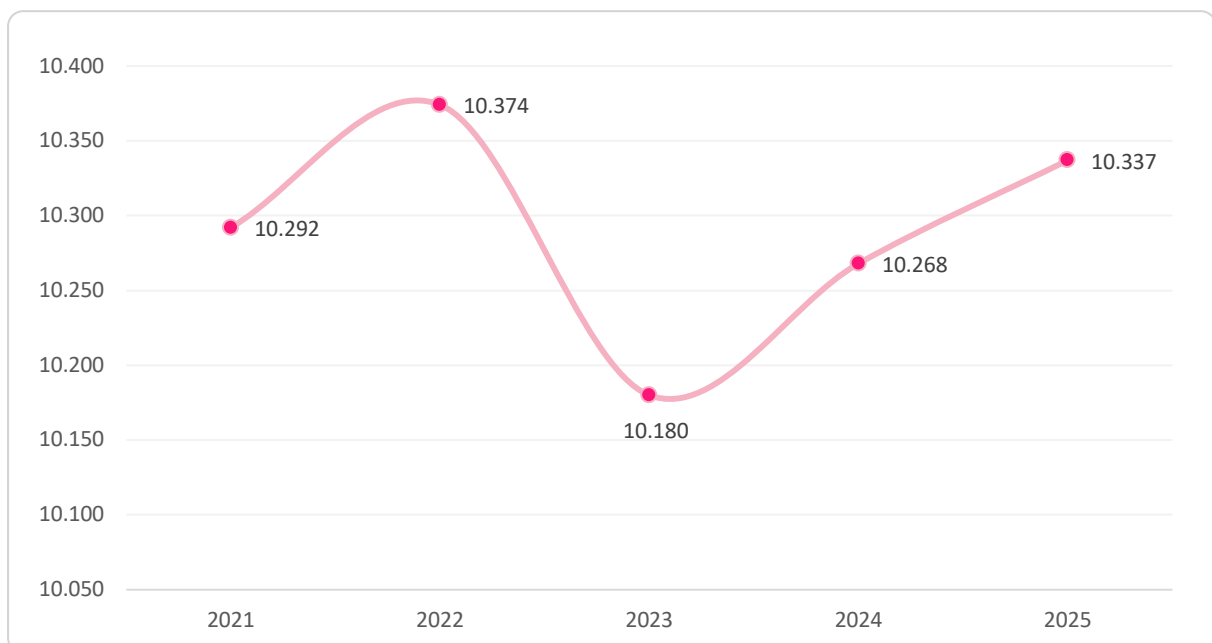
Sejalan dengan Transformasi Layanan Primer Kementerian Kesehatan, UKBM terus diperkuat untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Posyandu tidak lagi berfokus hanya pada pelayanan ibu dan balita, tetapi berkembang menjadi Posyandu siklus hidup yang melayani seluruh kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Selain Posyandu, UKBM yang dibahas dalam bab ini mencakup Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) yang berperan dalam deteksi dini dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional.

Jumlah Puskesmas di Indonesia hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 10.337 unit, yang terdiri atas 4.316 Puskesmas rawat inap dan 6.021 Puskesmas nonrawat inap. Dibandingkan tahun 2021, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari 10.292 unit, yang terdiri atas 4.200 Puskesmas rawat inap dan 6.092 Puskesmas nonrawat inap. Peningkatan jumlah Puskesmas mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan primer serta mendukung implementasi Transformasi Layanan Primer yang berfokus pada penguatan promotif dan preventif, pemenuhan layanan kesehatan berbasis siklus hidup, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Data mengenai jumlah Puskesmas secara lengkap disajikan pada Lampiran 2.1.

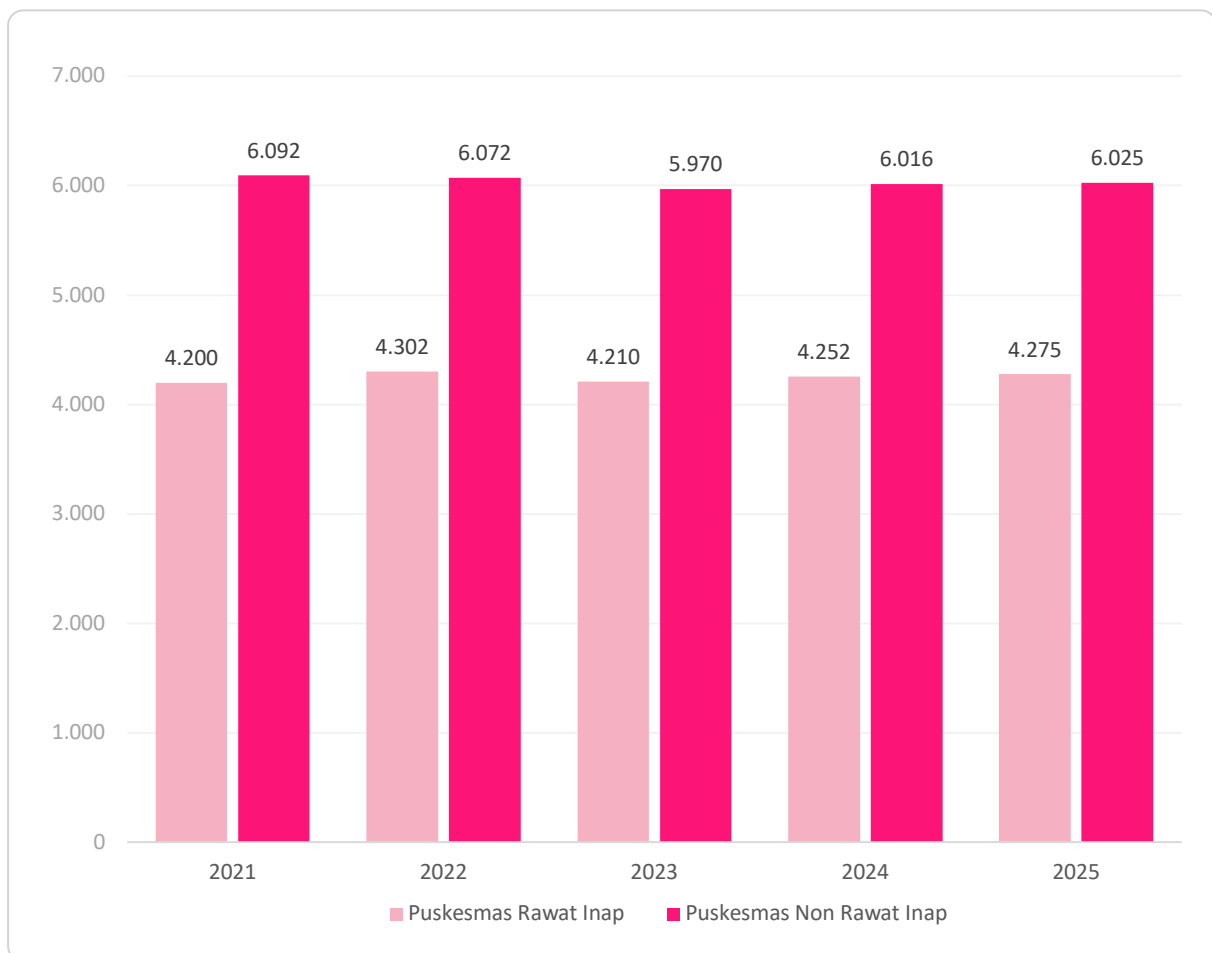
GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2025



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2026

Perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2021 mengalami jumlah yang fluktuasi dari 10.292 unit di tahun 2021 menjadi 10.337 puskesmas pada tahun 2025. Peningkatan jumlah puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pada tahun 2023 jumlahnya menurun yaitu 10.180 yang disebabkan oleh penghapusan jumlah puskesmas dimana penghapusan tersebut karena meningkatnya status puskesmas menjadi RS tipe D, restrukturisasi organisasi, dan penggabungan dua puskesmas. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio puskesmas terhadap kecamatan. Rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2025 sebesar 1,42. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2025



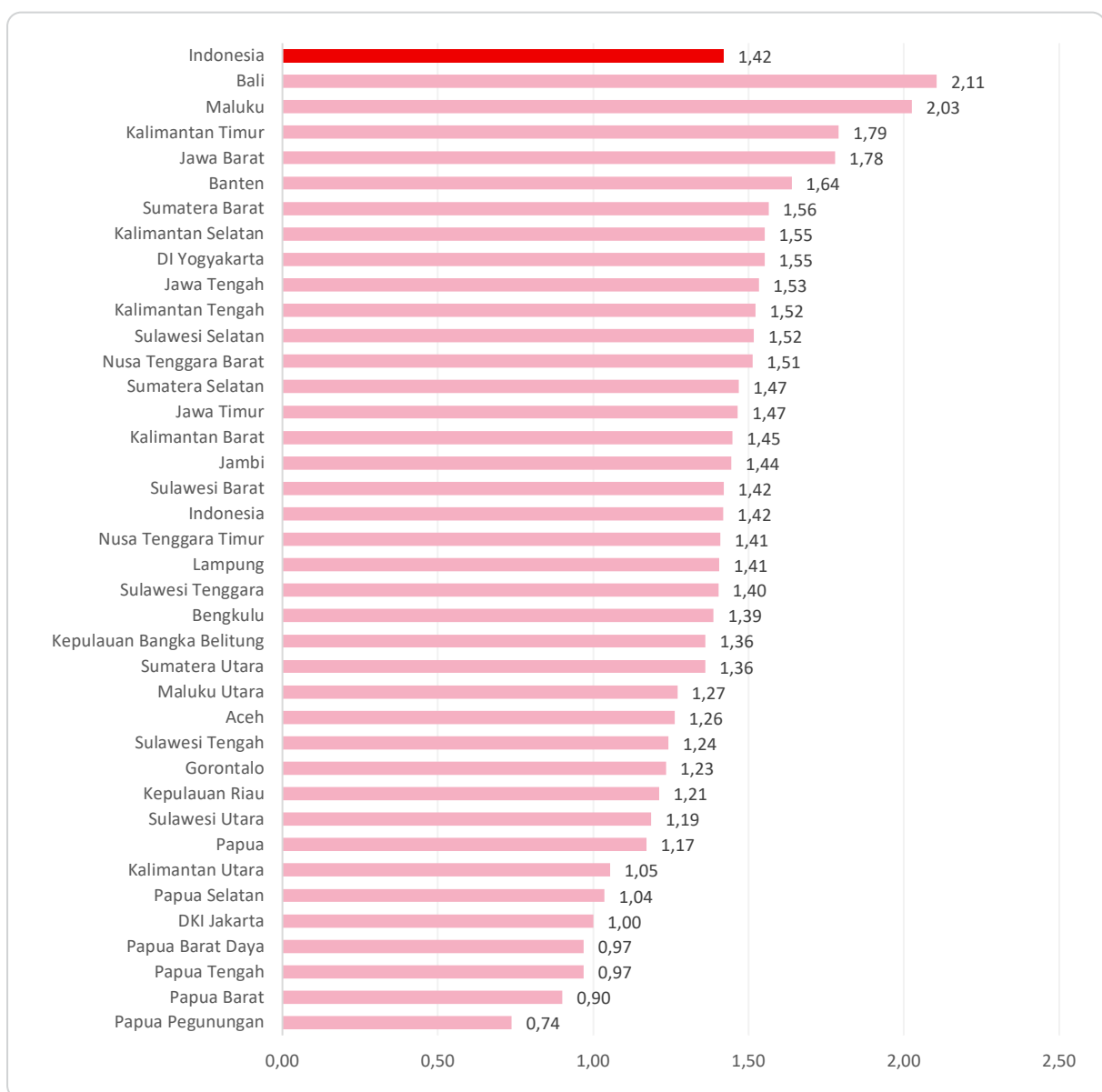
Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025; Kementerian Dalam Negeri, 2025

Jumlah Puskesmas di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2025 terdapat 10.300 Puskesmas yang terdiri atas 4.275 Puskesmas rawat inap dan 6.025 Puskesmas nonrawat inap. Dibandingkan tahun 2021, jumlah Puskesmas meningkat sebesar 0,08%, dari 10.292 menjadi 10.300 Puskesmas.

Jumlah Puskesmas rawat inap mengalami peningkatan dari 4.200 unit pada tahun 2021 menjadi 4.275 unit pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah Puskesmas nonrawat inap mengalami fluktuasi, dari 6.092 unit pada tahun 2021 menjadi 6.025 unit pada tahun 2025. Meskipun jumlah Puskesmas nonrawat inap sedikit menurun, secara umum ketersediaan Puskesmas di Indonesia relatif stabil dan tetap menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat.

Perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan nonrawat inap di Indonesia selama tahun 2021–2025 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

GAMBAR 2.3
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2025.



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, rasio Puskesmas per kecamatan pada tahun 2025 mencapai 1,42. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Bali (2,11), Maluku (2,03), Kalimantan Timur (1,79), Jawa Barat (1,78), dan Banten (1,64). Sementara itu, rasio terendah terdapat di Papua Pegunungan (0,74), Papua Barat (0,90), Papua Tengah (0,97), Papua Barat Daya (0,97), dan DKI Jakarta (1,00). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional target minimal satu Puskesmas per kecamatan telah terpenuhi, masih terdapat kesenjangan ketersediaan Puskesmas antarwilayah yang memerlukan perhatian dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan primer.

Rasio puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi. Data mengenai rasio puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.3.

1. Akreditasi Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, akreditasi Puskesmas merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan serta keselamatan pasien dan masyarakat, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan institusi Puskesmas, meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan, serta mendukung program pembangunan kesehatan nasional.

Setiap Puskesmas wajib mengikuti akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Puskesmas yang telah terakreditasi wajib mengikuti reakreditasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun guna memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Penyelenggaraan akreditasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Penetapan status akreditasi Puskesmas terdiri atas 5 (lima) tingkatan dengan pemenuhan masing-masing Bab pada tiap tingkatan kelulusan dengan persyaratan sebagai berikut.

TABEL 2.1
PERSYARATAN PENETAPAN KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS

Status Akreditasi	Bab Akreditasi Puskesmas				
	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
Terakreditasi Paripurna	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Terakreditasi Utama	≥ 80%	≥ 80%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 75%
Terakreditasi Madya	≥ 75%	≥ 75%	≥ 60%	≥ 75%	≥ 70%
Terakreditasi Dasar	≥ 75%	≥ 60%	≥ 50%	≥ 60%	≥ 60%
Tidak Terakreditasi	< 75%	< 60%	< 50%	< 60%	< 60%

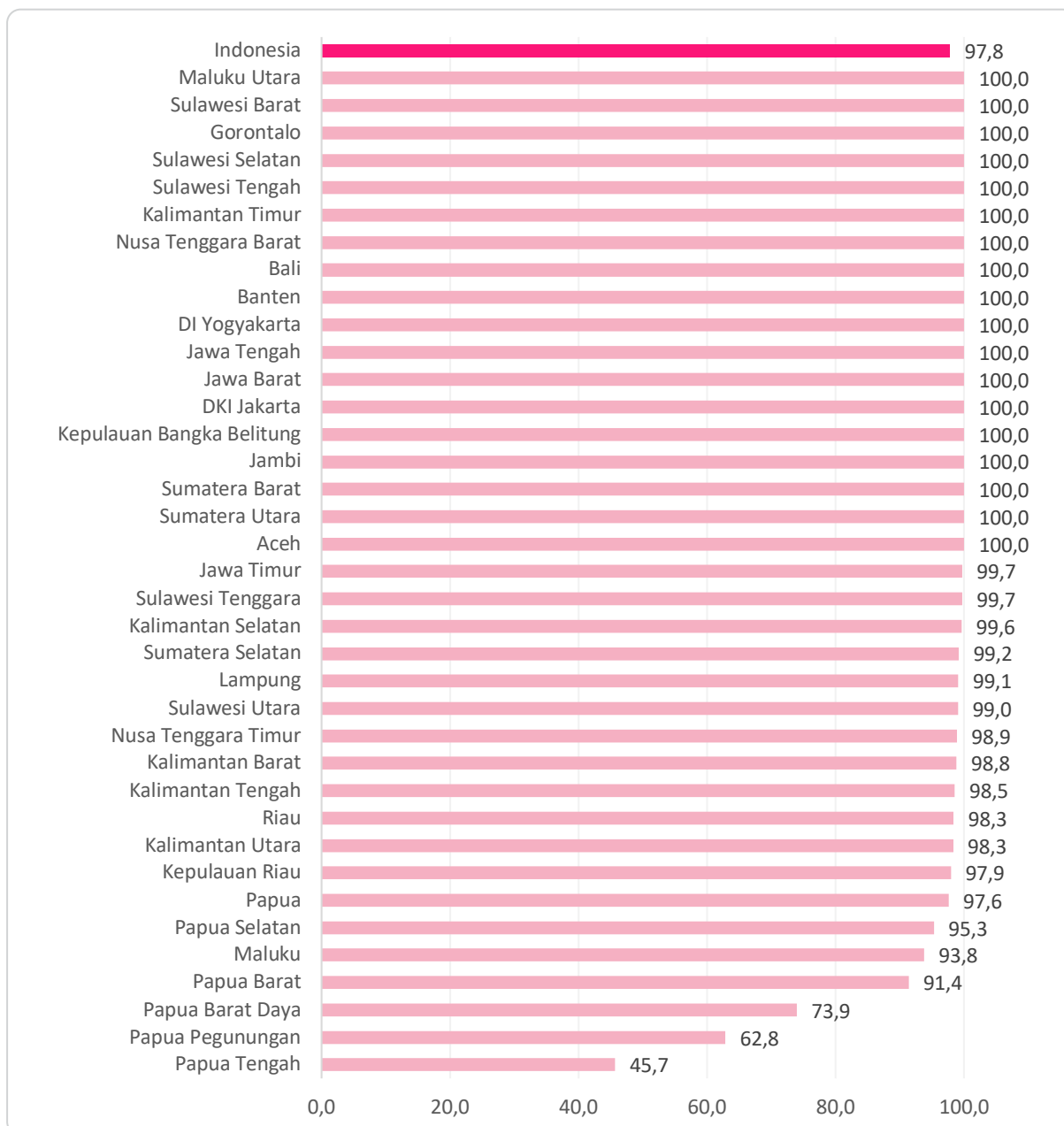
Untuk Hingga Desember 2025, hasil akreditasi Puskesmas menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah mencapai standar mutu yang baik. Dari seluruh Puskesmas yang telah terakreditasi, sebanyak 62% memperoleh status Paripurna, 26% berstatus Utama, 8% berstatus Madya, dan 2% berstatus Dasar. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022, setiap Puskesmas yang telah melaksanakan survei akreditasi wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil survei melalui penyusunan dan pelaksanaan Program Perbaikan Strategis (PPS). Program tersebut disusun berdasarkan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh survei dan menjadi dasar dalam pelaksanaan peningkatan mutu secara berkelanjutan. PPS disampaikan kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil akreditasi.

Selain itu, Puskesmas wajib menyampaikan umpan balik pelaksanaan survei akreditasi melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasilitas Kesehatan (SINAF) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima sertifikat akreditasi elektronik dan rekomendasi hasil survei. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan serta memastikan efektivitas pelaksanaan akreditasi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan.

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi mencapai 10.072 unit atau 97,8% dari total 10.300 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan primer yang ditetapkan pemerintah.

GAMBAR 2.4
PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

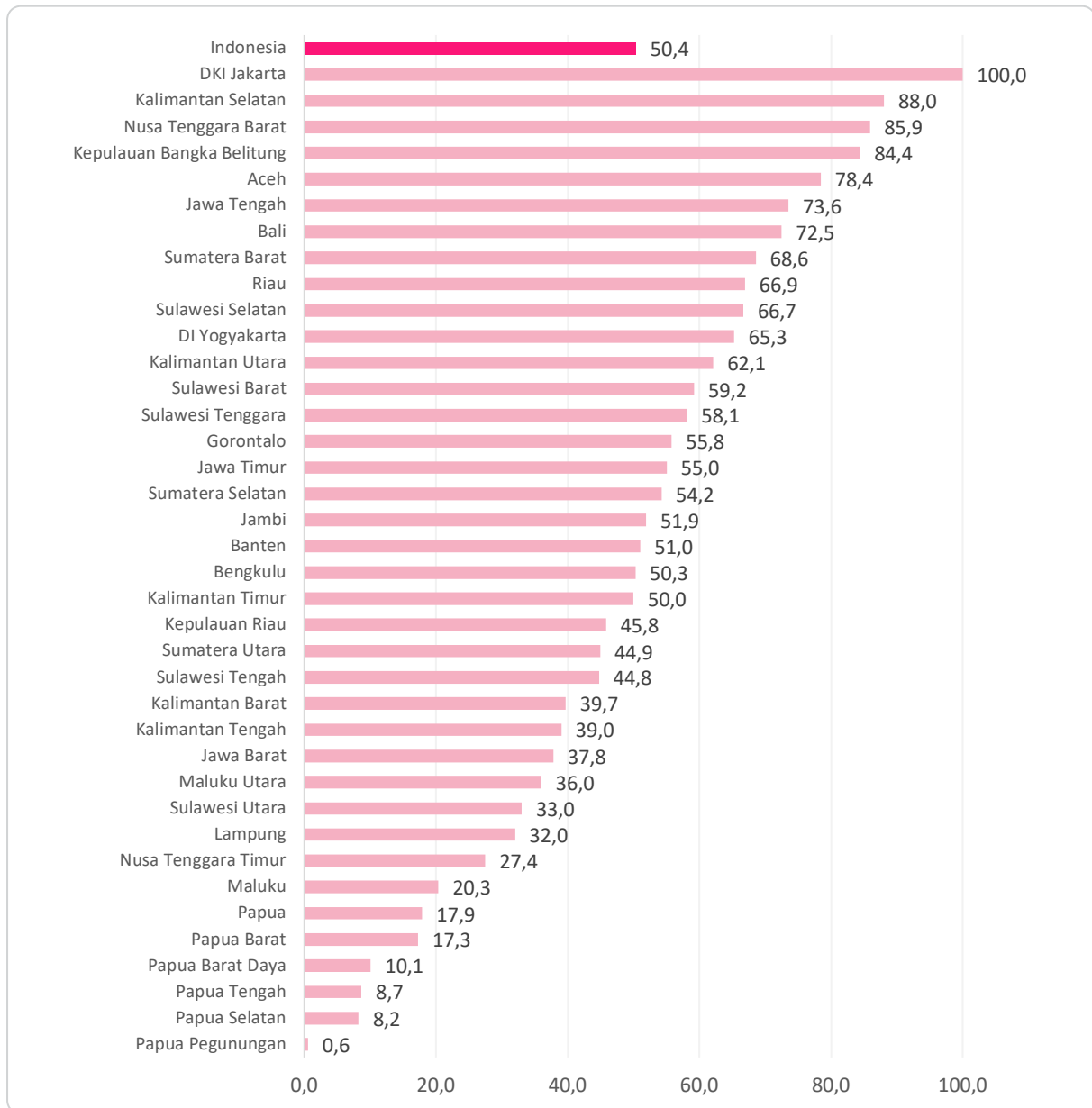


Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

2. Persentase Puskesmas Dengan Jenis Tenaga Kesehatan (9 Nakes) Sesuai Dengan Standar

Sebuah Puskesmas dianggap memadai atau memenuhi syarat jika memiliki setidaknya satu orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan, meliputi: (1) dokter atau dokter layanan primer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Menurut data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), pada tahun 2025, sebanyak 50,4% Puskesmas telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan yang diperlukan.

GAMBAR 2.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

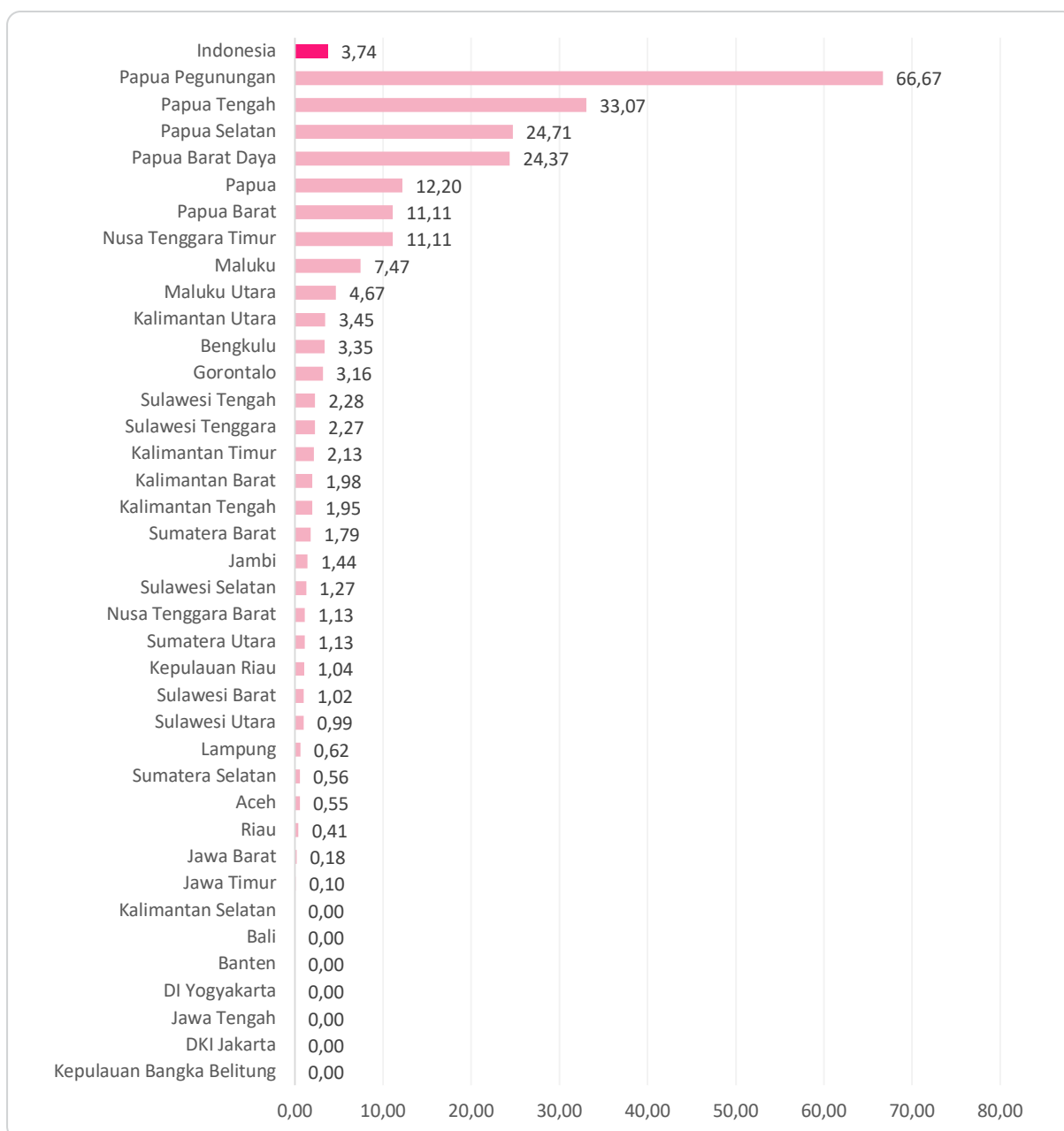


Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan Gambar 2.5, persentase puskesmas secara nasional sebesar 50,4%. Berdasarkan provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (100%), Kalimantan Selatan (88,0%), dan Nusa Tenggara Barat (84,4%). Sedangkan persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling rendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (0,6%), Papua Selatan (5,88%) dan Papua Tengah (8,7%).

Derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, meskipun jumlah tenaga kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2025 masih terdapat 3,74% Puskesmas tanpa dokter. Kementerian Kesehatan mengadakan program Penugasan Khusus sejak tahun 2015 dalam rangka pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan Gambar 2.6, provinsi dengan persentase Puskesmas tanpa dokter pada tahun 2025 tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan sebesar 66,67%, diikuti Provinsi Papua Tengah sebesar 33,07%, dan Provinsi Papua Selatan sebesar 24,71%.

Secara nasional, 96,26% Puskesmas telah memiliki dokter pada tahun 2025. Berdasarkan Lampiran 2.6, terdapat tujuh provinsi yang seluruh Puskesmas di wilayahnya telah memiliki dokter (100%), yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional

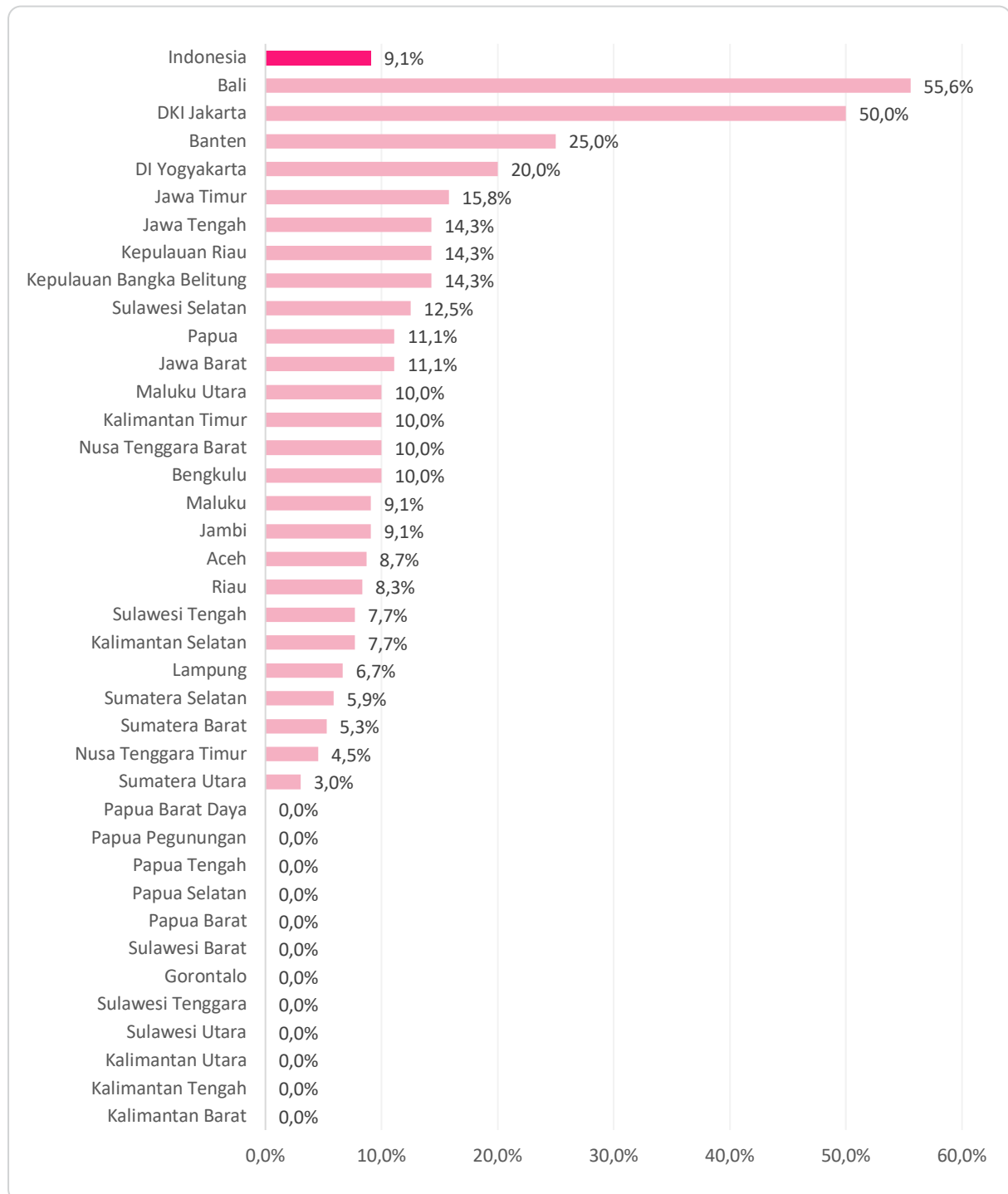
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional harus memenuhi aspek keamanan, mutu, manfaat, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan penyedia dan pelayanan kesehatan tradisional diselenggarakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan tersebut adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki penyedia dan/atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu. Indikator ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Gambar 2.7, pada tahun 2025 secara nasional 9,1% kabupaten/kota telah memiliki penyedia dan/atau pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi standar mutu. Provinsi Bali mencatat persentase tertinggi, yaitu 55,6%, diikuti DKI Jakarta sebesar 50,0%, Banten sebesar 25,0%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 20,0%, dan Jawa Timur sebesar 15,8%. Sementara itu, masih terdapat 12 provinsi yang belum memiliki kabupaten/kota dengan penyedia dan/atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Perbedaan capaian antarprovinsi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi standar mutu masih belum merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pengawasan yang berkesinambungan agar semakin banyak kabupaten/kota mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya dalam memperkuat pelayanan primer serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan berbasis bukti.

GAMBAR 2.7
KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM

1. Klinik

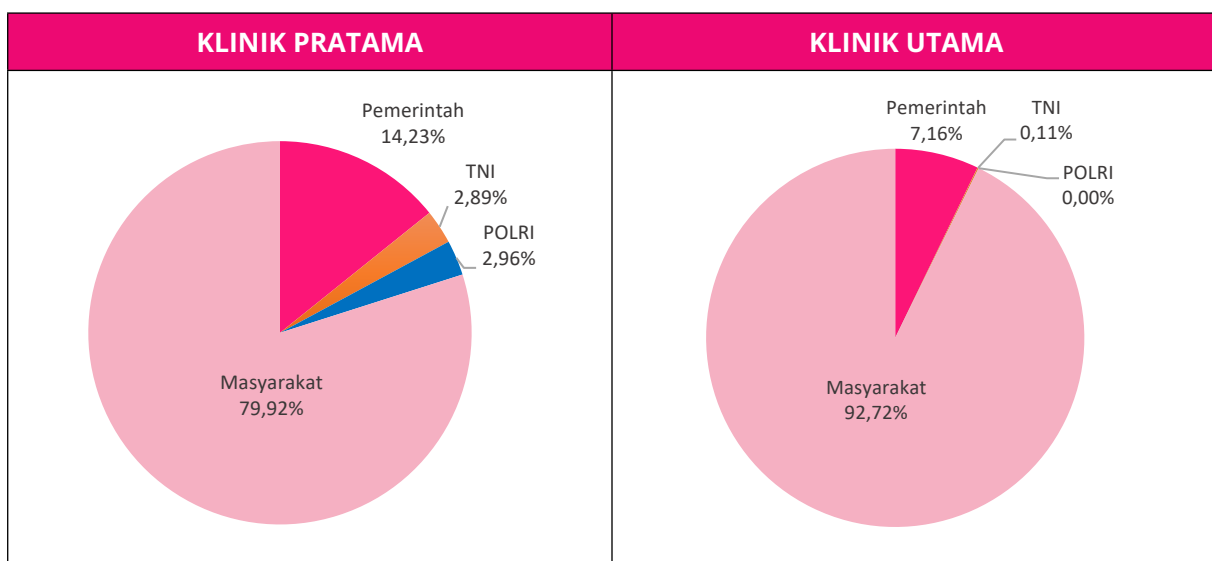
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.

Berdasarkan data registrasi fasilitas pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan, hingga Desember 2025 terdapat 20.693 klinik yang teregistrasi di Indonesia. Klinik tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, yang meliputi Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah, serta oleh swasta/masyarakat.

Berdasarkan kepemilikannya, sebanyak 2.950 klinik dimiliki oleh pemerintah, TNI 550, POLRI 560 dan Masyarakat 18.454. Sementara itu, berdasarkan kemampuan pelayanannya, klinik terdiri atas klinik pratama dan klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki. Keberadaan klinik berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan spesialisik di berbagai wilayah Indonesia.

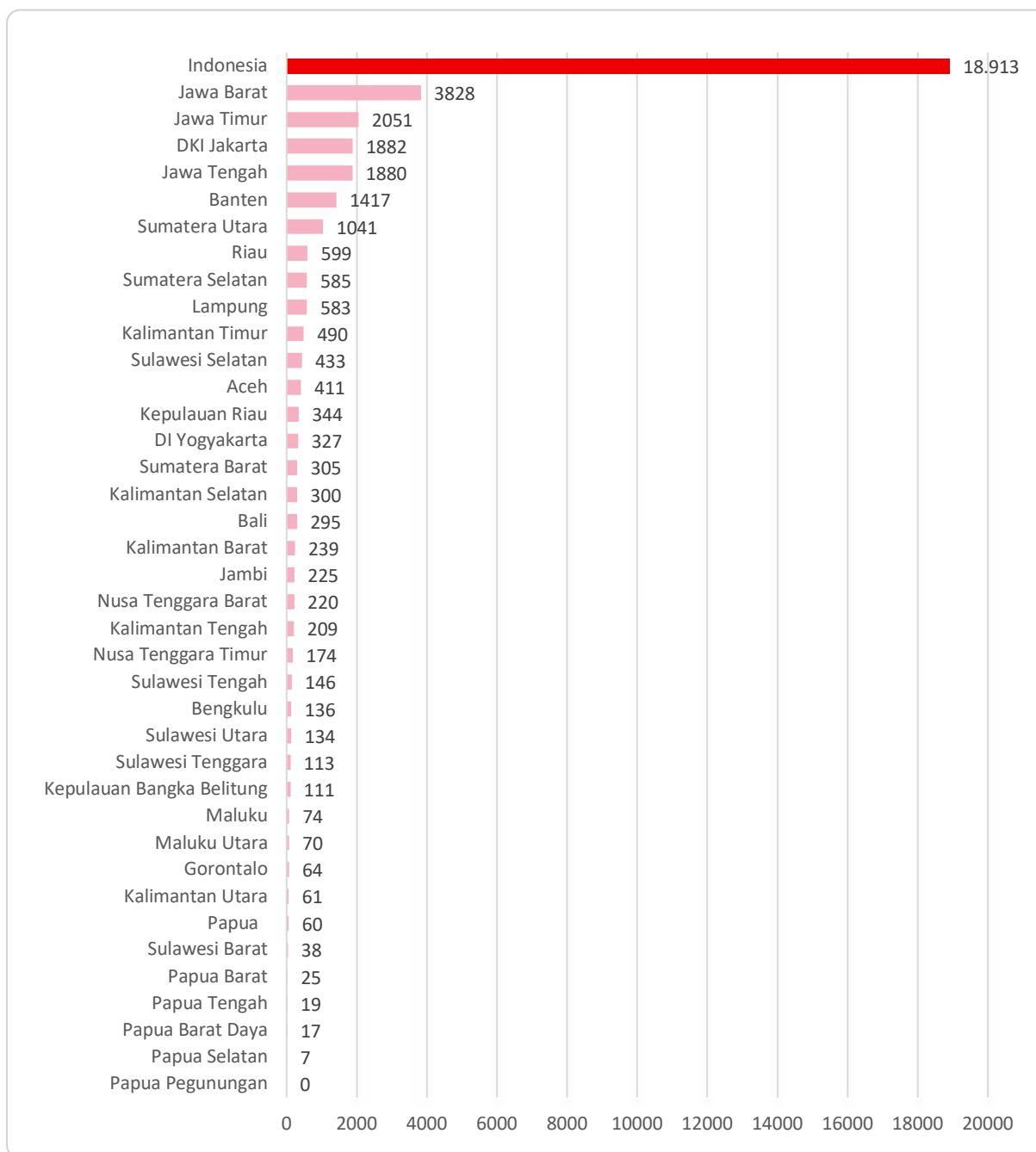
Data lengkap mengenai jumlah klinik teregistrasi menurut kemampuan pelayanan dan kepemilikan disajikan pada Gambar 2.8.

GAMBAR 2.8
JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

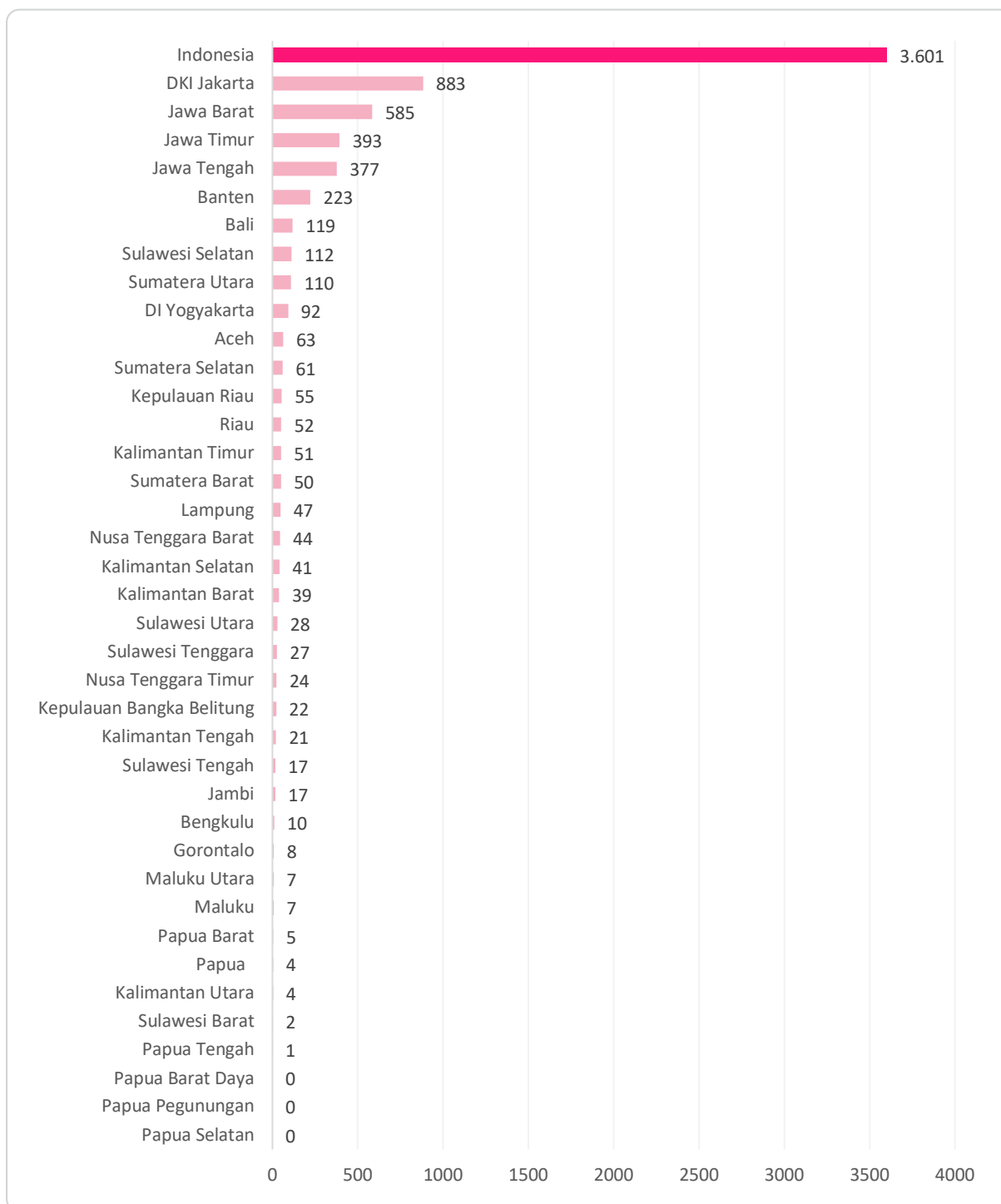
GAMBAR 2.9
JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

Provinsi dengan jumlah klinik pratama tereistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 3.828 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama paling sedikit adalah Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 0 klinik disajikan pada gambar 2.9.

GAMBAR 2.10
JUMLAH KLINIK UTAMA TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

Provinsi dengan jumlah klinik utama tereistrasi paling banyak adalah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 883 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik utama paling sedikit adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya sebanyak 0 klinik disajikan pada gambar 2.10.

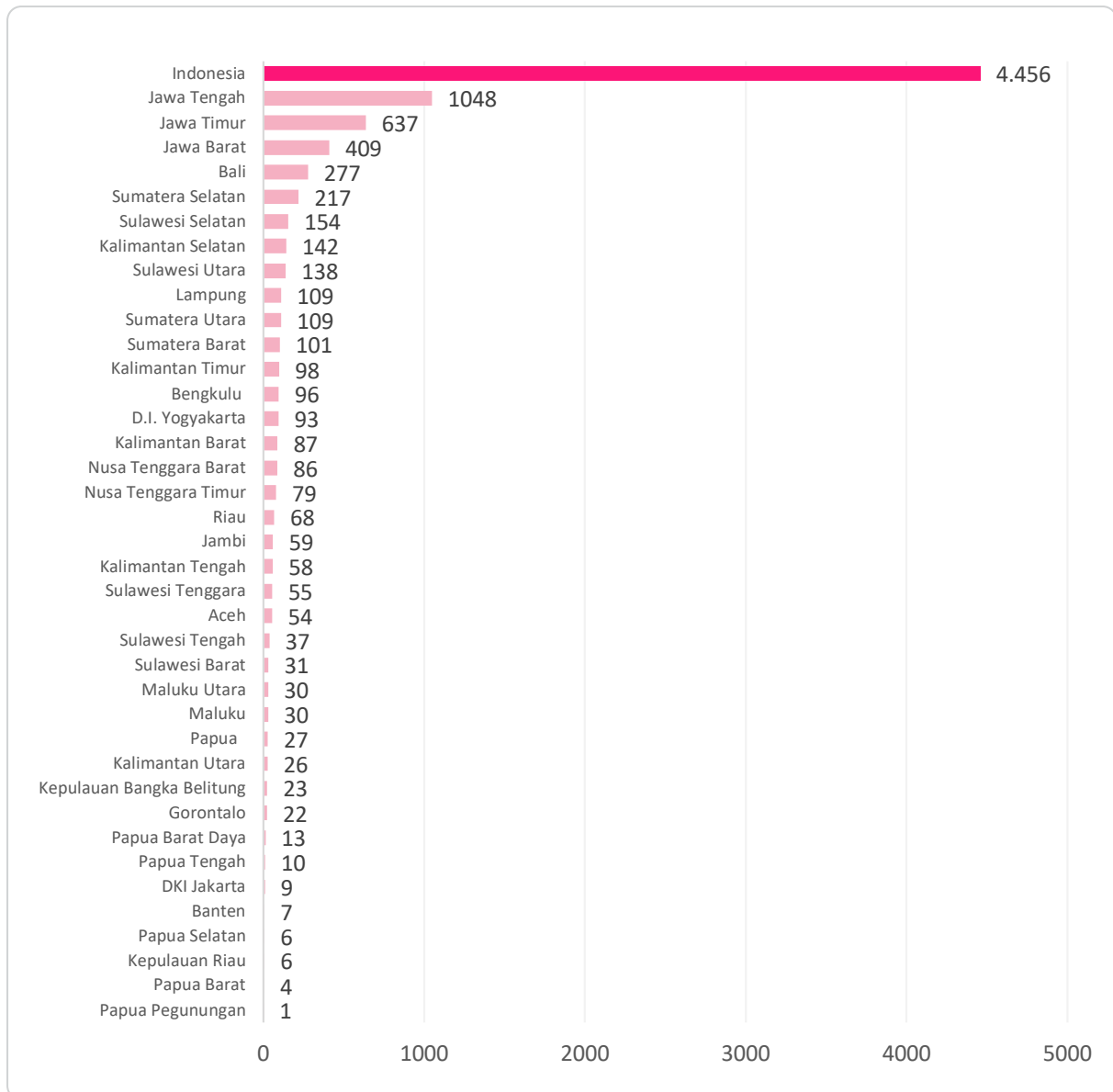
2. Praktik Mandiri Tenaga Medis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tempat Praktik Mandiri Tenaga Medis merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Medis meliputi Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, penyelenggaraan tempat praktik mandiri harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, hingga Desember 2025 terdapat 5.640 Tempat Praktik Mandiri Tenaga Medis yang telah teregistrasi di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 4.456 Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dan 1.184 Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG).

Keberadaan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Medis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, terutama dalam mendukung pemerataan pelayanan kesehatan serta penguatan transformasi layanan primer. Data mengenai jumlah Tempat Praktik Mandiri Tenaga Medis menurut jenis fasilitas disajikan pada Gambar 2.11.

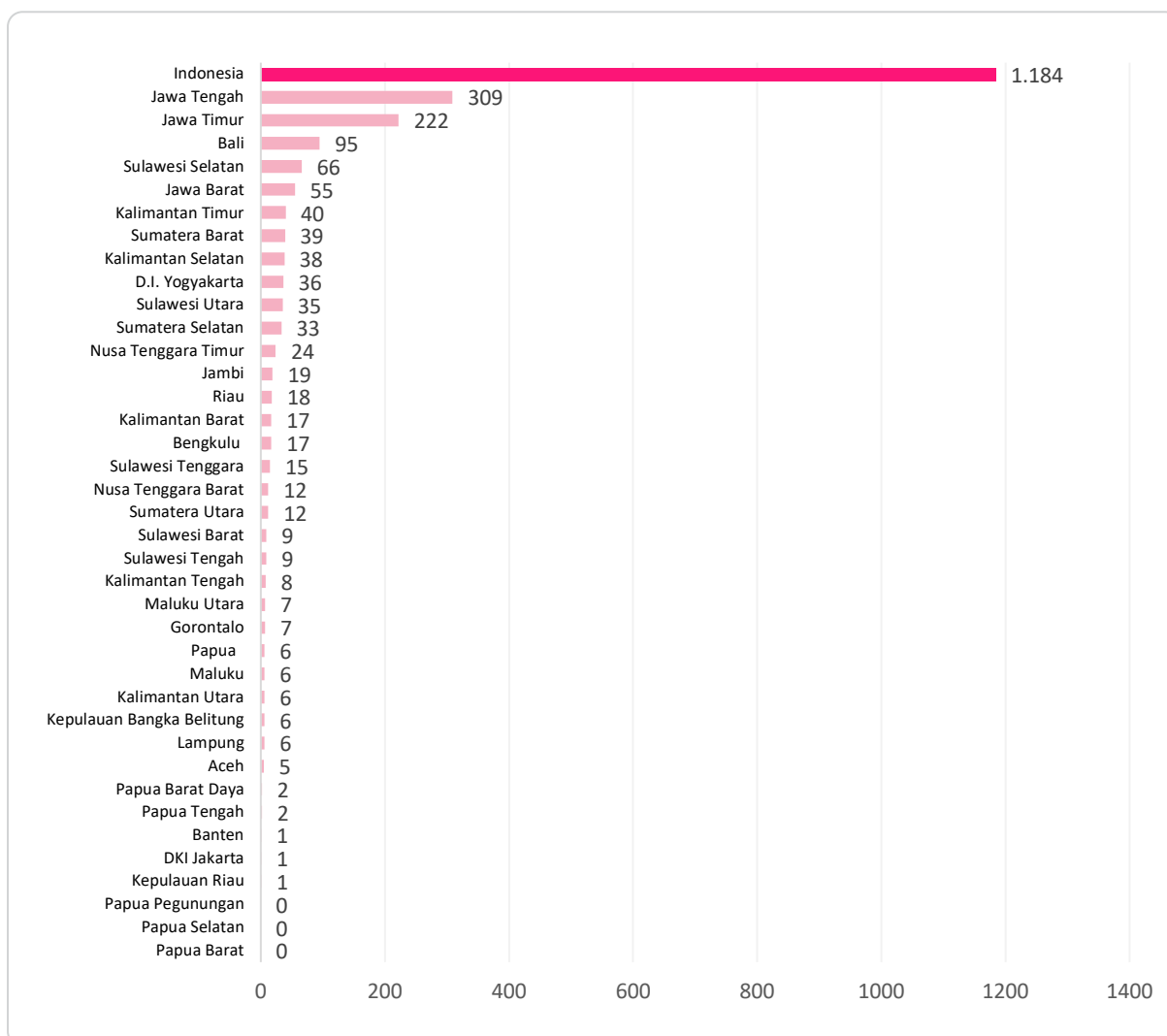
GAMBAR 2.11
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER (TPMD) MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

Provinsi dengan jumlah TPMD teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1.048 TPMD. Sedangkan provinsi dengan jumlah TPMD paling sedikit adalah Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 1 TPMD.

GAMBAR 2.12
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI (TPMDG) MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

Provinsi dengan jumlah TPMDG teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 309 TPMDG. Ada 3 provinsi yang belum mempunyai TPMDG yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat disajikan pada Gambar 2.12.

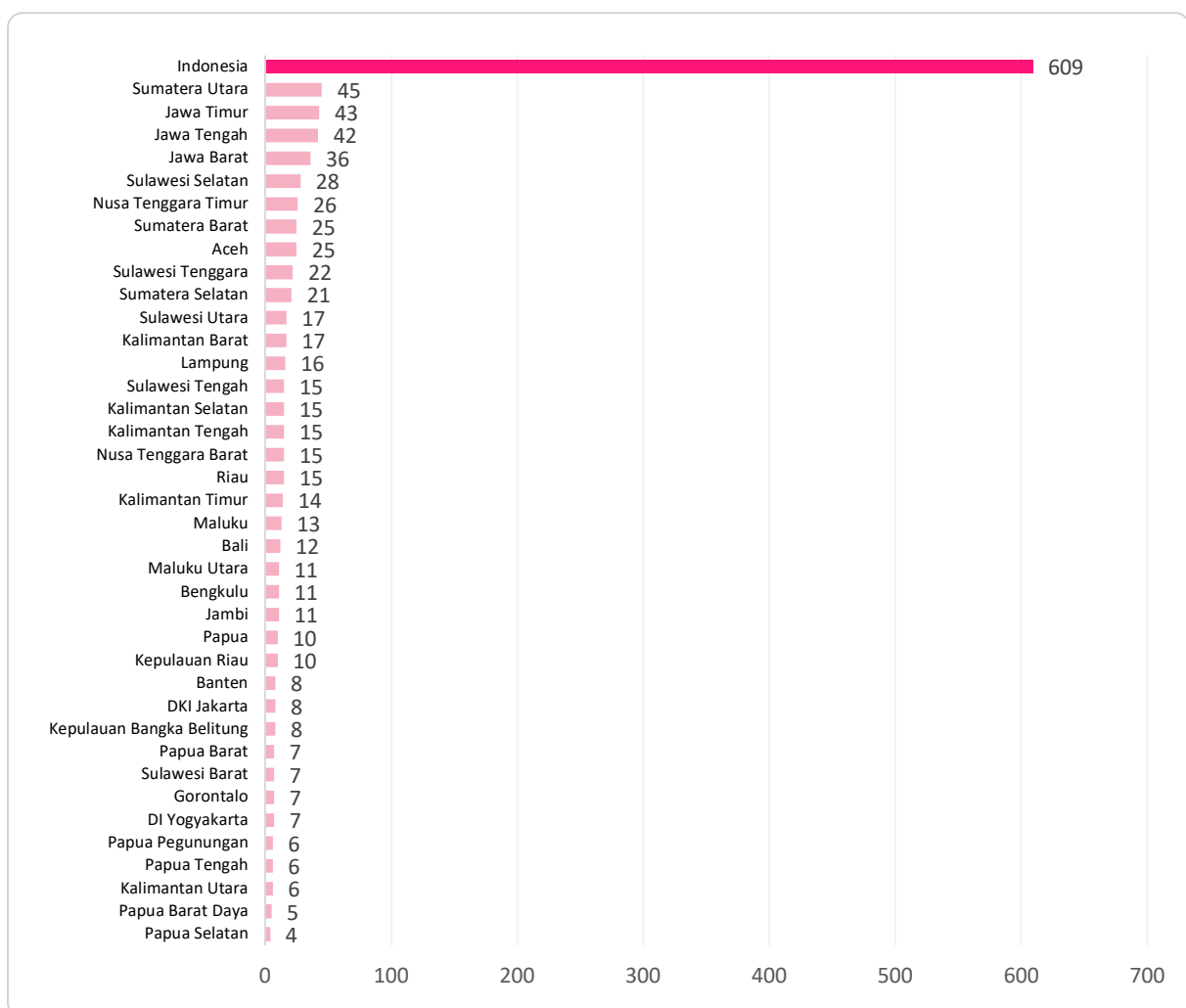
3. Unit Transfusi Darah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan

yang menyelenggarakan kegiatan donor darah, pengolahan dan penyediaan darah, serta pendistribusian darah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara aman, bermutu, dan sesuai standar.

Berdasarkan data aplikasi Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RegFasyankes) per Desember 2025, terdapat 609 Unit Transfusi Darah (UTD) yang telah teregistrasi di Indonesia dan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta Palang Merah Indonesia (PMI). Pada tahun 2025, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah UTD teregistrasi terbanyak, yaitu 45 UTD, sedangkan Provinsi Papua Selatan memiliki jumlah UTD teregistrasi paling sedikit, yaitu 4 UTD. Sebaran lengkap UTD teregistrasi di Indonesia disajikan pada Gambar 2.13.

GAMBAR 2.13
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025



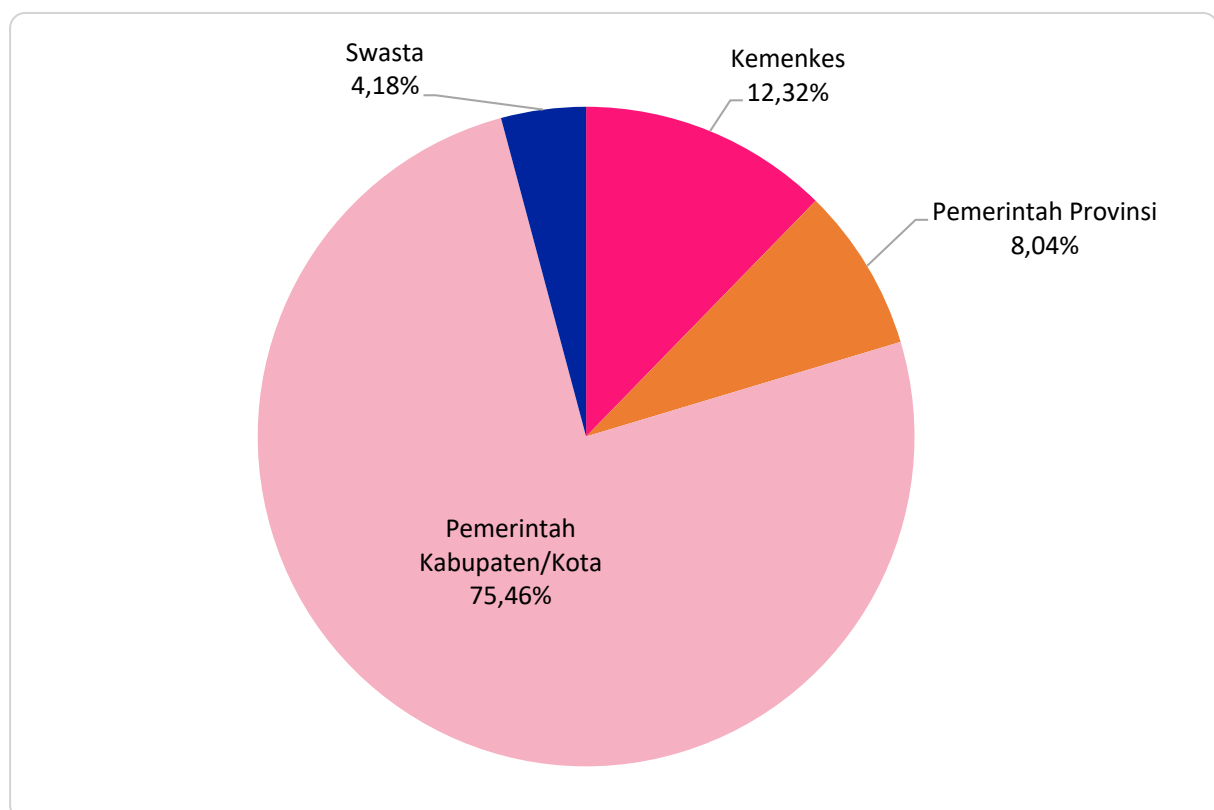
Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahkan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisis, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah laboratorium di Indonesia sebanyak 982, dengan jumlah laboratorium kesehatan terbanyak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu sebanyak 741 dan sebanyak 337 laboratorium yang sudah terakreditasi. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke dua yaitu laboratorium Kementerian Kesehatan, yakni sebanyak 121 laboratorium, sudah terakreditasi sebanyak 58. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke tiga yaitu laboratorium milik pemerintah provinsi, yakni sebanyak 79 laboratorium. Laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan menjadi pengampu dari laboratorium kesehatan yang tersebar di Indonesia disajikan pada Gambar 2.14.

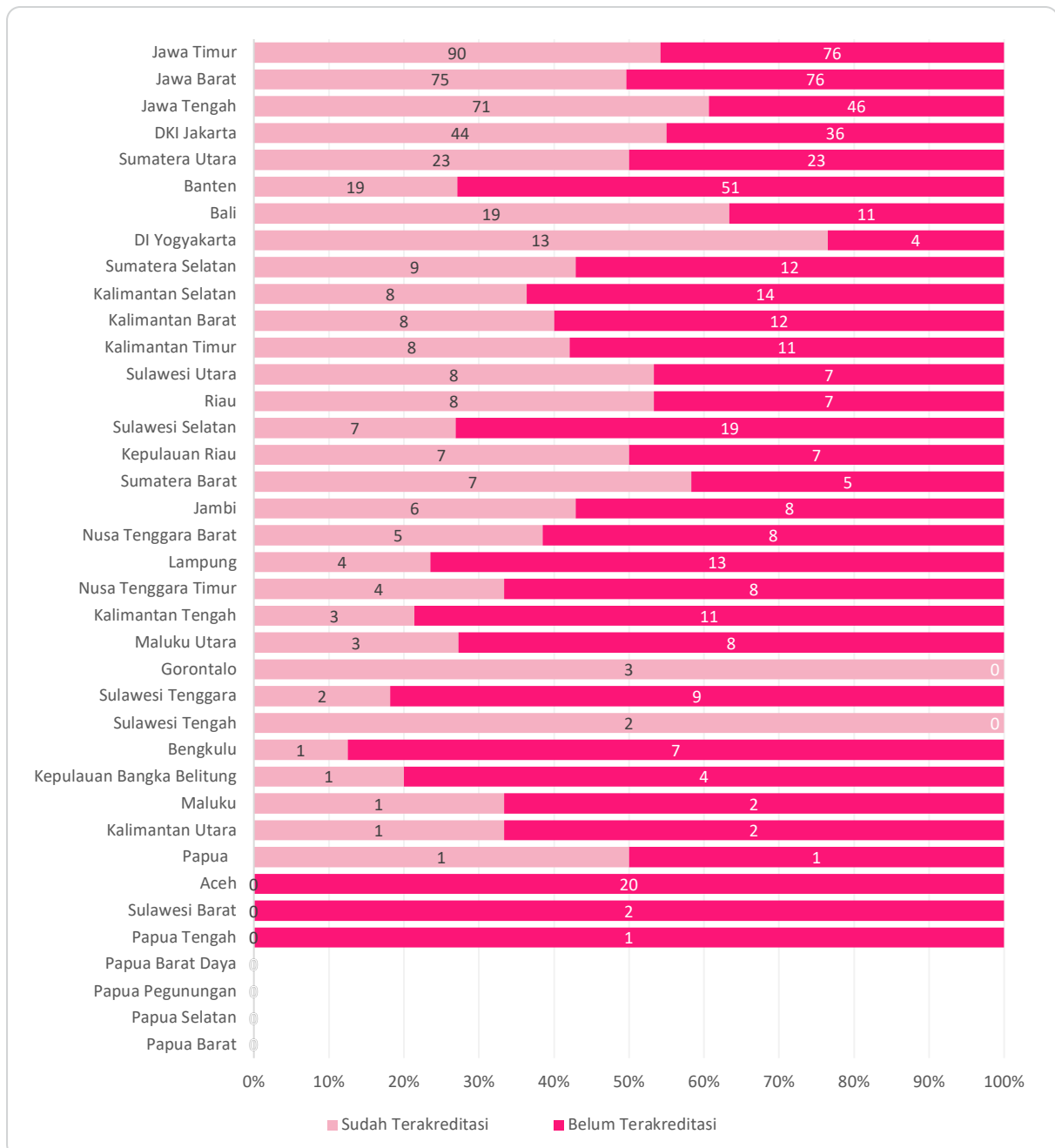
GAMBAR 2.14
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak disajikan pada Gambar 2.15, yaitu sebanyak 166 laboratorium. Provinsi terbanyak kedua yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 151, dan terbanyak ketiga yaitu Provinsi Jawa Tengah 117 laboratorium. Sebanyak 4 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya (0 laboratorium).

GAMBAR 2.15
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, 2026

D. RUMAH SAKIT

Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Dalam penyelenggaraan upaya kuratif dan rehabilitatif, rumah sakit memiliki peran strategis sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif. Selain memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan, rumah sakit juga berfungsi mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengembangan teknologi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

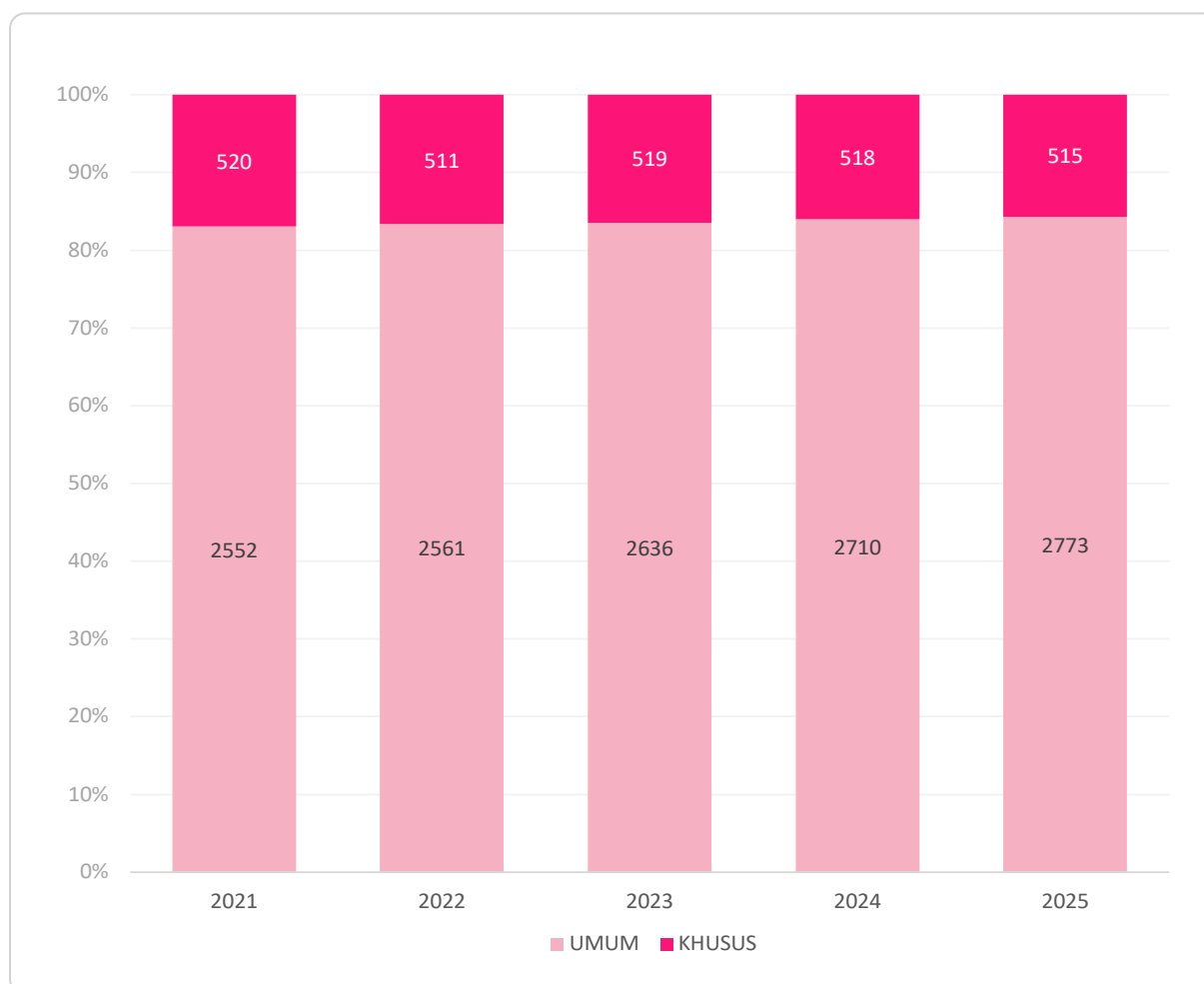
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, serta pelayanan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menjamin mutu dan pemerataan pelayanan, rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan kemampuan pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, serta pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh berbagai instansi atau Lembaga, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, BUMN, dan swasta. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Selama tahun 2021-2025 pada gambar 2.16 Jumlah Rumah Sakit Umum meningkat dari 2.552 pada tahun 2021 menjadi 2.773 pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 8,66%. Sementara itu, jumlah Rumah Sakit Khusus menurun tipis dari 520 menjadi 515 atau sebesar 0,96% pada periode yang sama.

GAMBAR 2.16
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN
DI INDONESIA TAHUN 2021– 2025

No	Penyelenggara	2021	2022	2023	2024	2025
PEMERINTAH PUSAT		236	241	242	253	263
1	Kementerian Kesehatan	19	20	20	22	24
2	TNI/POLRI	164	165	163	171	173
3	Kementerian Lain dan BUMN	53	56	59	60	66
PEMERINTAH DAERAH		790	817	849	881	903
1	Pemerintah Provinsi	96	97	98	98	102
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	694	720	751	783	801
SWASTA		1496	1503	1545	1576	1607
TOTAL KESELURUHAN		2522	2561	2636	2710	2773

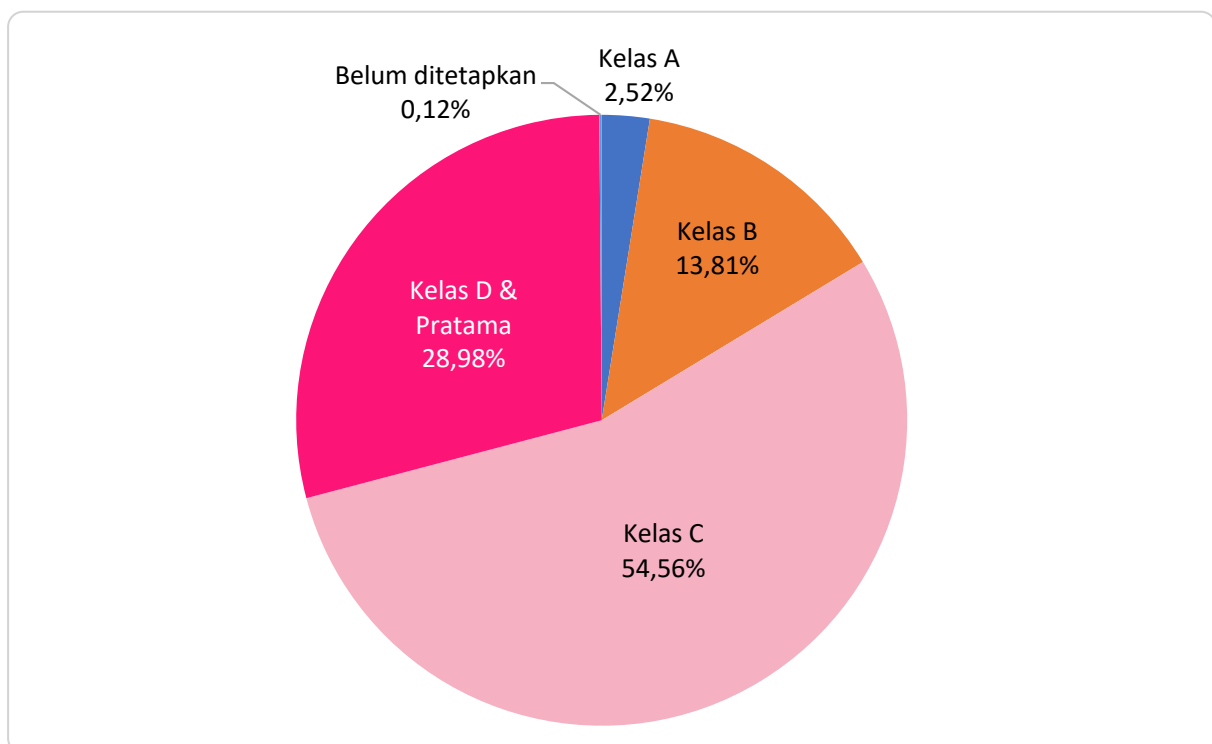
Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2026

Pada tabel 2.1 tahun 2025, penyelenggara rumah sakit di Indonesia masih didominasi oleh swasta, dengan jumlah 1.607 rumah sakit (57,95% dari total rumah sakit). Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan 903 rumah sakit (32,56%), sedangkan Pemerintah Pusat menyelenggarakan 263 rumah sakit (9,48%). Di lingkungan Pemerintah Pusat, rumah sakit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan penyelenggara terbanyak, yaitu sebanyak 173 rumah sakit, atau 6,24% dari total rumah sakit di Indonesia.

2. Tipe Rumah Sakit

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C (1.794 RS) sebesar 54,56%, kemudian kelas D dan Pratama (953 RS) sebesar 28,98%, kelas B (454 RS) sebesar 13,81%, dan kelas A (83 RS) sebesar 2,52%, sedangkan selebihnya merupakan RS yang belum ditetapkan kelas (4 RS) 0,12% dapat dilihat pada gambar 2.17.

GAMBAR 2.17
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, 2026

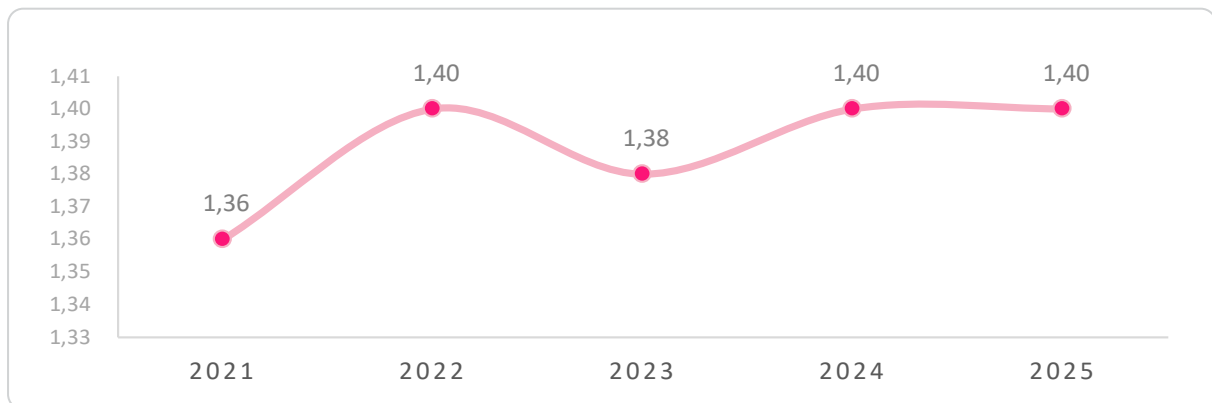
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Dalam standar World Health Organization (WHO), standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat

tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2021 hingga 2025 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk.

Untuk tahun 2025, rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia adalah 1,40 per 1.000 penduduk (Gambar 2.18). Sehingga, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia sudah tercukupi menurut standar WHO.

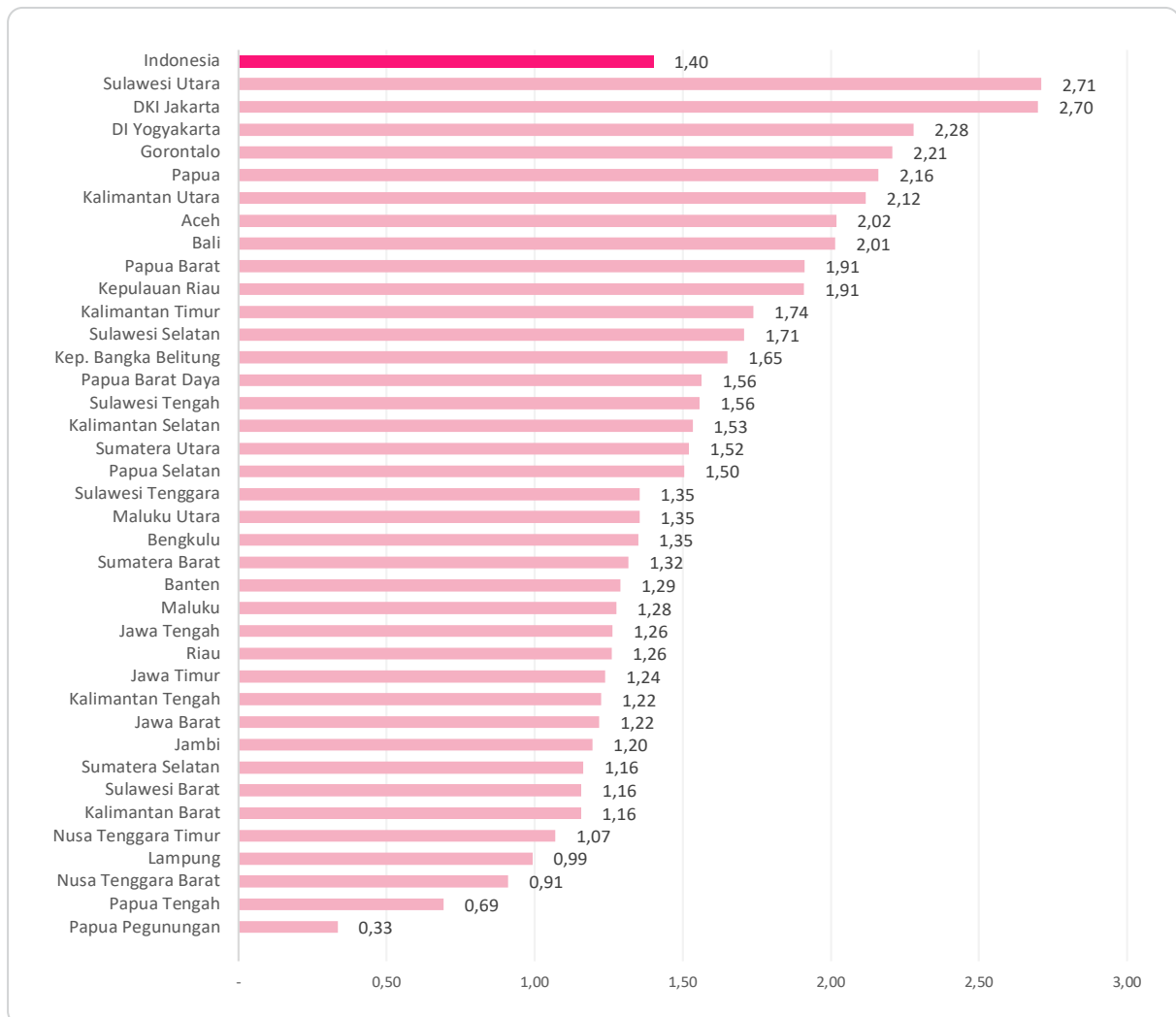
GAMBAR 2.18
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
TAHUN 2021-2025



Sumber : Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan Gambar 2.19, rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2025 menunjukkan adanya variasi antarprovinsi. Provinsi Sulawesi Utara memiliki rasio tempat tidur tertinggi, yaitu 2,71 tempat tidur per 1.000 penduduk, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 2,70 tempat tidur per 1.000 penduduk. Sebaliknya, Provinsi Papua Pegunungan memiliki rasio terendah, yaitu 0,33 tempat tidur per 1.000 penduduk, sehingga masih berada di bawah standar yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO).

GAMBAR 2.19
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

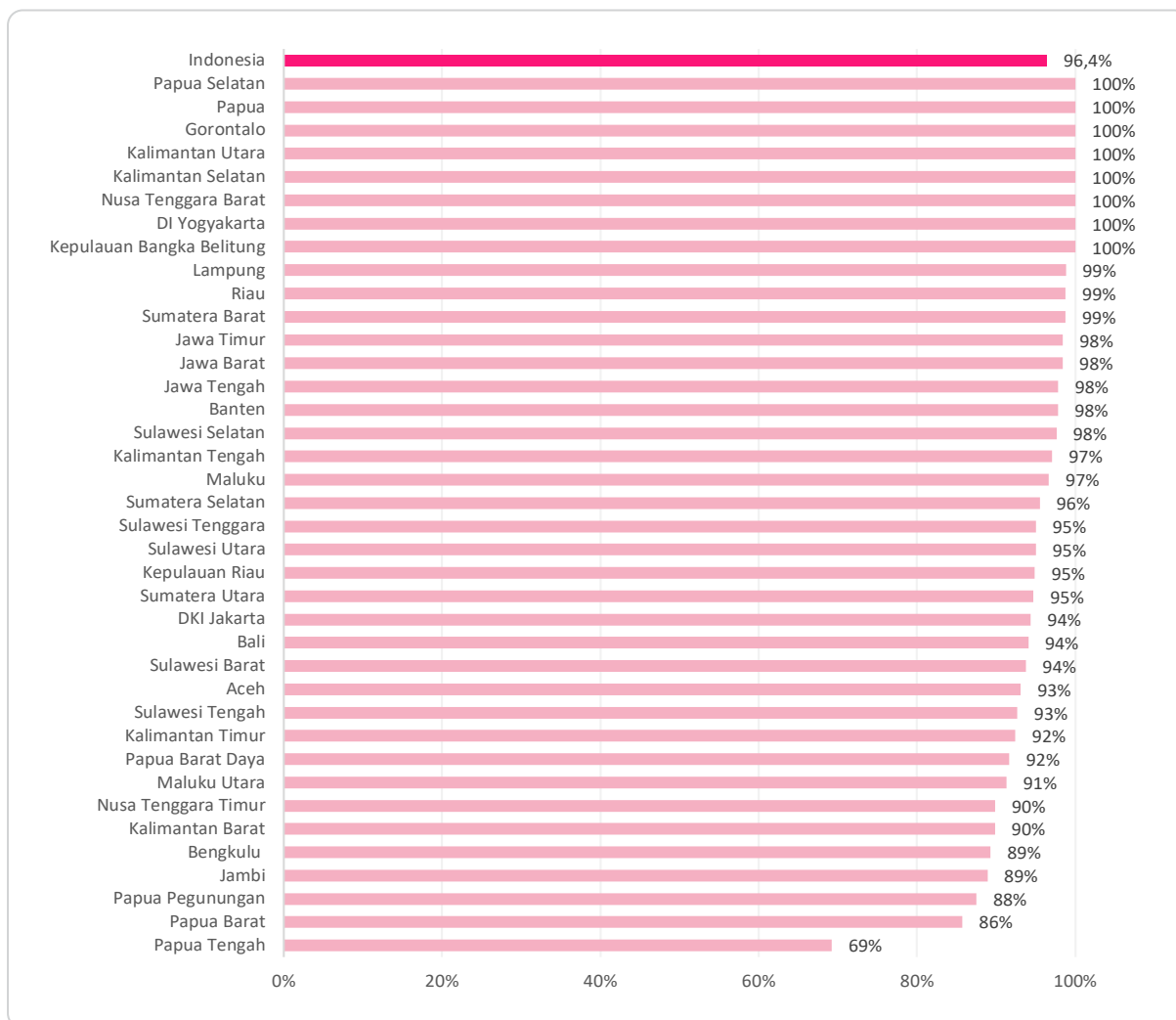


Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, 2026

4. Akreditasi Rumah Sakit

Pada tahun 2025, persentase rumah sakit terakreditasi di Indonesia mencapai 96,4%, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat variasi capaian antarprovinsi. Beberapa provinsi telah mencapai 100% rumah sakit terakreditasi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Sebagian besar provinsi lainnya juga menunjukkan capaian yang tinggi, berada pada rentang 95–99%, seperti Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa provinsi dengan capaian di bawah rata-rata nasional, terutama di wilayah timur Indonesia, seperti Papua Tengah (69%), Papua Barat (86%), Papua Pegunungan (88%), Nusa Tenggara Timur (90%), dan Maluku Utara (91%) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.20.

GAMBAR 2.20
PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, 2026

5. Fasilitas Kesehatan Yang Terkoneksi Dengan Sistem Informasi Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) terus diperkuat melalui interoperabilitas data kesehatan berbasis platform SATUSEHAT. Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan ekosistem data kesehatan yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, serta pengambilan keputusan berbasis data.

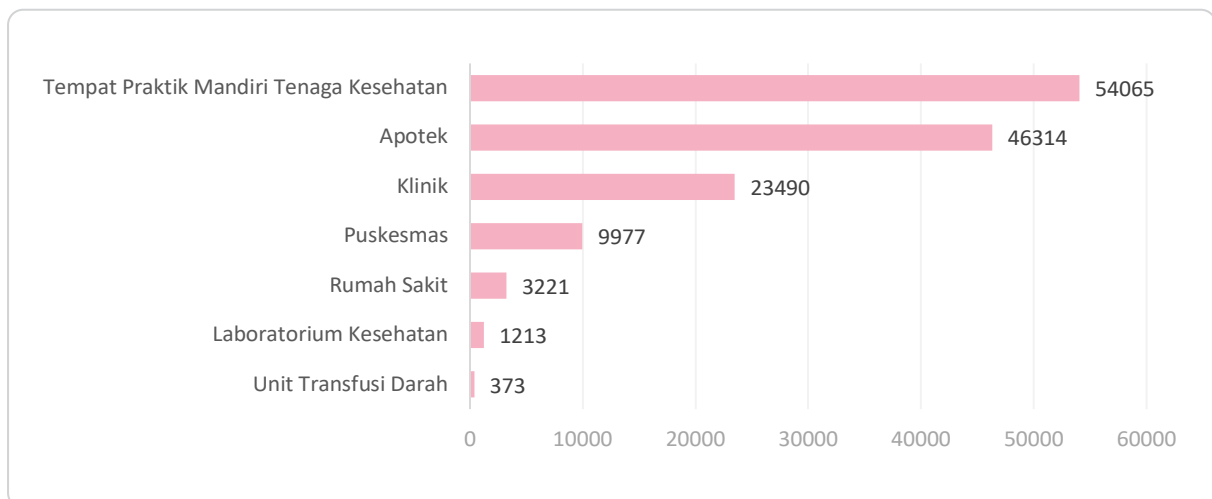
Berdasarkan data per Desember 2025, sebanyak 138.653 fasilitas pelayanan kesehatan telah terhubung dengan SIKN. Fasilitas tersebut terdiri atas 54.065 Tempat Praktik Mandiri

Tenaga Kesehatan, 46.314 Apotek, 23.490 Klinik, 9.977 Puskesmas, 3.221 Rumah Sakit, 1.213 Laboratorium Kesehatan, dan 373 Unit Transfusi Darah. Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terhubung dengan SIKN menurut jenis fasilitas disajikan pada Gambar 2.21 Capaian ini menunjukkan semakin luasnya implementasi transformasi digital kesehatan melalui integrasi sistem informasi pada berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan jenis fasilitas, Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan merupakan kelompok fasilitas dengan jumlah koneksi terbesar, yaitu sekitar 39,0% dari seluruh fasilitas yang telah terhubung dengan SIKN. Selanjutnya, Apotek berkontribusi sebesar 33,4%, diikuti Klinik sebesar 16,9%, Puskesmas sebesar 7,2%, Rumah Sakit sebesar 2,3%, Laboratorium Kesehatan sebesar 0,9%, dan Unit Transfusi Darah sebesar 0,3%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas data kesehatan telah menjangkau berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, termasuk praktik mandiri tenaga kesehatan.

Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan SIKN merupakan salah satu indikator keberhasilan transformasi digital kesehatan nasional. Melalui platform SATUSEHAT, interoperabilitas data antarfasilitas pelayanan kesehatan diharapkan semakin meningkat sehingga mendukung penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi, meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data kesehatan, memperkuat kesinambungan pelayanan, serta mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi program, dan perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.

GAMBAR 2.21
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG TERKONEKSI DENGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes RI, 2026

E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

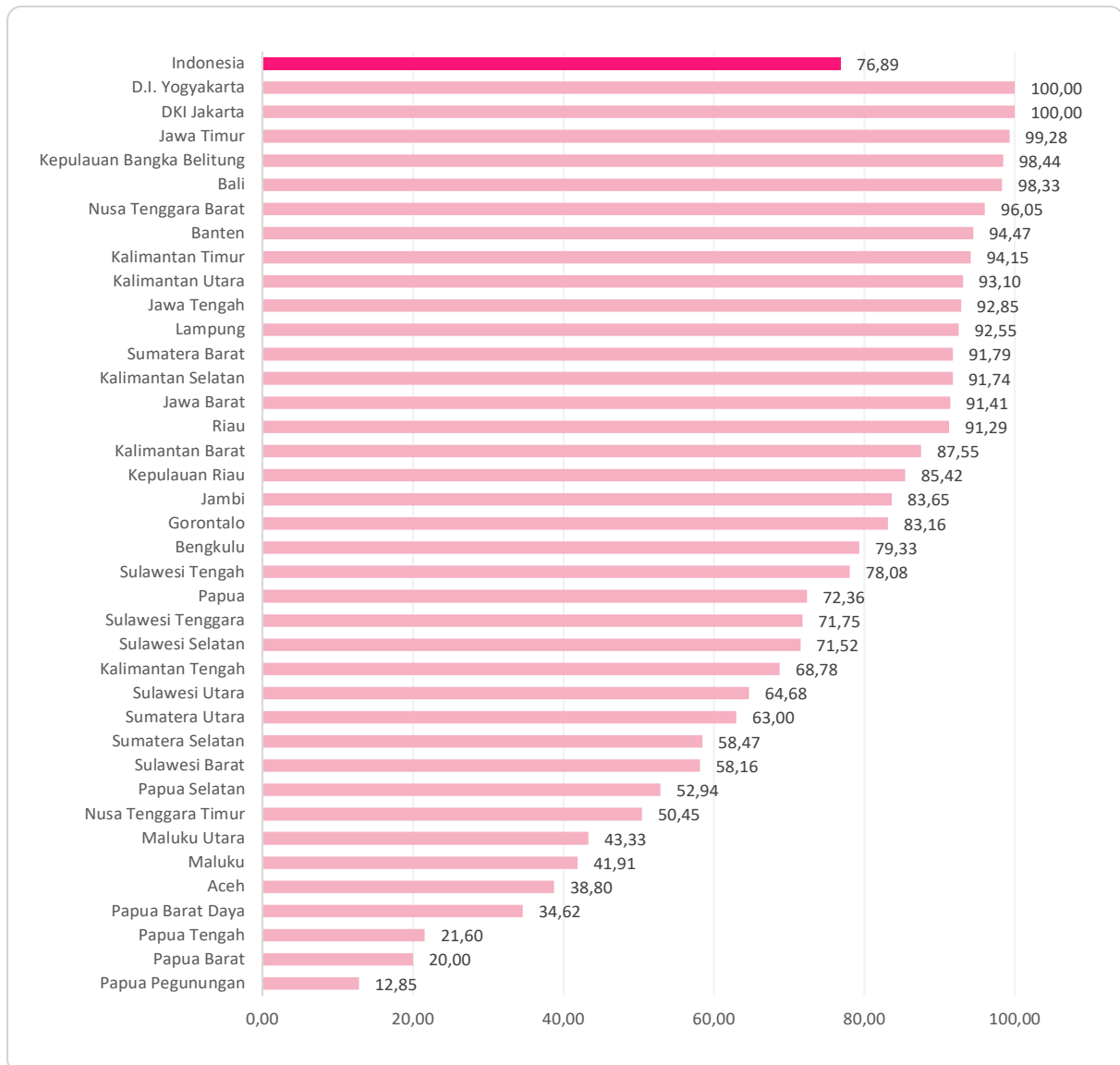
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2025–2029, Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui peningkatan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya tersebut adalah Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) sesuai standar. Indikator ini menggambarkan kemampuan Puskesmas dalam menyediakan obat esensial dan vaksin yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar serta penyelenggaraan program imunisasi secara berkesinambungan.

Pada tahun 2025, persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi rutin lengkap di Indonesia mencapai 76,89%. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN tahun 2025 sebesar 75%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah mampu memenuhi standar ketersediaan obat dan vaksin untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem logistik kesehatan, meningkatkan perencanaan kebutuhan, serta memperbaiki mekanisme distribusi obat dan vaksin hingga tingkat pelayanan kesehatan primer.

Berdasarkan capaian per provinsi, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta mencatat capaian tertinggi sebesar 100%, diikuti oleh Jawa Timur (99,28%), Kepulauan Bangka Belitung (98,44%), Bali (98,33%), dan Nusa Tenggara Barat (96,05%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas di provinsi tersebut telah mampu menjaga ketersediaan obat esensial dan vaksin sesuai standar. Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Papua Pegunungan (12,85%), Papua Barat (20,00%), Papua Tengah (21,60%), Papua Barat Daya (34,62%), dan Aceh (38,80%). Rincian data persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada gambar 2.22.

GAMBAR 2.22
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IMUNISASI RUTIN LENGKAP TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ketersediaan sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sarana distribusi berperan dalam menjaga kelancaran rantai pasok mulai dari produsen hingga fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat, sehingga mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkesinambungan.

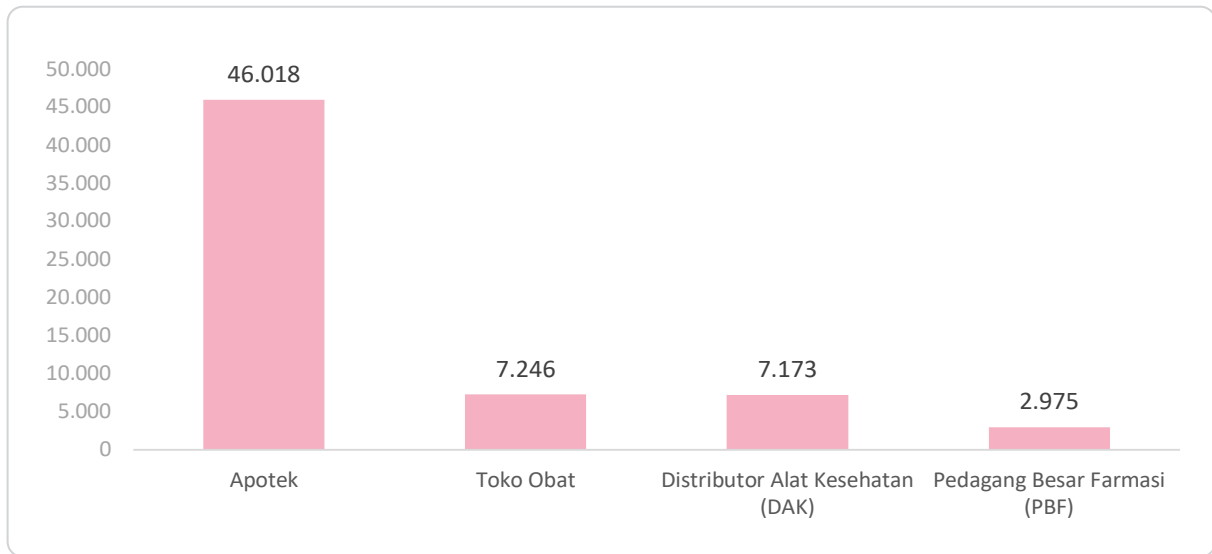
Pada tahun 2025, jumlah sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia mencapai 63.412 sarana. Sarana tersebut terdiri atas 46.018 Apotek, 7.246 Toko Obat, 7.173 Distributor Alat Kesehatan (DAK), dan 2.975 Pedagang Besar Farmasi (PBF). Jumlah tersebut menunjukkan luasnya jaringan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang mendukung penyediaan produk kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Apotek merupakan sarana distribusi yang jumlahnya paling banyak, yaitu 46.018 unit atau sekitar 72,6% dari seluruh sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Tingginya jumlah apotek menunjukkan peran strategis apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat dalam penyediaan obat, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian lainnya. Selain itu, terdapat 7.246 Toko Obat (11,4%) yang turut mendukung akses masyarakat terhadap obat bebas dan obat bebas terbatas, terutama di wilayah yang belum memiliki apotek dalam jumlah memadai.

Sementara itu, jumlah Distributor Alat Kesehatan (DAK) mencapai 7.173 unit (11,3%), yang berperan dalam menjamin ketersediaan dan distribusi alat kesehatan ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun Pedagang Besar Farmasi (PBF) berjumlah 2.975 unit (4,7%) dan memiliki fungsi penting dalam pengadaan, penyimpanan, serta penyaluran obat dan produk farmasi dari industri farmasi kepada fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana kesehatan lainnya.

Keberadaan sarana distribusi yang tersebar di berbagai wilayah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029. Dengan tersedianya jaringan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memadai, diharapkan akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan dapat semakin merata, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Gambar 2.23

GAMBAR 2.23
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posyandu merupakan salah satu bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) yang berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Dalam mendukung transformasi layanan primer, Posyandu tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi dikembangkan sebagai pusat pelayanan yang melayani seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Penguatan Posyandu bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang bersifat promotif dan preventif serta mendukung deteksi dini faktor risiko kesehatan di tingkat komunitas.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur penguatan Posyandu adalah persentase kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu aktif. Posyandu aktif merupakan Posyandu yang menyelenggarakan kegiatan secara rutin, didukung oleh kader aktif, serta memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penguatan Posyandu dilakukan melalui peningkatan kapasitas kader, pembinaan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola dan pelaporan kegiatan.

Berdasarkan Gambar 2.24, pada tahun 2025 persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 75% Posyandu aktif di Indonesia mencapai 66,15%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki Posyandu aktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Namun demikian, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa pemerataan penguatan Posyandu di seluruh wilayah Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

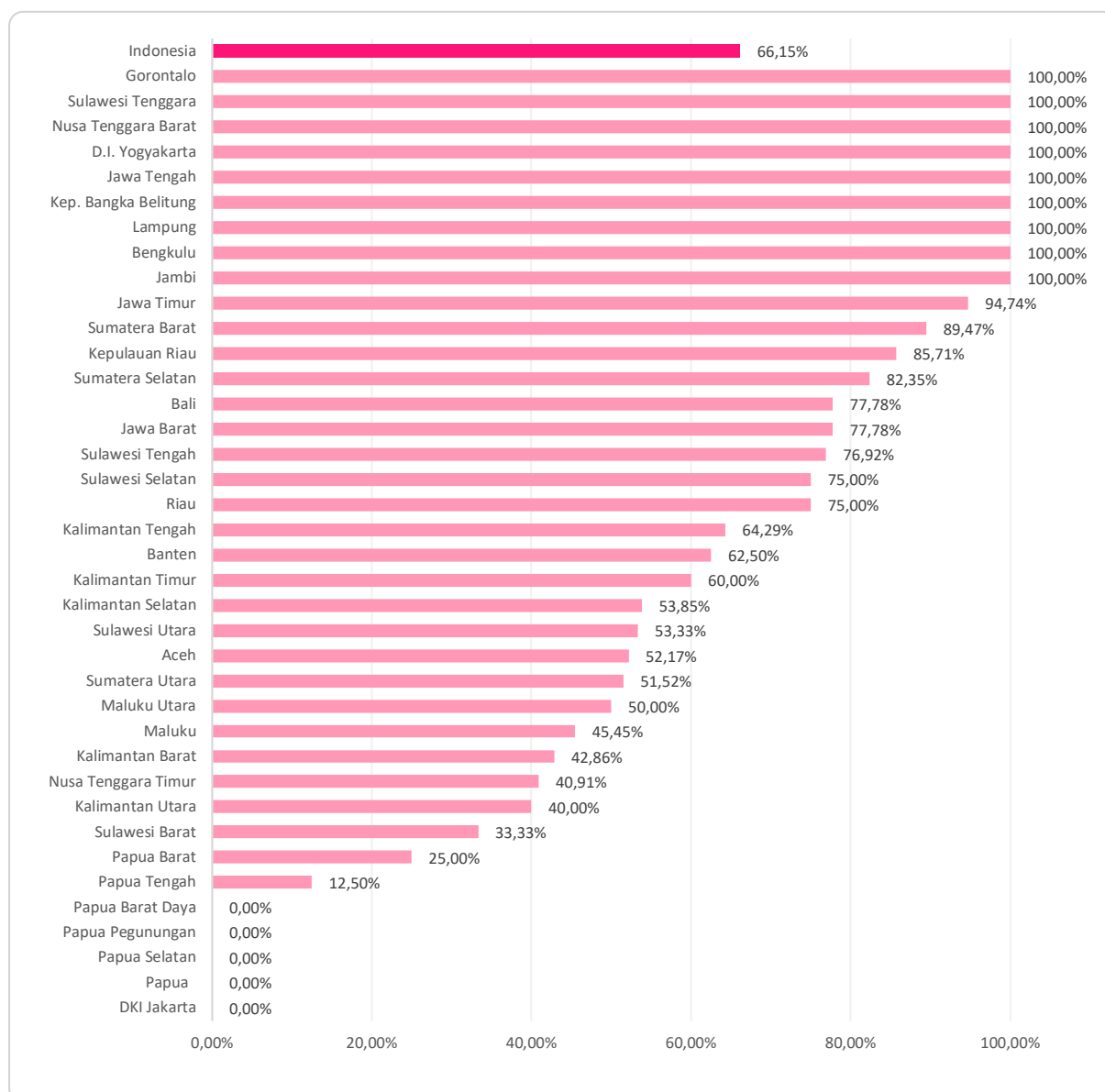
Ditinjau menurut provinsi, terdapat sembilan provinsi yang telah mencapai capaian 100%, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Selain itu, capaian yang relatif tinggi juga ditunjukkan oleh Jawa Timur (94,74%), Sumatera Barat (89,47%), Kepulauan Riau (85,71%), dan Sumatera Selatan (82,35%). Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan Posyandu, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Sebaliknya, masih terdapat beberapa provinsi dengan capaian yang rendah. Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya belum memiliki kabupaten/kota yang mencapai indikator tersebut (0%). Sementara itu, Papua Tengah (12,50%), Papua Barat (25,00%), Sulawesi Barat (33,33%), Kalimantan Utara (40,00%), dan Nusa Tenggara Timur (40,91%) masih berada di bawah rata-rata nasional. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah Posyandu yang memenuhi kriteria aktif, tantangan geografis, keterbatasan sumber daya kader, serta belum optimalnya pembinaan, pendampingan, dan pelaporan kegiatan Posyandu.

Khusus DKI Jakarta, capaian 0% dipengaruhi oleh ketidaklengkapan pelaporan dan kendala pada sistem pelaporan selama periode pengumpulan data, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pelaksanaan Posyandu di lapangan. Oleh karena itu, capaian tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Secara nasional, terdapat 18 provinsi yang telah mencapai atau melampaui ambang batas 75% kabupaten/kota dengan Posyandu aktif, sedangkan 20 provinsi lainnya masih berada di bawah capaian tersebut. Penguatan Posyandu sebagai bagian dari transformasi layanan primer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, memperkuat upaya promotif dan preventif, serta mendukung pencapaian indikator pembangunan kesehatan melalui pelayanan yang terintegrasi bagi seluruh siklus hidup.

GAMBAR 2.24
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 75% PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT
PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

BAB III. SDM KESEHATAN



BAB III. SDM KESEHATAN

Kementerian Kesehatan telah menetapkan arah Transformasi Sistem Kesehatan yang terdiri atas enam pilar utama, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Di antara keenam pilar tersebut, transformasi SDM kesehatan merupakan fondasi yang sangat strategis karena keberhasilan pelaksanaan setiap pilar transformasi sangat bergantung pada ketersediaan SDM kesehatan yang memadai, kompeten, merata, dan berkualitas.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, SDM kesehatan merupakan salah satu komponen utama yang berperan sebagai penggerak penyelenggaraan pembangunan kesehatan. SDM kesehatan adalah setiap orang yang bekerja dan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, baik dalam pelayanan maupun manajemen kesehatan. Keberadaan SDM kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta dalam mendorong peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, SDM kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis. Sementara itu, tenaga kesehatan terdiri atas tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai SDM kesehatan dalam bab ini mencakup gambaran tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, bab ini juga menguraikan aspek registrasi dan pendayagunaan SDM kesehatan, serta perkembangan lulusan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan nasional.

A. JUMLAH SDM KESEHATAN

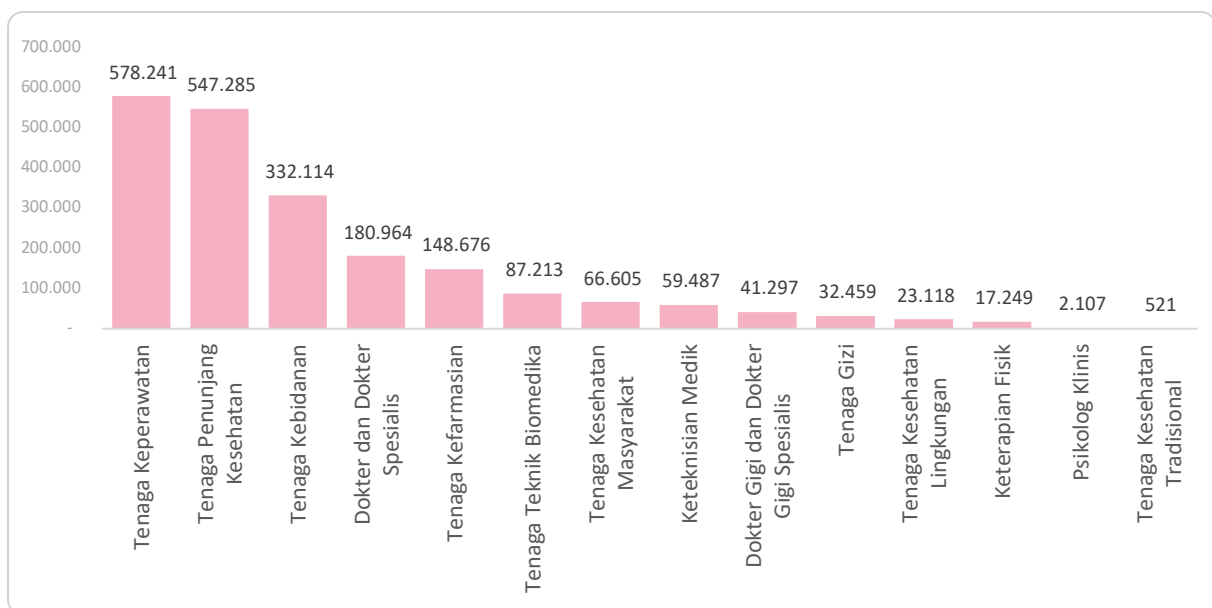
Pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, SDM kesehatan didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal di bidang kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. SDM kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang secara bersama-sama berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi, jumlah SDM kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 2.117.336 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 222.261 tenaga medis (10,5%), 1.347.790 tenaga kesehatan (63,65%), dan 547.285

tenaga pendukung atau penunjang kesehatan (25,85%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kelompok terbesar dalam struktur SDM kesehatan nasional, yang berperan sebagai tulang punggung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di berbagai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan

Ditinjau berdasarkan jenis tenaga kesehatan, tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan merupakan kelompok dengan proporsi terbesar. Tenaga keperawatan mencapai 42,9% dari seluruh tenaga kesehatan, sedangkan tenaga kebidanan sebesar 24,6%. Besarnya proporsi kedua jenis tenaga tersebut mencerminkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan primer, pelayanan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif

GAMBAR 3.1
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025

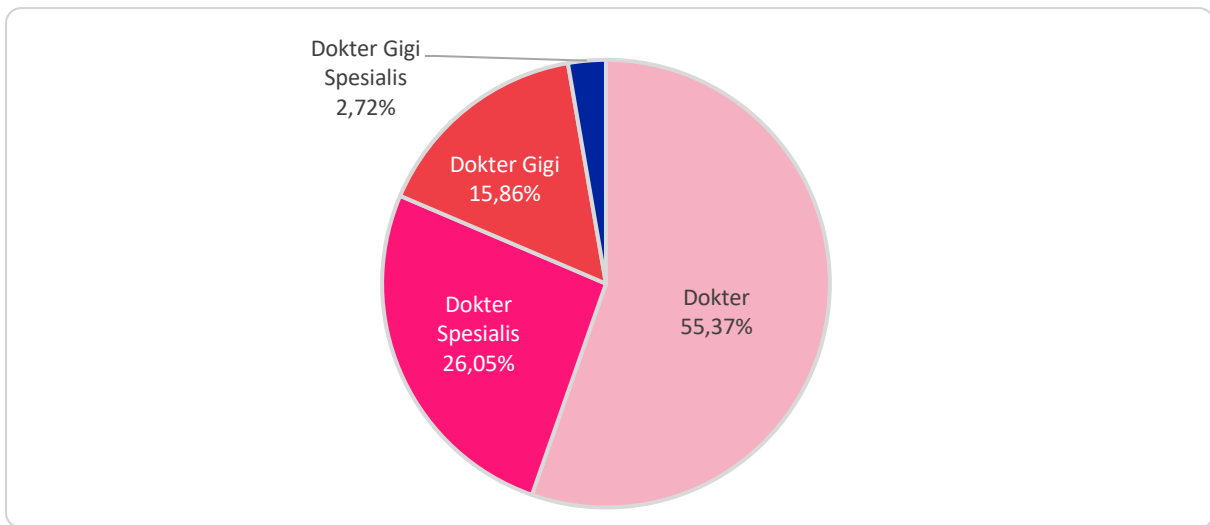


Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 222.261 orang atau 10,5% terhadap seluruh SDM kesehatan.

Dari seluruh tenaga medis, sebagian besar merupakan dokter yaitu sebesar 123.058 orang (55,37%). Proporsi tenaga medis dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

GAMBAR 3.2
PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Di antara provinsi di Pulau Jawa, jumlah tenaga medis terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 33.551 orang, diikuti DKI Jakarta sebanyak 28.014 orang, dan Jawa Timur sebanyak 26.237 orang. Sebaliknya, jumlah tenaga medis paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 222 orang, Papua Selatan sebanyak 325 orang, dan Papua Barat Daya sebanyak 430 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan tenaga medis masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), sehingga diperlukan berbagai upaya pendayagunaan dan pemerataan SDM kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

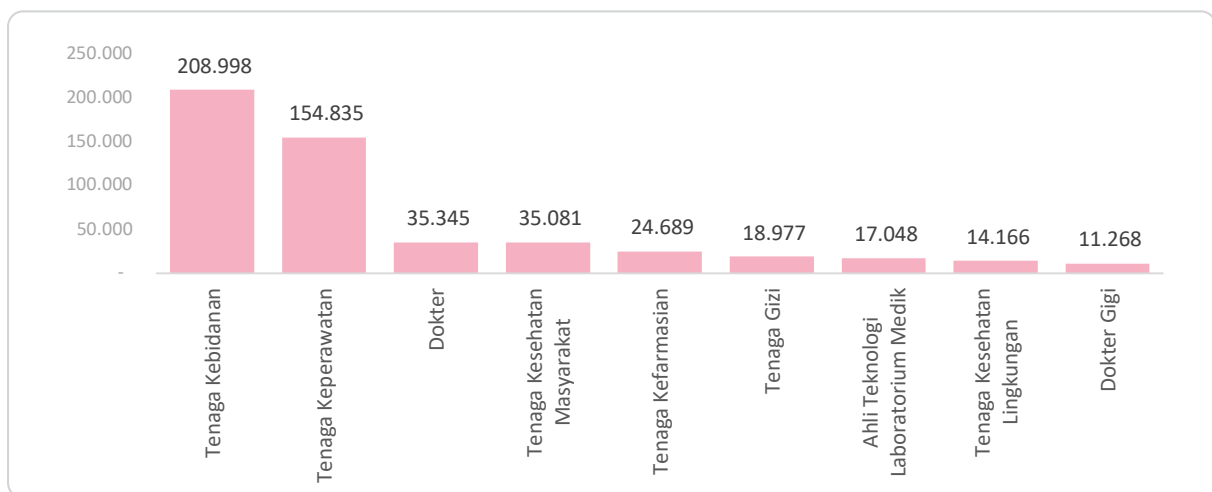
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Puskesmas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan penyelenggaraannya, puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Dalam mendukung penyelenggaraan fungsi tersebut, Puskesmas wajib memenuhi berbagai persyaratan, meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, pelayanan kefarmasian, serta laboratorium klinik, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, setiap Puskesmas paling sedikit harus memiliki tenaga yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi (nutrisi), apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, serta tenaga nonkesehatan. Selain jenis tenaga tersebut, Puskesmas dapat menambah tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan, antara lain terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, serta jenis tenaga kesehatan lainnya sesuai karakteristik wilayah, beban kerja, dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

GAMBAR 3.3
JUMLAH 9 JENIS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, jumlah sembilan jenis tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas di Indonesia mencapai 520.407 orang. Komposisi tenaga kesehatan di Puskesmas didominasi oleh tenaga kebidanan dan tenaga keperawatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer. Tenaga kebidanan merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 208.998 orang, diikuti oleh tenaga keperawatan sebanyak 154.835 orang.

Dominasi kedua jenis tenaga tersebut mencerminkan peran strategis Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan dasar, serta upaya promotif dan preventif yang menjadi fokus utama pelayanan kesehatan primer. Keberadaan tenaga kebidanan dan tenaga keperawatan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin akses, kesinambungan, dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

Selain tenaga kesehatan, puskesmas juga memerlukan tenaga penunjang/pendukung kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja. Jumlah tenaga penunjang/pendukung kesehatan di puskesmas di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 79.027 orang. Tenaga penunjang ini dapat merupakan tenaga kesehatan maupun non-kesehatan yang secara fungsi berperan sebagai pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen.

Terkait dengan tenaga non-kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur lebih jauh tentang hal ini. Regulasi ini mengatur bahwa penentuan jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan non-kesehatan di puskesmas dilakukan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja, jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap

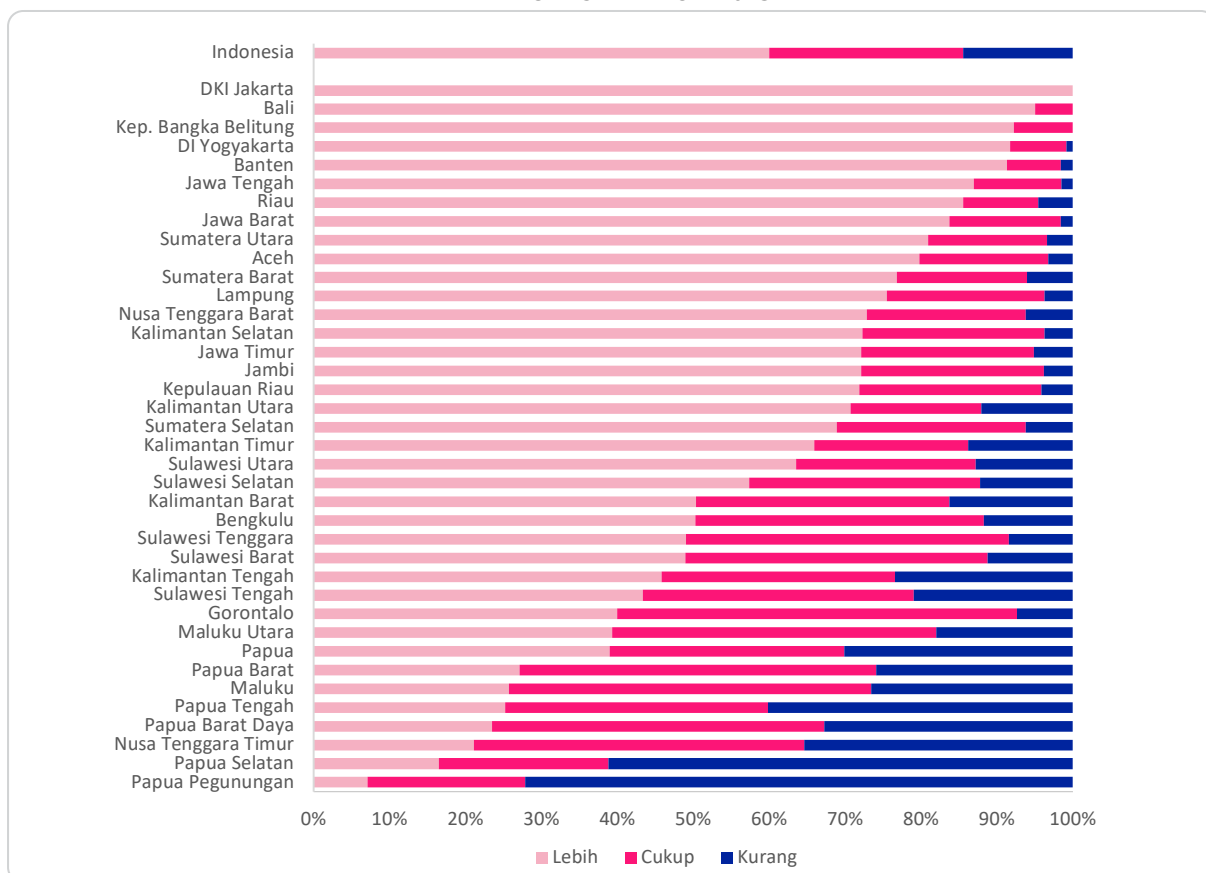
jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas dengan memberikan batasan minimal jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya. Kriteria kecukupan tenaga ini dibedakan untuk puskesmas rawat inap dan non-rawat inap. Pada Puskesmas non rawat inap, minimal satu orang dokter baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter baik pada kawasan perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Berdasarkan kondisi tahun 2025, masih terdapat Puskesmas yang belum memenuhi kebutuhan minimal tenaga dokter. Sebanyak 14,43% Puskesmas mengalami kekurangan dokter, sedangkan 59,9% Puskesmas memiliki jumlah dokter melebihi standar minimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan tenaga dokter di Puskesmas tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga yang tersedia secara nasional, tetapi juga dengan distribusinya yang belum merata antarwilayah dan antar-Puskesmas. Oleh karena itu, kebijakan pendayagunaan dan redistribusi tenaga medis perlu terus diperkuat agar pemenuhan kebutuhan dokter di Puskesmas dapat lebih merata sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI
DI INDONESIA TAHUN 2025



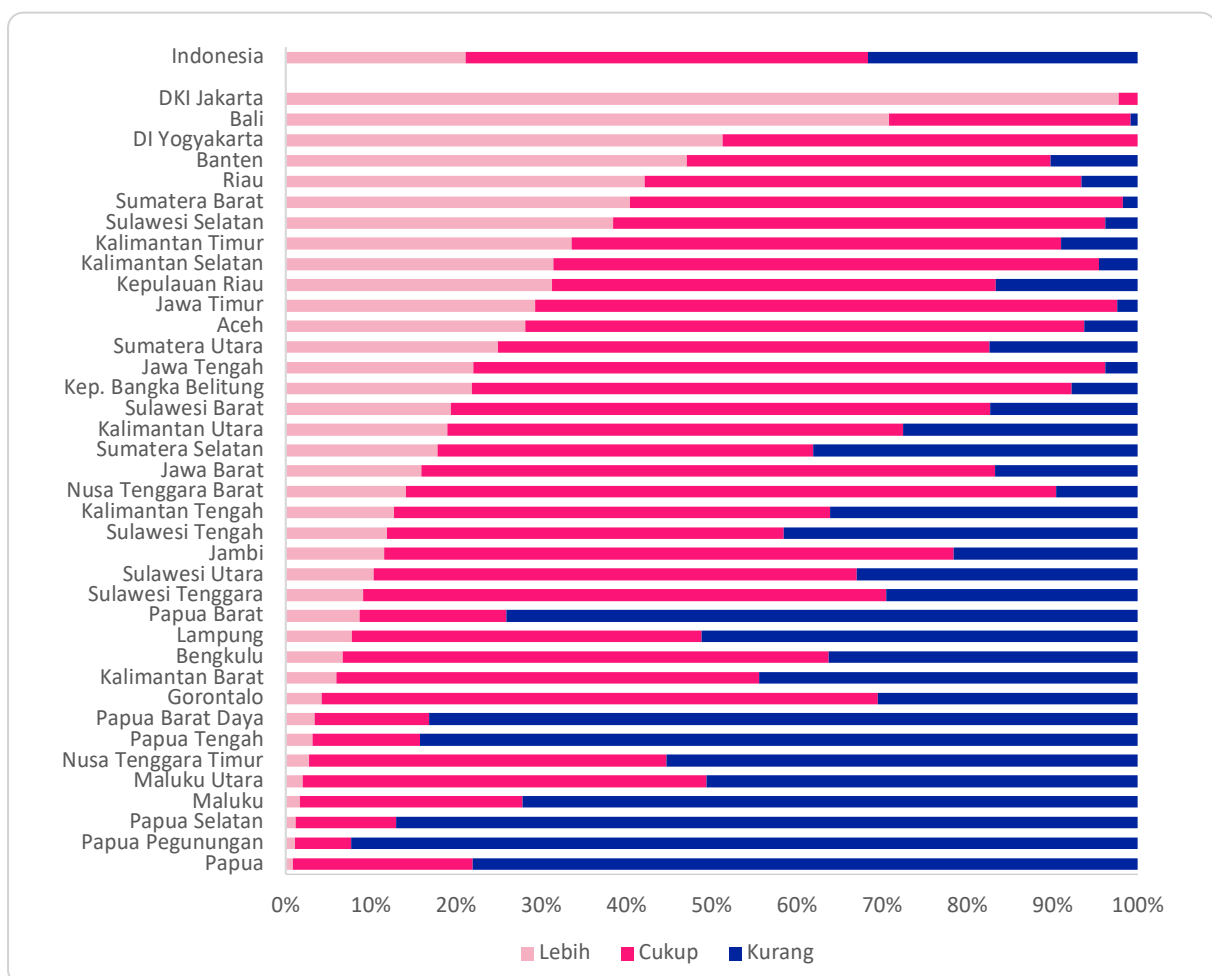
Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Pada grafik di atas diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan seluruh puskesmas telah memenuhi standar kecukupan dokter di puskesmas. Provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas yang kekurangan dokter adalah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas rawat inap dan non-rawat inap baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil adalah minimal satu orang. Pada tahun 2025, terdapat 31,64% puskesmas kekurangan dokter gigi.

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA
TAHUN 2025



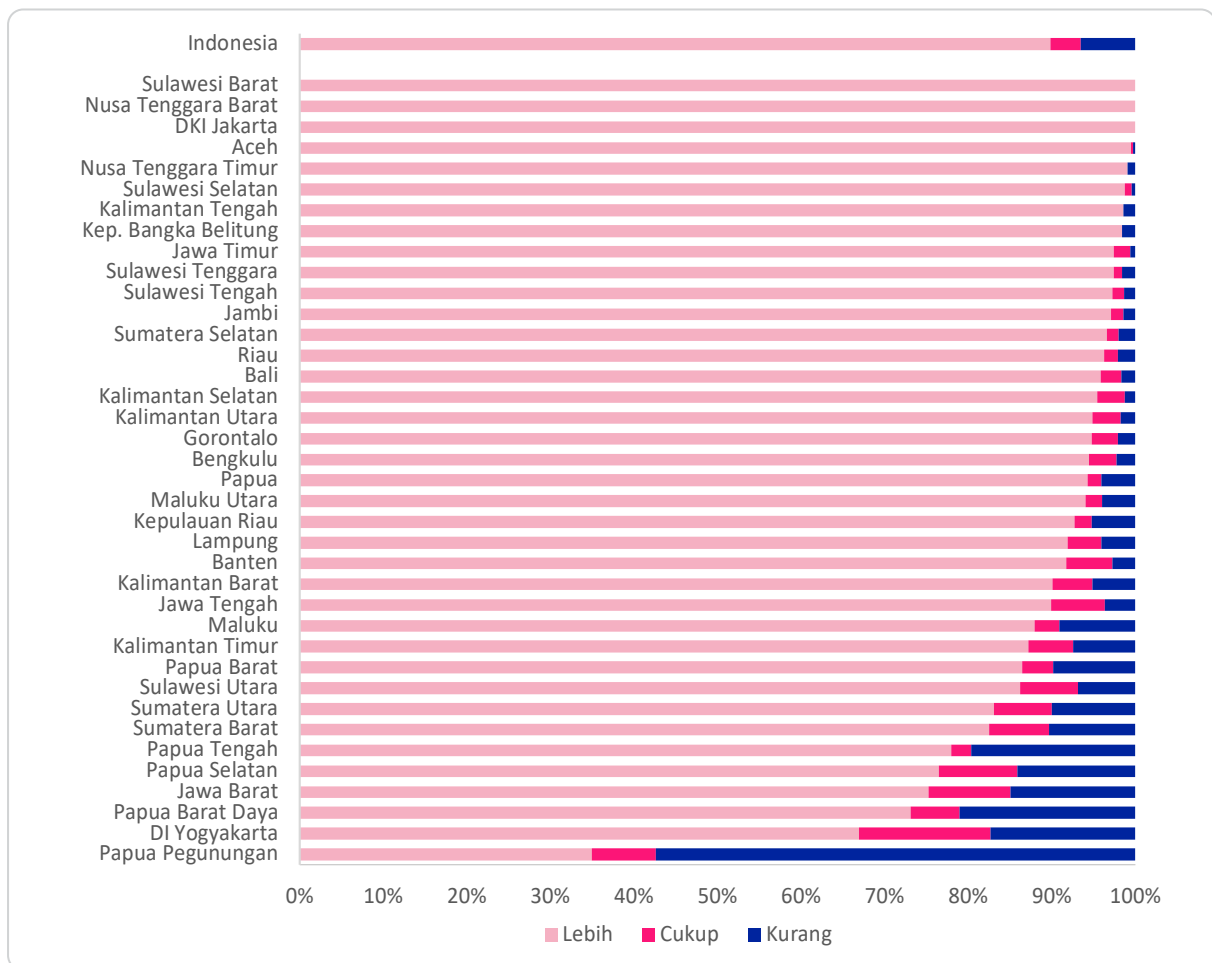
Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas dengan dokter gigi sesuai standar adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing sebesar 100%. Persentase tertinggi puskesmas dengan kekurangan dokter gigi adalah Papua Pegunungan (92,35%), Papua Selatan (87,06%), dan Papua (78,05%). Gambaran ini semakin mengkonfirmasi adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara di wilayah yang Jawa-Bali dengan wilayah timur Indonesia.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Standar kecukupan perawat di puskesmas mensyaratkan jumlah minimal yang lebih tinggi dibandingkan dokter dan dokter gigi, yaitu sebesar lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan delapan perawat pada puskesmas rawat inap. Pada tahun 2025 terdapat 6,57% puskesmas dengan status kekurangan perawat di Indonesia, kondisi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,22%.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2025



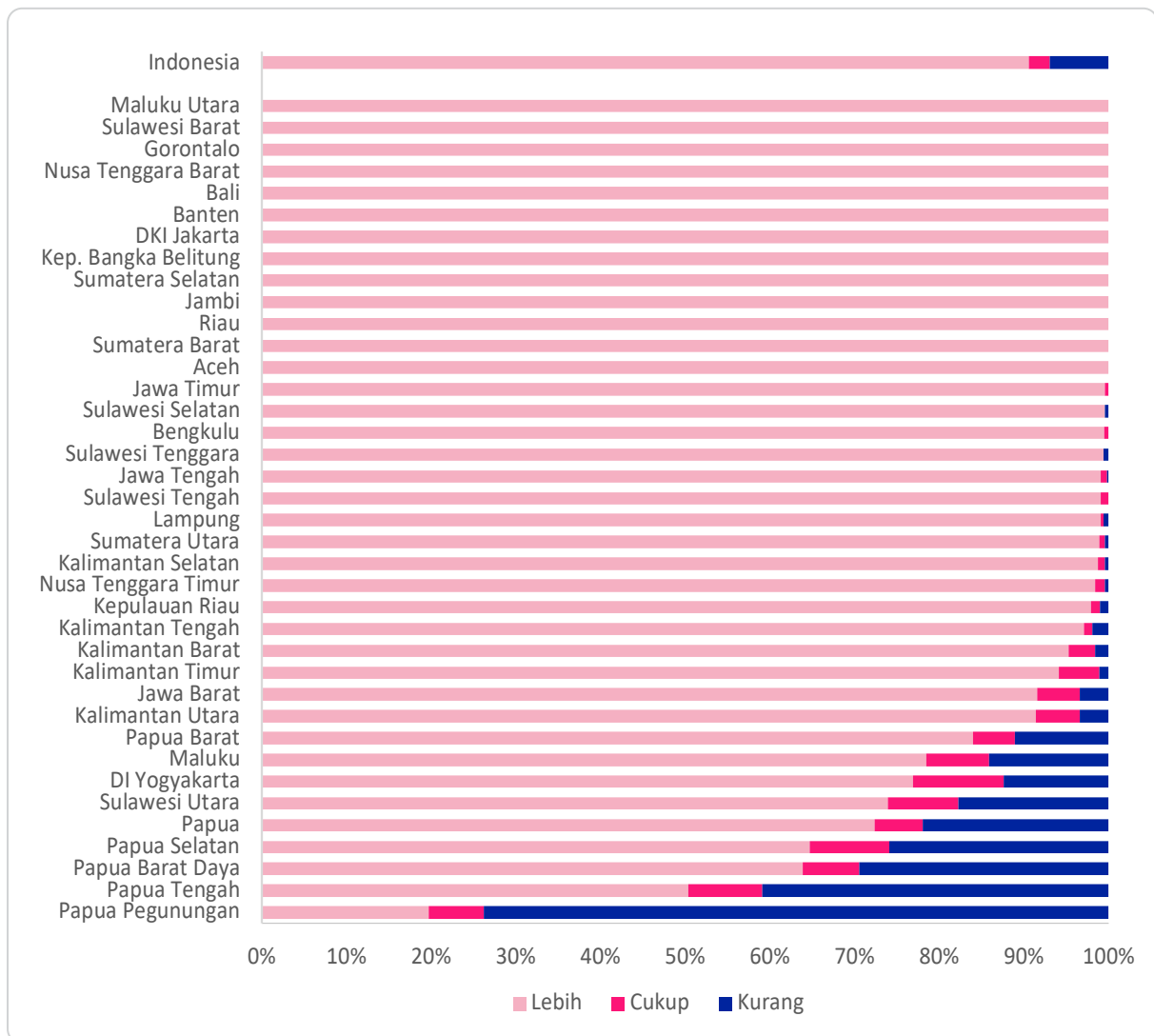
Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Secara nasional, pada tahun 2025 sebagian besar puskesmas memiliki jumlah perawat sesuai standar (cukup dan lebih) yaitu sebesar 93,43%. Provinsi dengan puskesmas dengan status kekurangan perawat adalah Papua Pegunungan (57,38%).

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Bidan juga termasuk salah satu tenaga kesehatan yang disyaratkan kecukupannya di puskesmas. Puskesmas dinilai memiliki jumlah bidan cukup jika sedikitnya memiliki empat orang untuk puskesmas non rawat inap, dan tujuh orang untuk puskesmas rawat inap. Jumlah minimal ini diterapkan untuk puskesmas di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

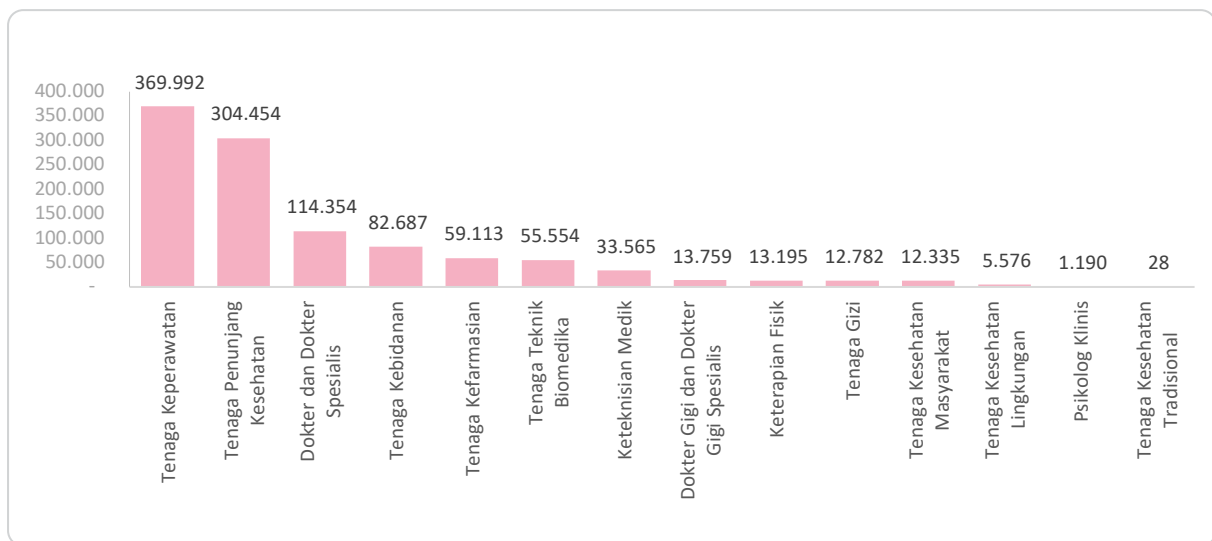
Secara nasional, pada tahun 2025 sebanyak 93,08% puskesmas dengan jumlah bidan yang sudah memenuhi standar. Provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas yang kekurangan bidan adalah Papua Pegunungan (73,77%) dan Papua Tengah (40,94%).

Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan dapat dilihat di Lampiran 3.5.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Selain pelayanan kesehatan dasar yang utamanya diselenggarakan oleh puskesmas, di Indonesia juga terdapat pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2025



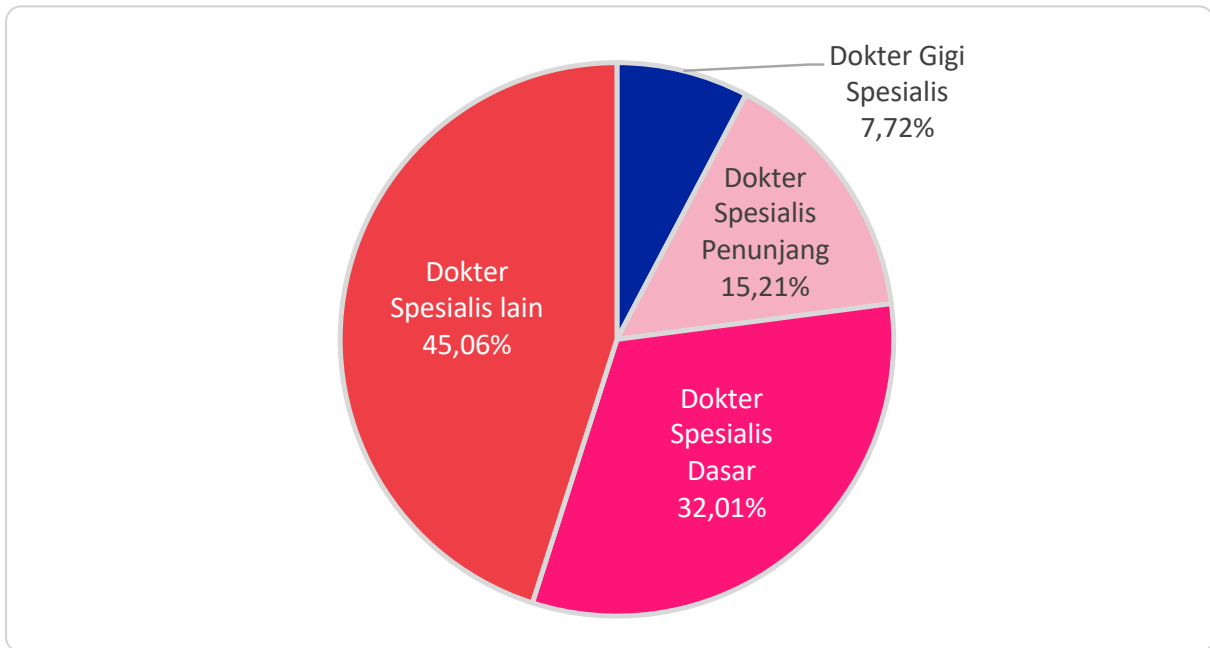
Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

SDM kesehatan dengan jumlah terbanyak di seluruh rumah sakit pada tahun 2025 adalah perawat sebanyak 369.992 orang. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dari jumlah tenaga keperawatan di rumah sakit tahun 2024 yaitu 376.569 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, rumah sakit didukung dengan keberadaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter spesialis yang disajikan pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2025 dikelompokkan menjadi dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter gigi spesialis, dan spesialis lain.

Dokter spesialis dasar terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah. Spesialis penunjang terdiri dari spesialis radiologi, spesialis anestesi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, dan spesialis rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Sebanyak 59.747 orang dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 56.769 orang. Sebagian besar tenaga ini merupakan dokter spesialis dasar sebanyak 19.123 orang atau 32,01% dari total dokter spesialis di rumah sakit.

Sama seperti permasalahan distribusi tenaga kesehatan lainnya, jumlah dokter spesialis juga menunjukkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur. Sebagian besar dokter spesialis yang melakukan pelayanan di rumah sakit terkonsentrasi di Pulau Jawa (62,2%) dan Sumatera (18,1%). Sedangkan 19,7% lainnya tersebar di pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

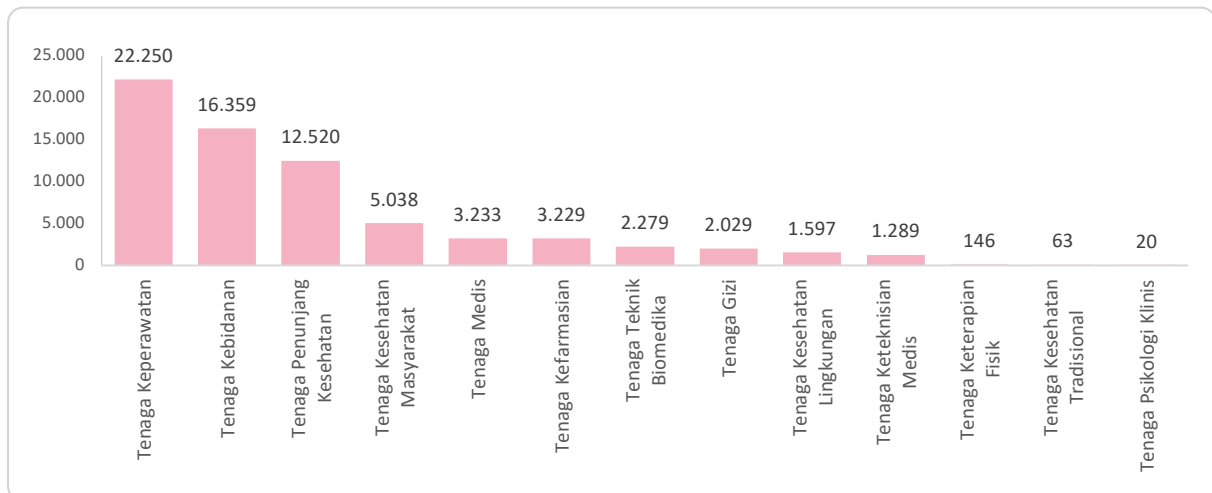
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Kesenjangan pembangunan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan. Permasalahan ini di antaranya dapat dilihat dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah di Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menetapkan 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di 11 provinsi (karena pemekaran wilayah maka menjadi 15 provinsi pada tahun 2023). Dalam sektor kesehatan, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Jumlah SDM kesehatan yang ditempatkan di daerah tertinggal pada tahun 2025 sebanyak 70.052 orang. Jenis tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak yang ditempatkan di daerah tertinggal adalah perawat, sedangkan jumlah paling sedikit adalah tenaga psikologi klinis.

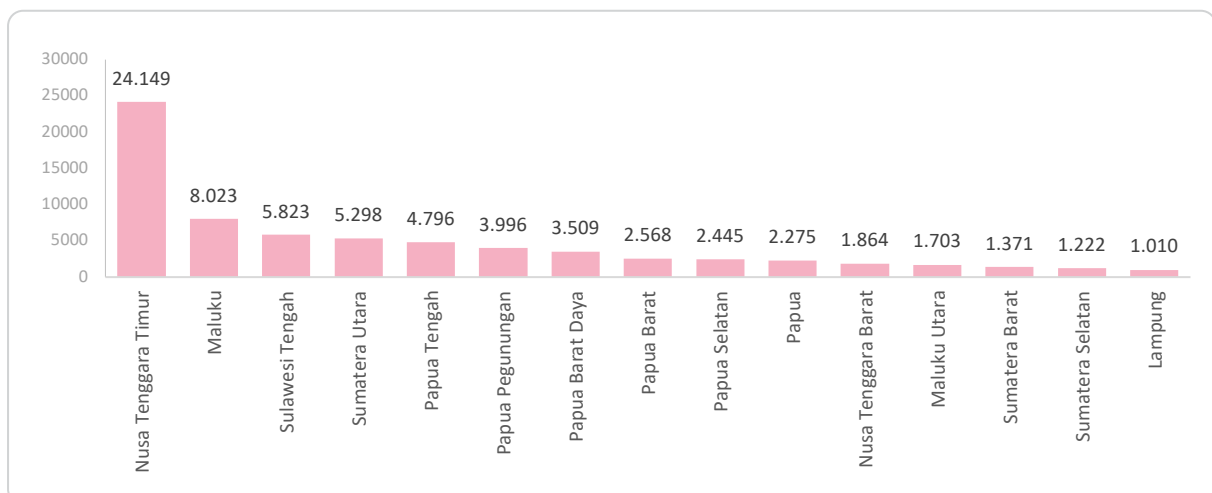
GAMBAR 3.10
DISTRIBUSI JUMLAH SDM KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan wilayah, sebagian besar SDM kesehatan di daerah tertinggal tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sumatera Utara.

GAMBAR 3.11
SEBARAN JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

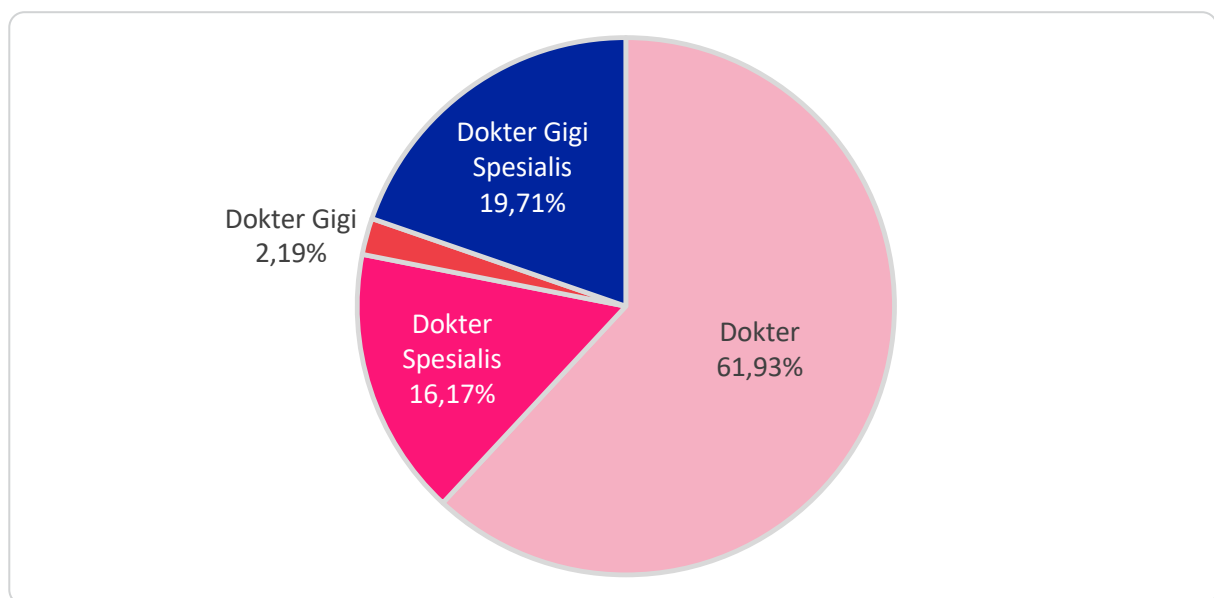
Sebaran SDM kesehatan di daerah tertinggal sejalan dengan banyaknya jumlah kabupaten tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku memiliki jumlah kabupaten tertinggal terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.

B. REGISTRASI SDM KESEHATAN

Selain metode pencatatan dan pelaporan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota, sistem pengelolaan data SDM kesehatan juga bersumber dari proses registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap SDM kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. SDM kesehatan yang telah menyelesaikan proses registrasi akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia.

Proses registrasi tidak hanya penting bagi pendataan SDM kesehatan, namun juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan. Registrasi tenaga medis yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dikelola oleh Konsil Kesehatan Indonesia.

GAMBAR 3.12
JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2025

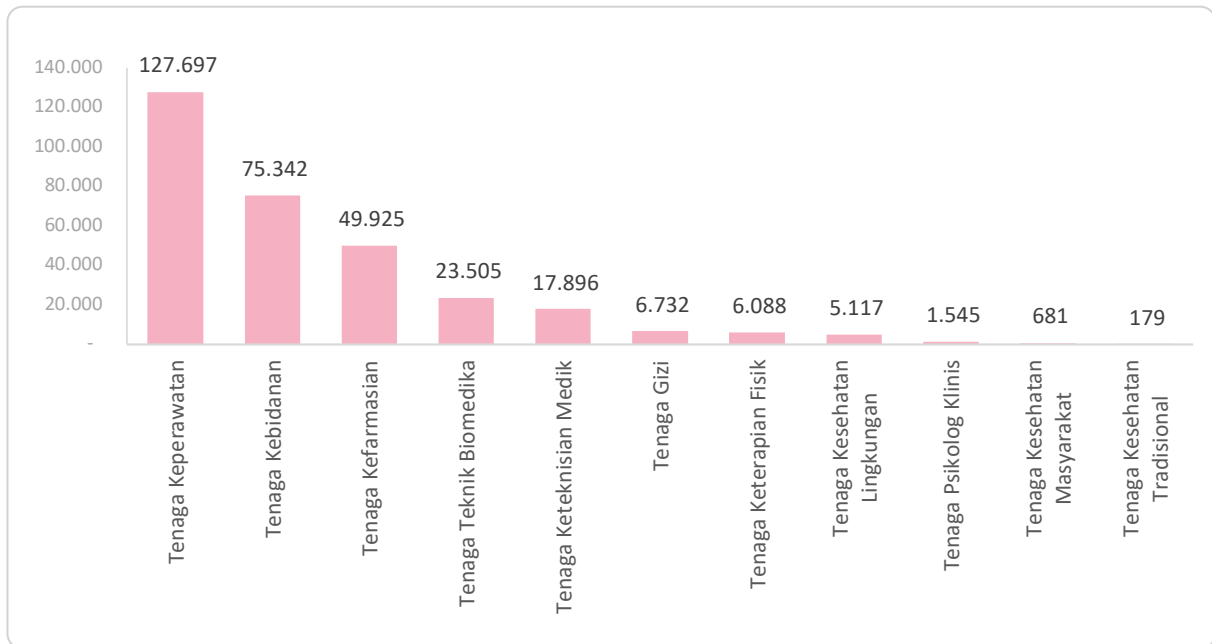


Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Jumlah tenaga medis yang memiliki STR sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 279.869 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 263.076 orang. Dokter merupakan tenaga medis dengan kepemilikan STR terbanyak yaitu sebesar 61,93%.

Registrasi tenaga kesehatan juga dikelola oleh Konsil Kesehatan Indonesia yang melingkupi 30 jenis tenaga kesehatan. Sama halnya dengan tenaga medis, tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Izin tersebut diperoleh dengan adanya kepemilikan STR yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia.

GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025

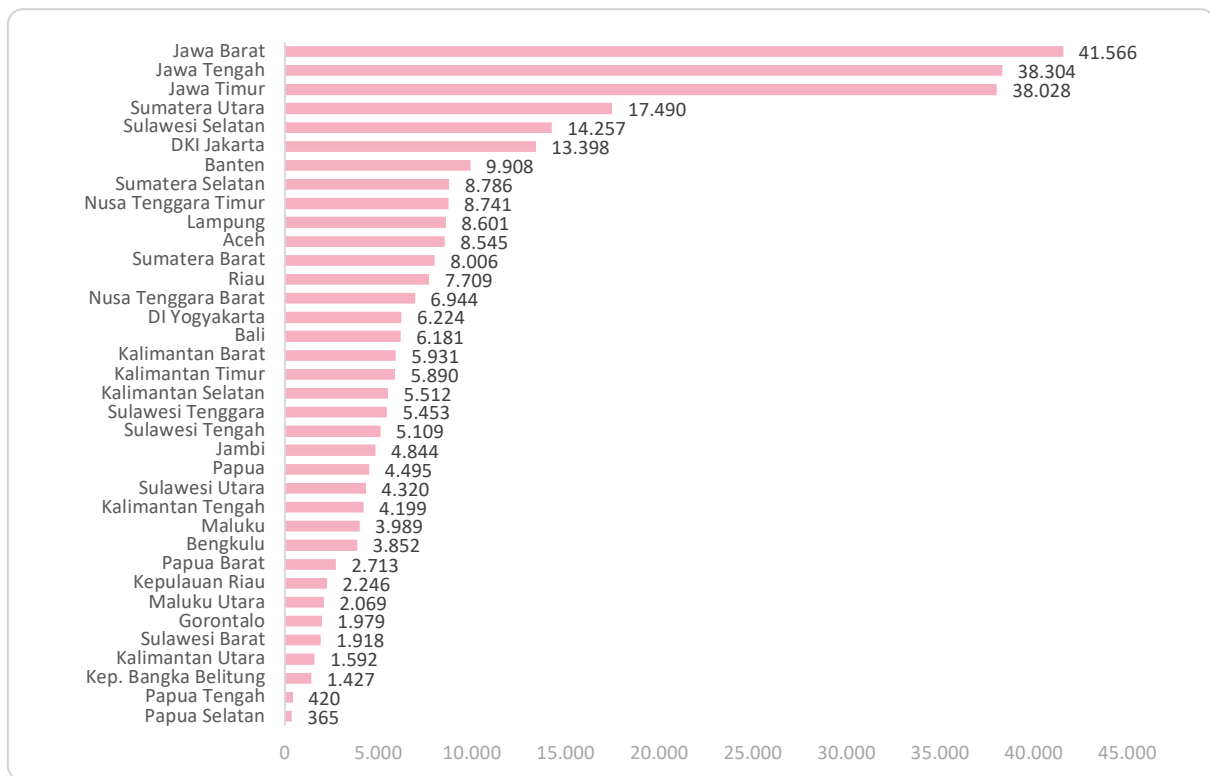


Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Tenaga Keperawatan dan tenaga kebidanan menjadi tenaga dengan jumlah penerbitan STR terbanyak, yaitu masing-masing sebanyak 127.697 orang dan 75.342 orang.

Berdasarkan sebaran provinsi, penerbitan STR terbanyak dilaporkan di provinsi Jawa Barat sebesar 41.566, Jawa Tengah sebesar 38.304, dan Jawa Timur sebesar 38.028. Banyaknya registrasi di provinsi tersebut sejalan dengan fakta bahwa jumlah sarana pendidikan ilmu kesehatan dan lulusannya banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya tidak ada data penerbitan STR pada tahun 2025. Pada penerbitan STR tenaga kefarmasian, terdapat sejumlah 3.696 STR yang tidak diketahui lokasi penerbitannya.

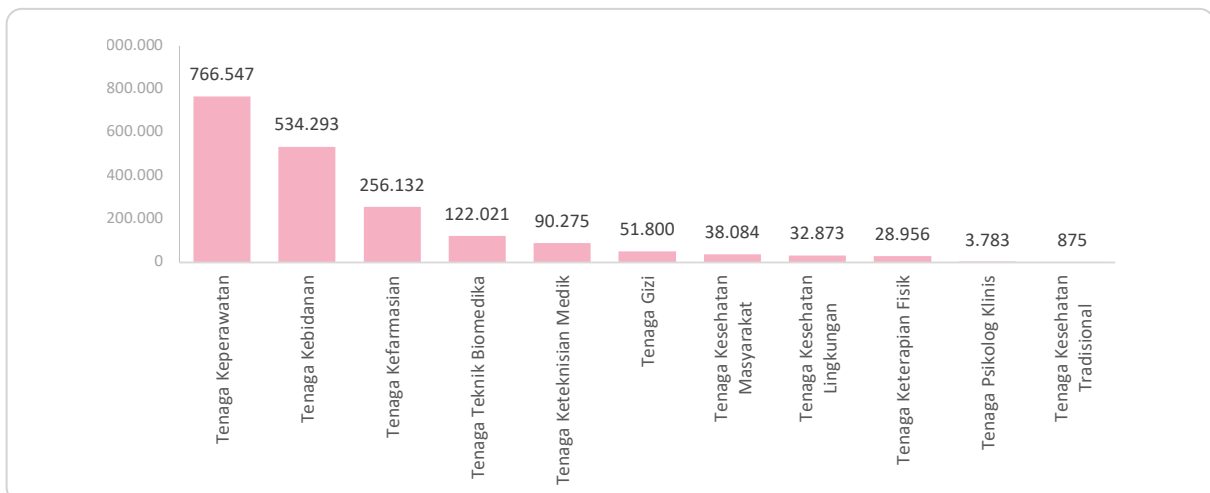
GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 1.925.639 orang. Tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan merupakan yang paling banyak memiliki STR.

GAMBAR 3.15
JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2025

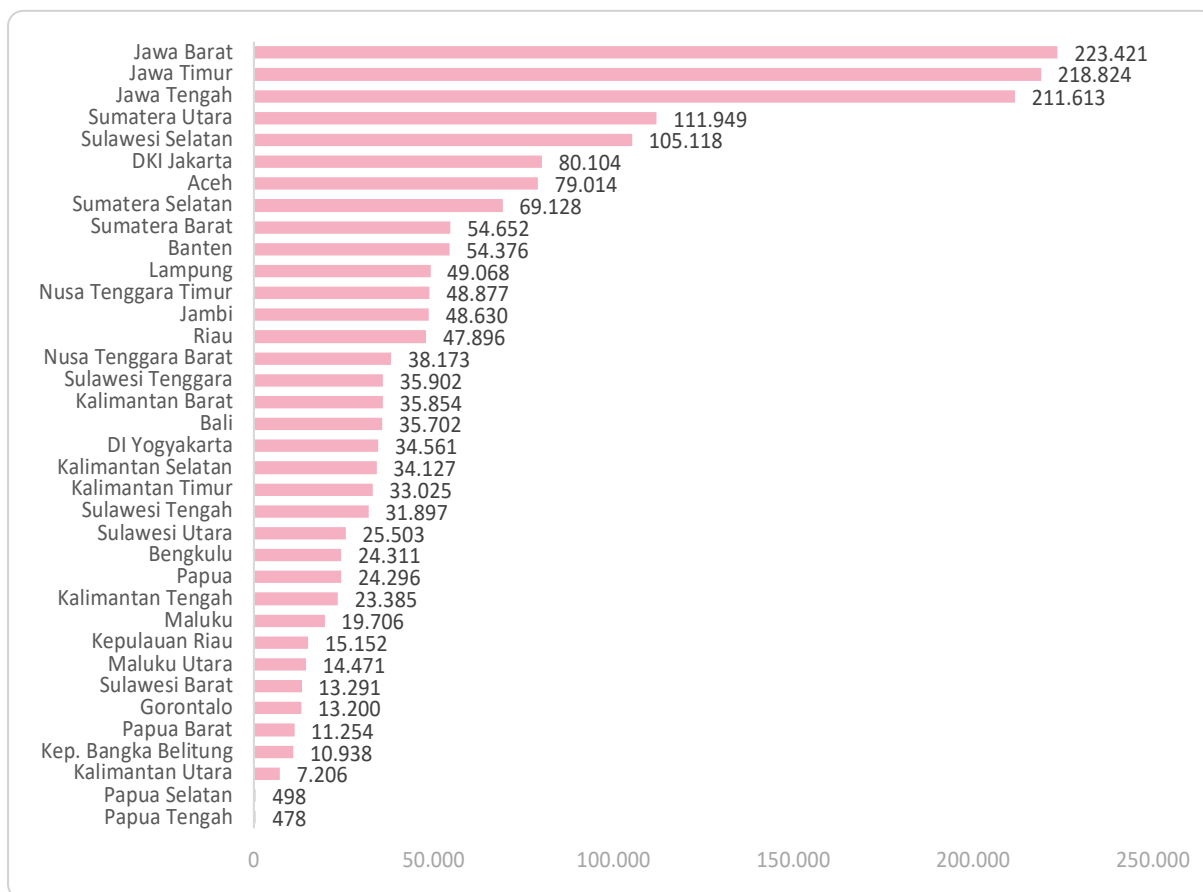


Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Jika dilihat berdasarkan provinsi, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan memiliki STR yang paling banyak seperti

tampak pada gambar di bawah ini. Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya tidak ada data tenaga kesehatan yang memiliki STR aktif. Terdapat sejumlah 40.039 orang tenaga kefarmasian yang tidak diketahui lokasi kepemilikan STR.

GAMBAR 3.16
JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI STR PER PROVINSI
AKTIF PER 31 DESEMBER 2024



Sumber: Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan upaya pemenuhan melalui Program Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di puskesmas, Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Dokter dan Dokter Gigi Internship, serta Pendayagunaan Dokter Residen.

1. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat pada tahun 2015 sebagai terobosan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas yang meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individu. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang kemudian

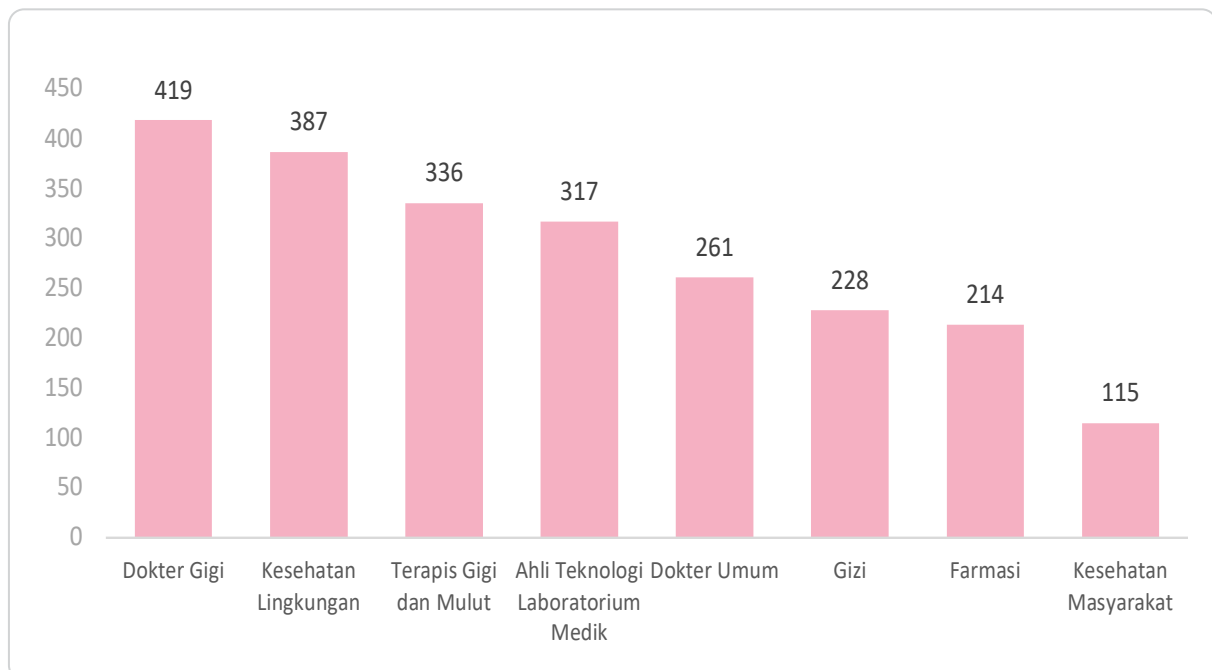
direvisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan SDM menyatakan penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan dan Rumah Sakit pemerintah yang memerlukan Pelayanan Kesehatan lanjutan, serta memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan dilakukan pada daerah tidak diminati yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan atau dalam rangka penanganan kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana. Penugasan khusus diutamakan untuk mengisi kekosongan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penempatan Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 2 periode. Periode I ditempatkan di 235 kabupaten/kota dan 772 puskesmas dan pada periode II ditempatkan di 223 kabupaten/kota dan 881 puskesmas.

Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan penempatan penugasan khusus periode I dan II pada tahun 2025 adalah 2.277 orang. Jumlah tenaga terbanyak pada penempatan tahun 2025 adalah dokter gigi yaitu sebanyak 419 orang dan jumlah paling sedikit adalah tenaga kesehatan masyarakat (115 orang). Pada tahun 2025, penugasan khusus ditempatkan pada 30 provinsi. Provinsi dengan jumlah penempatan penugasan khusus terbanyak adalah Sumatera Utara (328 orang) dan jumlah penempatan paling sedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung (3 orang). Data selengkapnya terkait penempatan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat dilihat di lampiran 3.10 dan 3.11.

GAMBAR 3.17
PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Pemerintah daerah dapat melakukan pendayagunaan tenaga kesehatan pasca penempatan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individual dengan mempertimbangkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

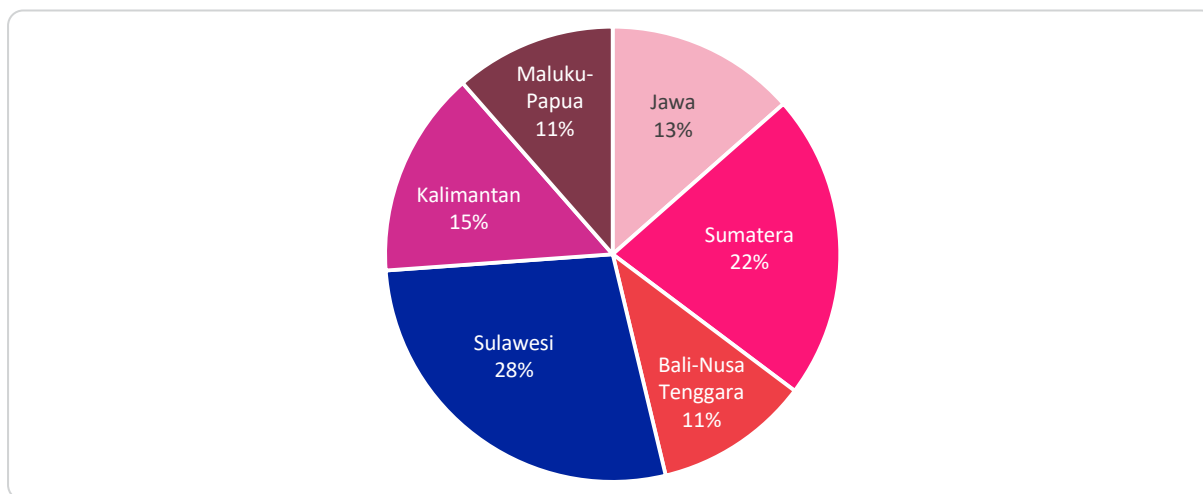
Pendayagunaan dokter spesialis merupakan bentuk penugasan khusus di rumah sakit. PGDS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan spesialistik, pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Jenis spesialisasi yang dapat mengikuti PGDS terdiri dari 25 jenis spesialis, yaitu spesialis anak, spesialis bedah, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, spesialis patologi klinik, spesialis radiologi, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis neurologi, spesialis patologi anatomi, spesialis urologi, spesialis bedah saraf, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, spesialis bedah anak, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, spesialis mata, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher, spesialis gizi klinik, spesialis mikrobiologi klinik, spesialis orthopaedi dan traumatologi, spesialis onkologi radiasi, spesialis kedokteran nuklir, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dan spesialis kedokteran jiwa.

Pendayagunaan Dokter Spesialis merupakan upaya pemenuhan dokter spesialis setelah program Wajib Kerja Dokter Spesialis. PGDS dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.

Peserta PGDS terdiri dari peserta Mandiri (Non ASN) dan peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan (ASN). Pada tahun 2025 telah ditempatkan sejumlah 735 orang dokter spesialis yang ditempatkan di 38 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI dan K/L lainnya yang mengikuti program PGDS. Jika dilihat secara regional, penempatan PGDS paling banyak pada regional Sulawesi. Provinsi dengan penempatan dokter spesialis pada PGDS terbanyak adalah Provinsi Sulawesi Selatan (79 orang). Jumlah penempatan PGDS di rumah sakit TNI/POLRI/KL lainnya adalah 54 orang.

Jenis spesialisasi terbanyak pada penempatan PGDS tahun 2025 adalah dokter spesialis penyakit dalam (71 orang), sedangkan penempatan jenis spesialisasi yang paling sedikit adalah dokter spesialis kedokteran akupunktur dan spesialis ilmu kedokteran andrologi (1 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2025 dapat dilihat di Lampiran 3.14.

GAMBAR 3.18
PROPORSI PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
MENURUT REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

3. Penugasan Khusus Tenaga Residen

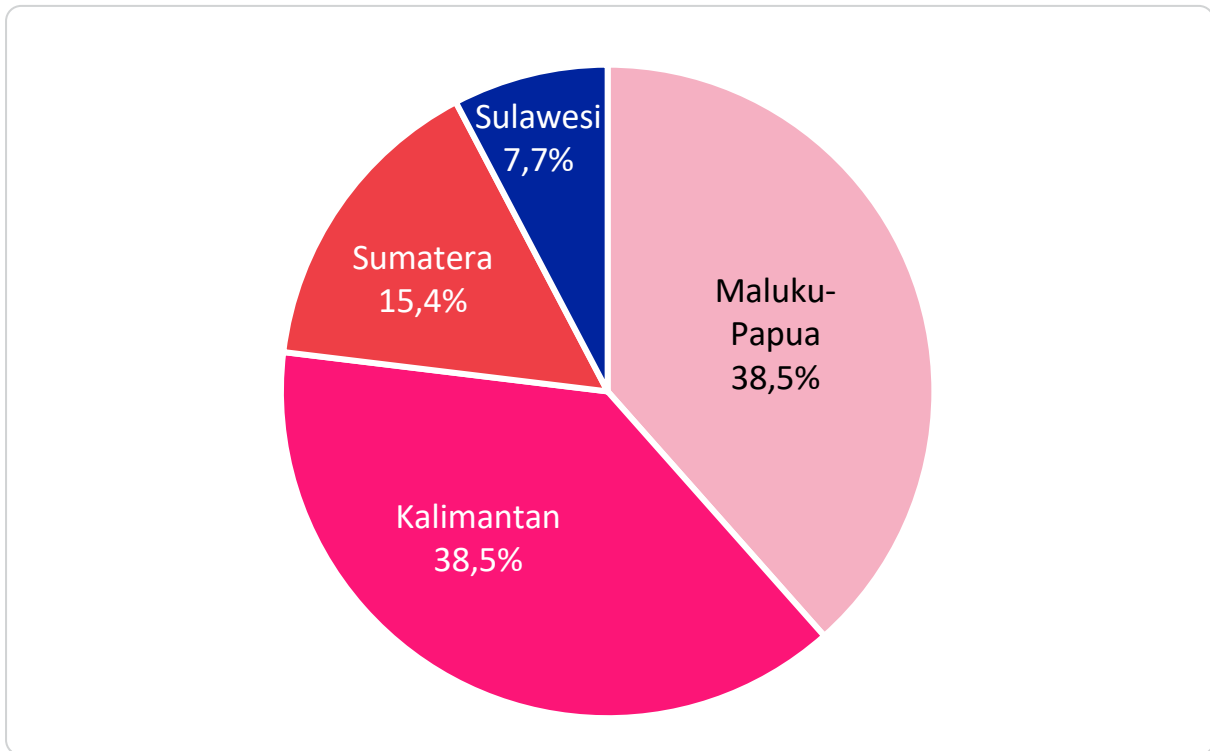
Penugasan Residen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, yang merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.

Kemudian pada November 2025 diterbitkan Permenkes 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan SDM Kesehatan, istilah penugasan khusus Residen berubah menjadi Pendayagunaan peserta didik pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan program spesialis/subspesialis. Tujuan program tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pemerataan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan program spesialis/subspesialis.

Pada tahun 2025, jumlah dokter spesialis dalam penugasan khusus sebagai residen di Indonesia adalah 13 orang. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan jumlah penugasan khusus residen pada tahun 2024 yaitu 10 orang. Sebagian lokus penugasan residen sudah terisi oleh tenaga dokter spesialis dari program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program penugasan khusus residen masih berlanjut hingga tahun 2025.

Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar pada tahun 2025 adalah regional Maluku-Papua dan regional Kalimantan sebesar 38,5%. Sebanyak 29 provinsi tidak ditempatkan residen dokter spesialis pada tahun 2025.

GAMBAR 3.19
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH
PADA TAHUN 2024



Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

4. Program Internsip Dokter

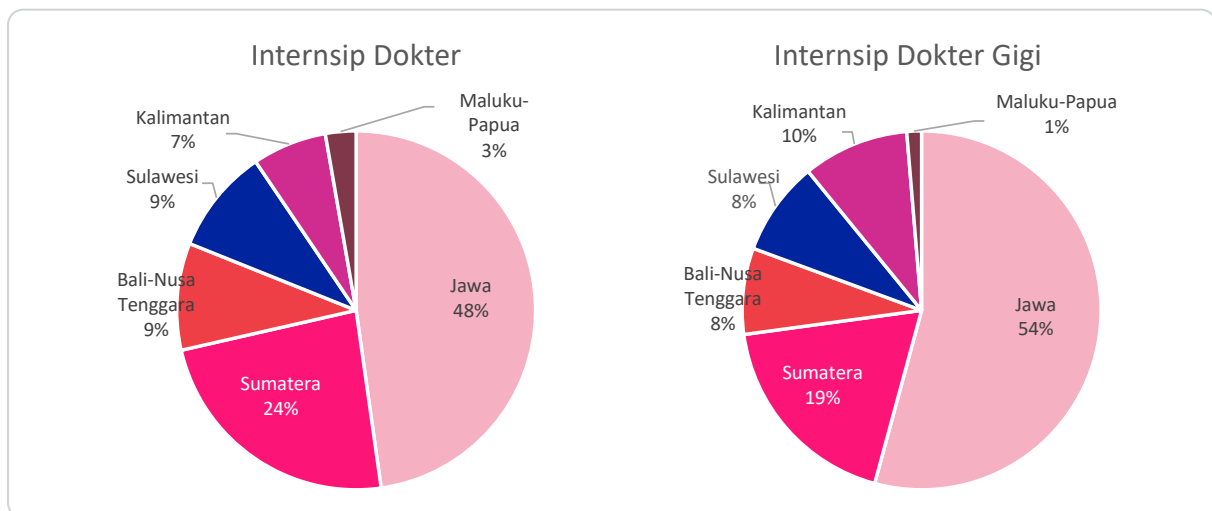
Program internsip merupakan penempatan wajib sementara pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi dokter warga negara Indonesia yang telah mengangkat sumpah profesi (Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2025). Dokter dan dokter gigi peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan hanya berlaku di wahana internsip selama menjalani program internsip. Peserta program internsip ditempatkan paling lama selama satu tahun di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan peserta internsip sebanyak empat kali dalam satu tahun. Jumlah dokter peserta internsip tahun 2025 sebanyak 12.519, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 diberangkatkan empat angkatan berjumlah 11.292 orang. Jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari sebanyak 2.357 orang, bulan Mei sebanyak 2.213 orang, bulan Agustus sebanyak 4.150 orang, dan bulan November sebanyak 3.799 orang. Provinsi dengan jumlah dokter peserta internsip terbanyak adalah Jawa Timur sebanyak 1.654 orang. Provinsi dengan jumlah dokter peserta internsip paling sedikit adalah Papua Selatan sebanyak 7 orang dan Papua Pegunungan sebanyak 6 orang.

Jumlah dokter gigi peserta internsip tahun 2025 sebanyak 3.322 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 diberangkatkan empat angkatan berjumlah 3.174. orang. Jumlah dokter gigi peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari sebanyak 1.002 orang, bulan Mei sebanyak 848 orang, bulan Agustus sebanyak 574 orang, dan

bulan November sebanyak 896 orang. Provinsi dengan jumlah dokter gigi peserta internsip terbanyak adalah Jawa Tengah sebanyak 603. orang. Provinsi dengan jumlah dokter gigi peserta internsip paling sedikit adalah Bengkulu sebanyak 6 orang dan Maluku Utara sebanyak 7 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2025 dapat dilihat di lampiran 3.12 dan 3.13.

GAMBAR 3.20
PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi, sedangkan tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III.

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, profesional, serta memenuhi standar profesi, dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan kesehatan dan dinamika pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri, kemampuan produksi tenaga kesehatan dan ketersediaan sumber daya pendidikan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan

Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

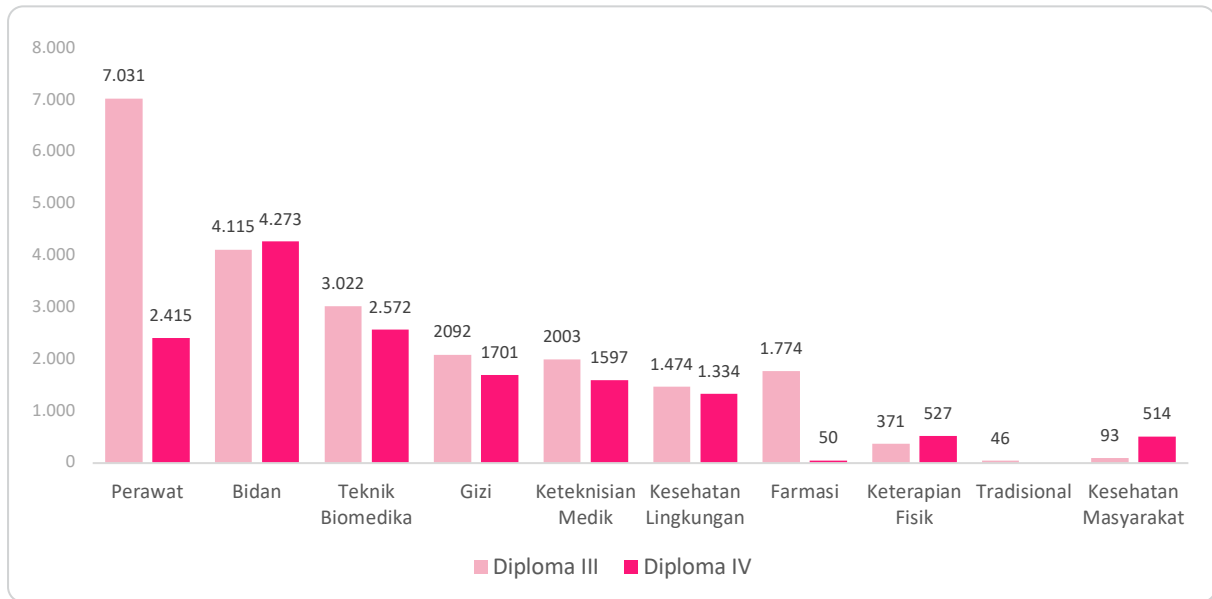
Terdapat 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 33 provinsi. Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan 509 program studi yang terdiri dari 300 program studi Diploma III (296 program studi reguler dan 4 program studi Pendidikan Jarak Jauh), 156 program studi Sarjana Terapan (Diploma IV), 49 program studi pendidikan profesi, dan 4 program studi Magister Terapan. Program studi di Poltekkes mencakup 24 rumpun ilmu kesehatan, antara lain:

1. Keperawatan
2. Kebidanan
3. Farmasi
4. Gizi
5. Kesehatan Lingkungan
6. Teknologi Laboratorium Medis
7. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
8. Fisioterapi
9. Radiologi
10. Kesehatan Gigi
11. Ortotik Prostetik
12. Keperawatan Anestesiologi
13. Okupasi Terapi
14. Teknik Gigi
15. Teknologi Elektromedis
16. Akupunktur
17. Promosi Kesehatan
18. Analisis Farmasi dan Makanan
19. Teknologi Bank Darah
20. Terapi Wicara
21. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
22. Asuransi Kesehatan
23. Pengawasan Epidemiologi
24. Jamu

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2025 sebanyak 40.297 orang, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 34.234 orang. Jumlah lulusan poltekkes tahun 2025 terdiri dari lulusan diploma III sebanyak 21.029 orang, diploma IV sebanyak 13.378 orang, program profesi sebanyak 5.539 orang, dan magister terapan sebanyak 223 orang. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 6.989 orang lulusan Diploma III dan 2.598 orang lulusan Diploma IV. Program studi Akupunktur memiliki lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 30 orang lulusan Diploma III dan 65 orang lulusan Diploma IV. Secara umum, lulusan Diploma III lebih banyak dibandingkan dengan Diploma IV untuk hampir semua program studi. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.g dan Lampiran 16.h.

GAMBAR 3.21
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025

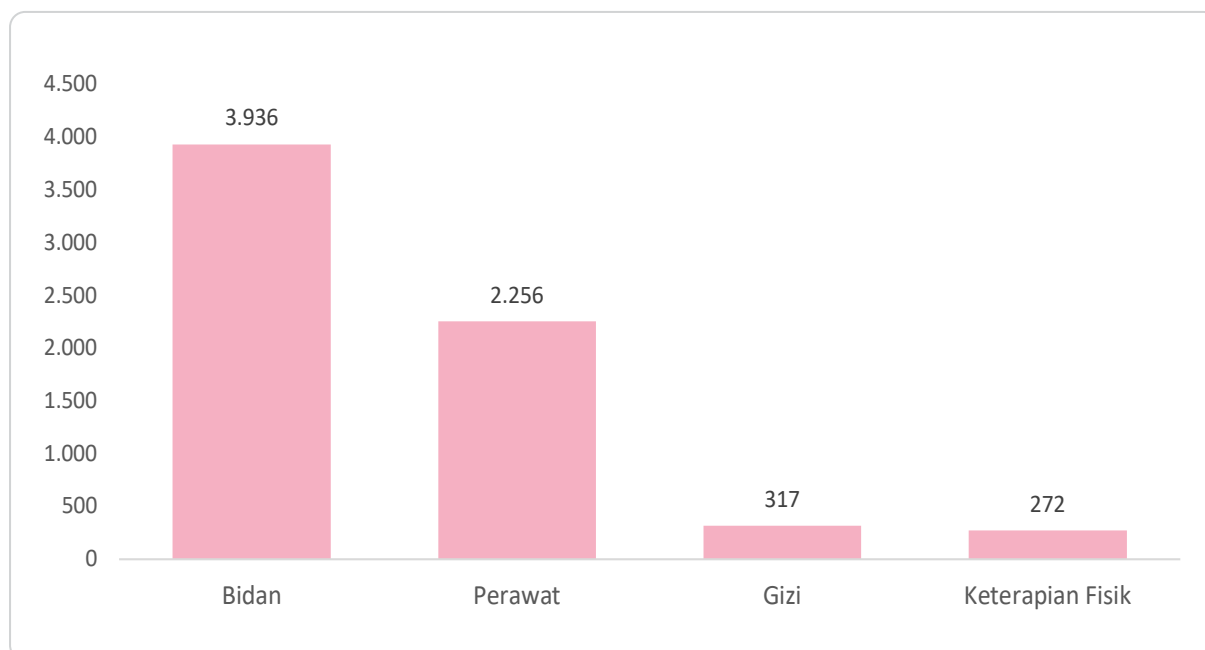


Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Selain jenjang diploma, pada tahun 2025 Poltekkes juga meluluskan 6.781 tenaga kesehatan dari program profesi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5.483 lulusan. Lulusan program profesi terdiri atas 3.936 lulusan Profesi Bidan, 2.256 lulusan Profesi Ners, 317 lulusan Profesi Dietisien, dan 272 lulusan Profesi Fisioterapi.

Sementara itu, jumlah lulusan program Magister (S2 dan S2 Terapan) pada tahun 2025 mencapai 126 orang, yang terdiri atas 57 lulusan Magister Terapan Kebidanan, 14 lulusan Magister Terapan Keperawatan, 19 lulusan Magister Terapis Gigi dan Mulut, serta 36 Magister Teknik Biomedika. Rincian mengenai jumlah lulusan program profesi dan magister di Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 3.35 dan 3.36.

GAMBAR 3.22
JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2025



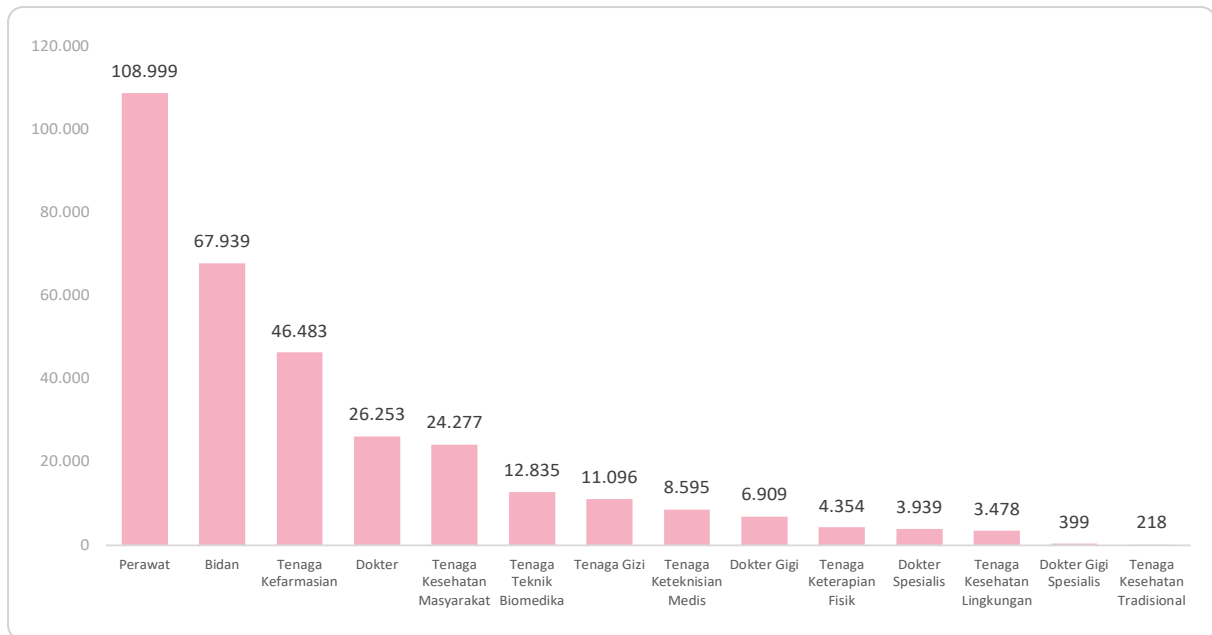
Sumber: Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 325.774 orang lulusan bidang kesehatan serta matematika dan ilmu pengetahuan alam dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai salah satu sarana produksi SDM kesehatan. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D3, D4, S1, Profesi, Spesialis 1, Spesialis 2, S2, S2 Terapan, dan S3. Perguruan tinggi, khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Jika dipilah berdasarkan rumpun tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 108.999 orang, diikuti oleh bidan sebanyak 67.939 orang, dan tenaga kefarmasian 46.483 orang. Jumlah lulusan perguruan tinggi paling sedikit adalah tenaga kesehatan tradisional yaitu sejumlah 218 orang.

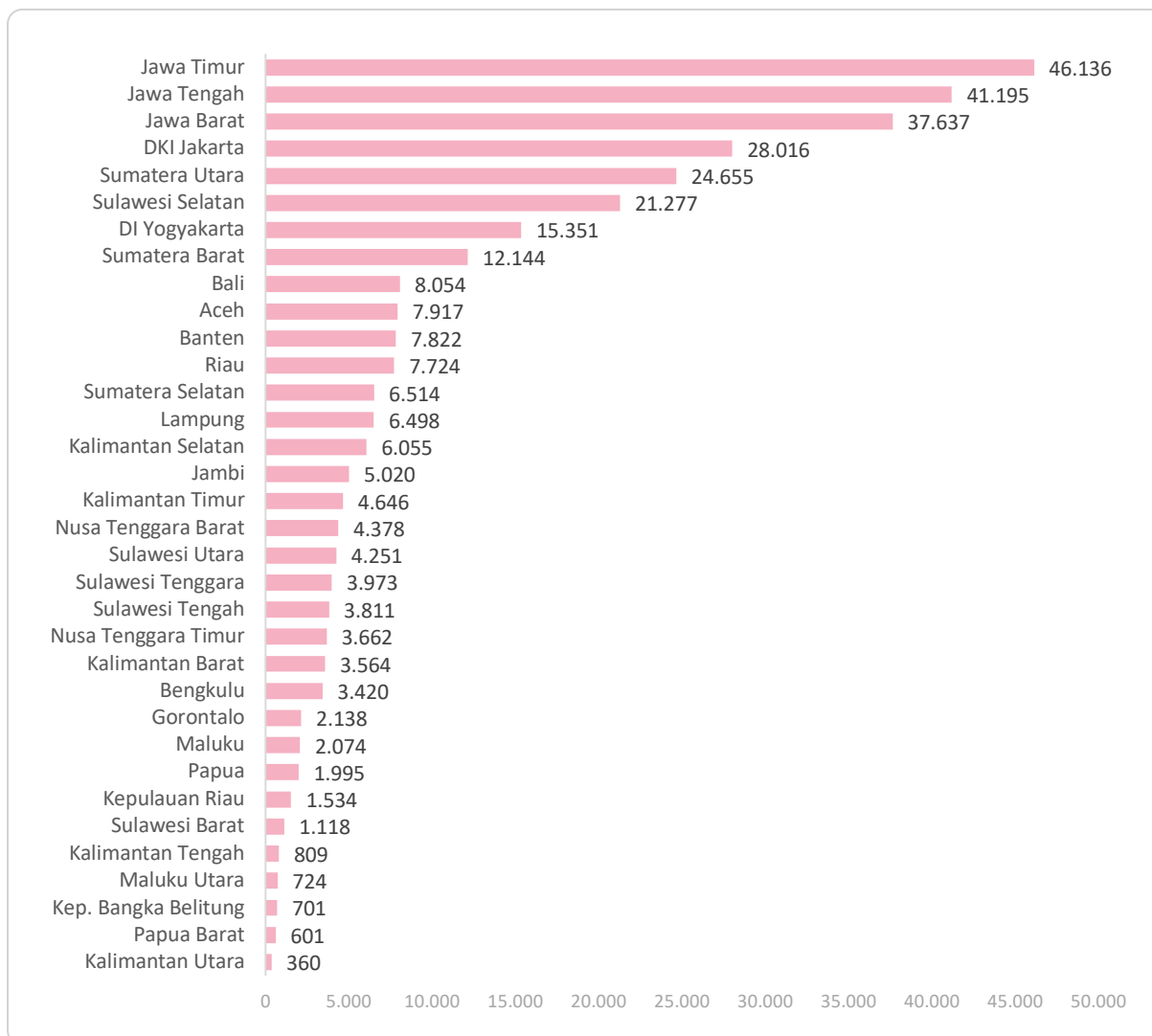
GAMBAR 3.23
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2024



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2026

Jika dilihat berdasarkan provinsi, diketahui bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak di Provinsi Jawa Timur sejumlah 46.136 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 41.195 orang, dan Jawa Barat sejumlah 37.637 orang. Provinsi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 360 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 3.37 dan 3.38.

GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2026

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN



BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan anggaran berbasis kinerja (*money follow program*), artinya Pemerintah harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas.

Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan dana yang mencakup penggalan, alokasi, dan pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan upaya kesehatan perorangan maupun masyarakat secara efektif dan efisien. Sistem ini bertujuan memastikan ketersediaan dana yang adil, merata, dan berkualitas, dengan komponen utama meliputi APBN/APBD (pemerintah), swasta, serta jaminan sosial seperti BPJS.

Pembiayaan kesehatan menurut World Health Organization (WHO) adalah fungsi sistem kesehatan yang berkaitan dengan mobilisasi, pengumpulan, dan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara adil. Tujuannya adalah memastikan akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi semua orang tanpa kesulitan finansial, yang dikenal sebagai Universal Health Coverage (UHC).

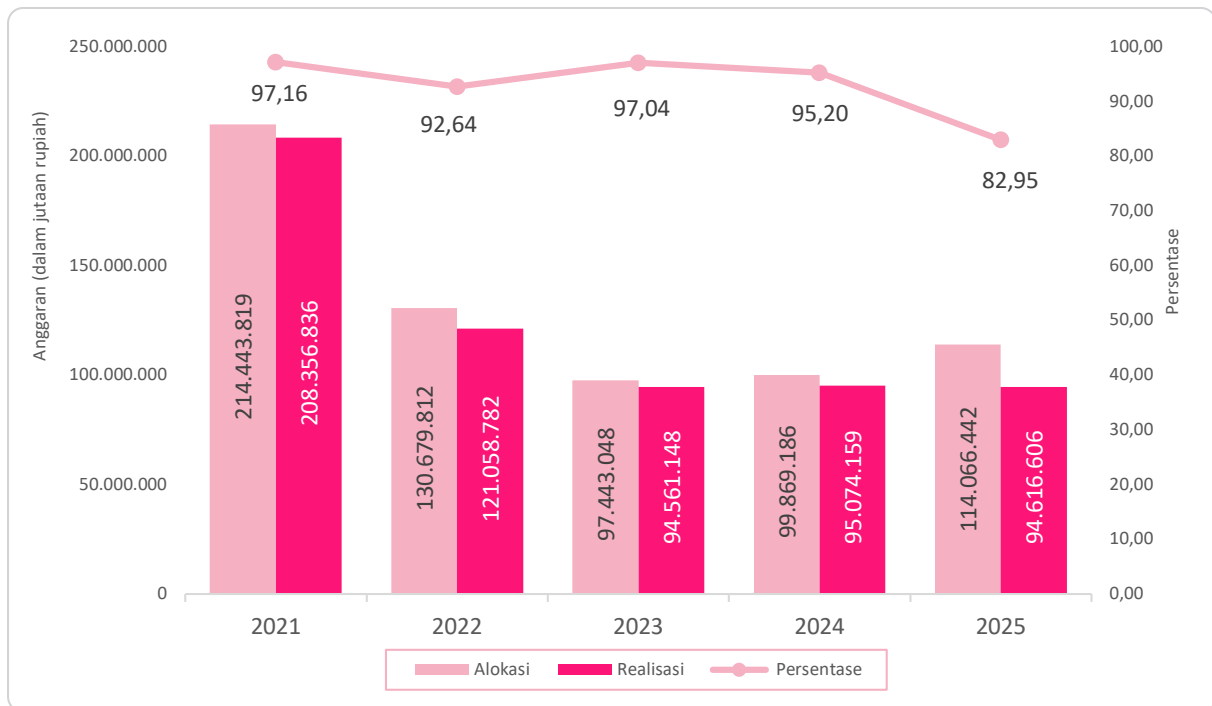
Di dalam bab ini akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kementerian kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 ini memiliki alokasi anggaran sebesar 114,06 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 94,61 triliun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 14,19 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Dibandingkan dengan persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2025 mengalami penurunan realisasi, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 sebesar 82,95%, sedangkan tahun 2024 sebesar 95,20%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2021-2025

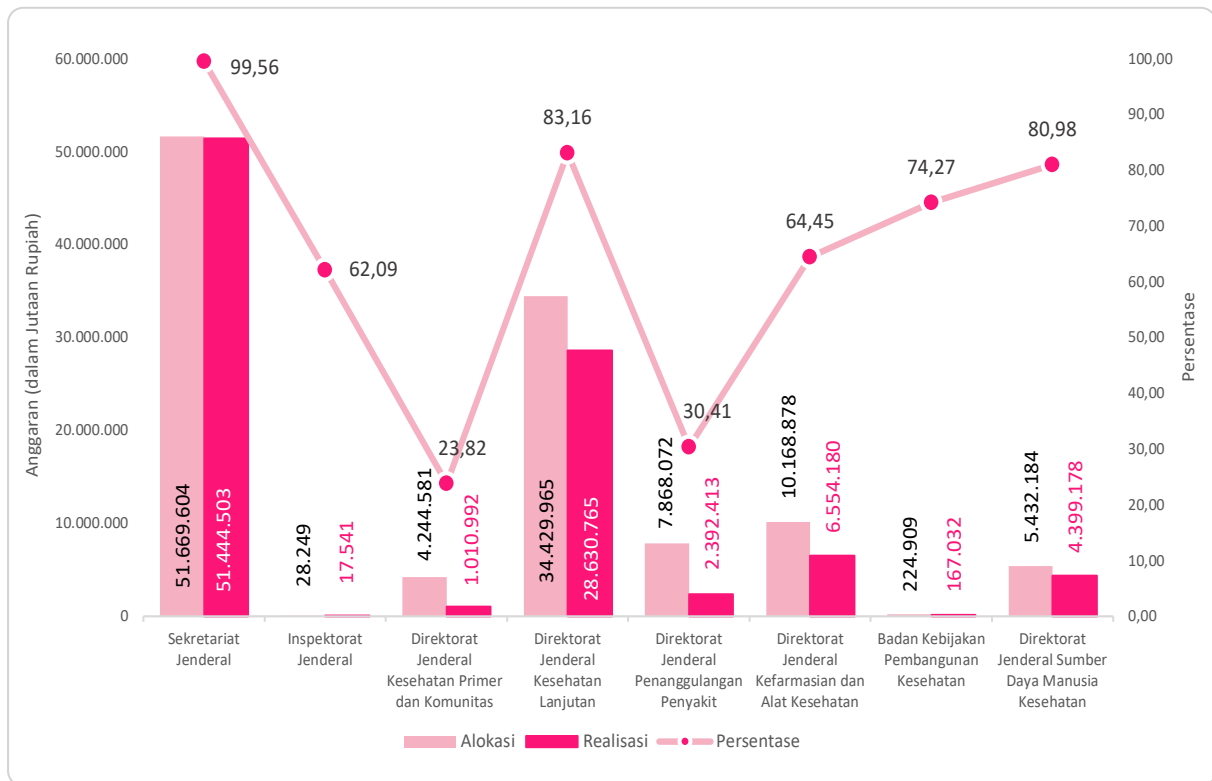


Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2026

Gambar 4.1 menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2021-2025 berfluktuasi, dengan alokasi dan realisasi tertinggi pada tahun 2021.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2, menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal sebesar 51 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 28,2 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 99,56%, sedangkan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan persentase realisasi sebesar 23,82%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2025 selengkapnya terdapat pada Lampiran 4.1.

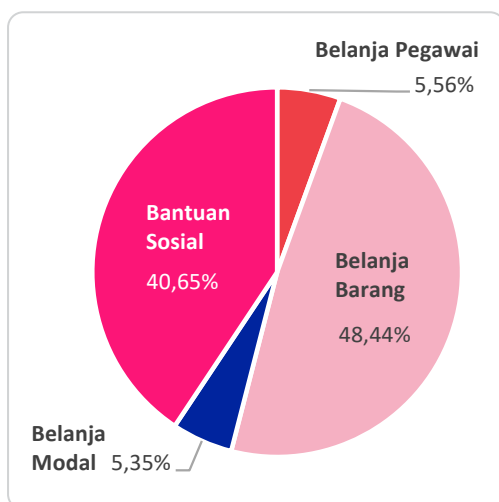
GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2025



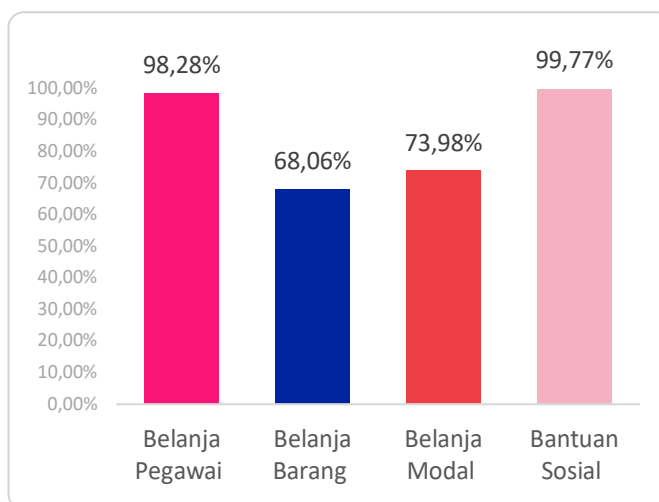
Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2026

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 114,06 triliun rupiah, sebanyak 46,36 triliun rupiah atau sebesar 40,65% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alokasi ini dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja barang sebesar 48,44%, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 5,56% dan belanja modal 5,35% (Gambar 4.3). Untuk persentase realisasi berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,7% dan yang paling rendah adalah belanja barang sebesar 68,06% (Gambar 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.2.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN
KESEHATAN BERDASARKAN JENIS
BELANJA TAHUN 2025



GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2025



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

B. DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu. Tujuan pemberian DAK untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Fisik 2025 diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

DAK Fisik menetapkan fokus pada pemenuhan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 merupakan dana dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan fasilitas prioritas nasional, seperti sektor pendidikan, jalan, air minum, sanitasi, dan kesehatan.

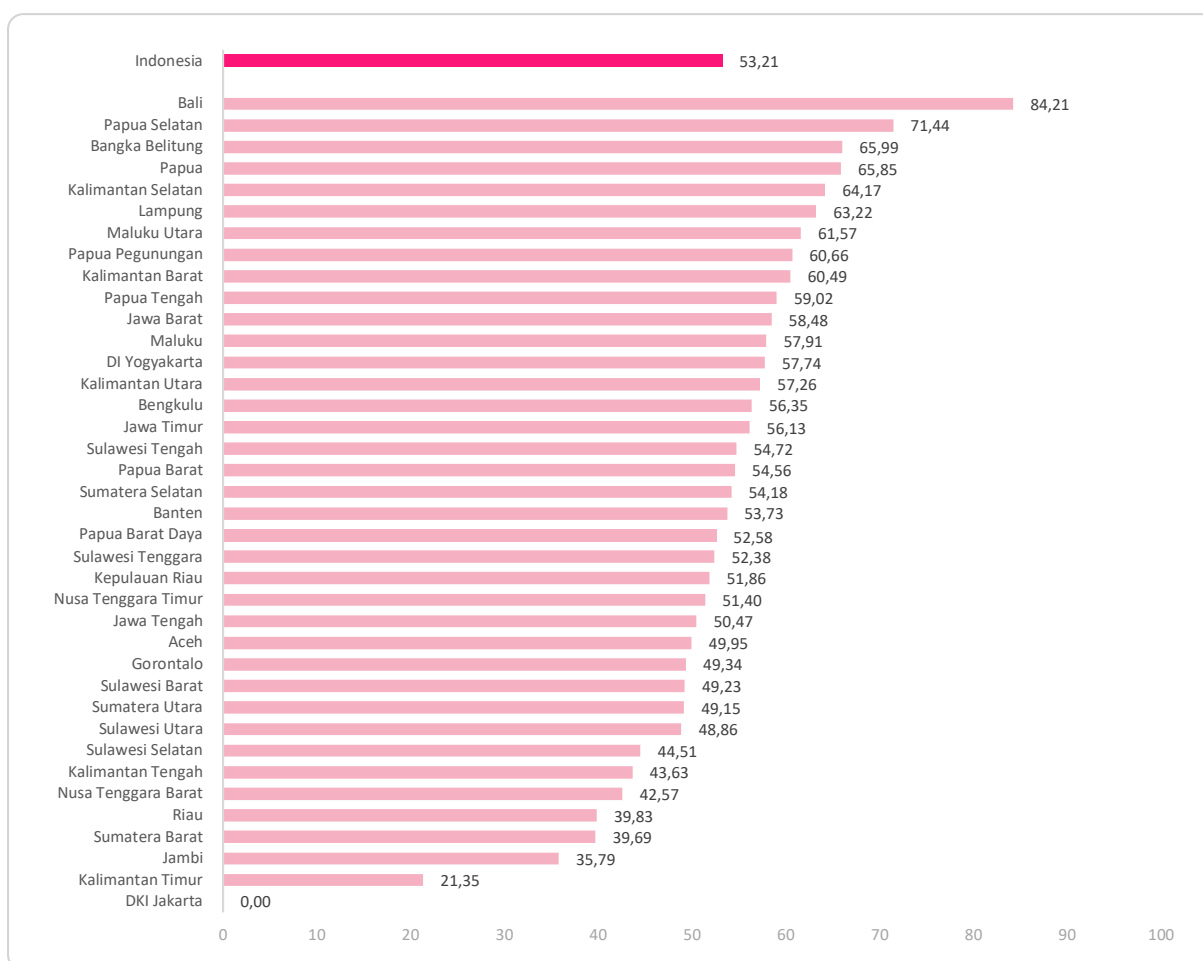
Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana di tingkat layanan primer (Puskesmas dan Pustu) serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses serta mutu layanan kesehatan nasional. Layanan Primer difokuskan pada pemenuhan unit layanan kesehatan (Puskesmas dan Pustu) di setiap desa, serta kelengkapan alat-alat kesehatan esensial di dalamnya. Sedangkan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam penguatan sarana untuk deteksi dan respons cepat masalah kesehatan di berbagai daerah.

Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 disalurkan dari RKUN ke RKUD. Penyalurannya dilakukan secara bertahap atau sekaligus (untuk pagu s.d. Rp1 miliar), dengan mekanisme pelaporan capaian output dan realisasi yang terintegrasi melalui aplikasi Kementerian Keuangan dan Bappenas. Data capaian hasil dan realisasi penyerapan dana dilaporkan sesuai Peraturan Presiden yang berlaku mengenai mekanisme pelaporan DAK Fisik. Pelaporan dilakukan

melalui simplifikasi sistem yang menghubungkan berbagai aplikasi pelaporan pemerintah daerah agar lebih efisien, meminimalisir kesalahan, dan mengurangi beban administrasi.

Pada tahun 2025, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sampai dengan tanggal 16 april 2026 secara nasional sebesar 53,21% dan masih bergerak hingga 22 juli 2026 dimana merupakan batas akhir penyampaian pelaporan sebagai syarat penyaluran. Dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Bali (84,21%) dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Timur (21,35%) serta DKI Jakarta (0%) tidak ada DAK fisik, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5 berikut:

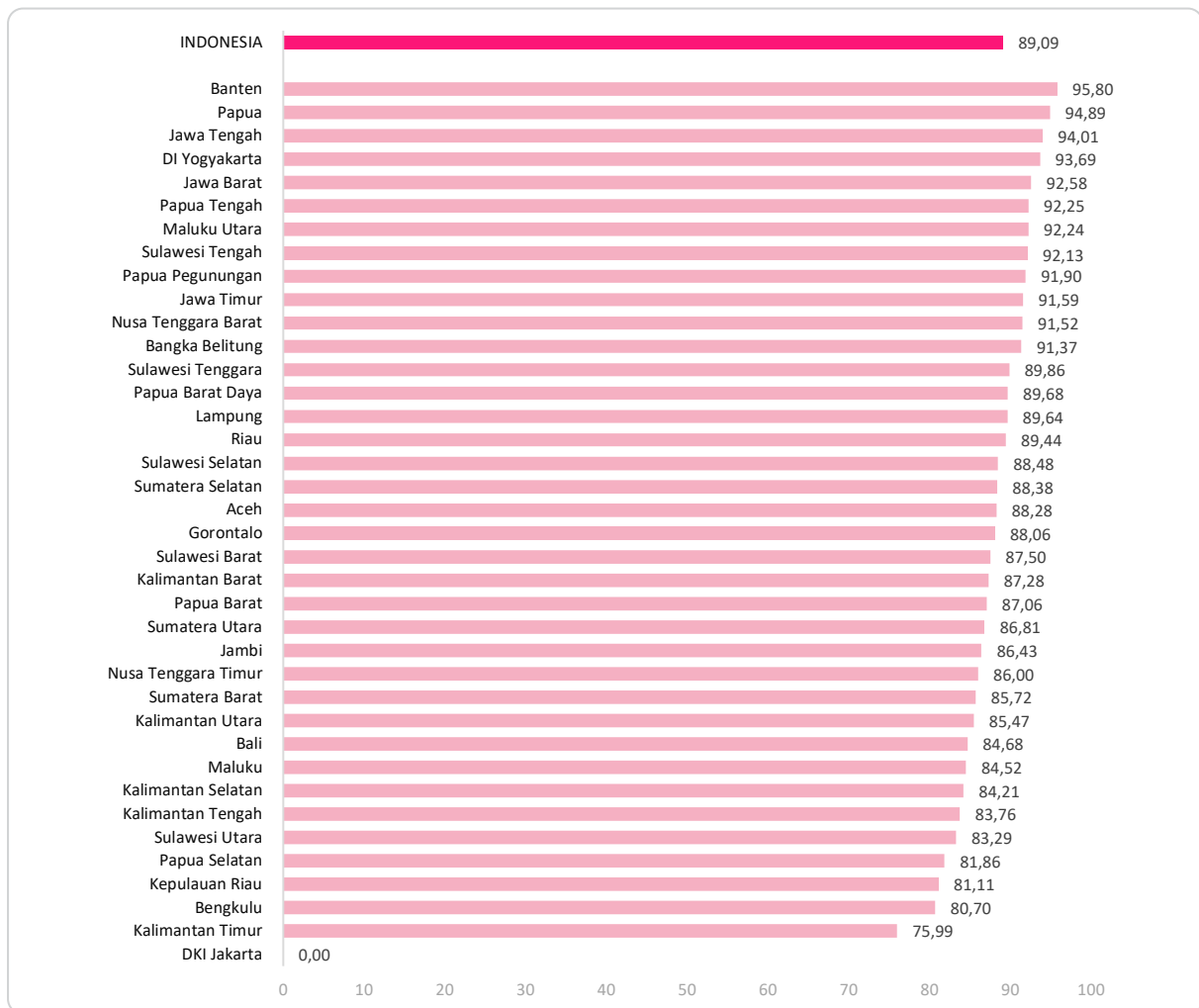
GAMBAR 4.5
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2026

Untuk realisasi DAK nonfisik Tahun 2025 secara nasional, realisasi DAK Nonfisik bidang kesehatan tahun 2025 mencapai 89,09%, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 84,53%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran di daerah. Berdasarkan wilayah, Provinsi Banten mencatat realisasi tertinggi sebesar 95,80%, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur mencatat realisasi terendah sebesar 75,99%. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh alokasi DAK Nonfisik pada tahun 2025. Perbandingan realisasi DAK Nonfisik antarprovinsi disajikan pada Gambar 4.6 berikut:

GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan terutama dalam rangka pelaksanaan transformasi sistem kesehatan di daerah. Selain itu juga mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu instrumen transfer ke daerah yang bertujuan mendukung pencapaian target kinerja daerah yang menjadi prioritas nasional. Salah satu jenis DAK yang dialokasikan pemerintah adalah DAK Nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, terutama dalam rangka pelaksanaan Transformasi Sistem Kesehatan di daerah.

Pada tahun 2025, kebijakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) difokuskan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, penanggulangan penyakit, pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola kesehatan. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pelaksanaan program kesehatan di daerah dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.

Pengalokasian Dana BOK tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana BOK berfungsi sebagai dukungan pendanaan yang melengkapi upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOK harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta menghindari duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.

Penyaluran Dana BOK dilaksanakan melalui dua skema, yaitu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran langsung ke rekening Puskesmas. Dana BOK yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi disalurkan ke RKUD Provinsi, sedangkan Dana BOK yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disalurkan ke RKUD Kabupaten/Kota. Adapun Dana BOK Puskesmas disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Puskesmas. Mekanisme penyaluran langsung tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sehingga Puskesmas dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanjanya berdasarkan kebutuhan program nasional dengan berpedoman pada prinsip penganggaran berbasis kinerja. Ketentuan ini menandai terjadinya transisi dalam pendekatan pendanaan kesehatan, dari yang sebelumnya berlandaskan pada prinsip *mandatory spending* menjadi *mandatory services*. Dengan demikian, penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, efektif, efisien dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Belanja kesehatan adalah alokasi dana atau pengeluaran yang digunakan untuk penyediaan fasilitas, penyelenggaraan, dan pemanfaatan berbagai layanan serta upaya kesehatan. Pengeluaran ini dapat dilakukan oleh pemerintah (melalui APBN/APBD), swasta, maupun perorangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Pelaksanaan pendanaan kesehatan dipantau dan dievaluasi setiap tahun oleh Menteri Kesehatan, baik pada tingkat nasional maupun regional guna memastikan tercapainya tujuan Pembangunan Kesehatan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk akun belanja kesehatan nasional, yaitu *National Health Accounts* (NHA) untuk tingkat nasional, *Provincial Health Accounts* (PHA) untuk tingkat provinsi, dan *District Health Accounts* (DHA) untuk tingkat kabupaten/kota. Ketiga jenis akun ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai aliran pendanaan kesehatan yang mencakup sumber dana, mekanisme pendanaan, institusi pengelola dana, penyedia layanan, serta tujuan penggunaan belanja tersebut. Informasi dari NHA dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menilai input terkait efisiensi, efektivitas, serta keselarasan (sinergi) antara belanja kesehatan dengan arah kebijakan program prioritas dan regulasi yang berlaku.

Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (SHA) 2011, yang merupakan standar internasional, sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan posisi Indonesia dengan negara-negara lain. Data NHA Indonesia juga telah dimasukkan dalam *World Health Report* yang diterbitkan setiap tahun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan data NHA 2024, tercatat adanya peningkatan belanja kesehatan pada sektor publik, dari Pemerintah Daerah maupun Asuransi Kesehatan Sosial. Peningkatan ini berkontribusi terhadap penurunan proporsi pengeluaran langsung oleh rumah tangga (*Out-of-Pocket/ OOP*).

Peningkatan kontribusi sektor publik dalam belanja kesehatan, sebagaimana tercermin dalam data NHA, menunjukkan penguatan peran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memegang peranan sentral menjadi tulang punggung sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2014, JKN bertujuan untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/ UHC*) dengan prinsip gotong royong. Peserta membayar iuran sesuai dengan segmen kepesertaan, sementara pemerintah menanggung iuran peserta tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada tahun 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 99,4% penduduk Indonesia, menjadikannya salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/*Total Health Expenditure* (THE)

Total Belanja Kesehatan (TBK), dalam publikasi ini indikator yang akan digunakan adalah THE. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan Total Belanja Kesehatan (TBK) Indonesia selama periode 2015–2024. Secara umum, nilai nominal belanja kesehatan terus mengalami peningkatan, sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, perluasan cakupan jaminan kesehatan, serta peningkatan investasi di sektor kesehatan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), proporsi belanja kesehatan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Indikator persentase TBK terhadap PDB menggambarkan besarnya sumber daya ekonomi nasional yang dialokasikan untuk sektor kesehatan dan lazim digunakan untuk membandingkan tingkat pengeluaran kesehatan antarnegara. Di sisi lain, belanja kesehatan per kapita juga menunjukkan tren meningkat, yang mencerminkan bertambahnya pengeluaran kesehatan rata-rata per penduduk dari waktu ke waktu.

TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2014-2024

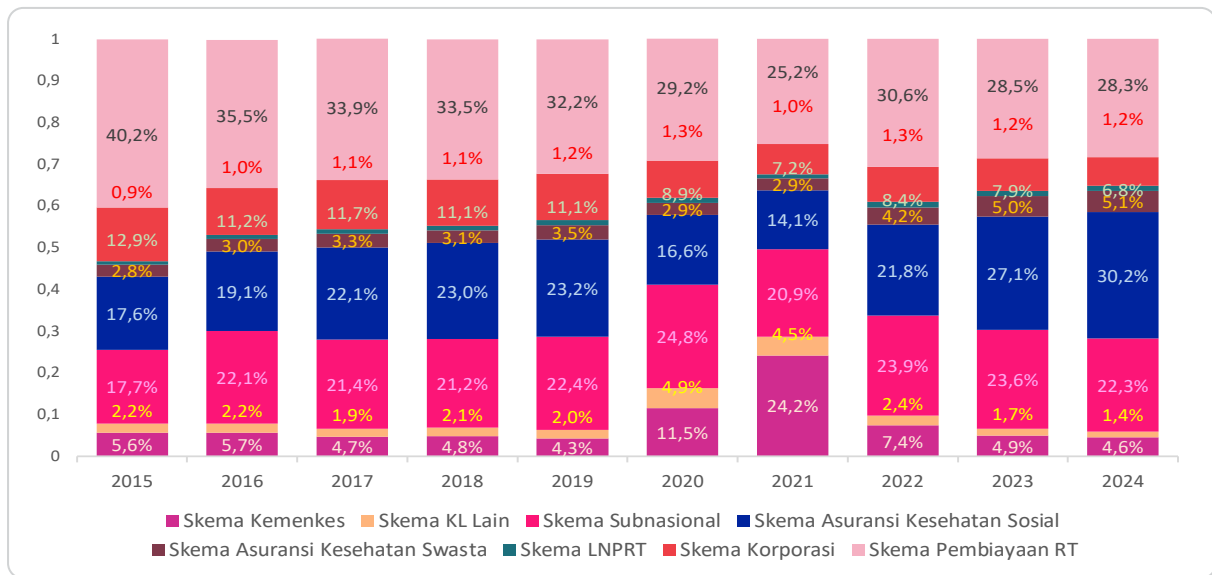
Tahun	Total Belanja Kesehatan/TBK (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US \$)	% TBK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2015	358,3	1.402.754	104,8	3,10%
2016	401,9	1.553.424	116,7	3,20%
2017	421,8	1.610.502	120,4	3,10%
2018	448,1	1.690.807	118,8	3,00%
2019	488,4	1.822.048	128,8	3,10%
2020	564,2	2.081.726	142,8	3,70%
2021	678,1	2.475.091	173	4,00%
2022	567,6	2.050.677	138,1	2,90%
2023	614,5	2.197.930	144,3	2,90%
2025	639,9	2.267.135	143	2,90%

Sumber: Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Gambar 4.7 berikut menunjukkan proporsi belanja kesehatan menurut skema pendanaan kesehatan yang meliputi sektor publik dan sektor non publik. Sektor publik mencakup belanja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN dan Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK). Sementara itu, sektor non publik meliputi Asuransi Kesehatan Swasta, Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Korporasi, dan Pengeluaran langsung Rumah Tangga (*Out of Pocket/OOP*).

Peningkatan proporsi belanja kesehatan melalui skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran strategis dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penurunan proporsi skema OOP yang selama ini menjadi indikator beban finansial masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Secara proporsi, skema OOP mengalami penurunan dari 43,7% pada tahun 2014 menjadi 28,3% pada tahun 2024. Meskipun demikian, secara nominal OOP tetap meningkat dari Rp141,8 triliun menjadi Rp181,3 triliun dalam periode yang sama. Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

GAMBAR 4.7
PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN
DI INDONESIA TAHUN 2015-2024



Sumber: Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Secara historis, belanja kesehatan nasional didominasi oleh pendanaan dari sektor nonpublik, terutama yang bersumber dari pengeluaran langsung rumah tangga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor publik terus mengalami peningkatan, baik dari sisi proporsi maupun nilai nominal. Pada tahun 2015, sektor publik menyumbang 43,1% dari total belanja kesehatan nasional dan meningkat menjadi 58,5% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan belanja pada skema asuransi kesehatan sosial dan skema subnasional.

2. Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan transformasi dari berbagai skema jaminan kesehatan yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah oleh berbagai lembaga di Indonesia. Sebelum JKN diimplementasikan secara nasional, sistem jaminan kesehatan di Indonesia bersifat terfragmentasi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi landasan hukum skema jaminan kesehatan ke dalam satu sistem yang terpadu dan menyeluruh. JKN telah diimplementasikan mulai tahun 2014 dengan penunjukan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan.

JKN bertujuan untuk mewujudkan *universal health coverage* (UHC) di Indonesia dengan memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program JKN merupakan bentuk nyata amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

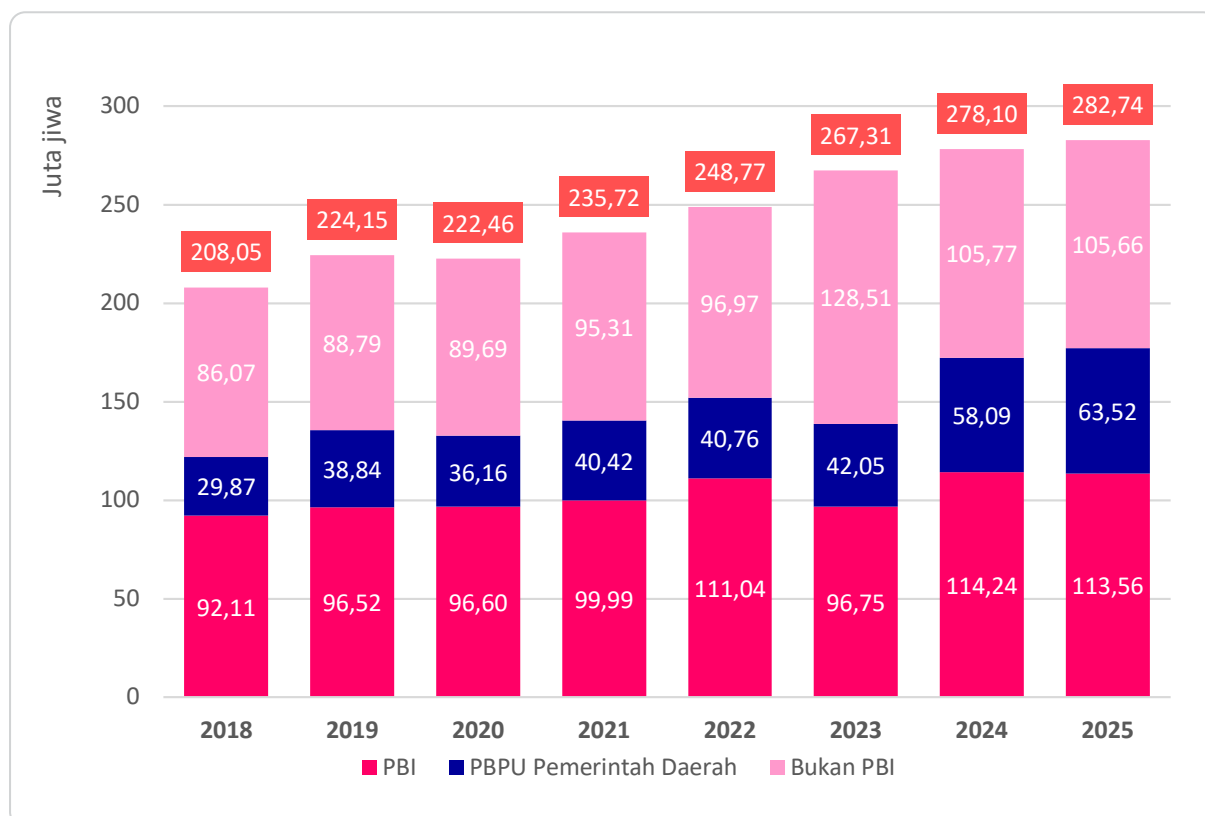
Penyelenggaraan JKN mengacu pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip asuransi sosial meliputi beberapa aspek fundamental, yaitu kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah. Sistem ini memungkinkan terjadinya subsidi silang yang memastikan seluruh masyarakat, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Sedangkan prinsip ekuitas menjamin kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis tanpa dikaitkan dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ekuitas dalam JKN mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antara berbagai kelompok sosial ekonomi. Dengan sistem ini, seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan medis mereka, tanpa terhalang oleh keterbatasan finansial.

Program JKN dirancang untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia melalui sistem kepesertaan yang inklusif. Kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan. PBI Jaminan Kesehatan adalah kelompok peserta yang terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Penetapan status PBI dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan kriteria dan data yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Di luar segmen PBI, terdapat masyarakat dengan kriteria tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang masuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, kelompok Bukan PBI terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Struktur kepesertaan JKN yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam perlindungan Kesehatan.

Meski capaian kepesertaan sangat tinggi, tantangan utama JKN masih berkisar pada aspek keaktifan peserta JKN (tingkat peserta non aktif yang masih tinggi), kualitas layanan, keberlanjutan pendanaan program, serta kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta mandiri. Selain itu, perlu upaya sistematis untuk memastikan bahwa peserta benar-benar mendapatkan manfaat layanan yang berkualitas tanpa hambatan administratif maupun ketidaksetaraan dalam akses. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas serta pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, pembenahan sistem rujukan, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan program.

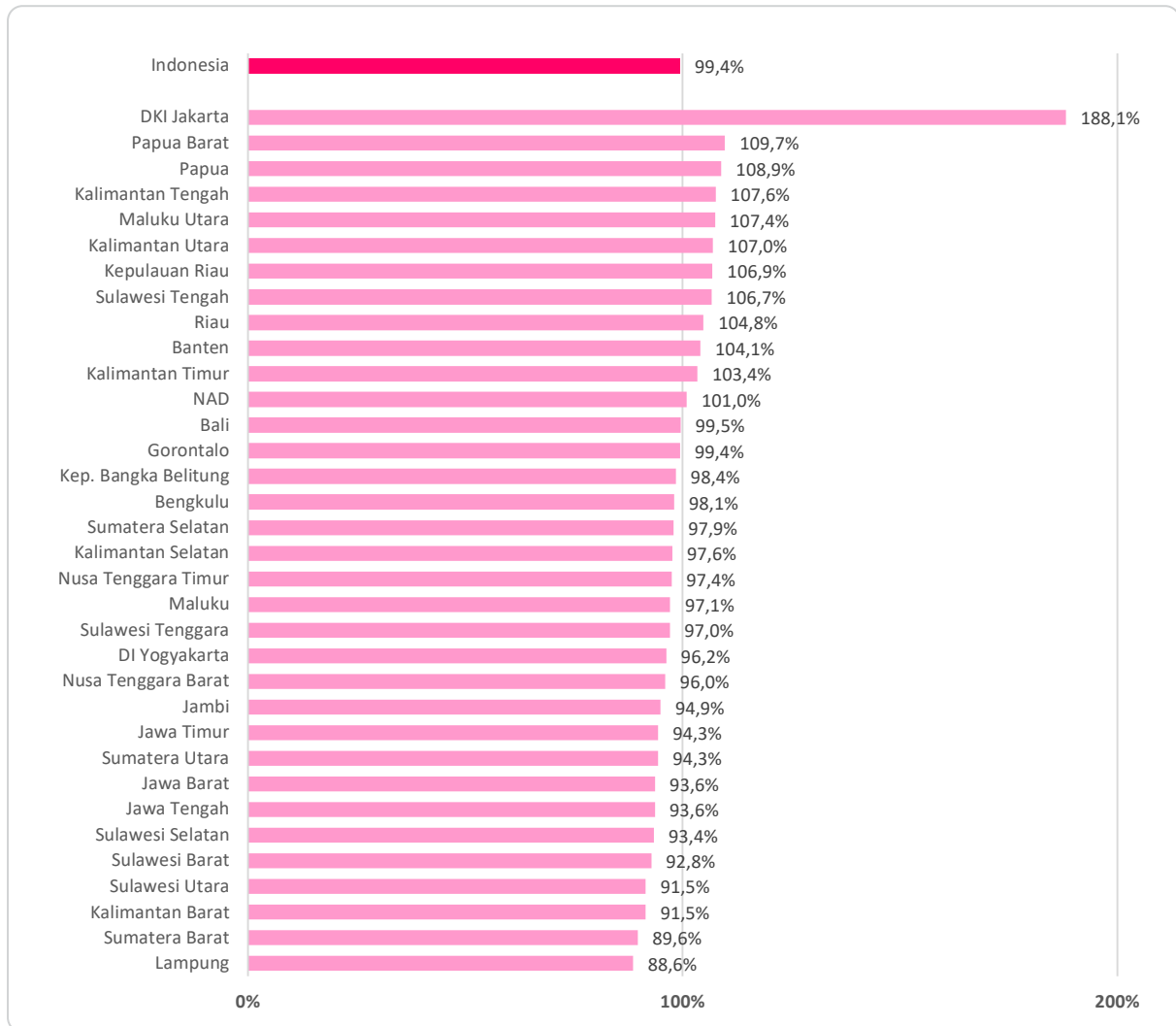
GAMBAR 4.8
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI INDONESIA TAHUN 2018-2025



Sumber: Laporan BPJS Kesehatan, Desember 2025

Pada tahun 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 99,4% penduduk Indonesia atau sebanyak 282,7 juta jiwa. Jumlah tersebut mencakup 233,5 juta peserta JKN aktif dan 49,2 juta peserta JKN non aktif. Mayoritas peserta JKN berasal dari segmen penerima bantuan (Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda) yang mencapai 177,1 juta jiwa atau 62,6% dari total peserta JKN. Namun, meskipun total kepesertaan JKN mengalami peningkatan, pertumbuhan peserta di luar segmen penerima bantuan iuran menunjukkan tren penurunan 110 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa perlu upaya lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan, untuk mendorong partisipasi kepesertaan aktif JKN bagi masyarakat mampu ke dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri, guna menjaga keberlanjutan ekosistem JKN.

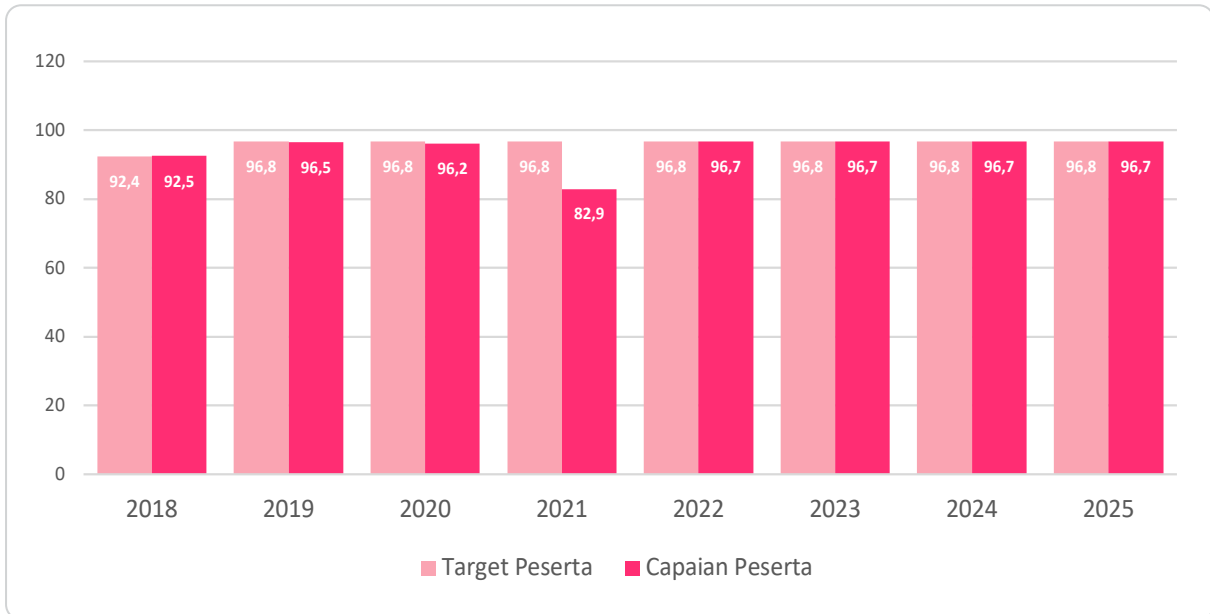
GAMBAR 4.9
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Laporan BPJS Kesehatan, Desember 2025

Pada tahun 2025 secara nasional, cakupan kepesertaan JKN baik yang berstatus aktif dan non-aktif mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 99,4% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN). Namun, masih terdapat tantangan terhadap tingginya peserta non aktif karena menunggak iuran dan mutasi (berpindah segmen kepesertaan) yang mencapai 49,2 juta jiwa atau 17,3% dari total penduduk. Sebagaimana diketahui, syarat bagi peserta JKN mendapatkan manfaat dari program JKN adalah kepesertaan aktif, sehingga peserta JKN yang non aktif tidak dapat memperoleh manfaat dari JKN. Oleh karena itu, meskipun cakupan kepesertaan terus meningkat, namun mendorong peningkatan keaktifan peserta JKN menjadi aspek krusial dalam memastikan manfaat program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Rincian data cakupan kepesertaan JKN di Indonesia menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 4.6.

GAMBAR 4.10
TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2025



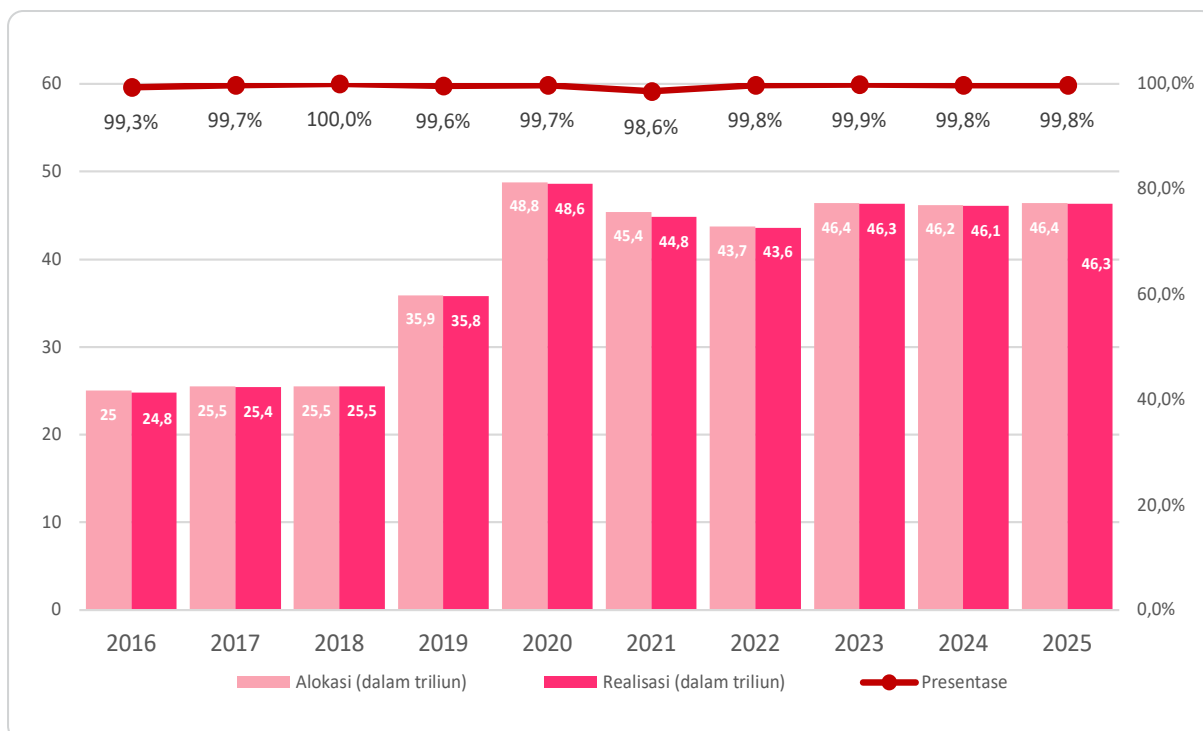
Sumber: Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Program **Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)** merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan orang tidak mampu melalui pembiayaan iuran oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu serta mendukung pencapaian cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*).

Peserta PBI JK ditetapkan oleh Menteri Sosial. Data kepesertaan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. DTSEN mulai digunakan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Mei Tahun 2025. Sebelumnya data kepesertaan PBI JK bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tahun 2025 Menteri Sosial menetapkan peserta PBI JK sebanyak 96.800.000 jiwa setiap bulan. Penetapan tersebut dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Data yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBI JK dan menjadi dasar pembayaran iuran dari Kementerian Kesehatan ke BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.11
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2016-2025

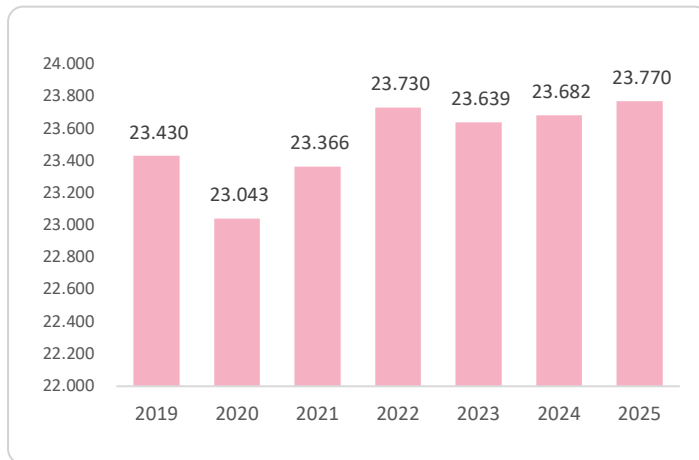


Sumber: P2JK (2016 s.d 2021), Biro Keuangan dan BMN (2022 s.d 2024), Pusbikes (2025), Kemenkes RI, 2026

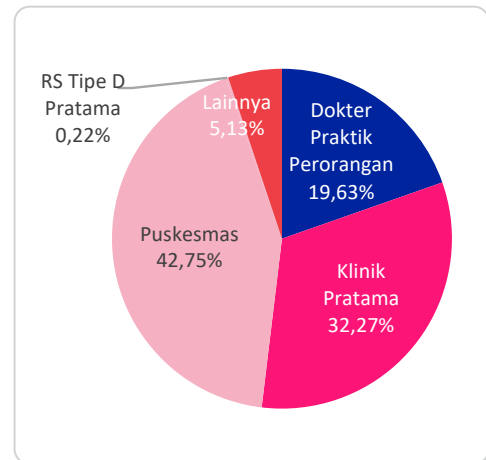
Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan iuran PBI JK ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tren alokasi dan realisasi anggaran PBI sebagaimana terlihat pada Gambar 4.11. Alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan target data kepesertaan PBI JK setiap tahunnya. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembiayaan PBI tetap terjaga untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan orang tidak mampu.

GAMBAR 4.12
JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN
BPJS KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019-2025



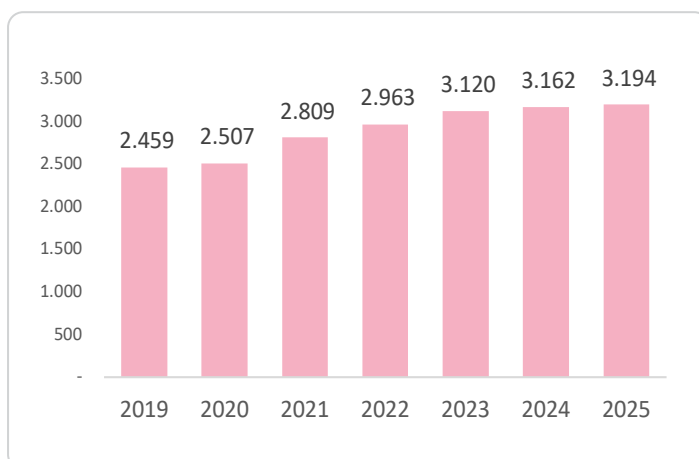
GAMBAR 4.13
PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA
DENGAN BPJS DI INDONESIA
TAHUN 2025



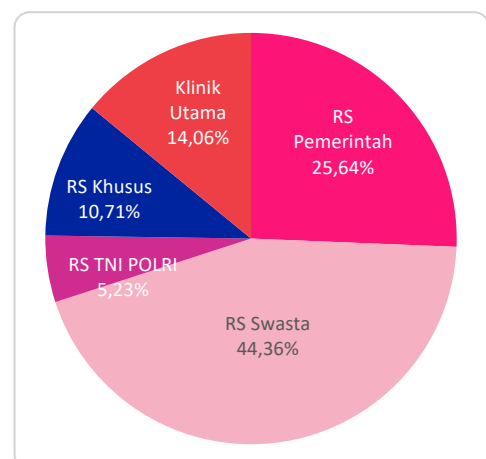
Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2025

Jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2025 mengalami peningkatan, dari sebanyak 22.430 FKTP pada tahun 2019 menjadi 23.770 FKTP pada tahun 2025. Jenis FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbanyak adalah Puskesmas yaitu sebesar 42,75%, kemudian Klinik Pratama sebesar 32,27%, diikuti dengan Dokter Praktik Perorangan sebesar 19,63%. Sebaran ini mencerminkan peran puskesmas dan klinik sebagai gate keeper dalam mendukung layanan Kesehatan primer dalam program JKN. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.7.

GAMBAR 4.14
JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS
KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2025



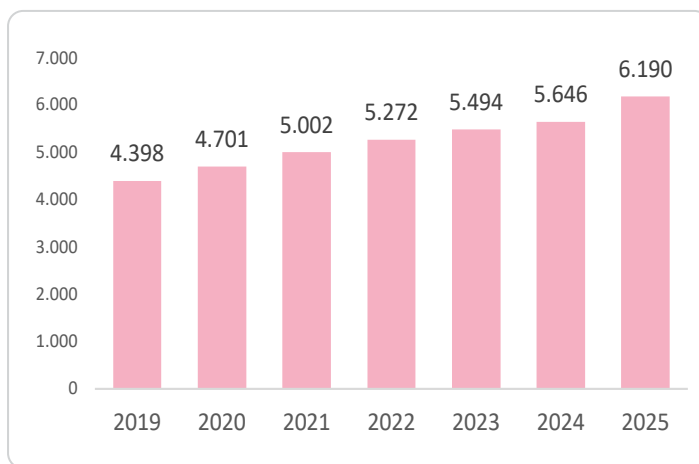
GAMBAR 4.15
PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA
DENGAN BPJS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025



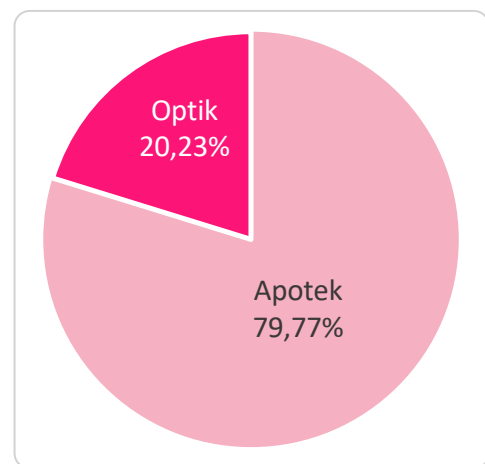
Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2025

Sama halnya dengan FKTP, perkembangan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terjadi peningkatan dari 2.459 FKRTL pada tahun 2019 menjadi 3.194 FKRTL pada tahun 2025. Jenis FKRTL terbanyak adalah Rumah Sakit Swasta, yaitu sebesar 44,4%, Rumah Sakit Pemerintah 25,6%, Klinik Utama 14,1%, Rumah Sakit Khusus 10,7%, dan Rumah Sakit TNI/POLRI sebesar 5,2% dari seluruh FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.16
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG
BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019-2025



GAMBAR 4.17
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN
PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN
BPJS KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: BPJS Kesehatan, Desember 2025

Selain FKTP dan FKRTL, fasilitas kesehatan penunjang juga melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2025, jumlah fasilitas kesehatan penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tercatat sebanyak 6.190, terdiri dari 4.938 apotek (79,7%) dan 1.252 optik (20,2%). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah apotek yang bekerja sama, dari 4.249 menjadi 4.938. Sebaliknya, jumlah optik justru mengalami peningkatan, dari 1.217 pada tahun 2024 menjadi 1.252 pada tahun 2025, sehingga secara keseluruhan tetap terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan penunjang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yakni 5.646 di Tahun 2023 menjadi 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di Tahun 2025.

Namun demikian, peningkatan jumlah fasilitas Kesehatan maupun penunjang yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan juga perlu diikuti dengan pemerataan sebarannya diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut untuk mendukung pemerataan akses peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tujuan *universal health coverage* yang menjadi landasan pelaksanaan program JKN dapat tercapai.

TABEL 4.2
PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMENT KEPESERTAAN
DI INDONESIA TAHUN 2023 – 2025

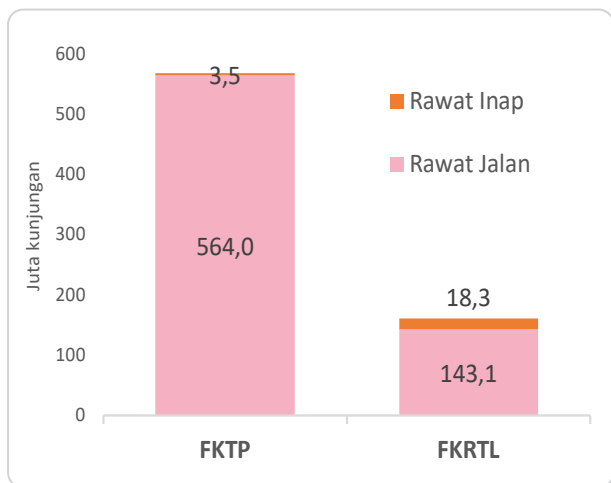
No	Jenis iuran	Pendapatan iuran	
		2024	2025
1	PBI	48.506.458	48.656.922
2	PBPU Pemerintah Daerah	18.758.843	21.137.128
3	Bantuan iuran		
	a. Bantuan iuran Pemerintah atas PBPU & BP Mandiri	281.892	1.152.636
	b. Bantuan iuran Pemerintah atas PBPU Pemda	3.741.958	4.216.793
4	Bukan PBI		
	a. PPU Penyelenggara Negara	30.978.318	32.988.223
	b. BP Penyelenggara Negara	2.582.814	2.671.310
	c. PPU Badan Usaha	45.917.453	50.683.063
	b. PBPU dan BP	14.483.910	14.789.866
Total		165.251.646	176.295.941

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Desember 2025

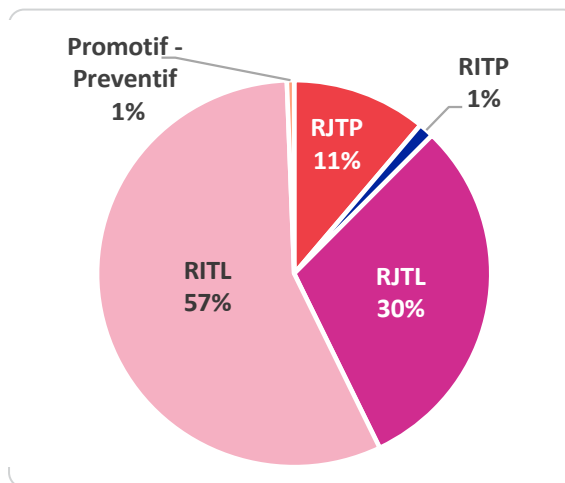
Total pendapatan iuran sampai dengan bulan 31 Desember 2025 adalah Rp176,295 Triliun (unaudited), dimana meningkat dari pendapatan iuran tahun 2023 yang telah selesai diaudit (audited), yakni 165,251 Triliun. Pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segment kepesertaan terbesar yaitu pada segment Penerima Bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 48,6 Triliun (27,6%), terbanyak kedua dari segment Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan usaha sebesar Rp50,7 Triliun (28,7%). Selanjutnya dari segment Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara sebesar Rp33 Triliun (18,7%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sebesar Rp21,1 Triliun (12,0%), segment PBPU dan BP Mandiri sebesar Rp14,8 Triliun (8,4%), Bantuan iuran PBPU Pemda sebesar Rp4,2 Triliun (2,4%), Bukan Pekerja Penyelenggara Negara sebesar Rp2,7 Triliun (1,56), dan pada segment Bantuan iuran atas PBPU dan BP sebesar Rp1,2 Triliun (0,7%) dari total pendapatan iuran.

Jika dibandingkan dengan data Tahun 2024, secara keseluruhan pendapatan iuran BPJS Kesehatan meningkat sebesar Rp11,004 Triliun. Hampir semua pendapatan iuran di setiap segment meningkat di Tahun 2025.

GAMBAR 4.19
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2025



GAMBAR 4.20
BEBAN JAMINAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Desember 2025

Pada tahun 2025, jumlah pelayanan Kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah kunjungan rawat jalan di FKTP atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanyak 564 juta kunjungan, sedangkan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebesar 3,5 juta kunjungan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) merupakan yang terbesar pemanfaatannya, yaitu sebesar Rp 107,7 Triliun atau 56,6% dari seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan.

Total pemanfaatan pelayanan tingkat lanjutan oleh peserta JKN mencapai 161,4 juta kasus, dengan total biaya pelayanan sebesar Rp190,3 triliun. Dari jumlah tersebut, penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit katastropik menyumbang sebanyak 59.9 juta kasus atau sekitar 8,5% dari total kasus yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan, dan dari sisi biaya mencapai Rp50,28 triliun atau 26,4% dari jumlah pembiayaan layanan tingkat lanjutan.

TABEL 4.3
JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Katastropik	Kasus	Biaya (RpJuta)
1	Jantung	29.734.406	17.345.779
2	Gagal ginjal	12.686.971	13.376.180
3	Kanker	7.192.844	10.306.063
4	Stroke	9.531.253	7.210.821
5	Sirosis Hati	311.327	278.073
6	Talasemia	398.107	852.738
7	Hemofilia	84.825	909.635
TOTAL		59.939.733	50.279.288

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Desember 2025

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat delapan penyakit katastropik dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penyakit katastropik yang disajikan merupakan penyakit kronis yang dari sisi pengeluaran peserta diperkirakan dapat membebani finansial rumah tangga. Biaya terbesar dari penyakit katastropik tersebut, biaya terbesar adalah penyakit jantung, yang membutuhkan Rp17,3 Triliun untuk pembiayaan. Penyakit jantung juga merupakan jumlah kasus penyakit yang terbanyak dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 29,7 juta kasus. Penyakit katastropik dengan biaya terendah yaitu Sirosis Hati, yang dibiayai BPJS Kesehatan sebesar Rp278 Miliar dengan sebanyak 311.327 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari rata-rata pembiayaan per kasus, tiga teratas penyakit dengan biaya terbesar per kasus merupakan penyakit kronis, yaitu Jantung, Gagal ginjal, dan Stroke.

BAB V. KESEHATAN KELUARGA



BAB V. KESEHATAN KELUARGA

Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

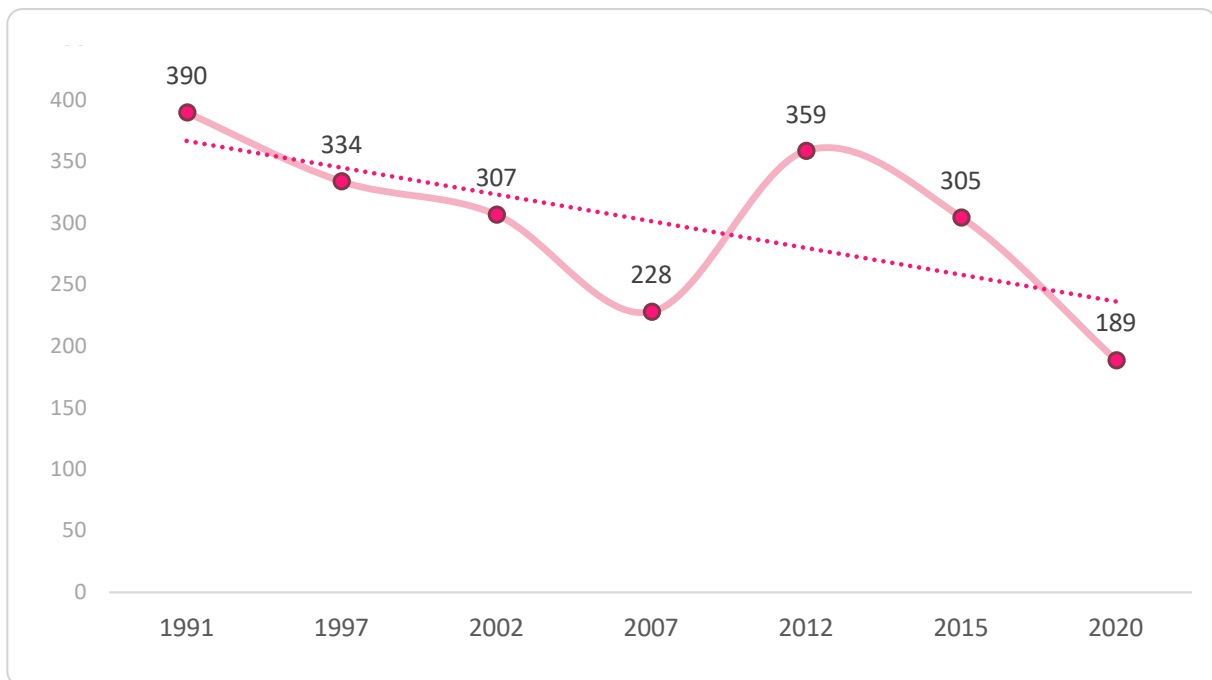
Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum, sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu merupakan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan program Kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu yang terus menurun merupakan tujuan dari Pembangunan Kesehatan. Kematian ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Sampai dengan saat ini Angka Kematian Ibu, masih didapatkan dari data Survei dan Sensus. Secara umum, terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SGDs yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

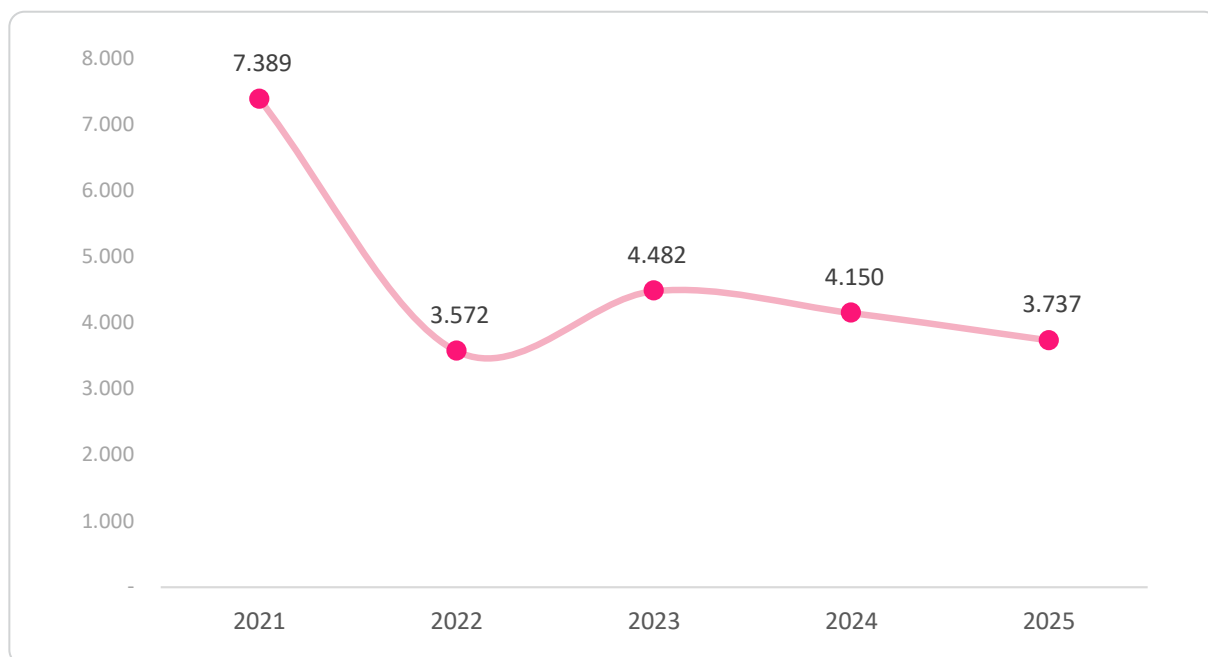
GAMBAR 5.1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991–2020



Sumber: BPS, SDKI 1991-2012
*AKI tahun 2020 merupakan hasil SP 2020

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program Kesehatan Keluarga di Kementerian Kesehatan pada tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun, meskipun terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu tercatat sebesar 7.389 kasus, kemudian menurun tajam pada tahun 2022 menjadi 3.572 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 4.482 kasus. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu kembali menurun menjadi 4.150 kasus, dan terus menurun pada tahun 2025 menjadi 3.737 kasus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi kenaikan pada periode 2022–2023, secara umum jumlah kematian ibu selama tahun 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun seperti tampak pada grafik di bawah ini.

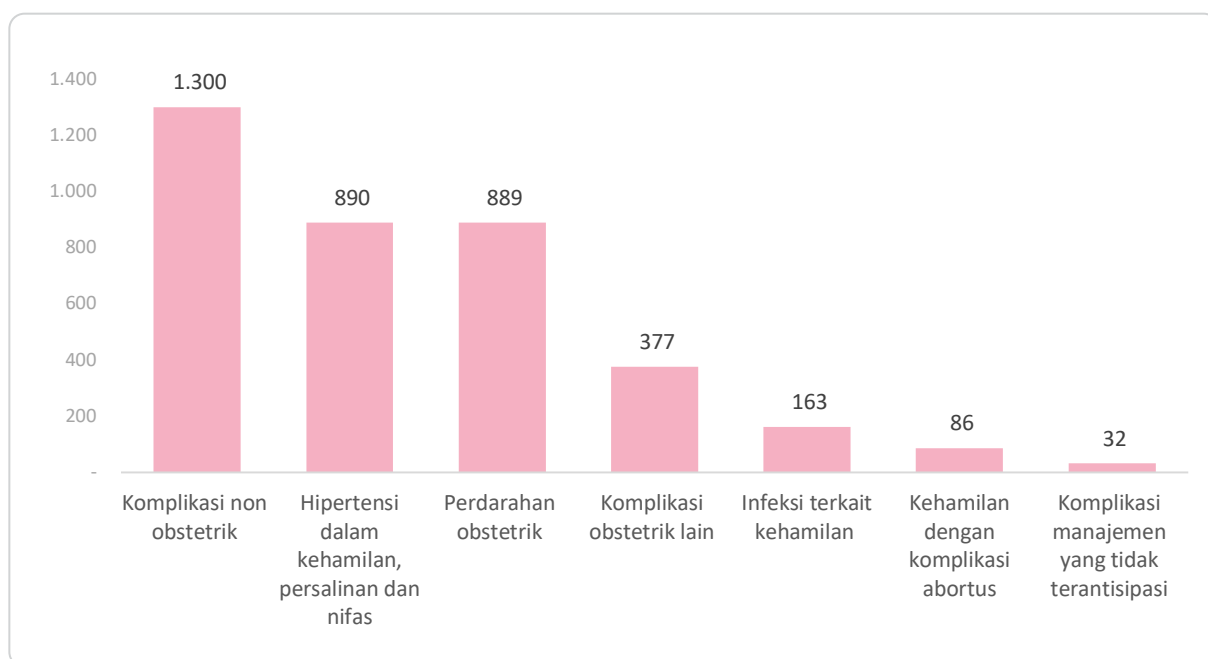
GAMBAR 5.2
JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2025 adalah komplikasi nonobstetrik dalam kehamilan sebanyak 1.300 kasus, diikuti oleh hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas sebanyak 890 kasus dan perdarahan obstetrik sebanyak 955 kasus. Jumlah kematian ibu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 5.2.

GAMBAR 5.3
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS), pemberian tablet tambah darah, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas, puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana (KB), dan pemeriksaan HIV, sifilis, serta Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
6. Skrining status imunisasi tetanus (TT) dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 180 tablet selama masa kehamilan.
8. Pelayanan tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: glukosa-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan.
10. Pelaksanaan Temu wicara (konseling) untuk menyampaikan informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.
11. Pemeriksaan USG obstetri dasar terbatas.
12. Skrining kesehatan jiwa.

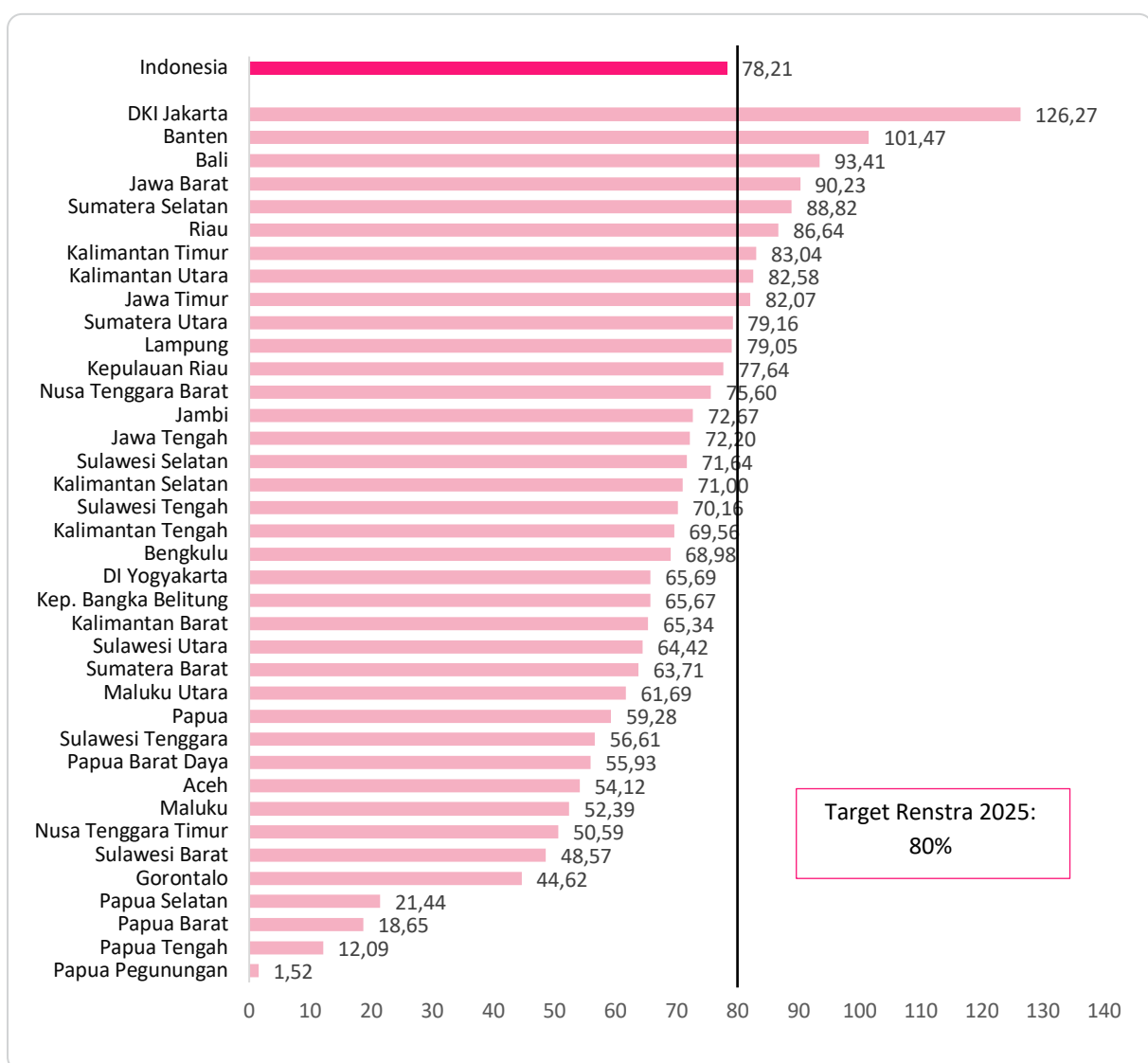
Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dengan dua kali pemeriksaan USG oleh dokter. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 2 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu), dan 3 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya) serta minimal dua kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke-5 di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin

perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K6) pada tahun 2025 di Indonesia sebesar 78,21% dengan provinsi tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 126,27% diikuti Banten sebesar 101,47, dan Bali sebesar 93,41%. Terdapat 9 provinsi sudah mencapai target Renstra tahun 2025 sebesar 80%.

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil yang harus diberikan saat kunjungan, dan pemerataan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten di seluruh Indonesia.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)

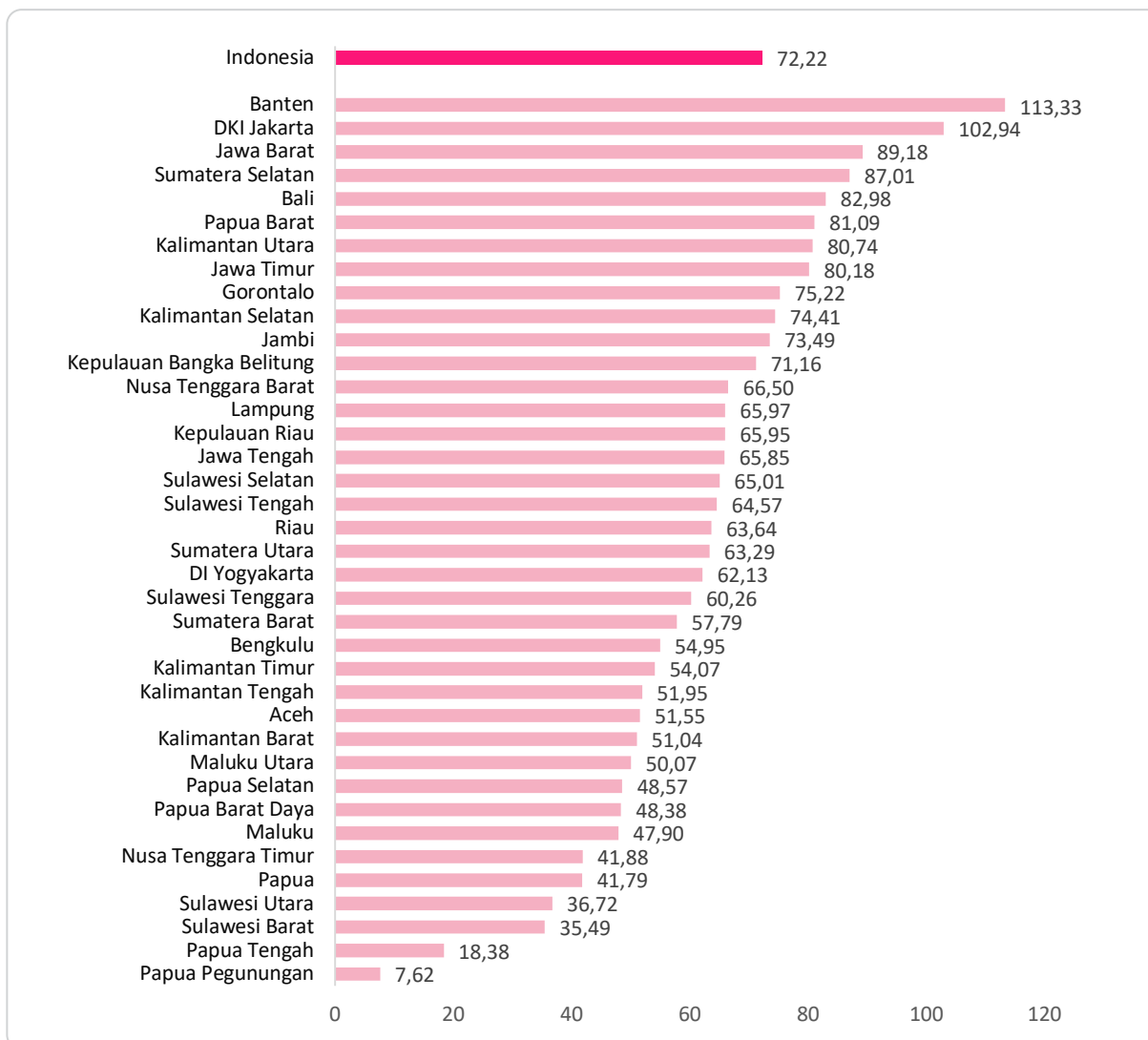
Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi serta memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit difteri, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur (khususnya ibu hamil) merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil skrining penilaian status T yang dimulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal, atau pelayanan kesehatan di posyandu.

Skrining status "T" pada WUS harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan status WUS telah mencapai T5, yang dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort, atau buku register imunisasi lainnya. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi T2+.

Imunisasi T2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil. Cakupan imunisasi T2+ pada ibu hamil tahun 2025 sebesar 72,22%, angka ini lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K6 yang sebesar 79,38%, hal ini dapat diartikan bahwa ibu hamil yang sudah menjalani pemeriksaan kehamilan (K6), tidak semuanya mendapatkan imunisasi T2+.

GAMBAR 5.5
CAKUPAN IMUNISASI TETANUS TOXOID 2+ (T2+) PADA IBU HAMIL DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan distribusi provinsi, Banten memiliki cakupan tertinggi sebesar 113,33% diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 102,94%, dan Jawa Barat sebesar 89,18%. Provinsi dengan cakupan rendah yaitu Papua pegunungan sebesar 7,62%, Papua Tengah sebesar 18,38%, dan Sulawesi Barat sebesar 35,49%. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur terdapat pada Lampiran 5.5.

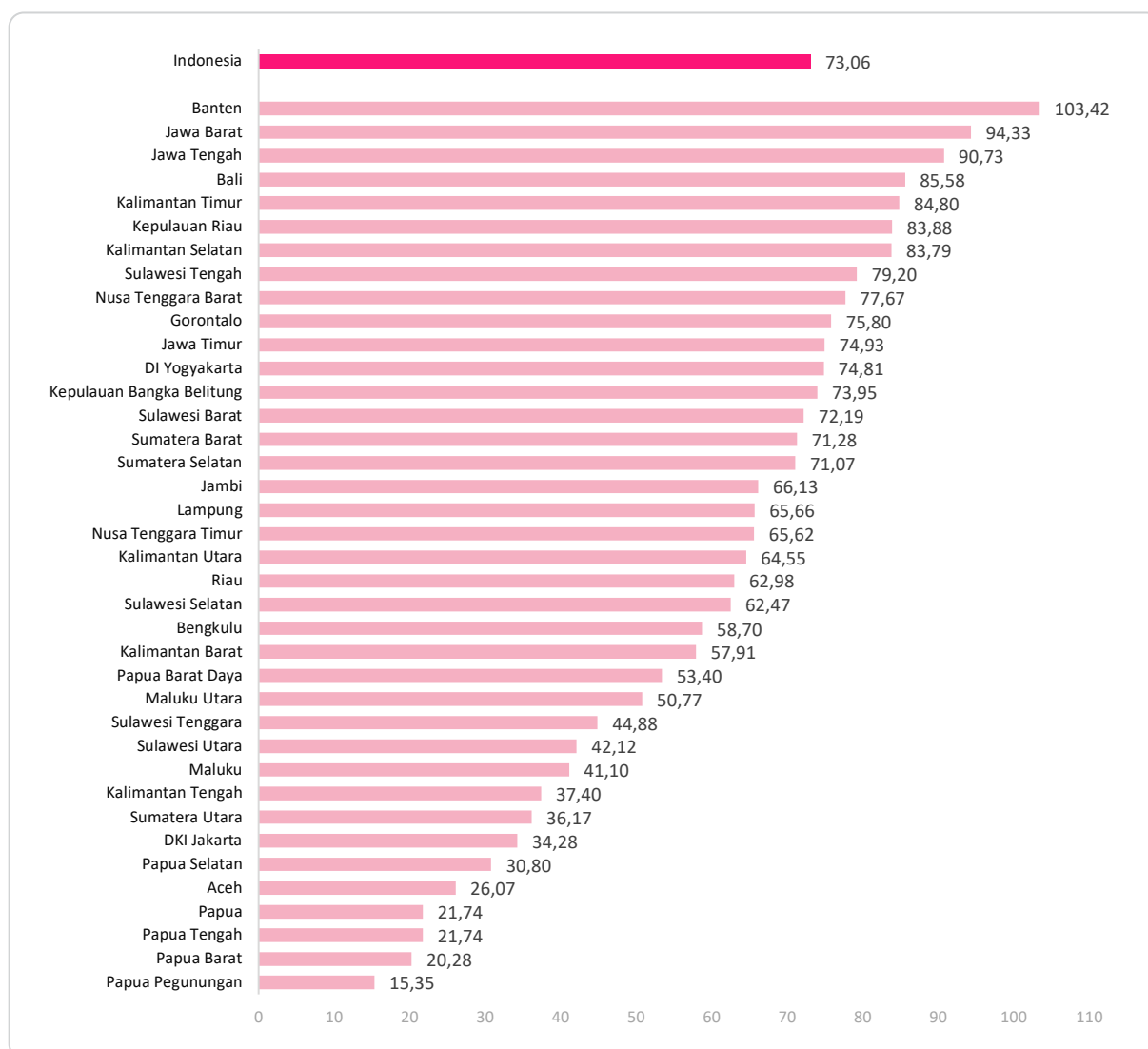
3. Pemberian Suplementasi Gizi (Tablet Tambah Darah/TTD dan *Multiple Micronutrient Supplement/MMS*) pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi zat besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 27,7% ibu hamil mengalami anemia.

Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, ibu hamil mengalami anemia paling tinggi pada kelompok umur 35-44 sebesar 39,6%, diikuti kelompok umur 25-34 sebesar 31,4%. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan suplementasi minimal 180 Tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian suplementasi minimal 180 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2025 adalah 73,06%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 87,17%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil adalah Provinsi Banten sebesar 103,22%, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 94,33%, dan Jawa Tengah sebesar 90,73%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 15,35% dan Provinsi Papua Barat 20,28%. Cakupan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.9.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN PEMBERIAN SUPELEMENTASI GIZI (TABLET TAMBAH DARAH/TTD
DAN *MULTIPLE MICRONUTRIENTS SUPPLEMENT/MMS*) PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

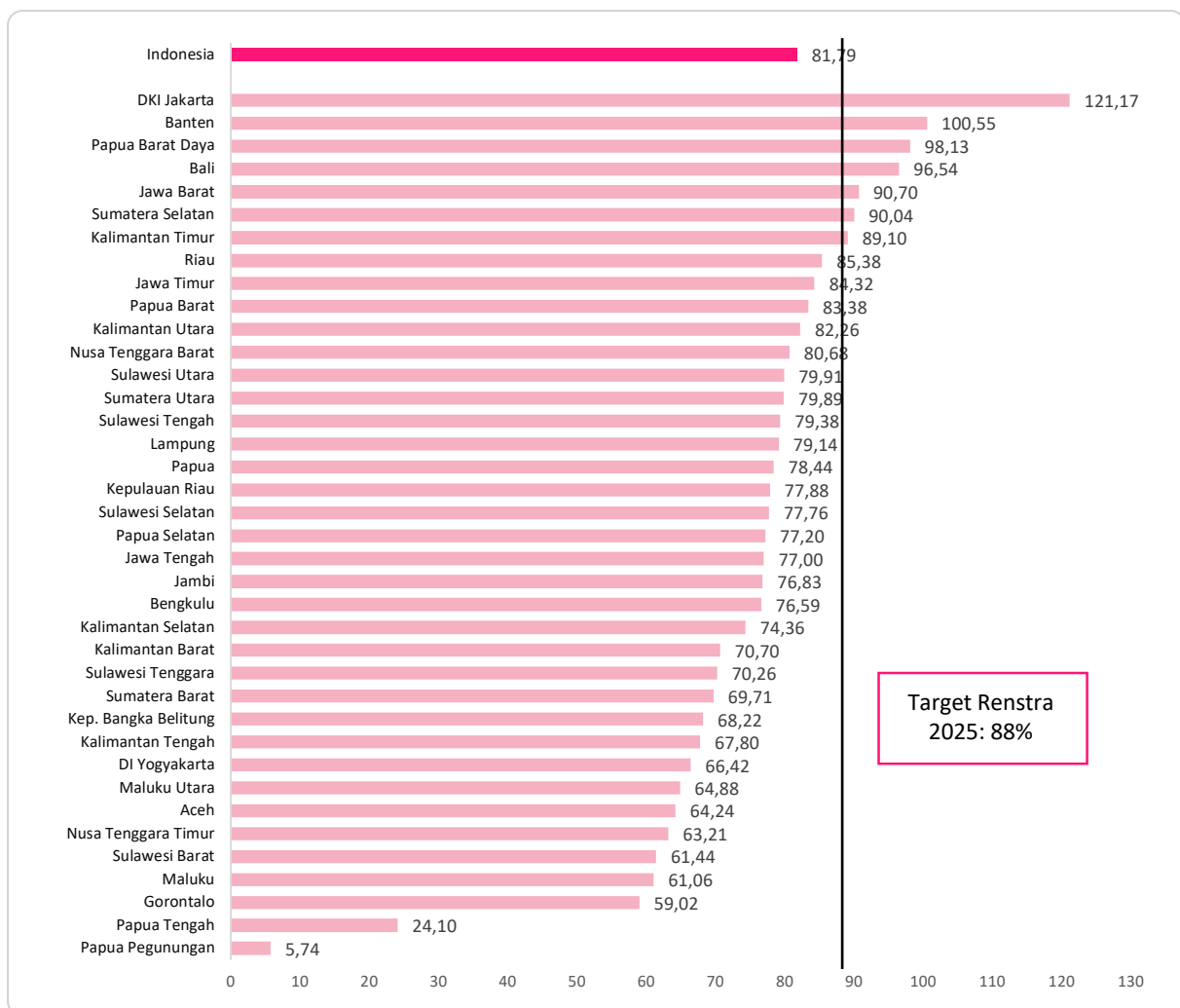
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.7 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 38 provinsi di Indonesia Tahun 2025.

GAMBAR 5.7
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2025 di Indonesia sebesar 81,79%. Bila dilihat berdasarkan target Renstra 2025 sebesar 88%, maka persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2025 belum mencapai target Renstra 2025. Provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 121,17%, Banten sebesar 100,55%, dan Papua Barat Daya sebesar 98,13%. Sementara cakupan terendah di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,74%, Papua Tengah sebesar 24,10% dan Gorontalo sebesar 59,02%.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

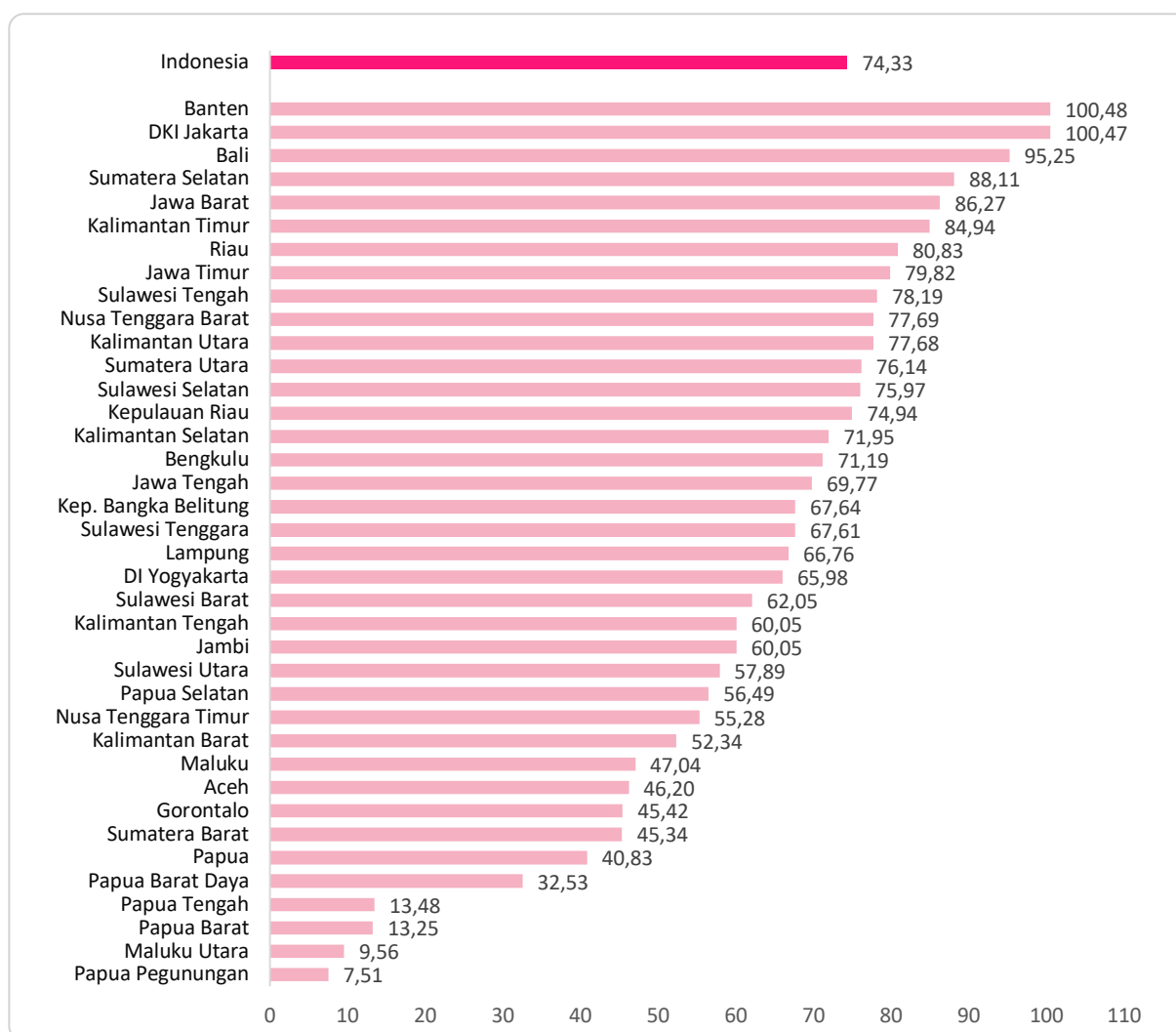
Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

1. Anamnesis;
2. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
3. Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
4. Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
5. Pemeriksaan kontraksi uteri;
6. Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
7. Pemeriksaan lochia dan perdarahan;
8. Pemeriksaan jalan lahir;
9. Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;
10. Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
11. Pemeriksaan status mental ibu;
12. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
13. Pemberian KIE dan konseling;
13. Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap).

Cakupan kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.8 berikut ini.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 74,33%, dimana provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi Banten sebesar 100,48, DKI Jakarta sebesar 100,47% dan Bali sebesar 95,25%. Provinsi yang memiliki cakupan terendah antara lain Papua Pegunungan dengan 7,51%, Maluku Utara sebesar 9,56% dan Papua Tengah sebesar 13,48%.

6. Pelayanan Kontrasepsi

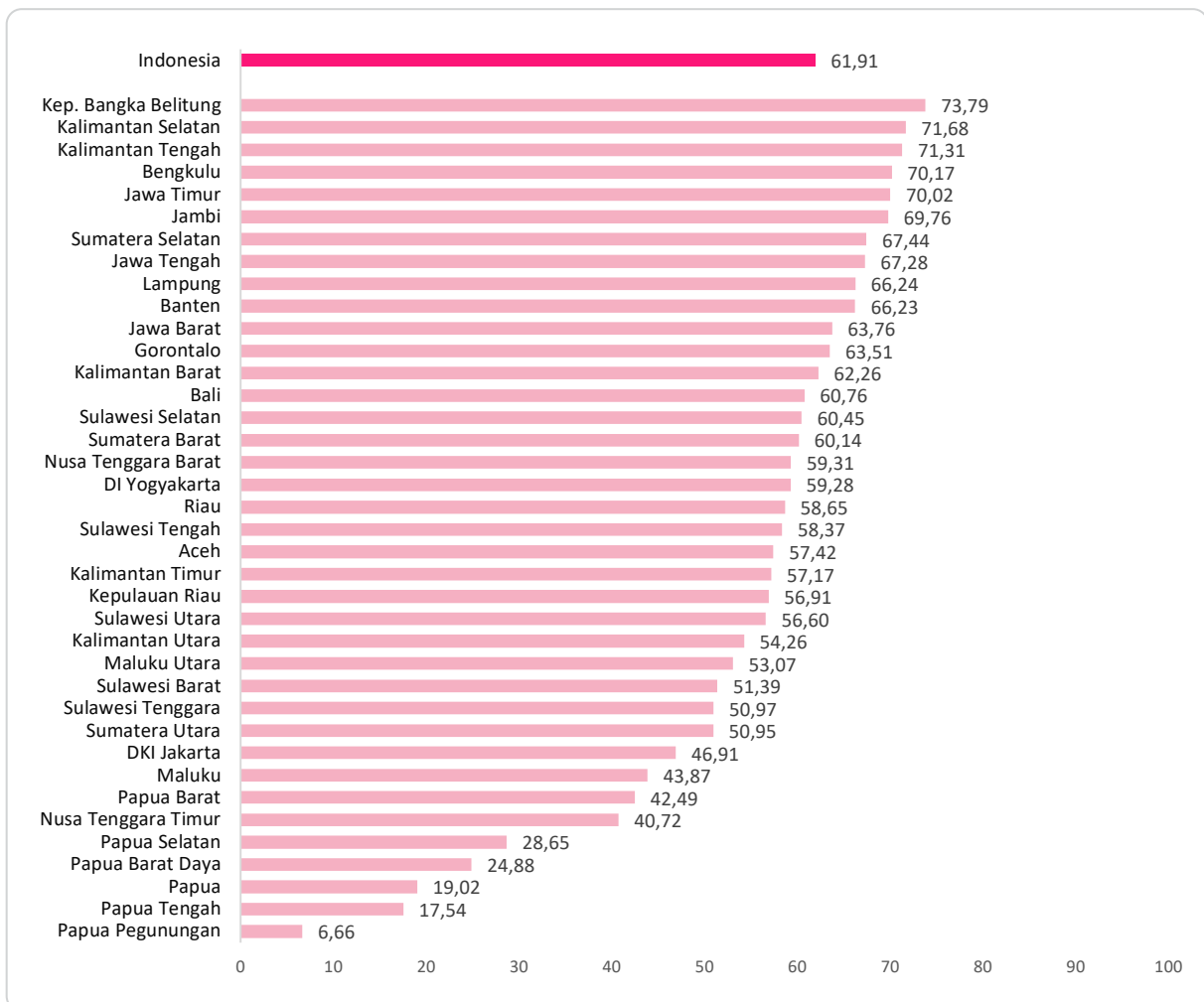
Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui:

1. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan;
2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas; dan

3. Mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa steril wanita (MOW), steril pria (MOP), IUD/AKDR), implan/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL) dan peserta KB tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, senggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya).

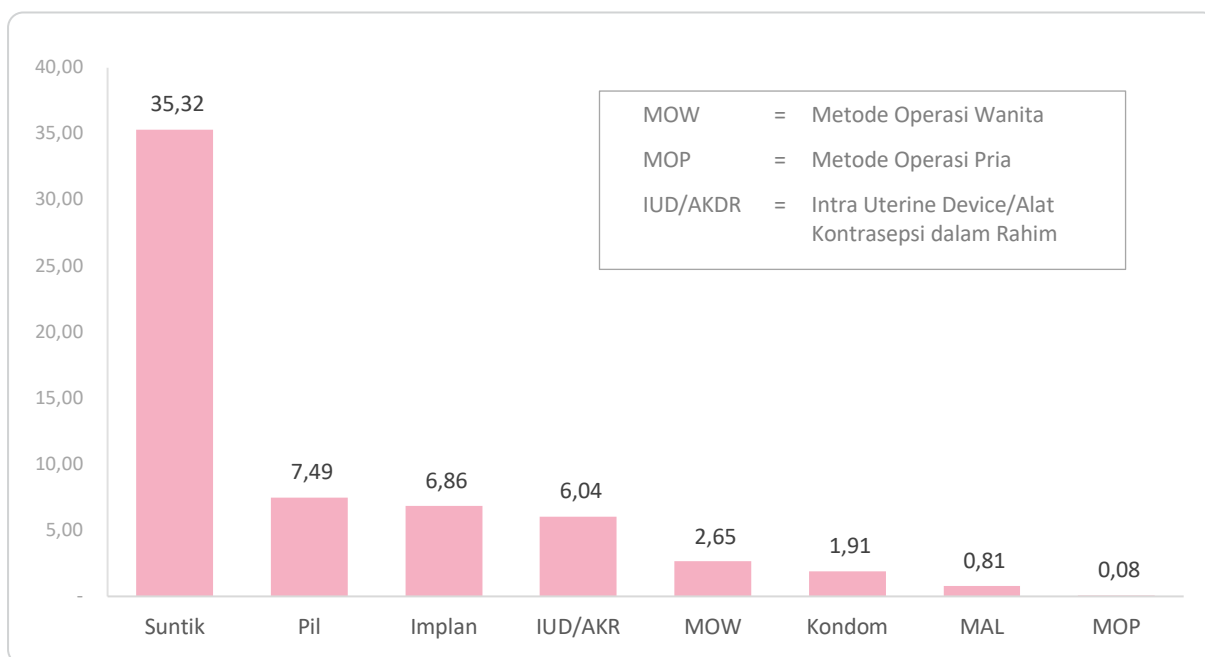
GAMBAR 5.9
PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (dengan *weighting*), BKKBN

Menurut hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 oleh BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS peserta KB di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 61,91%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB tertinggi adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung (73,79%), Provinsi Kalimantan Selatan (71,68%), dan Kalimantan Tengah (71,31%), sedangkan terendah adalah Papua Pegunungan (6,66%), Papua Tengah (17,54%) dan Papua (19,02%).

GAMBAR 5.10
PERSENTASE PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI
DI INDONESIA TAHUN 2025

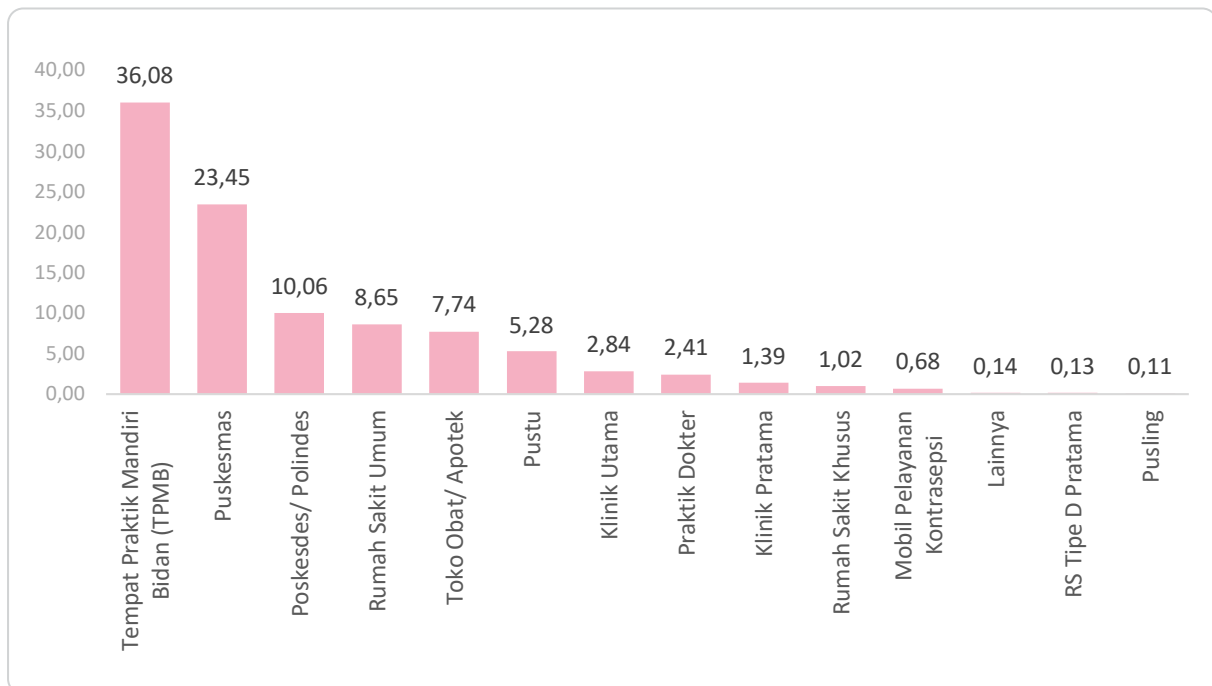


Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (dengan *weighting*), BKKBN

Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 35,32%, diikuti pil sebesar 7,49%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat efektivitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama (lebih dari dua tahun), efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk MKJP yaitu IUD/AKR, Implan, MOP dan MOW.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi PUS dengan tujuan membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.11 berikut ini.

GAMBAR 5.11
JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (dengan *weighting*), BKKBN

Berdasarkan tempat pelayanan KB, PUS paling banyak dilayani oleh praktek mandiri bidan sebesar 36,08%, Puskesmas sebesar 23,45% dan Poskesdes/Polindes sebesar 10,06%.

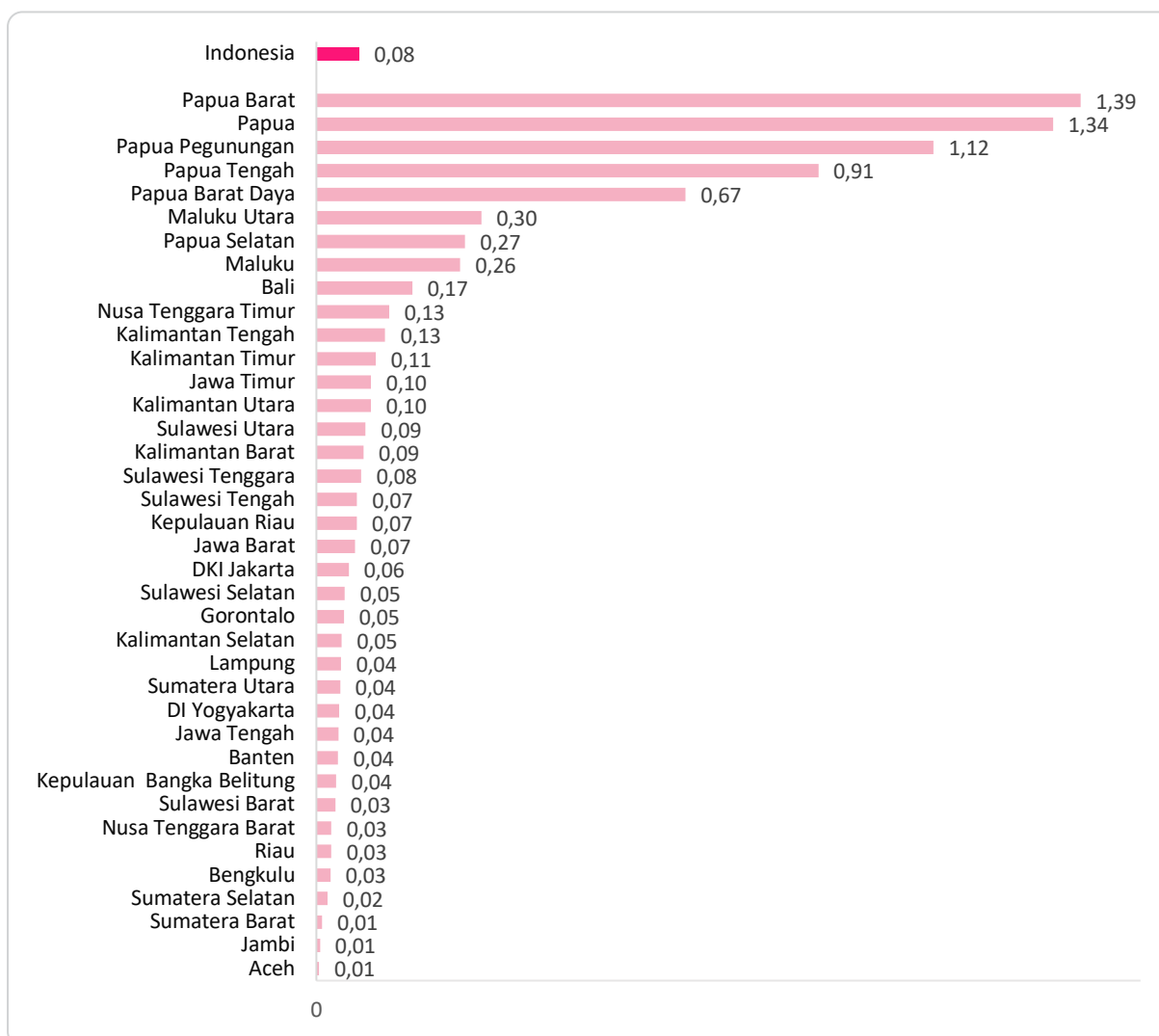
7. Pemeriksaan HIV, Hepatitis B, dan Sifilis pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Pada tahun 2025 terdapat 4.833.700 ibu hamil yang di periksa HIV di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 2.793 (0,08%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Papua Barat 1,39%, Papua sebesar 1,34% dan Papua Pegunungan sebesar 1,12%. Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 5.6.

GAMBAR 5.12
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

b. Hepatitis B

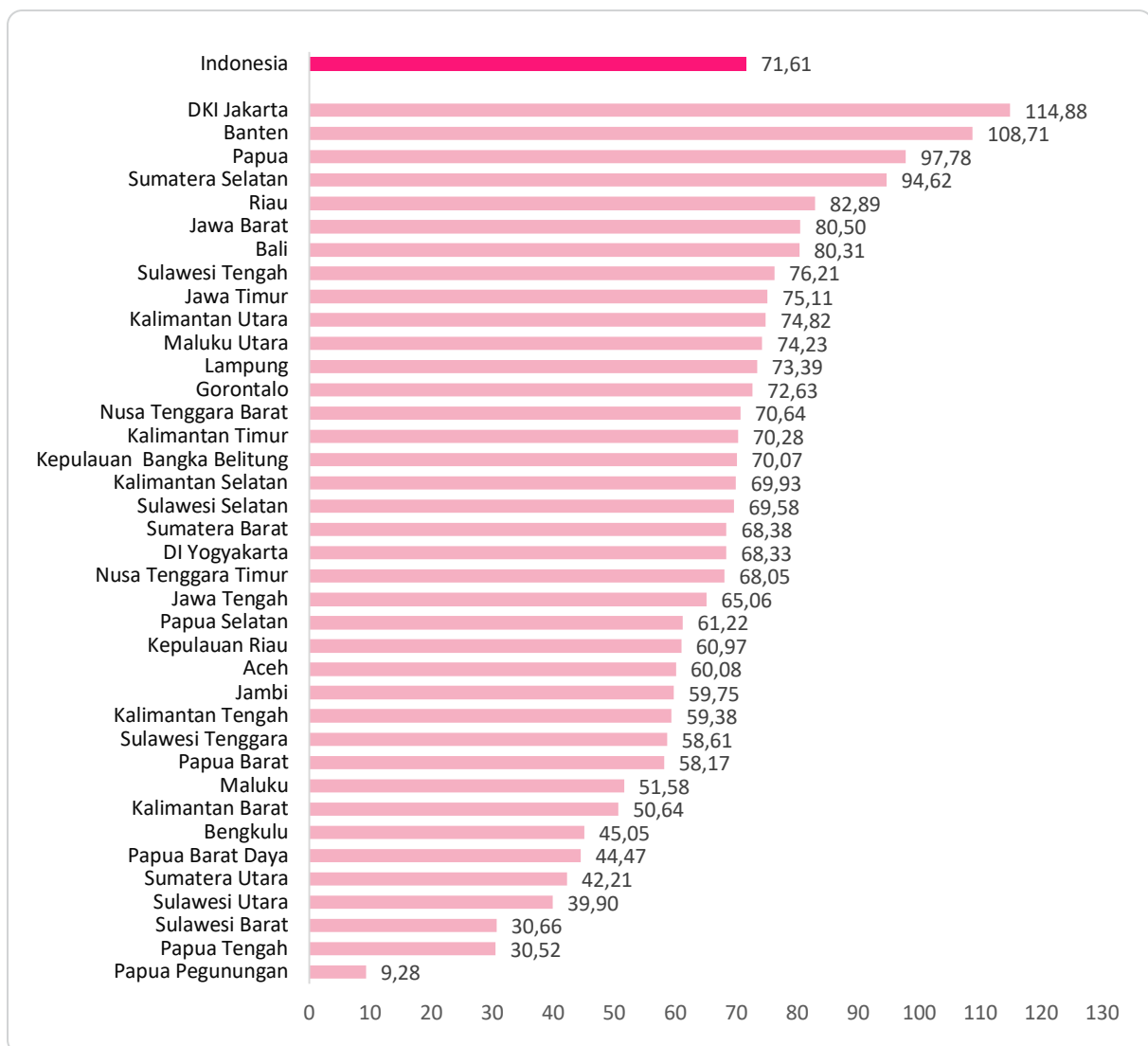
Penularan virus Hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal (dari ibu yang positif menderita Hepatitis B kepada bayinya) dan horizontal (dari individu yang positif menderita Hepatitis B kepada individu lainnya). Pada daerah endemik seperti Indonesia penularan Hepatitis B umumnya terjadi secara vertikal terutama saat masa perinatal dan 95% bayi yang tertular saat masa perinatal akan menjadi Hepatitis B kronik.

Untuk mencegah penularan dari ibu ke anak tersebut telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya dengan melakukan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil menggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg). HBsAg merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus Hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi Hepatitis B. DDHB bertujuan menemukan sedini mungkin ibu hamil terinfeksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif), kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya terhadap bayi dari ibu terdeteksi HBsAg Reaktif tersebut yang didahului dengan pemberian Vitamin K1, diikuti

dengan vaksin Hepatitis B (HB0) dan HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 Jam kelahiran. HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Persentase ibu hamil melaksanakan DDHB pada tahun 2025 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana sebesar 71,61% ibu hamil melaksanakan DDHB. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 69,76%. Provinsi dengan capaian tertinggi, yaitu DKI Jakarta sebesar 114,88%, Banten sebesar 108,71%, dan Papua sebesar 97,78% seperti tampak pada gambar di bawah ini.

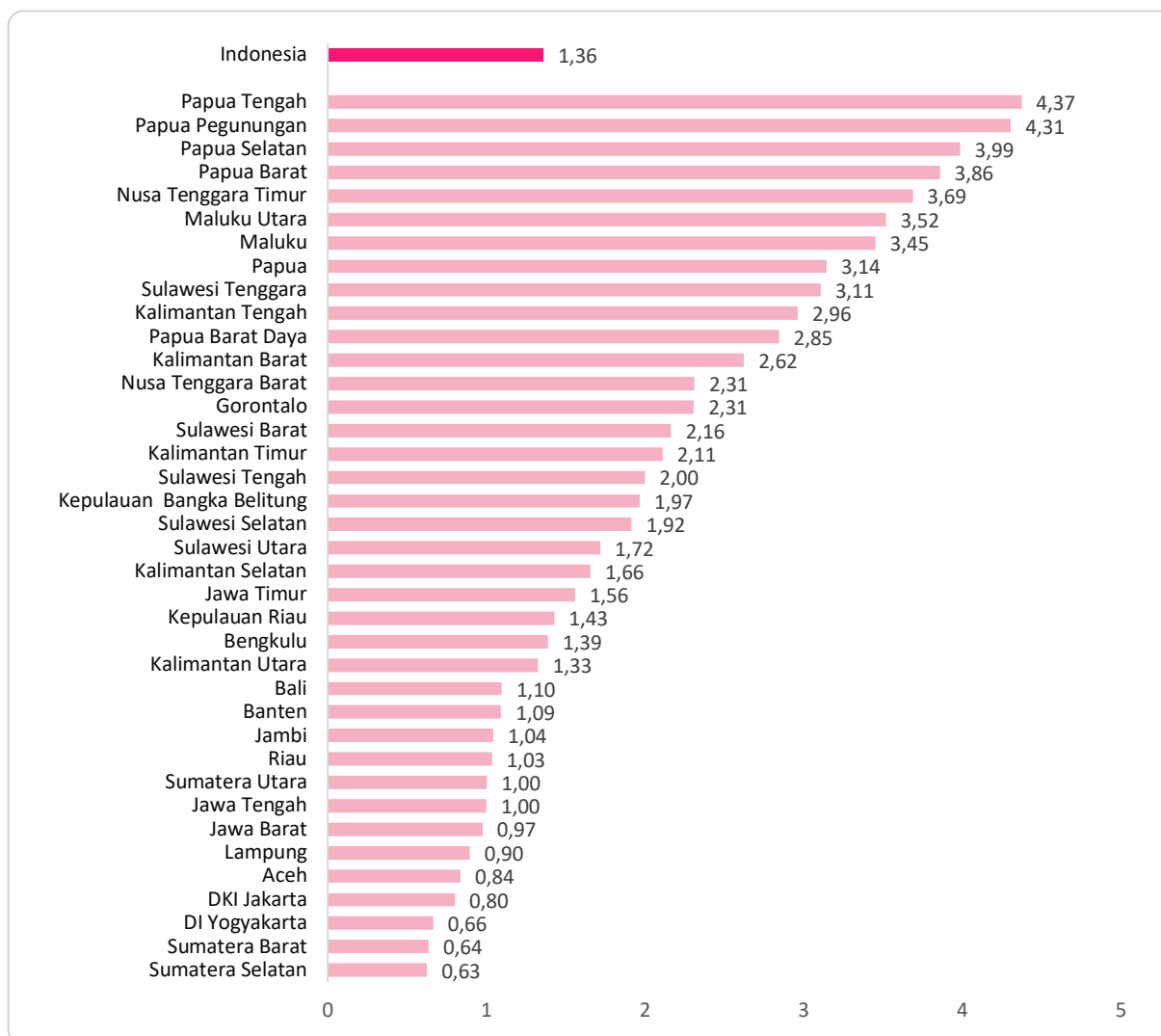
GAMBAR 5.13
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan RDT HBsAg tahun 2025, yaitu sebanyak 3.461.402 orang dari 4.833.700 ibu hamil yang menjadi sasaran. Hasil pemeriksaan RDT HBsAg tahun 2025 menemukan sebanyak 47.081 atau 1,36% ibu hamil menunjukkan hasil reaktif.

GAMBAR 5.14
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



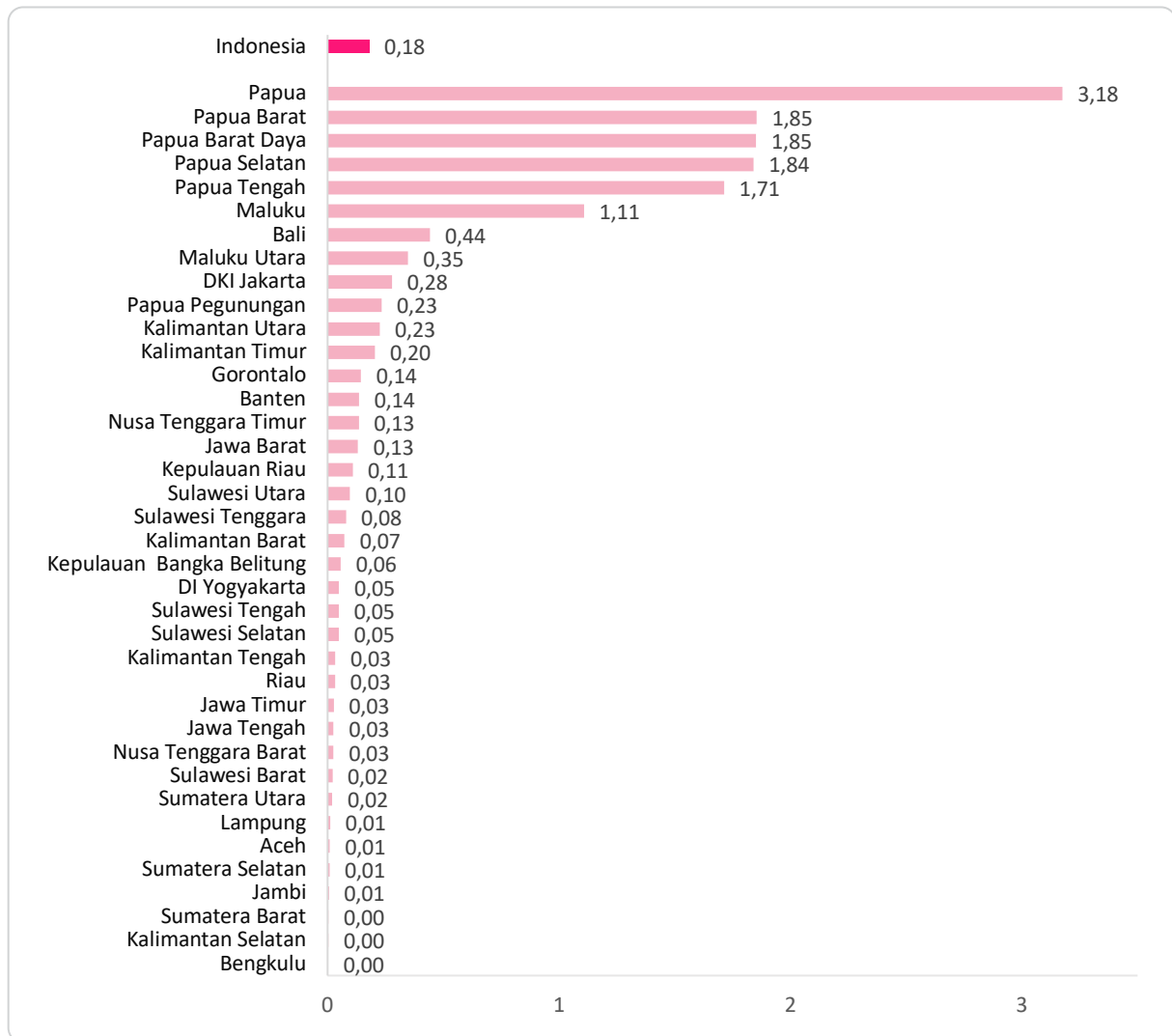
Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada gambar di atas, terlihat bahwa provinsi dengan ibu hamil yang hasil tesnya menunjukkan HBsAg reaktif tertinggi terdapat di Provinsi Papua Tengah dengan 4,37%, diikuti dengan Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,31%, dan Provinsi Papua Selatan sebesar 3,99%. Data terkait deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.7.

c. Sifilis

Sifilis merupakan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang disebabkan oleh kuman *Treponema pallidum*. Apabila penyakit ini mengenai ibu hamil, maka kuman dapat ditularkan ke bayi melalui plasenta atau pada saat bersalin dan dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, serta sifilis kongenital pada bayi. Semakin awal terjadi infeksi, risiko penularan ke bayi akan semakin tinggi. Pada perempuan yang telah menderita sifilis dalam beberapa tahun, hampir separuhnya dapat berpengaruh pada kehamilannya. Dari angka tersebut, separuhnya dapat berakibat lahir mati termasuk keguguran dan separuhnya lagi berakibat kematian perinatal atau kongenital sifilis dan BBLR. Oleh karena itu, ibu hamil diperiksa sifilis merupakan upaya program kesehatan untuk mencegah dampak yang lebih buruk.

GAMBAR 5.15
PERSENTASE IBU HAMIL POSITIF SIFILIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

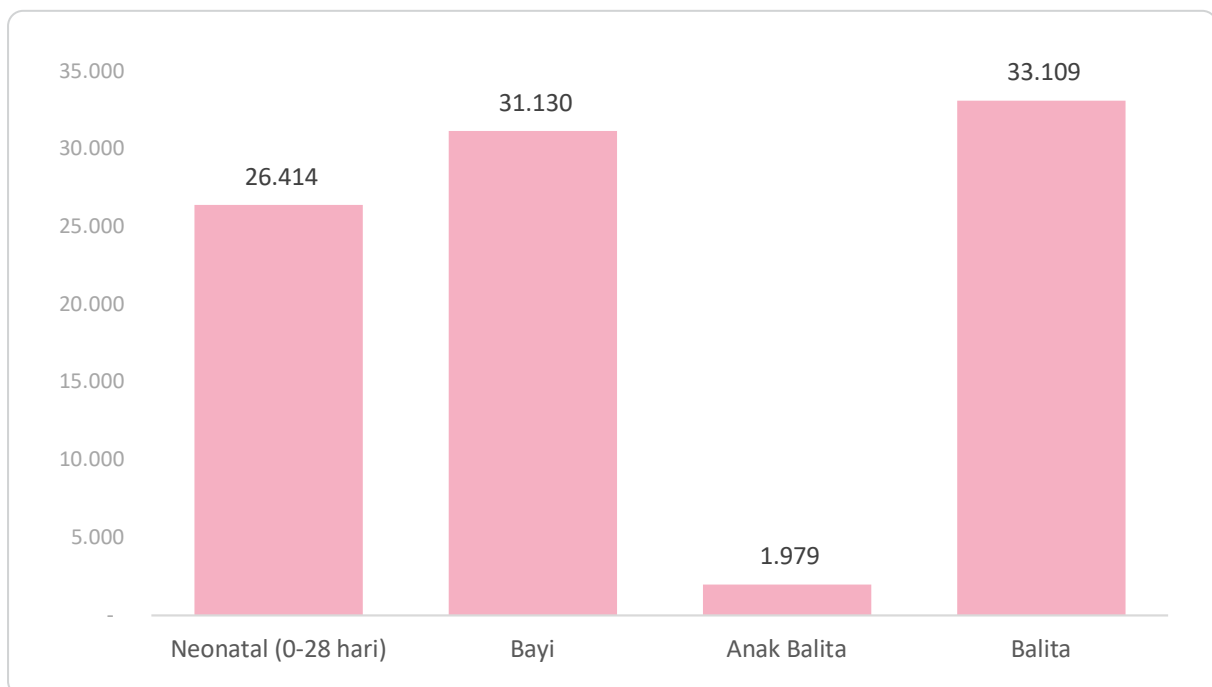
Pada tahun 2025 sebanyak 69,04% ibu hamil yang menjalani pemeriksaan Sifilis, dimana sebesar 0,18% ibu hamil dinyatakan positif dari keseluruhan target ibu hamil yang diperiksa sifilis. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase ibu hamil positif sifilis tertinggi, yaitu sebesar 3,18%, jauh di atas angka nasional yang sebesar 0,18%. Selanjutnya, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing memiliki persentase sebesar 1,85%, diikuti Provinsi Papua Selatan sebesar 1,84%. Di sisi lain, beberapa provinsi memiliki persentase ibu hamil positif sifilis yang sangat rendah, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu dengan persentase mendekati 0%.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarwilayah dalam proporsi ibu hamil positif sifilis. Wilayah Tanah Papua dan sebagian wilayah Maluku masih menjadi daerah dengan beban sifilis pada ibu hamil yang relatif tinggi sehingga memerlukan penguatan skrining antenatal, penemuan kasus secara dini, pengobatan yang adekuat, serta peningkatan cakupan pemeriksaan sifilis pada ibu hamil untuk mencegah terjadinya sifilis kongenital.

B. KESEHATAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya kesehatan anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya ini dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan dan kualitas hidup anak melalui upaya penurunan angka kematian, perbaikan gizi, pemenuhan standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir, bayi, dan balita.

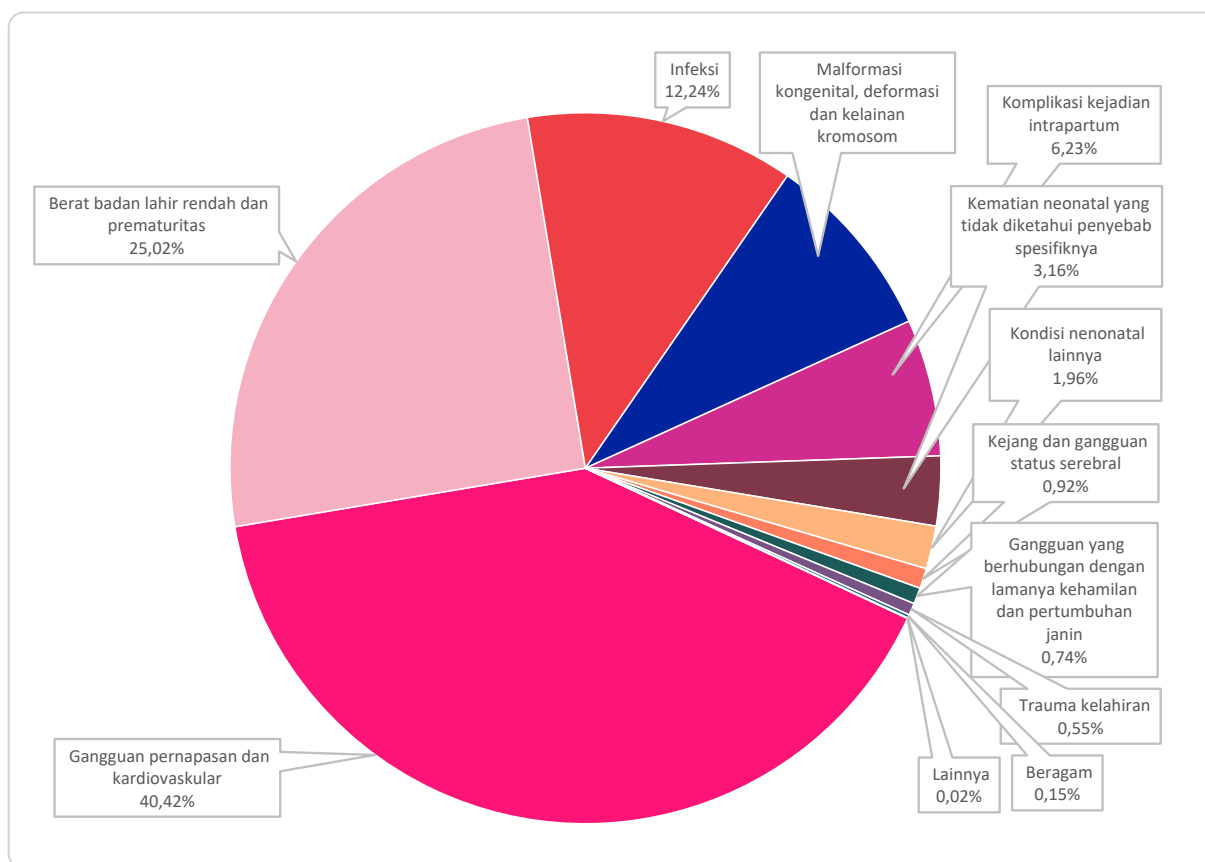
GAMBAR 5.16
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Meskipun jumlah kematian tertinggi secara absolut terdapat pada kelompok anak bayi (0-12 bulan), periode neonatal (0-28 hari) tetap merupakan fase yang paling rentan dalam siklus kehidupan balita. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 84,8% kematian bayi terjadi pada masa neonatal. Oleh karena itu, strategi penurunan kematian balita perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan kesehatan ibu selama kehamilan, pelayanan persalinan yang berkualitas, perawatan neonatal esensial, hingga penguatan pelayanan kesehatan anak usia 1-4 tahun melalui imunisasi lengkap, pemenuhan gizi, pencegahan penyakit infeksi, dan deteksi dini gangguan kesehatan.

GAMBAR 5.17
PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)
DI INDONESIA TAHUN 2025



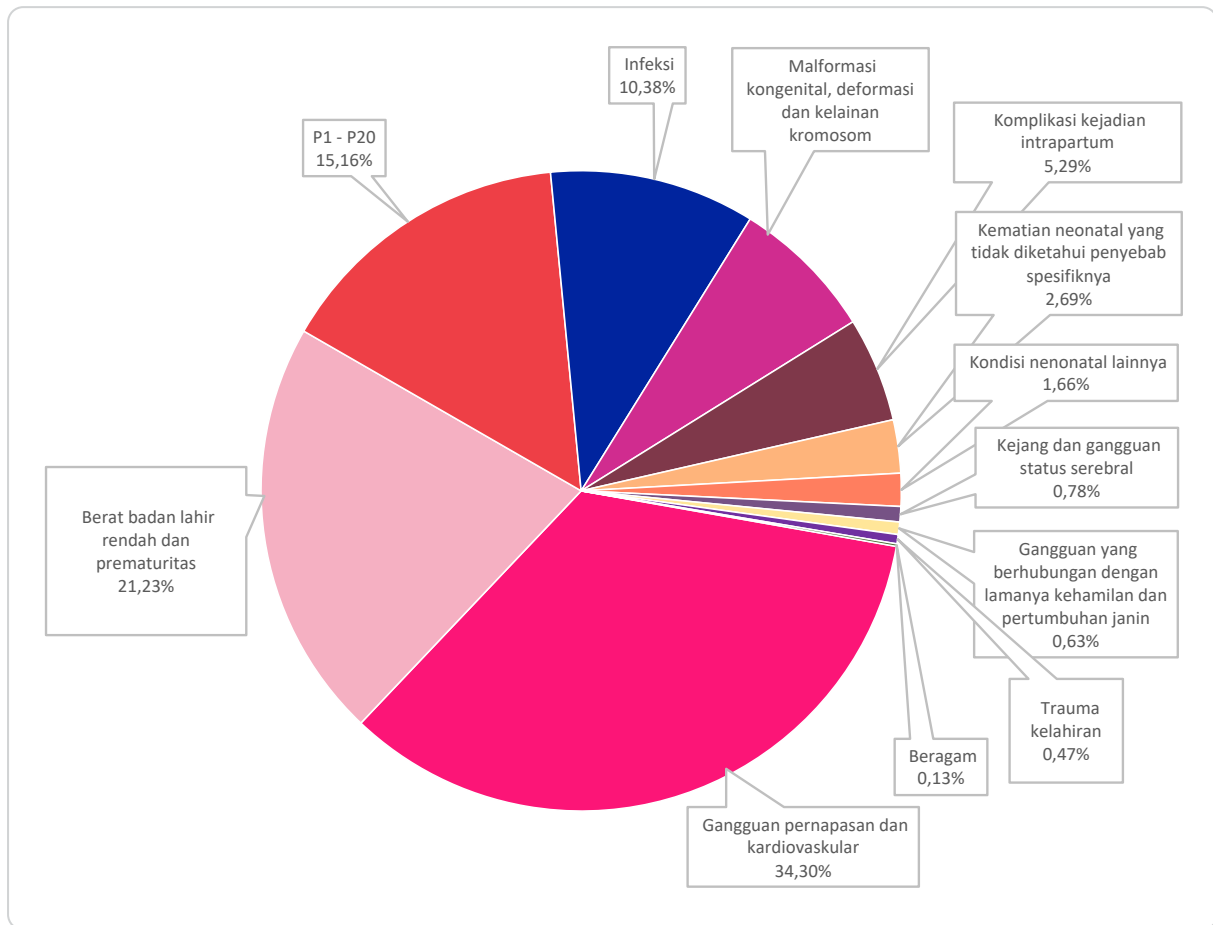
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Gambar 5.17 di atas menerangkan sebagian besar kematian neonatal disebabkan oleh gangguan pernapasan dan kardiovaskular sebanyak 10.677 kasus (40,42%), menjadikannya penyebab utama kematian neonatal. Penyebab terbesar berikutnya adalah berat badan lahir rendah (BBLR) dan prematuritas sebanyak 6.609 kasus (25,02%). Kedua kelompok penyebab ini secara bersama-sama menyumbang 65,44% dari seluruh kematian neonatal, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan perawatan neonatal esensial sangat menentukan kelangsungan hidup bayi baru lahir.

Selanjutnya, infeksi berkontribusi sebesar 12,24% (3.232 kasus), sedangkan malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom menyumbang 8,59% (2.269 kasus). Sementara itu, komplikasi kejadian intrapartum atau komplikasi saat proses persalinan menyumbang 6,23% (1.646 kasus). Kelima penyebab utama tersebut mencakup sekitar 92,5% dari seluruh kematian neonatal.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian neonatal perlu difokuskan pada pencegahan kelahiran prematur dan BBLR, peningkatan kualitas pelayanan antenatal, deteksi dini faktor risiko kehamilan, penanganan komplikasi persalinan, pencegahan infeksi, serta penguatan pelayanan neonatal esensial dan rujukan neonatal. Selain itu, masih terdapat 3,16% kematian neonatal dengan penyebab yang tidak diketahui secara spesifik, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pencatatan dan penentuan penyebab kematian neonatal.

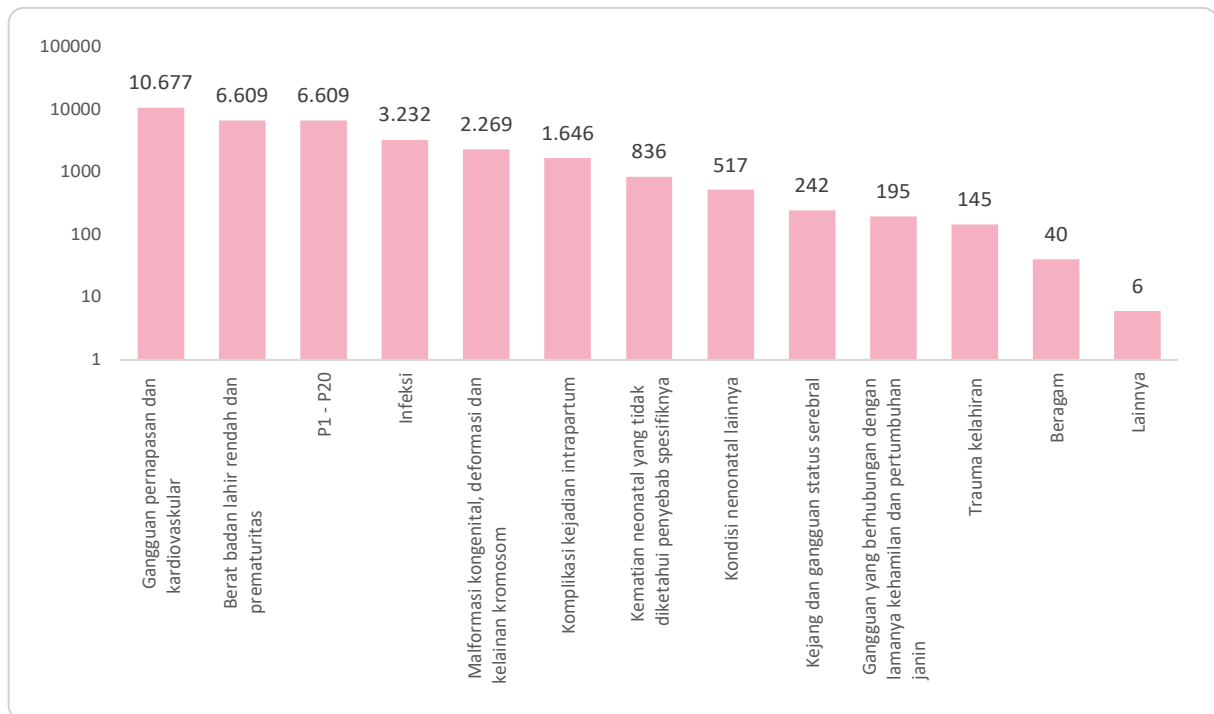
GAMBAR 5.18
PENYEBAB KEMATIAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan data yang tersedia, tercatat 31.130 kematian bayi dengan berbagai penyebab. Sebagian besar kematian bayi masih didominasi oleh kondisi yang terjadi pada masa neonatal dan perinatal, yang menunjukkan bahwa periode awal kehidupan merupakan masa yang paling kritis bagi kelangsungan hidup bayi. Tiga penyebab terbesar, yaitu gangguan pernapasan dan kardiovaskular (34,30%), BBLR dan prematuritas (21,23%), serta kondisi perinatal (15,16%), menyumbang lebih dari 70% seluruh kematian bayi. Dengan intervensi yang berfokus pada periode kehamilan, persalinan, dan neonatal, sebagian besar penyebab utama kematian bayi berpotensi untuk dicegah atau ditangani lebih dini.

GAMBAR 5.19
PENYEBAB KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN)
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Penyebab kematian balita tertinggi adalah gangguan pernapasan dan kardiovaskular sebanyak 10.677 kasus (32,3%), diikuti oleh berat badan lahir rendah (BBLR) dan prematuritas serta kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal (P1-P20) yang masing-masing mencapai 6.609 kasus (20,0%). Selanjutnya, infeksi menjadi penyebab kematian balita terbesar berikutnya dengan 3.232 kasus (9,8%), menunjukkan bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan pada anak. Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom menyumbang 2.269 kasus (6,9%), sedangkan komplikasi kejadian intrapartum berkontribusi sebesar 1.646 kasus (5,0%).

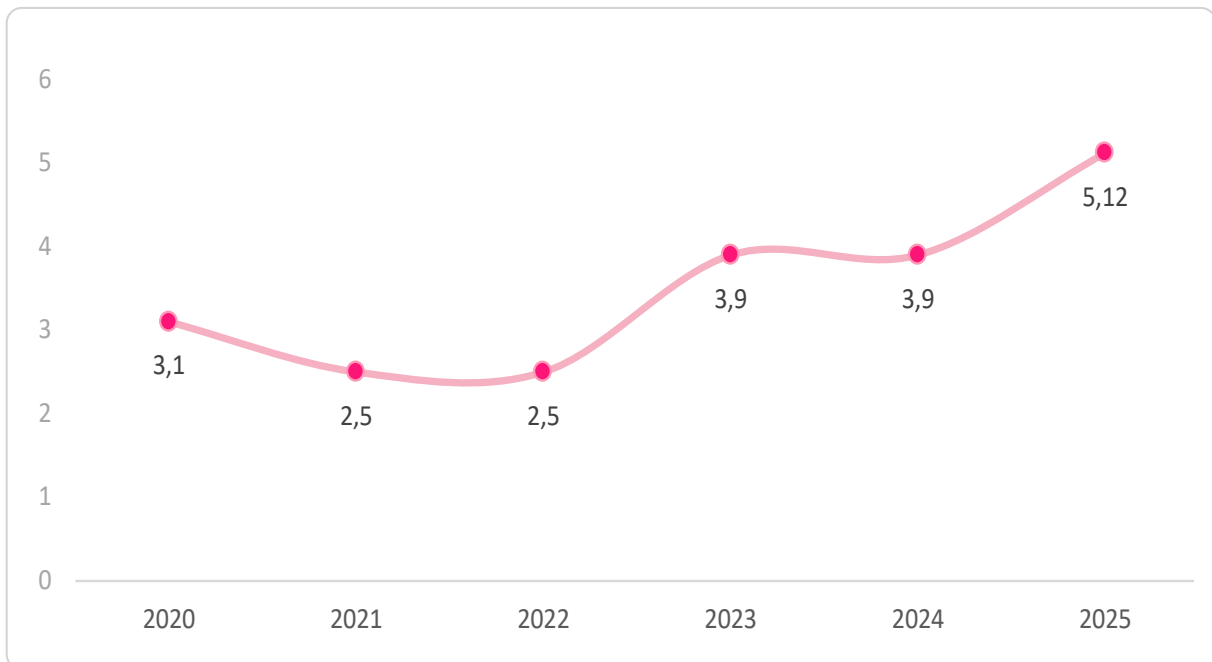
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari)

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia 28 hari memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Bila tidak dilakukan penanganan yang tepat, hal tersebut dapat berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada bayi baru lahir yang dimaksud adalah,

1. Pelayanan neonatal essensial melalui paling sedikitnya Kunjungan neonatal (KN) sebanyak 3 kali yang dilakukan bersamaan dengan Kunjungan Nifas ibu (KF),
2. Skrining bayi baru lahir (Skrining Hipotiroid Kongenital/SHK, Penyakit Jantung Bawaan/ PJK), dan
3. Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi kepada Ibu dengan menggunakan Buku KIA

GAMBAR 5.20
BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI INDONESIA
TAHUN 2020-2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan data tahun 2020–2025 pada gambar 5.20, prevalensi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 prevalensi BBLR tercatat sebesar 3,1%, kemudian menurun menjadi 2,5% pada tahun 2021 dan tetap pada tingkat yang sama pada tahun 2022. Selanjutnya terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,9% dan bertahan pada angka yang sama pada tahun 2024, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2025 sebesar 5,12%.

Peningkatan prevalensi BBLR pada periode 2023–2025 perlu mendapat perhatian karena BBLR merupakan salah satu faktor risiko utama kematian neonatal, gangguan pertumbuhan, serta masalah kesehatan jangka panjang pada anak. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain status gizi ibu selama kehamilan, anemia pada ibu hamil, usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, penyakit penyerta selama kehamilan, serta kualitas pelayanan antenatal.

Secara keseluruhan, tren BBLR di Indonesia menunjukkan belum adanya perbaikan pada tahun 2025. Oleh karena itu, upaya peningkatan gizi ibu hamil, pencegahan anemia, pemantauan kehamilan secara rutin, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak perlu terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut

Upaya pelayanan kesehatan esensial pada bayi baru lahir yang wajib diberikan dan dapat mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu kunjungan neonatal. Tujuan kunjungan neonatal untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan penyebab kematian dan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan pada bayi usia 0-28 hari, meliputi:

1. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
3. Pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan;

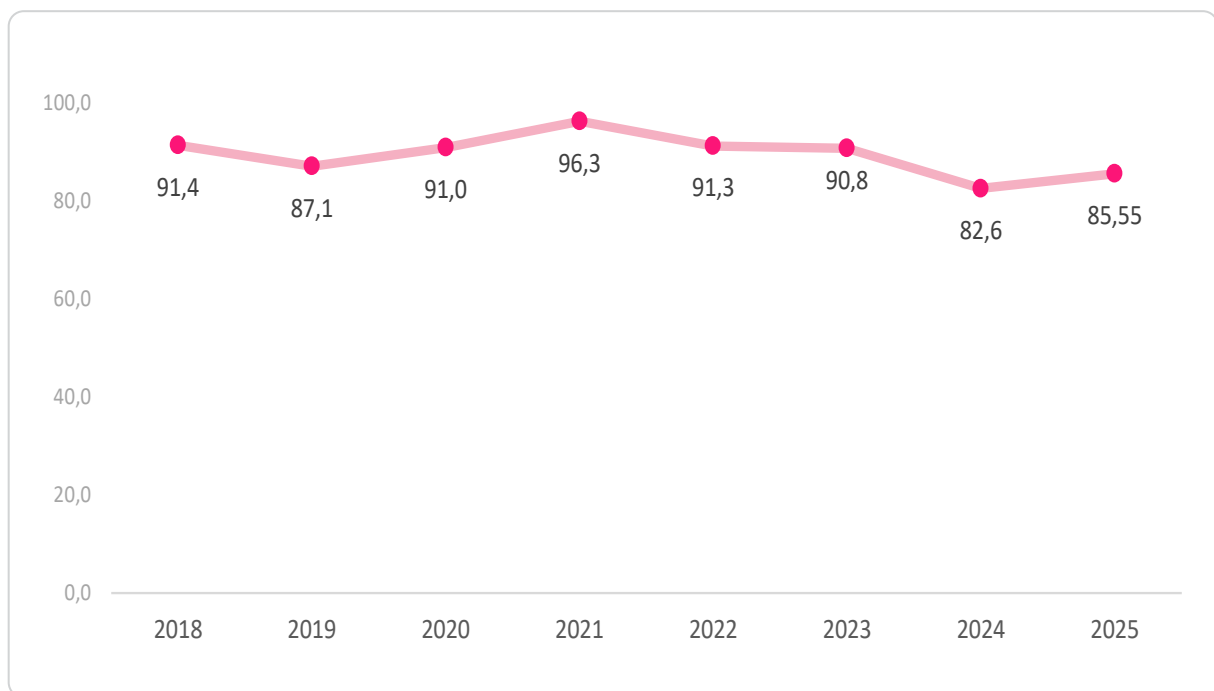
4. Pemberian salep/tetes mata;
5. Pemberian Imunisasi Hb0 untuk mencegah penyakit hepatitis;
6. Konseling perawatan bayi baru lahir;
7. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
8. Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);
9. Memeriksa kesehatan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM).

Kunjungan neonatal dilakukan sebanyak 3 kali terdiri dari:

1. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada usia 6-48 jam;
2. Kunjungan Neonatal Kedua (KN2) pada usia 3-7 hari; dan
3. Kunjungan Neonatal Ketiga (KN3) pada usia 8-28 hari.

Cakupan kunjungan neonatal sebagai salah satu indikator yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Cakupan indikator yang diukur dan dipantau adalah cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap).

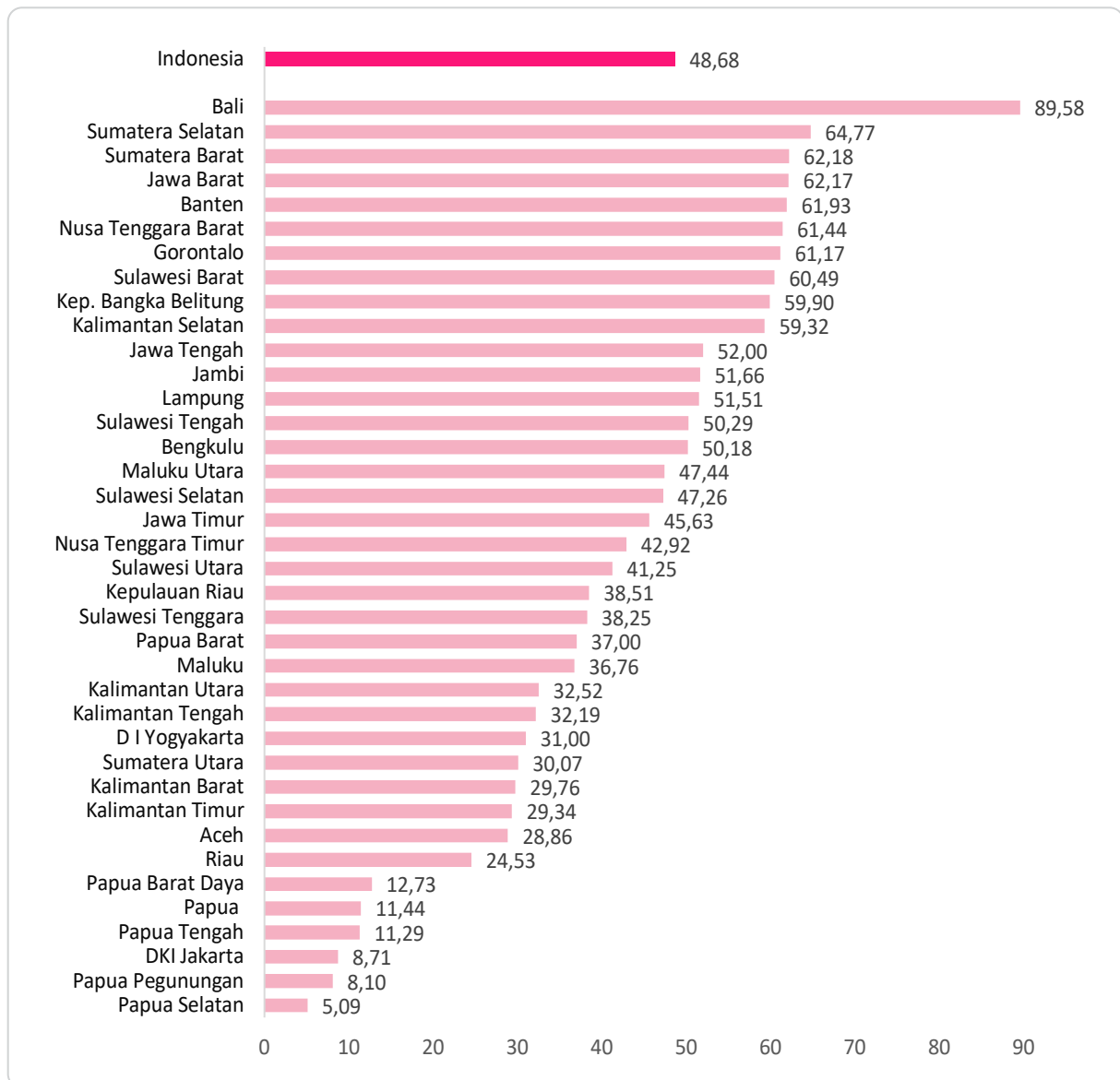
GAMBAR 5.21
CAKUPAN KUNJUNGAN KN LENGKAP
DI INDONESIA TAHUN 2018-2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) di Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi, mencapai puncak 96,3% pada tahun 2021, kemudian menurun hingga 82,6% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 85,55% pada tahun 2025, namun masih lebih rendah dibandingkan capaian sebelum tahun 2024, seperti tampak pada gambar di atas.

GAMBAR 5.22
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Penjelasan Gambar 5.22 di atas bahwa Cakupan KN lengkap secara nasional adalah 82,60%. Cakupan per provinsi berkisar antara 6,21% di Papua Pegunungan hingga 141,14% di DKI Jakarta. Terdapat provinsi yang sasarnya lebih tinggi dari target Renstra 2025, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Bali, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Lampung (lebih dari 90%).

2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Kegiatan pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilaksanakan secara terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dengan standar minimal pelayanan sesuai dengan SPM tingkat kabupaten/kota untuk kesehatan balita meliputi penimbangan berat badan setiap bulan minimal 8x, pengukuran panjang badan/tinggi badan minimal 2x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2x setahun, pemberian vitamin A (usia 6-59 bulan), imunisasi dasar lengkap dan lanjutan, dan pelayanan balita sakit dengan pendekatan MTBS.

Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, menurunkan prevalensi stunting dan wasting, meningkatkan kualitas hidup balita, sehingga semua hak anak dapat terpenuhi.

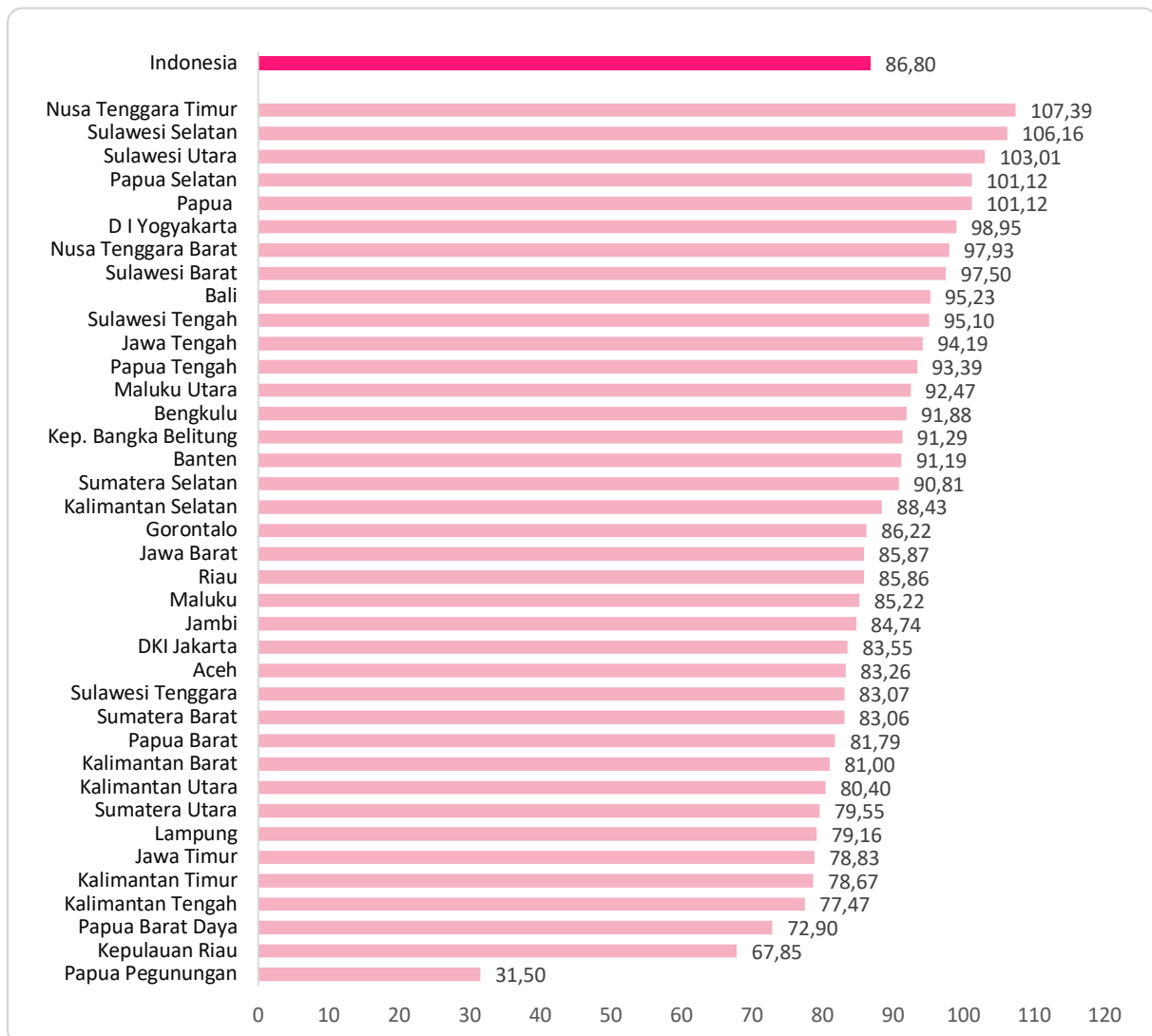
Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah home-base record untuk memastikan *Continuum of Care* (COC) ibu dan anak, serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan, media komunikasi informasi, dan edukasi.

Berdasarkan data Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, persentase balita yang memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tahun 2025 secara nasional mencapai 86,8%. Capaian ini menunjukkan bahwa kepemilikan Buku KIA pada balita merata di seluruh provinsi, dengan kesenjangan yang cukup lebar antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah.

Provinsi dengan persentase kepemilikan Buku KIA tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (107,39%), Sulawesi Selatan (106,16%), Sulawesi Utara (103,01%). Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Papua Pegunungan (31,5%), Kepulauan Riau (67,85%), Papua Barat Daya (72,9%). Persentase Baliat memiliki Buku KIA dapat dilihat pada Grafik 5.23.

GAMBAR 5.23
BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

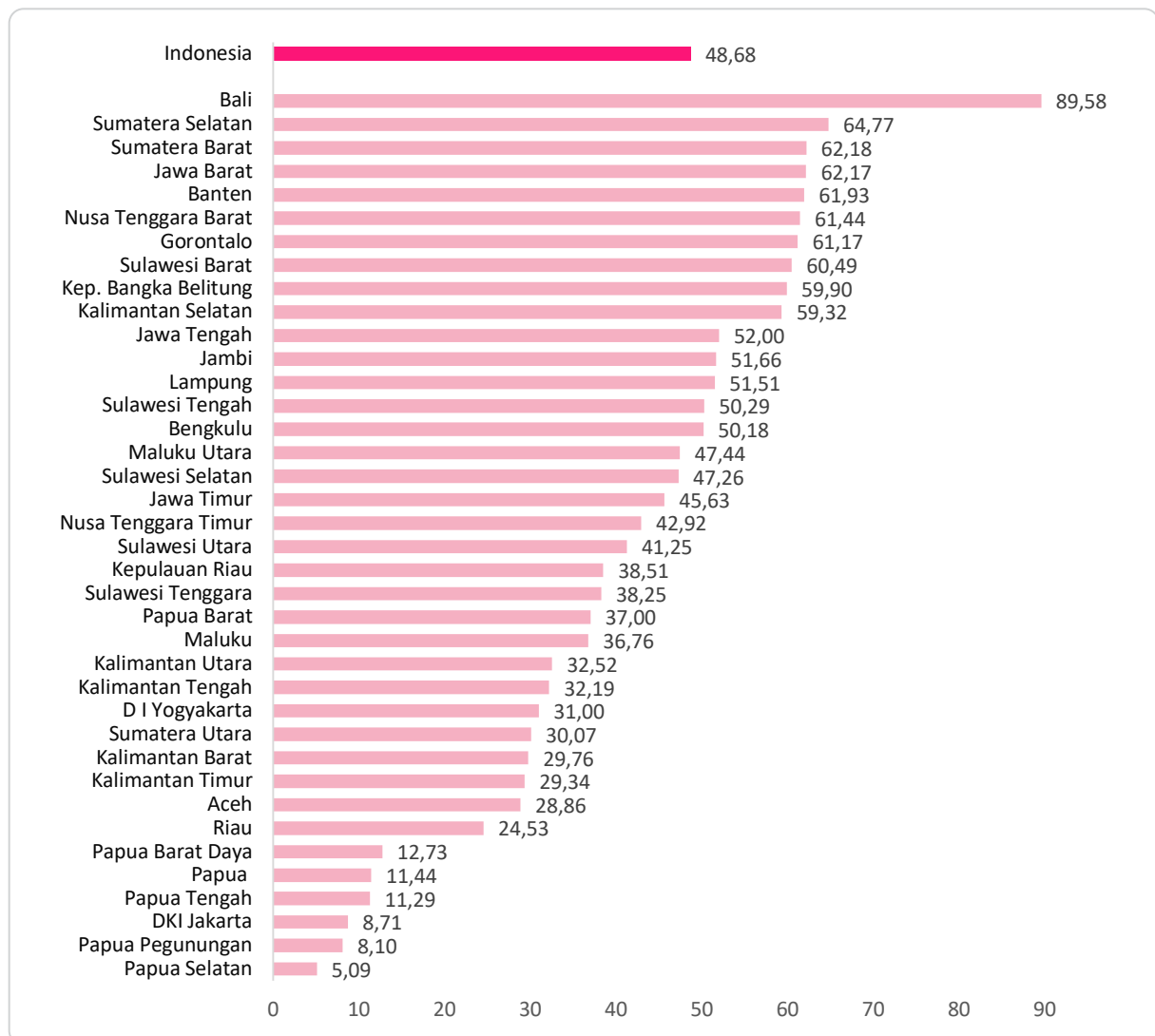
Upaya pemenuhan layanan esensial utama usia bayi dan balita adalah pemberian ASI eksklusif dan vitamin A, serta upaya preventif untuk pelayanan kesehatan balita salah satunya dengan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan agar dapat mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti balita bermasalah gizi (stunting, wasting, gizi buruk, obesitas) selanjutnya untuk dilakukan tatalaksana yang sesuai atau dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan.

Indikator keberhasilan dalam hal ini diukur dengan melihat persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan total sasaran balita. Berdasarkan data tahun 2025, persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya secara nasional mencapai 48,68%, yang berarti kurang dari separuh balita di Indonesia telah memperoleh pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin. Capaian ini menunjukkan bahwa pemantauan tumbuh kembang balita masih perlu ditingkatkan untuk memastikan deteksi dini masalah gizi, gangguan pertumbuhan, maupun keterlambatan perkembangan anak.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Bali (89,58%), diikuti Sumatera Selatan (64,77%), Sumatera Barat (62,18%), Jawa Barat (62,17%), dan Banten (61,93%). Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Papua Selatan (5,09%), Papua Pegunungan (8,10%), DKI Jakarta (8,71%) yang menunjukkan masih rendahnya cakupan pemantauan balita di beberapa wilayah.

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal penting melalui penguatan pelaksanaan Posyandu dan kunjungan rumah untuk mencari sasaran yang tidak datang ke pelayanan dan belum lengkap pelayanan yang diterima balita, peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader masyarakat dan pemantauan mandiri ibu/keluarga dengan menggunakan buku KIA.

GAMBAR 5.24
BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

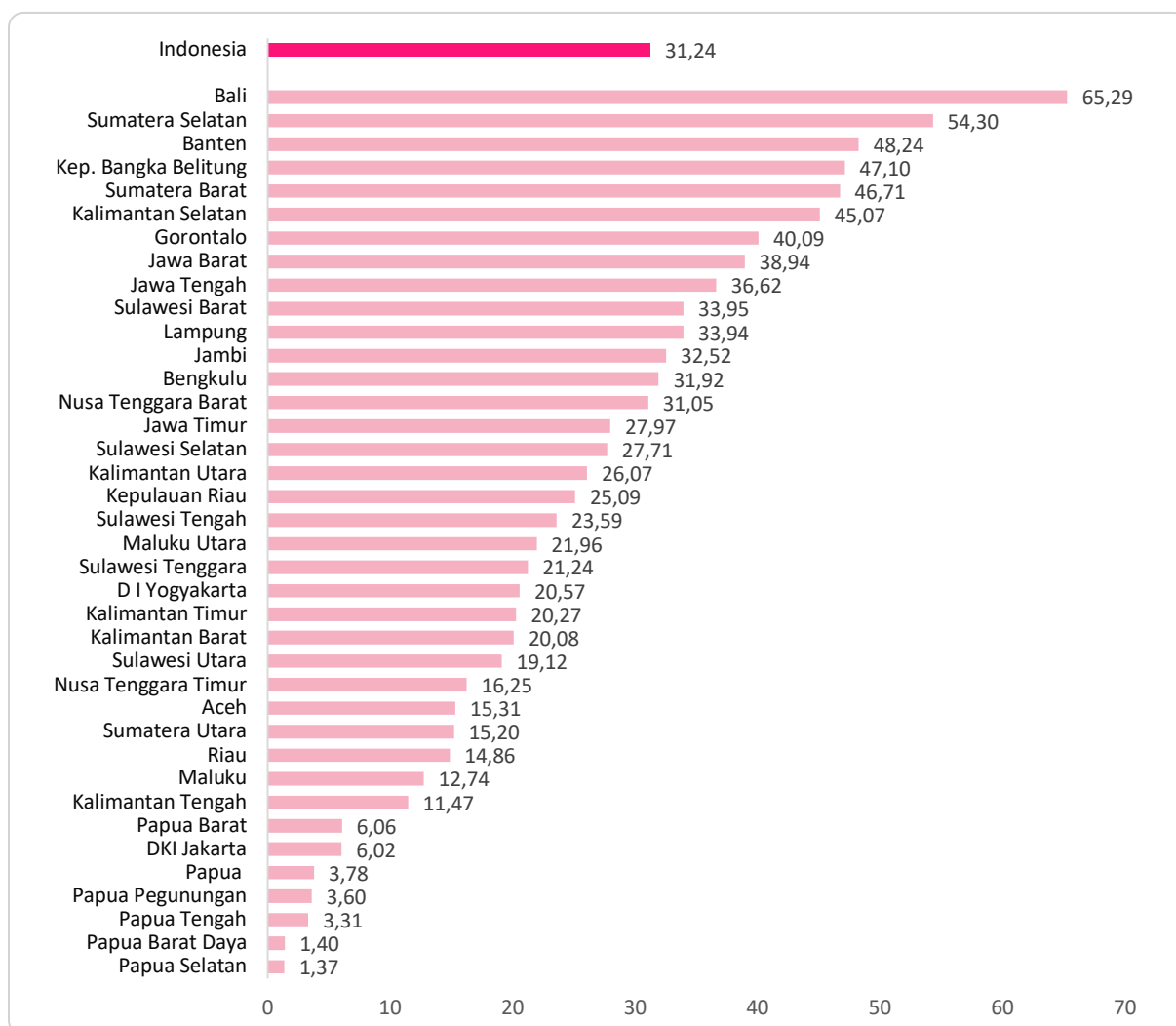
Berdasarkan Gambar 5.24 kesenjangan yang sangat lebar antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah mengindikasikan adanya perbedaan akses layanan kesehatan, pemanfaatan posyandu, ketersediaan tenaga kesehatan, serta pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program. Wilayah Papua dan beberapa provinsi lainnya masih memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita.

Secara keseluruhan, rendahnya capaian nasional menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan anak melalui optimalisasi posyandu, peningkatan peran kader dan tenaga kesehatan, serta edukasi kepada orang tua agar pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dapat dilakukan secara rutin sebagai upaya mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

Pada gambar 5.25 di bawah menunjukkan persentase balita yang dilayani melalui Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) secara nasional mencapai 31,24%, menunjukkan bahwa baru sekitar sepertiga balita yang mendapatkan layanan pemantauan tumbuh kembang secara komprehensif. Capaian ini mengindikasikan masih terbatasnya jangkauan layanan SDIDTK, padahal layanan tersebut berperan penting dalam mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan perilaku anak.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Bali (65,29%), diikuti Sumatera Selatan (54,30%), Banten (48,24%), Kepulauan Bangka Belitung (47,10%), dan Sumatera Barat (46,71%). Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Papua Selatan (1,37%), Papua Barat Daya (1,40%), Papua Tengah (3,31%), yang menunjukkan masih sangat rendahnya cakupan layanan SDIDTK di sebagian besar wilayah Papua.

GAMBAR 5.25
BALITA DILAYANI STIMULASI, DETEKSI, DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

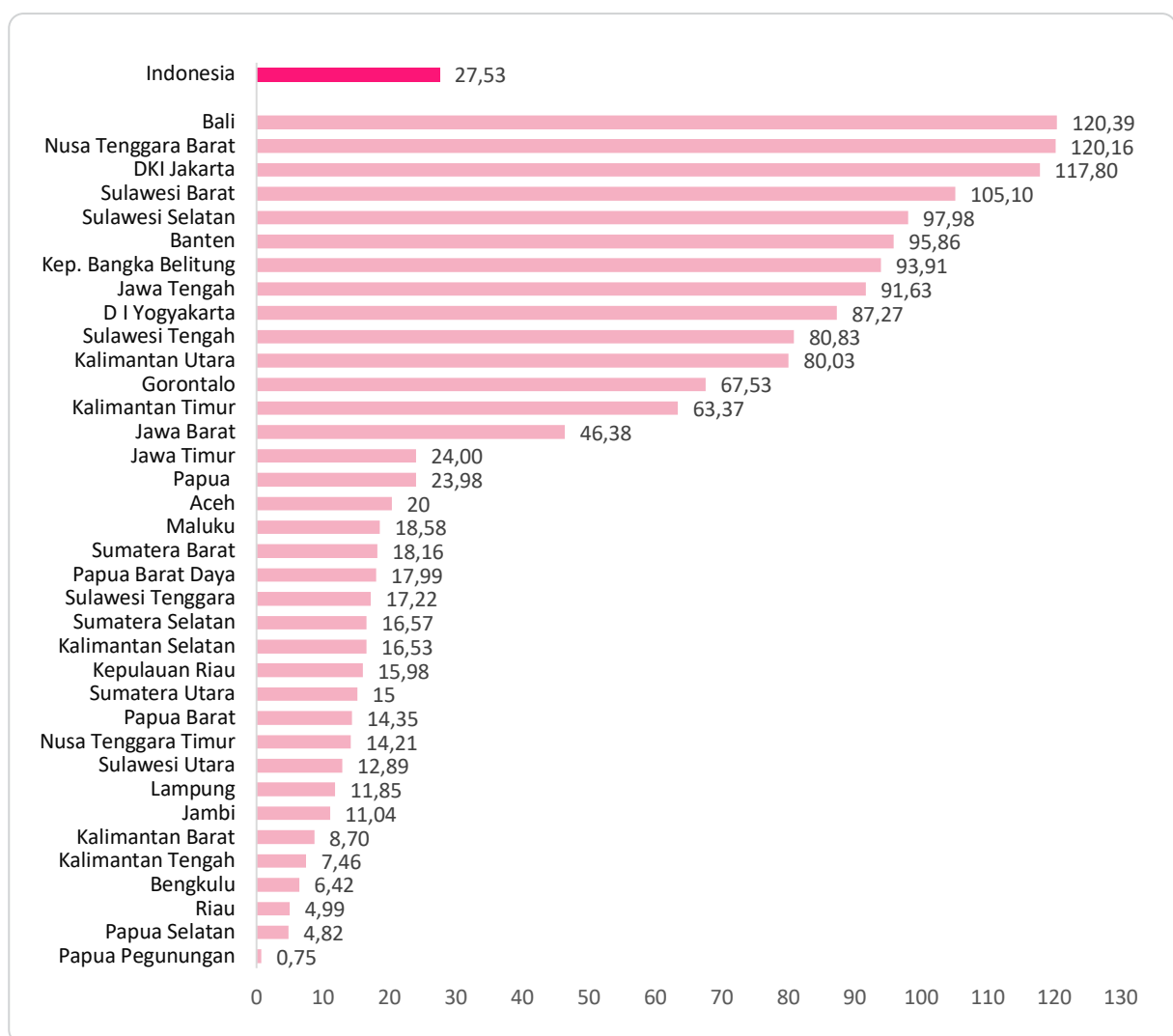


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan oleh petugas kesehatan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di puskesmas.

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan pendekatan pelayanan komprehensif dan terintegrasi terhadap penyebab utama kematian balita yang sering dijumpai, seperti pneumonia, diare, campak, malaria, atau kombinasi dari penyakit-penyakit tersebut. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut sering kali dikaitkan dengan kondisi gizi kurang atau gizi buruk. Implementasi MTBS dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten/kota.

GAMBAR 5.26
BALITA DILAYANI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Gambar 5.26 menunjukkan persentase balita yang dilayani melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) secara nasional tahun 2025 masih relatif rendah yaitu sebesar 27,53%. Terdapat variasi yang sangat besar antarprovinsi, dengan capaian tertinggi di Bali (120,39%), Nusa Tenggara Barat (120,16%), dan DKI Jakarta (117,80%), sementara capaian terendah terdapat di Papua Pegunungan (0,75%), Papua Selatan (4,82%), dan Riau (4,99%); selain itu, Maluku Utara dan Papua Barat Daya belum melaporkan data. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam akses pelayanan kesehatan anak, penerapan MTBS di fasilitas kesehatan, serta kualitas pencatatan dan pelaporan program antarwilayah. Secara keseluruhan, rendahnya capaian nasional menunjukkan perlunya penguatan implementasi MTBS melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, optimalisasi pelayanan kesehatan anak di puskesmas dan jejaringnya, serta perbaikan sistem pelaporan untuk memastikan balita sakit mendapatkan penanganan yang sesuai standar.

3. Imunisasi

Arah pembangunan kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya program imunisasi. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan suatu penyakit, orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia, pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling *cost-effective*. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan *herd immunity*. Pemberian imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diperkirakan sebanyak 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam PD3I, antara lain Hepatitis B, TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak rubela, radang selaput otak dan radang paru-paru.

Program imunisasi yang dilakukan pemerintah mencakup beberapa jenis vaksinasi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Beberapa program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): Program ini mencakup serangkaian vaksinasi dasar yang diberikan kepada bayi dan anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seperti imunisasi Hepatitis B, BCG (Tuberkulosis), DPT-HB-Hib (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type b), polio, campak, dan rubella.
2. Imunisasi Tambahan dan Lanjutan: Selain imunisasi dasar, terdapat juga program imunisasi tambahan dan lanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kekebalan individu terhadap penyakit tertentu, seperti vaksinasi influenza, HPV (*Human Papillomavirus*), meningokokus, dan lain sebagainya.
3. Imunisasi Rutin: Pemerintah juga menyelenggarakan program imunisasi rutin yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik di puskesmas, posyandu, sekolah, maupun tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya.

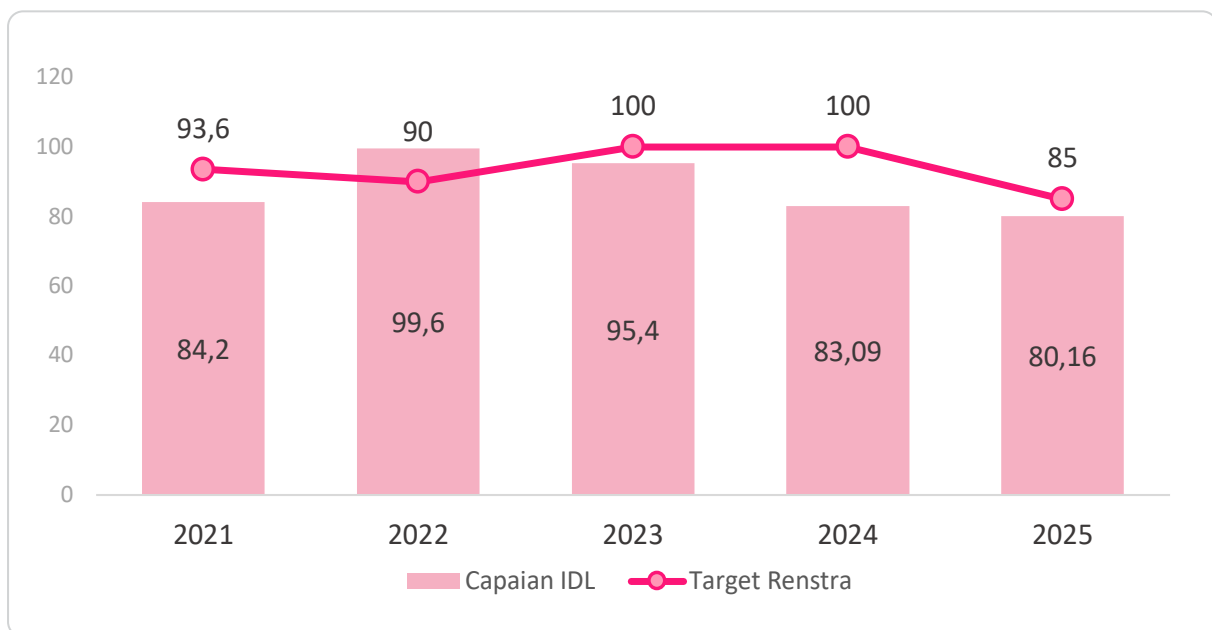
a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yang terdiri dari:

1. Satu dosis Hepatitis B yang diberikan segera setelah lahir;
2. Satu dosis BCG untuk mencegah tuberkulosis;
3. Tiga dosis DPT-HB-HiB untuk mencegah difteri, pertussis, tetanus hepatitis B, dan *Haemophilus influenza* tipe B;
4. Empat dosis polio tetes atau *Oral Polio Vaccine (OPV)*;
5. Satu dosis polio suntik atau *Inactivated Polio Vaccine (IPV)*; dan
6. Satu dosis Campak Rubela.

Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberian ini didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Untuk beberapa daerah terpilih sesuai kajian epidemiologi, analisis beban penyakit dan rekomendasi ahli, ada tambahan imunisasi tertentu, yaitu *Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)* dan *Japanese Encephalitis*. Implementasi pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* belum berlaku secara nasional, sehingga tidak diperhitungkan sebagai komponen imunisasi dasar lengkap pada bayi.

GAMBAR 5.27
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
DI INDONESIA TAHUN 2013-2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada Gambar 5.27 terlihat cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2021-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Capaian IDL meningkat dari 84,2% pada tahun 2021 menjadi 99,6% pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 95,4% pada tahun 2023, dan mengalami penurunan yang lebih tajam pada tahun 2024 (83,09%) serta tahun 2025 (80,16%).

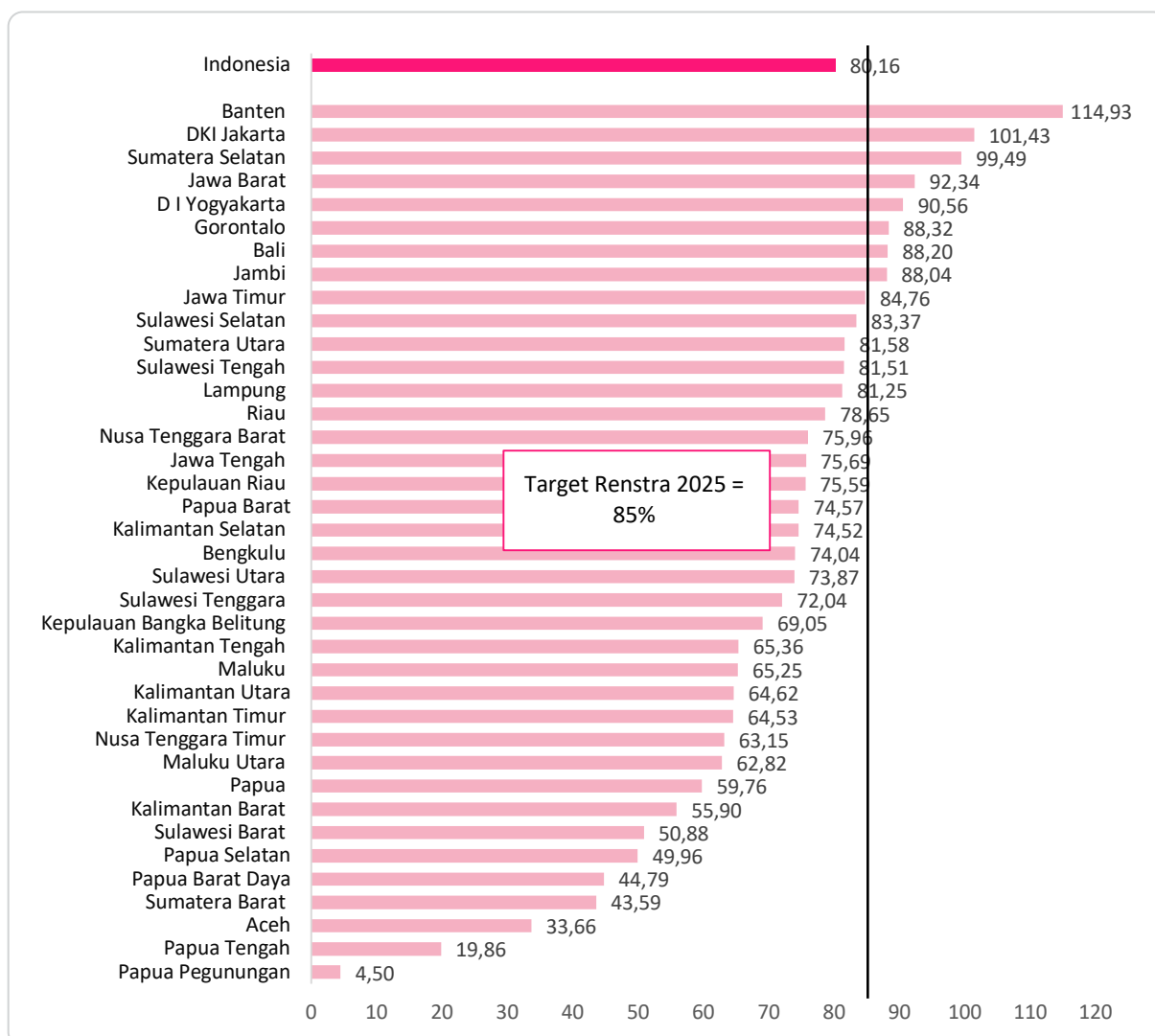
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian tahun 2022 telah melampaui target sebesar 9,6 poin persentase, sedangkan tahun 2021, 2023, 2024, dan 2025 masih berada di bawah target. Kesenjangan terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan selisih 16,91 poin persentase dari target 100%, sementara pada tahun 2025 terdapat kesenjangan 4,84 poin persentase dari target Renstra sebesar 85%.

Meskipun target tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian IDL belum berhasil mencapainya. Penurunan cakupan dalam dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan jumlah anak yang tidak mendapatkan perlindungan optimal terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Beberapa kemungkinan faktor penyebab, diantaranya ketidakseimbangan distribusi vaksin dan sumber daya di tingkat daerah, hambatan geografis dan aksesibilitas di wilayah terpencil, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi, masalah pencatatan dan pelaporan, dampak lanjutan “pandemic” terhadap sistem kesehatan dasar yang belum pulih sepenuhnya.

Langkah-langkah seperti: penguatan program imunisasi di daerah dengan cakupan rendah, evaluasi menyeluruh terhadap penurunan capaian tiap daerah, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi guna meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, koordinasi lintas sector pemerintah pusat, daerah dan mitra pembangunan untuk mengakselerasi pencapaian target nasional.

GAMBAR 5.28
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada gambar 5.28 di atas terlihat bahwa dari 38 provinsi, hanya 8 provinsi yang telah mencapai atau melampaui target Renstra 2025, yaitu Banten (114,93%), DKI Jakarta (101,43%), Sumatera Selatan (99,49%), Jawa Barat (92,34%), D.I. Yogyakarta (90,56%), Gorontalo (88,32%), Bali (88,20%), dan Jambi (88,04%).

Sementara itu, provinsi seperti Jawa Timur (84,76%), Sulawesi Selatan (83,37%), Sumatera Utara (81,58%), dan Sulawesi Tengah (81,51%) sudah mendekati target namun masih belum mencapainya. Di sisi lain, terdapat kesenjangan yang cukup besar pada beberapa provinsi dengan capaian rendah, terutama Papua Pegunungan (4,50%), Papua Tengah (19,86%), dan Aceh (33,66%).

b. Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

Setiap anak yang telah mendapatkan kesempatan pertama imunisasi harus menyelesaikan rangkaian dosis sesuai jadwal agar kekebalan tubuh yang didapat melalui imunisasi dapat terbentuk secara optimal. Jika anak tersebut tidak menyelesaikannya secara lengkap maka disebut sebagai *Drop Out* (DO). Angka DO ini menjadi indikator pemanfaatan layanan imunisasi.

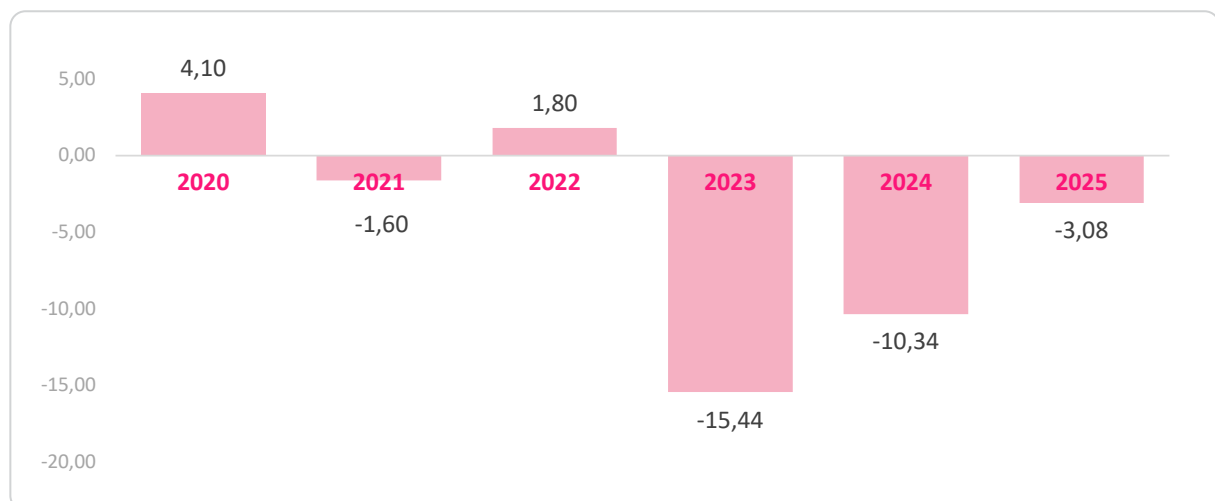
Pemanfaatan layanan imunisasi adalah kesempatan masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi.

Untuk mengetahui angka DO pada bayi, dapat dilakukan penghitungan menggunakan DO imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau DO imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1. Angka DO imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3. Sedangkan, angka DO imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi Campak Rubela 1. Pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik apabila angka DO <5%, sehingga angka DO dari DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diharapkan tidak melebihi 5%.

Berdasarkan data tahun 2020–2025, angka drop out (DO) imunisasi pada bayi yang diukur dari selisih cakupan DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020 angka DO sebesar 4,10%, masih memenuhi kriteria baik karena berada di bawah batas <5%. Pada tahun 2021 dan 2022 tercatat angka DO masing-masing -1,60% dan 1,80%, yang menunjukkan cakupan imunisasi lanjutan relatif dapat dipertahankan.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi nilai DO negatif yang cukup besar, yaitu -15,44% dan -10,34%, serta -3,08% pada tahun 2025. Nilai DO negatif menunjukkan bahwa cakupan imunisasi Campak Rubela lebih tinggi dibandingkan cakupan DPT-HB-Hib1, yang dapat disebabkan oleh imunisasi kejar (*catch-up immunization*), perbedaan sasaran antarantigen, atau kualitas pencatatan dan pelaporan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

GAMBAR 5.29
ANGKA DROP OUT (DO) IMUNISASI PADA BAYI
TAHUN 2022-2025



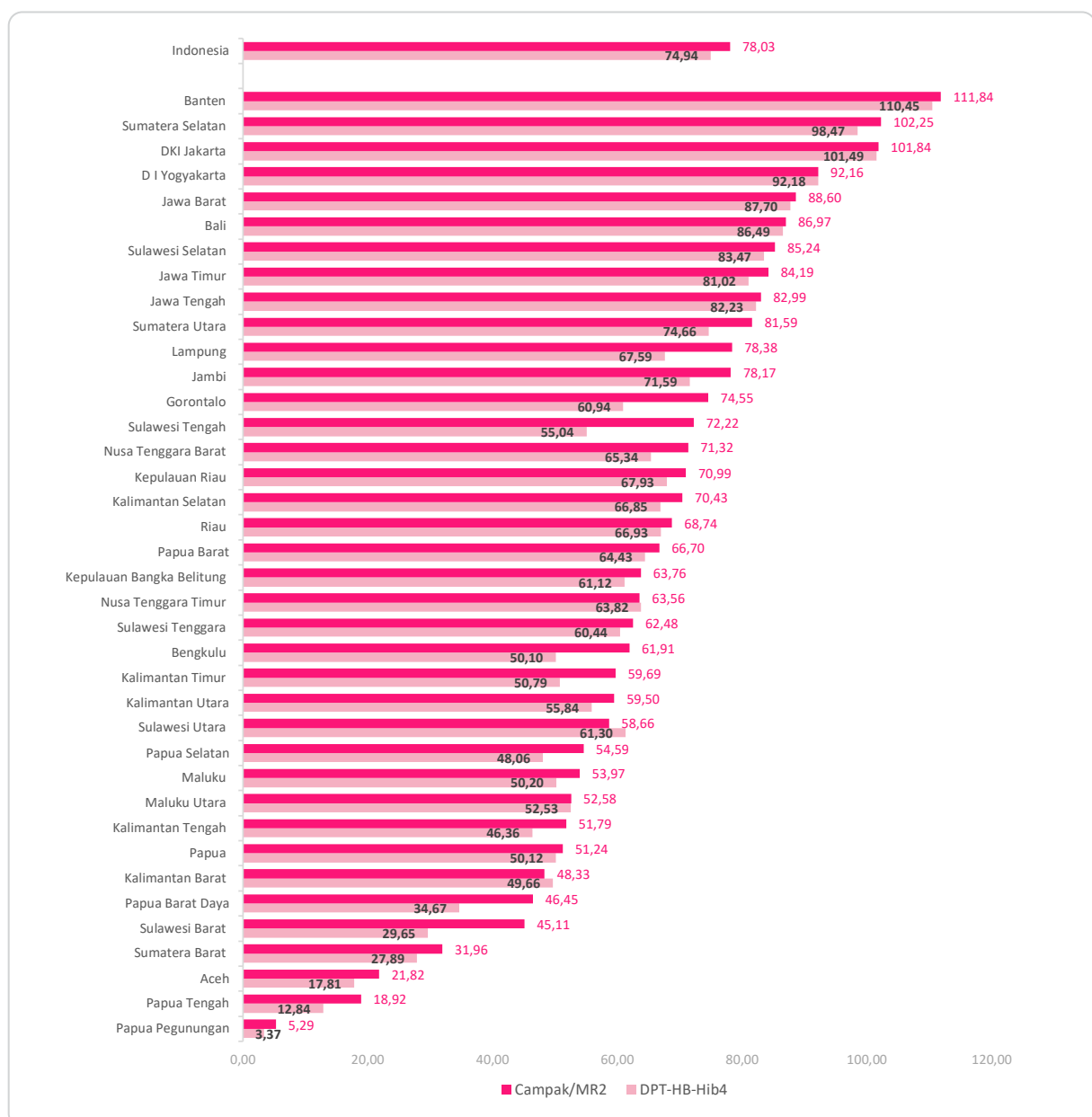
Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan kriteria bahwa pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik apabila angka DO kurang dari 5%, capaian tahun 2020, 2021, 2022, dan 2025 menunjukkan keberlangsungan layanan imunisasi yang baik. Meskipun demikian, adanya nilai DO negatif yang cukup besar pada beberapa tahun mengindikasikan perlunya evaluasi kualitas data dan konsistensi pencatatan cakupan imunisasi agar indikator DO dapat menggambarkan keberlanjutan imunisasi bayi secara lebih akurat Rincian data mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2024 terdapat pada Lampiran 5.23.

c. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta (bawah dua tahun) diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Beberapa jenis imunisasi dasar yang diberikan pada saat bayi memerlukan dosis lanjutan (*booster*) untuk meningkatkan kekebalannya, salah satunya melalui pemberian imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan masing-masing 1 dosis DPT-HB-HiB dan Campak Rubela kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5.30
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Dari Gambar 5.30 di atas, cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 tahun 2025 secara nasional mencapai 74,94%, sedangkan cakupan Campak/MR2 mencapai 78,03%. Dengan Drop Out (DO) sebesar -4,12%. Nilai ini berada di bawah batas 5%, sehingga secara umum menunjukkan keberlangsungan layanan imunisasi lanjutan yang baik.

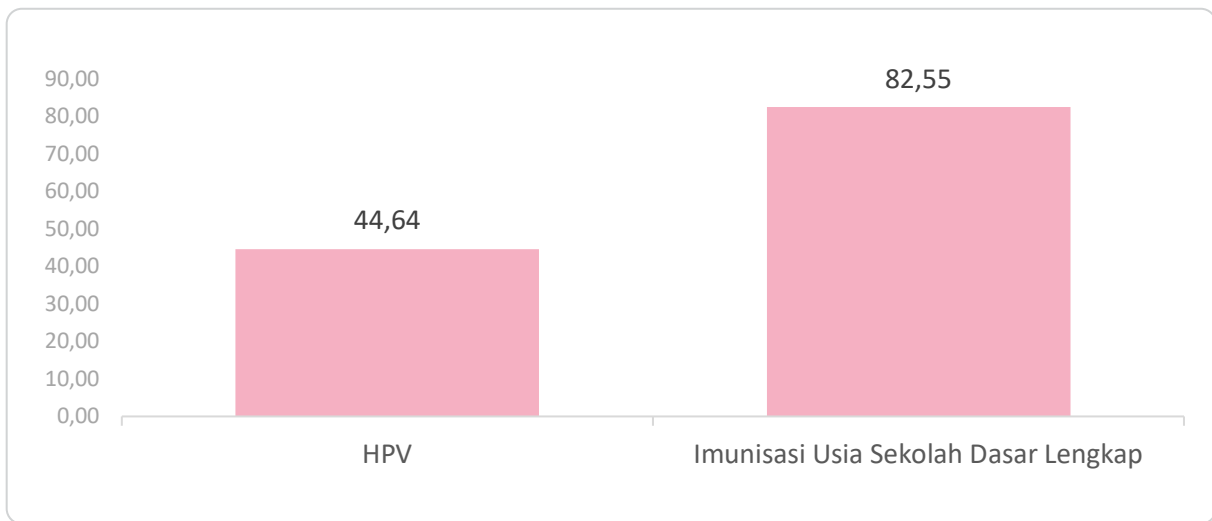
Nilai DO nasional yang negatif mengindikasikan bahwa cakupan Campak/MR2 lebih tinggi dibandingkan DPT-HB-Hib4, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pelaksanaan imunisasi kejar (catch-up immunization), pemberian imunisasi pada anak yang sebelumnya belum tercatat, atau perbedaan kualitas pencatatan dan pelaporan antarantigen. Kondisi serupa juga terlihat pada sebagian besar provinsi, termasuk Banten, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung, yang menunjukkan cakupan Campak/MR2 lebih tinggi dibandingkan DPT-HB-Hib4.

Meskipun demikian, beberapa provinsi masih menunjukkan angka DO positif, seperti Kalimantan Barat (2,68%), Sulawesi Utara (4,31%), dan Nusa Tenggara Timur (0,41%), namun seluruhnya masih berada di bawah ambang batas 5% yang menandakan keberlangsungan imunisasi lanjutan masih tergolong baik. Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 5.25.

e. Imunisasi Anak Sekolah

Selain imunisasi lanjutan pada baduta, untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada anak sehingga dapat terlindungi dari PD3I, juga dilakukan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah. Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dilakukan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan sasaran anak usia sekolah dasar (SD). Jenis imunisasi yang diberikan pada pelaksanaan BIAS, yaitu Campak Rubela, Tetanus dan Difteri. Pada daerah tertentu yang menjadi lokus pelaksanaan program demonstrasi imunisasi Human Papilloma Virus (HPV), imunisasi HPV ditambahkan pada kegiatan BIAS dengan sasaran siswa perempuan kelas 5 dan 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pelaksanaan imunisasi pada anak sekolah diberikan pada anak SD/MI/ sederajat usia kelas 1 (Campak Rubela dan DT), kelas 2 (Td) dan kelas 5 (Td). Pada masa pandemi COVID-19, pelaksanaan BIAS menjadi sangat terpengaruh dan tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya pelaksanaan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

GAMBAR 5.31
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan data tahun 2025, cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar Lengkap di Indonesia mencapai 82,55%, menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah telah memperoleh imunisasi sesuai jadwal program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Namun, cakupan imunisasi HPV baru mencapai 44,64%, yang berarti masih kurang dari separuh sasaran anak perempuan yang mendapatkan imunisasi HPV sebagai upaya pencegahan kanker leher rahim.

C. GIZI

Pembahasan ini berisi status gizi balita beserta pencegahan dan penanganan masalah gizi, di antaranya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita gizi kurang.

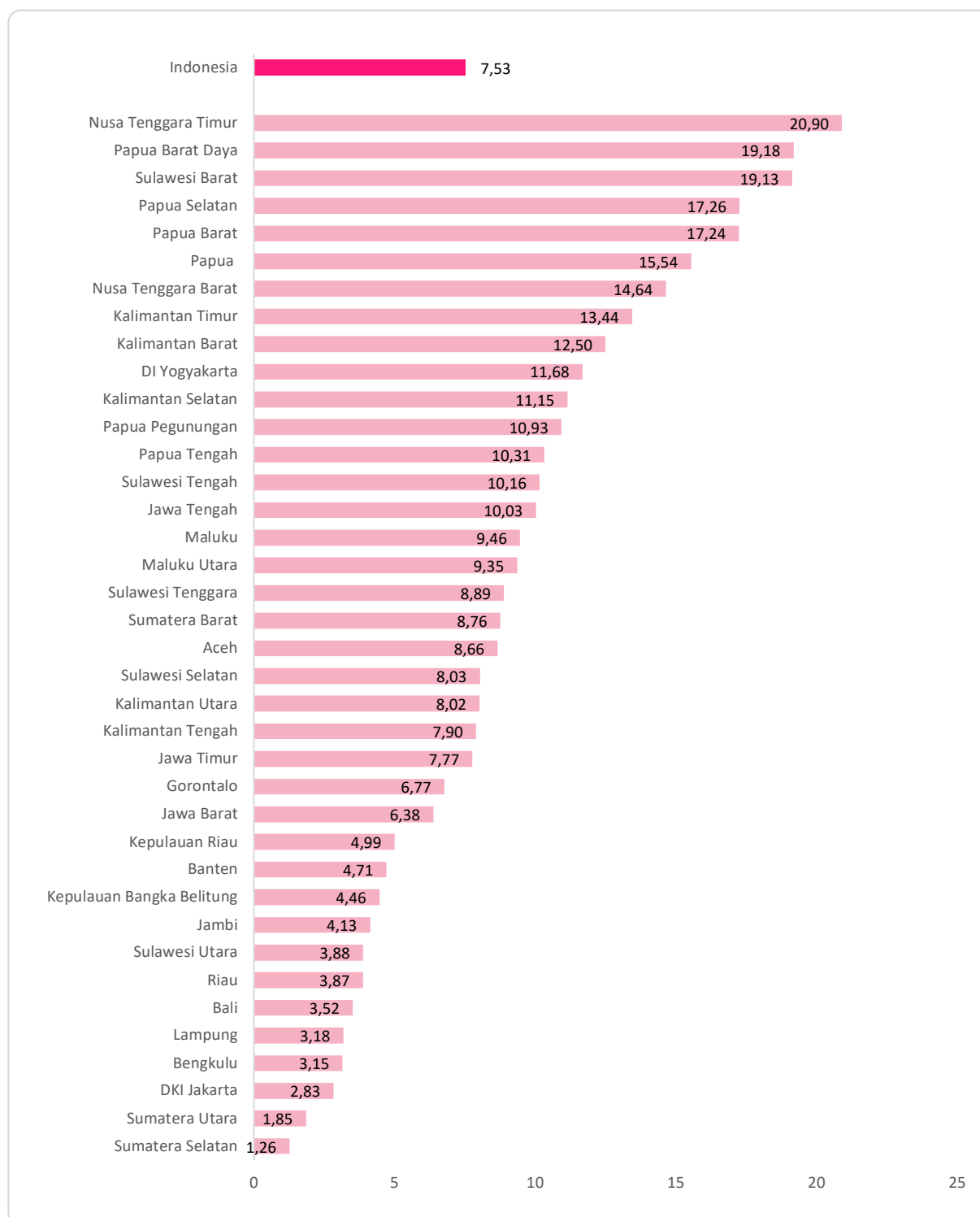
1. Status Gizi Balita

Standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun standar antropometri yang digunakan terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO *Child Growth Standards* untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO *Reference* 2007 untuk anak 5-18 tahun.

Gambar 5.32 menunjukkan prevalensi balita *underweight* (berat badan sangat kurang dan berat badan kurang) tahun 2025 secara nasional sebesar 7,53%. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi, dengan prevalensi terendah di Sumatera Selatan (1,26%), Sumatera Utara (1,85%), dan DKI Jakarta (2,83%), sedangkan prevalensi tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur (20,90%), Papua Barat Daya (19,18%), dan Sulawesi Barat (19,13%). Persentase selengkapnya untuk

persentase balita menurut status gizi dengan indeks BB/U di setiap provinsi dapat dilihat pada lampiran 5.29

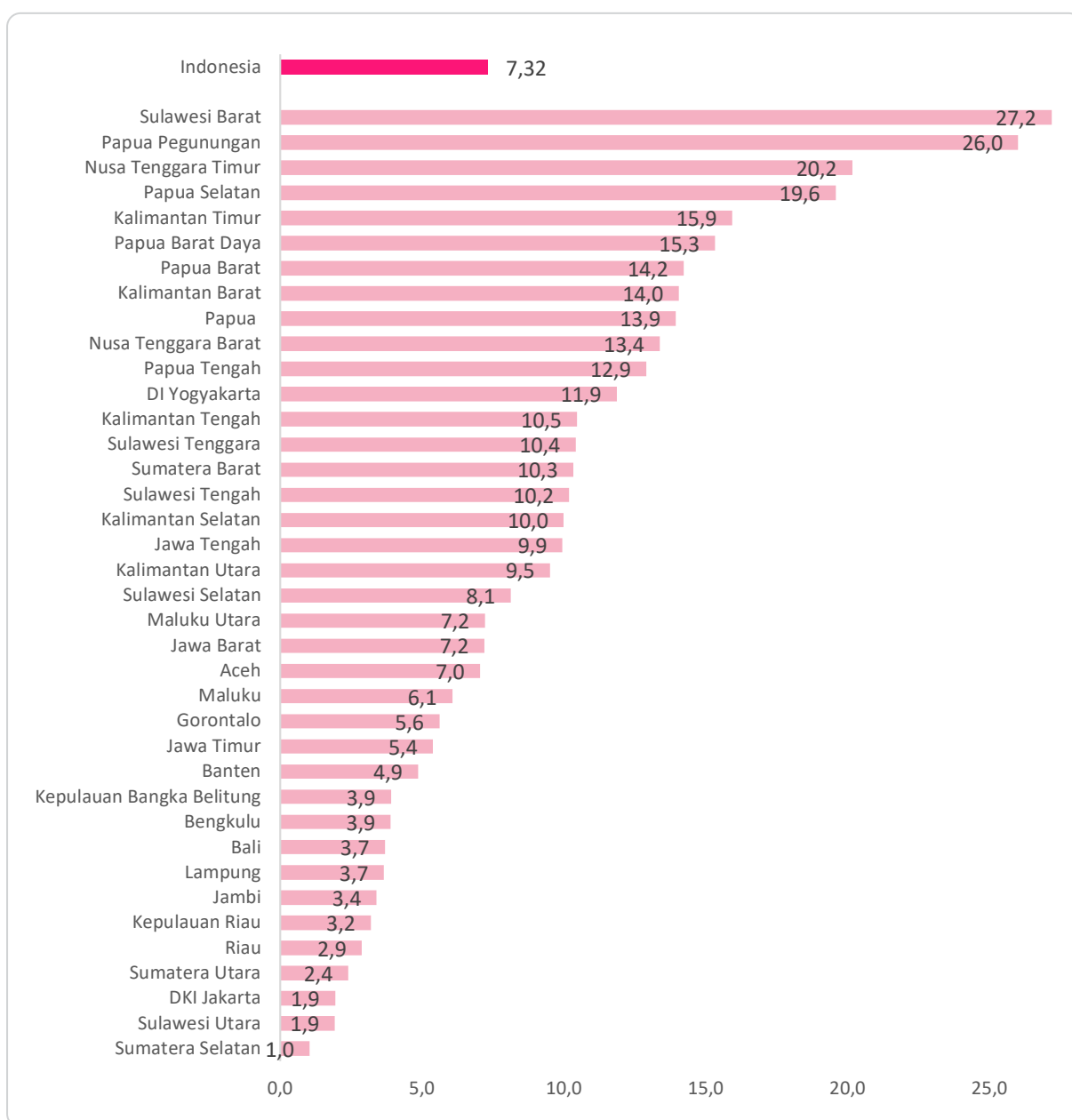
GAMBAR 5.32
PERSENTASE *UNDERWEIGHT* (BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG)
PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Pada Balita usia 0-59 bulan, seperti pada Gambar 5.33 menunjukkan persentase balita *stunting* (pendek dan sangat pendek) tahun 2025 di Indonesia sebesar 7,32%. Meskipun angka nasional relatif rendah, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antar provinsi. Provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah adalah Sumatera Selatan (1,04%), Sulawesi Utara (1,92%), dan DKI Jakarta (1,93%), sedangkan prevalensi tertinggi terdapat di Sulawesi Barat (27,19%), Papua Pegunungan (26,01%), dan Nusa Tenggara Timur (20,16%). Persentase selengkapnya untuk persentase Balita menurut status gizi dengan indeks TB/U di setiap provinsi dapat dilihat pada lampiran 5.29.

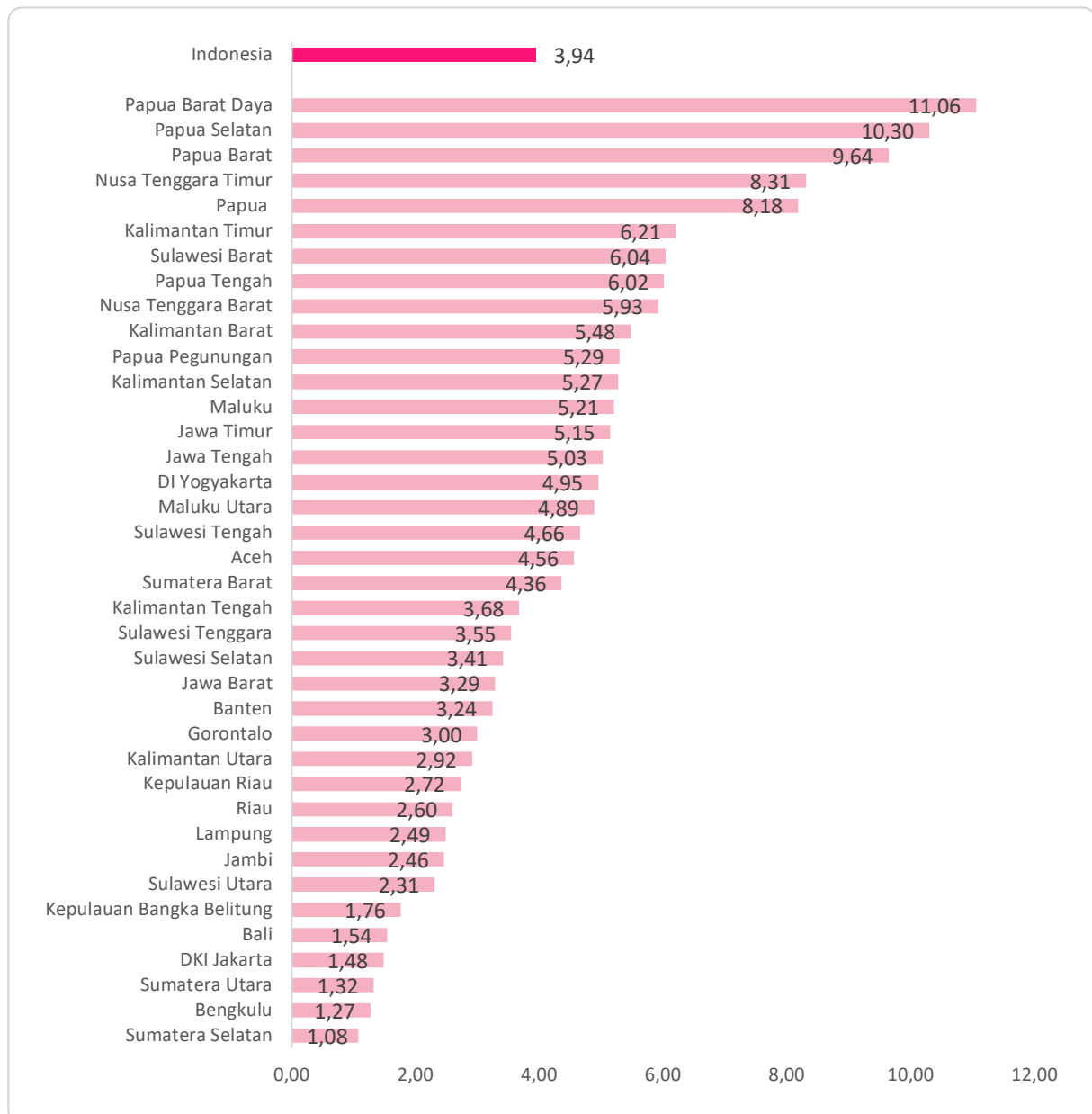
GAMBAR 5.33
PERSENTASE *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)
PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Persentase balita *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) tahun 2025 di Indonesia sebesar 3,94%. Meskipun angka nasional relatif rendah, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antar provinsi. Provinsi dengan prevalensi terendah adalah Sumatera Selatan (1,08%), Bengkulu (1,27%), dan Sumatera Utara (1,32%), sedangkan prevalensi tertinggi terdapat di Papua Barat Daya (11,06%), Papua Selatan (10,30%), dan Papua Barat (9,64%).

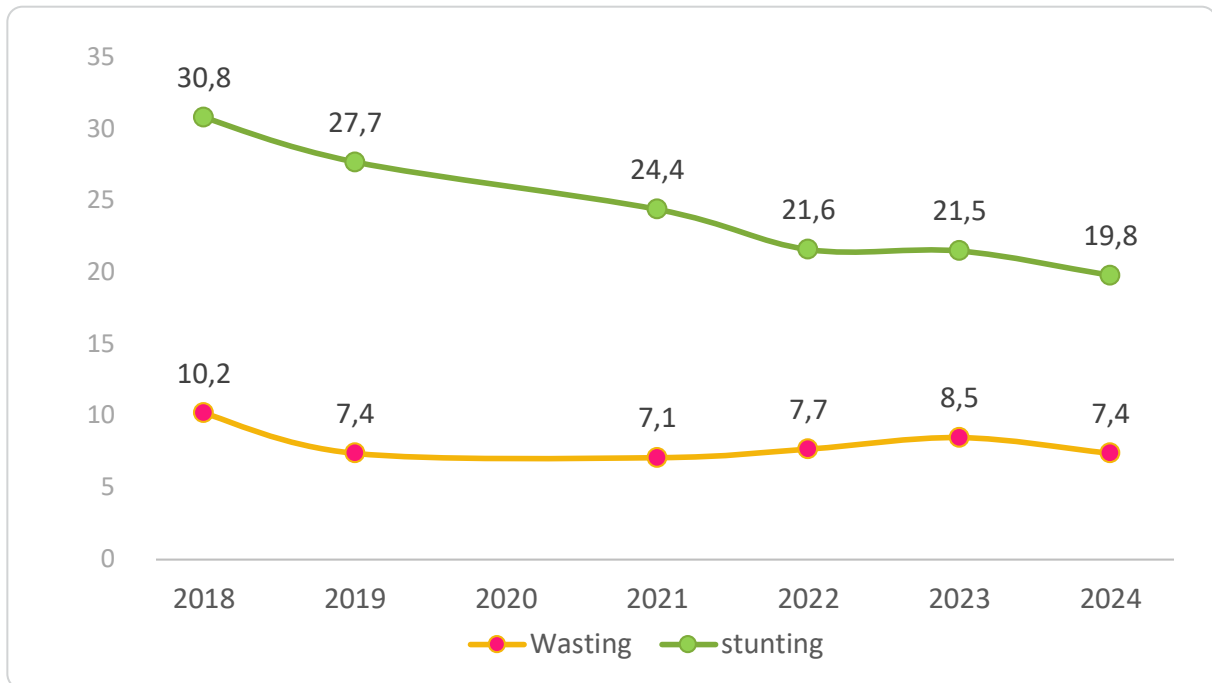
GAMBAR 5.34
PERSENTASE *WASTING* (GIZI KURANG DAN GIZI BURUK)
PADA BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Pada Gambar 5.35 terlihat bahwa prevalensi stunting (sangat pendek dan pendek) dan wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2018-2023 cenderung mengalami penurunan, meskipun untuk wasting mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun apada 2024, prevalensinya berhasil turun kembali. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk penurunan angka stunting dan wasting.

GAMBAR 5.35
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (STUNTING) DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG (WASTING) PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2024



Sumber: Kemenkes PSG 2017, Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021-2024

Perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat dalam upaya penerapan gizi seimbang perlu dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), mengonsumsi menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat dalam upaya penerapan gizi seimbang perlu dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), mengonsumsi menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

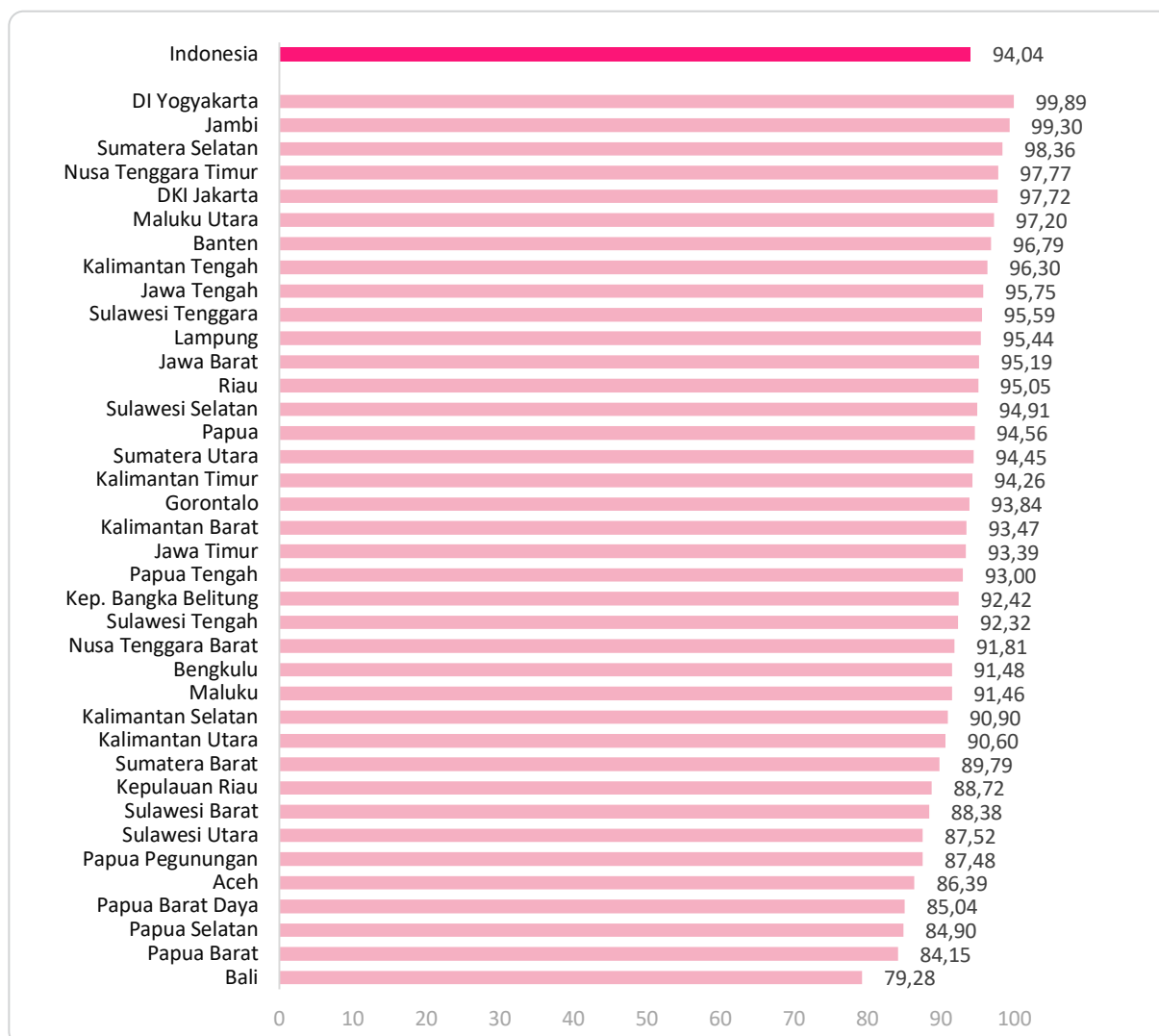
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI (Air Susu Ibu) dari payudara. Inisiasi Menyusu Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) tahun 2025 secara nasional mencapai 94,04%, menunjukkan bahwa sebagian besar bayi baru lahir telah mendapatkan kesempatan untuk mulai menyusui dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan pelayanan persalinan yang semakin mendukung praktik menyusui dini sebagai salah satu intervensi penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah DI Yogyakarta (99,89%), Jambi (99,30%), dan Sumatera Selatan (98,36%), sedangkan capaian terendah terdapat di Bali (79,28%), Papua Barat (84,15%), dan Papua Selatan (84,90%). Meskipun terdapat variasi antarprovinsi, seluruh provinsi telah mencapai cakupan di atas 79%, menunjukkan bahwa praktik IMD telah diterapkan secara luas di Indonesia.

GAMBAR 5.36
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

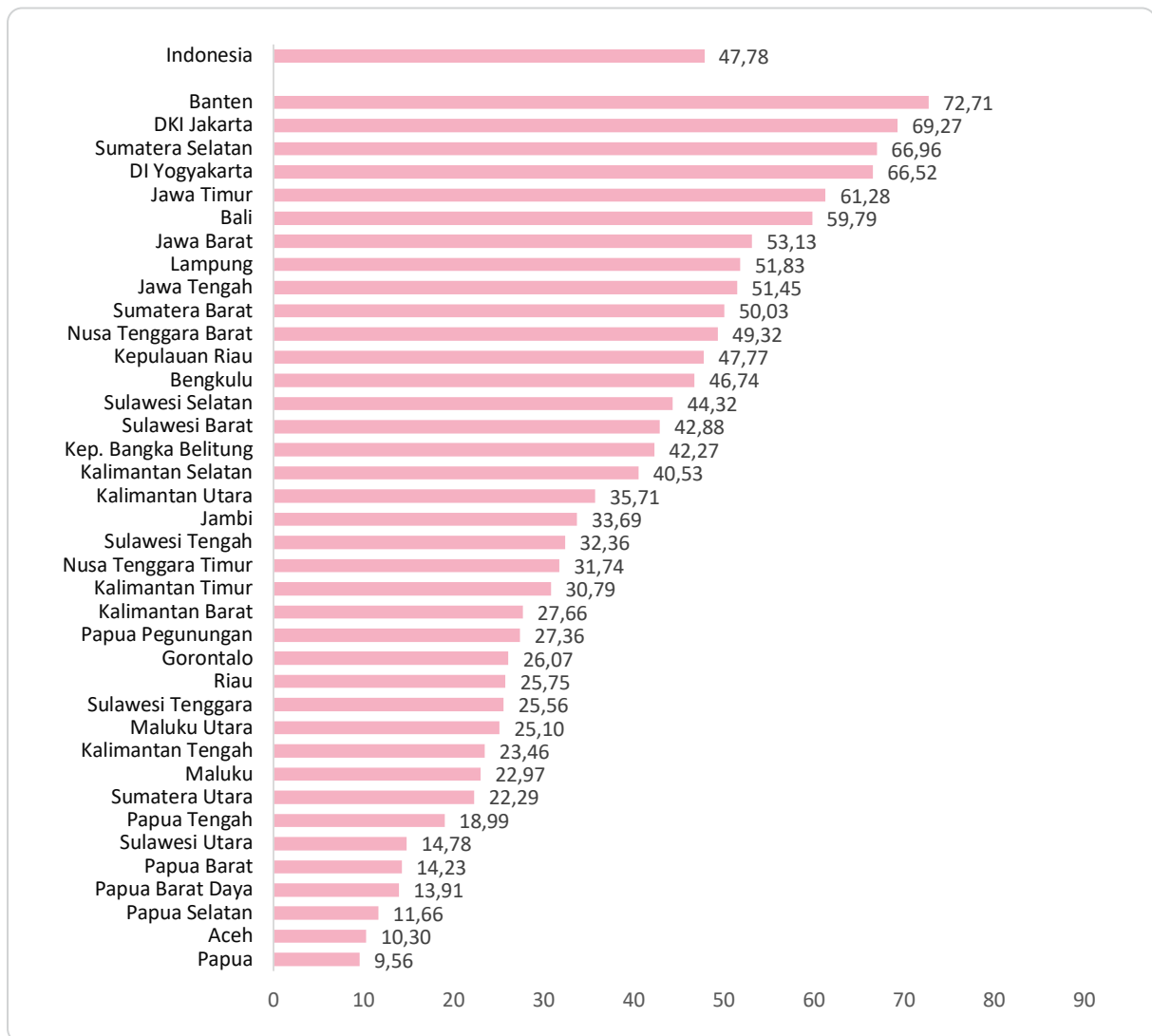


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif secara nasional pada tahun 2025 mencapai 47,78%, yang menunjukkan bahwa kurang dari separuh bayi usia 6 bulan memperoleh ASI eksklusif sesuai rekomendasi. Meskipun capaian ASI eksklusif bayi yang lulus sampai usia 6 bulan kurang dari 50%, namun cakupan ASI eksklusif bayi usia kurang dari 6 bulan (ASI proses) mencapai 87,61%, hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan promosi, perlindungan, dan dukungan pemberian ASI eksklusif sampai bayi usia lulus 6 bulan untuk meningkatkan kesehatan dan status gizi bayi.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Banten (72,71%), DKI Jakarta (69,27%), dan Sumatera Selatan (66,96%), sedangkan capaian terendah terdapat di Papua (9,56%), Aceh (10,30%), dan Papua Selatan (11,66%). Kesenjangan yang cukup besar antarprovinsi menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik pemberian ASI, akses terhadap konseling menyusui, dukungan keluarga dan lingkungan kerja, serta kualitas pencatatan dan pelaporan program. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.20.

GAMBAR 5.37
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

b. Penimbangan Balita

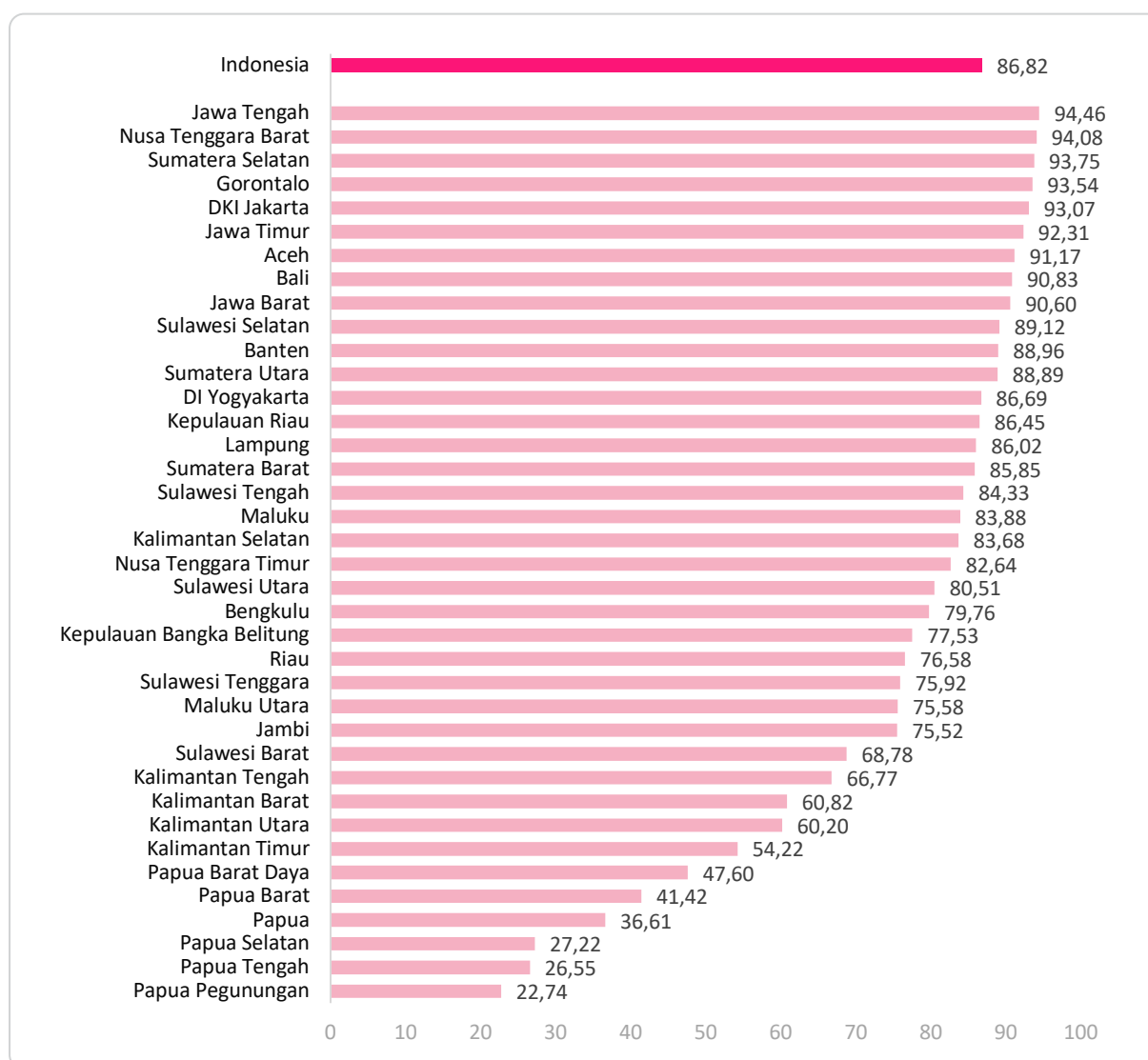
Penimbangan balita merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan balita adalah bagian dari kegiatan rutin pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada pelayanan gizi dan kesehatan di Puskesmas. Pemantauan pertumbuhan balita juga berfungsi sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan pada balita. Melalui penimbangan balita tersebut dapat diketahui status gizi balita yang bermasalah sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahannya.

Secara nasional, persentase balita yang ditimbang setiap bulan pada tahun 2025 mencapai 86,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar balita di Indonesia telah memperoleh pemantauan pertumbuhan secara rutin melalui kegiatan penimbangan bulanan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi, dengan rentang capaian mulai dari 22,74% hingga 94,46%.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Jawa Tengah (94,46%), diikuti Nusa Tenggara Barat (94,08%), Sumatera Selatan (93,75%), Gorontalo (93,54%), DKI Jakarta (93,07%), dan Jawa Timur (92,31%). Tingginya cakupan di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemantauan pertumbuhan balita, termasuk pelaksanaan kegiatan Posyandu, telah berjalan dengan baik sehingga sebagian besar balita memperoleh layanan penimbangan secara rutin.

Sebaliknya, provinsi dengan capaian terendah didominasi oleh wilayah Tanah Papua. Papua Pegunungan mencatat persentase paling rendah, yaitu 22,74%, disusul Papua Tengah (26,55%), Papua Selatan (27,22%), Papua (36,61%), Papua Barat (41,42%), dan Papua Barat Daya (47,60%). Rendahnya cakupan di wilayah tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan tenaga kesehatan, serta belum meratanya penyelenggaraan Posyandu. Data lebih lengkap mengenai jumlah balita yang ditimbang menurut jenis kelamin dan provinsi dapat dilihat di lampiran 5.28.

GAMBAR 5.38
PERSENTASE BALITA DITIMBANG PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

Vitamin A merupakan zat gizi penting yang terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Adapun vitamin A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Sedangkan apabila anak kekurangan vitamin A, maka anak bisa menjadi rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernafasan atas, campak, dan diare.

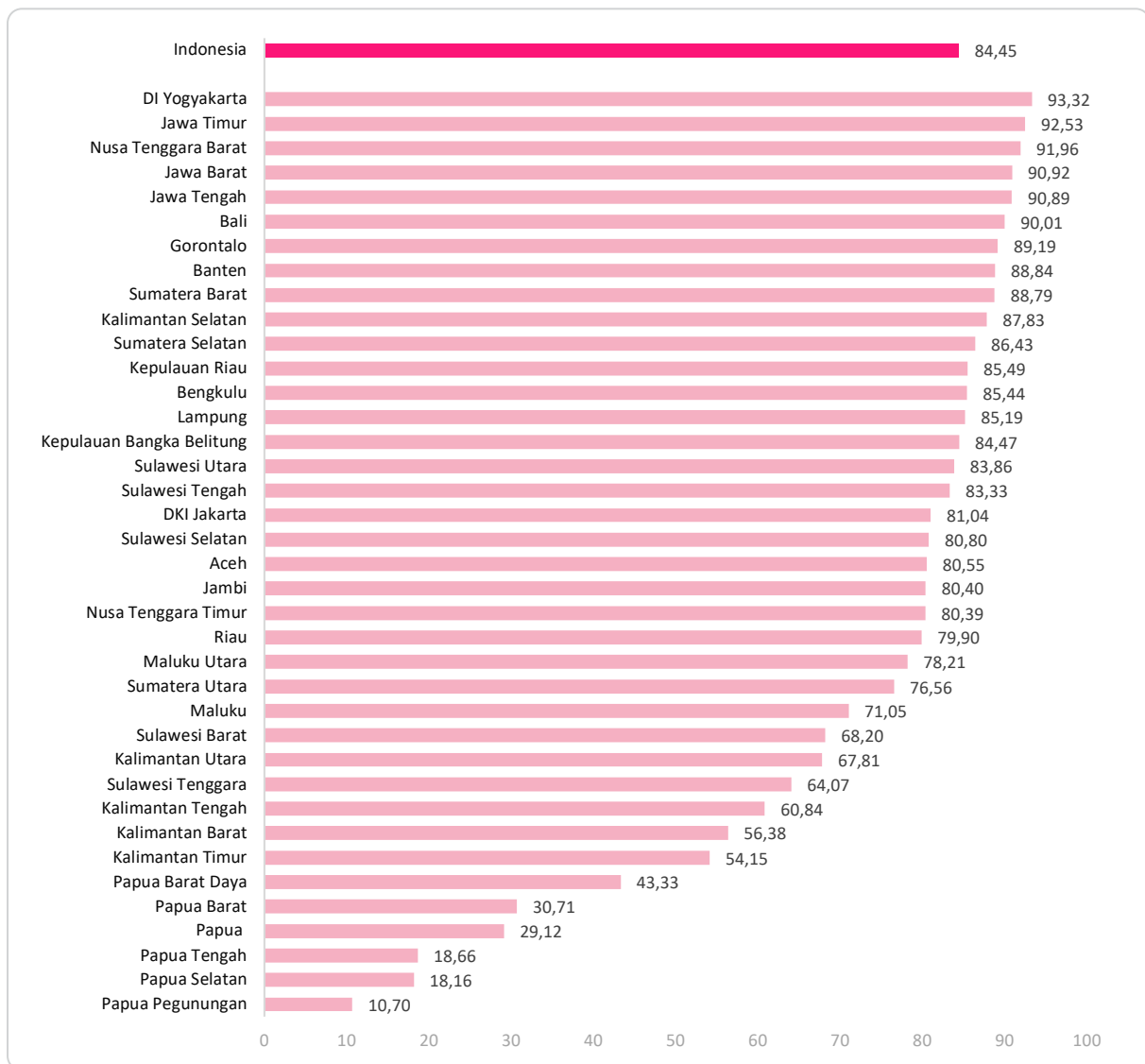
Kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (*nipple*) yang dapat digunting, tidak transparan (*opaque*), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin

A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

Gambar 5.39 memperlihatkan bahwa cakupan pemberian kapsul Vitamin A pada balita secara nasional tahun 2025 mencapai 84,45%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar balita telah memperoleh suplementasi Vitamin A sesuai program. Namun, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antarprovinsi, dengan capaian tertinggi di DI Yogyakarta (93,32%), Jawa Timur (92,53%), dan Nusa Tenggara Barat (91,96%), sedangkan capaian terendah terdapat di Papua Pegunungan (10,70%), Papua Selatan (18,16%), dan Papua Tengah (18,66%).

GAMBAR 5.39
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

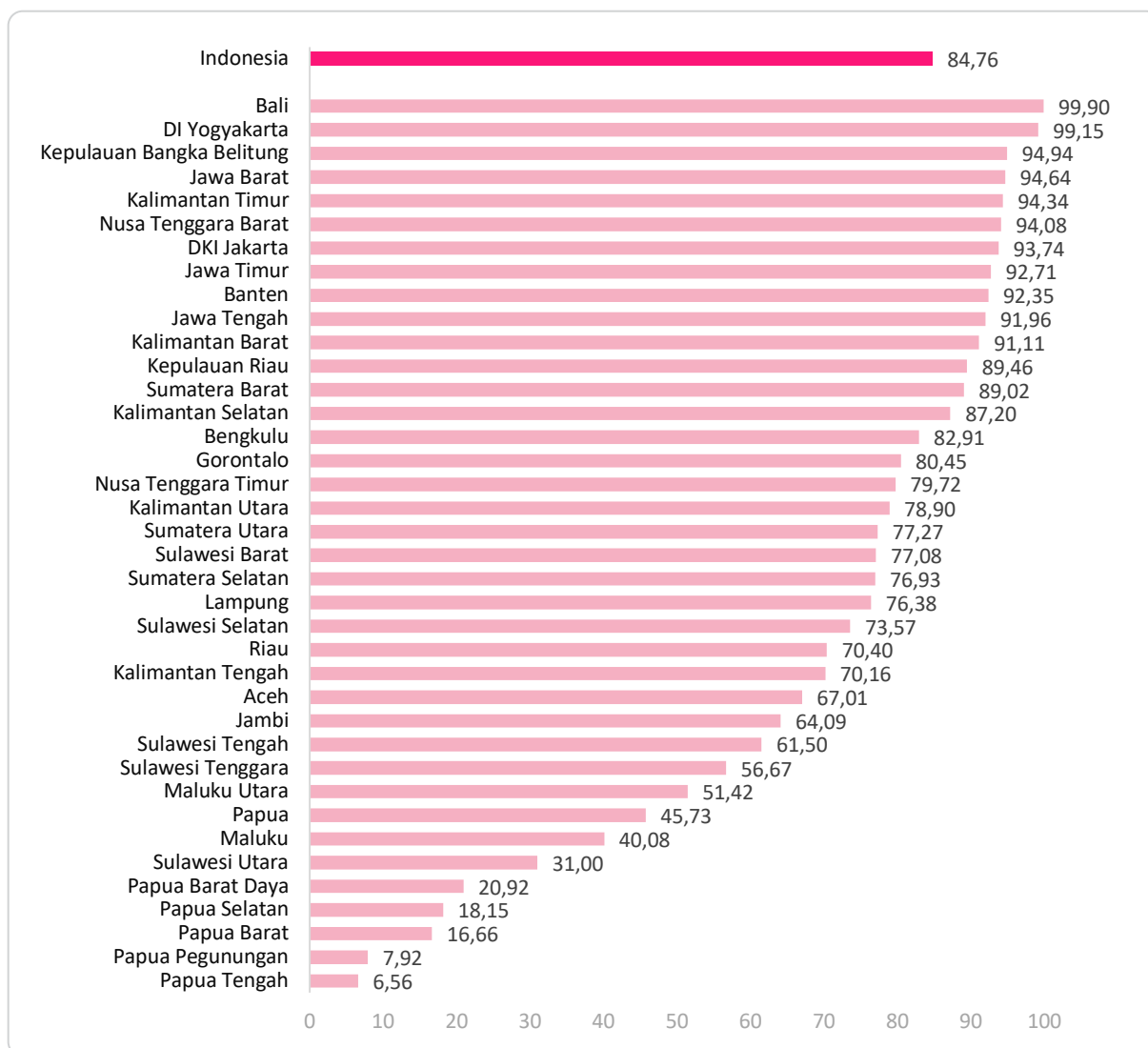
Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur mulai dari balita sampai usia lanjut. Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia dikarenakan siklus menstruasi setiap bulan. Anemia dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Anemia yang terjadi pada rematri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak.

Penanganan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai pencegahan, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Konsumsi makanan beraneka ragam dan kaya akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C seperti yang terdapat pada hati, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap, buah-buahan, dsb. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun dengan minimal pemberian 26 tablet

Cakupan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 26 tablet pada remaja putri tahun 2025 secara nasional mencapai 84,76%, menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri telah memperoleh TTD sebagai upaya pencegahan anemia. Meskipun capaian nasional tergolong tinggi, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi, dengan capaian tertinggi di Bali (99,90%), DI Yogyakarta (99,15%), dan Kepulauan Bangka Belitung (94,94%), sedangkan capaian terendah terdapat di Papua Tengah (6,56%), Papua Pegunungan (7,92%), dan Papua Barat (16,66%). data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.9.

GAMBAR 5.40
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

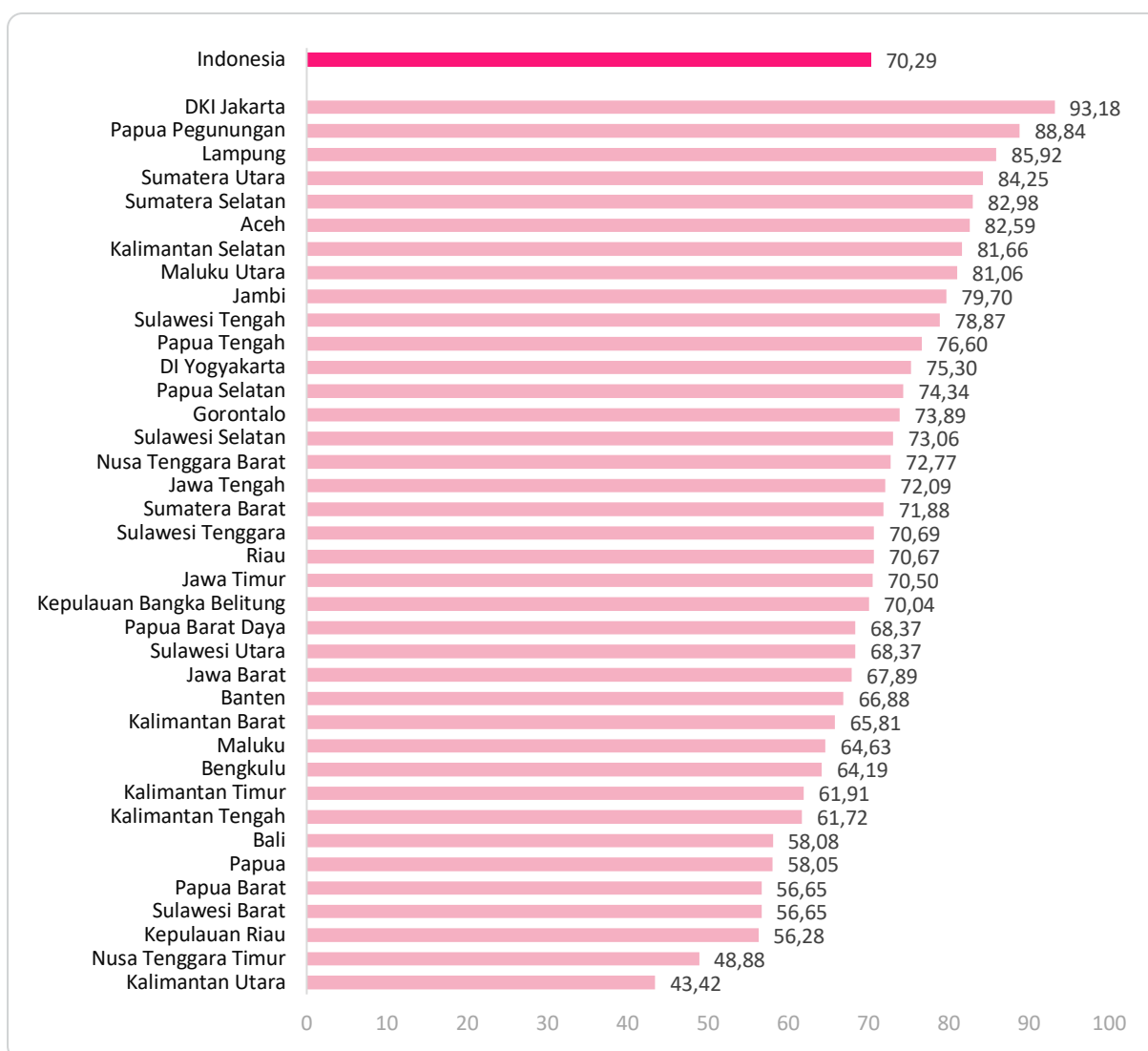


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Kurang

Gambar 5.41 menunjukkan bahwa Ibu hamil dengan KEK berisiko mengalami partus lama, perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi, serta melahirkan bayi prematur, BBLR, atau cacat. Penanggulangannya melalui pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mencukupi kebutuhan gizi, bukan menggantikan makanan utama. Cakupan nasional PMT bagi ibu hamil risiko KEK dan KEK tahun 2025 tercatat 70,29%.

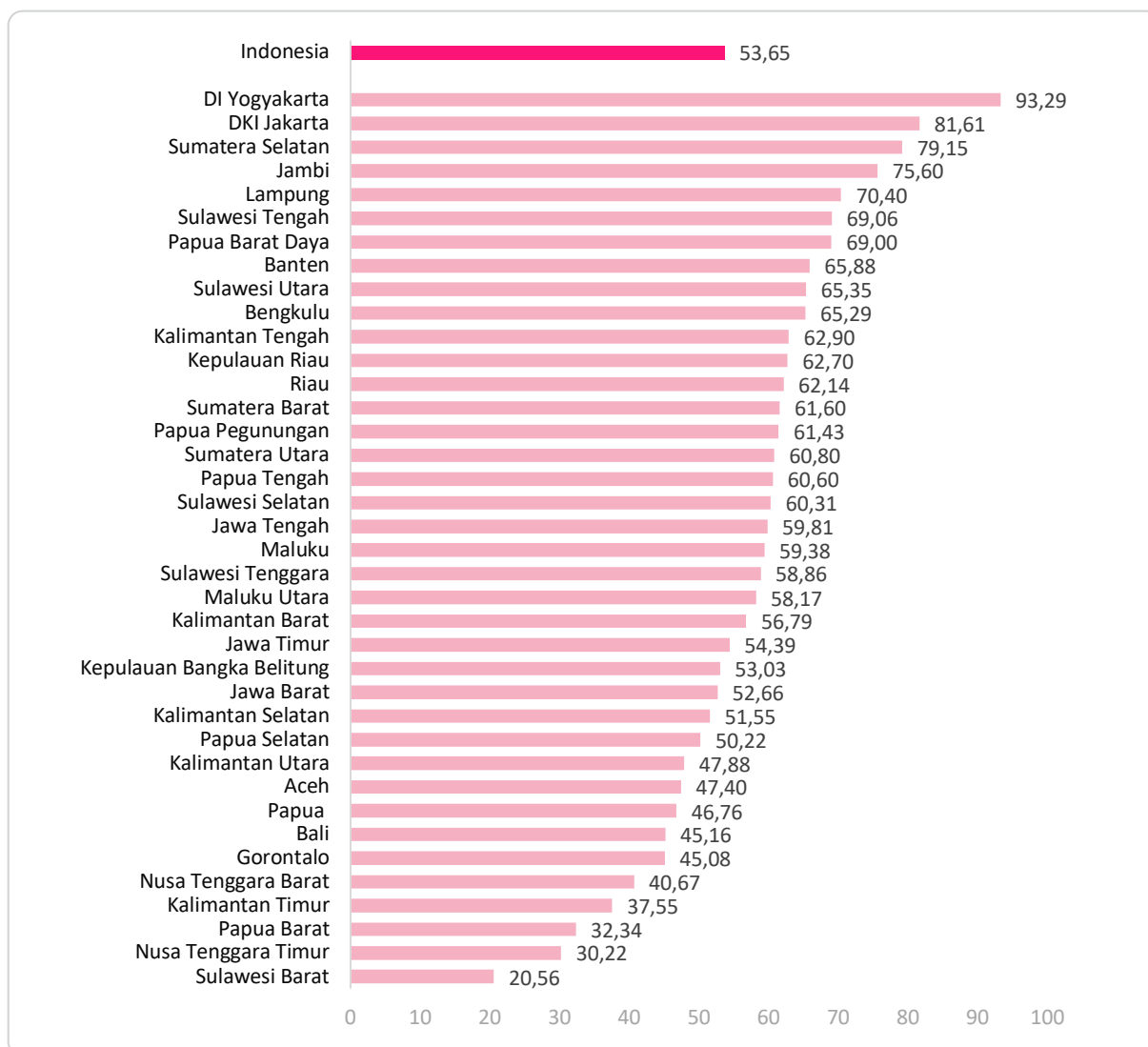
GAMBAR 5.41
CAKUPAN IBU HAMIL RESIKO KURANG ENERGI KRONIK (KEK) MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Langkah ini diperlukan untuk memastikan intervensi gizi bagi ibu hamil KEK tepat sasaran, merata, dan berdampak nyata, dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas generasi mendatang.

GAMBAR 5.42
CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan secara nasional tahun 2025 mencapai 53,65%, yang menunjukkan bahwa baru sekitar separuh balita gizi kurang telah memperoleh intervensi pemberian makanan tambahan. Capaian ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan cakupan layanan gizi untuk memastikan seluruh balita gizi kurang mendapatkan penanganan sesuai standar.

Provinsi dengan capaian tertinggi adalah DI Yogyakarta (93,29%), DKI Jakarta (81,61%), dan Sumatera Selatan (79,15%), sedangkan capaian terendah terdapat di Sulawesi Barat (20,56%), Nusa Tenggara Timur (30,22%), dan Papua Barat (32,34%). Kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi menunjukkan adanya perbedaan dalam akses layanan gizi, ketersediaan makanan tambahan, efektivitas penemuan kasus, serta pelaksanaan program di daerah.

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT



BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi, dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang selain paru (ekstra paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa (56,5% laki-laki dan 32,5% perempuan) dan 11% diderita oleh anak-anak. Sampai saat ini, TBC merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia dan merupakan kematian tertinggi yang disebabkan oleh penyakit menular. Jumlah kematian akibat TBC (di antara pasien HIV negatif) secara global pada tahun 2024 sebesar 1,08 juta (WHO Global TB report, 2025).

Indonesia juga merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 10% dibandingkan seluruh kasus di dunia. Secara global, diperkirakan 10,7 juta orang menderita TBC pada tahun 2024. (WHO Global TB report, 2025).

Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Insiden Tuberkulosis

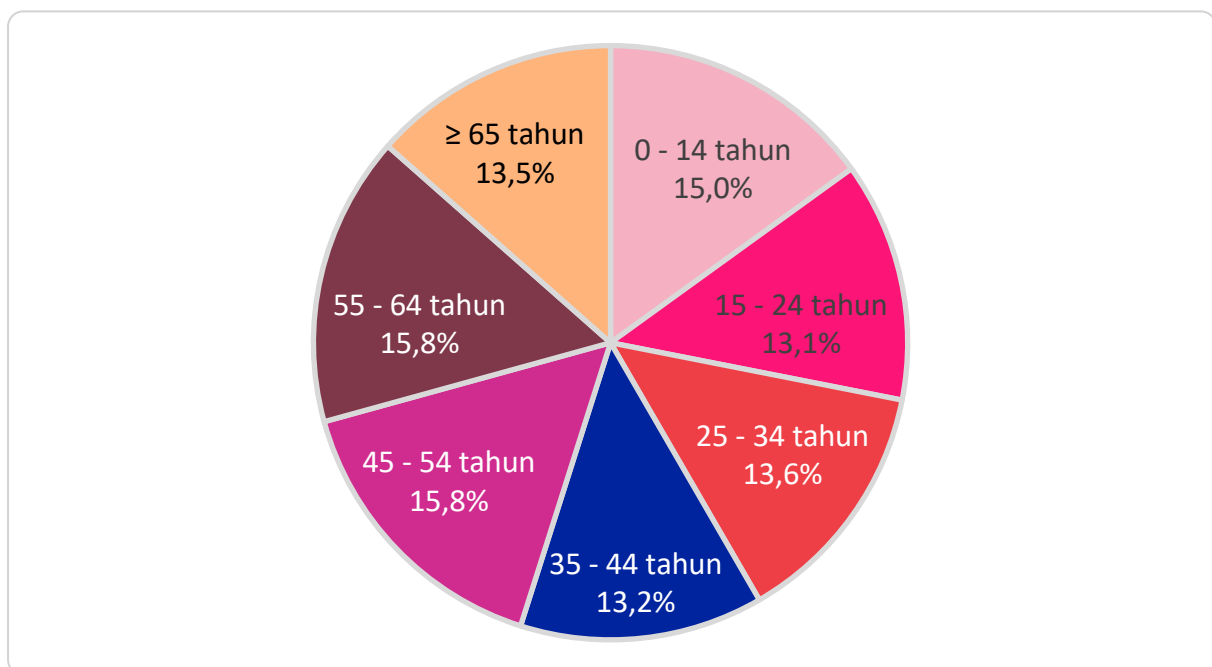
Menurut WHO Global Tuberculosis Report tahun 2025, pada tahun 2024 estimasi angka insiden TBC di Indonesia sebesar 382 per 100.000 penduduk, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan angka insiden TBC tahun 2023 yaitu sebesar 388 per 100.000 penduduk. Angka kematian TBC tahun 2023 sebesar 41 per 100.000 penduduk.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2025 jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 867.480 kasus, meningkat cukup tinggi bila dibandingkan semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2024 yaitu sebesar 856.420 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan baik secara nasional maupun provinsi. Secara nasional jumlah kasus pada laki-laki sebesar 58,2% dan 41,8% pada perempuan. Gambar 6.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 kasus TBC terbanyak ditemukan pada kelompok umur anak 45-54 tahun yaitu sebanyak 137.238 kasus, diikuti kelompok umur 55-64 tahun sebanyak 137.002 kasus dan 0-14 tahun sebanyak 130.485 kasus.

GAMBAR 6.1
KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2025



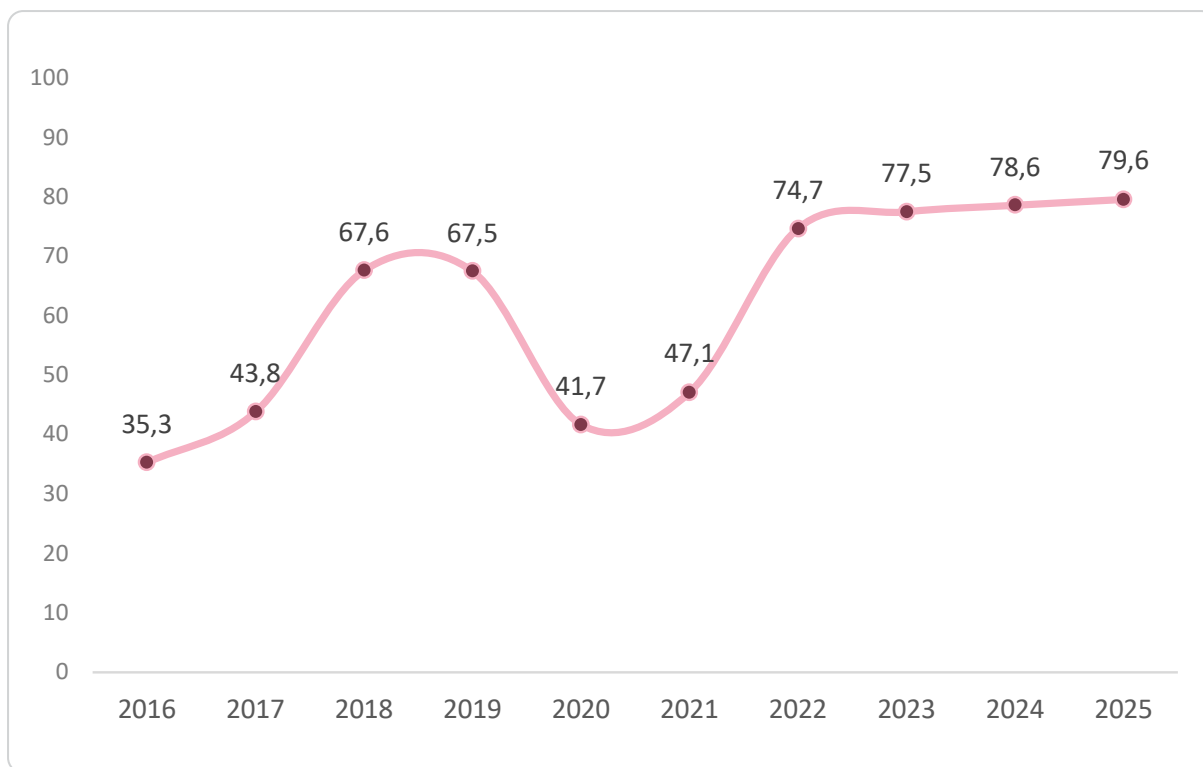
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

c. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada tahun 2025 adalah 79,6%, meningkat dari tahun 2024 yaitu 78,6%. Namun angka cakupan ini masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu 90%.

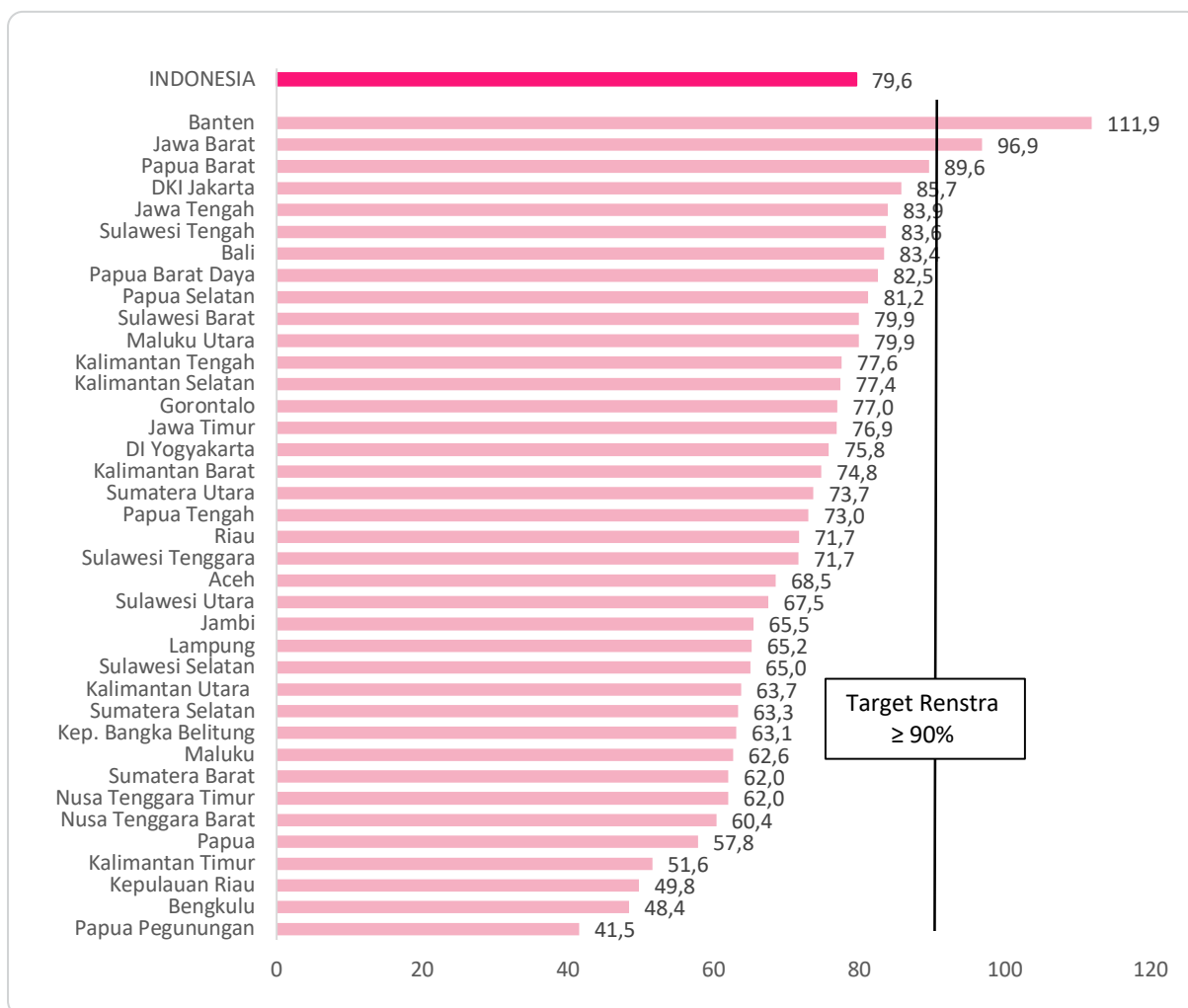
GAMBAR 6.2
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DI INDONESIA
TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat dua provinsi yang telah mencapai target cakupan penemuan kasus tuberkulosis $\geq 90\%$ yaitu Banten dan Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan penurunan dari tahun 2024 yaitu ada tiga provinsi yang mencapai target $\geq 90\%$.

GAMBAR 6.3
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

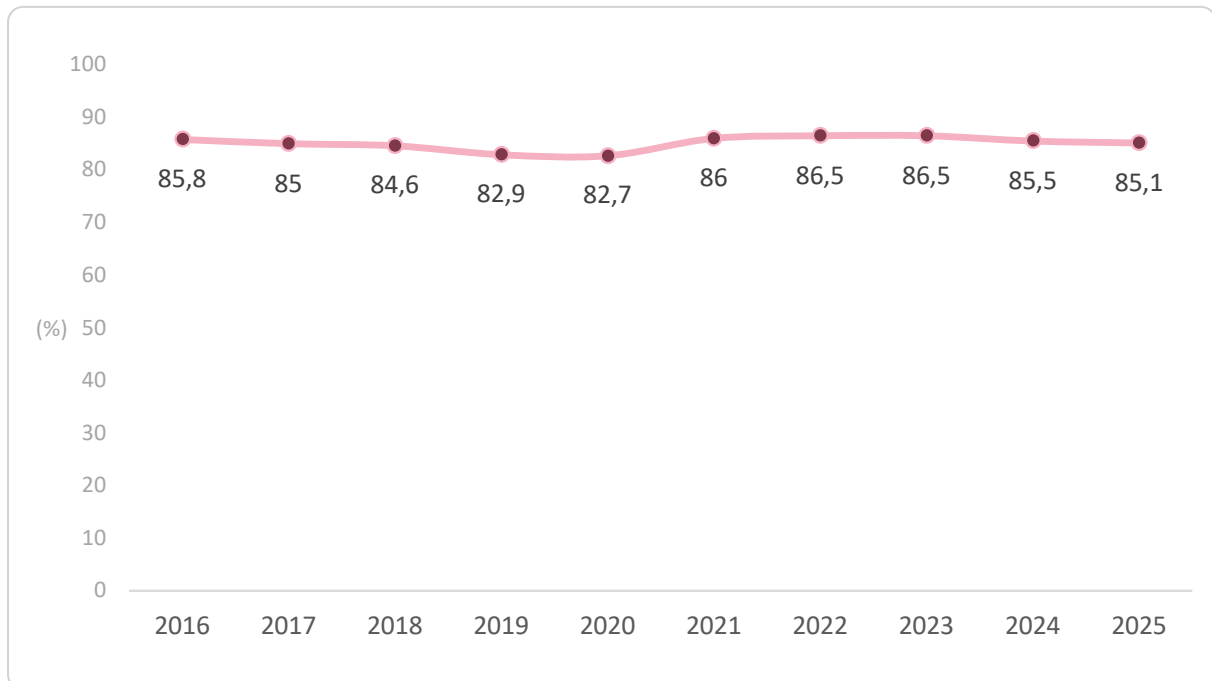


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

d. Angka Keberhasilan Pengobatan (*Treatment Success Rate/TSR*)

Angka keberhasilan pengobatan (*Treatment Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2025 adalah 85,1%. Angka ini masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu 90%.

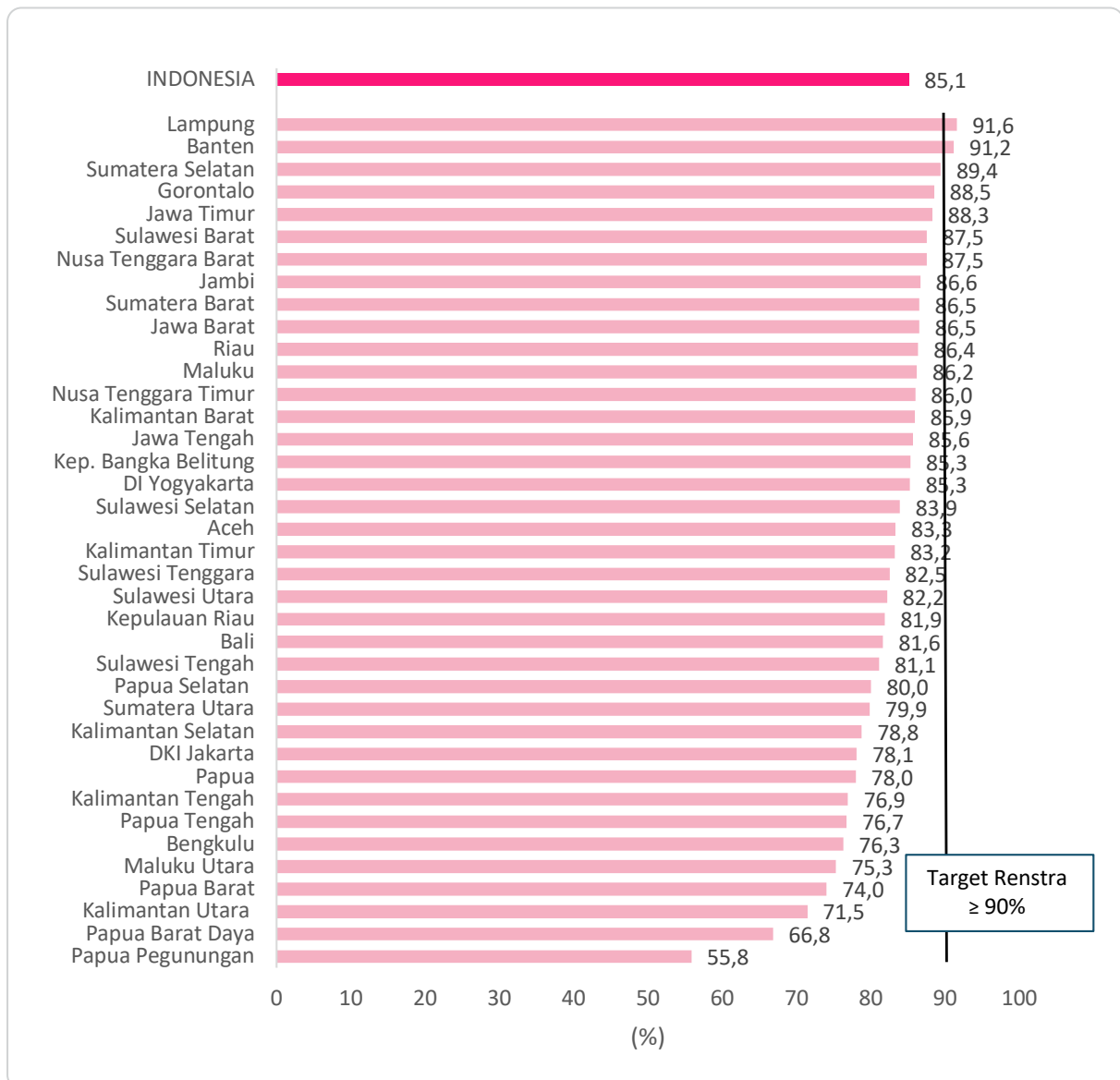
GAMBAR 6.4
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus Tuberkulosis minimal 90% pada tahun 2025 sebanyak dua provinsi, yaitu Lampung (91,6%) dan Banten (91,2%). Hasil ini menunjukkan sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2024 dengan lima provinsi yang berhasil mencapai target angka keberhasilan pengobatan.

GAMBAR 6.5
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

2. HIV dan AIDS

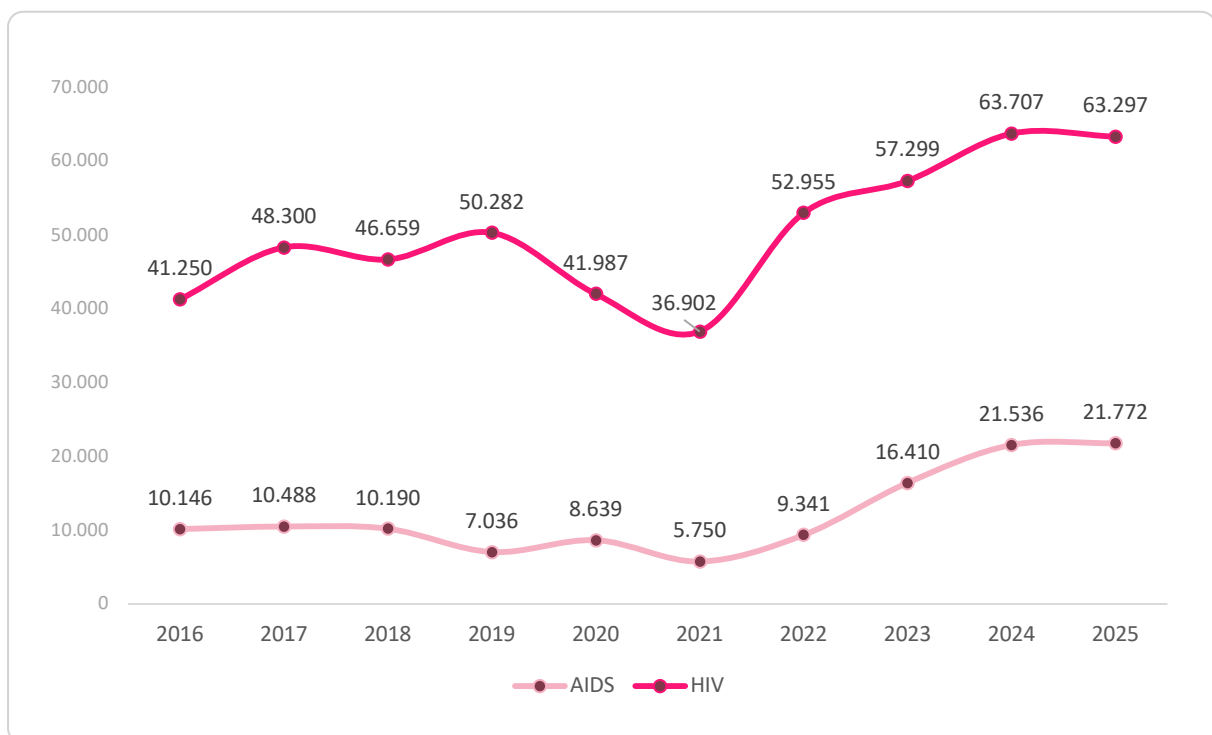
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.

Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada

HIV stadium lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: (1) menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; (2) menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; (3) menurunkan stigma dan diskriminasi.

Dari Gambar 6.6 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan selama sebelas tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2025 dilaporkan sebanyak 63.297 kasus HIV dan 21.772 kasus AIDS. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tren tiga tahun terakhir. Penurunan kasus yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi sehingga terbatasnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Dari segi penyedia pelayanan, peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan menyebabkan beberapa tenaga kesehatan di layanan diperbantukan untuk membantu penanganan COVID-19, sehingga kegiatan operasional penemuan dan penjangkauan kasus menjadi terhambat. Selain itu pada tahun 2021 tenaga kesehatan di layanan membantu pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

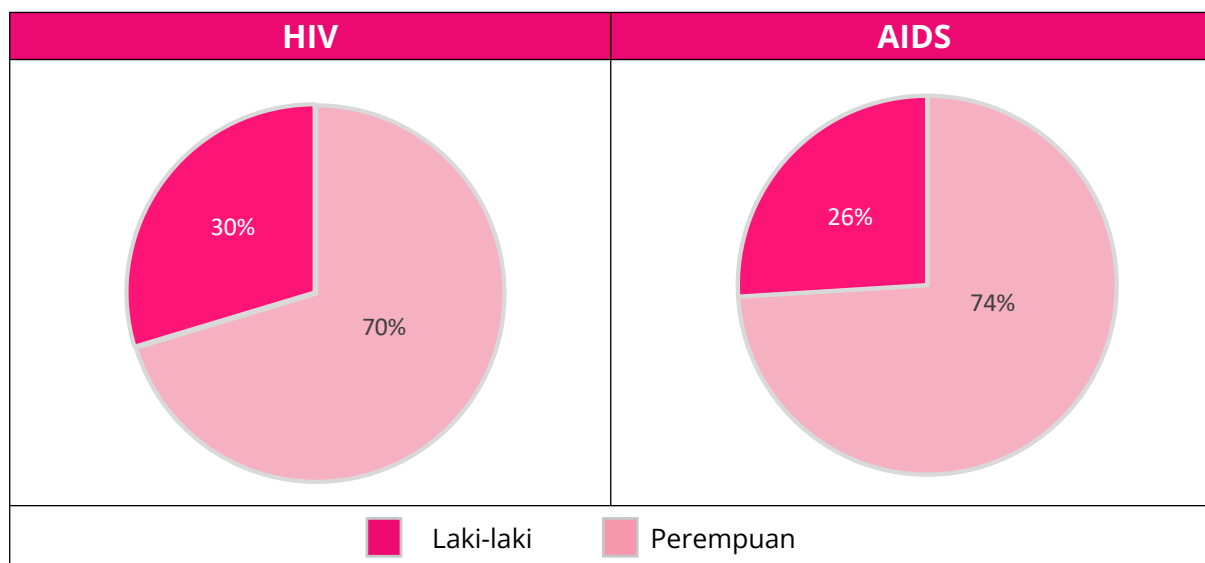
GAMBAR 6.6
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA
TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus HIV dan AIDS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Kesenjangan proporsi kasus kelompok laki-laki yang hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.7 berikut ini.

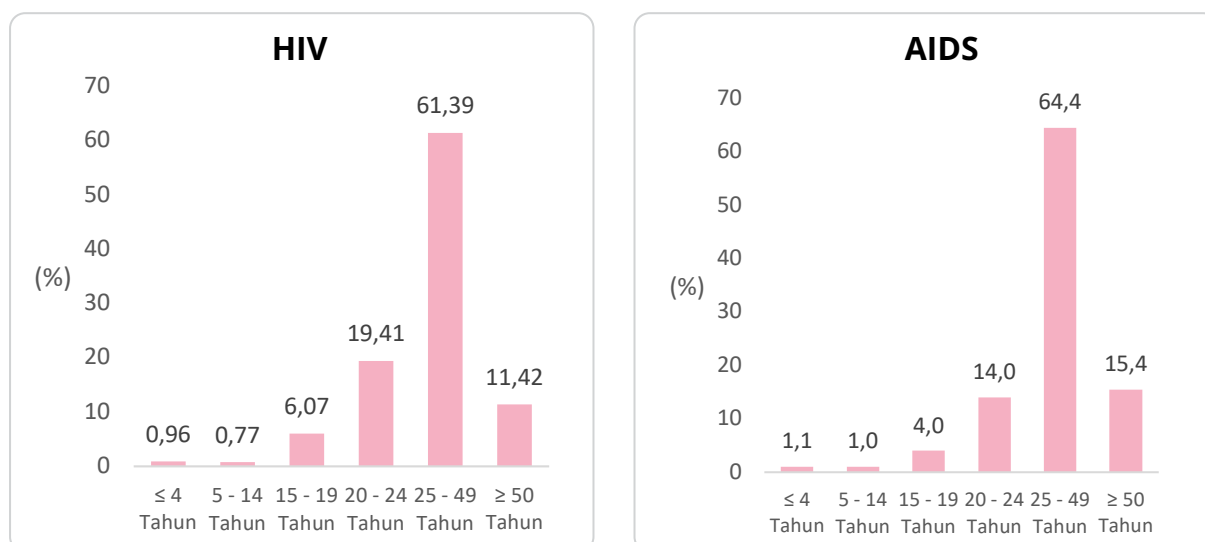
GAMBAR 6.7
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2025 menurut kelompok umur seperti digambarkan pada Gambar 6.8 berikut ini.

GAMBAR 6.8
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 25-49 tahun. Hal ini disebabkan oleh rentang usia produktif lebih rentan terhadap perilaku beresiko seperti perilaku seks yang tidak aman dan penggunaan NAPZA suntik. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia ≤ 4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Penanggulangan HIV dan AIDS pada anak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Namun, masih adanya tantangan pengobatan seperti pengobatan pertama bagi anak dengan HIV yang saat ini hanya tersedia di unit pediatrik di Rumah Sakit dan regimen ART yang tidak ramah anak menyebabkan kurang optimalnya pengobatan HIV sehingga terjadi perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan global triple elimination (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

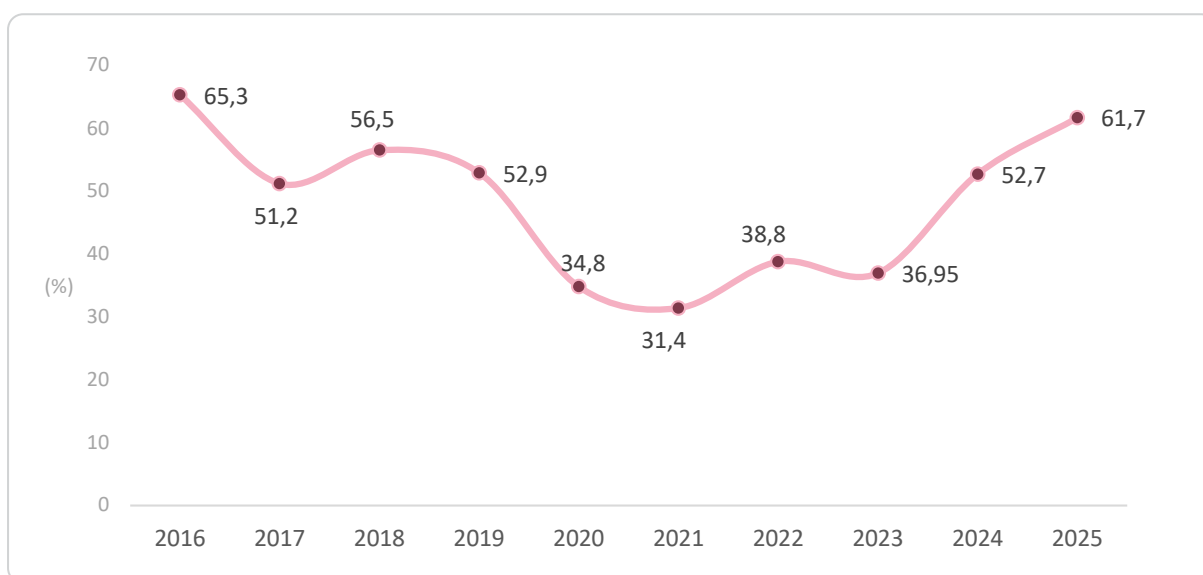
3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan parasit. Sampai saat ini program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita karena penyakit pneumonia memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian balita. Diharapkan dengan penemuan kasus dan pengobatan pneumonia yang sudah sesuai standar dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian balita akibat pneumonia.

Pneumonia masih menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas utama karena infeksi pada bayi dan anak di dunia. Pada tahun 2019, kasus pneumonia menyumbang 740.180 (14%) kasus kematian anak usia di bawah 5 tahun (Balita) (WHO 2021). Sekitar 2.200 anak meninggal setiap hari akibat pneumonia (IVAC 2020; UNICEF 2019a). Pneumonia juga menjadi penyebab kematian Balita terbesar di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI 2020; UNICEF 2019b). Pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 19.000 anak meninggal dunia akibat pneumonia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2016-2025 dapat dilihat pada Gambar 6.9.

GAMBAR 6.9
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2016-2025

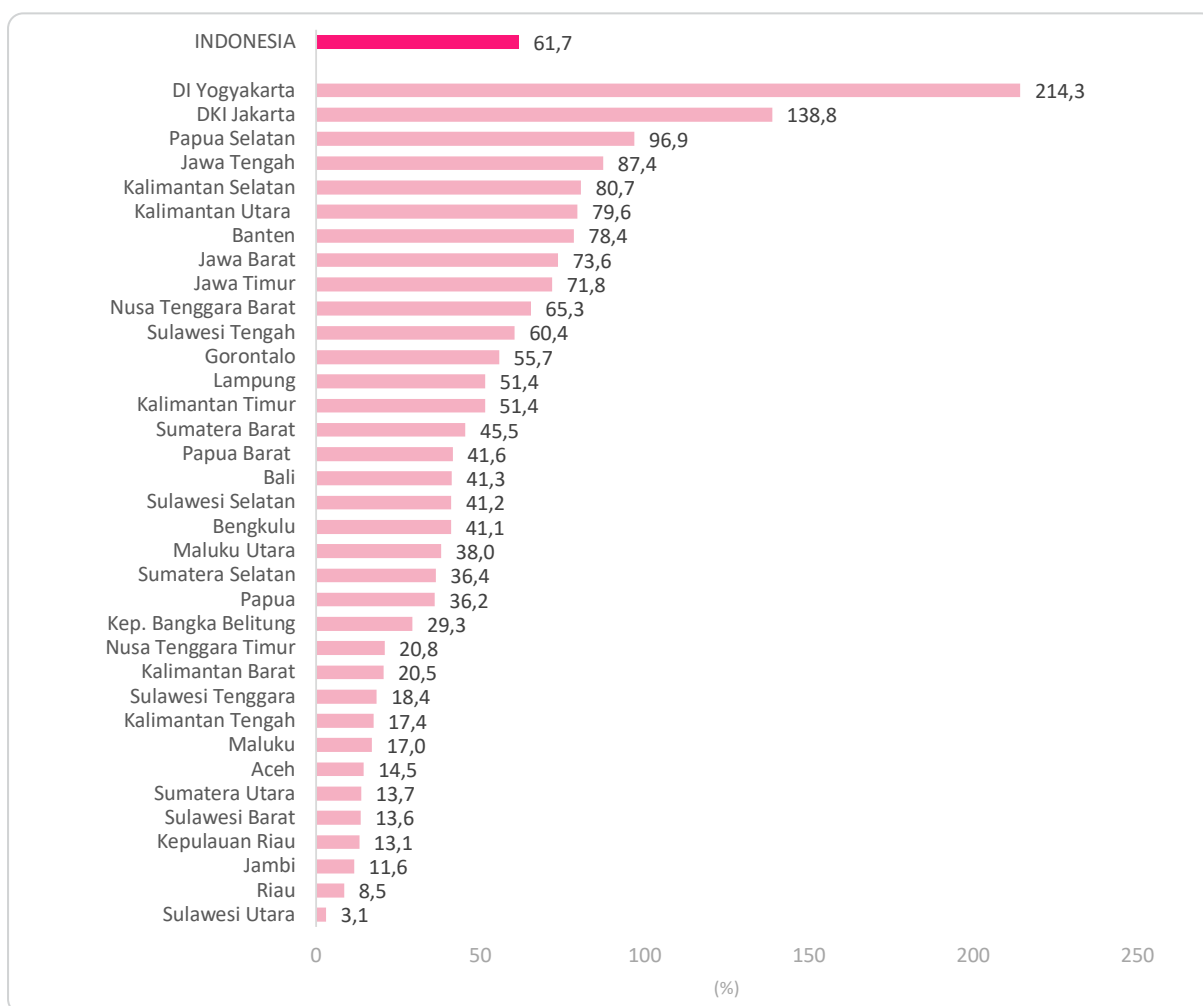


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Tren cakupan penemuan pneumonia pada balita selama sepuluh tahun terakhir cukup fluktuatif. Cakupan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,3%. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020-2021 jika dibandingkan dengan cakupan 5 tahun terakhir, penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19, dimana adanya stigma pada penderita COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di Puskesmas.

Pada tahun 2025, cakupan penemuan pneumonia pada balita meningkat kembali yaitu sebesar 61,7%. Provinsi dengan cakupan penemuan pneumonia pada balita tertinggi adalah DI Yogyakarta (214,3%), DKI Jakarta (138,8%), dan Papua Selatan (96,9%). Cakupan yang lebih dari 100% disebabkan adanya peningkatan penemuan dari estimasi kasus pneumonia. Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya tidak ada pelaporan penemuan pneumonia.

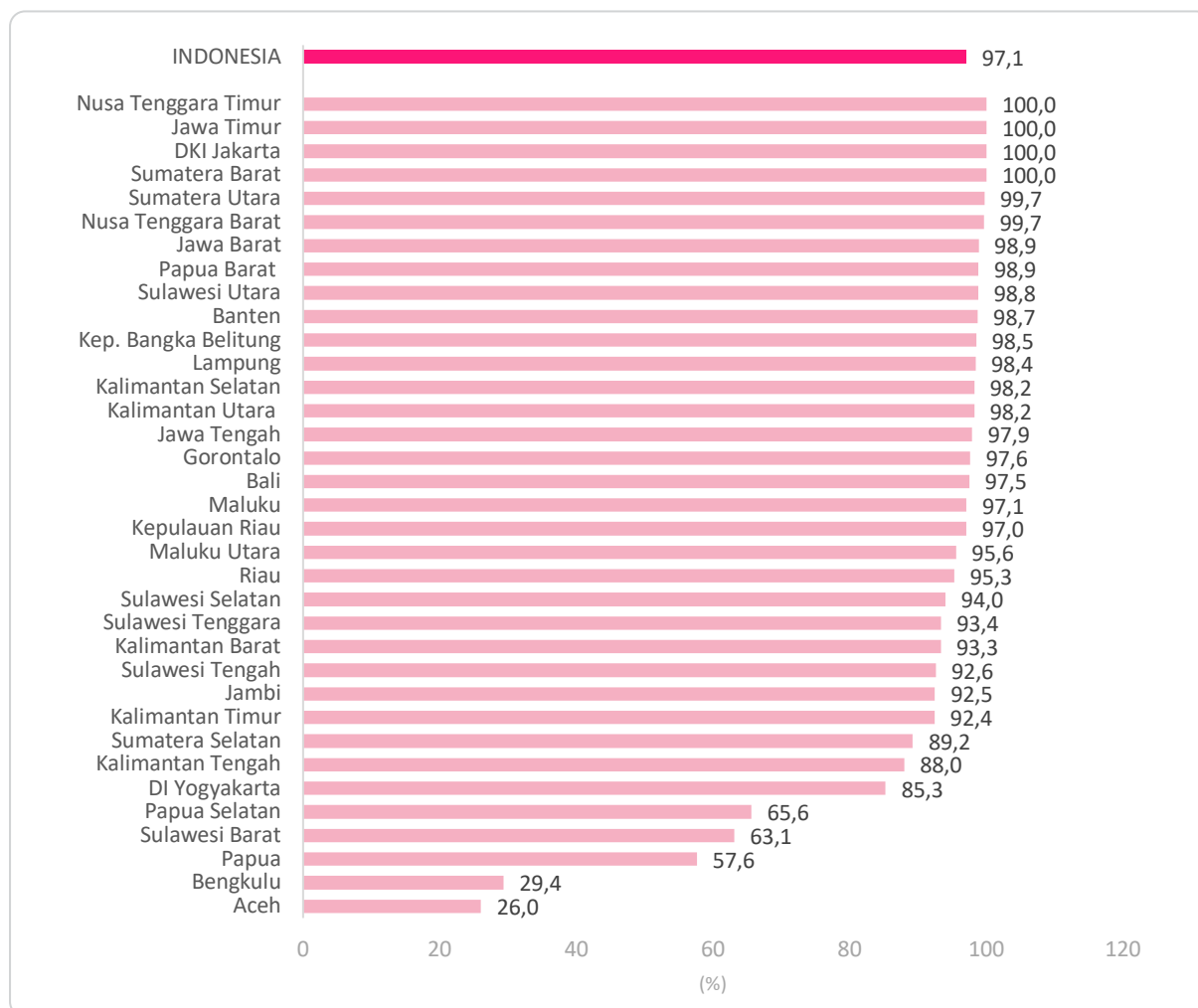
GAMBAR 6.10
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Tata laksana pneumonia standar mengalami perluasan definisi menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik. Secara nasional, persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar tahun 2025 sebesar 97,1%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, ada empat provinsi yang sudah mencapai 100%.

GAMBAR 6.11
PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,06%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024 yaitu 0,12%. Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.6.

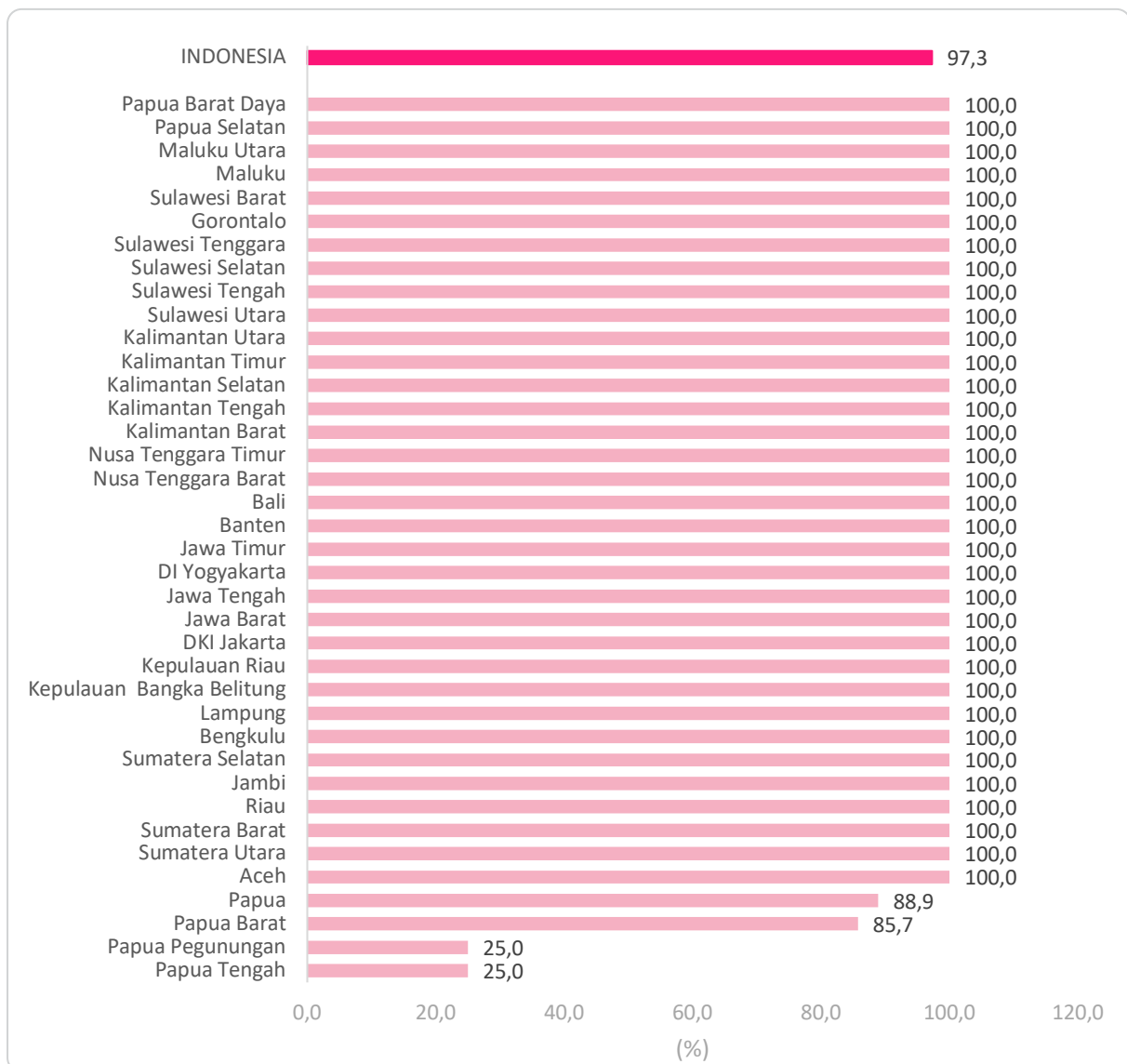
4. Hepatitis

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A (VHA), virus hepatitis b (VHB), Virus Hepatitis C (VHC), Virus Hepatitis D (VHD) dan Virus hepatitis E (VHE).

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi hepatitis A, B, C, D dan E pada semua kelompok umur di Indonesia adalah 0,12%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah Papua Tengah (0,88%) dan provinsi dengan prevalensi hepatitis terendah adalah Riau (0,06%).

Meskipun ke lima jenis virus tersebut menyebabkan penyakit hati, tapi virus tersebut berbeda dalam hal penularan, tingkat keparahan penyakit dan pencegahan. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Sementara hepatitis B dan C merupakan jenis virus hepatitis yang menyebabkan penyakit kronis dan penyebab paling umum terjadinya sirosis hati, kanker hati dan kematian.

GAMBAR 6.12
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, Proporsi HBsAg reaktif (Hepatitis B) , pada semua umur sebesar 2,4% dan bila dilihat berdasarkan usia, proporsi tertinggi ada pada kategori usia 35-44, 45-54 dan 55- 64 tahun masing-masing 3,6% dan proporsi terendah ada pada usia 0-4 tahun sebesar 0,1%

Indikator kegiatan hepatitis saat ini salah satunya adalah persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Dari 38 provinsi sebanyak 34 provinsi sudah mencapai 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan dan Papua Tengah yaitu hanya 25% dari jumlah kabupaten/kota yang sudah melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C.

5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diare pada semua kelompok umur sebesar 2%, pada balita sebesar 4,9%, dan pada bayi sebesar 3,9%. Sementara pada *Sample Registration System* tahun 2018, diare tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian pada neonatus sebesar 7% dan pada bayi usia 28 hari sebesar 6%.

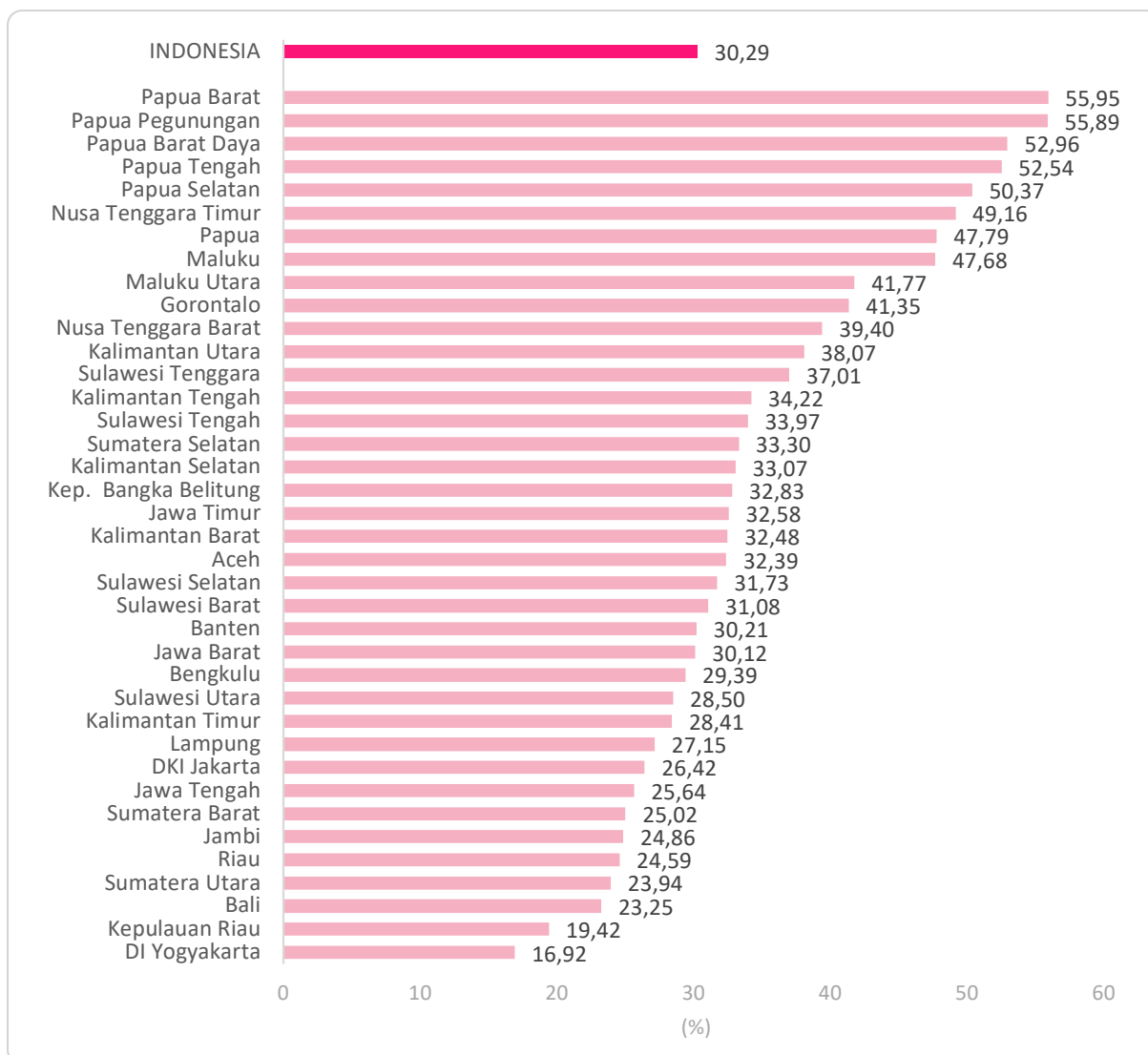
a. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 70% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare pada semua umur ditargetkan sebesar 30% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

Jumlah penderita diare yang dilayani di fasilitas kesehatan di Indonesia tahun 2025 adalah 984.370 orang pada kelompok umur balita dan 3.250.149 orang pada semua kelompok umur. Pada kelompok umur balita, provinsi dengan jumlah tertinggi kasus dilayani adalah Jawa Barat (188.734 balita), Jawa Timur (173.776 balita), dan Jawa Tengah (127.352 balita).

Di antara semua kasus diare yang dilayani oleh fasilitas kesehatan, proporsi kelompok umur balita sebanyak 30,29%. Proporsi tertinggi kasus diare balita yang dilayani di fasilitas kesehatan adalah Papua Barat (55,95%), Papua Pegunungan (55,95%), dan Papua Tengah (52,96%), artinya pada provinsi tersebut, lebih dari 50% kasus yang dilayani di fasilitas kesehatan adalah kasus diare pada balita.

GAMBAR 6.13
PROPORSI BALITA PADA KASUS DIARE YANG DILAYANI DI FASILITAS KESEHATAN (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

b. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit untuk penderita semua umur, maka target penggunaan oralit sebesar 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tahun 2025 secara nasional penggunaan oralit pada penderita diare semua umur sebesar 92,6%.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemberi layanan di puskesmas belum memberikan oralit/zink sesuai standar tata laksana pada penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit/zink sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta mencegah terjadinya diare berulang diare pada tiga bulan berikutnya.

Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2025 cakupan rata-rata pemberian oralit dan zink pada balita diare sebesar 93,13%. Cakupan ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2024 yaitu 92,05%.

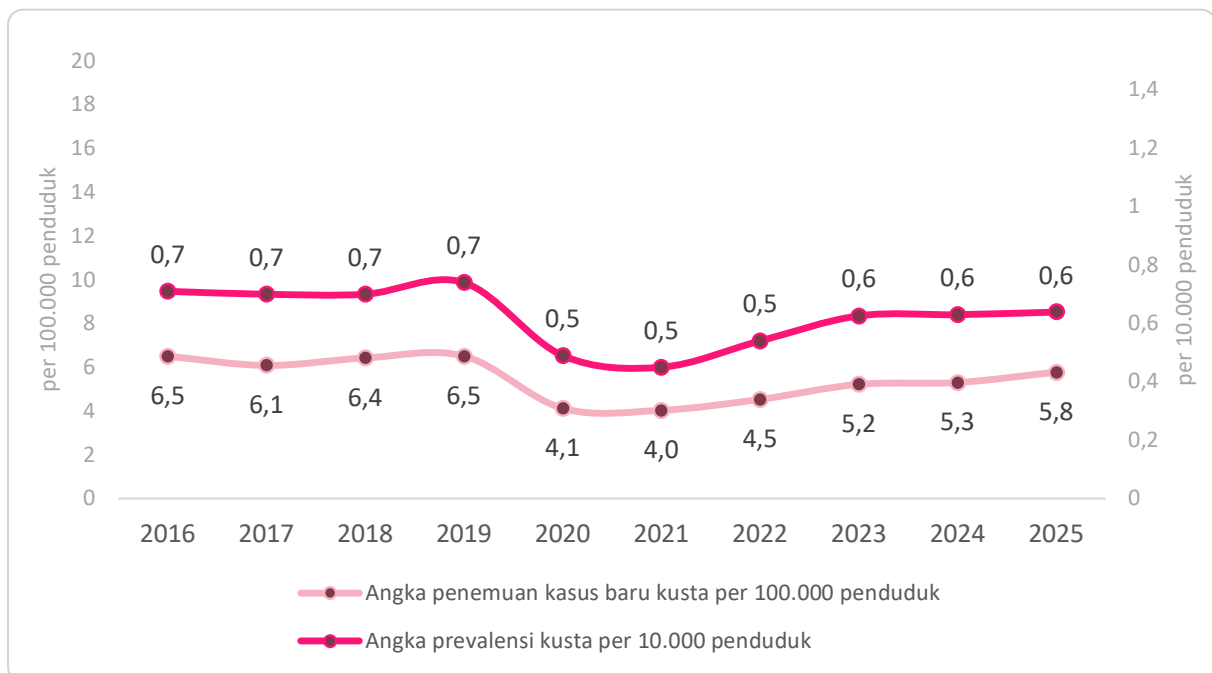
6. Kusta

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri, *Mycobacterium leprae*. Penyakit kusta bersifat kronis, menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain kecuali saraf pusat. Terlambatnya dalam deteksi dini dan tatalaksana kasus kusta dapat mengakibatkan kecacatan, pada mata, tangan, dan kaki.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 0,64 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 5,8 kasus per 100.000 penduduk. Tren angka kejadian kusta dapat dilihat pada Gambar 6.15. Selama sepuluh tahun terakhir terlihat rasio prevalensi angka penemuan kasus kusta baru tren relatif menurun, tetapi kembali menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022. Pada tahun 2025 dilaporkan terdapat 16.292 kasus baru kusta yang 91,3% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

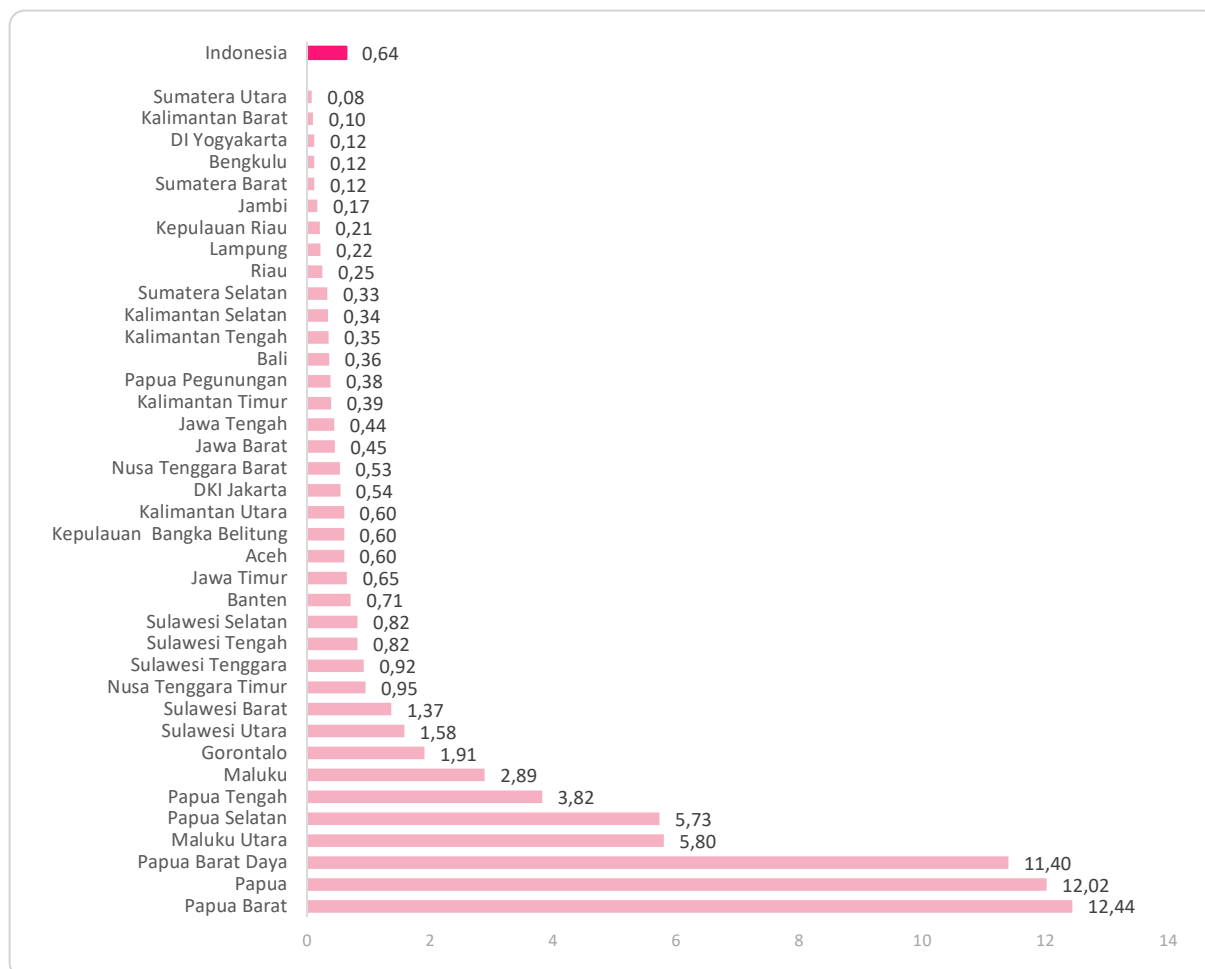
GAMBAR 6.14
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Angka prevalensi menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2024 sebesar 5,3 menjadi 5,8 pada tahun 2025. Sedangkan angka penemuan kasus kusta baru (CDR) dalam 3 (tiga) tahun terakhir stagnan di angka 0,6.

GAMBAR 6.15
PREVALENSI KUSTA PER 10.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

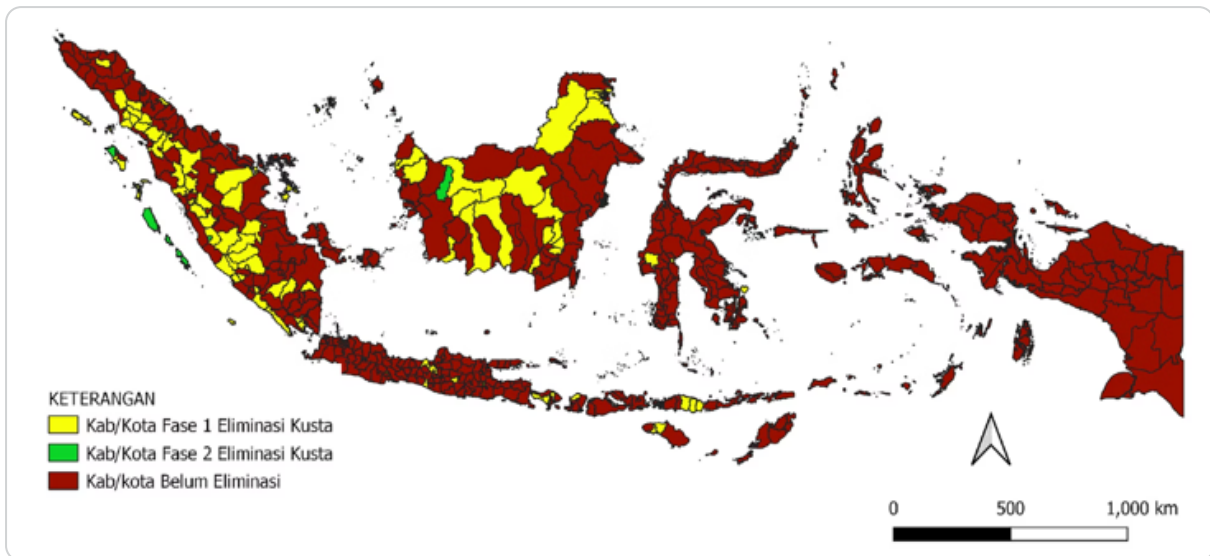
Angka prevalensi < 1 per 10.000 penduduk tidak digunakan lagi untuk penetapan status eliminasi kusta. Status eliminasi kusta berdasarkan angka prevalensi saja menjadi sangat dinamis dan mudah berubah, bergantung pada besar jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pada periode selanjutnya 2025-2029, dalam penetapan status eliminasi dalam Renstra perubahan definisi kabupaten kota mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus kusta anak selama 5 tahun dan tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun (Guideline WHO terbaru 2023).

Jika daerah eliminasi disajikan secara spasial, daerah yang berwarna hijau menandai provinsi yang sudah berstatus eliminasi kusta, daerah yang berwarna kuning menandai yang sudah mencapai eliminasi fase 1 tidak ditemukan kasus anak selama 5 tahun terakhir namun masih ditemukan kasus dewasa, sedangkan daerah yang berwarna merah menandai provinsi yang berstatus belum eliminasi kusta yaitu masih ditemukan kasus anak selama 5 tahun dan kasus dewasa selama 3 tahun terakhir.

Tahun 2025 capaian kabupaten/kota eliminasi mengalami penurunan sebanyak 6 kabupaten/kota yaitu Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Solok, Sekadau, Sungai Penuh dan Kepulauan Mentawai. Jumlah ini belum mencapai target eliminasi kusta tahun 2025 yaitu 11 kabupaten/kota dikarenakan berbagai kendala baik dari sumber daya manusia, akses geografis sulit dijangkau,

adanya stigma dan diskriminasi yang masih tinggi serta kurangnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan merupakan permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penanggulangan kusta.

GAMBAR 6.16
PETA ELIMINASI KUSTA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2025

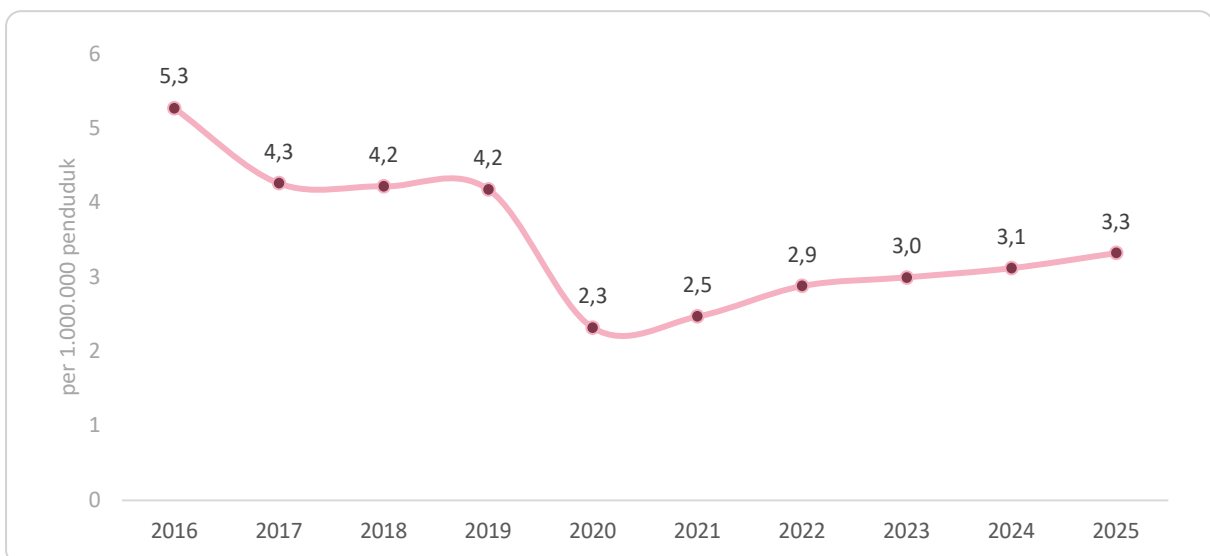


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

b. Angka Disabilitas Tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini yaitu angka disabilitas tingkat 2. Pada tahun 2025 angka disabilitas tingkat 2 sebesar 3,3 per 1.000.000 penduduk. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

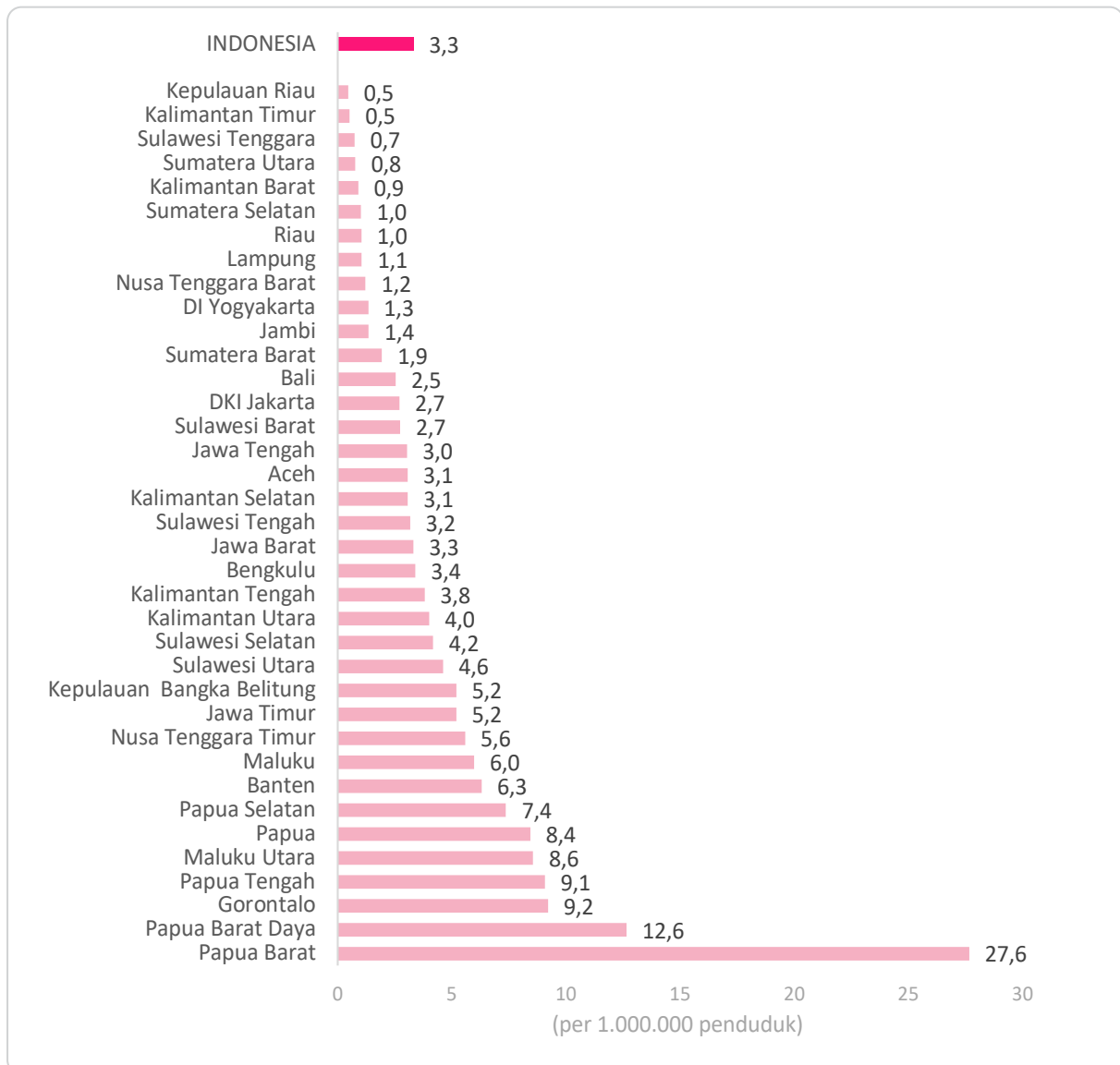
GAMBAR 6.17
ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan provinsi, tidak ditemukan kasus kusta baru dengan disabilitas tingkat 2 di Provinsi Papua Pegunungan. Angka disabilitas tingkat 2 tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu 27,6 per 1.000.000 penduduk. Angka disabilitas tingkat 2 terendah pada Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur yaitu 0,5 per 1.000.000 penduduk.

GAMBAR 6.18
ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2025

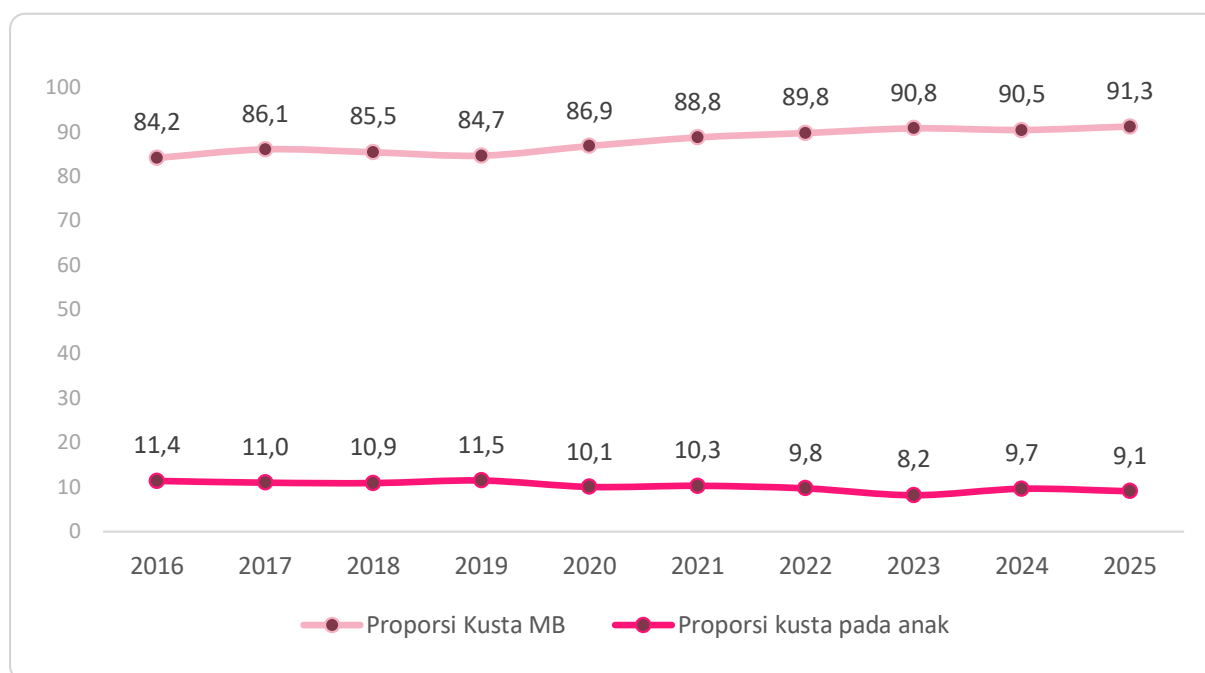


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

c. Proporsi Kusta Multibasiler (MB) dan Proporsi Kusta Baru pada Anak

Proporsi kusta MB dan proporsi kusta pada anak (0-14 tahun) di antara kasus baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.19
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2016 - 2025. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi tertinggi kusta MB pada kasus baru tahun 2025 yaitu Gorontalo (100%), Kepulauan Bangka Belitung (98,4%), dan Kalimantan Barat (98,1%). Jumlah kasus baru pada Provinsi Gorontalo sebanyak 217 kasus dan seluruhnya merupakan kusta MB.

Proporsi kusta pada anak sedikit menurun pada tahun 2025 yaitu sebesar 9,1%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (25,4%) dan Papua (23,8%). Data terkait penyakit kusta selengkapnya terdapat pada Lampiran 6.16 - 6.19.

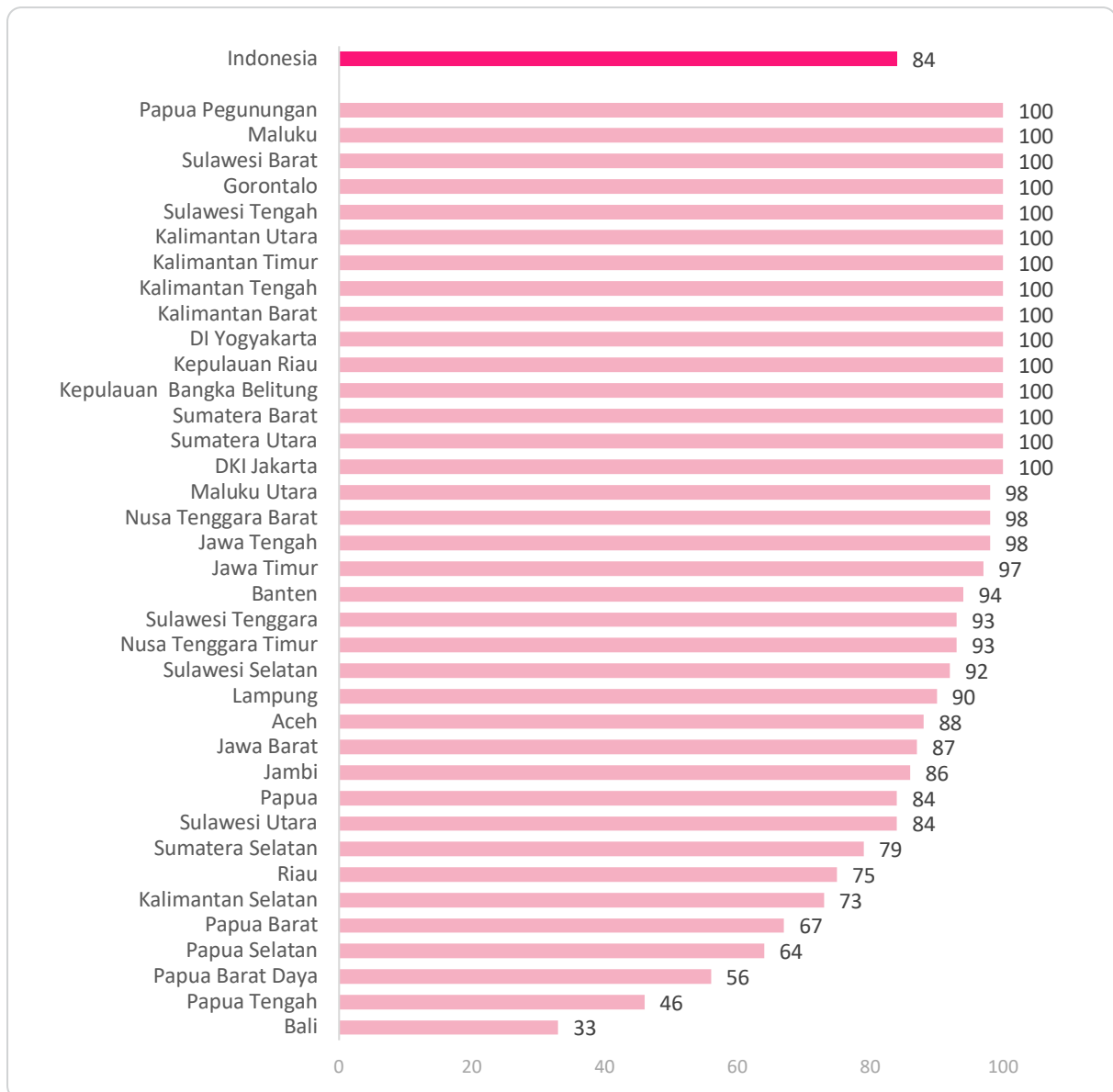
d. Penderita Kusta Selesai Berobat (*Release From Treatment/RFT*)

Indikator persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (RFT rate) sangat penting digunakan dalam menilai kualitas tatalaksana penderita dan kepatuhan penderita dalam minum obat. Indikator tersebut merupakan indikator tahunan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan penderita yang memulai pengobatan MDT pada periode kohort yang sama.

Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu merupakan jumlah penderita baru kusta (PB/MB) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (PB menyelesaikan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan/ MB menyelesaikan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) dinyatakan dalam persentase.

Pada tahun 2025, cakupan RFT di Indonesia sudah cukup tinggi yaitu untuk kusta PB sebesar 84% dan kusta MB sebesar 86%. Penderita kusta PB yang telah selesai berobat di tahun 2025 adalah penderita kusta yang tercatat pada kohort sejak satu tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Sebanyak 15 provinsi telah mencapai 100% persentase penderita kusta PB yang selesai berobat. Provinsi Bengkulu tidak ada penderita kusta PB yang selesai berobat di tahun 2025.

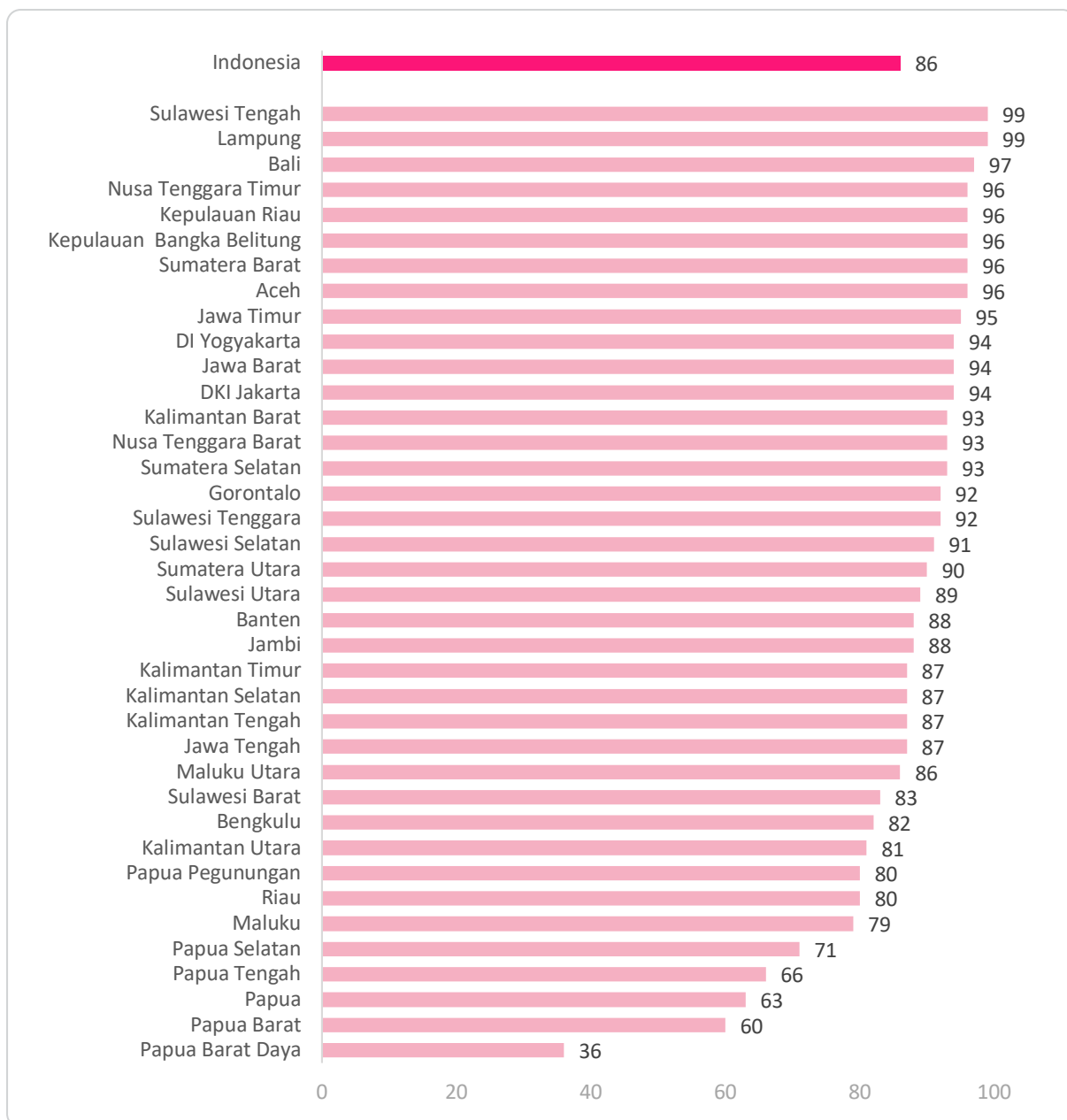
GAMBAR 6.20
CAKUPAN RFT KUSTA PB MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Penderita kusta MB yang tercatat selesai berobat di tahun 2025 adalah penderita kusta MB yang tercatat pada kohort sejak 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Provinsi dengan cakupan tertinggi kusta MB selesai berobat adalah Sulawesi Tengah dan Lampung yaitu 99%. Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua Barat Daya dengan persentase sebesar 36%.

GAMBAR 6.21
CAKUPAN RFT KUSTA MB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini masih mengancam dunia karena dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, 2017). Dengan memberikan imunisasi secara tepat waktu, maka masyarakat dapat tetap terlindung dan terjadinya wabah PD3I dapat dicegah. Untuk mendapatkan perlindungan seumur hidup, seseorang perlu mendapatkan imunisasi sesuai dosis dan jadwal secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain **imunisasi rutin**, yaitu imunisasi bayi, imunisasi anak bawah dua tahun (baduta), imunisasi anak usia sekolah dan imunisasi dewasa, juga dikenal **imunisasi kejar, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus**. Imunisasi kejar diberikan pada bayi, baduta dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi rutin. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu, sementara itu imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan PD3I. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
- b. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas surveilans PD3I dalam rangka meningkatkan kinerja surveilans AFP dan campak-rubela serta pengendalian difteri;
- d. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan petunjuk teknis surveilans PD3I
- e. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) surveilans PD3I;
- f. Melakukan sosialisasi tentang PD3I kepada lintas program dan lintas sektor terkait serta organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, PAEI, dll)
- g. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komite Ahli Nasional PD3I, untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka mencapai target eradikasi polio, eliminasi campak-rubela/CRS serta pengendalian difteri dan strategi penanggulangan KLB.
- h. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium difteri, campak-rubela/CRS, dan polio;
- i. Melakukan pendampingan penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah sebagai berikut:

1. Tetanus Neonatorum

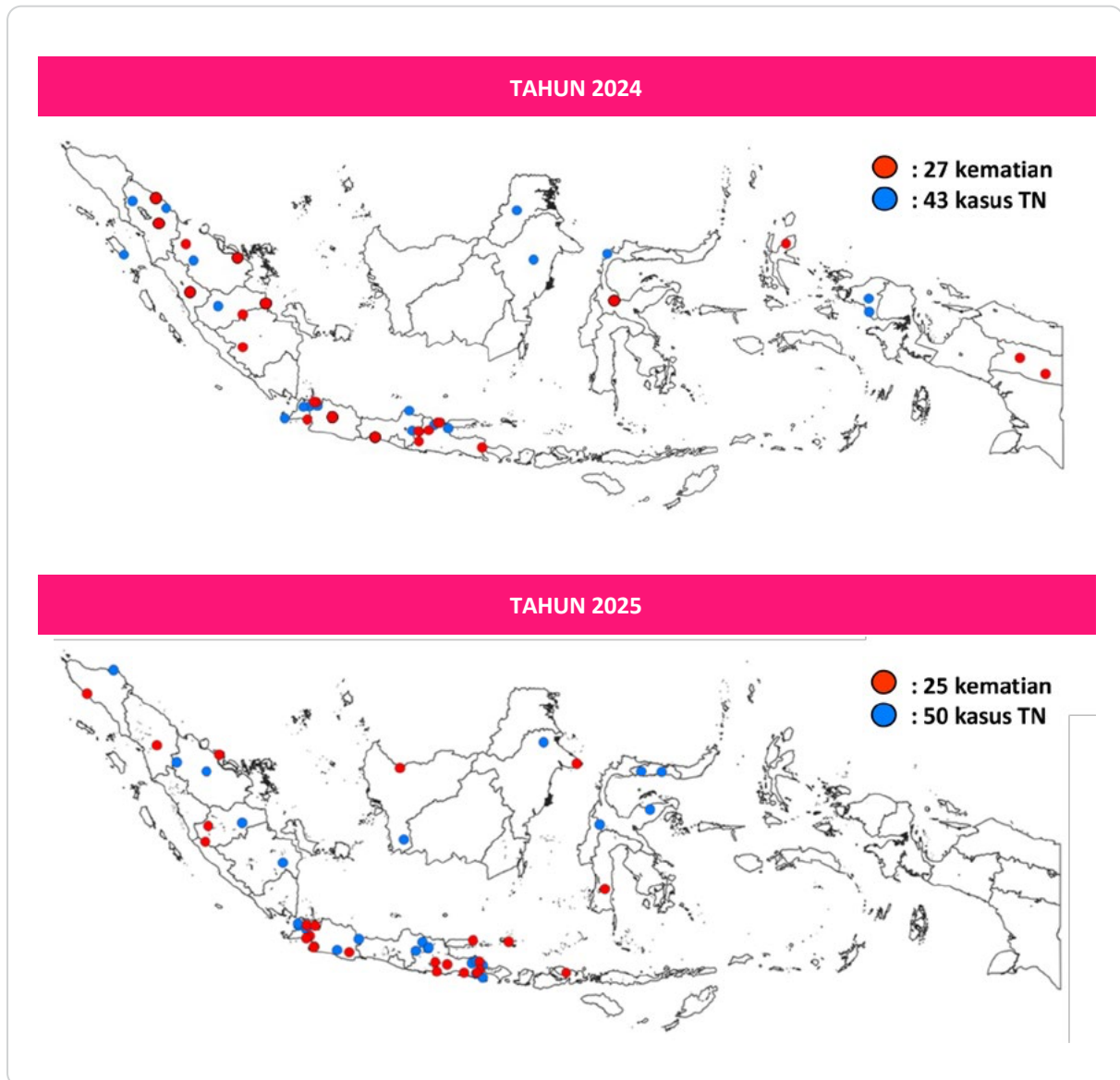
Tetanus Neonatorum (TN) merupakan penyakit tetanus yang menyerang neonatus (bayi usia <28 hari). Walaupun disebut sebagai *silent killer*, penyakit ini bisa dicegah melalui pemberian vaksin Tetanus Toxoid (TT) secara tepat waktu, selain menjaga kebersihan tempat praktik bersalin, serta proses persalinan, dan perawatan tali pusat yang bersih dan aman. Penyebab utama dari penyakit ini adalah infeksi bakteri *Clostridium tetani*, yaitu bakteri yang menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf pusat. Bakteri ini biasa ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Bakteri *Clostridium tetani* bisa menginfeksi seseorang, melalui luka goresan, sobekan, atau luka tusukan yang disebabkan oleh benda-benda yang terkontaminasi. Tetanus tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, tetapi pada bayi yang baru lahir tetanus neonatorum terjadi oleh karena bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktik persalinan yang tidak higienis, seperti memotong dan merawat tali pusat yang tidak bersih atau steril. Persalinan yang dilakukan oleh penolong persalinan dengan tangan yang tidak steril dan terkontaminasi juga merupakan faktor risiko terjadinya kasus tetanus neonatorum. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 3-10 hari. Tanda dan gejala biasanya muncul pada hari ke-3 sampai 28 setelah kelahiran (rata-rata 7 hari setelah kelahiran). Apabila masa inkubasi kurang dari 7 hari, prognosis penyakit akan lebih buruk dan mempunyai angka kematian yang tinggi.

Indonesia pada tahun 2016 berhasil mencapai status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (TMN) dan menjadi negara terakhir di Wilayah Regional Asia Tenggara WHO yang divalidasi untuk eliminasi TMN. Eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau *Maternal and Neonatal Tetanus Elimination* (MNTE) didefinisikan sebagai situasi dimana kejadian kasus TN < per 1000 kelahiran hidup di setiap kabupaten/kota. Saat ini Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan status eliminasi TMN. Ada 4 strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk dapat mempertahankan status eliminasi TMN, yaitu penguatan imunisasi rutin, pemberian imunisasi tetanus tambahan (*Supplementary Immunization Activities/SIA*) di wilayah-wilayah risiko tinggi dengan menargetkan wanita usia subur, mempromosikan persalinan dan perawatan tali pusat yang bersih, dan penguatan surveilans TN.

Pada penyakit tetanus, kekebalan tidak bisa didapat setelah terjadi infeksi. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya dapat diperoleh melalui kekebalan buatan secara pasif dengan suntikan anti tetanus serum dan/atau secara aktif dengan pemberian imunisasi yang mengandung tetanus (jenis vaksin yang diberikan sesuai usia). Jadwal imunisasi tetanus dengan vaksin yang mengandung tetanus toxoid saat ini di Indonesia adalah DPT-HB-Hib (umur 2, 3, 4, dan 18 bulan), DT (SD/ sederajat Kelas 1), Td 2 dosis (SD/ sederajat kelas 2 dan 5), dan Td WUS (15-39 tahun).

Selama tahun 2021-2025, jumlah kasus TN secara terus menerus mengalami peningkatan. Jumlah kasus TN pada tahun 2025 sebanyak 50 kasus, meningkat dari tahun 2024 yaitu. Tahun 2021 jumlah kasus tetanus neonatorum sebanyak 11 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 21 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 27 kasus. Angka *Case Fatality Rate* (CFR) pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu 50% jika dibandingkan CFR yang cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu 62,8%. Kasus TN tersebar pada 15 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Provinsi Jawa Timur (9 kasus). Dari 15 provinsi tersebut, terdapat 11 provinsi dengan kasus kematian TN. Sebaran kasus TN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

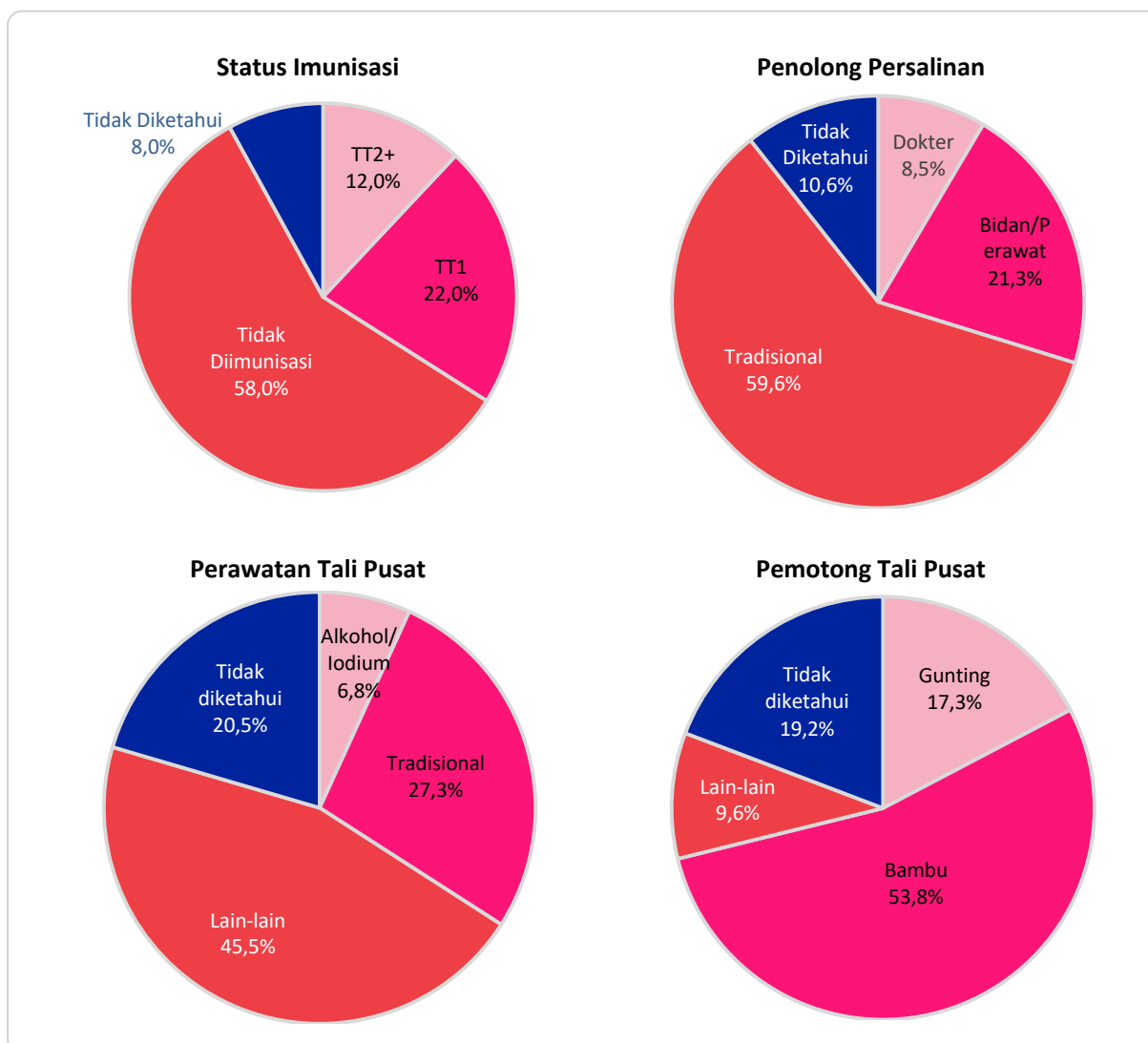
GAMBAR 6.22
SEBARAN KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI
TAHUN 2023 - 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan faktor risiko terjadinya kasus TN, dari 50 kasus yang terjadi pada tahun 2025, proporsi kasus dominan terjadi pada penderita yang tidak diimunisasi sebanyak 29 kasus (58%), penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga tradisional sebanyak 28 kasus (59,6%), perawatan tali pusat yang dilakukan secara tradisional sebanyak 12 kasus (27,3%), alat pemotong tali pusat yang menggunakan bambu sebanyak 28 kasus (53,8%). Dari keseluruhan kasus TN, mayoritas penderita tidak dirawat di rumah sakit, yaitu sebanyak 43 penderita (79,6%). Jika mengacu pada proporsi kasus TN berdasarkan faktor risiko maka kita dapat melihat bahwa peningkatan kasus TN pada tahun 2025 disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi, praktik persalinan yang tidak higienis, dan perawatan tali pusat yang tidak bersih.

GAMBAR 6.23
PROPORSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* MENURUT FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

2. Campak

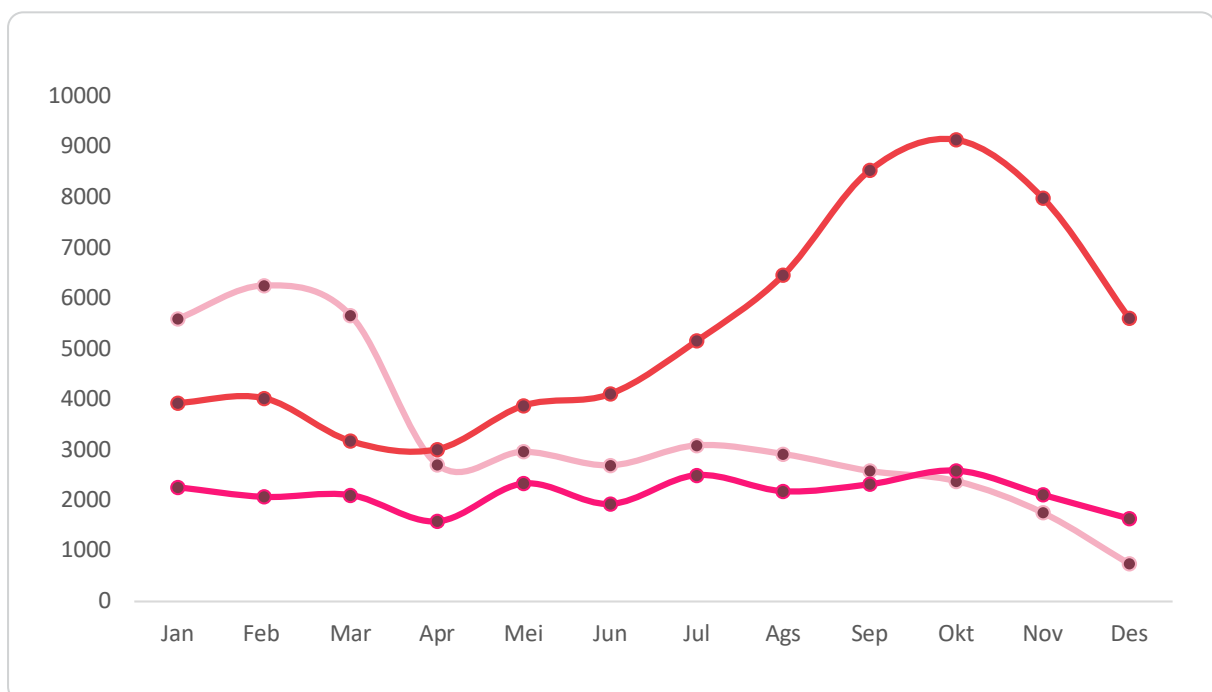
Penyakit campak yang biasanya juga dikenal sebagai *morbili* atau *measles* merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus dari genus *Morbillivirus* dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Campak akan menyerang hampir 100% anak yang tidak kebal terhadap virus tersebut. Manusia diperkirakan satu-satunya *reservoir*, walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penyebaran. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi *droplet* dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Masa inkubasi penyakit campak adalah 7-18 hari, rata-rata 10 hari. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, akan muncul ruam *maculopapular*, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan

secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, *ensefalitis* (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti *pneumonia*. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Suspek campak adalah setiap kasus dengan gejala minimal demam dan ruam maculopapular, kecuali sudah terbukti secara laboratorium disebabkan oleh penyakit lain. Penemuan kasus suspek campak merupakan salah satu strategi surveilans yang dilakukan untuk menemukan kasus campak lebih dini sehingga bisa terhindar dari komplikasi dan kematian. Pada tahun 2025 terdapat kasus suspek campak sebanyak 65.008 kasus dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan jumlah kasus suspek campak pada tahun 2024 sebanyak 25.639 kasus.

Gambar 6.24 memperlihatkan kasus suspek campak per bulan yang terjadi di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Kasus suspek campak meningkat drastis pada awal tahun 2023. Kondisi ini mulai menurun pada bulan April, dan cenderung menurun sampai dengan Desember 2023. Pada tahun 2024, tren kasus suspek campak setiap bulannya cenderung tidak terlalu berbeda setiap bulannya. Pada tahun 2025, peningkatan kasus terus terjadi sejak bulan April hingga puncaknya di bulan Oktober.

GAMBAR 6.24
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA
TAHUN 2023-2025

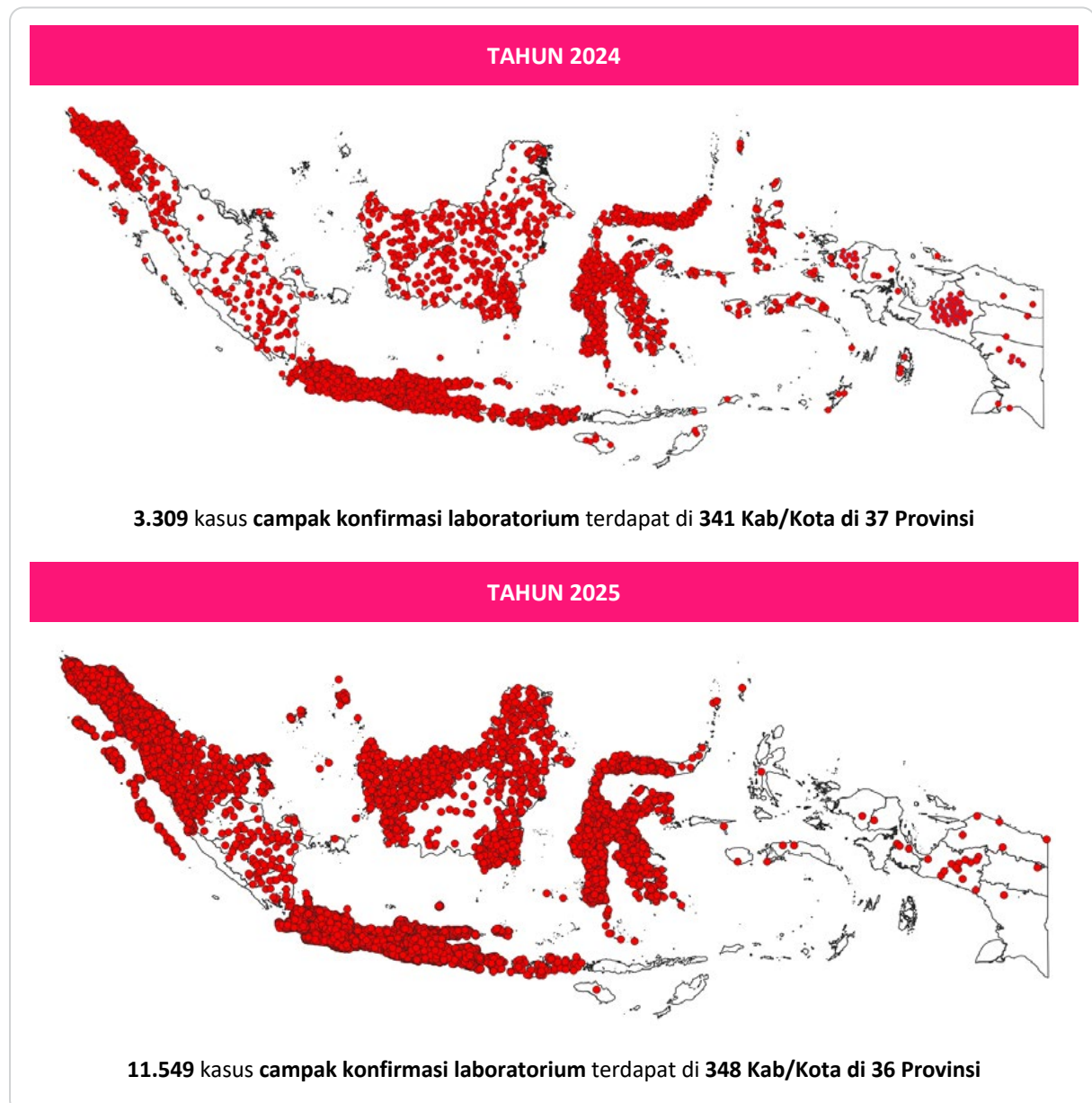


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Upaya surveilans untuk menemukan kasus suspek campak, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa kasus campak. Pada tahun 2025, dari seluruh kasus suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh data kasus campak konfirmasi laboratorium sebanyak 11.549 kasus (17,8% dari kasus suspek campak) dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 6.25 memperlihatkan perbandingan sebaran kasus campak konfirmasi laboratorium pada tahun 2024 dan 2025.

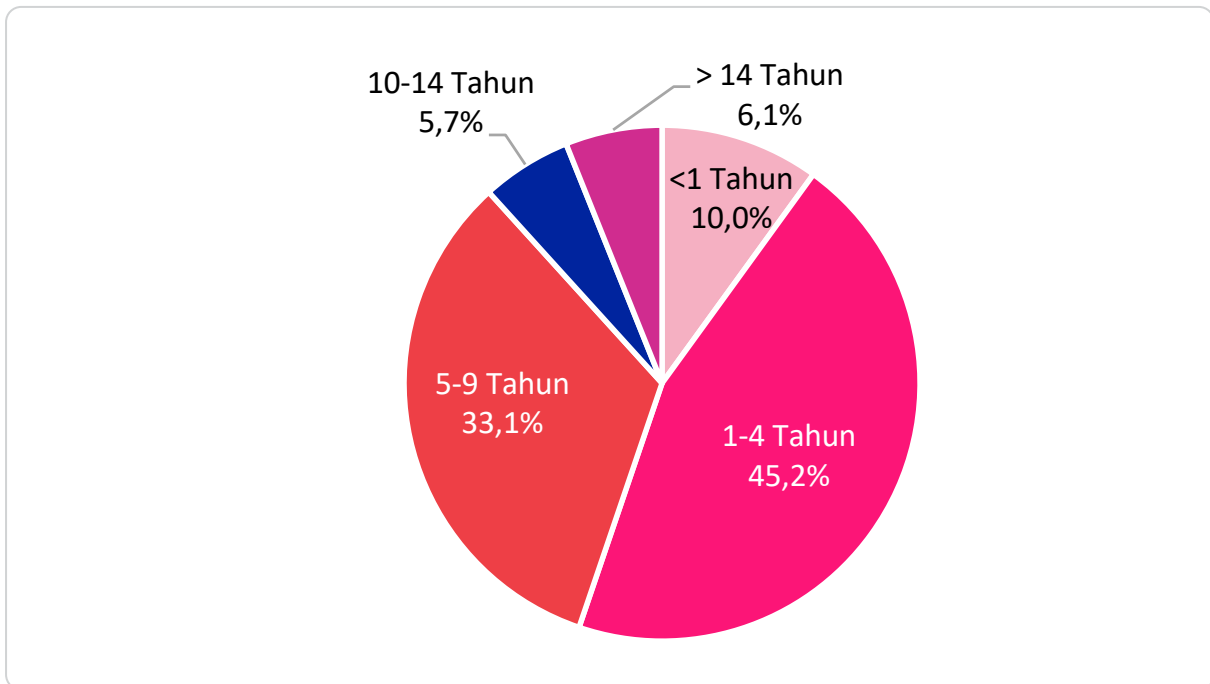
GAMBAR 6.25
PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2024 - 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Gambar 6.26 memperlihatkan proporsi kasus campak berdasarkan kelompok umur pada tahun 2025. Proporsi kasus campak terbesar pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 5.224 kasus (45,2%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 3.818 (33,1%). Proporsi kasus paling rendah ditemukan pada kelompok umur >14 tahun sebesar 6,1%.

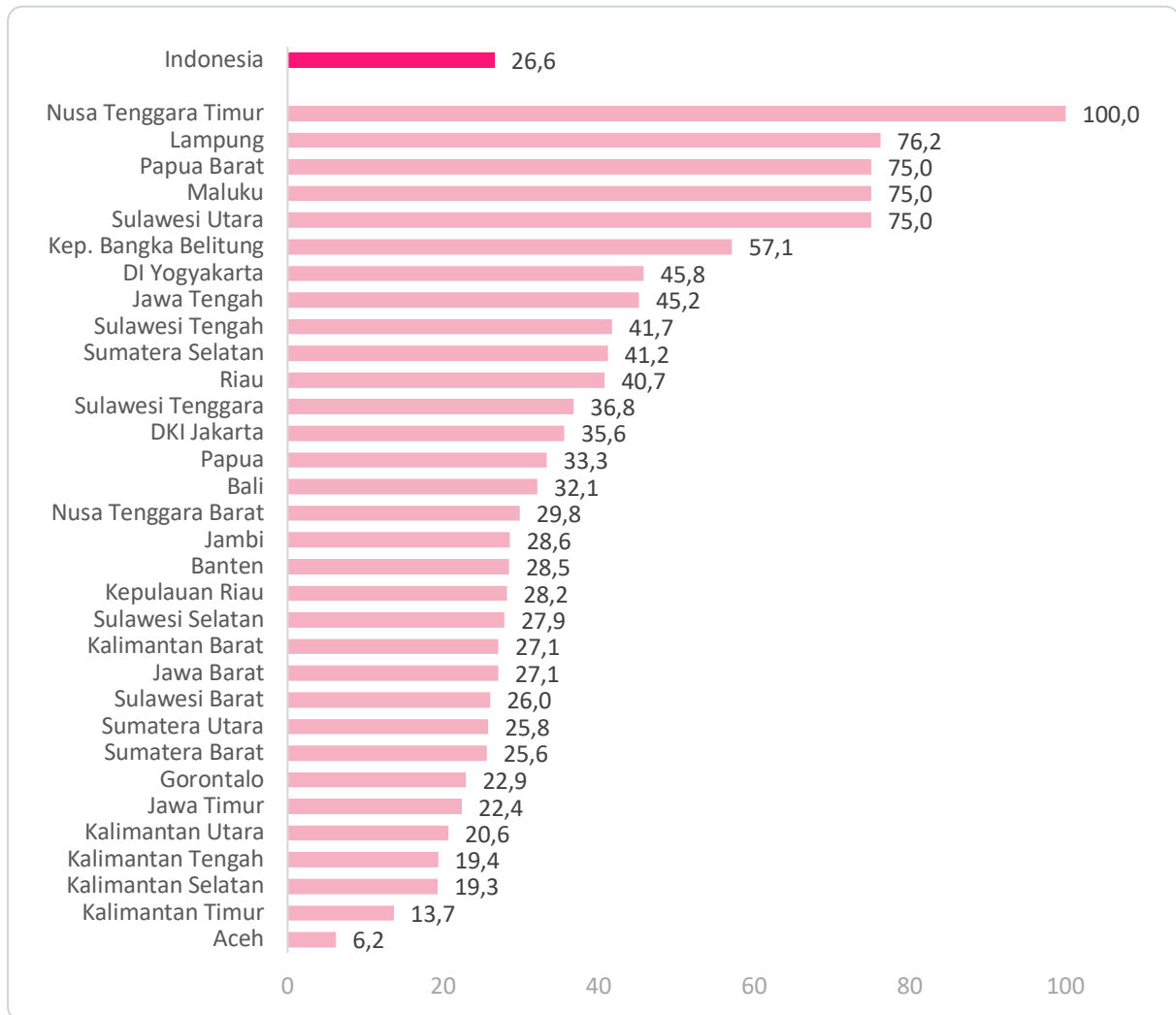
GAMBAR 6.26
PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Gambar 6.27 memperlihatkan proporsi kasus campak konfirmasi laboratorium yang sudah mendapatkan vaksinasi. Di Indonesia, proporsi kasus campak yang sudah mendapatkan imunisasi pada tahun 2025 sebesar 26,6%. Proporsi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 21,1%. Mengacu pada data tersebut, maka dapat diartikan bahwa dari seluruh kasus campak konfirmasi laboratorium, ada sebanyak 73,4% kasus yang belum mendapatkan vaksin campak. Cakupan imunisasi pada kasus campak, masih jauh dari target cakupan imunisasi campak dosis pertama dan kedua minimal 95%. Dari 38 provinsi dengan kasus campak konfirmasi laboratorium, urutan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (100%). Total kasus konfirmasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1 orang dan kasus tersebut sudah pernah diimunisasi campak. Ada enam provinsi dengan proporsi kasus campak yang diimunisasi 0%, yaitu Bengkulu, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

GAMBAR 6.27
PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

3. Difteri

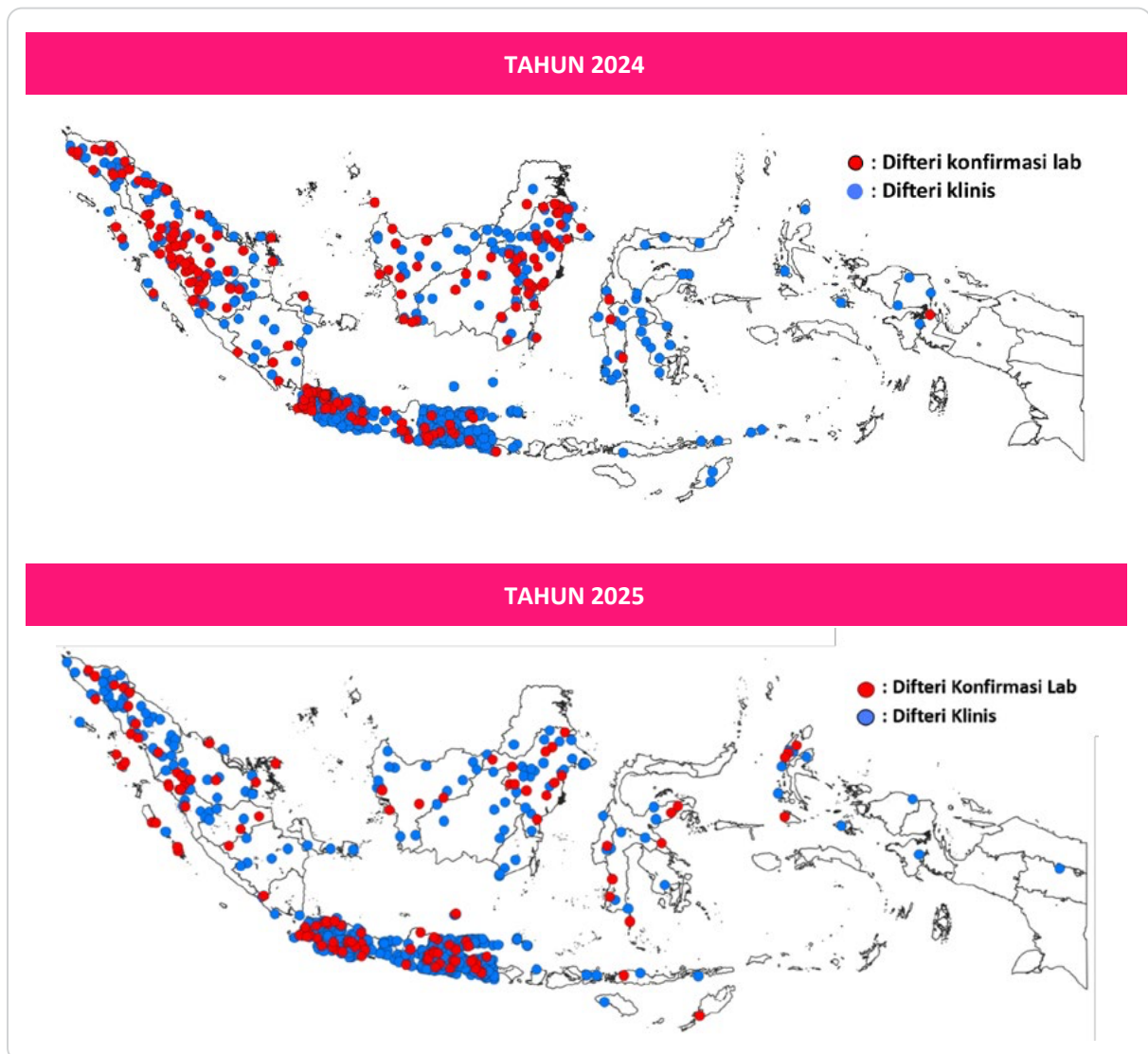
Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* strain toksigenik. Penularan terjadi secara *droplet* (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10% (CDC *Manual for the Surveillance of Vaccine Preventable Diseases*, 2017). Angka kematian difteri rata rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa diatas 40 tahun (CDC Atlanta, 2016).

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah. Setiap satu kasus suspek difteri dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya *pseudomembran* putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi harus dilaporkan dalam 24 jam dan dilakukan segera penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan. Kegiatan penanggulangan

KLB difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait. (Pedoman Surveilans Difteri, 2019)

Pada tahun 2025, kasus difteri menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali 5 provinsi, yaitu Bengkulu, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Jumlah kasus difteri pada tahun 2025 sebanyak 752 kasus. Angka ini menunjukkan penurunan dari kasus difteri yang terjadi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 943 kasus.

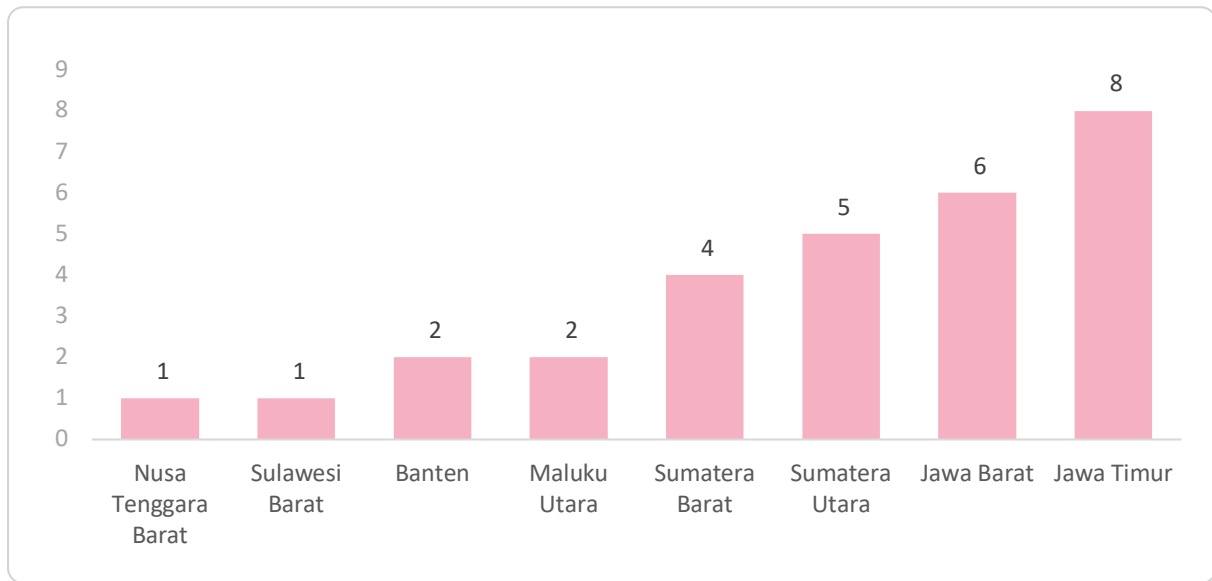
GAMBAR 6.28
SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2024-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025 terjadi 29 kematian kasus difteri di 8 provinsi. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024 yaitu 42 kasus kematian. Kasus kematian paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat (8 kasus) dan Jawa Barat (6 kasus). Pada tahun 2025, angka CFR pada kasus difteri di Indonesia sebesar 2,9%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu sebesar 4,5%. Dari 8 provinsi dengan kasus meninggal difteri, angka CFR paling tinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat (33,3%).

GAMBAR 6.29
KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

KLB difteri terjadi jika suatu wilayah kab/kota dinyatakan KLB difteri jika ditemukan satu suspek difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau jika ditemukan suspek difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus kultur positif.

Kebijakan dalam penanggulangan difteri antara lain:

1. Setiap KLB harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian
2. Dilakukan tatalaksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri/isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain
3. Setiap suspek difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis, dan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi
5. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi
6. Setiap suspek difteri dilakukan *Outbreak Response Immunization (ORI)* atau respon pemberian imunisasi pada KLB sesegera mungkin. Sebaiknya luas wilayah *ORI* dilakukan untuk satu (1) kabupaten/kota tetapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal maka *ORI* minimal dilakukan satu (1) kecamatan dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi dan interval *ORI* 0-1-6 bulan
7. *ORI* dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir.

4. Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus *poliomyelitis*. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. Satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara yang lumpuh, 5-10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan.

Pada bulan Mei 2012, sidang *World Health Assembly* (WHA) mendeklarasikan bahwa pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global dan menetapkan agar Direktur Jenderal WHO menyusun strategi eradikasi polio yang komprehensif. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global, telah disetujui oleh Badan Eksekutif WHO pada Januari 2013. Dalam rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen global bahwa setiap negara perlu melaksanakan strategis yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine* (tOPV) menjadi *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV), introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) dan penarikan seluruh vaksin polio oral (OPV), surveilans AFP (*Acute Flaccid Paralysis*), dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*). Sebagai kelanjutannya, WHO juga telah menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023 yang berisi 3 tujuan utama yaitu eradikasi, integrasi serta sertifikasi dan pengamanan virus polio.

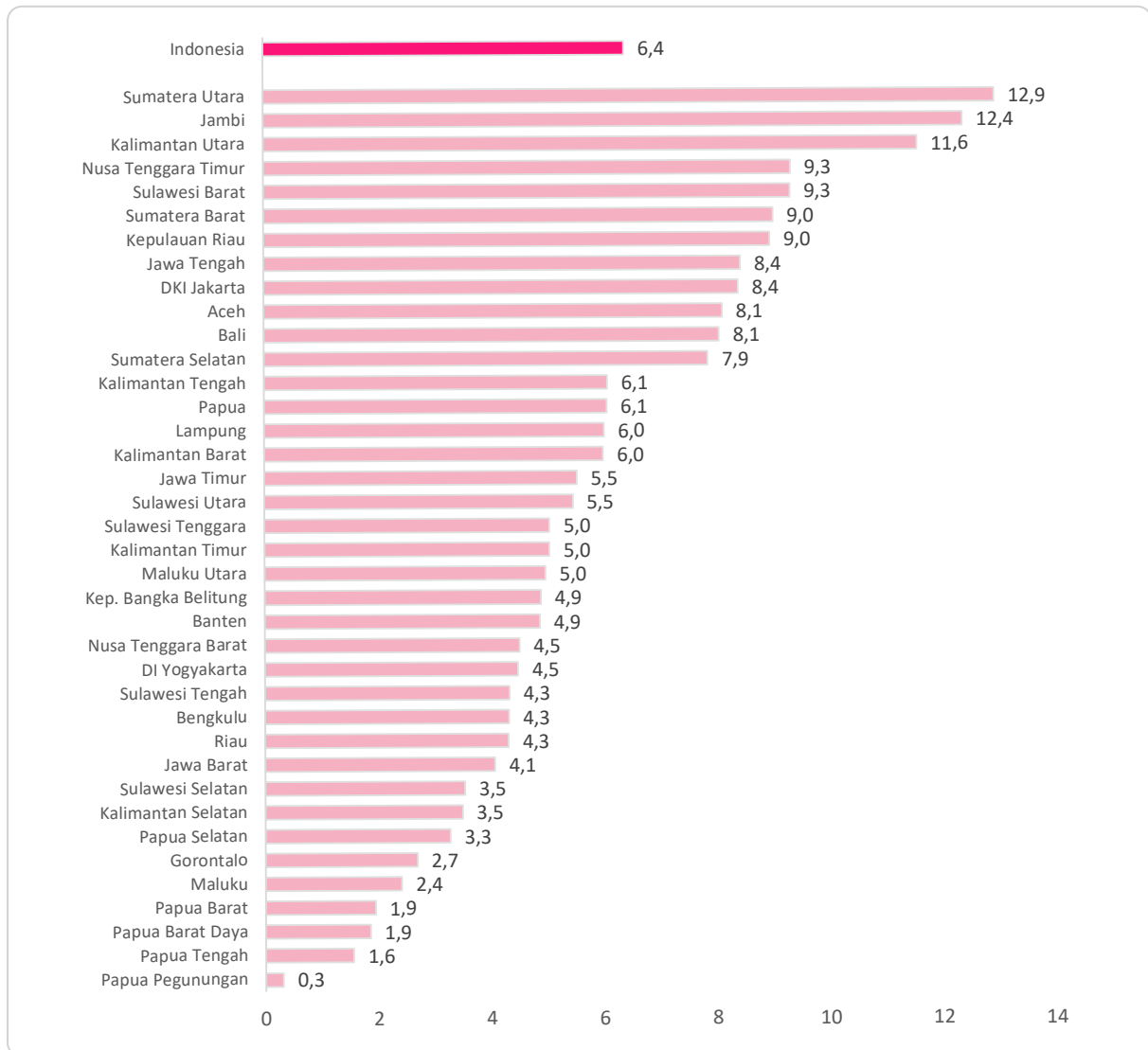
Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat *vaccine derived polio virus* (VDPV) tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan bOPV. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (*acute flaccid paralysis*/AFP) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio. Surveilans AFP juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Indikator surveilans AFP adalah *non-polio AFP rate*, yaitu kasus lumpuh layu akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga disebabkan oleh virus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan target *non-polio AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk usia kurang dari 15 tahun. Namun, dikarenakan adanya KLB pada tahun 2022 sehingga target *non-polio AFP rate* tahun 2023 dinaikkan menjadi minimal 3/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2023, secara nasional *non-polio AFP rate* sebesar 6,18/100.000 populasi penduduk kurang dari 15 tahun. Dapat diartikan bahwa secara nasional, Indonesia telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan kinerja surveilans AFP untuk menemukan kasus AFP sudah sangat baik sehingga diharapkan tidak ada kasus AFP yang belum terjaring. Angka capaian tahun 2023 ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,05/100.000 populasi penduduk kurang dari 15 tahun.

Pada tahun 2025 seluruh provinsi telah melaporkan kasus AFP. Dari 38 provinsi di Indonesia, hampir semua provinsi sudah mencapai standar minimal penemuan *non-polio AFP rate* sebesar ≥ 3 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun, kecuali enam provinsi. Angka capaian tertinggi ada di Provinsi Sumatera Utara dan Jambi. Capaian *non-polio AFP rate* yang paling rendah adalah Papua Pegunungan sebesar 0,3 per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun.

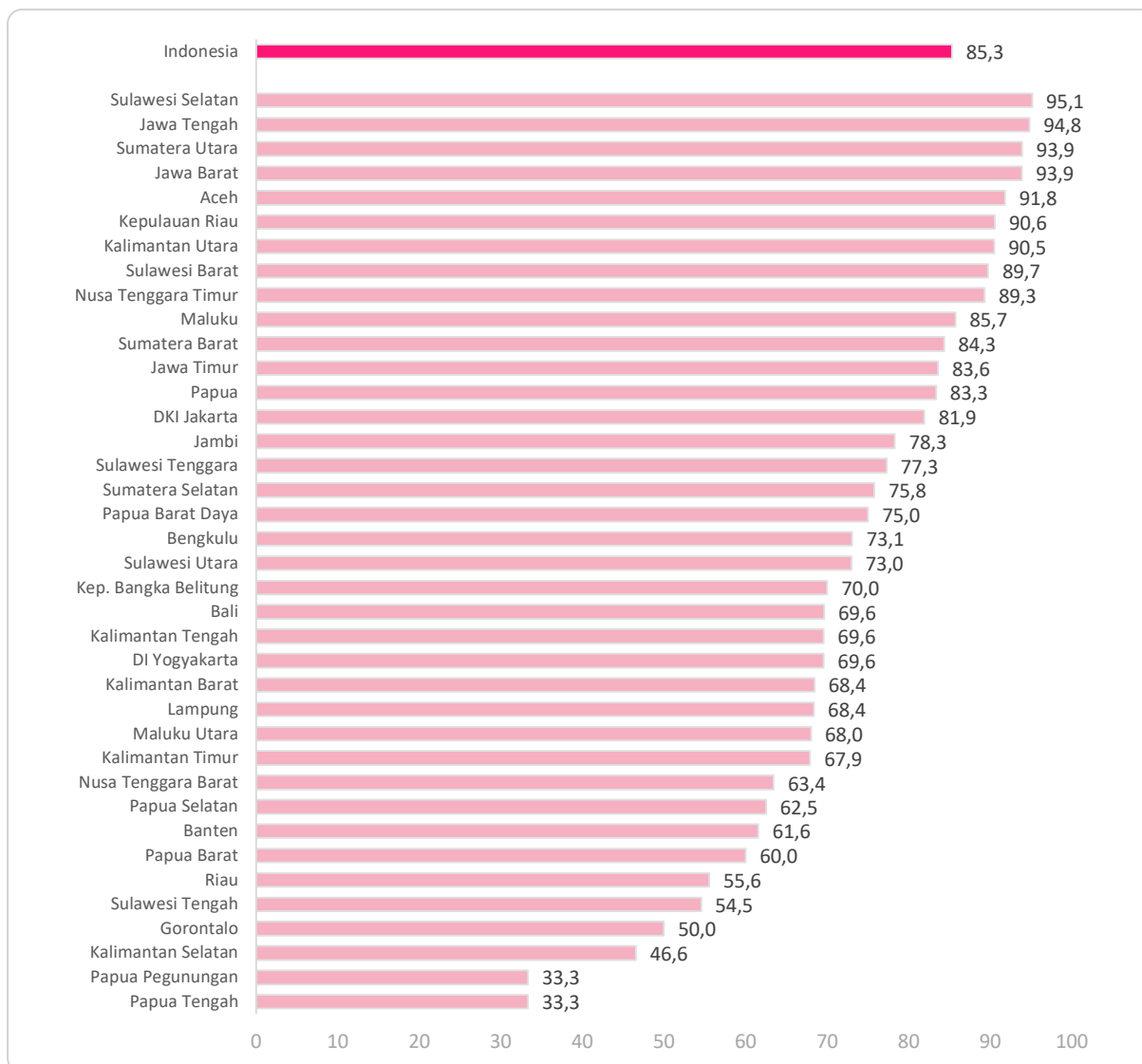
GAMBAR 6.30
NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK <15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan surveilans AFP. Semua kasus AFP seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus memenuhi standar spesimen adekuat dengan persyaratan yaitu volume cukup 8-10 gr, spesimen kondisi baik (tidak bocor, suhu dingin 4-80 C), dua spesimen didapatkan ≤ 14 hari setelah munculnya kelumpuhan dengan waktu pengambilan spesimen pertama dan kedua jeda waktu minimal 24 jam.

GAMBAR 6.31
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Persentase spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 85,3%, meningkat dibandingkan dengan persentase spesimen adekuat pada tahun 2024 sebesar 76,2%. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat AFP yang tertinggi adalah Sulawesi Selatan sebesar 95,1%. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat yang paling rendah adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yaitu sebesar 33,3%.

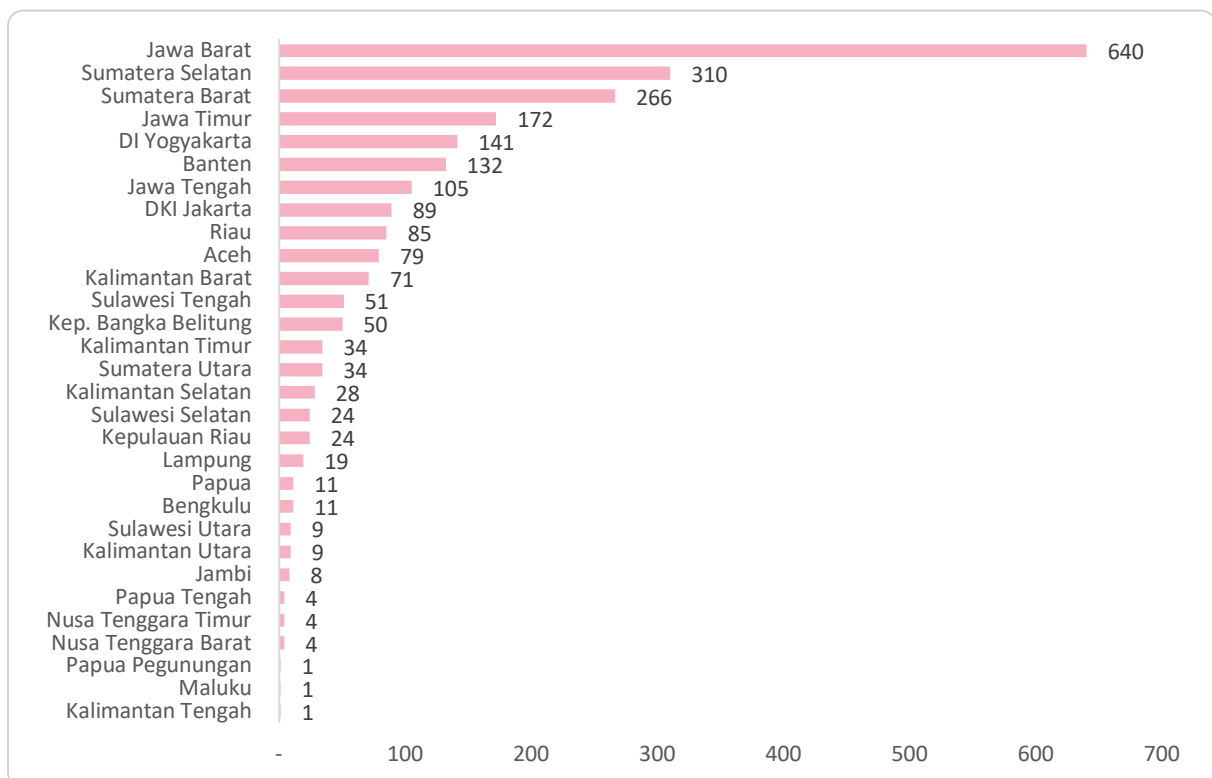
5. Pertusis

Pertusis atau batuk rejan adalah penyakit infeksi saluran pernapasan menular yang dipicu oleh bakteri *Bordetella pertussis*. Penyakit ini menyebar dengan cepat antarindividu melalui percikan ludah (droplet) saat batuk atau bersin. Bayi merupakan kelompok usia yang paling rentan, dengan angka kesakitan dan kematian yang signifikan. Gejala awal biasanya bermanifestasi 7–10 hari setelah paparan, ditandai dengan demam ringan, pilek, dan batuk ringan yang secara bertahap

memburuk menjadi batuk paroksismal dengan suara melengking yang khas. Penyakit ini dapat memicu komplikasi umum seperti pneumonia, serta dampak neurologis yang lebih jarang berupa kejang dan kerusakan otak. Penderita berada pada fase paling menular hingga 3 minggu sejak batuk dimulai, dan gejala batuk pada anak-anak dapat bertahan selama 4 hingga 8 minggu. Terapi antibiotik diterapkan sebagai standar pengobatan infeksi ini.

Penularan pertusis dapat diantisipasi secara efektif melalui imunisasi. Di Indonesia, pencegahan pertusis pada bayi usia 0–11 bulan diintegrasikan melalui pemberian vaksin DPT-HB-Hib yang terbukti aman dan berefikasi tinggi. Imunitas protektif yang optimal tercapai setelah bayi menerima dosis ketiga. Kendati demikian, studi menunjukkan adanya penurunan titer antibodi setelah skema tiga dosis primer tersebut pada usia 15–18 bulan. Oleh karena itu, pemberian imunisasi lanjutan (booster) sangat direkomendasikan pada periode bawah dua tahun (baduta).

GAMBAR 6.32
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT
PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, jumlah kasus pertusis yang dilaporkan di Indonesia sebanyak 2.417 kasus dengan jumlah kasus terbanyak di Provinsi Jawa Barat (640 kasus). Jumlah pelaporan kasus pertusis di Indonesia tiga tahun terakhir cenderung stagnan. Jumlah kasus pertusis tahun 2023 adalah 2.157 kasus, meningkat di tahun 2024 menjadi 2.466 kasus, dan sedikit menurun menjadi 2.417 kasus di tahun 2025. Ada 8 provinsi yang tidak ada pelaporan kasus pertusis tahun 2025 yaitu Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 6.21 – 6.26.

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah Dengue. Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. Sejak pertama kali ditemukan kasus ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Nyamuk *Aedes* menyukai genangan atau tempat penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah sebagai tempat perindukan. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi. Habitat nyamuk *Aedes* pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, serta suhu panas dan lembab. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan seiring dengan bermunculannya tempat perindukan. Selain mempengaruhi banyaknya kasus, karakteristik dan perilaku nyamuk *Aedes* juga menjadi landasan upaya pengendalian penyakit DBD melalui intervensi lingkungan dan perilaku individu dan masyarakat. Upaya pengendalian tersebut di antaranya melalui kampanye 3M (Menguras, Menutup, dan Memanfaatkan) dan 3M plus (memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air).

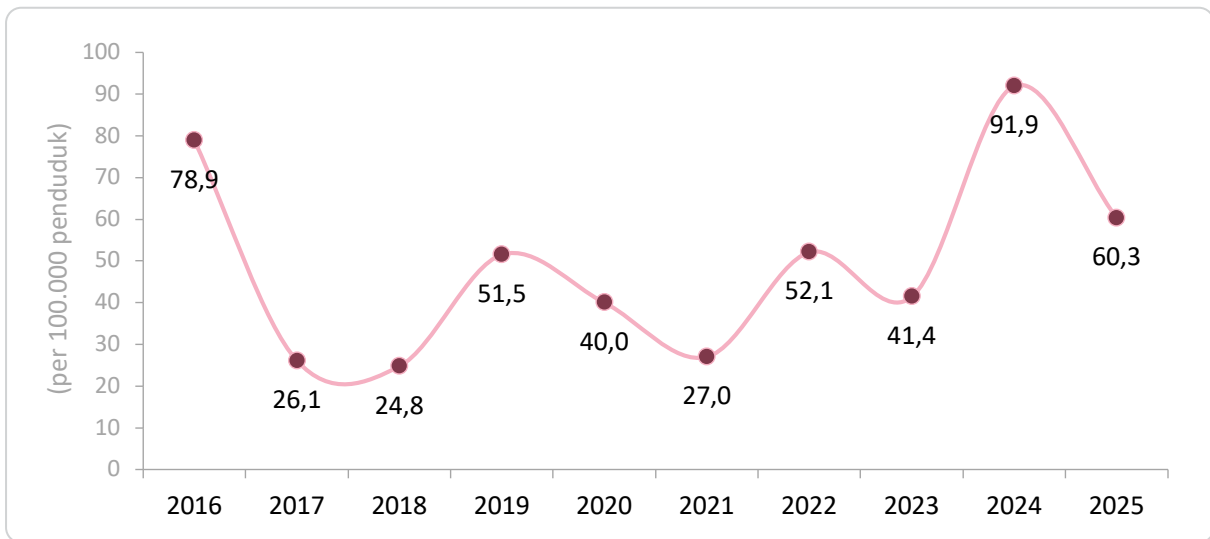
a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit $< 100.000/\text{mm}^3$ dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit $> 20\%$.

Pada tahun 2025 terdapat 170.798 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 703 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 257.271 kasus dan 1.461 kematian.

Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate*.

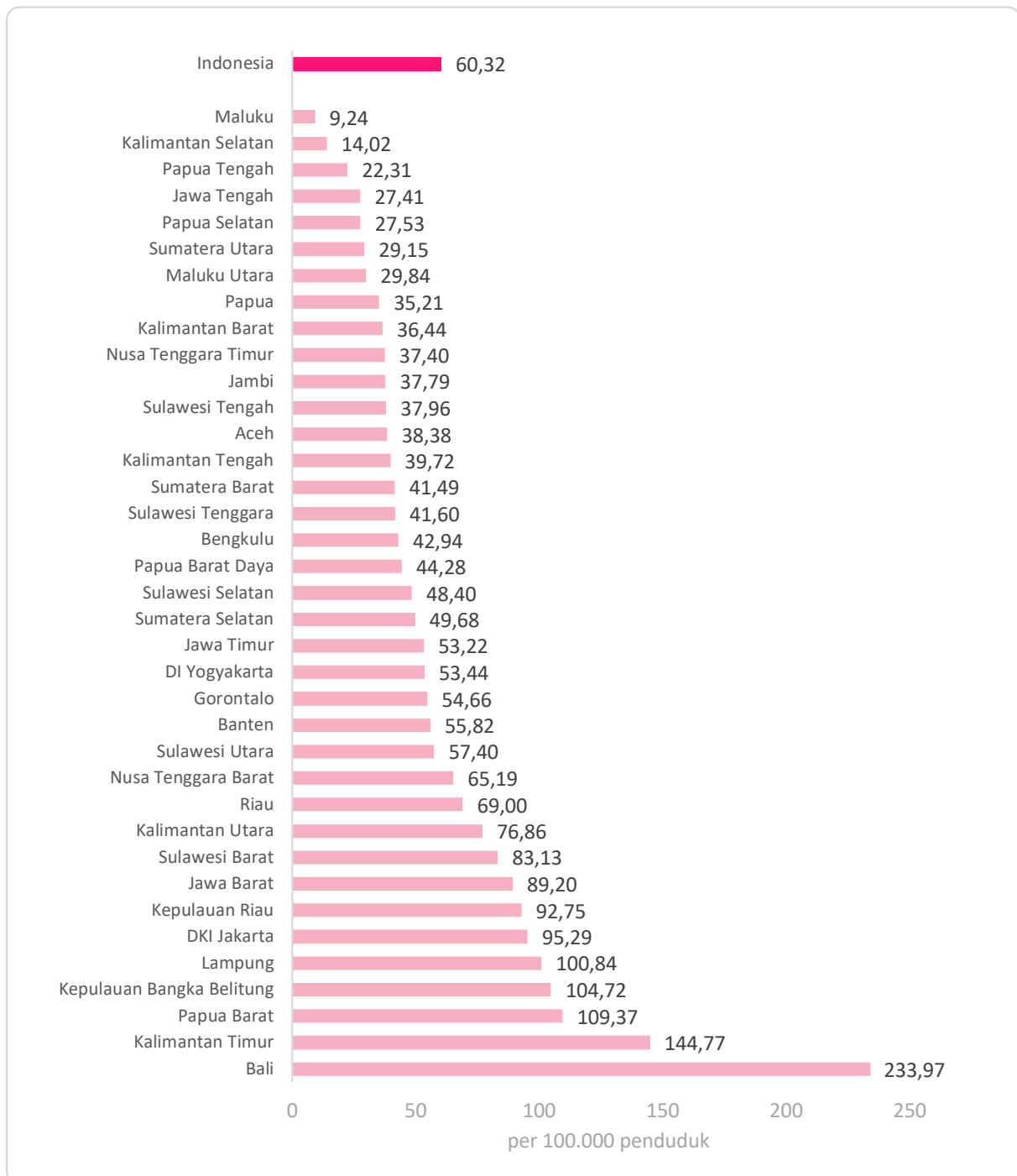
GAMBAR 6.33
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE
DI INDONESIA TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk mengalami penurunan pada tahun 2025 setelah adanya lonjakan cukup signifikan pada tahun 2024. Penurunan IR DBD di tahun 2025 dapat dikarenakan beberapa hal seperti, 1) Fenomena El Nino sudah mulai turun di tahun 2025 dan berkurang secara global dibandingkan tahun 2024, 2) Tujuan Global “Zero Dengue Death” atau nol kematian akibat Dengue di tahun 2030 menjadi semangat baru dalam upaya penanggulangan Dengue Nasional sehingga berbagai macam upaya telah dilakukan dalam mencegah kasus dan kematian akibat Dengue 3) Perkembangan media digital (seperti media sosial) lebih diminati oleh masyarakat sehingga upaya pengembangan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) menjadi lebih banyak menjangkau sasaran masyarakat modern 4) Penentuan indikator baru IKP (indikator kinerja program) berupa angka kematian akibat Dengue dan IKK (indikator kinerja kegiatan) berupa proporsi kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Dengue yang tertuang dalam Permenkes no. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Resnstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 memberikan panduan yang lebih jelas dalam penanggulangan Dengue.

GAMBAR 6.34
ANGKA KESAKITAN (INCIDENCE RATE/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

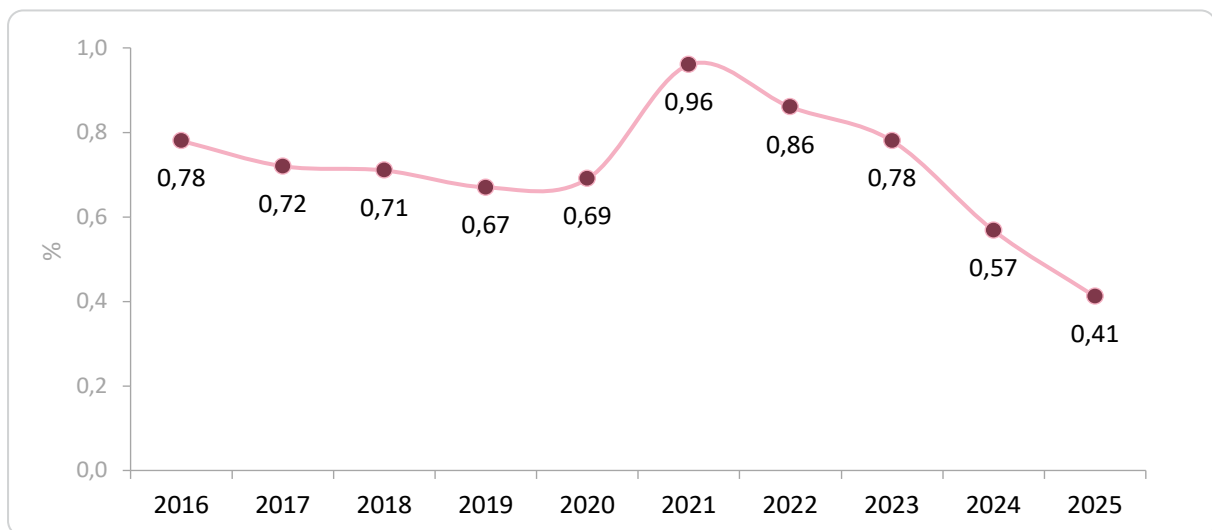


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional IR DBD tahun 2025 sebesar 60,32 per 100.000 penduduk, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 10 per 100.000 penduduk. Hampir seluruh provinsi memiliki IR DBD >10 per 100.000 penduduk, kecuali Maluku. Tidak ada pelaporan kasus pada Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi dengan IR DBD tertinggi adalah Bali dan Kalimantan Timur.

Kasus DBD yang terlambat mendapatkan perawatan dapat menyebabkan fatalitas seperti kematian. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian DBD.

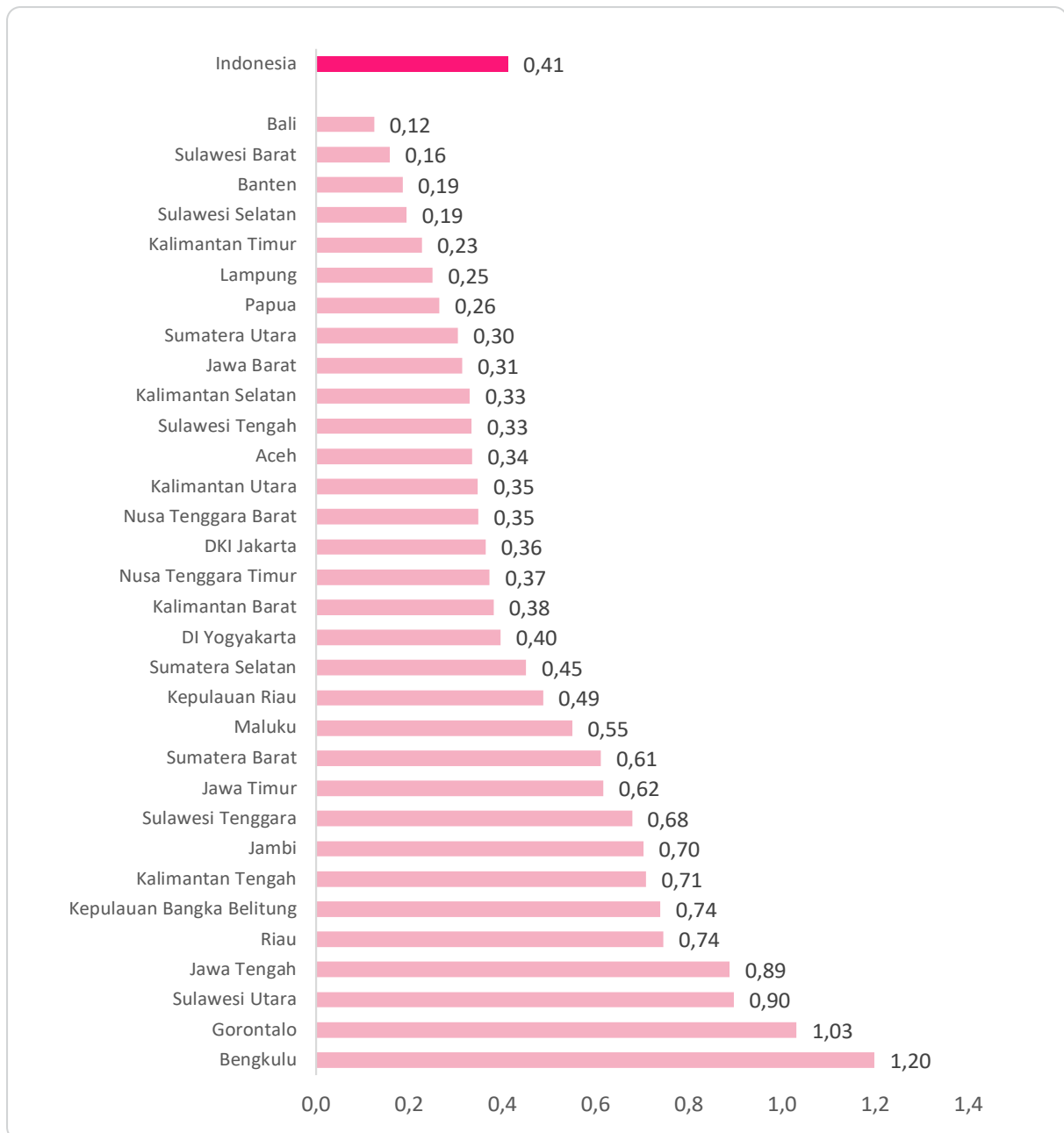
GAMBAR 6.35
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
DI INDONESIA TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020 CFR DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan. Peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,96% dan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2025 yaitu sebesar 0,41%. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan pada perawatan pasien DBD baik dari sisi ketepatan waktu penanganan maupun kualitas pelayanan kesehatan.

GAMBAR 6.36
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



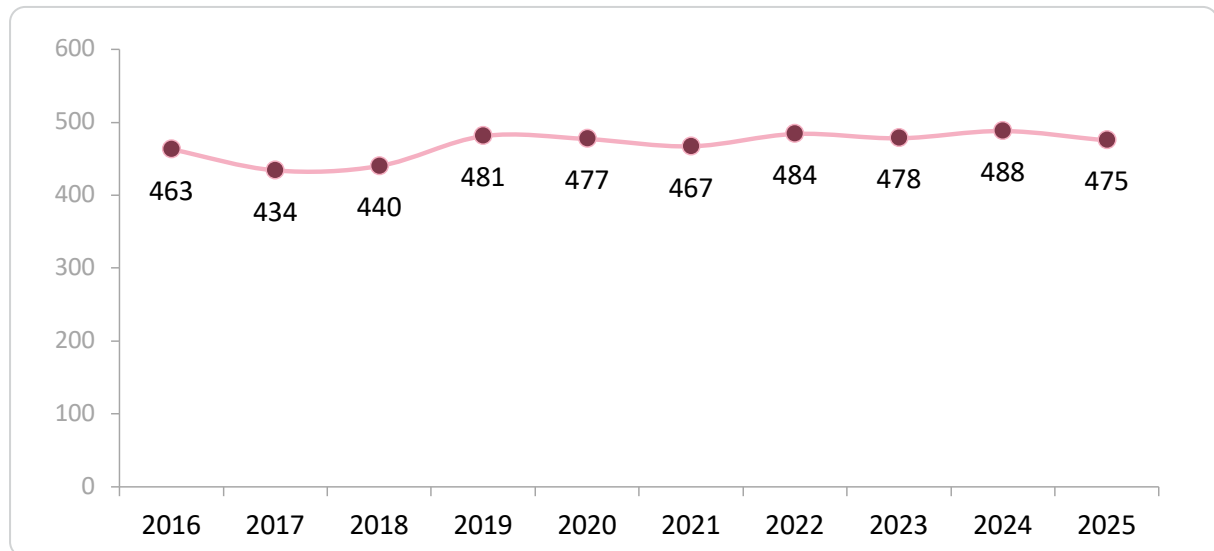
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional CFR DBD tahun 2025 adalah 0,41%. Angka ini menurun dibandingkan periode sebelumnya. CFR tinggi jika melampaui angka 1%. Terdapat dua provinsi yang memiliki CFR di atas 1%. Pertolongan segera untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian diperlukan untuk menurunkan CFR. Diperlukan upaya tindak lanjut tata laksana kasus yg adekuat, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya Dengue untuk mencegah keterlambatan penanganan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat secara dini mengenali gejala dan tanda bahaya Dengue. Provinsi Maluku, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan, dan Papua Barat Daya tidak terdapat kasus kematian DBD (CFR 0%).

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran kasus DBD di Indonesia dapat dipantau melalui banyaknya kabupaten/kota dengan status terjangkit DBD. Pada tahun 2025 terdapat 475 (92,4%) kabupaten/kota yang terjangkit DBD di Indonesia. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2025 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan tahun 2025.

GAMBAR 6.37
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

c. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue

Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue adalah upaya penyelidikan penularan penyakit Dengue yang meliputi kegiatan pencarian atau identifikasi kasus Dengue dan/atau kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular Dengue di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum yang berada dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE bertujuan untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran Dengue lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita atau fokus penularan. PE harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya laporan kasus atau terduga Dengue.

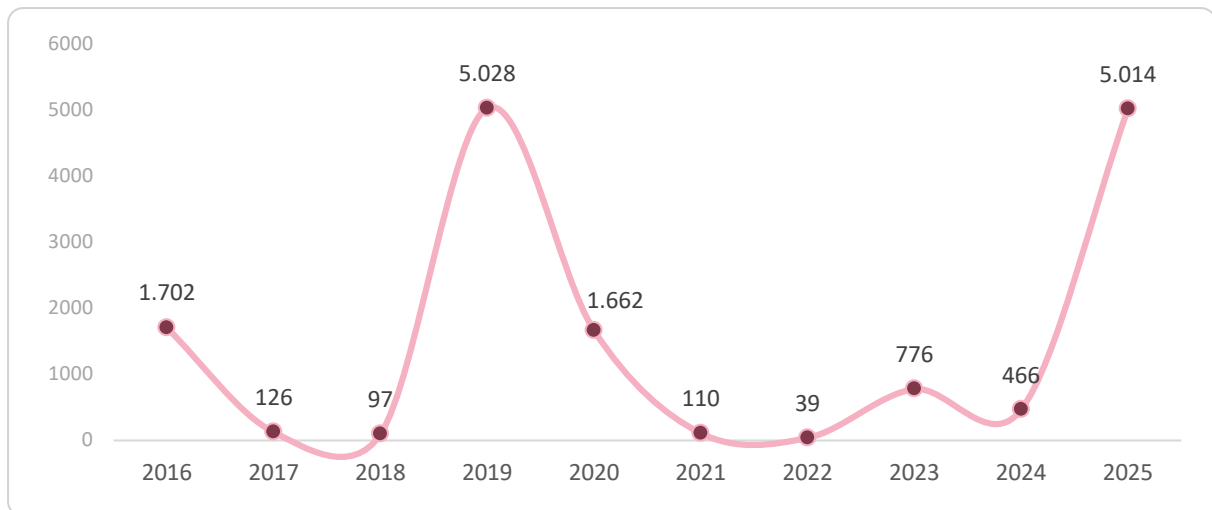
2. Chikungunya

Demam Chikungunya (demam chik) ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Gejala utama demam chik adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat Chikungunya

Pada tahun 2024 dilaporkan kasus demam Chikungunya sebanyak 5.014 kasus, meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 sebanyak 466 kasus. Provinsi dengan kasus tertinggi yaitu Jawa Barat sebanyak 1.714 kasus. Jumlah kasus Chikungunya pada tahun 2016-2025 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.38
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2016-2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus chikungunya antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya.

b. Penyelidikan Epidemiologi Pada Chikungunya

Penyelidikan epidemiologi (PE) bertujuan untuk mengetahui potensi dan penyebaran Chikungunya lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita. PE pada Chikungunya adalah kegiatan pencarian penderita atau terduga demam chikungunya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular di tempat tinggal penderita dan rumah/ bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.

3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya

Pengendalian faktor risiko yang paling efektif adalah pengendalian vektor terpadu baik secara fisik, kimiawi dan biologi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Pengendalian Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. PSN 3M Plus merupakan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Kegiatan PSN 3M meliputi menguras bak mandi atau bak penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.

Kegiatan Plus meliputi: mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, dan lainnya, menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, dan cara spesifik lainnya di masing-masing daerah.

Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Jika $ABJ \geq 95\%$ diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi. Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

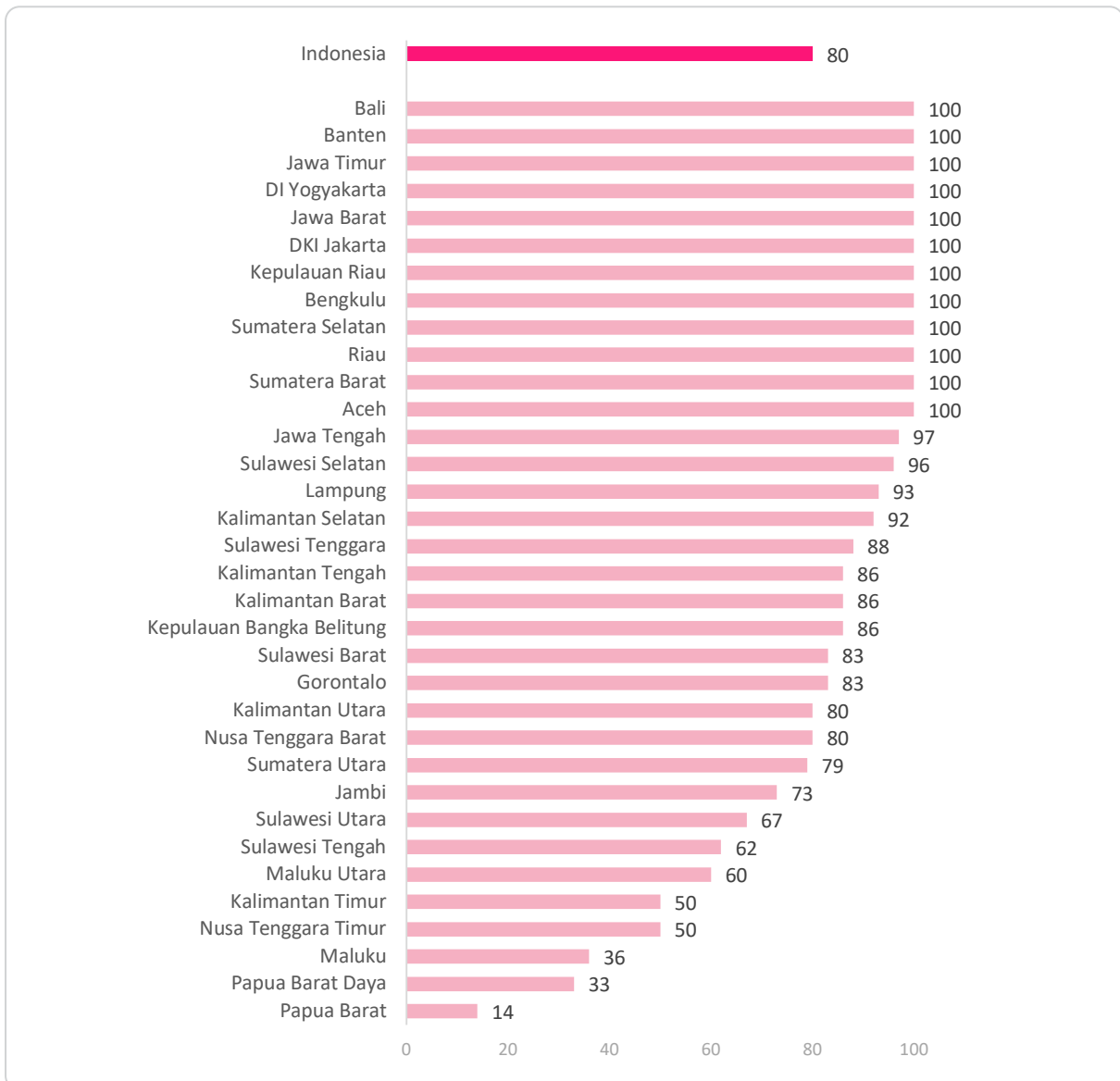
4. Malaria

Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Target ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 22 tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria.

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia. *Plasmodium* menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk *Anopheles*. Bersama dengan HIV AIDS dan Tuberkulosis, pengendalian malaria menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tujuan global yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030.

Pada tahun 2025, terdapat 12 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Selain itu, terdapat empat provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Papua tersebut yang memiliki status endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan menjadi bebas malaria.

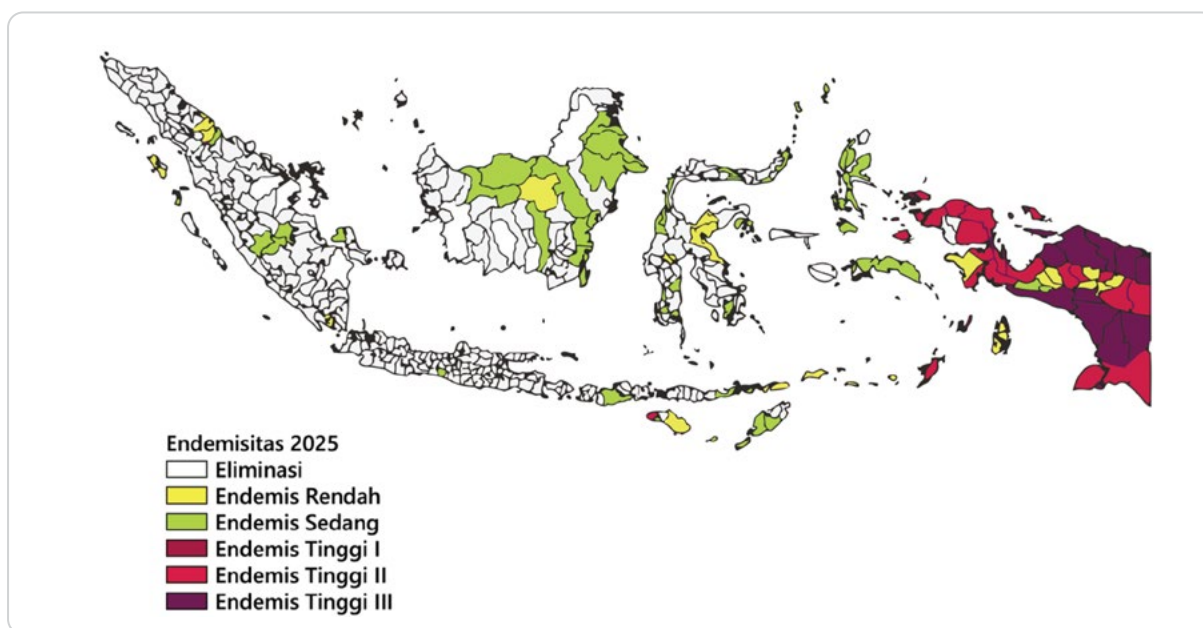
GAMBAR 6.39
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi sediaan darah dan persentase pengobatan standar. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 sebanyak 80,2% kabupaten/kota di Indonesia atau sebanyak 412 kabupaten/kota telah berstatus bebas malaria.

GAMBAR 6.40
PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

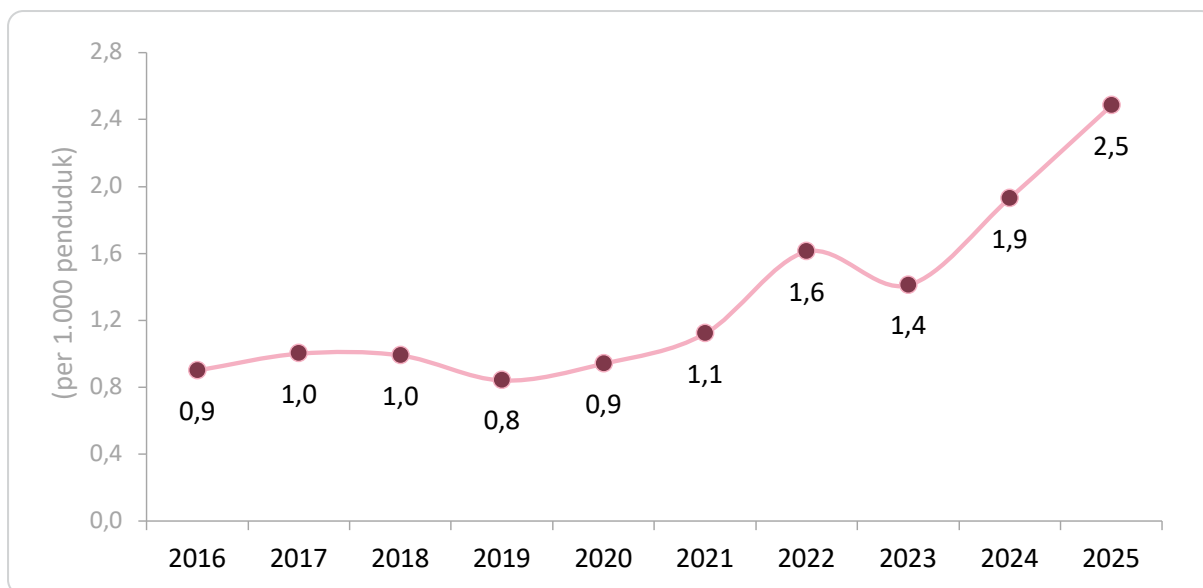
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berstatus eliminasi malaria tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian besar kabupaten/kota dengan status endemis tinggi terdapat pada enam provinsi di Pulau Papua.

Penentuan tingkat endemisitas di antaranya ditentukan berdasarkan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) per 1000 penduduk. Wilayah endemis rendah jika API <1 per 1000 penduduk, endemis sedang jika API sebesar 1-5 per 1000 penduduk, dan endemis tinggi jika API >5 per 1000 penduduk. Pada tahun 2025 terdapat 412 kabupaten/kota (80,2%) bebas malaria, 44 kabupaten/kota (8,6%) berstatus endemis rendah, 23 kabupaten/kota (4,5%) berstatus endemis sedang, dan 35 kabupaten/kota (6,8%) berstatus endemis tinggi.

a. Angka Kesakitan Malaria

Morbiditas malaria dapat diketahui dengan menilai indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk. Indikator ini diperoleh dengan menghitung proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tertentu. Indonesia berhasil menekan API menjadi kurang dari 1 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, terus terjadi peningkatan sejak tahun 2021 hingga API pada tahun 2025 mencapai 2,5 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan pemeriksaan kasus malaria yang cukup signifikan menjadi 7.021.816 dengan kasus positif sebesar 706.297.

GAMBAR 6.41
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*)
PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016-2025

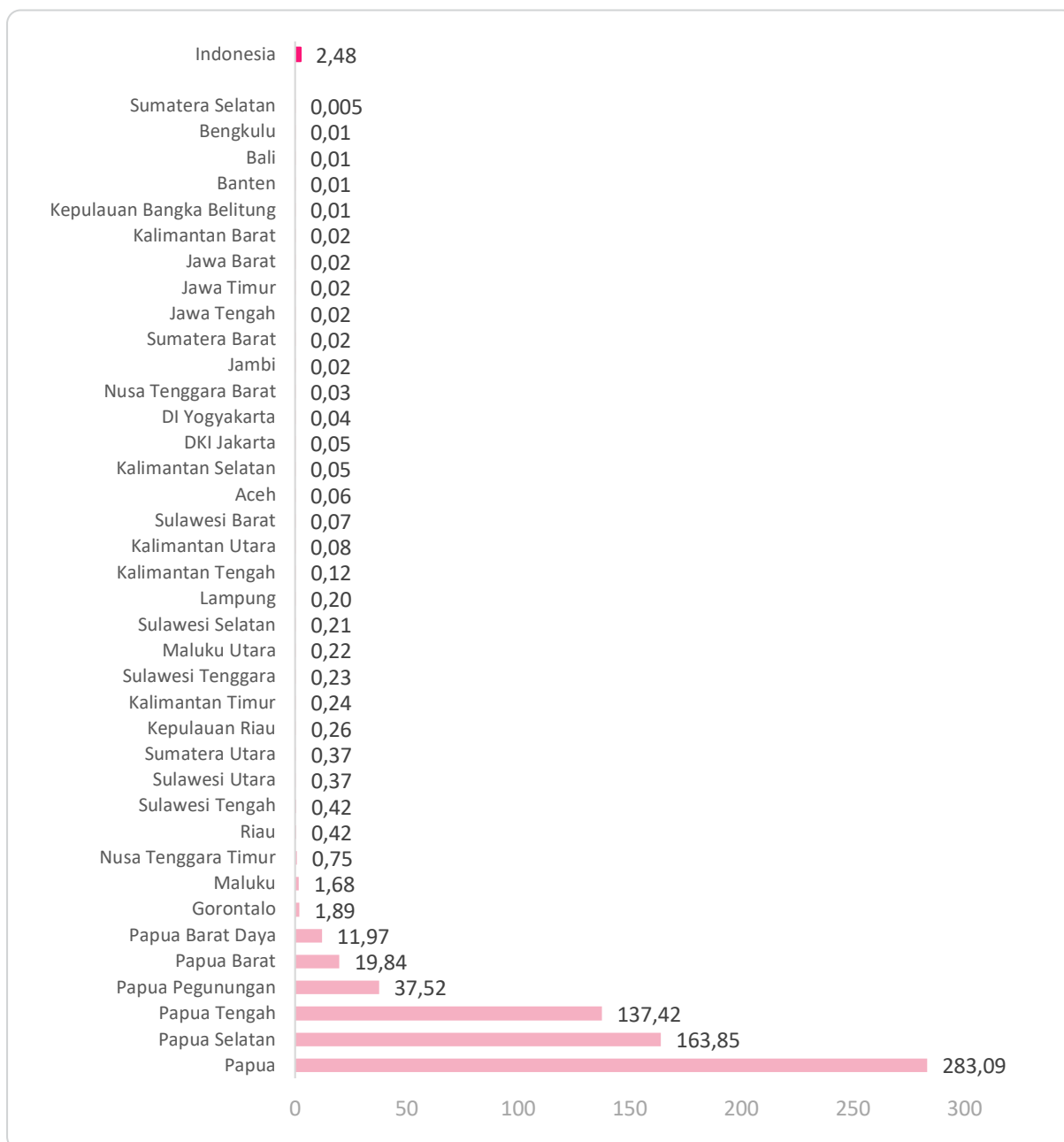


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Dari 7.026.671 suspek malaria tahun 2024 yang dilaporkan, sebanyak 99,93% di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium, 34,6% diperiksa secara mikroskopis dan 65,4% menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT), dengan capaian *Positivity Rate* (PR) sebesar 10,1% dari angka PR yang ditargetkan <5%.

Sebanyak 78,94% provinsi di Indonesia telah mampu menekan API malaria hingga kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan API malaria tertinggi. Hal ini sejalan dengan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan status endemis tinggi. Tingginya API di Provinsi Papua sebesar 283,09 per 1.000 penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh provinsi, menggambarkan kontribusi yang signifikan terhadap API di tingkat nasional. API pada tingkat nasional dan provinsi di tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.45
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

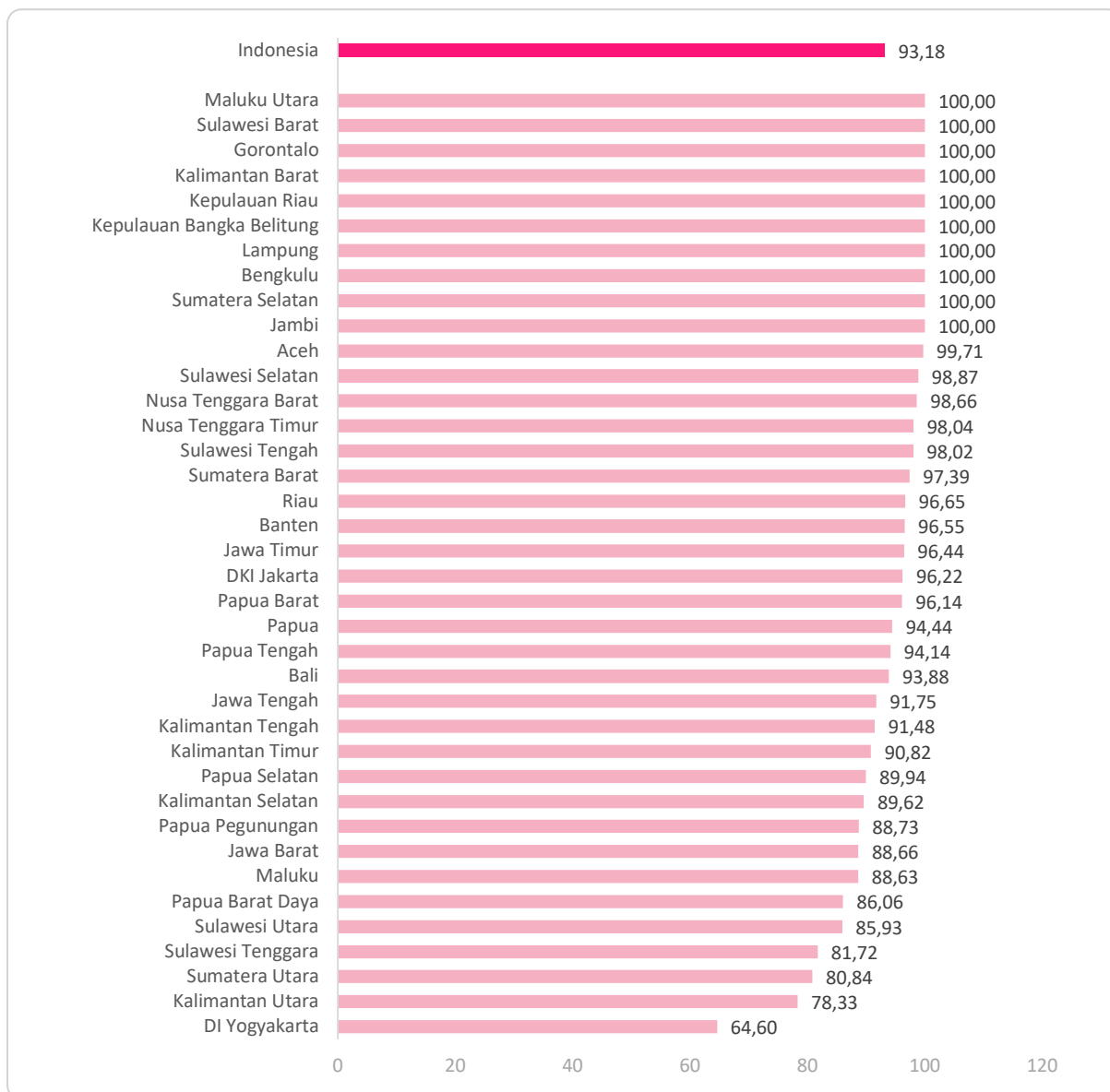


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria yang standar dan efektif sampai saat ini masih menggunakan *Artemisinin-based Combination Therapy* (ACT) ditambah primakuin. Pengobatan dilakukan pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum habis. Pemerintah menetapkan target persentase pengobatan ACT sebesar $\geq 95\%$.

GAMBAR 6.43
PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada gambar di atas dapat diketahui hanya sebagian provinsi di Indonesia yang memenuhi target pengobatan standar $\geq 95\%$, yaitu sebanyak 21 provinsi (55,3%). Selain itu masih terdapat 17 provinsi dengan persentase pengobatan standar kurang dari 95%, dengan provinsi terendah yaitu DI Yogyakarta dan Kalimantan Utara.

Data dan informasi lebih rinci tentang penyakit Malaria terdapat pada Lampiran 6.29 – 6.31.

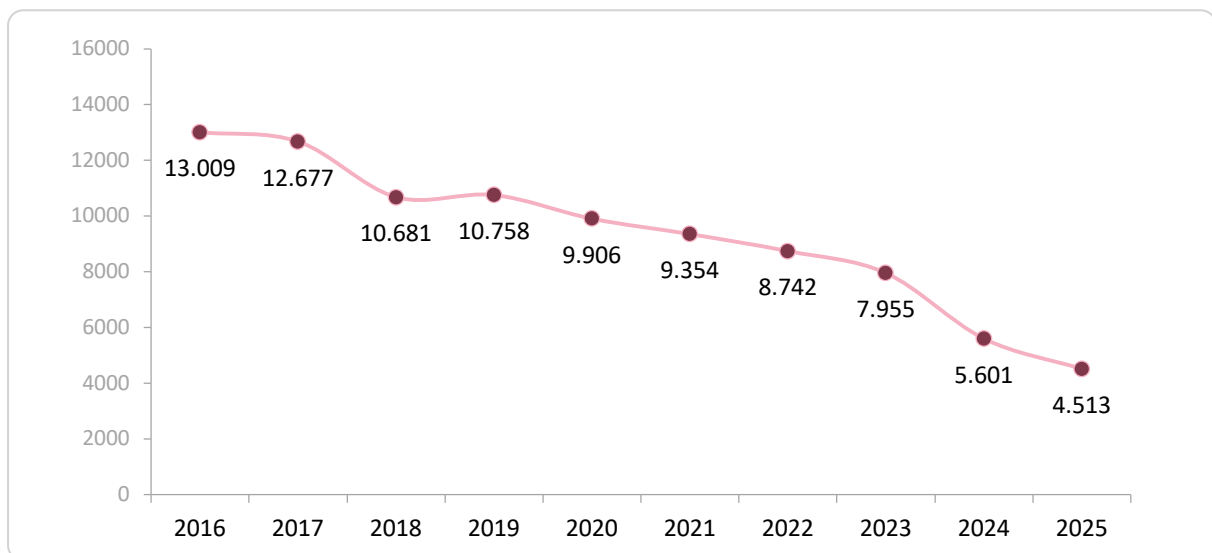
5. Filariasis

Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing *Filaria* dan ditularkan dengan perantara nyamuk. Cacing *Filaria* yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk akan merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula *mammæ* dan *scrotum*, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja penderita dan beban keluarga. Cacing penyebab *Filaria* yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*.

Secara Global, diperkirakan jumlah kasus kronis filariasis adalah sebanyak 36 juta kasus. Sebanyak 657 juta penduduk di 39 negara masih beresiko tertular filariasis sehingga membutuhkan obat pencegahan untuk memutus rantai penularan (WHO 2023). Dalam Pertemuan ke 73 *World Health Assembly* (WHA) secara Virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (*Neglected Tropical Diseases /NTDs*) tahun 2021–2030. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah mentargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2030.

Di Indonesia, pada tahun 2025 terdapat 4.513 kasus kronis Filariasis yang tersebar di 38 provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis setelah dilakukan validasi data dan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus Filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

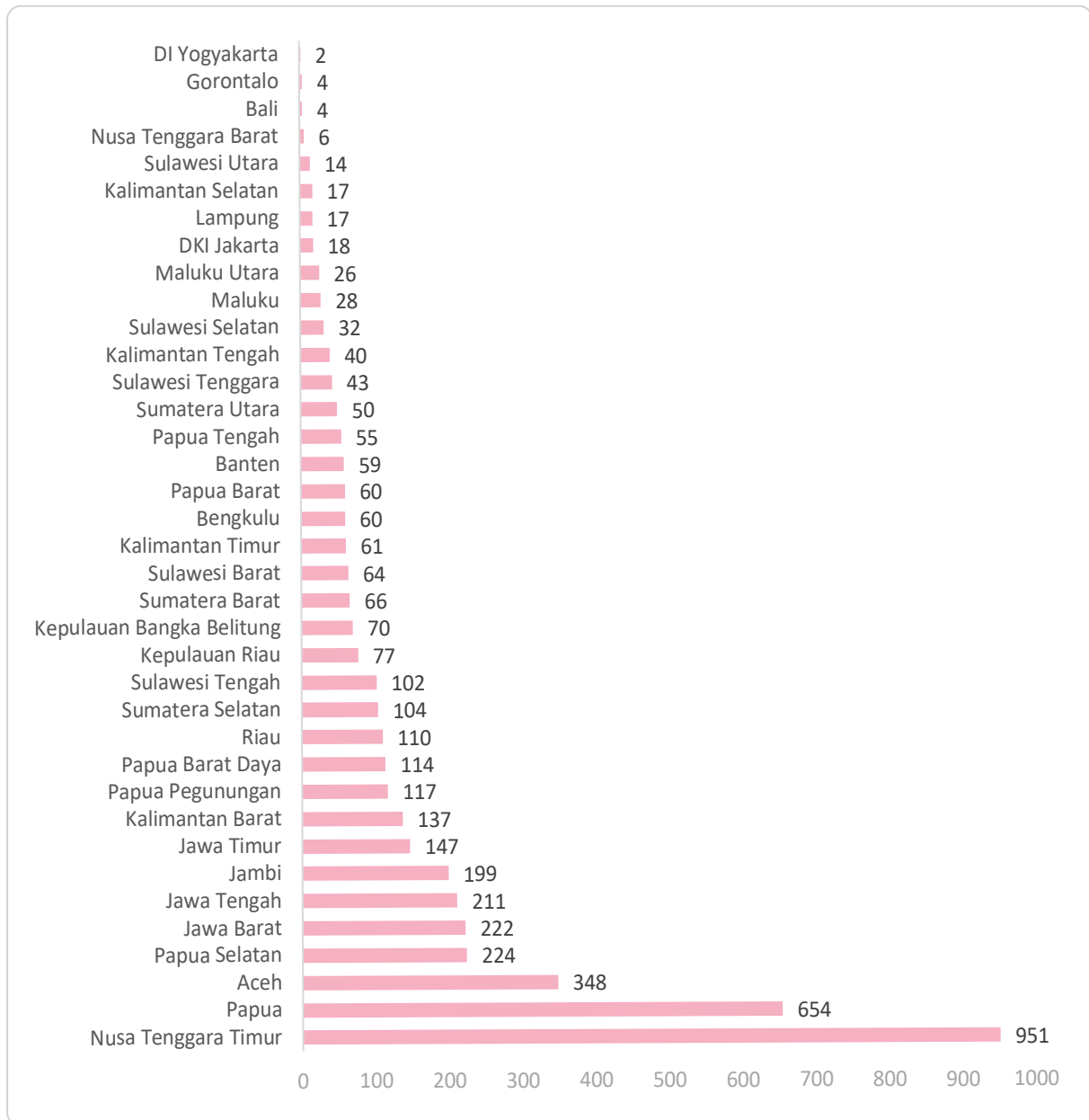
GAMBAR 6.47
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Provinsi dengan kasus kronis Filariasis tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur 951 kasus dan Papua sebanyak 654 kasus. Provinsi dengan kasus Filariasis terendah adalah DI Yogyakarta dengan total 2 kasus. Provinsi Kalimantan Utara tidak ada kasus kronis filariasis.

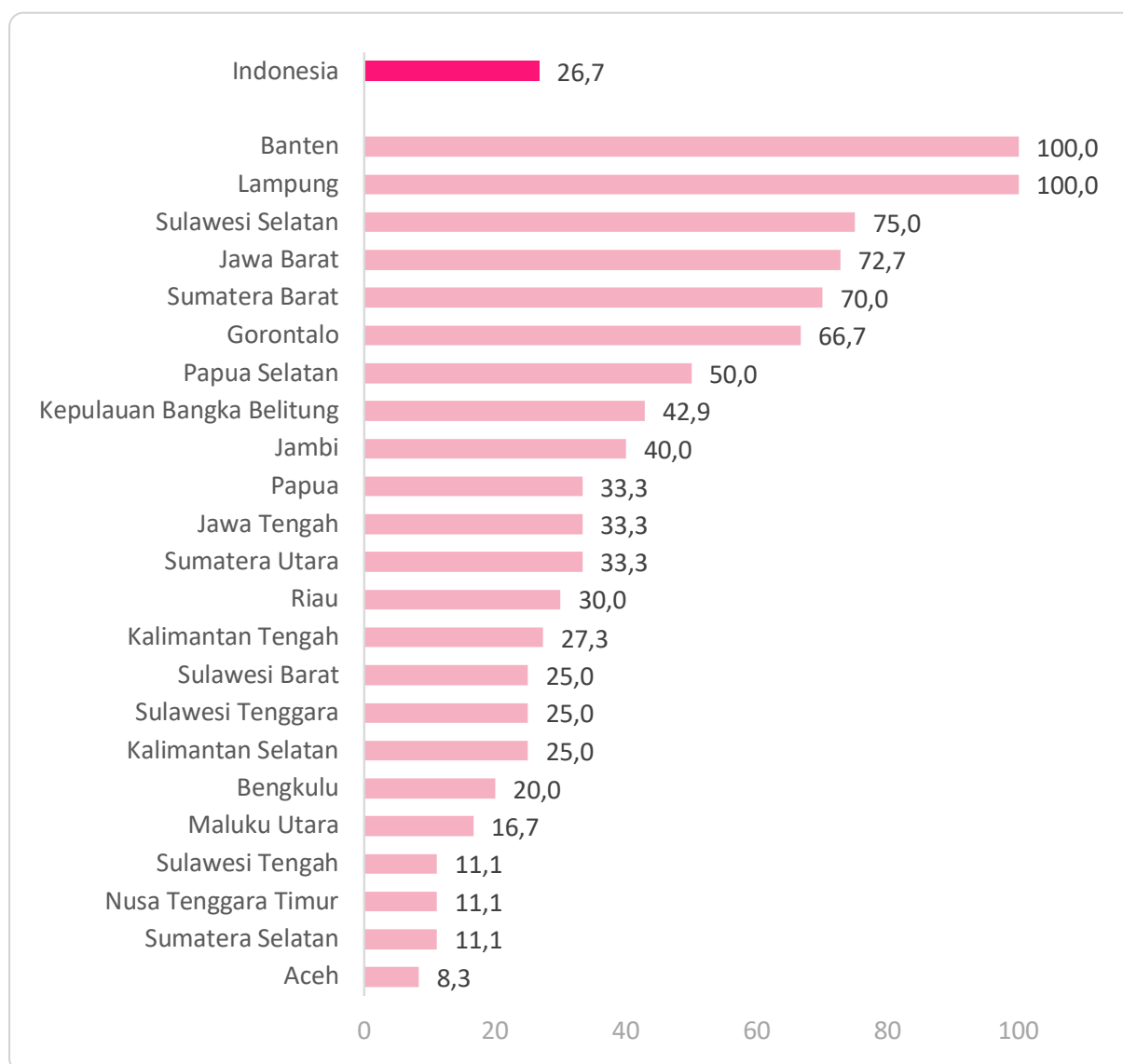
GAMBAR 6.45
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keberhasilan program pengendalian Filariasis dapat diketahui di antaranya dengan melihat jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil eliminasi. Indonesia telah menetapkan 236 kabupaten/kota di 32 provinsi sebagai daerah endemis filariasis. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis Filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam menuju eliminasi filariasis, pemerintah menetapkan dua program utama yaitu melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan filariasis pada penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis serta yang kedua adalah tatalaksana kasus kronis filariasis di fasyankes.

GAMBAR 6.46
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIASIS BERHASIL ELIMINASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



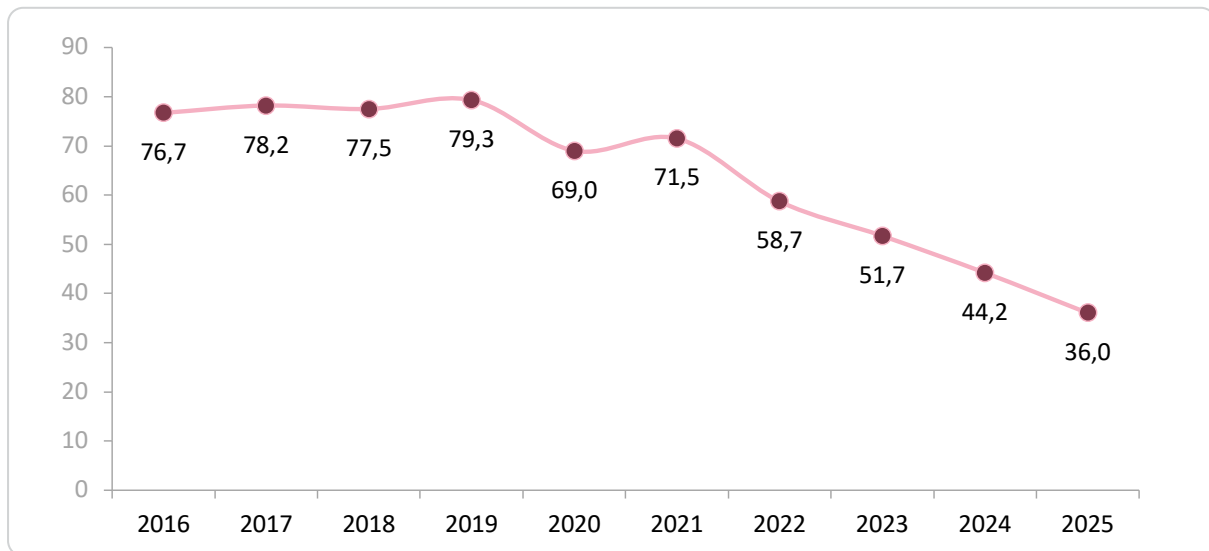
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, dari 236 kabupaten/kota endemis filariasis, sebanyak 63 kabupaten/kota endemis telah berhasil mencapai eliminasi, 153 kabupaten/kota memasuki tahap surveilans, dan 20 kabupaten/kota masih melaksanakan POPM filariasis. Dalam tahapan eliminasi filariasis, suatu kabupaten/kota endemis hanya dapat dinilai tingkat transmisi filariasisnya bila kabupaten/kota tersebut telah selesai melaksanakan POPM Filariasis pada seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun dengan cakupan pengobatan diatas 65% dari total jumlah penduduk. Selanjutnya, dilaksanakan survei evaluasi prevalensi dan survei evaluasi penularan filariasis (*Transmission Assessment Survey/TAS*) sebanyak 3 tahap dalam jangka waktu setiap 2 tahun. Dari data diatas terdapat provinsi yang seluruh kabupaten/kota endemis dinilai telah mencapai eliminasi filariasis yaitu Provinsi Lampung dan Banten. Sedangkan provinsi yang capaian eliminasinya masih 0% dikarenakan kabupaten/kota endemis masih melaksanakan POPM atau masuk dalam tahap surveilans pasca POPM antara lain Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan

Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan.

Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dilaksanakan setahun sekali selama lima tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65%. Seluruh kabupaten/kota endemis Filariasis telah memulai tahapan POPM filariasis dengan waktu yang berbeda-beda. Pada tahun 2025 sebanyak 20 (8,5%) kabupaten/kota endemis masih melaksanakan POPM Filariasis dengan cakupan sebesar 36,03%.

GAMBAR 6.47
CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2015 - 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan Filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Selama periode tahun 2015 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat Filariasis di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat. Namun tahun 2019-2024 cenderung menurun menjadi 44,16% pada tahun 2025. Dari 20 kabupaten/kota endemis filariasis yang masih melaksanakan POPM, sebanyak 14 kabupaten/kota diantaranya berada di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kondisi geografis serta faktor keamanan menjadi penyebab menurunnya cakupan POPM filariasis pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 sebanyak 11 kabupaten/kota melaksanakan POPM Filariasis menggunakan obat *Diethylcarbamazine* (DEC) dan *Albendazole* (DA) dan sebanyak 9 kabupaten/kota menggunakan tiga macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC, *Albendazole* dan *Ivermectine* (IDA).

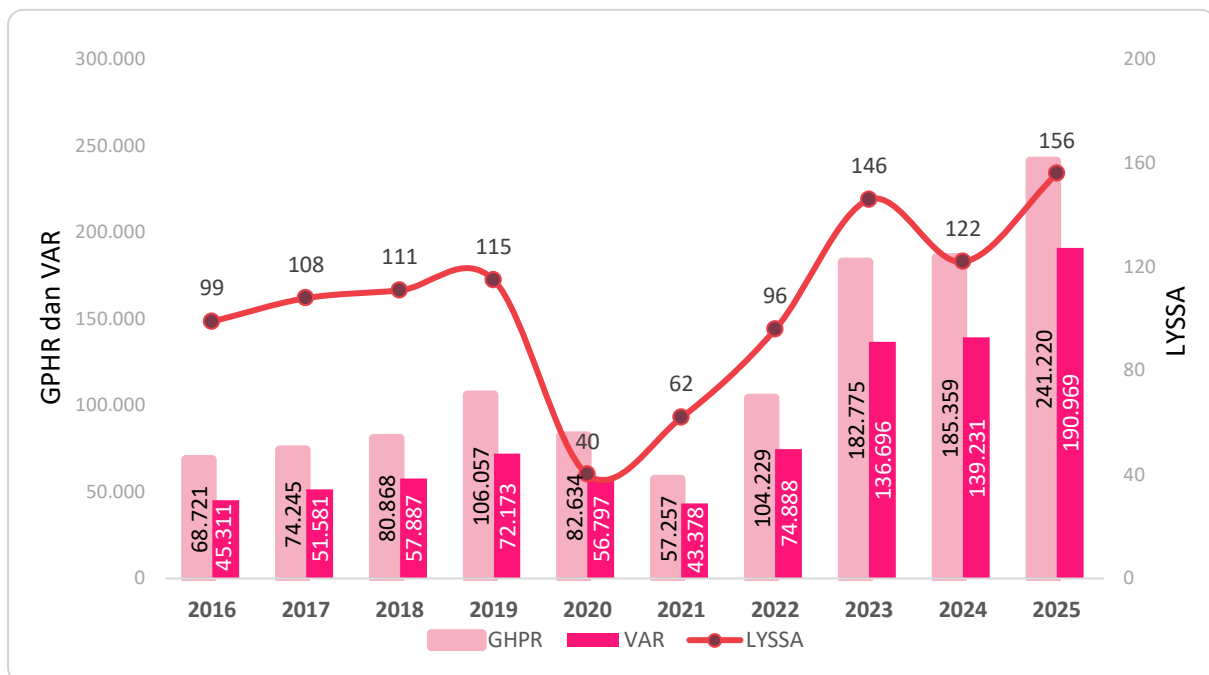
6. Rabies

Rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dari golongan Rhabdovirus. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, monyet/keras, kelelawar. Selain bagi manusia, rabies dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bagi hewan penular tersebut.

Permasalahan Rabies dapat diketahui melalui kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), dan kasus kematian (LYSSA). Kasus GHPR yang dilaporkan di fasilitas kesehatan segera dilakukan tatalaksana seperti cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit dan pemberian VAR/SAR sesuai dengan katagori luka gigitannya. Kasus Kematian (Lyssa) adalah Kasus GHPR yang mengalami mengalami gejala klinis seperti takut air (hidrophobia), takut udara (aerophobia), dan takut cahaya (fotophobia) dan akhirnya meninggal. Tidak adanya kasus kematian selama 2 tahun berturut-turut atau ditemukan adanya sampel positif pada hewan penularnya menjadi landasan penentuan daerah eliminasi rabies.

Sampai dengan tahun 2025 terdapat 12 provinsi yang telah dinyatakan sebagai wilayah bebas Rabies, yaitu yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

GAMBAR 6.48
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2015 - 2025

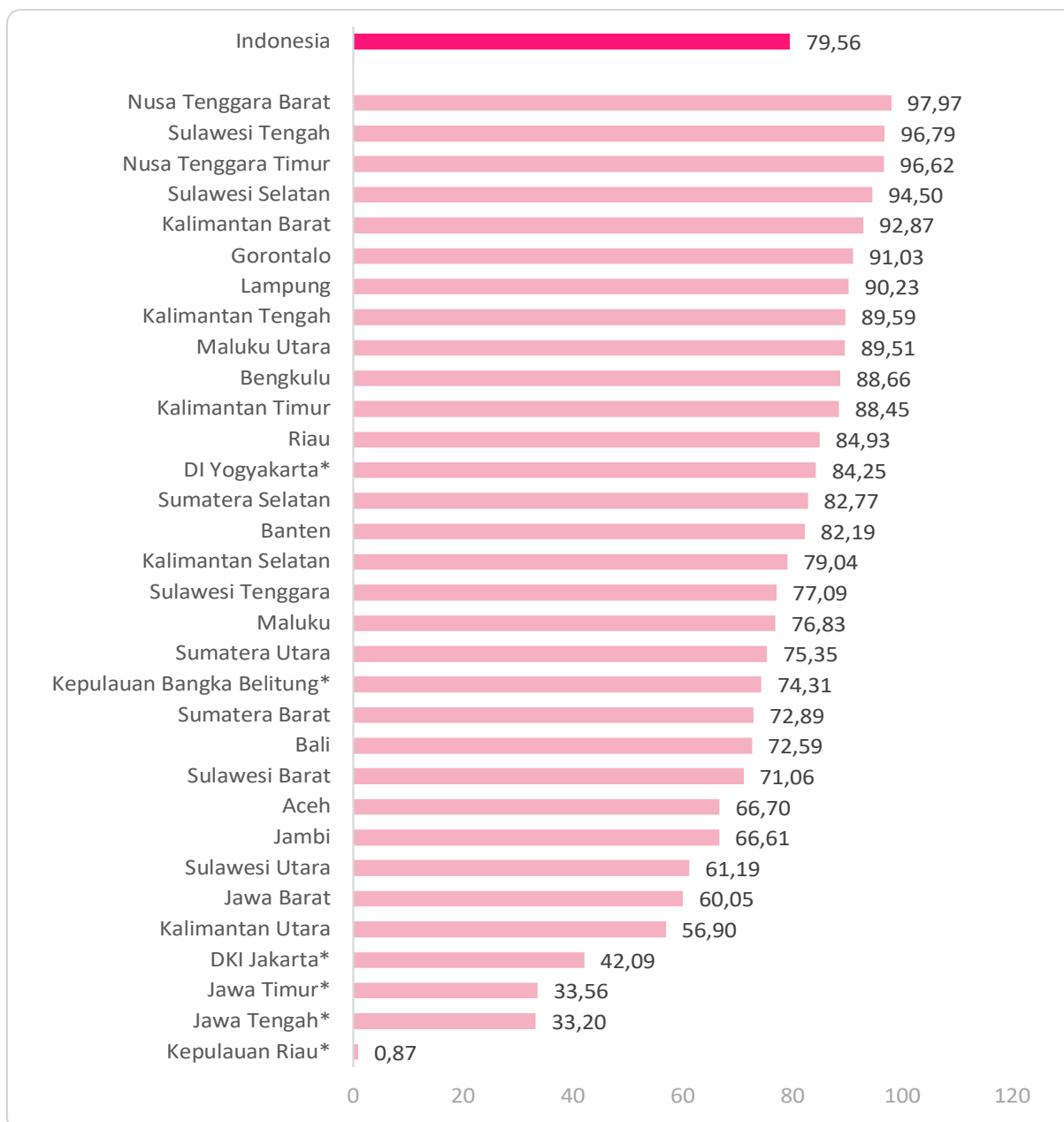


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan grafik kecenderungan GHPR, VAR dan LYSSA yang disajikan di atas, kasus GHPR tertinggi dilaporkan pada tahun 2025 sebesar 241.220 kasus. Kasus GHPR pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus VAR yang dilaporkan pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu dari 139.231 menjadi 190.969 kasus. Kasus kematian (LYSSA) juga mengalami peningkatan dari 122 menjadi 156 kasus.

Pada tahun 2025 kasus GHPR paling banyak dilaporkan oleh Provinsi Bali sebesar 69.412 kasus, Nusa Tenggara Timur sebesar 39.167 kasus, dan Sumatera Utara sebesar 15.174 kasus. Kasus GHPR harus segera mendapatkan tatalaksana, di antaranya dengan pemberian VAR. Berikut ini disajikan persentase pemberian VAR terhadap kasus GHPR.

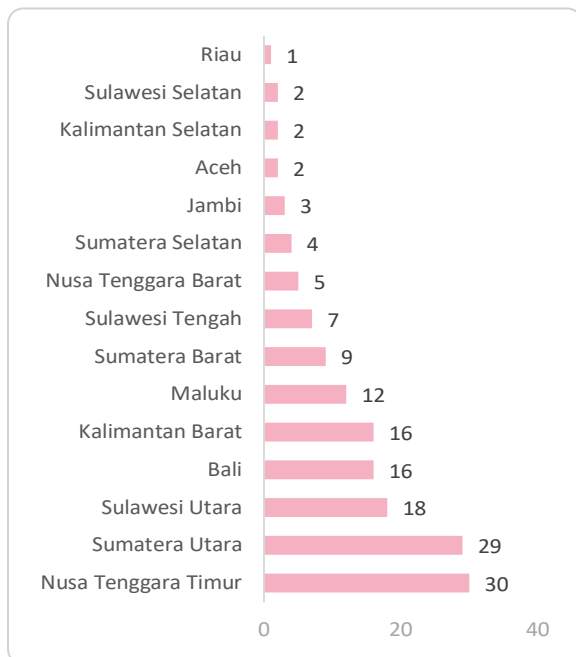
GAMBAR 6.49
PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR DI INDONESIA TAHUN 2025



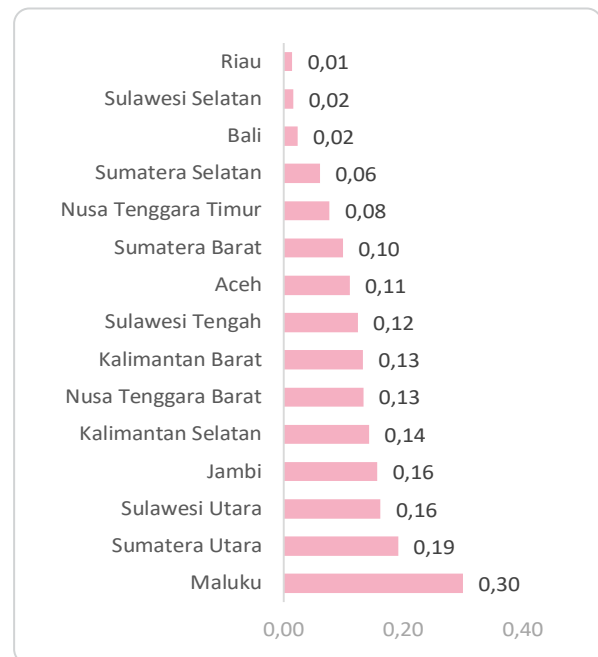
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Capaian pemberian VAR tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 97,97% dan capaian pemberian VAR terendah di Kepulauan Riau sebesar 0,87%. Provinsi Bali, NTT dan Sumatera Utara yang melaporkan kasus GHPR tertinggi masing-masing memiliki persentase 72,59%, 96,62% dan 75,35%. Dengan tingginya kasus GHPR, seharusnya diperlukan capaian pemberian VAR yang tinggi. Penatalaksanaan kasus yang efektif dan pemberian VAR dapat mencegah kematian karena Rabies.

GAMBAR 6.50
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA)
DI INDONESIA TAHUN 2025



GAMBAR 6.51
PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES TERHADAP
KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara melaporkan kasus kematian akibat rabies lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Jika dilihat berdasarkan proporsi kematian akibat rabies terhadap kasus GHPR, proporsi tertinggi pada Provinsi Maluku, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara dengan masing-masing persentase sebesar 0,3%, 0,19% dan 0,16%. Apabila dibandingkan dengan persentase VAR terhadap kasus GHPR, ketiga provinsi ini hanya memiliki persentase antara 60-77%. Kematian akibat rabies diakibatkan keterlambatan penatalaksanaan kasus dan pemberian VAR.

7. Leptospirosis

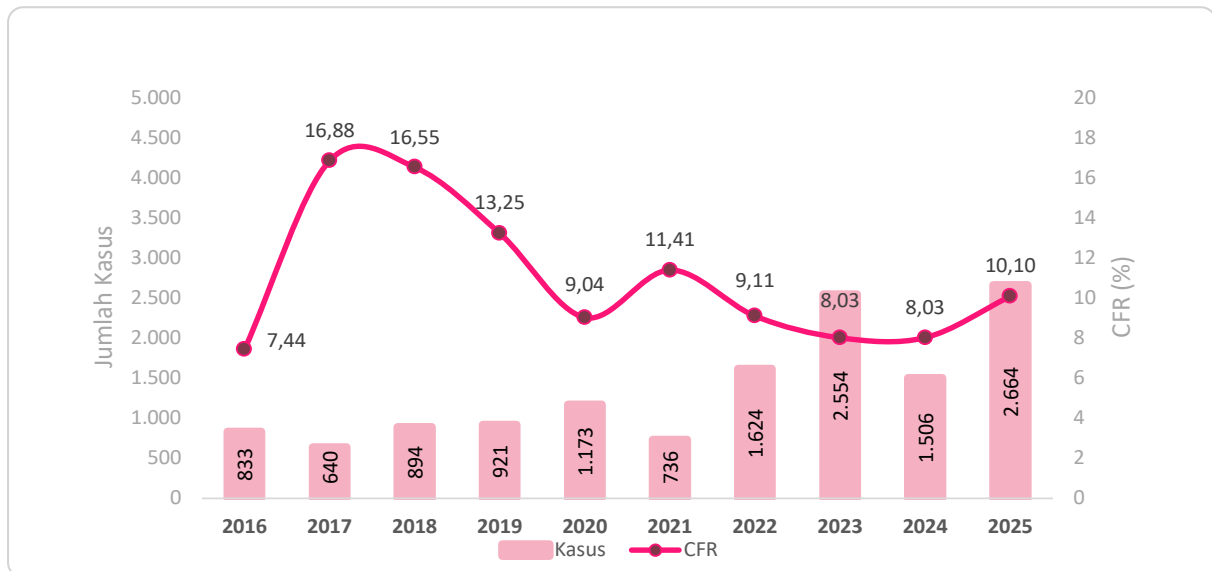
Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri *Leptospira* sp. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan urine hewan yang telah terinfeksi bakteri *Leptospira* yang masuk melalui luka pada kulit, mukosa dan selaput lendir. Hewan penular utama adalah tikus, penular lainnya seperti sapi, kambing, anjing, kucing, babi, dan marmut. Faktor risiko yang mendukung terjadi kasus Leptospirosis ini seperti daerah banjir, persawahan, pemukiman kumuh.

Gejala dan tanda Leptospirosis adalah demam akut atau riwayat demam dalam 7 hari terakhir, dengan atau tanpa sakit kepala dapat disertai satu atau lebih tanda/gejala : nyeri otot, Malaise, dengan atau tanpa *conjunctival suffusion* (radang pada konjungtiva), disertai riwayat kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi urine tikus yang mengandung bakteri leptospira (daerah banjir, persawahan, selokan dan lain-lain).

Keterlambatan diagnosa menyebabkan keterlambatan dalam pengobatan sehingga menjadi kasus leptospirosis berat dan diakhiri dengan kematian. Pemeriksaan laboratorium untuk membantu peneguhan diagnosis antara lain RDT, PCR dan MAT.

Pada tahun 2025 ditemukan adanya 2.664 kasus Leptospirosis di Indonesia yang dilaporkan oleh 18 provinsi. Terdapat empat provinsi baru dengan kasus Leptospirosis yang dilaporkan pada tahun 2025 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat 268 kasus meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 10,1%. Tren CFR kembali meningkat setelah 2 tahun sebelumnya stagnan.

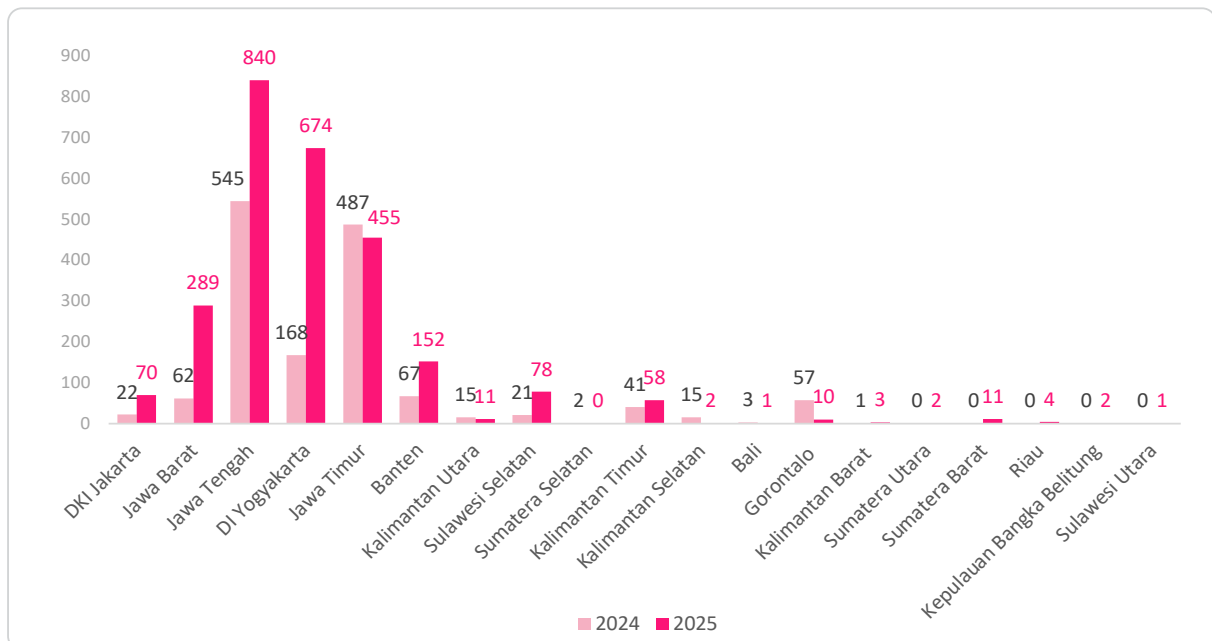
GAMBAR 6.52
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Kasus Leptospirosis tahun 2025 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu dari 1.506 kasus menjadi 2.643 kasus.

GAMBAR 6.53
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2022 – 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat melaporkan peningkatan kasus. Penurunan kasus terjadi di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali, dan Gorontalo. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dilaporkan 2 kasus, tetapi pada tahun 2025 tidak ada pelaporan kasus.

Kasus dan kematian akibat Leptospirosis memerlukan upaya pengendalian yang selama ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan NSPK Pengendalian Leptospirosis,
2. Penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik melalui pelatihan, sosialisasi, orientasi dan *workshop*,
4. Penguatan surveilans zoonosis berbasis laboratorium seperti Surveilans Sentinel Leptospirosis di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
5. Penguatan surveilans leptospirosis terpadu lintas sektor Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
6. Penguatan tata laksana sesuai standar dan prosedur,
7. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB,
8. Pengendalian faktor risiko secara terpadu yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor meliputi sektor kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar,
9. Penyediaan logistik (*Rapid Diagnostik Test*).

D. SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING

1. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons

Sebagai upaya pencegahan dan deteksi awal penyakit terutama yang berpotensi menjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB), Kementerian Kesehatan membentuk Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR)/*Early Warning Alert Response and System* (EWARS). SKDR merupakan sistem yang berfungsi untuk mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan yang berbasis pelaporan elektronik. SKDR dapat menampilkan *alert* atau sinyal peringatan dini jika ada peningkatan kasus penyakit yang melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah. Sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem adalah notifikasi pra KLB yang akan mendorong petugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB.

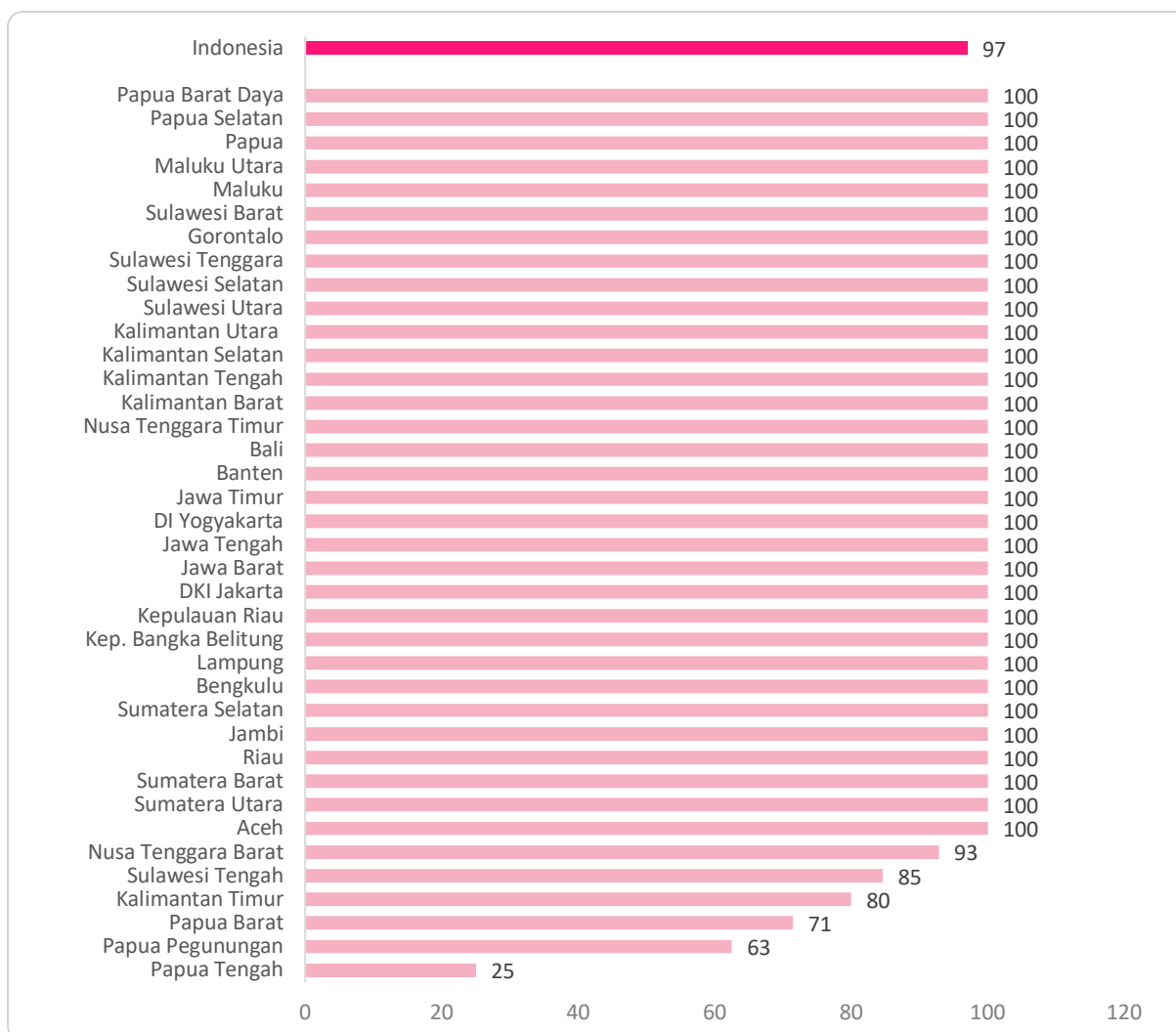
Tujuan penyelenggaraan SKDR adalah:

1. Menyelenggarakan deteksi dini penyakit menular berpotensi KLB
2. Memberikan input kepada program dan sektor terkait untuk melakukan respon pengendalian penyakit menular berpotensi KLB
3. Meminimalkan kesakitan dan atau kematian akibat penyakit menular berpotensi KLB.
4. Memonitor kecenderungan atau tren penyakit menular berpotensi KLB.
5. Menilai dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit menular berpotensi KLB

Pelaksanaan SKDR dilakukan secara rutin dan berjenjang mulai dari fasilitas Kesehatan hingga ke pusat. Sasaran populasi dalam penyelenggaraan SKDR adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, Rumah Sakit, dan Laboratorium. Populasi juga dapat berdasarkan wilayah administrasi mulai dari wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Populasi digunakan untuk membandingkan besaran masalah (jumlah kasus per jumlah populasi dikali konstanta) dari penyakit potensial KLB dalam SKDR antar wilayah.

Secara nasional, 97% kabupaten/kota sudah melakukan respon alert terhadap sinyal kewaspadaan pada tahun 2025. Sebanyak 32 provinsi sudah mencapai 100% kabupaten/kota yang melakukan respon alert terhadap sinyal kewaspadaan. Provinsi dengan persentase terendah kabupaten/kota yang melakukan respon alert terhadap sinyal kewaspadaan adalah Papua Tengah (25%).

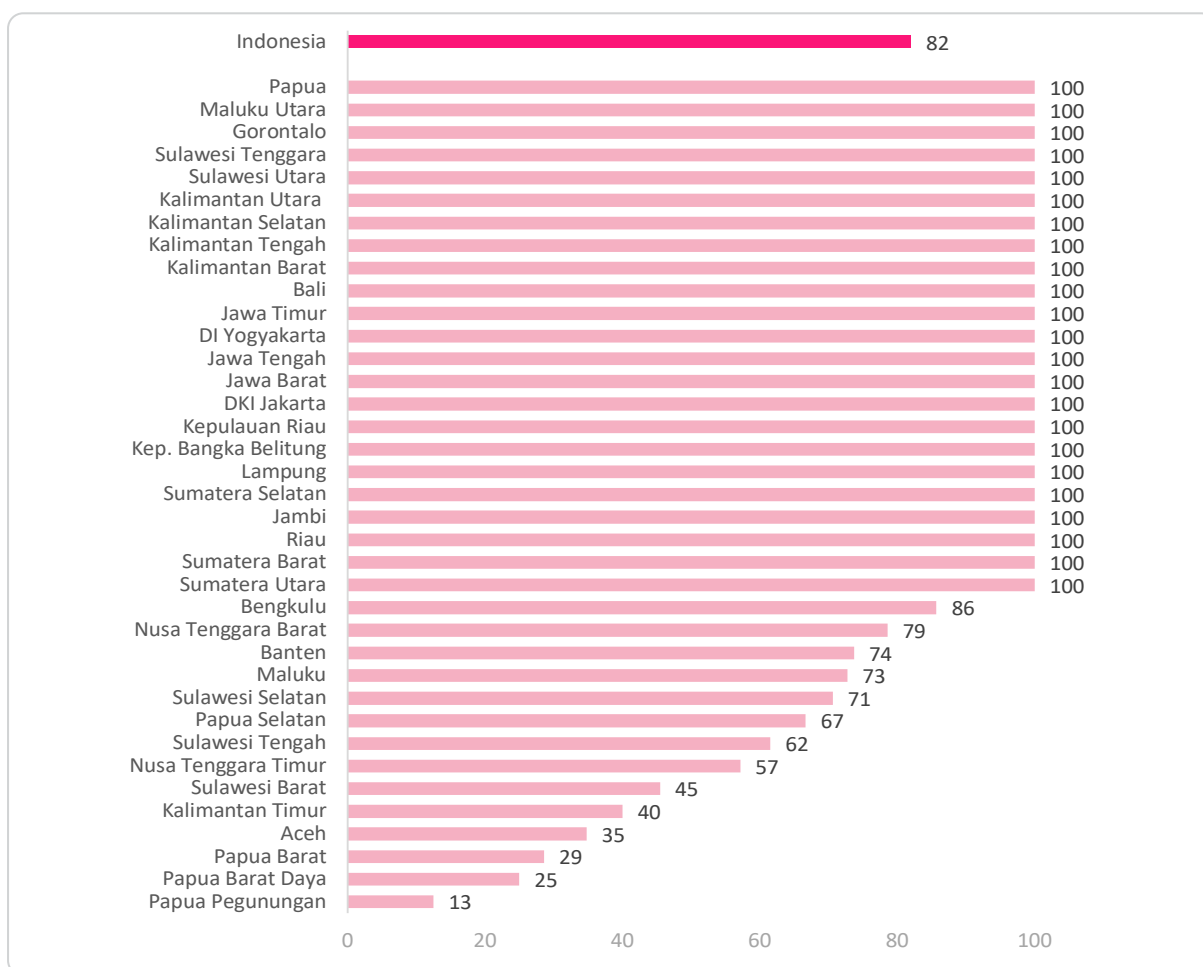
GAMBAR 6.54
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON ALERT
TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Dalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, target indikator tahun 2025 adalah jumlah kabupaten/kota melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu <24 jam minimal 80%. Secara nasional, 82% kabupaten/kota sudah melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR <24 jam minimal 80% dari sinyal kewaspadaan yang muncul di SKDR. Sebanyak 23 provinsi sudah mencapai 100%. Provinsi dengan persentase terendah kabupaten/kota melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu <24 jam minimal 80% adalah Papua Pegunungan (13%). Belum ada kabupaten/kota di Papua Tengah yang sudah melakukan respon verifikasi sinyal yang muncul di SKDR < 24 jam (0%).

GAMBAR 6.55
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON <24 JAM MINIMAL 50%
TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN DI SKDR TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Penyakit infeksi potensi KLB di Indonesia saat ini setidaknya sebanyak 23 jenis penyakit yang sudah dilaporkan dengan total 24.585.559 laporan kasus sepanjang 2025. Penyakit dengan jumlah laporan kasus terbanyak adalah ISPA dengan total 15.456.706 laporan kasus di tahun 2025. Laporan kasus ISPA meningkat dimulai sejak bulan Juli hingga akhir tahun. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat sehingga mempercepat penularan. Penyakit dengan laporan kasus paling sedikit adalah antraks dengan total kasus suspek dilaporkan sebanyak 28 kasus suspek pada bulan Maret, April, Juni, Agustus hingga Oktober. Rincian lengkap mengenai situasi penyakit infeksi potensi KLB di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 6.37.

2. Situasi Penyakit Infeksi Emerging

Penyakit infeksi emerging (PIE) merupakan kelompok penyakit infeksi yang baru muncul atau mengalami perubahan pola epidemiologi. PIE terdiri atas dua kelompok utama, yaitu *new emerging infectious diseases*, yakni penyakit infeksi yang muncul untuk pertama kali pada suatu populasi atau mengalami peningkatan insiden maupun perluasan wilayah penyebaran, serta *reemerging infectious diseases*, yaitu penyakit infeksi yang sebelumnya telah berhasil dikendalikan atau mengalami penurunan kejadian, tetapi kemudian muncul kembali dengan peningkatan jumlah kasus atau penyebaran. Sebagian besar PIE bersifat zoonotik, yaitu ditularkan dari hewan ke manusia, dan diperkirakan sekitar 60% penyakit infeksi pada manusia serta lebih dari 75% penyakit infeksi emerging yang muncul dalam beberapa dekade terakhir berasal dari hewan.

Penyakit infeksi emerging merupakan ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), wabah, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*), hingga pandemi. Dampaknya tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan pembangunan. Pengalaman pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penyakit infeksi emerging dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat luas, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan penguatan sistem kesehatan untuk mencegah serta merespons ancaman tersebut secara efektif.

Sebagai negara kepulauan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia merupakan salah satu hotspot kemunculan penyakit infeksi emerging. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain alih fungsi lahan, tingginya mobilitas penduduk dan konektivitas internasional, serta keberadaan berbagai reservoir dan vektor penyakit yang berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia. Meskipun berbagai faktor risiko telah teridentifikasi, potensi kemunculan dan penyebaran penyakit infeksi emerging pada manusia di Indonesia masih belum dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, kesiapsiagaan terhadap penyakit infeksi emerging perlu diperkuat melalui pemantauan situasi dan pemetaan risiko guna mendukung deteksi dini serta penyusunan langkah pencegahan dan respons yang efektif.

Pada tahun 2025, Indonesia melaporkan beberapa kejadian penyakit infeksi emerging yang memerlukan perhatian, di antaranya penyakit virus Hanta dan Legionellosis. Penyakit virus Hanta merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan pengerat ke manusia dan dapat menyebabkan sindrom demam berdarah dengan gangguan ginjal (*Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome/HFRS*) maupun sindrom gangguan pernapasan (*Hantavirus Pulmonary Syndrome/HPS*). Penyakit ini relatif sulit dikenali karena manifestasi klinisnya tidak spesifik dan sering menyerupai penyakit tropis lain yang umum ditemukan di Indonesia, seperti demam berdarah dengue (DBD), leptospirosis, tifus, dan rickettsiosis. Selain itu, ko-infeksi Hantavirus dengan penyakit tropis lainnya juga telah dilaporkan, sehingga diperlukan kewaspadaan klinis serta konfirmasi laboratorium untuk menegakkan diagnosis secara tepat.

Sepanjang tahun 2025 tercatat 17 kasus penyakit virus Hanta di Indonesia yang tersebar di enam provinsi yaitu Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Banten, dengan total total 11 kabupaten/kota terdampak. Dari seluruh kasus tersebut, dua kasus dilaporkan meninggal dunia. Meskipun jumlah kasus relatif terbatas, temuan ini menunjukkan bahwa penyakit virus Hanta telah terdeteksi di beberapa wilayah Indonesia dan memerlukan kewaspadaan melalui penguatan deteksi dini, surveilans, serta kapasitas diagnosis. Sebagai upaya penanggulangan penyakit virus Hanta, Kementerian Kesehatan telah melakukan pemantauan

situasi melalui SKDR serta informasi global, pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit, komunikasi risiko, penyusunan pedoman, penguatan surveilans sentinel penyakit infeksi emerging dan surveilans binatang pembawa penyakit, serta pengendalian binatang pembawa penyakit.

Selain penyakit virus Hanta, pada tahun 2025 juga dilaporkan kasus Legionellosis di Indonesia. Legionellosis merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri *Legionella*. Hingga saat ini, telah diidentifikasi sedikitnya 60 spesies *Legionella*, dengan 20 spesies di antaranya terbukti bersifat patogen pada manusia. Transmisi bakteri ini umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol yang berasal dari sumber air yang telah terkontaminasi. *Legionella* dapat berkembang biak pada lingkungan air hangat beriklim 20–50°C, dengan suhu pertumbuhan optimal pada 35°C, serta mampu bertahan hidup di dalam lapisan biofilm pada sistem perpipaan. Bakteri ini dapat ditemukan baik pada sumber air alami maupun buatan. Adapun media penularan yang berpotensi menghasilkan aerosol kontaminan meliputi sistem pengondisi udara (AC), menara pendingin, kondenser, pelembab udara (*humidifier*), pancuran air (*shower*), keran, serta uap dari fasilitas pemandian air panas (*spa/whirlpool*) yang tidak disanitasi dengan benar. Meskipun bukan merupakan penyakit yang menular antarmanusia, Legionellosis berpotensi menyebabkan pneumonia berat, terutama pada kelompok rentan.

Pada tahun 2025 dilaporkan 49 kasus Legionellosis dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali melalui pelaksanaan surveilans sentinel. Kasus tersebut tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Jakarta Timur, Kota Batam, dan Kota Denpasar, dengan dua kasus meninggal dunia.

Selain memperkuat surveilans penyakit infeksi emerging, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pemetaan risiko sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman penyakit infeksi emerging. Pada tahun 2025, pemetaan risiko penyakit infeksi emerging telah dilaksanakan di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk penyakit 4 penyakit yaitu Polio, COVID-19, MERS, serta salah satu penyakit prioritas daerah, yaitu Avian Influenza atau Meningitis Meningokokus. Hasil pemetaan risiko memberikan gambaran tingkat risiko penyakit infeksi emerging di setiap wilayah sehingga menjadi dasar dalam menetapkan prioritas intervensi, memperkuat kesiapsiagaan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Informasi hasil pemetaan risiko dapat diakses melalui website petarisikopie.id.

E. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kelompok penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Dalam beberapa dekade terakhir, PTM telah menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat di dunia dan menjadi bagian dari beban ganda epidemiologi (*double burden of disease*), termasuk di Indonesia.

Berdasarkan Data Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2021 penyakit tidak menular menyebabkan sedikitnya 43 juta kematian di seluruh dunia, atau setara dengan 75% dari seluruh kematian yang tidak terkait pandemi. Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta kematian terjadi secara prematur, yaitu pada penduduk berusia kurang dari 70 tahun, dan 82% di antaranya terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Secara keseluruhan, sekitar 73% kematian akibat PTM terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah, menunjukkan bahwa beban PTM semakin besar di negara-negara berkembang. Empat kelompok penyakit menjadi penyumbang

utama kematian akibat PTM, yaitu penyakit kardiovaskular dengan sekitar 19 juta kematian, diikuti oleh kanker sekitar 10 juta kematian, penyakit pernapasan kronis sekitar 4 juta kematian, dan diabetes melitus yang menyebabkan lebih dari 2 juta kematian, termasuk kematian akibat penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Keempat kelompok penyakit tersebut berkontribusi terhadap sekitar 80% dari seluruh kematian prematur akibat PTM.

Peningkatan kejadian PTM sangat dipengaruhi oleh faktor risiko yang dapat dimodifikasi, antara lain penggunaan produk tembakau, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang berbahaya, pola makan tidak sehat, dan paparan polusi udara. Faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko terjadinya berbagai gangguan metabolik, seperti hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia, kelebihan berat badan, dan obesitas, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya PTM.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang mengacu pada klasifikasi internasional penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) mengelompokkan penyakit ini berdasarkan sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit yaitu:

1. Penyakit keganasan;
2. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
3. Penyakit sistem saraf;
4. Penyakit sistem pernapasan;
5. Penyakit sistem sirkulasi;
6. Penyakit mata dan adnexa;
7. Penyakit telinga dan mastoid;
8. Penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
9. Penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
10. Penyakit sistem genitourinaria;
11. Penyakit gangguan mental dan perilaku;
12. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

Penanggulangan PTM diprioritaskan pada penyakit yang memberikan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, baik dari aspek angka kesakitan, kematian, kecacatan, maupun beban pembiayaan kesehatan, serta memiliki faktor risiko yang dapat dicegah dan dikendalikan.

Upaya penanggulangan PTM dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Kegiatan tersebut meliputi promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko dan penyakit, tata laksana sesuai standar, pemantauan berkelanjutan, serta pelayanan paliatif bagi penyandang PTM. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PTM sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di $\geq 80\%$ Puskesmas

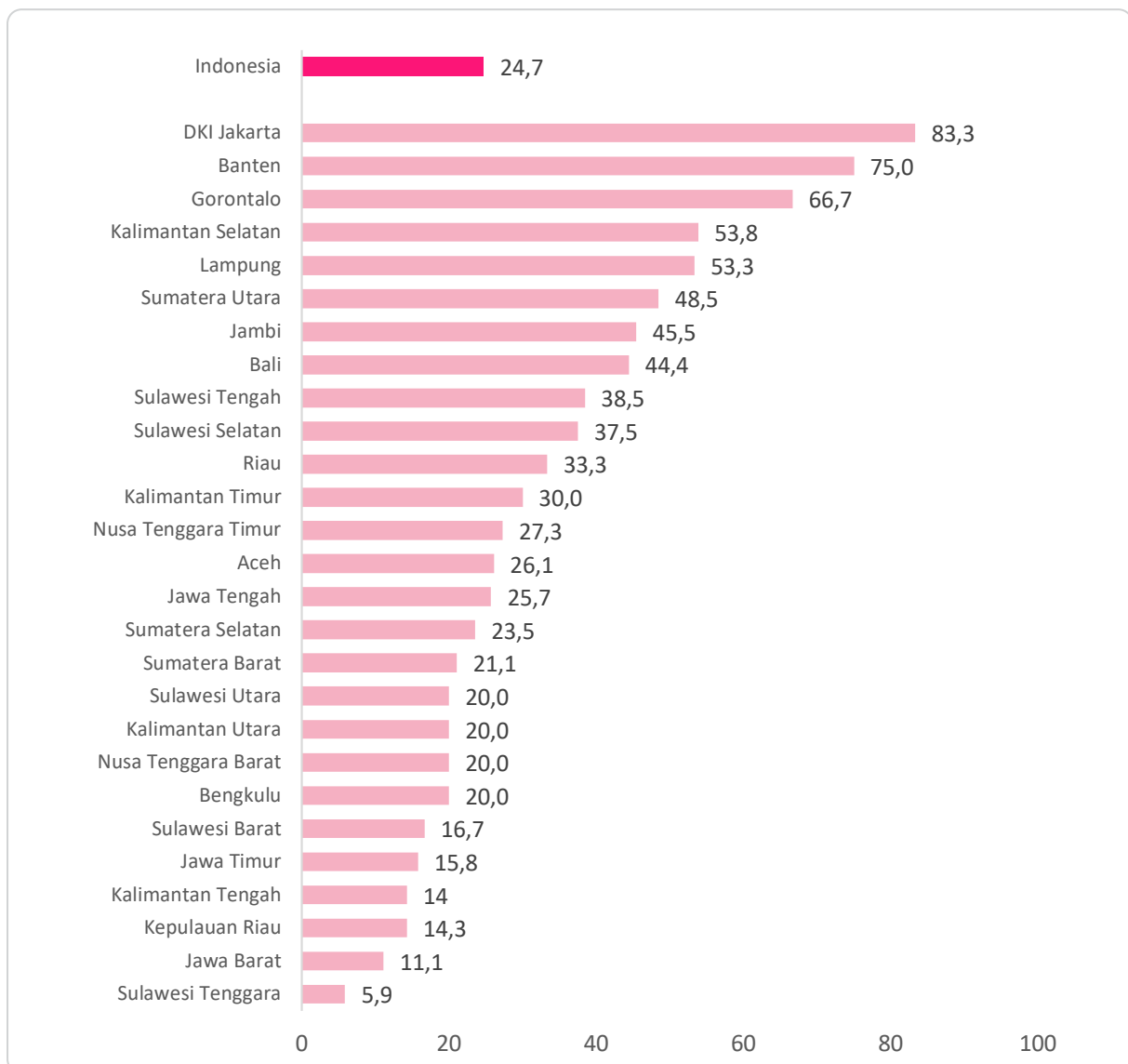
Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat nasional, sejalan dengan pendekatan global dan regional. Salah satu program yang telah dan masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target indikator Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029, yaitu tercapainya kabupaten/kota yang Puskesmasnya melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU PTM) pada minimal 80% kunjungan puskesmas, pada minimal 20% kabupaten/kota.

PANDU PTM di FKTP merupakan upaya pencegahan, pengendalian dan tatalaksana hipertensi dan diabetes melitus serta PTM lainnya yang dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan faktor risiko, menggunakan algoritma PANDU PTM dan tabel prediksi risiko PTM. Algoritma PANDU PTM merupakan alur pikir dalam melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTP. Dalam algoritma dijelaskan tentang tahapan pelayanan bagi pengunjung Puskesmas yang berusia 15 tahun keatas. Tahapan diawali dari identifikasi faktor risiko hingga diagnosis dan tata laksana yang dalam salah satu prosesnya menggunakan tabel prediksi risiko PTM. Sedangkan dalam kaitan dengan tatalaksana penyakit yang bersifat spesifik, PANDU PTM tetap mengacu pada pedoman tata laksana penyakit yang berlaku.

Untuk memperkuat pelaksanaan PANDU PTM di daerah, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan PANDU PTM di minimal $\geq 80\%$ kunjungan Puskesmas, pada minimal 20% kabupaten/kota. Puskesmas PANDU PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% atau lebih Puskesmas telah melakukan PANDU PTM.

Pada tahun 2025, target indikator berhasil dicapai, yaitu sebanyak 103 kabupaten/kota atau 20% dari total 514 kabupaten/kota telah memiliki $\geq 80\%$ Puskesmas yang menyelenggarakan PANDU PTM sesuai target Renstra Kementerian Kesehatan. Berdasarkan sebaran wilayah, terdapat 22 dari 38 provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan capaian sesuai target, sedangkan 16 provinsi lainnya masih berada di bawah target. Lima provinsi di wilayah Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat, tercatat memiliki capaian 0%, karena belum terdapat kabupaten/kota yang memiliki $\geq 80\%$ Puskesmas melaksanakan PANDU PTM.

GAMBAR 6.56
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM
DI >80% PUSKESMAS pada MINIMAL 20% KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2025



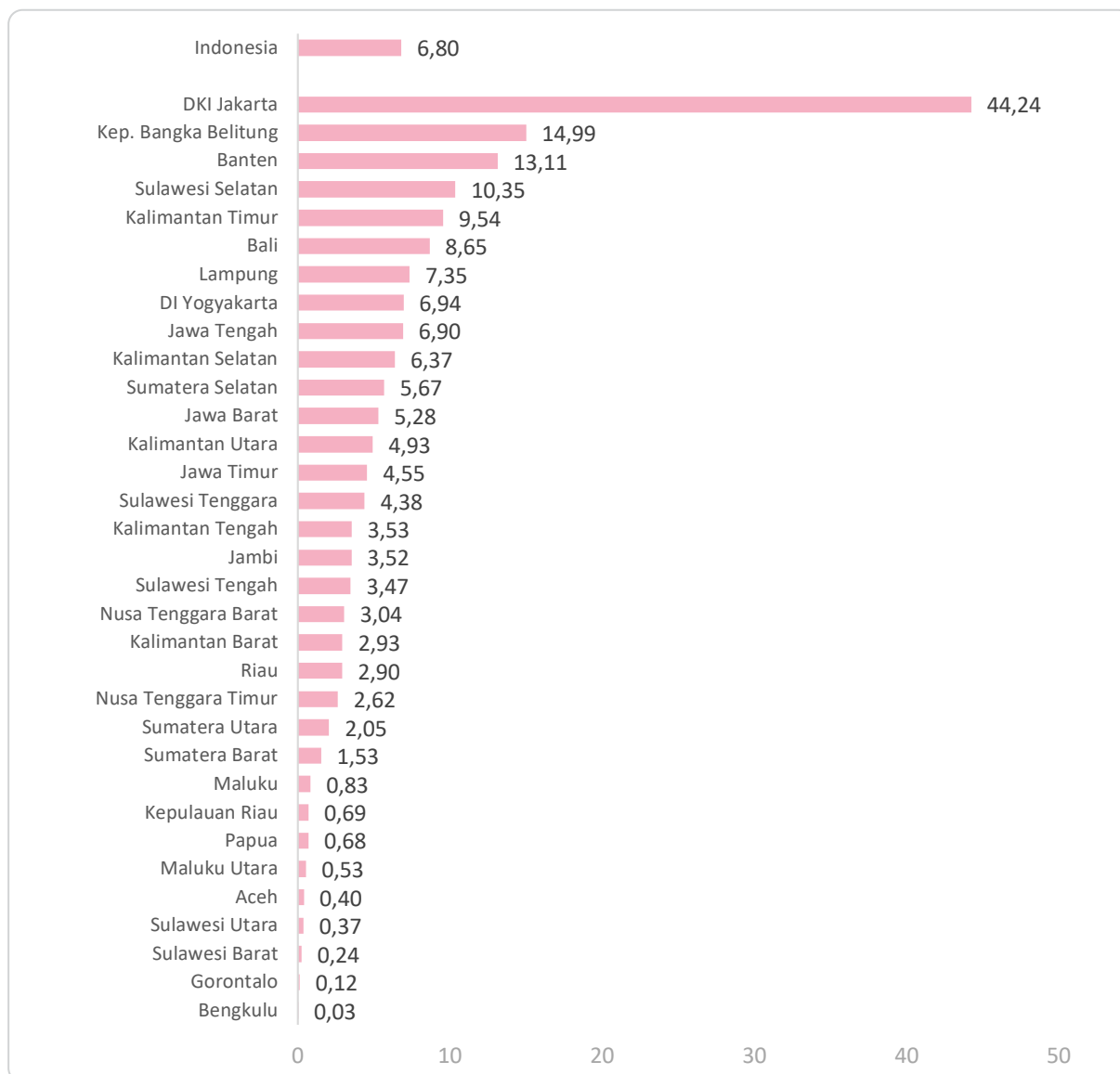
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan dua jenis kanker dengan beban penyakit tertinggi pada perempuan di Indonesia. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat kedua jenis kanker tersebut sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan diagnosis sehingga banyak kasus ditemukan pada stadium lanjut. Padahal, kanker leher rahim dapat dideteksi pada fase lesi prakanker dan ditangani sebelum berkembang menjadi kanker invasif, sedangkan kanker payudara dapat ditemukan lebih dini melalui Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS). Oleh karena itu, deteksi dini menjadi strategi penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian, meningkatkan keberhasilan pengobatan dan angka kesintasan, serta mengurangi beban pembiayaan akibat penyakit kanker.

Program deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), sedangkan deteksi dini kanker payudara dilakukan melalui Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih. Apabila ditemukan hasil yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk menjalani pemeriksaan diagnostik, seperti ultrasonografi (USG) dan/atau mammografi, sesuai dengan indikasi medis sebagai dasar penegakan diagnosis dan penentuan tata laksana.

GAMBAR 6.57
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA)
DI INDONESIA TAHUN 2023-2025

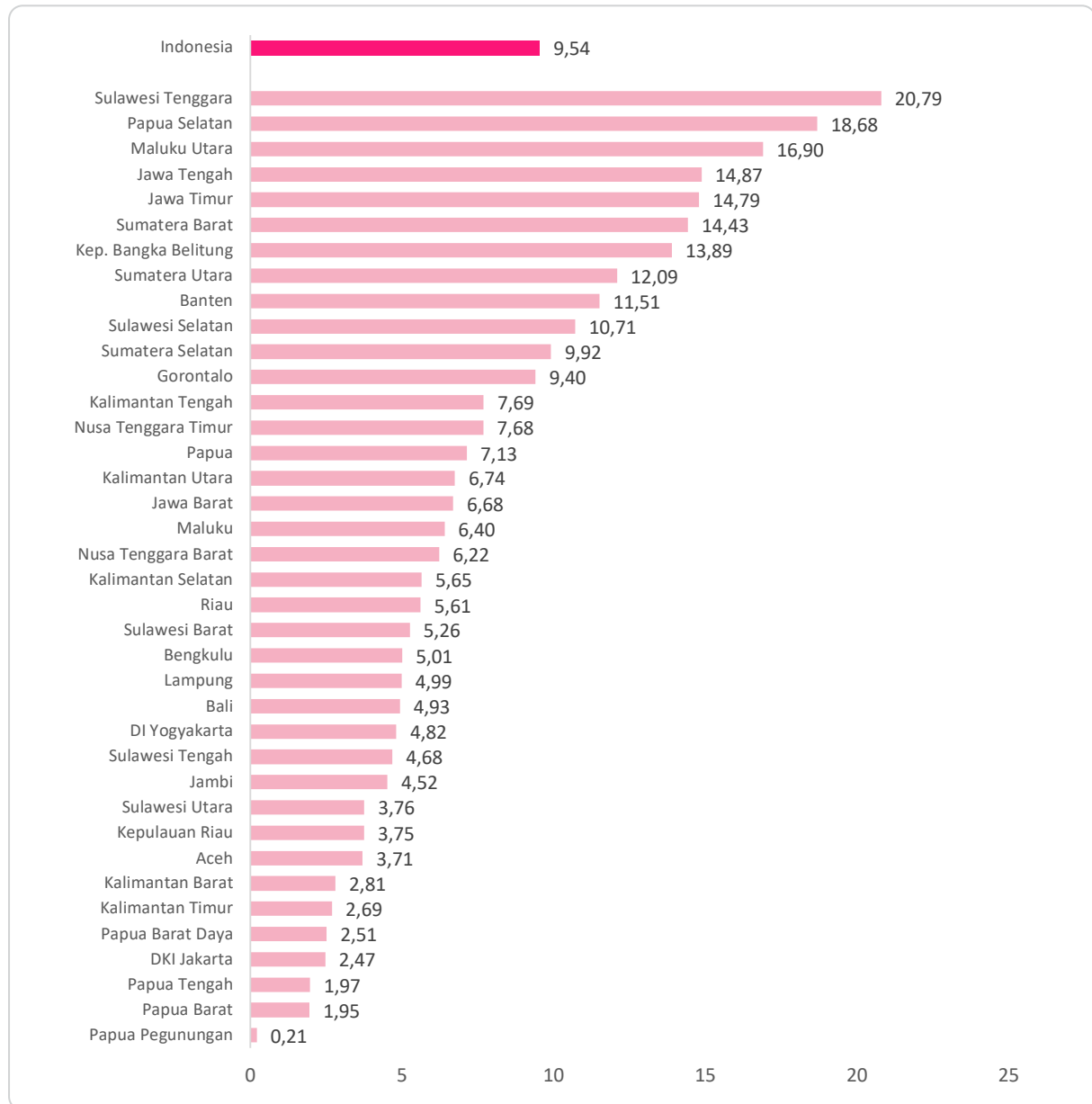


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada periode 2023–2025, sebanyak 631.162 perempuan usia 30–50 tahun atau 6,8% dari total sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Cakupan deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 44,2%, diikuti Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15,0% dan Banten sebesar

13,1%. Sebaliknya, cakupan terendah terdapat di Gorontalo (0,12%) dan Bengkulu (0,03%), yang menunjukkan masih perlunya penguatan akses, kapasitas layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim.

GAMBAR 6.58
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS)
DI INDONESIA TAHUN 2023-2025

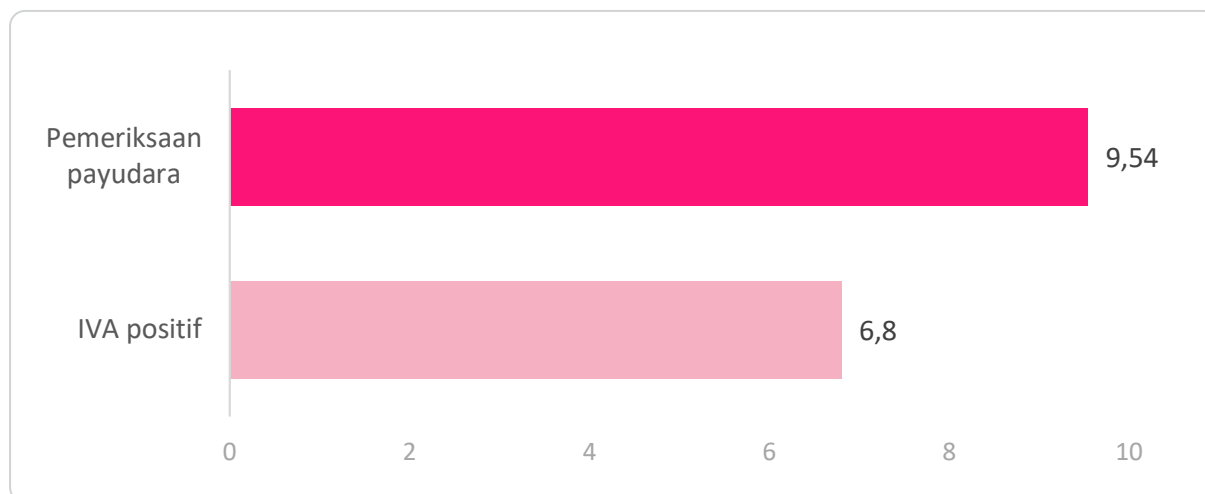


Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada periode 2023–2025, sebanyak 4.089.557 perempuan usia 30–50 tahun atau 9,54% dari total sasaran telah menjalani deteksi dini kanker payudara melalui Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS). Cakupan tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 20,8%, diikuti Papua Selatan sebesar 18,68% dan Maluku Utara sebesar 16,90%. Sebaliknya, cakupan terendah terdapat di Papua Barat (1,95%) dan Papua Pegunungan (0,21%).

Masih rendahnya cakupan deteksi dini di sejumlah provinsi berpotensi menyebabkan lebih banyak kasus kanker payudara maupun kanker leher rahim terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga dapat meningkatkan angka kesakitan, kematian, dan beban pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya deteksi dini melalui peningkatan akses dan kualitas layanan, kapasitas tenaga kesehatan, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemeriksaan skrining kanker.

GAMBAR 6.59
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

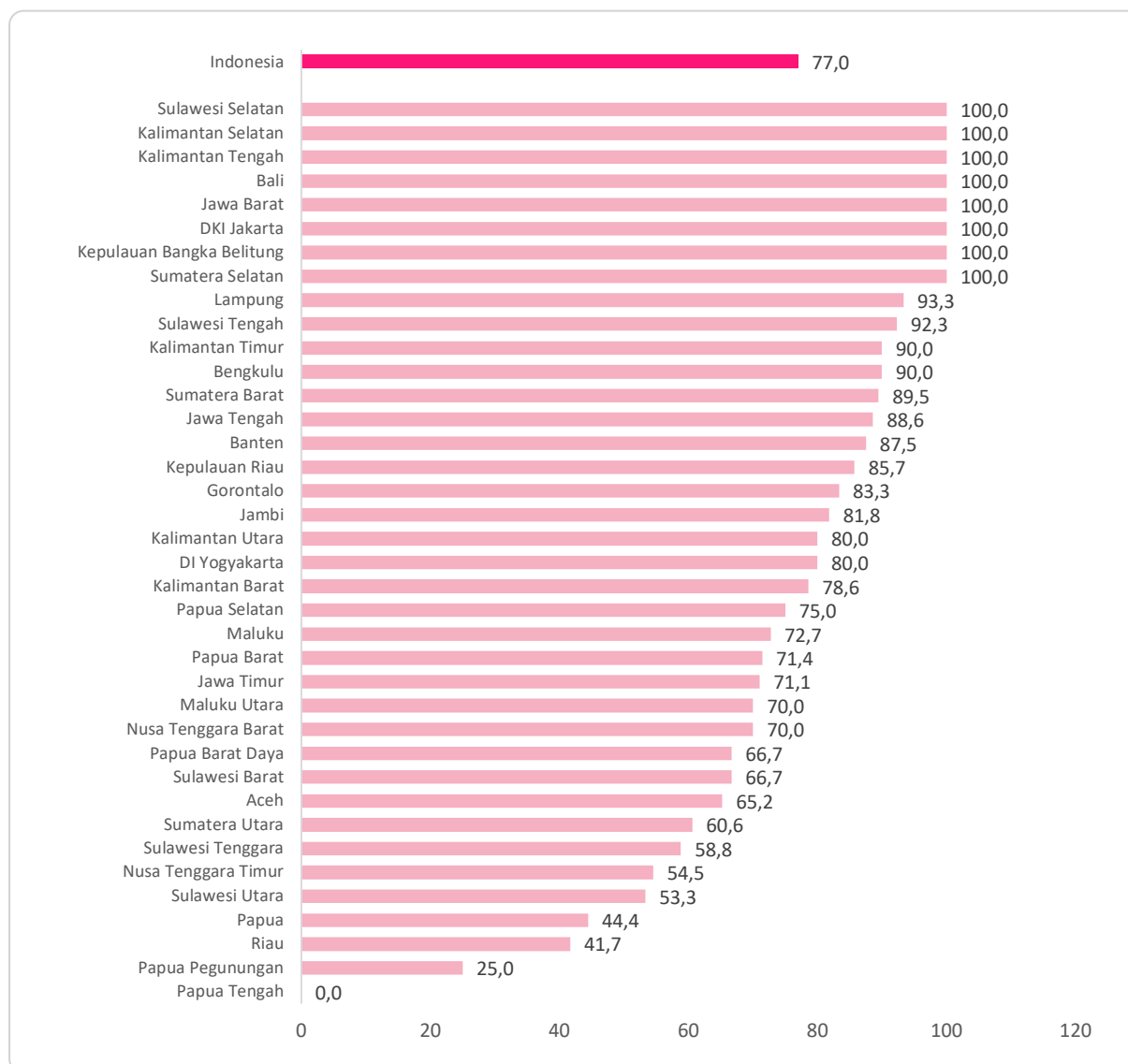
Pada tahun 2025, hasil pemeriksaan IVA positif sebanyak 2.433 (6,8%) dan pemeriksaan payudara sebanyak 4.089.557 (9,54%) dari 42.853.789 perempuan usia 30-50 tahun yang menjadi target pemeriksaan SADANIS.

3. Pengendalian Konsumsi Tembakau

Konsumsi tembakau merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular (PTM) yang berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit paru kronis, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Salah satu strategi pengendalian konsumsi tembakau adalah penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan KTR dilakukan melalui penyusunan regulasi daerah, penguatan implementasi kebijakan, serta pengawasan terhadap kepatuhan di berbagai tatanan, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari paparan asap rokok.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja. Kabupaten/kota dinyatakan telah menerapkan KTR apabila memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan/atau lebih dari 40% tatanan KTR memenuhi indikator penerapan (minimal 3 dari 7 tatanan). Hingga tahun 2025, sebanyak 396 kabupaten/kota atau 77,0% dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah menerapkan KTR. Capaian tersebut menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, sehingga diperlukan penguatan implementasi dan pengawasan penerapan KTR di daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

GAMBAR 6.60
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI INDONESIA TAHUN 2025



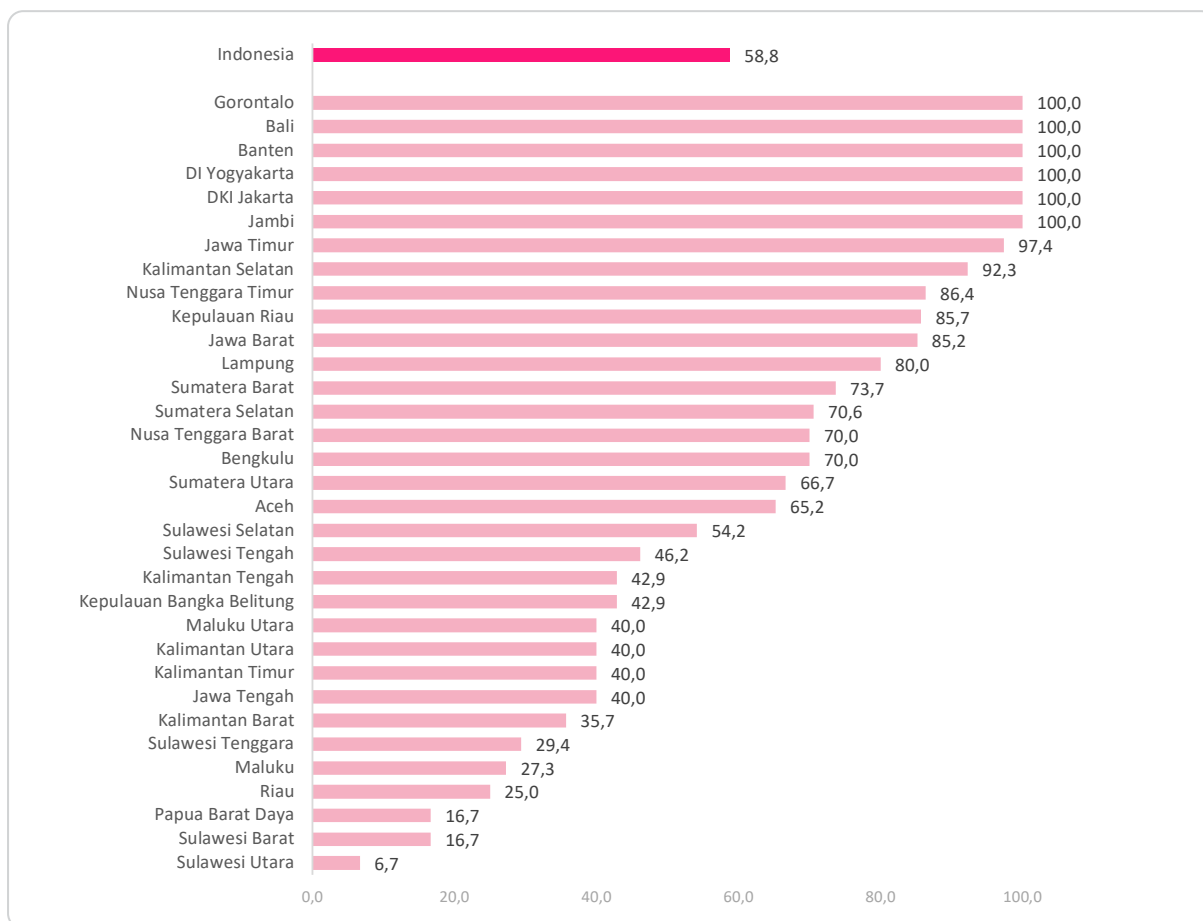
Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, terdapat 8 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Di sisi lain, masih terdapat 4 provinsi dengan persentase kabupaten/kota yang menerapkan KTR kurang dari 50%, yaitu Papua, Riau, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi, implementasi, dan pengawasan penerapan KTR.

Selain penerapan KTR, pemerintah juga mengembangkan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) sebagai bagian dari pengendalian konsumsi tembakau. Layanan UBM merupakan upaya promotif, preventif, dan kuratif yang bertujuan membantu perokok berhenti merokok melalui konseling dan penanganan gejala putus nikotin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama Puskesmas. Puskesmas penyelenggara UBM adalah Puskesmas yang menyediakan layanan konseling berhenti merokok. Pengembangan layanan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan berhenti merokok, mendukung penurunan prevalensi perokok,

khususnya pada kelompok usia 10–18 tahun, serta mendorong semakin banyak kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan UBM pada lebih dari 40% Puskesmas di wilayahnya.

GAMBAR 6.61
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI >40% PUSKESMAS
YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, sebanyak 302 kabupaten/kota telah menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) pada lebih dari 40% Puskesmas di wilayahnya. Capaian ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Terdapat 6 provinsi yang telah mencapai cakupan 100% kabupaten/kota, yaitu Gorontalo, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jambi.

Di sisi lain, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua belum memiliki kabupaten/kota yang memenuhi kriteria indikator, baik karena cakupan penyelenggaraan layanan UBM di Puskesmas belum mencapai lebih dari 40%, maupun karena belum tersedianya laporan pelaksanaan dari daerah. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan implementasi layanan UBM, peningkatan kapasitas Puskesmas, serta perbaikan sistem pelaporan untuk mendukung pencapaian indikator secara nasional.

4. Deteksi Dini Gangguan Indera

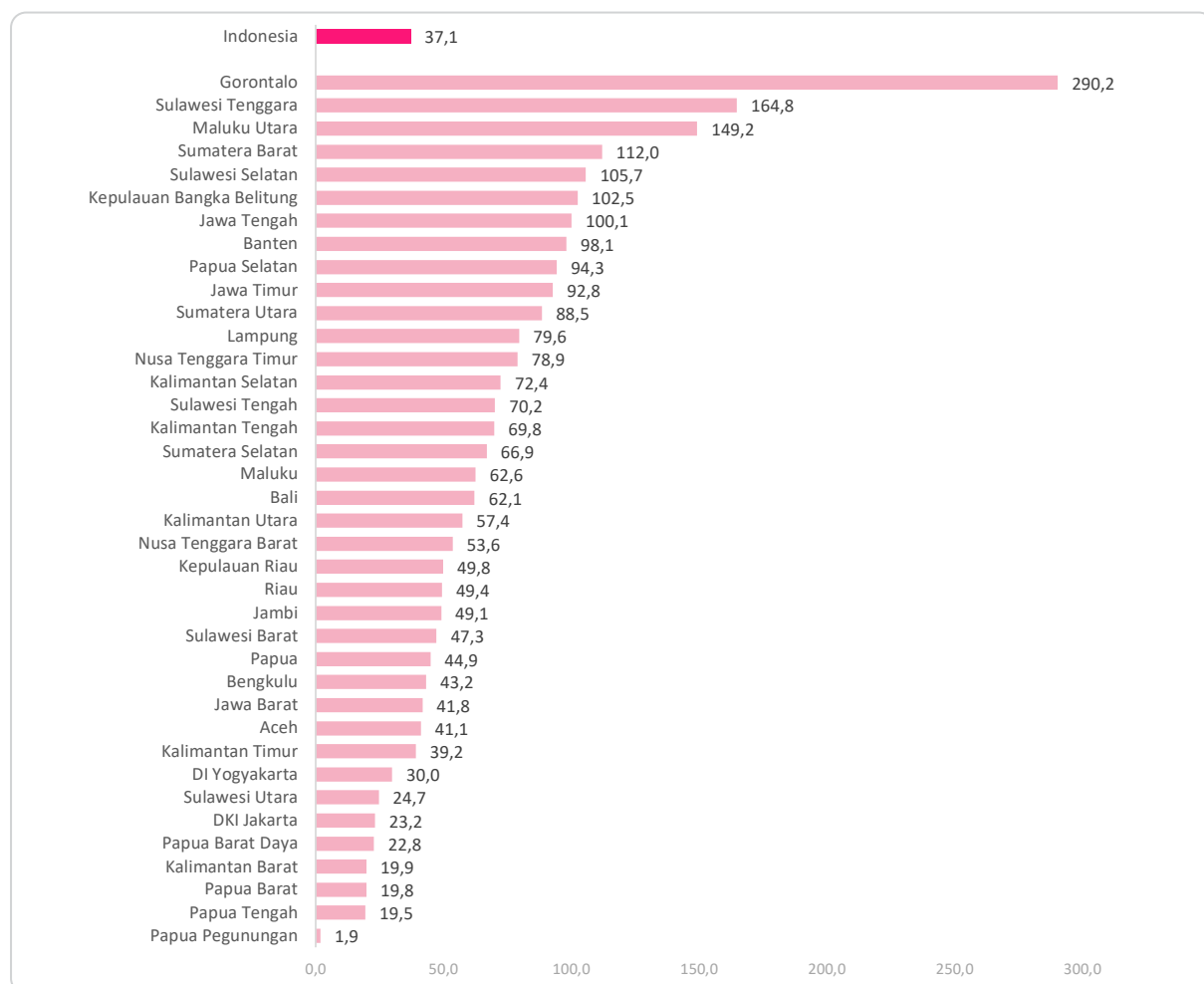
UUpaya penanggulangan gangguan indera dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan serta penemuan

kasus secara dini. Sejalan dengan transformasi sistem kesehatan, khususnya transformasi layanan primer dalam pengendalian penyakit tidak menular (PTM), deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran menjadi salah satu upaya prioritas untuk menemukan kasus lebih awal sehingga dapat segera diberikan intervensi dan tata laksana yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, disabilitas, dan dampak sosial ekonomi akibat gangguan indera.

Pelaksanaan deteksi dini gangguan indera dilakukan dengan pendekatan siklus hidup dan keluarga serta melibatkan kolaborasi lintas program dan lintas sektor. Sasaran deteksi dini meliputi kelompok usia 7–15 tahun dan lebih dari 15 tahun sebagai bagian dari skrining PTM prioritas. Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilakukan secara terintegrasi melalui Aplikasi Sehat Indonesia-Ku (ASIK).

Pada tahun 2025, hampir seluruh kabupaten/kota telah melaksanakan deteksi dini gangguan indera. Capaian deteksi dini gangguan penglihatan pada kelompok sasaran usia 7–15 tahun dan >15 tahun mencapai 31,7%, sedangkan deteksi dini gangguan pendengaran mencapai 41,4%. Capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 70%, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan skrining, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi pencatatan dan pelaporan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini gangguan indera.

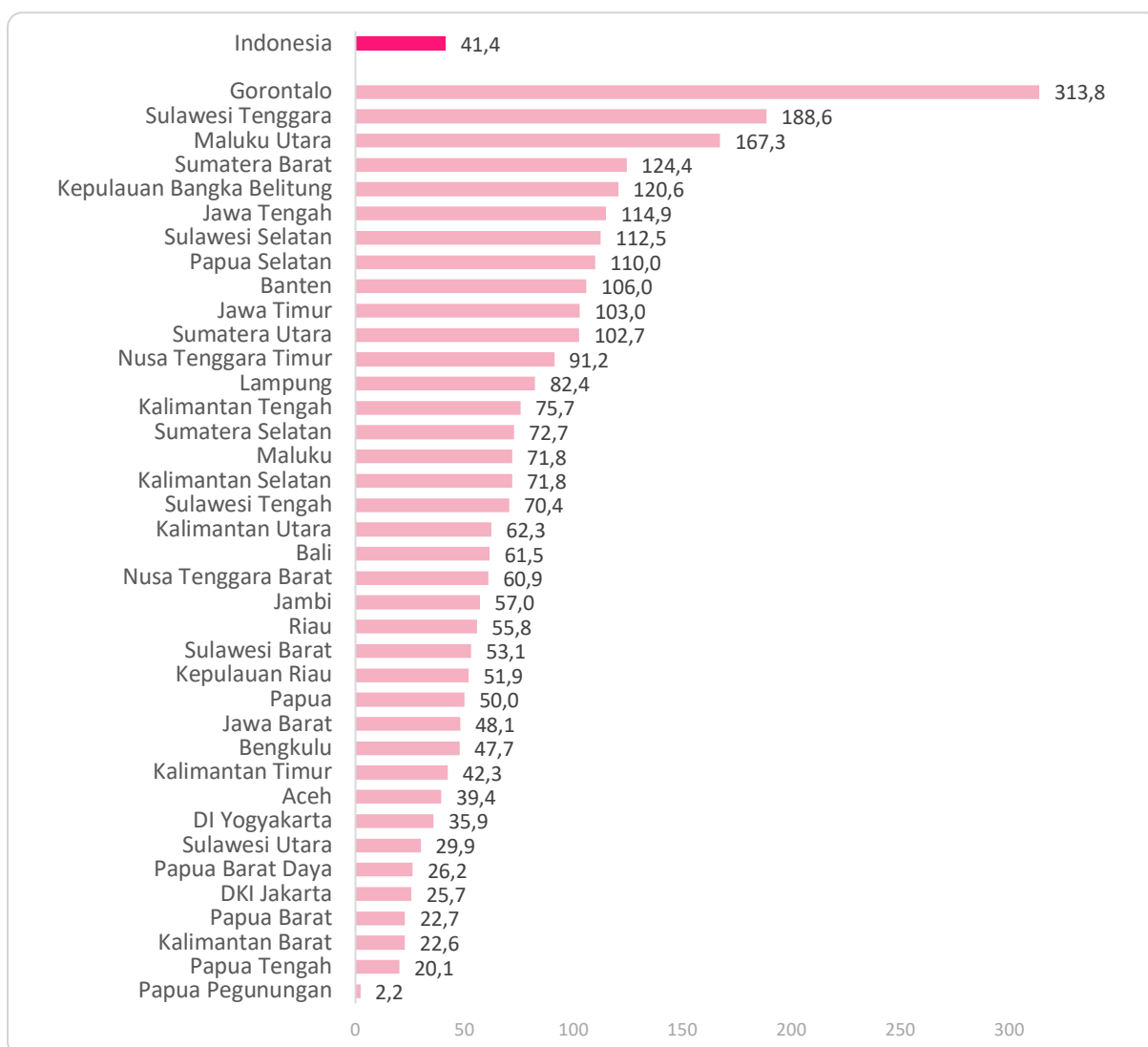
GAMBAR 6.62
PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING GANGGUAN INDERA PENGLIHATAN TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, provinsi dengan cakupan tertinggi deteksi dini gangguan indera penglihatan pada kelompok usia 7-15 tahun dan >15 tahun adalah Gorontalo sebesar 290,2%, diikuti Sulawesi Tenggara sebesar 164,8% dan Maluku Utara sebesar 149,2%. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendapatkan skrining lebih banyak dibandingkan dengan estimasi sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, cakupan terendah terdapat di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelaksanaan deteksi dini gangguan indera penglihatan serta memperluas cakupan layanan pada tahun-tahun berikutnya.

GAMBAR 6.63
PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING GANGGUAN INDERA PENDENGARAN TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, provinsi dengan cakupan tertinggi deteksi dini gangguan indera pada kelompok usia 7–15 tahun dan >15 tahun adalah Gorontalo sebesar 313,8%, diikuti Sulawesi Tenggara sebesar 188,6% dan Maluku Utara sebesar 167,3%. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendapatkan pemeriksaan deteksi dini lebih banyak dibandingkan dengan estimasi sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, cakupan terendah terdapat di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelaksanaan deteksi dini gangguan indera serta memperluas cakupan layanan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Deteksi Dini Obesitas

Obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak berlebih akibat ketidakseimbangan antara asupan energi (*energy intake*) dengan energi yang digunakan (*energy expenditure*) dalam jangka waktu lama (WHO, 2000). Obesitas telah menjadi masalah kesehatan global yang berdampak terhadap lebih dari 2 miliar penduduk dunia dan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Secara global, prevalensi obesitas terus meningkat, dengan beban terbesar terjadi di negara berkembang yang masih menghadapi permasalahan ganda malnutrisi.

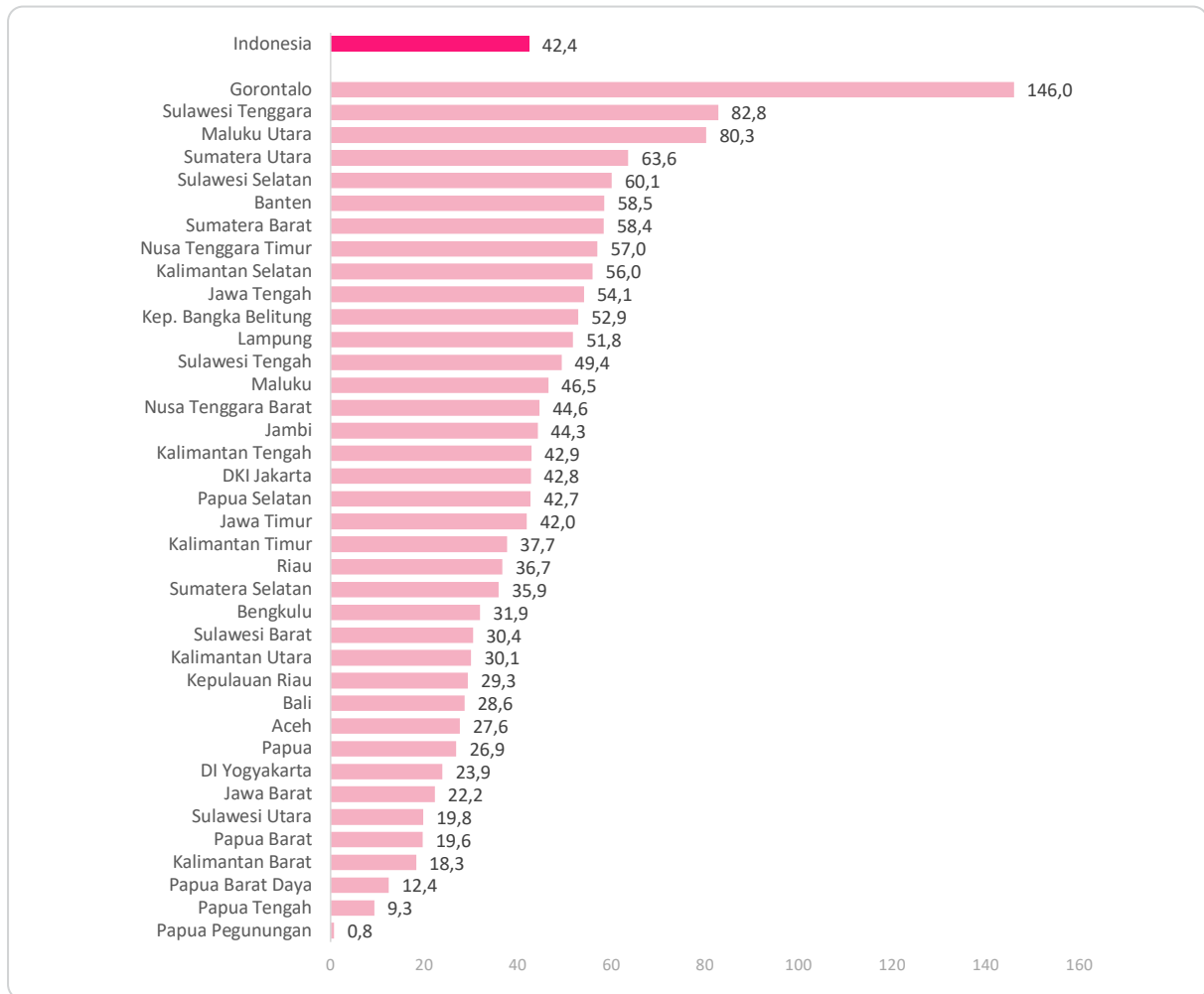
Obesitas merupakan penyakit sekaligus faktor risiko utama berbagai PTM, seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, hipertensi, kanker, dan gangguan metabolik lainnya. Tingginya indeks massa tubuh (IMT) berkontribusi terhadap meningkatnya beban penyakit secara global. Di Indonesia, prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥ 18 tahun mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 21,8% pada tahun 2018, dan kembali meningkat menjadi 23,4% pada tahun 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Peningkatan serupa juga terjadi pada obesitas sentral, yaitu dari 31% pada tahun 2018 menjadi 36,8% pada tahun 2023.

Pengendalian obesitas menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan PTM. Upaya yang dilakukan meliputi deteksi dini faktor risiko PTM secara masif melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian/lembaga, TNI, POLRI, institusi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit telah menetapkan indikator program berupa jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko PTM, dengan pemantauan dilakukan melalui Aplikasi Sehat Indonesia-Ku (ASIK).

Definisi operasional indikator obesitas adalah proporsi penduduk usia ≥ 18 tahun dengan kategori obesitas berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) > 27 , yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun dengan IMT > 27 dibandingkan dengan total penduduk usia ≥ 18 tahun pada periode tertentu.

Dalam pelaksanaan program, sasaran deteksi dini obesitas ditetapkan sebesar 70% dari penduduk usia ≥ 18 tahun. Pada tahun 2025, sebanyak 52.042.584 penduduk usia ≥ 18 tahun telah mendapatkan deteksi dini obesitas atau mencapai 42,4% dari sasaran nasional. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Gorontalo dengan capaian lebih dari 100%, yang menunjukkan jumlah penduduk yang dilakukan deteksi dini telah melampaui target sasaran yang ditetapkan. Sementara itu, cakupan terendah terdapat di Papua Pegunungan sebesar 0,8%, sehingga diperlukan penguatan dukungan dan intervensi untuk meningkatkan pelaksanaan deteksi dini obesitas di wilayah tersebut.

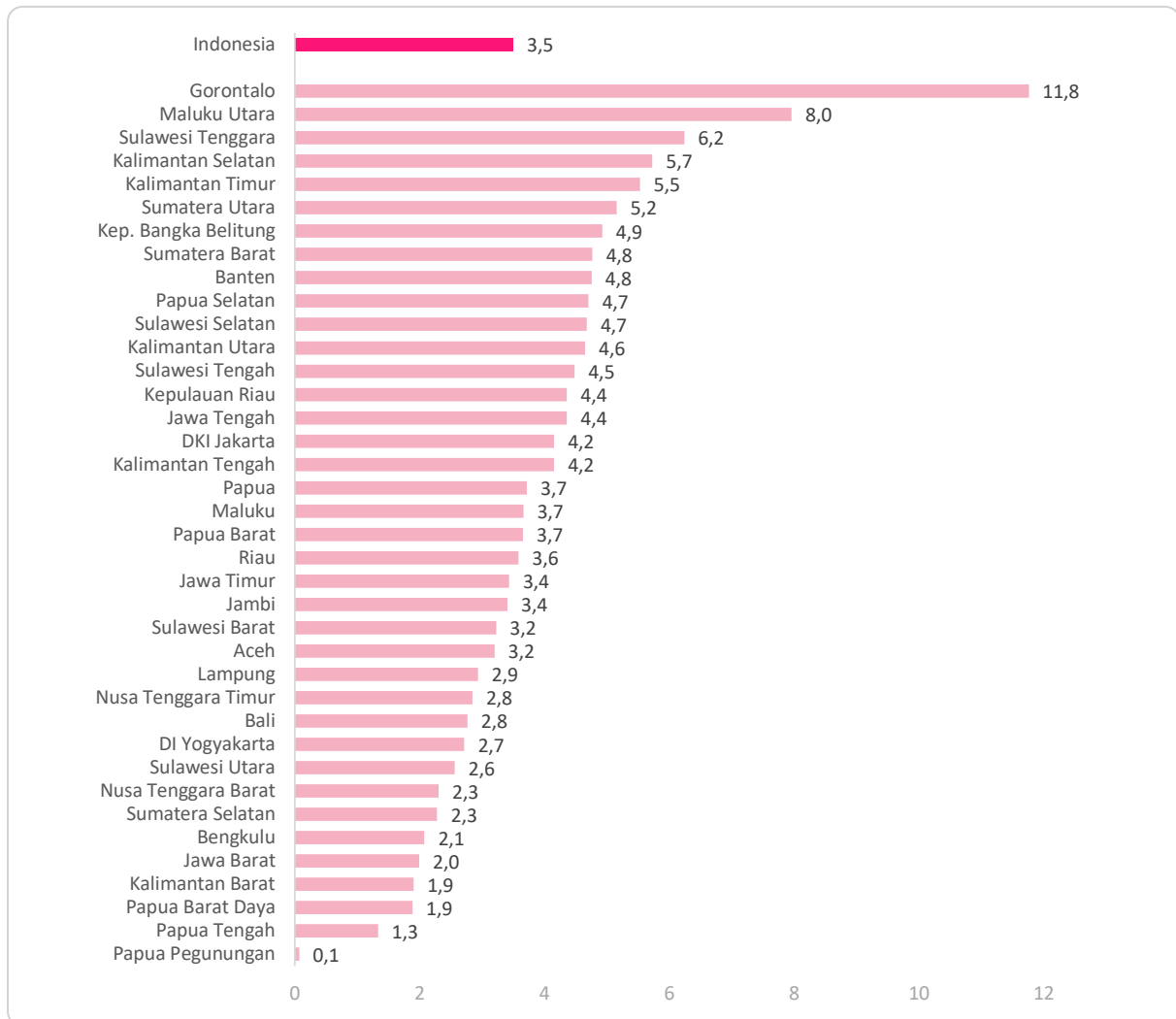
GAMBAR 6.64
PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI OBESITAS
TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Berdasarkan hasil deteksi dini, proporsi penduduk usia ≥ 18 tahun yang mengalami obesitas di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 18,5%. Provinsi dengan proporsi obesitas terendah adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 9,2%, sedangkan proporsi tertinggi ditemukan di Papua Barat sebesar 31,6%, diikuti Papua Selatan sebesar 28,8% dan Papua Barat Daya sebesar 27,8%.

GAMBAR 6.65
PROPORSI PENDUDUK USIA >18 TAHUN YANG OBESITAS BERDASARKAN
HASIL DETEKSI DINI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

F. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kesehatan jiwa mempunyai peran yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Psikotropika adalah zat atau obat,

baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), yang apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan ketergantungan yang ditandai antara lain dengan dosis penggunaan yang semakin besar, kesulitan mengontrol keinginan untuk menggunakan NAPZA, muncul gejala putus zat jika penggunaan dihentikan, hingga tetap menggunakan NAPZA meskipun mengetahui dampak buruknya.

Diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Gangguan ini memberikan kontribusi 14% dari beban penyakit global. Sekitar 154 juta diantaranya menderita depresi. Pada 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun mengalami masalah psikologis. Depresi penyebab utama disabilitas pada remaja. Depresi dapat menjadi penyebab bunuh diri, dan bunuh diri merupakan penyebab ke-4 kematian pada remaja di dunia. Kebanyakan dari gangguan psikologis tersebut tidak disadari dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan yang tidak tepat dan lambat pada kasus-kasus depresi dapat menimbulkan kematian akibat bunuh diri (Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023).

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pendekatan kesehatan jiwa secara global saat ini mulai bergeser dari layanan institusional menjadi berbasis masyarakat dengan mendekatkan akses layanan kesehatan jiwa tidak hanya di fasilitas layanan kesehatan, namun juga di fasilitas lain di luar sektor kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tetap mengedepankan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif preventif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa, dan perlunya skrining awal agar gejala kesehatan jiwa dapat diatasi sebelum menjadi parah.

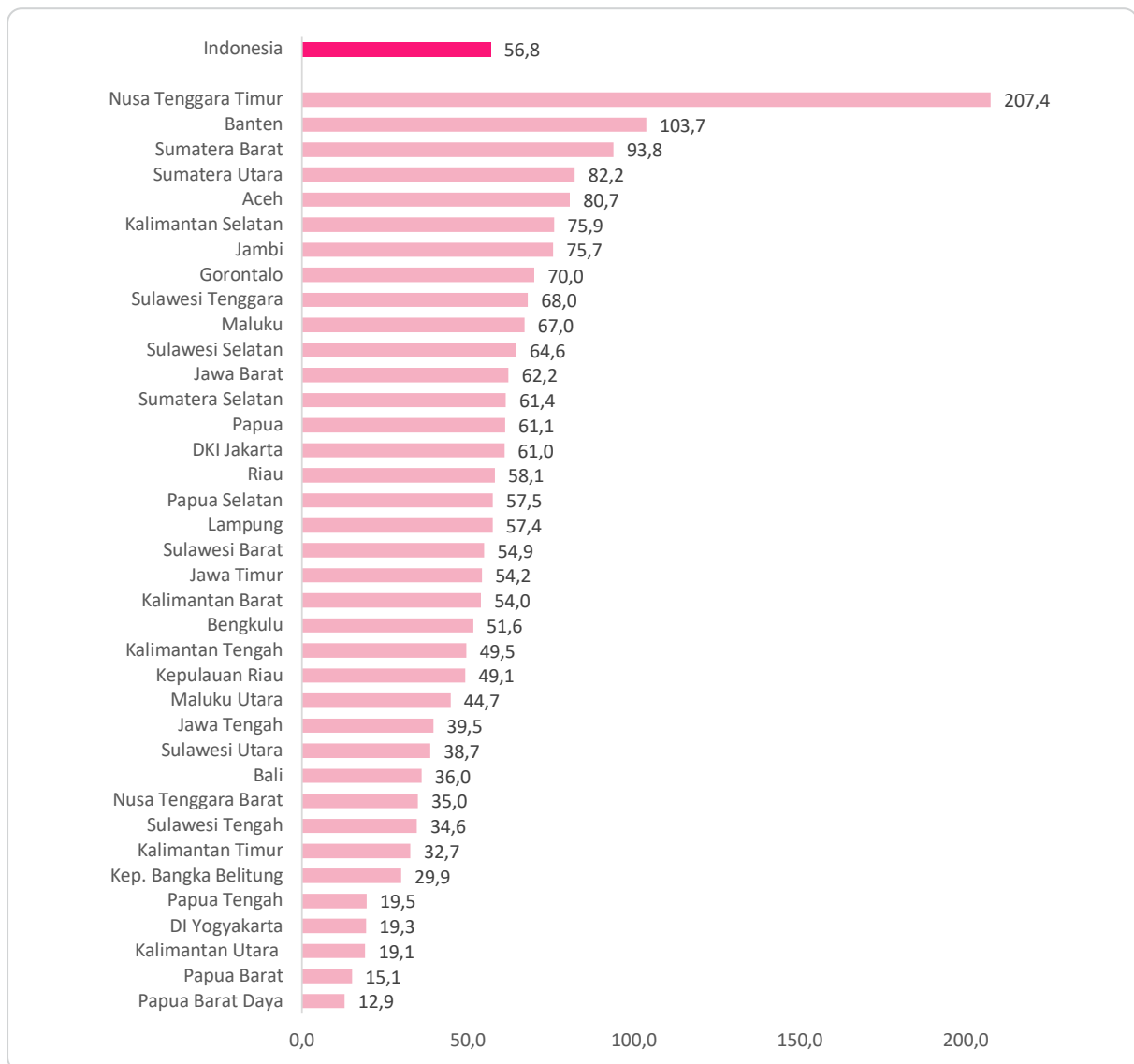
a. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan. ODGJ berat adalah orang yang mendapatkan diagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, RSUD dengan layanan Kesehatan Jiwa, RSJ). Gangguan jiwa psikosis/skizoprenia merupakan gangguan jiwa berat yang umumnya ditandai dengan penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi, disertai efek yang tidak wajar (inappropriate) atau tumpul (blunted). Kesadaran yang jernih (clear consciousness) dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu dapat berkembang kemudian. Gejala khas psikosis/skizofrenia berupa adanya waham atau halusinasi yang menetap selama satu bulan atau lebih, disertai perilaku aneh seperti katatonik atau agresivitas, serta gejala negatif yang berdampak signifikan kepada kualitas hidup keseluruhan.

Orang dengan gangguan jiwa memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, diantaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), mendapatkan informasi dan edukasi, serta tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. Stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia pada penderita skizofrenia seperti pemasangan sering terjadi. Lebih dari 2/3 penderita psikosis di dunia tidak menerima layanan kesehatan jiwa spesialis.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, proporsi rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang pernah dipasung sebesar 6,6%, proporsi rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang berobat 1 bulan terakhir dan berobat rutin 1 bulan terakhir di fasilitas kesehatan sebesar 55,9%.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, jumlah kasus ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan adalah 56,8% dari target sasaran 510.623 orang. Angka ini belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu 70%. Sebanyak 8 provinsi sudah mencapai target 70%. Provinsi dengan persentase terendah ODGJ berat mendapat layanan kesehatan adalah Papua Barat Daya (12,9%). Provinsi Papua Pegunungan tidak melaporkan data jumlah ODGJ mendapatkan layanan.

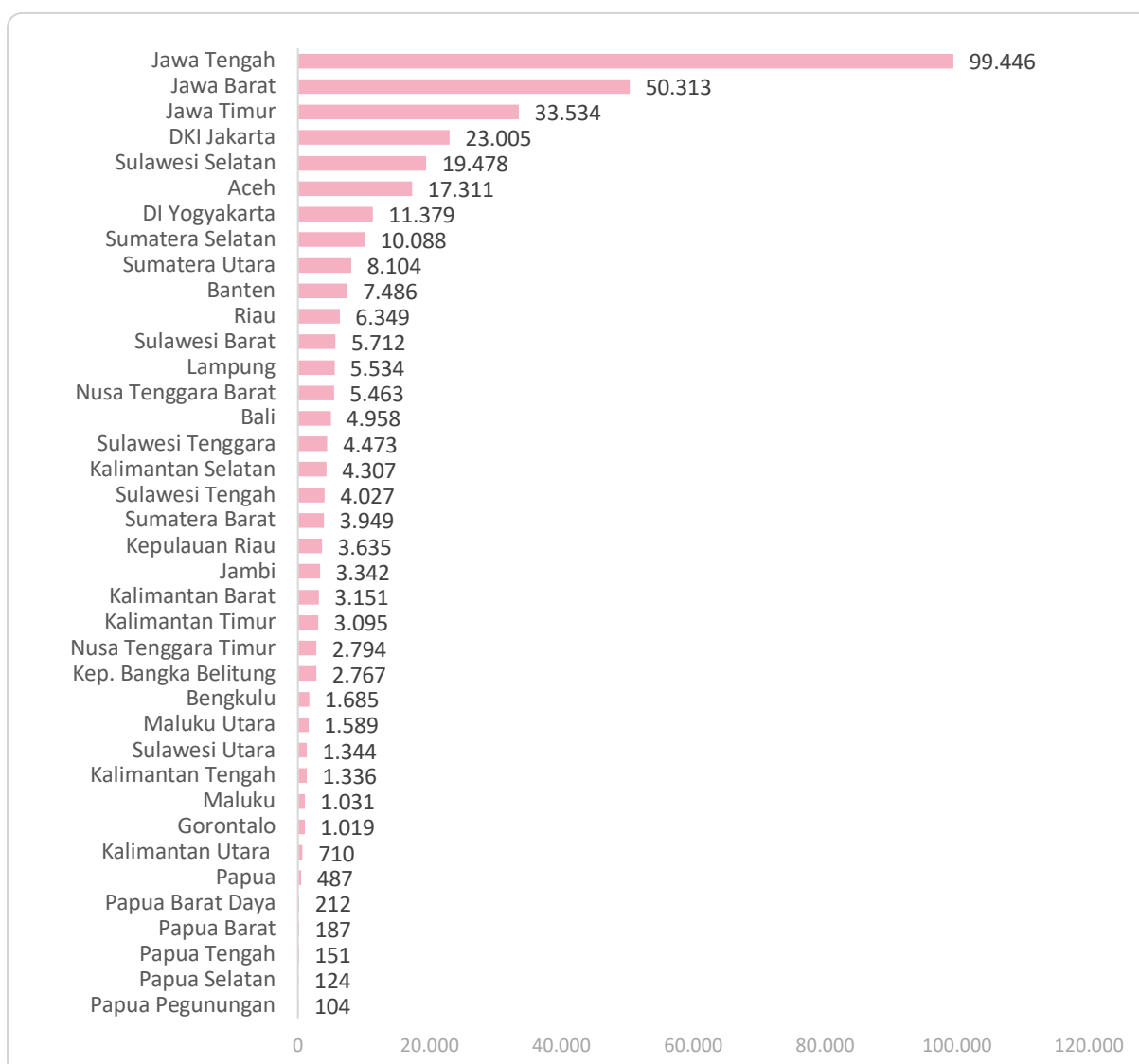
Kesenjangan pengobatan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan pelaporan data masih tinggi. Peningkatan akses pelayanan kesehatan jiwa untuk menurunkan kesenjangan pengobatan gangguan jiwa dan pelaporan data, menjadi tuntutan baik secara global maupun regional dengan penyediaan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan kontinu di fasilitas pelayanan kesehatan.

b. *First Aider* pada Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP)

Dalam penguatan sistem kesehatan jiwa berbasis komunitas, Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) hadir sebagai wujud nyata respons kemanusiaan yang cepat. Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) atau *Psychological First Aid* (PFA) merupakan bentuk intervensi awal yang bersifat praktis, humanis, dan suportif bagi individu yang menghadapi krisis, trauma, maupun tekanan psikologis berat. Sebagai upaya menjaga stabilitas emosional agar tidak memburuk sebelum mendapatkan penanganan medis profesional (psikolog/psikiater), P3LP berfokus pada mitigasi “luka mental” di tingkat hulu. Implementasi program ini bersifat inklusif. Peran first aider tidak terbatas pada tenaga profesional, melainkan dapat dilakukan oleh masyarakat, keluarga, maupun rekan kerja yang telah dibekali pelatihan dasar. Sebagai respons kemanusiaan cepat, P3LP terbukti efektif mereduksi stres pasca-krisis seperti saat bencana alam, kecelakaan, kehilangan, ataupun perundungan sekaligus menstimulasi resiliensi alami korban. Kendati demikian, sistem rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut wajib segera diaktifkan jika korban menunjukkan tanda bahaya (*red flags*). Indikator rujukan tersebut meliputi ketidakmampuan merawat diri, adanya tendensi perilaku menyakiti diri sendiri (*self-harm*) atau percobaan bunuh diri, hilangnya kontak dengan realitas (seperti disorientasi bicara dan histeria masal), serta adanya potensi perilaku yang membahayakan orang lain.

Jumlah orang yang menjadi *first aider* P3LP tahun 2025 di Indonesia adalah 353.679 orang dari sasaran 1.021.200 orang. Jumlah ini masih belum mencapai target pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu 650.000 orang. Provinsi dengan jumlah first aider P3LP terbanyak adalah Jawa Tengah (99.446 orang) dimana telah melebihi target sasaran 88.100 orang. Provinsi dengan jumlah *first aider* P3LP paling sedikit adalah Papua Pegunungan yaitu sebesar 104 orang, sekitar 0,67% dari sasaran yang sudah ditetapkan.

GAMBAR 6.67
JUMLAH ORANG YANG MENJADI *FIRST AIDER* PERTOLONGAN PERTAMA PADA LUKA PSIKOLOGIS (P3LP)
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

2. Pelayanan Rehabilitasi Medis pada Penyalahguna NAPZA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak dan mengatur kewajiban penyalahguna dan pecandu narkoba untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis pada penyalahguna NAPZA merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba dari ketergantungan narkoba. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor.

Wajib lapor merupakan suatu kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan /atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis

berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika. Di Indonesia, ada sebanyak 905 IPWL dengan 657 IPWL diantaranya merupakan milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, yang dapat mengajukan klaim pembiayaan pelayanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA yang dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis berasal dari penyalahguna yang datang secara sukarela dan/atau pembantaran, dan/atau kasus putusan pengadilan dan/atau mendapatkan rehabilitasi medis rawat jalan dan/atau rawat inap di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

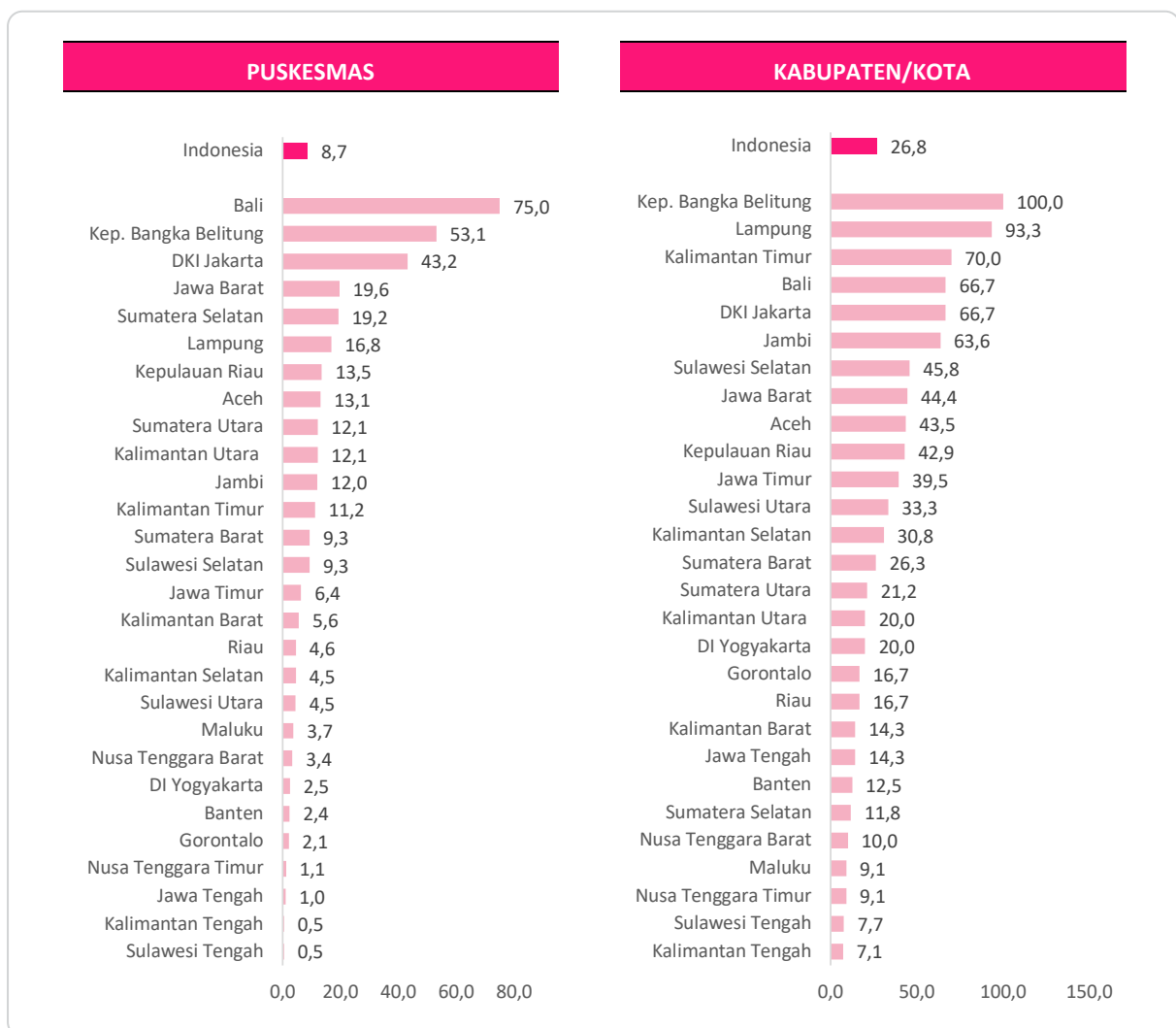
Pelayanan rehabilitasi medis di pusat kesehatan masyarakat dan klinik pratama (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP), rumah sakit dan klinik utama (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL), dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA adalah sebagai berikut:

1. **Pelayanan Gawat Darurat.** Merupakan pengelolaan kondisi gawat darurat baik fisik maupun psikis akibat kondisi intoksikasi ataupun kondisi putus Napza yang dapat mengancam kehidupan diri sendiri maupun orang lain, bertujuan untuk pengenalan tanda bahaya awal, memberikan bantuan hidup dasar, mengatasi kondisi akut pasien khususnya kegawatdaruratan psikiatri, mencegah kecacatan pasien serta kematian pasien.
2. **Manajemen Putus Zat.** Merupakan proses atau tindakan medis untuk membantu klien mengatasi gejala putus zat. Tujuannya untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan fisik dan/atau psikis akibat dikurangi atau dihentikannya penggunaan Napza.
3. **Pelayanan Rawat Jalan Non Rumatan.** Merupakan upaya terapi (intervensi) berbasis bukti yang mencakup perawatan medis, psikososial, atau kombinasi keduanya, berupa perawatan jalan jangka pendek atau jangka panjang, seperti pemberian farmakoterapi, konseling adiksi, psikoterapi, dan intervensi spiritual. Tujuannya untuk membantu pasien untuk menghentikan pemakaian Napza dan/atau mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan.
4. **Pelayanan Rawat Jalan Rumatan.** Merupakan pemberian farmakoterapi jangka panjang (minimal 6 bulan) dengan menggunakan zat golongan opioid sintesis agonis atau agonis parsial secara oral/sublingual bagi pasien ketergantungan opioda di bawah pengawasan dokter terlatih dan penerapan tata laksana mengikuti pedoman nasional yang tersedia. Layanan rawat jalan rumatan ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak buruk ketergantungan opioda dengan pemberian farmakoterapi jangka panjang, tanpa harus berhenti menggunakan zat golongan opioda.
5. **Pelayanan Penapisan dan Pengkajian.** Penapisan merupakan upaya mendeteksi kandungan Napza dalam tubuh seseorang dengan instrumen atau pemeriksaan tertentu, sedangkan pengkajian merupakan proses klinis yang mendalam (penelaahan) terhadap riwayat penggunaan Napza seseorang. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran utuh mengenai penggunaan Napza seseorang.
6. **Pelayanan Intervensi Psikososial.** Merupakan upaya terapi psikologis dan rehabilitasi sosial, yang melengkapi terapi farmakologis, untuk memulihkan aspek kejiwaan dan sosial dari penyalahgunaan Napza, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna Napza. Bentuk layanan intervensi psikososial antara lain konseling adiksi,

wawancara motivasional, psikoterapi, terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, dan konseling pasangan/marital.

7. **Pelayanan Rehabilitasi Rawat Inap.** Merupakan upaya terapi berbasis bukti yang mencakup perawatan medis, psikososial, atau kombinasi keduanya, berupa perawatan inap jangka pendek atau jangka panjang yang dapat dilakukan di FKRTL.
8. **Pelayanan Komorbiditas Fisik.** Merupakan upaya kuratif dan rehabilitatif untuk kondisi medis umum (nonpsikiatrik) yang menyertai masalah terkait penggunaan Napza.
9. **Pelayanan Dual Diagnosis/Komorbid Psikiatrik.** Merupakan penatalaksanaan masalah terkait penggunaan Napza disertai gangguan jiwa.

GAMBAR 6.68
PERSENTASE PUSKESMAS DAN KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI LAYANAN REHABILITASI MEDIS NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



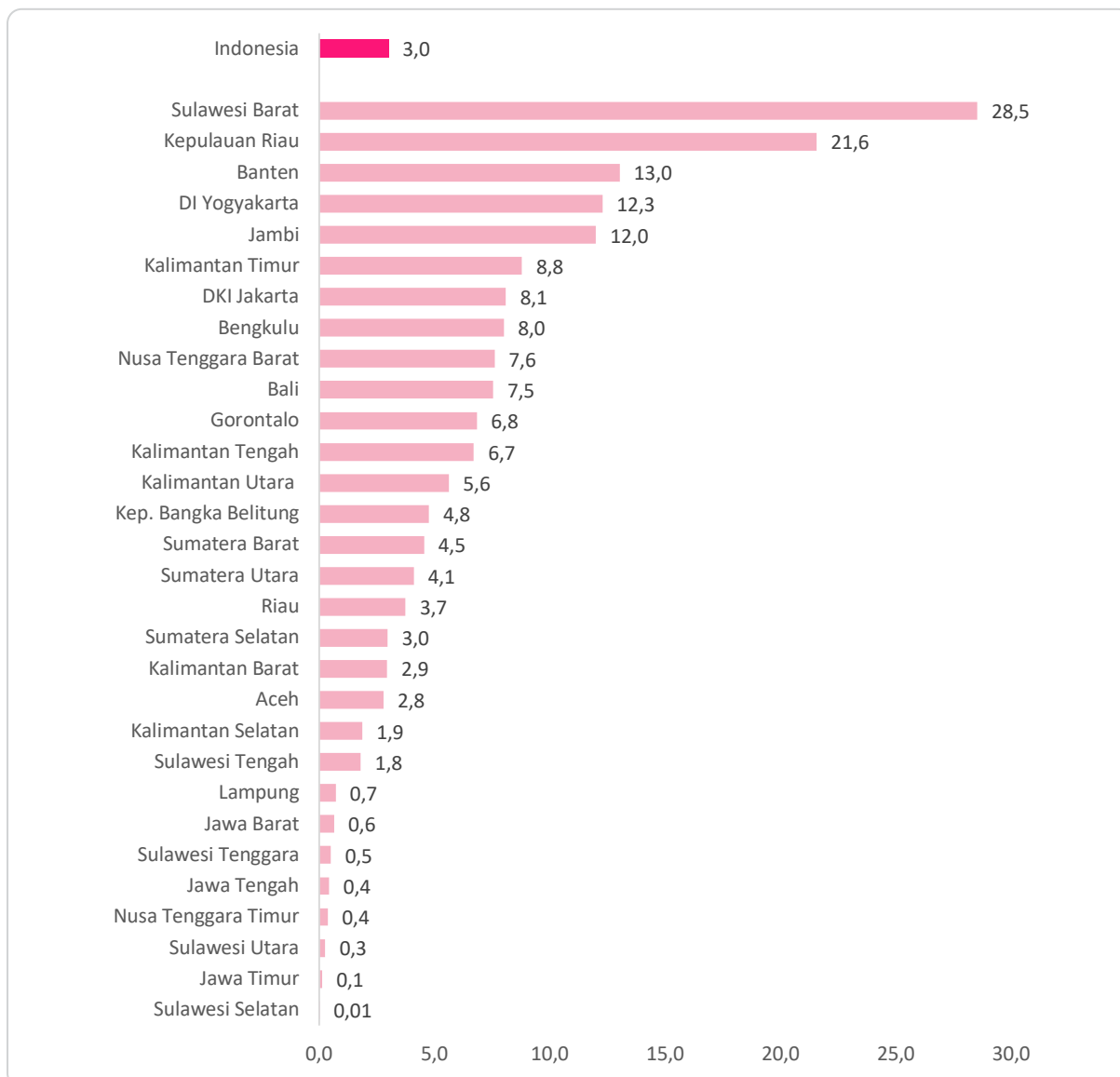
Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, persentase puskesmas yang mampu memberikan layanan rehabilitasi medis penyalahguna NAPZA di Indonesia sebesar 8,7%. Angka ini belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu 10%. Sebanyak 12 provinsi telah melampaui target nasional. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Bali (75%). Masih ada 10 provinsi yang belum memiliki puskesmas yang mampu memberikan layanan rehabilitasi medis penyalahguna NAPZA yaitu Provinsi Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan rehabilitasi medis NAPZA di Indonesia pada tahun 2025 ada sebanyak 26,8% dari total kabupaten/kota. Angka ini belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 yaitu 50%. Provinsi dengan persentase tertinggi kabupaten/kota yang memiliki faskes dengan layanan rehabilitasi medis NAPZA adalah Kepulauan Bangka Belitung (100%), artinya di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki faskes yang mampu melayani rehabilitasi medis NAPZA. Masih ada 10 provinsi yang belum ada kabupaten/kota dengan kemampuan layanan rehabilitasi medis NAPZA yaitu Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Target sasaran penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis pada tahun 2025 adalah 313.872 orang dan diperoleh capaian 3%. Angka ini belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 5% penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan target sasaran guna meningkatkan kualitas dan kinerja fasilitas kesehatan dalam menjangkau penyalahguna NAPZA. Sebanyak 13 provinsi sudah mencapai target 5% dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat (28,%). Sebanyak 8 provinsi belum ada penyalahguna NAPZA yang dilaporkan mendapat pelayanan rehabilitasi medis, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

GAMBAR 6.69
PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA YANG MENDAPATKAN LAYANAN
REHABILITASI MEDIS DI FASYANKES IPWL
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025



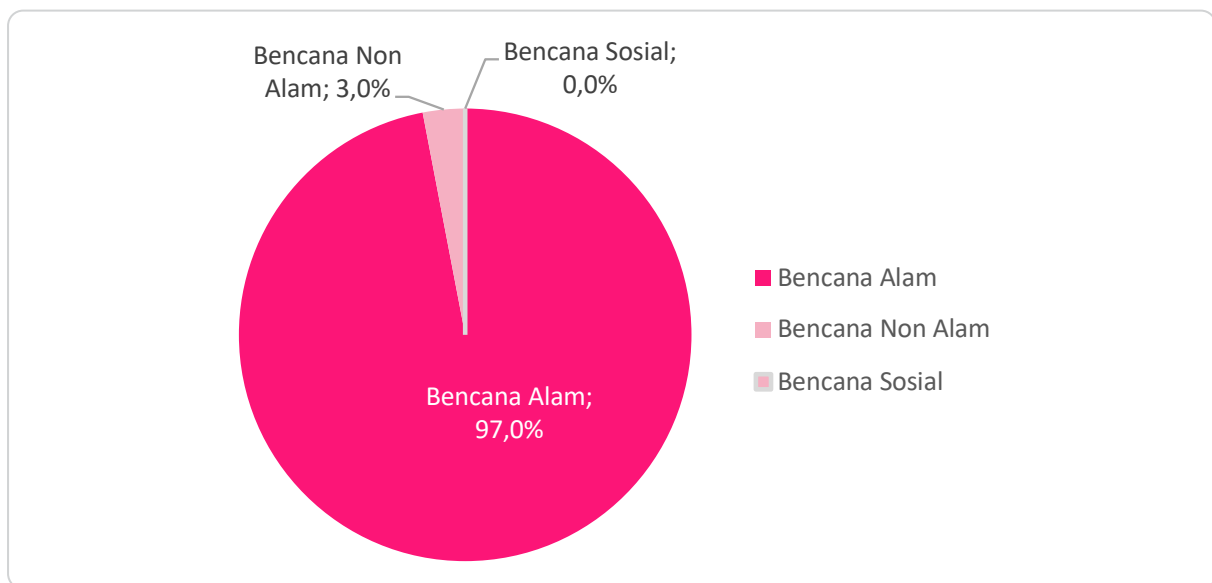
Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

G. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Sepanjang tahun 2025 terdapat 166 kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia. Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2024, dimana pada tahun 2024 terdapat 235 kejadian berdampak krisis kesehatan. Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian definisi untuk kejadian berdampak krisis kesehatan pada sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah/presiden atau adanya aktivasi klaster kesehatan atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/terjadi pengungsian yang disertai adanya mobilisasi sumber daya kesehatan.

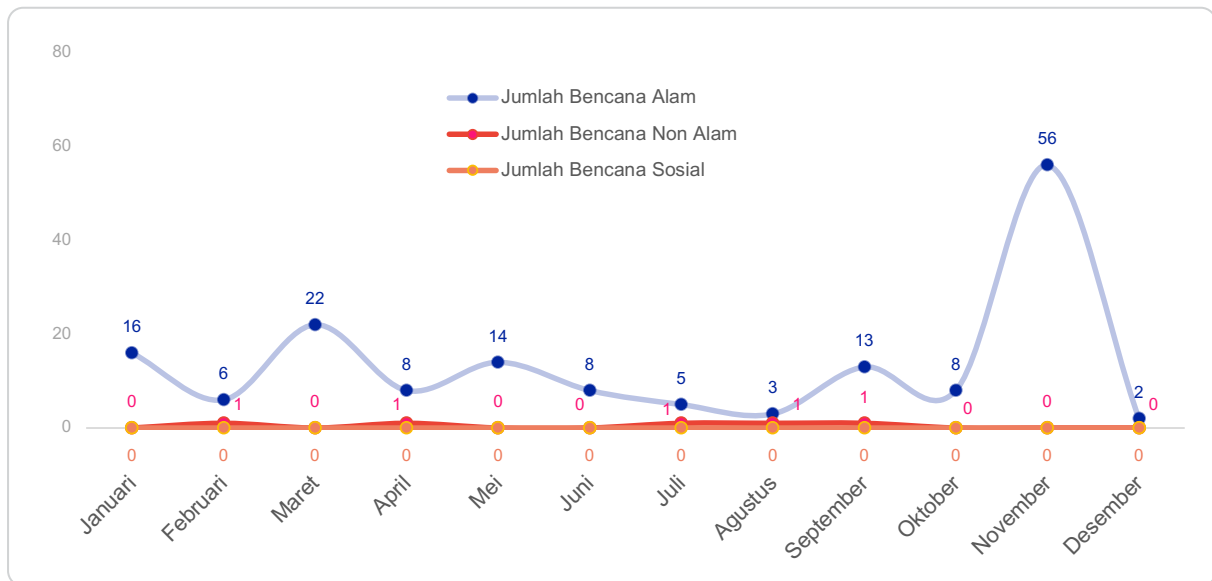
GAMBAR 6.70
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2026

Pada tahun 2025 kejadian berdampak krisis kesehatan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam dengan persentase 97,0%, kemudian disusul oleh bencana non alam dengan persentase 3,0% sedangkan untuk bencana sosial tidak ada kejadian (0%).

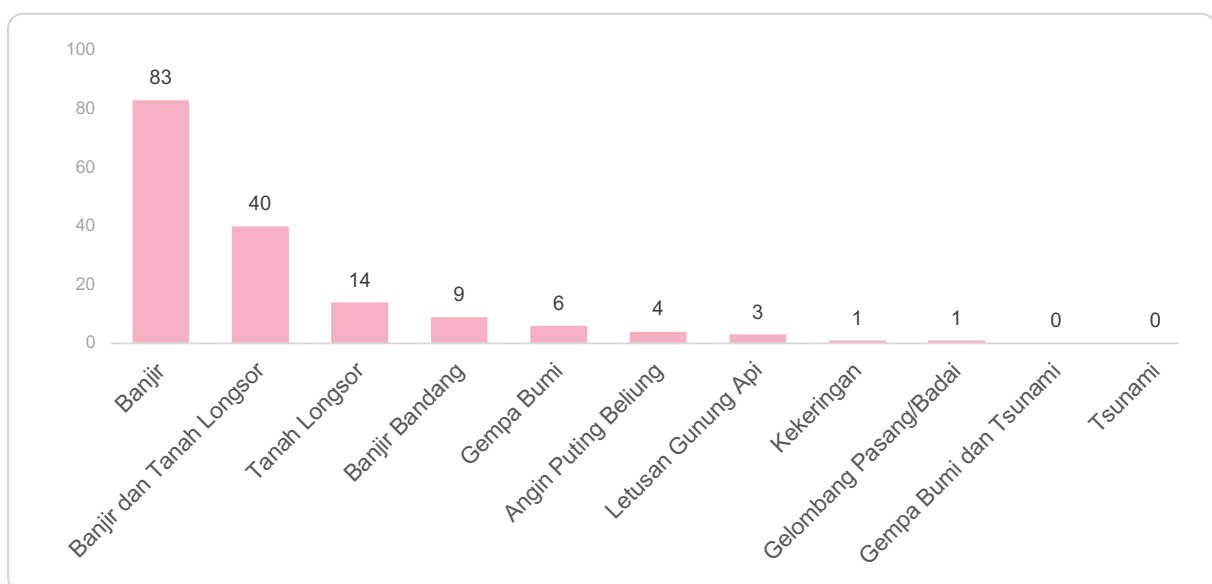
GAMBAR 6.71
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN
DI INDONESIA TAHUN 2025



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2026

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa tidak ada kejadian berdampak krisis kesehatan yang disebabkan oleh bencana sosial. Sebagian besar kejadian berdampak krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia tahun 2025 disebabkan oleh bencana alam dengan frekuensi tertinggi terjadi pada bulan November dengan 56 kejadian. Sedangkan untuk bencana non alam frekuensi setiap bulan berkisar antara 0-1 kejadian. Secara keseluruhan, frekuensi tertinggi kejadian berdampak krisis kesehatan terjadi pada bulan November dan terendah pada bulan Agustus.

GAMBAR 6.72
JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2025



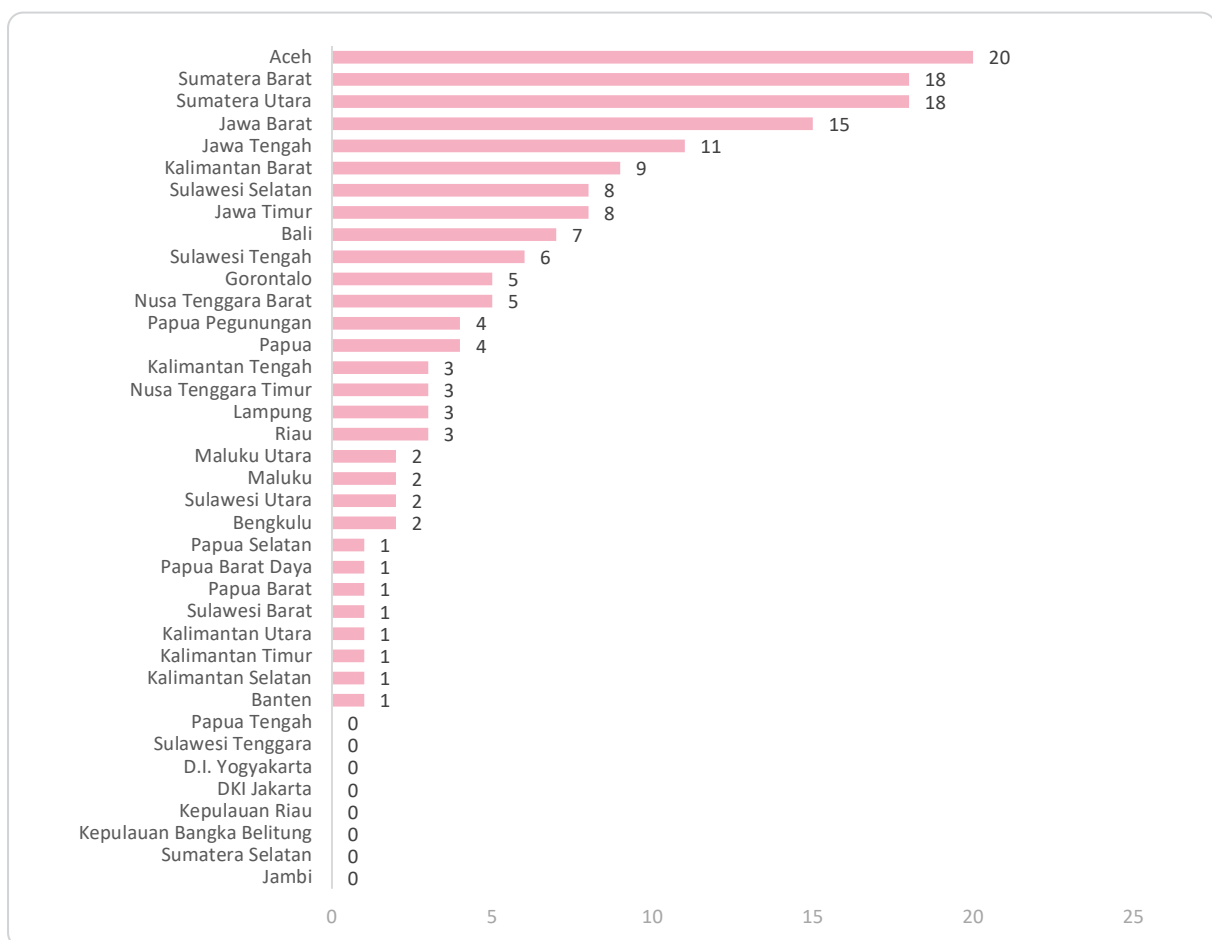
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2026

Dari 161 kejadian bencana yang berdampak krisis kesehatan sepanjang tahun 2025, banjir menjadi kejadian bencana alam dengan frekuensi tertinggi 83 kejadian disusul banjir dan tanah longsor dengan frekuensi 40 kejadian.

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2025 adalah kegagalan teknologi dengan 3 kejadian, disusul oleh penyakit dengan 1 kejadian dan kebakaran hutan dan lahan juga dengan 1 kejadian.

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2025 tidak ada kejadian bencana sosial yang berdampak pada krisis kesehatan.

GAMBAR 6.73
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 2026

Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 166 kejadian. Jika dilihat dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mengalami kejadian bencana berdampak krisis kesehatan terbanyak yaitu 20 kejadian, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan 18 kejadian bencana. Beberapa provinsi seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Papua Tengah tidak mengalami kejadian bencana berdampak krisis kesehatan.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2025

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banjir	83	22	479	97	18.916	694.932
2	Letusan Gunung Api	3	3	0	11	1.703	7.400
3	Gempa Bumi	6	4	2	13	615	163
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	14	6	62	29	1.661	3.755
6	Banjir Bandang	9	7	27	18	927	3.927
7	Kekeringan	1	1	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	4	4	0	0	9	81
9	Gelombang Pasang/ Badai	1	1	0	0	0	0
10	Banjir dan Tanah Longsor	40	11	827	695	77.338	533.222
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		161	27	1.397	863	101.169	1.243.480
1	Kebakaran	0	0	0	0	0	0
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	1	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0
6	Penyakit	1	1	0	252	609	0
7	Keracunan	0	0	0	0	0	0
8	Gagal Teknologi	3	3	65	33	76	750
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		5	5	65	285	685	750
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		0	0	0	0	0	0
Indonesia			166		1.462	1.148	101.854

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2026

Jumlah kejadian bencana alam berdampak krisis kesehatan tahun 2025 sebanyak 161 kejadian dengan jumlah korban meninggal sebanyak 1.397 orang, luka berat 863, luka ringan 101.169 orang dan pengungsi sebanyak 1.243.480 orang, sedangkan untuk kejadian bencana non alam yang berdampak krisis Kesehatan ada 5 kejadian dengan jumlah korban meninggal 65 orang, korban luka berat 285 orang, korban luka ringan 685 orang dan pengungsi sebanyak 750 orang. Untuk bencana sosial memang tidak ada kejadian yang berdampak krisis kesehatan. ***

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN



BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial sehingga setiap orang dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilaksanakan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap berbagai faktor risiko lingkungan guna memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media lingkungan. Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, setiap pengelola dan penanggung jawab lingkungan maupun fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memenuhi persyaratan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan limbah medis yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta pemenuhan baku mutu lingkungan sebagai dasar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan merupakan upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh faktor risiko lingkungan melalui pengendalian berbagai media lingkungan. Sejalan dengan definisi tersebut, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan lingkungan sebagai aspek kesehatan manusia yang ditentukan oleh faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial di lingkungan, termasuk seluruh faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku dan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan faktor risiko lingkungan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, mulai dari penetapan standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan media lingkungan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Selain itu, pemenuhan standar kualitas media lingkungan tertentu juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, yang menjadi acuan dalam menjamin keamanan dan kualitas air untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan diterapkan pada berbagai media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Upaya pencapaian kualitas lingkungan yang sehat

merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai sektor pembangunan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara luas. Berbagai sektor seperti lingkungan hidup, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pertanian, perindustrian, pendidikan, serta sektor lainnya berperan dalam pengendalian faktor risiko lingkungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, sektor kesehatan berfokus pada pengendalian dampak kesehatan melalui kegiatan surveilans kesehatan lingkungan, pembinaan, pengawasan, penyehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas media lingkungan, menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kesehatan, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya yang berkaitan dengan akses air minum aman, sanitasi layak, permukiman sehat, serta perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko lingkungan.

A. AIR MINUM

1. Kualitas Air Minum Pada Sarana Air Minum Memenuhi Syarat

Komitmen pemerintah Indonesia bersama dengan komitmen global dalam upaya mencapai target 6.1 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) “pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata ke air minum yang aman dan terjangkau untuk semua” menuntut pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam pemenuhan kualitas air minum yang aman. Pemenuhan tersebut dapat diperoleh dengan menyediakan akses yang universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua kalangan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Pada tahun 2020 telah dilakukan survei kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) yang digunakan sebagai data dasar dalam penerapan surveilans kualitas air minum berbasis kesehatan menggunakan lima parameter prioritas yaitu total dissolved solid (TDS), pH, E. coli, nitrat, dan nitrit. Akses air minum rumah tangga Indonesia pada tahun tersebut sebesar 11,8% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 20,49% dan pada tahun 2024 akses air minum aman di Indonesia menjadi 30,45%. Pemerintah Indonesia menargetkan penduduk yang mengakses air minum aman sebesar 45% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah meningkatkan penerapan tiga instrumen pokok yang saling terkait, yaitu Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM), Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), dan penerapan Pilar 3 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pengelolaan Air Minum dan Makanan - Rumah Tangga (PAM-RT).

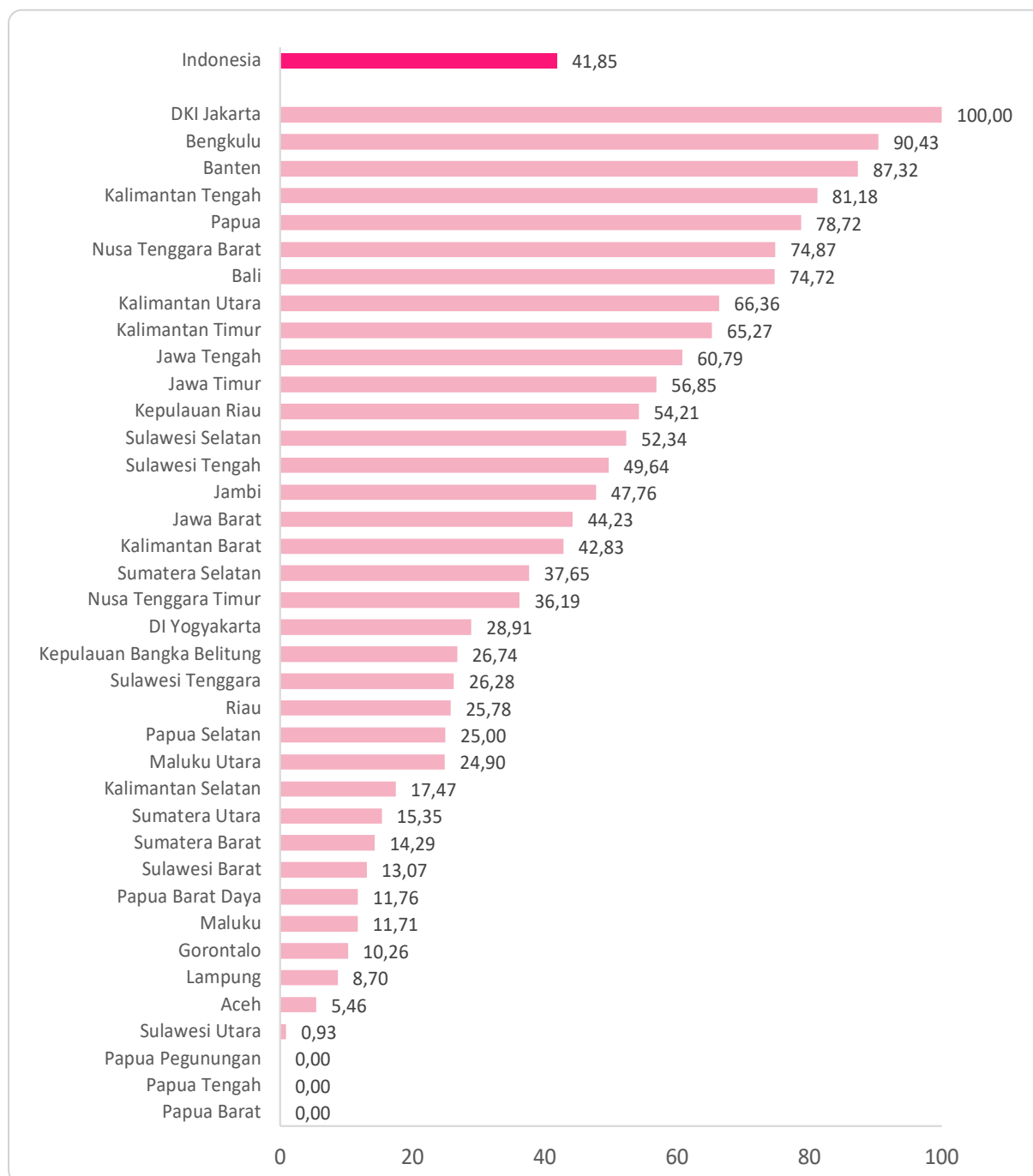
Untuk menjamin kualitas air minum aman, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang sebagian pengaturan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit. Dalam Permenkes RI tersebut dijelaskan bahwa upaya penyehatan air meliputi kegiatan pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas air. Kegiatan pengawasan kualitas air dilakukan melalui surveilans/pengawasan, uji laboratorium, analisis risiko, dan/atau rekomendasi tindak lanjut. Pengawasan air minum merupakan kegiatan mendasar untuk perlindungan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan melalui penyediaan air

minum yang aman (WHO *Regional Office for Europe*, 2019). Lebih lanjut dalam hal pengawasan, *World Health Organization* (WHO) (2017) juga mempromosikan pendekatan manajemen pencegahan berbasis risiko untuk menjamin keamanan air minum, karena pendekatan ini dianggap sebagai praktik terbaik di dalam kerangka pengawasan kualitas air minum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan terkait Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh tenaga Sanitarian Puskesmas.

GAMBAR 7.1
KUALITAS AIR MINUM PADA SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, jumlah sarana air minum yang diperiksa dan kualitas air minumnya sesuai syarat tahun 2025 sebesar 13.981 dari jumlah keseluruhan total sarana air minum yang sebanyak 33.410 (Gambar 7.1) dengan capaian presentase sarana air minum yang diperiksa kualitas air minumnya sesuai syarat tahun 2025 sebesar 41,85%. Terdapat 1 (satu) Provinsi dengan capaian persentase 100% dalam kualitas air minum yang memenuhi syarat yaitu DKI Jakarta. Sedangkan provinsi terendah yaitu Sulawesi Utara (0,93%), Aceh (5,46%) dan Lampung (8,70%). Dan masih terdapat 3 (tiga) Provinsi yang memiliki capaian indikator sebesar 0%. Capaian tersebut disebabkan

belum terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum pada sarana air minum yang ada, sehingga belum terdapat data hasil pemeriksaan yang dapat dilaporkan. Kondisi ini antara lain terjadi di Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan akses geografis, keterbatasan sumber daya, serta belum tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Rincian lengkap mengenai kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat dapat dilihat di Lampiran tabel 7.1.

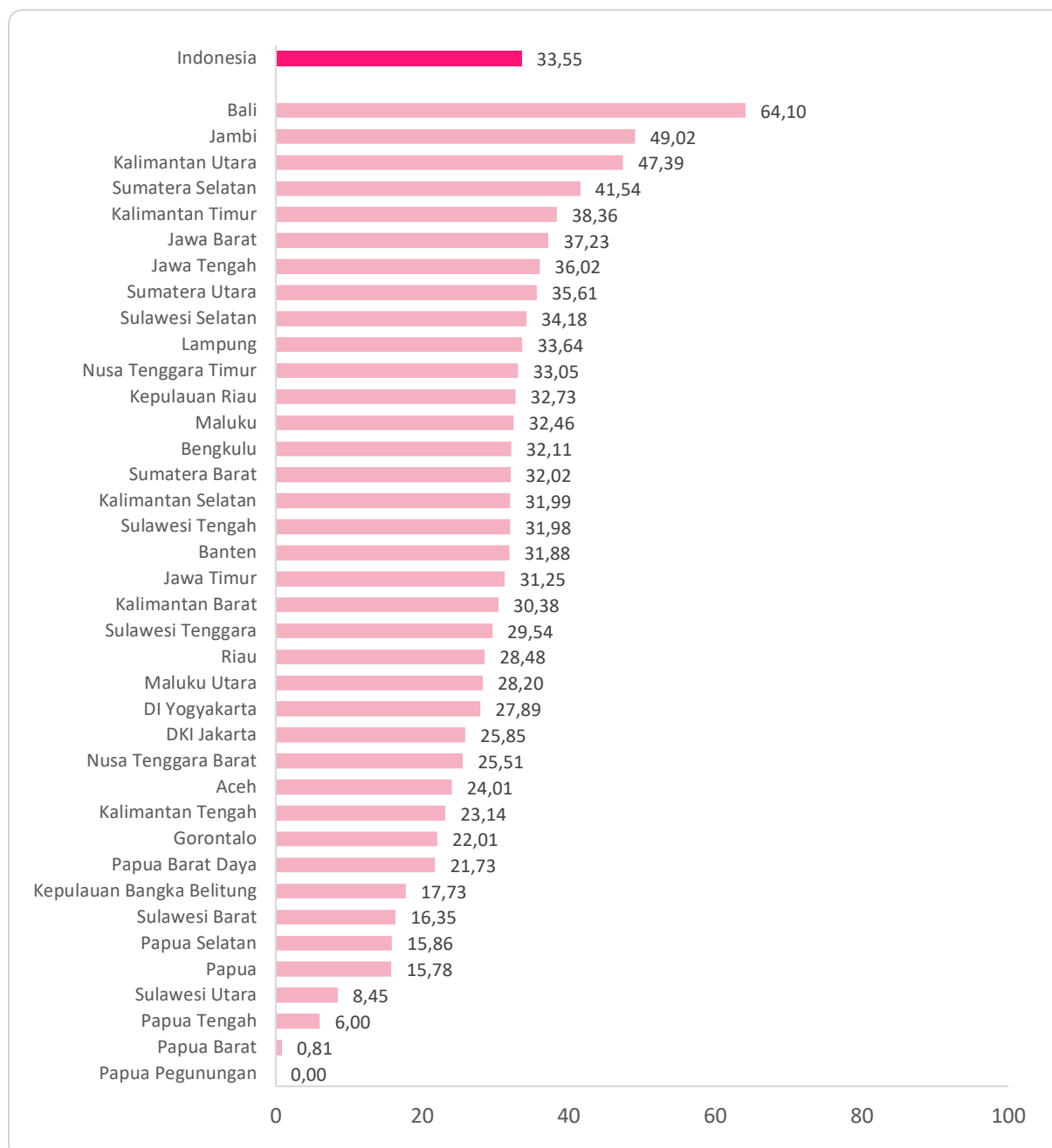
2. Kualitas Air Minum Dalam Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (Surveilans Kamrt) Memenuhi Syarat

Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) merupakan rangkaian proses pengawasan kualitas air minum meliputi pengisian kuesioner, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada sarana air minum, serta pengujian kualitas air minum yang dilakukan secara terpadu dalam satu waktu. Surveilans KAMRT bertujuan untuk memetakan ketersediaan data kualitas air minum di tingkat kabupaten/kota.

Hasil surveilans ini dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah provinsi dan Direktorat Kesehatan Lingkungan, serta dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Perbaikan perencanaan program;
- b. Pengembangan strategi pengawasan kualitas air minum;
- c. Evaluasi terhadap penyelenggara air minum guna meningkatkan kualitas pengelolaan dari hulu hingga hilir;
- d. Penjaminan mutu air minum yang aman hingga ke tingkat rumah tangga;
- e. Penyediaan data dasar bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan, penyusunan kerangka regulasi, perumusan kebijakan, serta penganggaran operasional teknis untuk mencapai target akses air minum aman sebesar 45% pada tahun 2030.

GAMBAR 7.2
KUALITAS AIR MINUM DALAM SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (SKAMRT)
MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

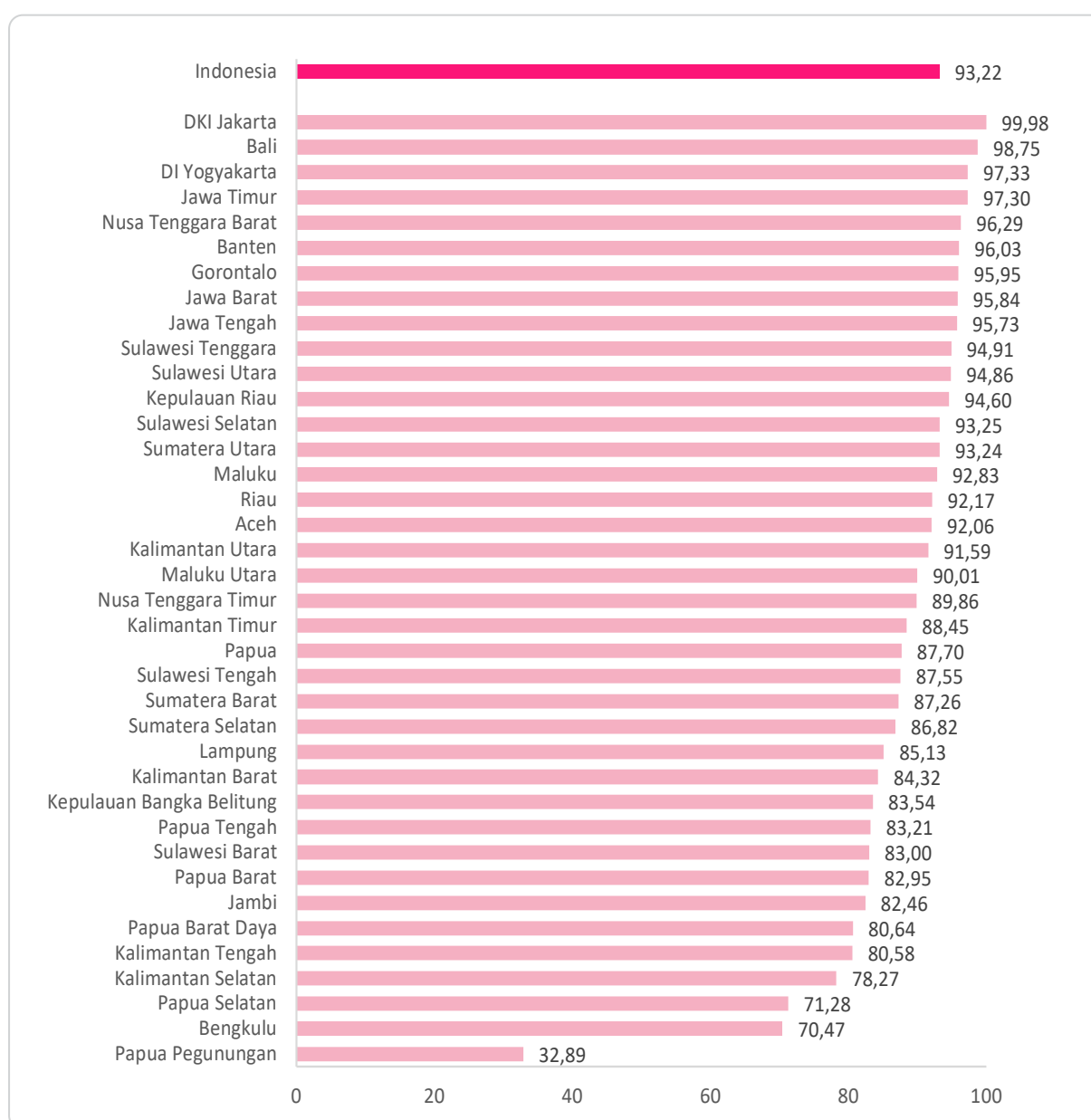
Secara nasional, kualitas air minum rumah tangga dalam surveilans kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) memenuhi syarat tahun 2025 sebesar 33,55%. Provinsi dengan persentase tertinggi SKAMRT yaitu Bali (64,10%), Jambi (49,02%), dan Kalimantan Utara (47,39%). Sedangkan Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (0,81%), Papua Tengah (6,00%), dan Sulawesi Utara (8,45%). Sedangkan 1 (satu) Provinsi Papua Pegunungan hasil surveilans kualitas air minum tingkat rumah tangganya belum memenuhi syarat pada E-Coli dan 4 parameter kimia tertentu. Rincian lengkap tentang kualitas air minum rumah tangga dalam surveilans kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) memenuhi syarat tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.2.

3. Akses Terhadap Air Minum Layak

Menurut Statistik Indonesia, BPS (2026), rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah:

1. Sumber air minum utama berupa leding, air terlindungi, atau air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung;
2. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan bermerk atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.

GAMBAR 7.3
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2026

Secara nasional, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 93,22% (Gambar 7.3). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu Provinsi DKI Jakarta (99,98%), Bali (98,75%), dan DI Yogyakarta (97,33%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan (32,89%), Bengkulu (70,47%), dan Papua Selatan (71,28%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.3.

TABEL 7.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2025

No	Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Provinsi
1	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	57,61	28,31	45,66
2	Leding	10,18	7,71	9,17
3	Sumur Bor/Pompa	16,65	18,19	17,28
4	Sumur Terlindung	9,93	18,42	13,40
5	Sumur Tak Terlindung	0,67	3,12	1,67
6	Mata Air Terlindung, Air Hujan	4,44	18,88	10,33
7	Mata Air Tak terlindung, Air Permukaan, Lainnya	0,51	5,37	2,49

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik , 2025

Data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS (2025), sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerk, air isi ulang (45,66%), sumur bor/pompa (17,28%), dan sumur terlindung (13,40%). Pada daerah perkotaan maupun perdesaan, air kemasan bermerk, air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan, untuk perkotaan sebesar 57,61% dan untuk perdesaan sebesar 28,31%. Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1

B. SANITASI

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Dimana pengelolaan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan dampak kesehatan seperti diare, infeksi pernapasan akut, penyakit cacing ditularkan melalui tanah dan kurang gizi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019 telah disampaikan bahwa 53% sungai tercemar berat dan pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) besar (Citarum, Ciliwung dan Cisadane) sebesar 53-84% tercemar air limbah domestik. Dalam data WHO 2019 telah menjelaskan bahwa 1,4 juta kematian dapat dicegah jika akses terhadap WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*) aman dan >1 juta kematian akibat diare yang disebabkan WASH yang tidak aman. Selain itu dalam data WHO 2022, sekitar 10% dari populasi masyarakat dunia mengkonsumsi makanan yang teririgasi dari air limbah.

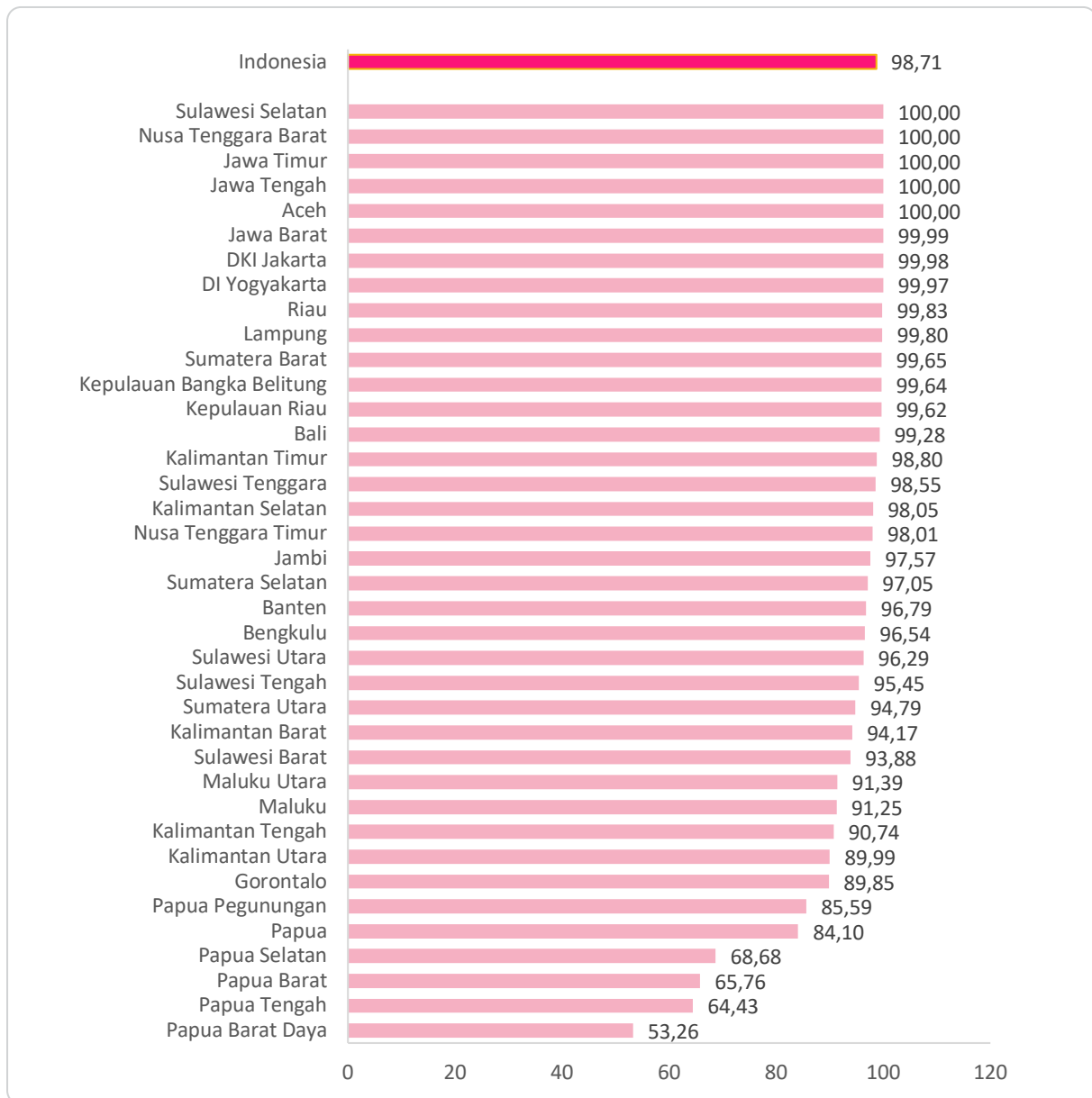
Selain berpengaruh kepada kesehatan, sektor sanitasi juga memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman Menuju Akses Aman dan Layanan Sanitasi Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas 2023, telah menyebutkan bahwa dalam riset telah menunjukkan bahwa air minum dan sanitasi yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat pertumbuhan GDP secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa apabila pembangunan sektor sanitasi hanya dikerjakan seadanya (*business as usual*), GDP bisa turun hingga 0,03% pada tahun 2030 dan 0,17% pada 2045. Namun jika upaya dikerahkan secara optimal, sektor ini berpotensi menaikkan GDP sebesar 0,81% di tahun 2030 dan 1,17% di tahun 2045. Sebaliknya, jika pemerintah tidak melakukan tindakan atau hanya mengambil langkah seadanya, GDP bisa merosot hingga 7,3% di tahun 2045. Sedangkan intervensi yang memadai dapat meningkatkan GDP sebesar 3,2% dengan 1,1% kontribusi dari penanganan penyediaan air minum dan sanitasi.

Salah satu hal yang mendukung pemenuhan akses sanitasi yaitu pendekatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Dimana outputnya terdiri dari lima pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

Dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029, indikator STBM menjadi target yang mendukung pemenuhan akses sanitasi dengan beberapa indikator adalah sebagai berikut:

1. Rumah Tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka
2. Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
3. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan Pengelolaan Sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)
4. Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

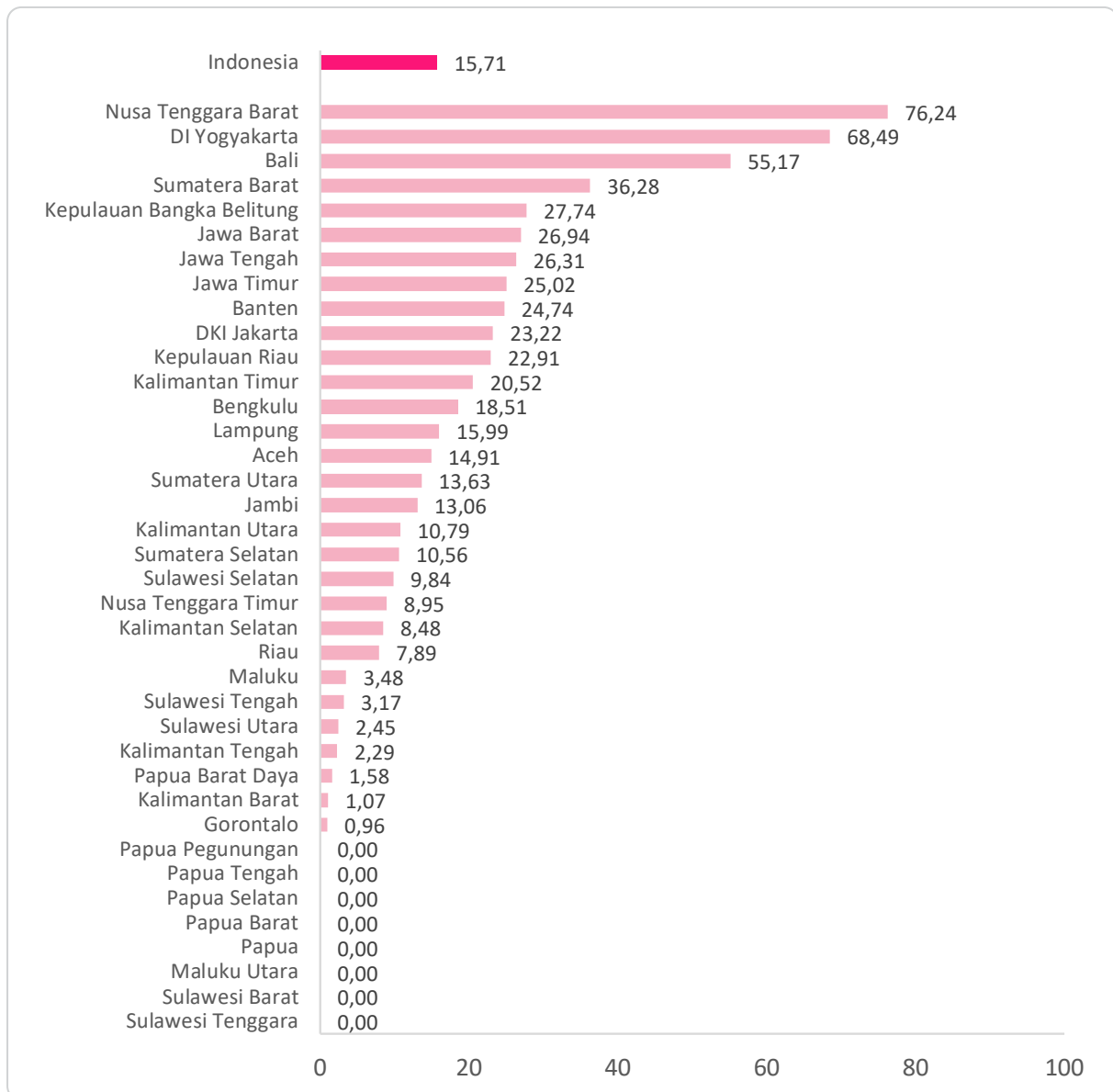
GAMBAR 7.4
PERSENTASE KEPALA KELUARGA (KK) DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI MENURUT
PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Persentase kepala keluarga (KK) dengan akses terhadap fasilitas sanitasi di Indonesia tahun 2025 adalah 98,71%. Terdapat 5 (lima) Provinsi dengan persentase kepala keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi mencapai 100% yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh. Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat Daya (53,26%), Papua Tengah (64,43%), dan Papua Barat (65,76%). Rincian lengkap mengenai kepala keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dapat dilihat pada Lampiran 7.4.

GAMBAR 7.5
PERSENTASE DESA/KELURAHAN STBM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, persentase desa/kelurahan STBM tahun 2025 adalah 15,71% atau sebanyak 13.160 desa/kelurahan. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (76,24%), DI Yogyakarta (68,49%) dan Bali (55,17%), sedangkan Provinsi terendah desa/kelurahan STBM adalah Provinsi Gorontalo (0,96%), Kalimantan Barat (1,07%), dan Papua Barat Daya (1,58%). Namun masih terdapat 8 (delapan) Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang Desa/kelurahannya belum 100% terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka, dan 75% mengimplementasikan 3 pilar lainnya (21,1%). Selain indikator desa/kelurahan STBM, terdapat indikator kabupaten/kota STBM dengan capaian tahun 2025 adalah sebanyak 30 kabupaten/kota atau 5,84%. Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan STBM dan kabupaten/kota STBM per provinsi tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.5.

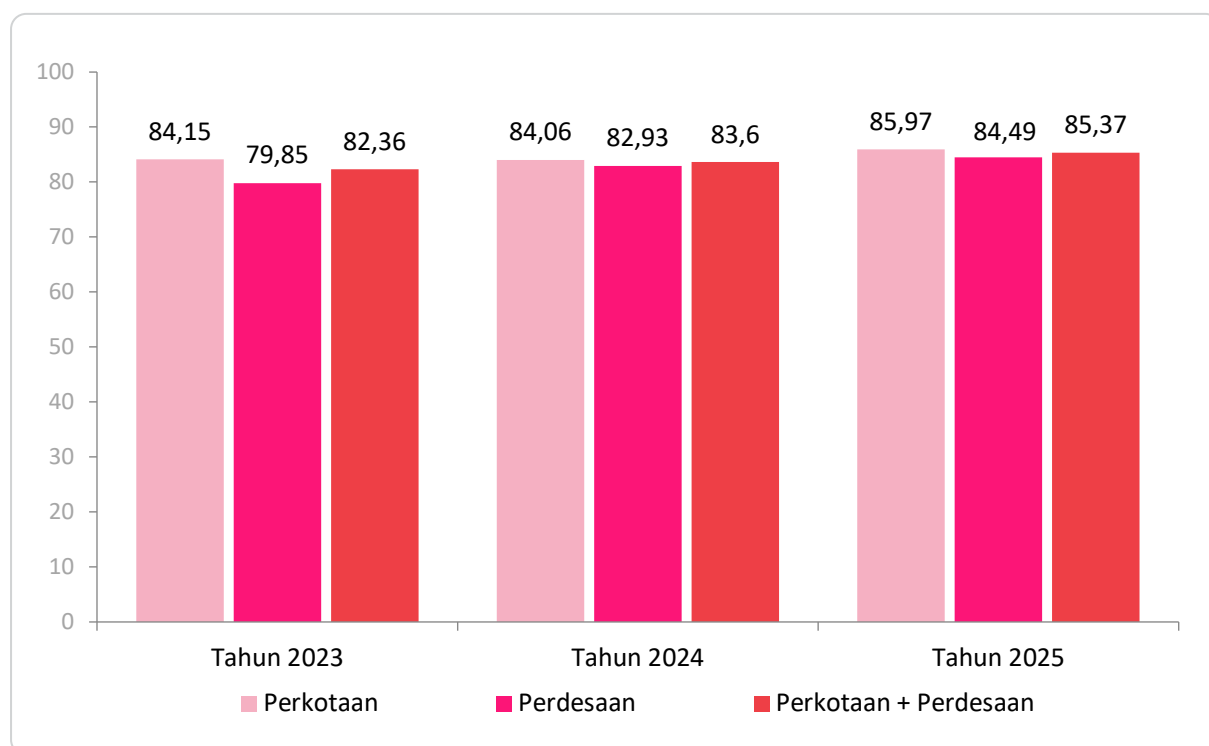
2. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Untuk memenuhi hak asasi manusia, setiap penduduk idealnya memiliki akses ke sanitasi layak. Menurut Statistik Indonesia, BPS (2026), definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain:

1. Kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Instalasi/ Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal.
2. Untuk daerah perdesaan, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke tangki septik atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL) atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, ataupun di MCK Komunal.

Pentingnya akses sanitasi layak di semua kalangan masyarakat berkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

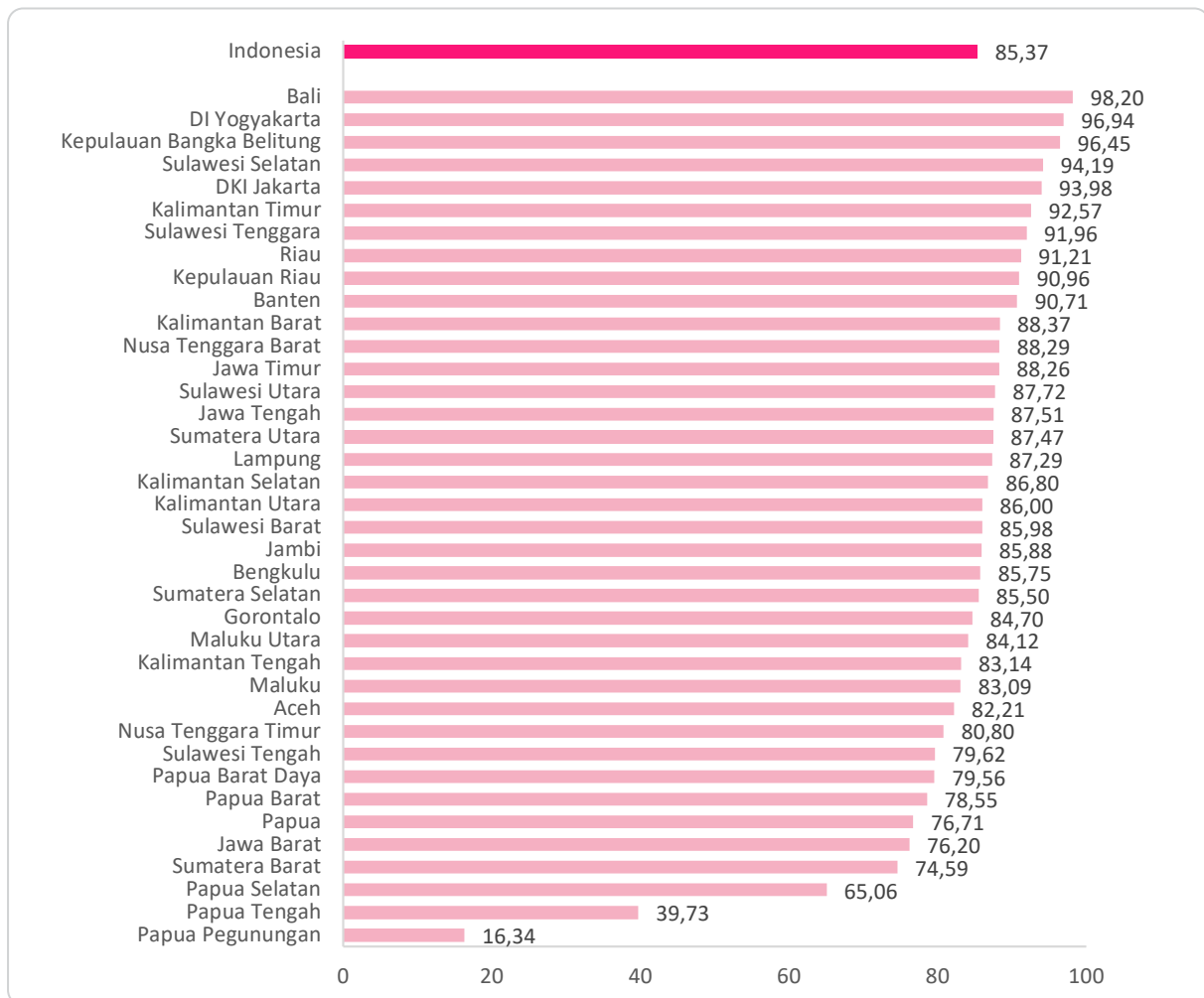
GAMBAR 7.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 7.6 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2025 sebesar 3,01%. Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (85,97%) dan (84,49%). Selama periode ini, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar (4,64%) sedangkan daerah perkotaan (1,82%).

GAMBAR 7.7
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2026

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 85,37% (Gambar 7.7). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu Provinsi Bali (98,20%), DI Yogyakarta (96,94%), dan Kepulauan Bangka Belitung (96,45%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (16,34%), Papua Tengah (39,73%), dan Papua Selatan (65,06%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.6.

C. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum. TFU merupakan lokasi dengan intensitas interaksi masyarakat yang tinggi sehingga berpotensi menjadi media penularan penyakit dan sumber risiko kesehatan lingkungan

apabila tidak dikelola sesuai persyaratan kesehatan. Upaya pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pada TFU menjadi bagian penting dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

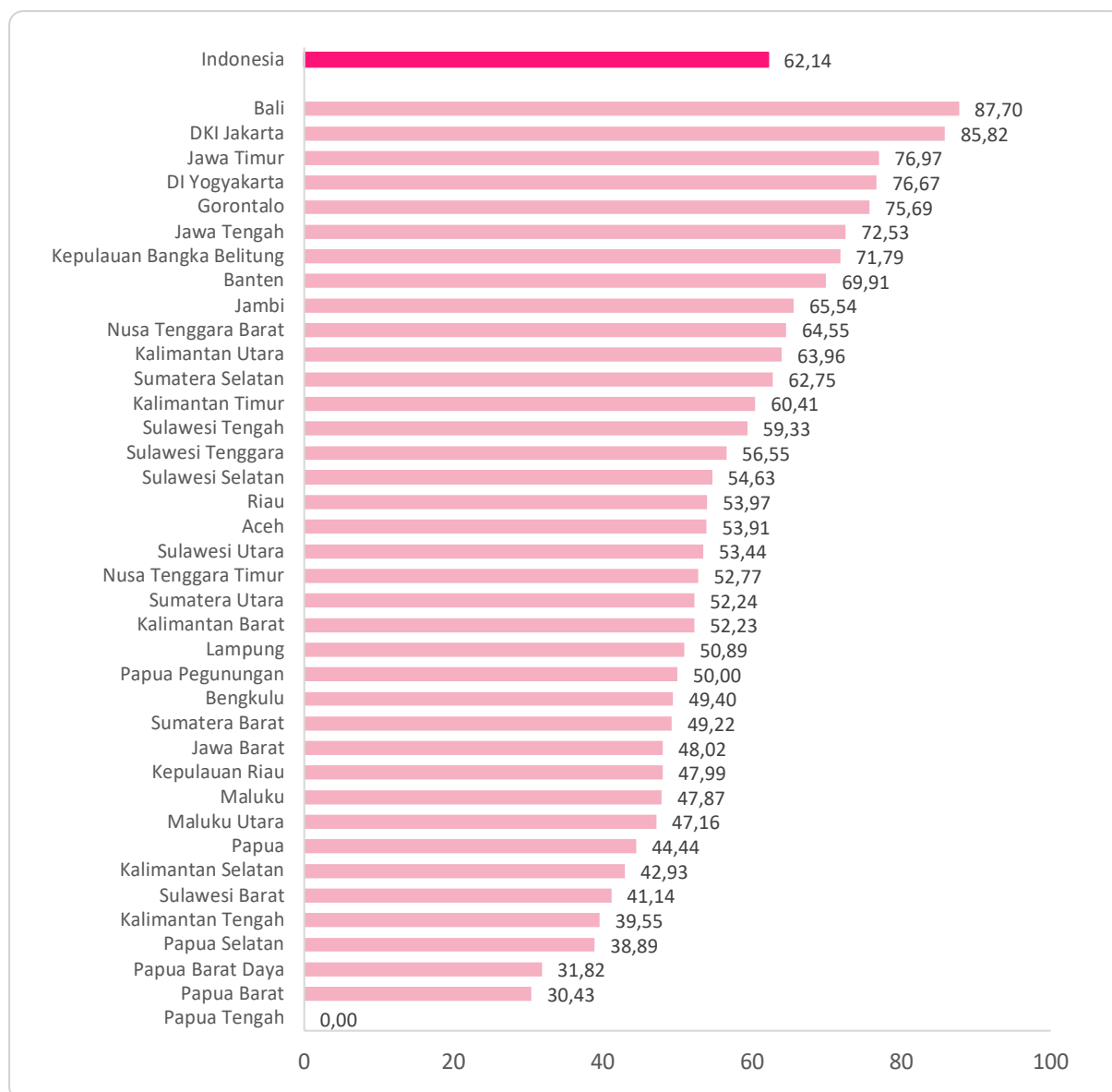
Penyelenggaraan TFU dibagi menjadi dua, yaitu yang berizin dan berbasis risiko, seperti hotel/akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, tempat olahraga dan TFU untuk kepentingan publik dan sosial seperti pelayanan Kesehatan, satuan Pendidikan tempat ibadah, sarana transportasi darat, laut, dan udara, termasuk kereta api, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, serta pos lintas batas negara, pasar dan pusat perbelanjaan; dan tempat dan fasilitas umum lainnya.

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan dilakukan pengukuran kualitas media lingkungan (minimal pengukuran kualitas udara dalam ruang) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Ruang lingkup pengawasan diprioritaskan pada 6 lokus TFU sesuai dengan indikator Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025 – 2029, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 6 (enam) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Pasar yang dimaksud adalah pasar rakyat yang terdaftar di Kementerian Perdagangan/ Dinas Perdagangan Kabupaten/kota. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola, oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Ketentuan mengenai pasar rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
2. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang terdaftar di Kemendikbud/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Akomodasi yang dimaksud adalah tempat menginap sementara bagi wisatawan atau tamu yang termasuk dalam klasifikasi PB UMKU sesuai Permenkes 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
4. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
6. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (*Sanitarian Kit*) yang tersedia di Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MEMENUHI
SYARAT IKL DAN UJI KUALITAS LINGKUNGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, persentase TFU yang dilakukan pengawasan memenuhi syarat IKL dan uji kualitas lingkungan pada tahun 2025 adalah 62,14%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Bali (87,70%), DKI Jakarta (85,82%), dan Jawa Timur (76,97%). Provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Papua Barat (30,43%), Papua Barat Daya (31,82%), dan Papua Selatan (38,89%). Terdapat 1 (satu) Provinsi Papua Tengah yang belum melaporkan pengawasan TFU sesuai standar. Rincian lengkap tentang persentase TFU yang dilakukan pengawasan memenuhi syarat IKL dan uji kualitas lingkungan tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.7.

D. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam mempertahankan kehidupan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pangan yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas pangan yang baik agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk kejadian keracunan pangan. Upaya menjamin keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan pada seluruh rantai pengelolaan pangan di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjamin keamanan pangan adalah penerapan higiene dan sanitasi pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Tempat Pengelolaan Pangan merupakan sarana yang digunakan untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan, dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. TPP meliputi berbagai jenis usaha, antara lain restoran, jasa boga untuk periode tertentu maupun *event* tertentu, depot air minum, rumah makan, warung makan, kedai makanan, rumah minum atau kafe, kawasan pariwisata, penyedia makanan dan minuman keliling atau tempat tidak tetap, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, serta tempat produksi es.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan olahan siap saji yang aman, pemerintah terus memperkuat regulasi di bidang keamanan pangan. Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Peraturan tersebut mengatur standar penyelenggaraan higiene sanitasi pangan, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Label Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan (Label HSP) sebagai bentuk pengakuan bahwa Tempat Pengelolaan Pangan telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan keamanan pangan.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan bukti bahwa suatu Tempat Pengelolaan Pangan telah memenuhi standar higiene sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menghasilkan pangan olahan siap saji yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, Label Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan menjadi bentuk informasi kepada masyarakat bahwa tempat pengelolaan pangan telah memenuhi persyaratan dasar higiene sanitasi berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.

Dalam rangka memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Tempat Pengelolaan Pangan wajib memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu:

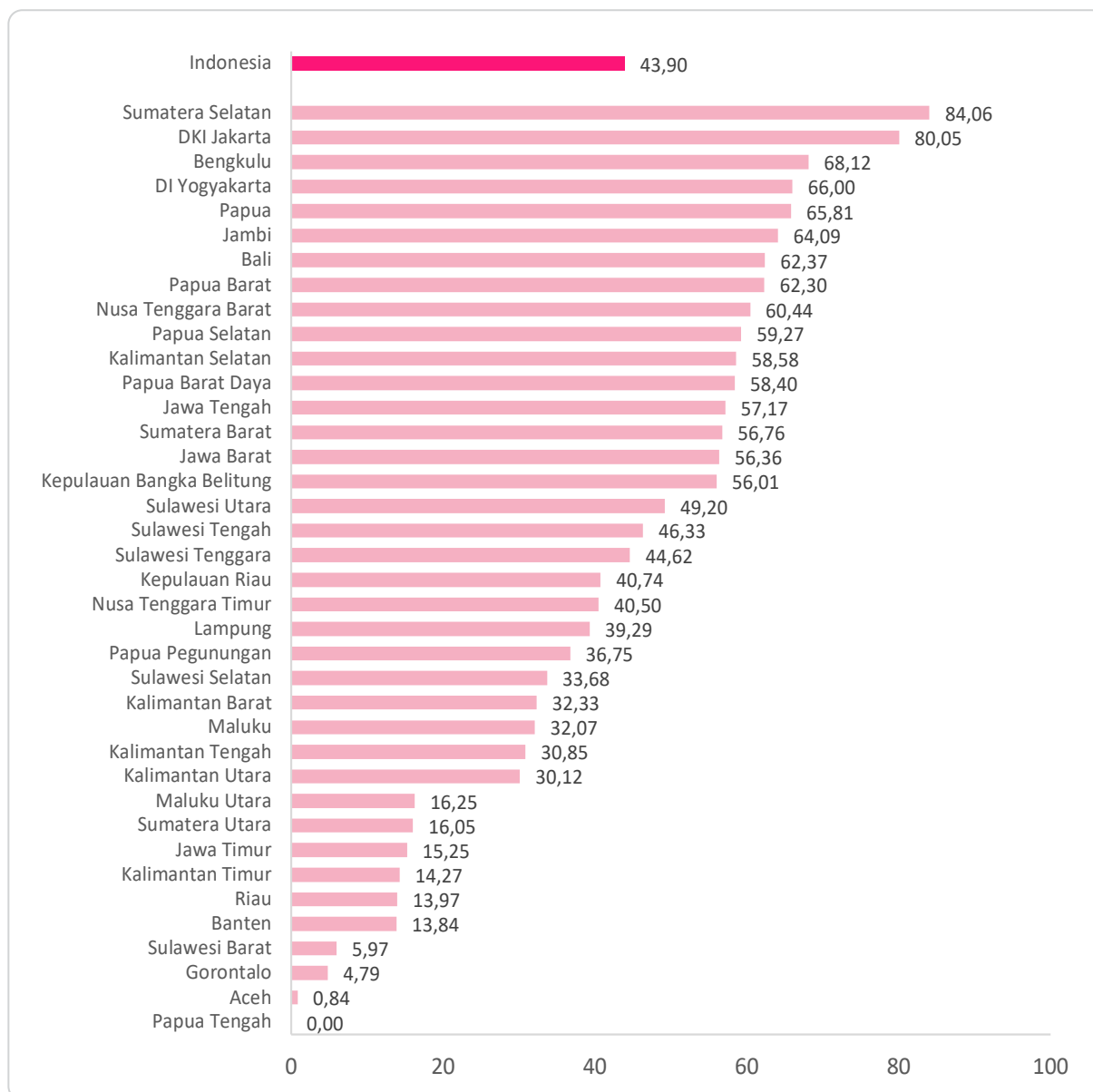
1. Memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan oleh petugas Puskesmas.
2. Memiliki penjamah pangan yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat kursus keamanan pangan.
3. Memenuhi persyaratan hasil pemeriksaan sampel pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Tempat Pengelolaan Pangan yang termasuk kategori wajib memiliki Label Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan (Label HSP) harus memenuhi hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang memenuhi syarat serta memastikan seluruh penjamah pangan telah memperoleh penyuluhan mengenai keamanan pangan olahan siap saji.

Untuk menjamin keberlanjutan penerapan higiene sanitasi pangan, pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas melalui kegiatan inspeksi, pembinaan, dan monitoring terhadap Tempat Pengelolaan Pangan di wilayah kerjanya. Sementara itu, pengawasan internal menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggung jawab Tempat Pengelolaan Pangan melalui penerapan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP) yang disusun sesuai karakteristik usahanya. SSOP dilaksanakan setiap hari sebagai instrumen penilaian mandiri untuk memastikan seluruh aspek higiene sanitasi tetap terjaga serta sebagai dasar dalam melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal yang berjalan secara sinergis diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) terhadap standar higiene sanitasi, menurunkan risiko kontaminasi pangan, mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan olahan siap saji. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan dapat mengajukan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau Label Pengawasan Higiene (HSP) Sanitasi Pangan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) SIAP SAJI YANG MEMENUHI SYARAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, persentase TPP siap saji yang memenuhi syarat pada tahun 2025 adalah 43,90%. Provinsi dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat adalah Provinsi Sumatera Selatan (84,06%), DKI Jakarta (80,05%), dan Bengkulu (68,12%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Aceh (0.84%), Gorontalo (4,79%), dan Sulawesi Barat (5,97%). Terdapat 1 (satu) Provinsi yang belum melaporkan capaian TPP yang memenuhi syarat yaitu Provinsi Papua Tengah. Rincian lengkap tentang persentase TPP siap saji yang memenuhi syarat tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.8.

E. Pengukuran Kualitas Udara Dalam Ruang

Pemerintah Indonesia telah menjadikan kualitas udara sebagai salah satu Visi Negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu terwujudnya negara yang berkelanjutan. Hal ini ditindaklanjuti dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai salah satu agenda Prioritas Nasional (PN) 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Salah satu arah kebijakan dalam prioritas nasional tersebut adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang dilakukan melalui serangkaian intervensi, termasuk peningkatan pengelolaan kualitas udara. Kementerian Kesehatan menindaklanjuti arahan RPJMN tersebut dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan memasukkan kualitas udara dalam ruang sebagai salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2025-2029.

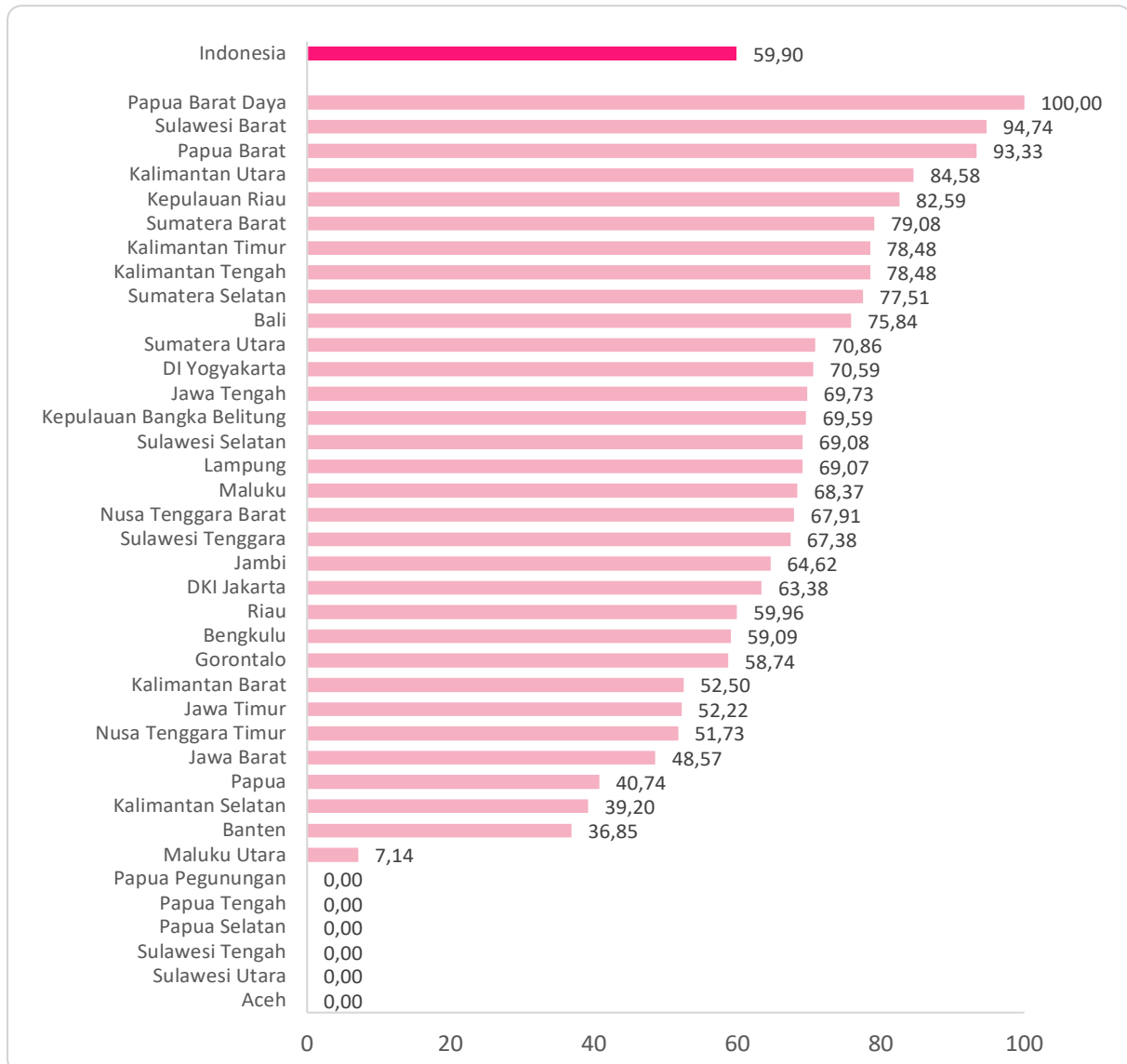
Dalam pengelolaan kualitas udara, Kementerian Kesehatan berperan dalam 4 (empat) tugas pokok dan fungsi, yaitu: (1) Pengendalian Emisi, (2) Pemantauan Kualitas Udara, (3) Pemantauan Dampak, dan (4) Pengelolaan Dampak. Dalam aspek Pemantauan Kualitas Udara, Kementerian Kesehatan melakukan monitoring dan surveilans kualitas udara dalam ruang terutama pada hunian/ rumah tinggal. Termasuk di dalam hal ini adalah melakukan surveilans dampak kesehatan dan faktor-faktor risikonya. Surveilans kualitas udara dalam ruang dan dampak kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pelaksanaan Surveilans Kualitas Udara Dalam Ruang (SKUDR) di tingkat daerah dilaksanakan melalui Tier 1, yaitu oleh Puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengukuran kualitas udara dalam ruang pada rumah tangga sasaran, wawancara kepada responden, serta observasi terhadap kondisi fisik rumah, perilaku penghuni, dan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas udara dalam ruang. Data yang dikumpulkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor risiko pencemaran udara dalam ruang sekaligus dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

Pengukuran pada Tier 1 difokuskan pada parameter dasar kualitas udara dalam ruang yang dapat diukur menggunakan sanitarian yang dimiliki Puskesmas, yaitu suhu, kelembapan, laju ventilasi, partikulat halus ($PM_{2.5}$), dan karbon monoksida (CO). Selain pengukuran kualitas udara, petugas juga mengumpulkan informasi mengenai riwayat penyakit anggota rumah tangga, kondisi fisik bangunan, sumber pencemar udara dalam ruang, perilaku pencegahan, serta perilaku berisiko seperti kebiasaan merokok di dalam rumah, penggunaan bahan bakar untuk memasak, penggunaan insektisida, hingga kebiasaan membakar sampah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan risiko gangguan kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif.

Pelaksanaan SKUDR Tier 1 dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun pada seluruh lokasi yang telah ditetapkan di 514 kabupaten/kota. Pengukuran pertama dilaksanakan pada periode April–Juni sebagai pengumpulan data dasar (*baseline*), sedangkan pengukuran kedua dilakukan pada bulan November sebagai tindak lanjut untuk mengevaluasi hasil intervensi dan perubahan kondisi kualitas udara dalam ruang. Hasil surveilans tersebut menjadi indikator capaian daerah sekaligus dasar bagi Puskesmas dan pemerintah daerah dalam merencanakan intervensi kesehatan lingkungan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat upaya pengendalian faktor risiko pencemaran udara dalam ruang.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE HASIL PENGUKURAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG MEMENUHI SYARAT MENURUT
PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, persentase hasil pengukuran kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat pada tahun 2025 adalah 59,90%. Terdapat 1 (satu) Provinsi dengan persentase hasil pengukuran kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat mencapai 100% yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Maluku Utara (7,14%), Banten (36,85%) dan Kalimantan Selatan (39,20%). Namun masih terdapat 6 (enam) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang belum melaporkan pengukuran kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat. Rincian lengkap mengenai hasil pengukuran kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat pada tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.9.

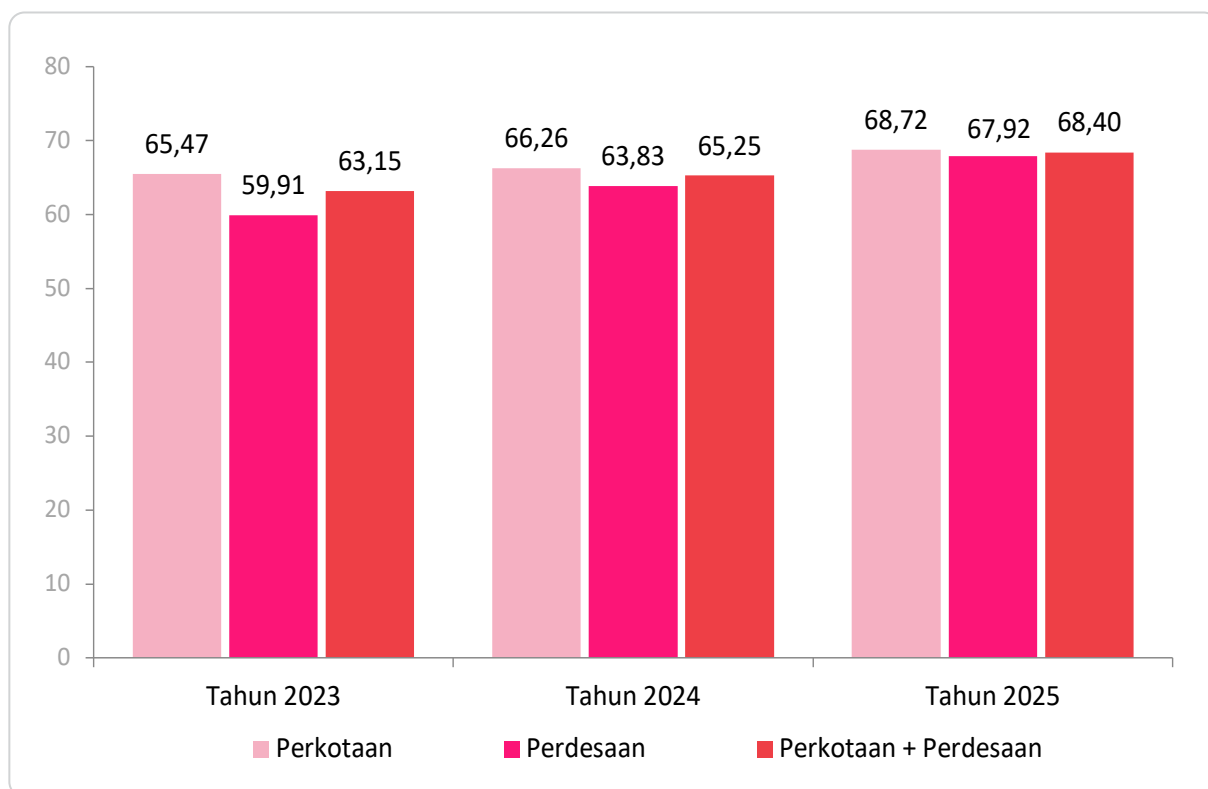
F. PERUMAHAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Menurut WHO (*World Health Organization*), pengertian perumahan (*housing*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Klasifikasi rumah layak huni menurut Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS 2025, tempat tinggal dikatakan rumah layak huni jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*)
Ketahanan bangunan dilihat dari penggunaan bahan bangunan utama atap, dinding, dan lantai terluas bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kelayakan sebagai berikut:
 - a. Bahan bangunan utama atap layak meliputi beton, genteng, seng, atau kayu/sirap.
 - b. Bahan bangunan utama dinding layak meliputi tembok, plesteran anyaman bambu/kawat dan kayu/papan/ batang kayu dan
 - c. Bahan bangunan utama lantai layak meliputi marmer/granit, keramik/ubin/tegel/teraso, parket/vinil/karpet, kayu/papan, atau semen/bata merah.
2. Kecukupan luas lantai (*sufficient living area*) dilihat dari luas lantai per kapita minimal bangunan tempat tinggal dengan cut off minimal 7,20 m². Di mana luas lantai per kapita merupakan luas lantai bangunan tempat tinggal dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.
3. Memiliki Akses terhadap sumber air minum layak
4. Memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

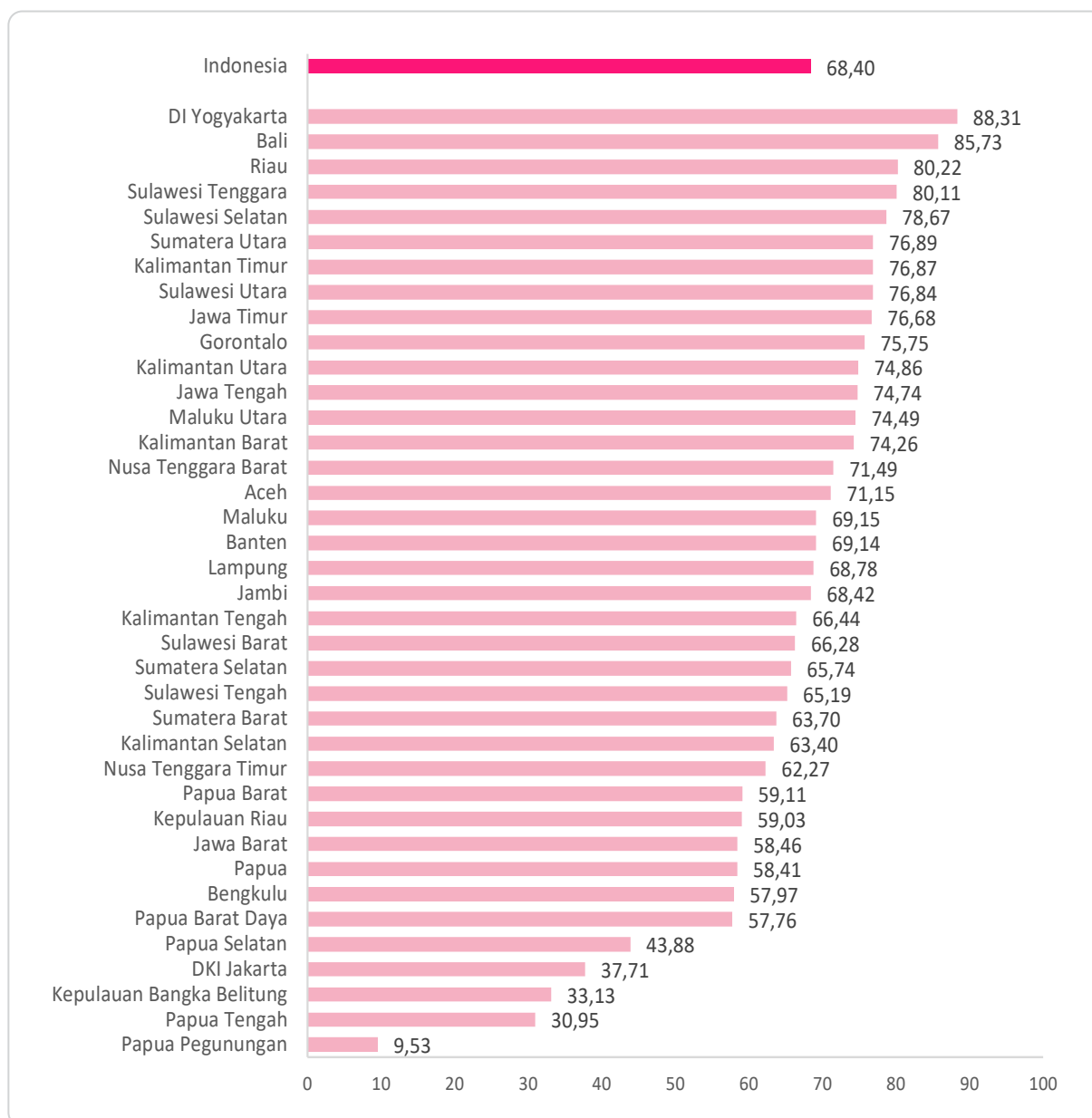
GAMBAR 7.11
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Gambar 7.11 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni pada tahun 2025 sebesar 68,40%. Persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (68,72%) dan (67,92%).

GAMBAR 7.12
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025.



Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, Badan Pusat Statistik, 2025.

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 68,40% (Gambar 7.12). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak yaitu Provinsi DI Yogyakarta (88,31%), Bali (85,73%) dan Riau (80,22%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan (9,53%), Papua Tengah (30,95%), dan Kepulauan Bangka Belitung (33,13%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.10.

G. KABUPATEN/KOTA SEHAT

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah bentuk implementasi pendekatan Kota Sehat dari WHO sebagai salah satu strategi dengan implementasi dasar mengedepankan hak atas kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan sosial, kesetaraan gender, solidaritas, inklusi sosial, dan pembangunan kota berkelanjutan melalui penyusunan kebijakan, strategi, dan program lokal. Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam PMK nomor 12 tahun 2025, indikator jumlah Kabupaten/Kota Sehat didefinisikan sebagai Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan dengan nilai minimal capaian 70% untuk setiap tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.

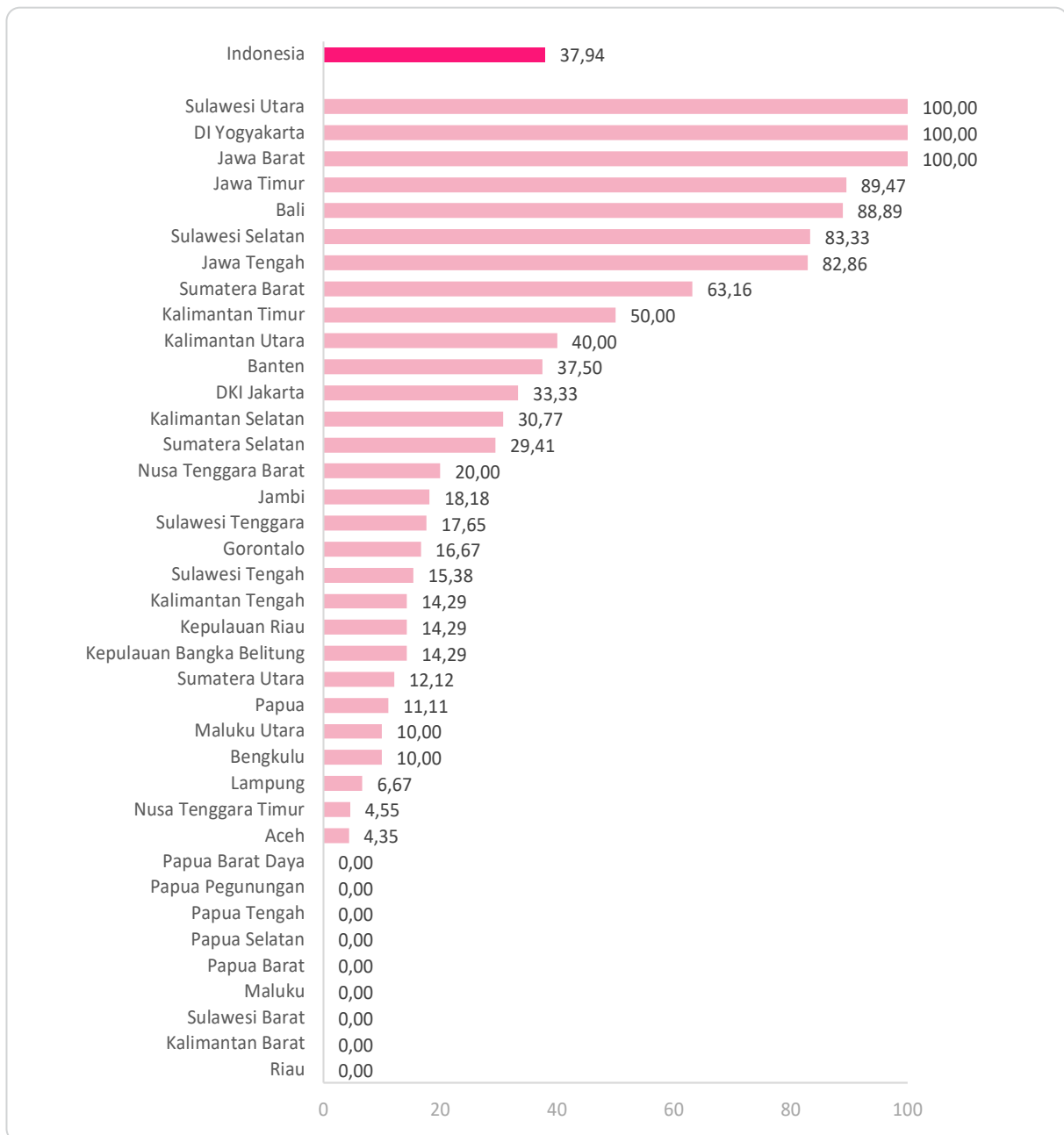
Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “Forum Kabupaten/Kota Sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, tatanan KKS dikelompokkan menjadi:

1. Kehidupan masyarakat sehat mandiri;
2. Permukiman dan fasilitas umum;
3. Satuan pendidikan;
4. Pasar;
5. Perkantoran dan perindustrian;
6. Pariwisata;
7. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
8. Perlindungan sosial; dan
9. Penanggulangan bencana.

Kabupaten/Kota yang memenuhi implementasi keseluruhan tatanan akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi usulan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti penghargaan ini dilakukan oleh Tim Pembina KKS Provinsi sebelum dikirimkan ke Pusat. Penghargaan memiliki 3 kategori, yaitu penghargaan Swasti Saba Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi minimal 80% Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 71% -80%, Swasti Saba Wiwerda diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi minimal 90% Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 81%-90%, Swasti Saba Wistara diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi 100% Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan minimal 91%.

GAMBAR 7.13
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 195 kabupaten/kota (37,94%) . Terdapat 3 (tiga) provinsi dengan persentase Kabupaten/Kota Sehat telah mencapai 100% adalah Provinsi Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Jawa Barat. Provinsi dengan persentase terendah kabupaten/kota Sehat yaitu Provinsi Aceh (4,35%), Nusa Tenggara Timur (4,55%) dan Lampung (6,67%). Namun masih terdapat 9 (sembilan) Provinsi adalah Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya belum melaporkan penyelenggaraan KKS. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS pada tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.11.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya:

1. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan tatanan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
2. Kurang optimalnya peran dari tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor atau OPD untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat.
4. Masih kurangnya advokasi kegiatan KKS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait untuk memperkuat implementasi penyelenggaraan KKS.

H. FASYANKES YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN LINGKUNGAN

Fasilitas layanan kesehatan merupakan tempat yang mempertemukan orang sehat dengan orang sakit. Pasien, petugas kesehatan, dan juga pengunjung (keluarga pasien) memiliki risiko terinfeksi bakteri/virus sumber penyakit melalui berbagai sumber penularan. Aspek kesehatan lingkungan yang terdiri dari air, sanitasi, hygiene, pengelolaan limbah, dan kebersihan lingkungan di Fasyankes sangat berpotensi menjadi sumber penularan penyakit jika kualitasnya tidak diperhatikan. Fasyankes dengan sumber air aman yang berkualitas buruk maka akan mengancam kesehatan masyarakat dan bisa menyebabkan terjadinya water borne disease. Potensi lain seperti penyebaran bakteri/virus yang bersumber dari feses dan urin manusia di toilet Fasyankes serta penyebaran bakteri dari limbah medis yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan bagi tenaga kesehatan, pasien, dan juga pengunjung Fasyankes. Padahal seharusnya Fasyankes seperti Puskesmas dan rumah sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Proses pencatatan dan pelaporan memiliki peran kunci dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi yang relevan tentang kondisi layanan kesehatan lingkungan di Fasyankes yang ada. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Kelola Limbah Medis (SIKELIM) sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan layanan Kesehatan lingkungan di Fasyankes. Kompilasi data meliputi layanan kesehatan lingkungan di Fasyankes yaitu layanan air, sanitasi, higiene, pengelolaan limbah (limbah B3, limbah kimia, limbah infeksius, limbah Covid-19, limbah merkuri dan 38 logam berat lainnya, limbah beracun, serta limbah cair dan domestik), dan kebersihan lingkungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia.

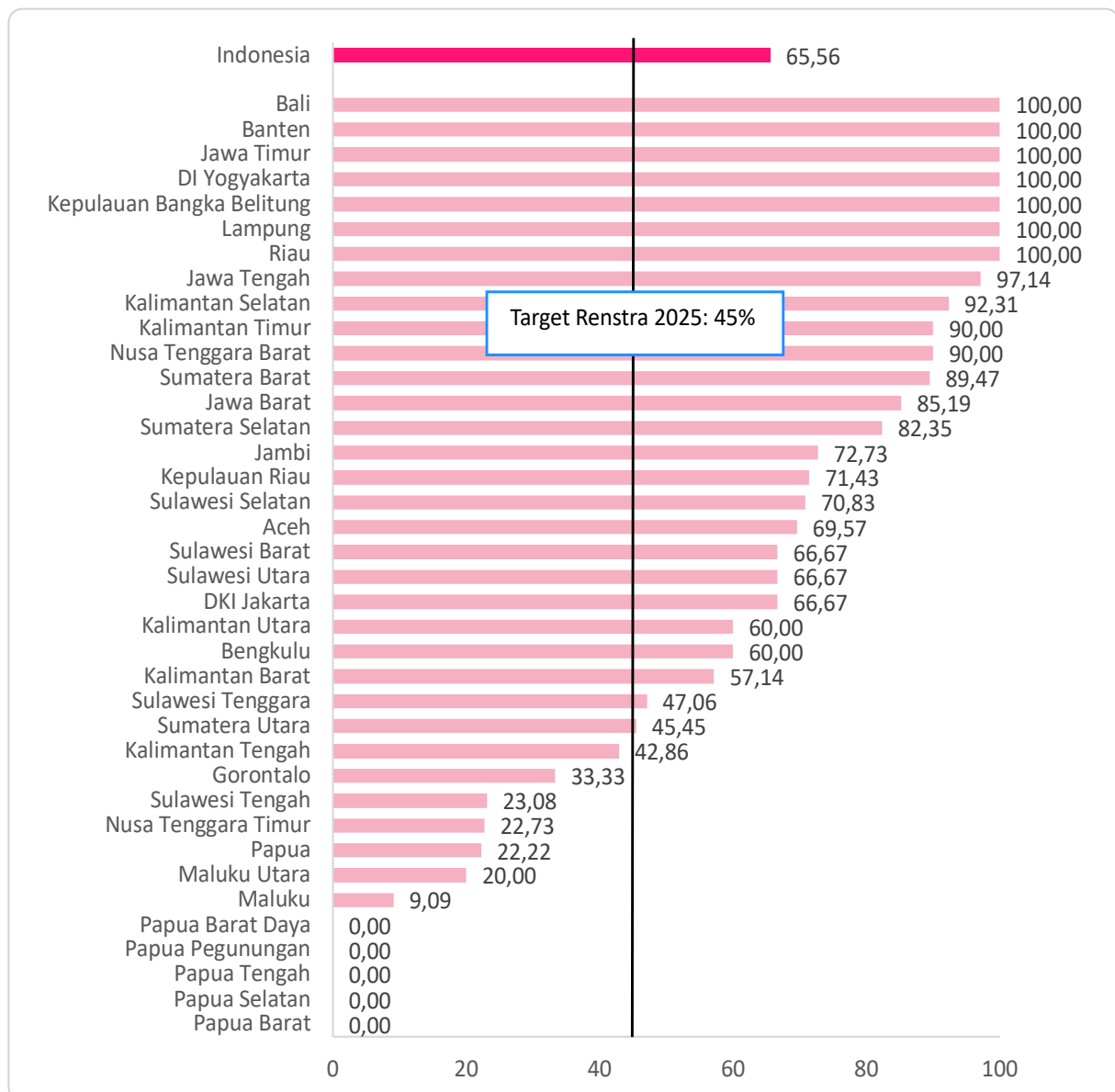
Standar layanan kesehatan lingkungan di Fasyankes menyesuaikan dengan pertanyaan kesehatan lingkungan kunci yang ada di SIKELIM dibedakan menjadi 4 tingkatan layanan, yaitu layanan paripurna, layanan dasar, layanan terbatas, dan tidak ada layanan. Setiap Fasyankes yang mengakses SIKELIM wajib mengisi penilaian kesehatan lingkungan kunci untuk mengetahui tingkatan/standar kualitas layanan kesehatan lingkungan di Fasyankesnya masing-masing.

Untuk indikator kinerja kegiatan yaitu Kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan dengan definisi operasional jumlah kumulatif

kabupaten/kota yang fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) minimal 50% fasyankes yang memenuhi layanan air, sanitasi, kelola limbah, higiene dan kebersihan sesuai standar peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, target Renstra Kabupaten/Kota dengan Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan sebesar 45%. Sedangkan capaian Kabupaten/Kota dengan Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan tahun 2025 sebesar 65%, melebihi target yang telah ditetapkan.

GAMBAR 7.14
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN FASYANKES YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN LINGKUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Secara nasional, persentase kabupaten/kota dengan Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan sebesar 65,56% . Provinsi yang belum mencapai target indikator 45%

sebanyak 7 (tujuh) Provinsi yaitu Provinsi Maluku (9,09%), Maluku Utara (20,00%), Papua (22,22%), Nusa Tenggara Timur (22,73%), Sulawesi Tengah (23,08%), Gorontalo (33,33%) dan Kalimantan Tengah (42,86%). Masih terdapat 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya belum memenuhi Fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Rincian lengkap mengenai Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.12.

I. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

GERMAS merupakan berbagai upaya intervensi komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*. Melalui pembudayaan GERMAS, *continuum of care* dilakukan secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan aksi multisektor.

GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. GERMAS bertujuan menciptakan masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, lingkungan bersih, dan berkurangnya biaya berobat.

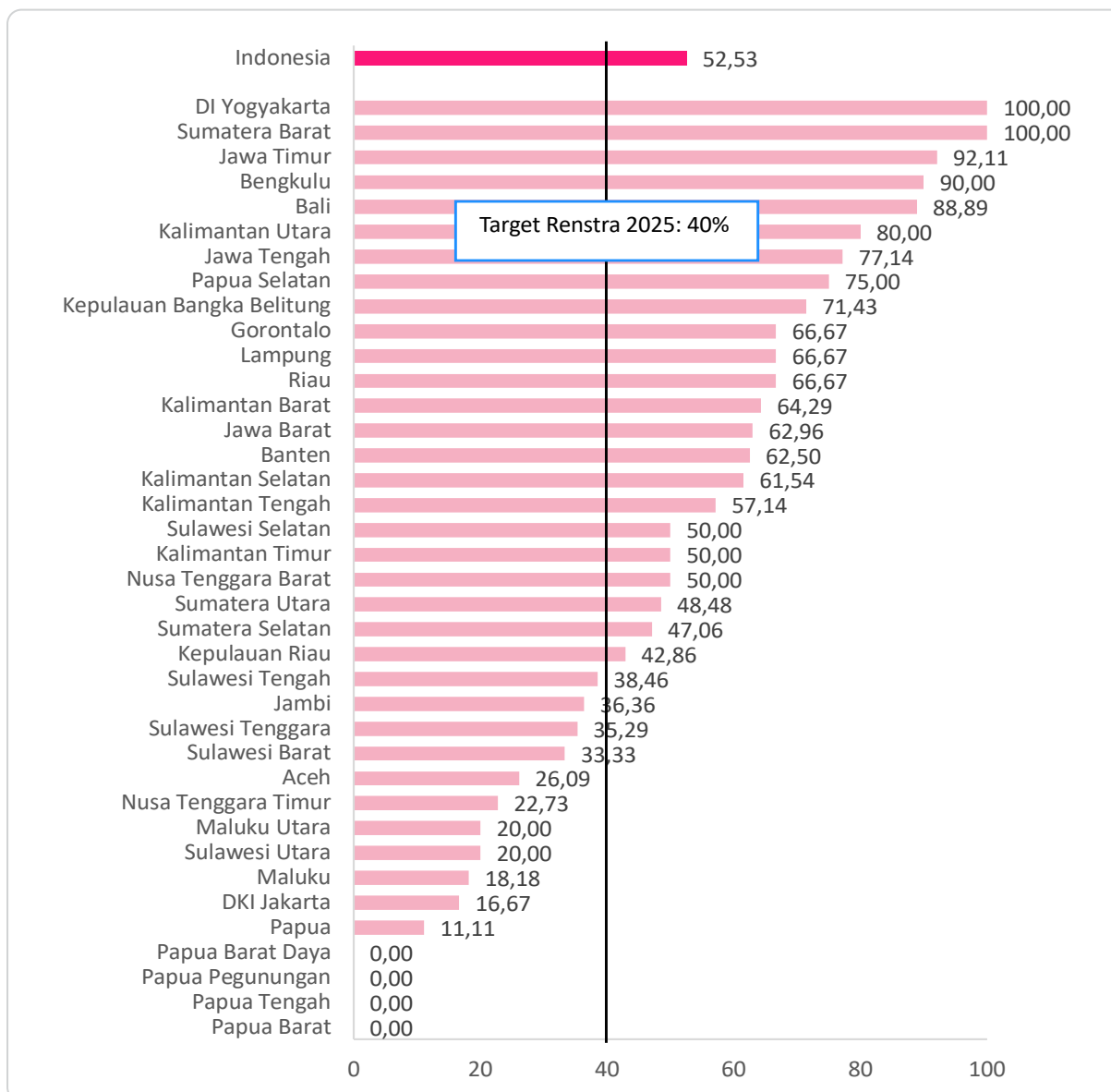
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS, meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas serta menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

GERMAS tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi yang kuat kepada lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat yang mampu menghasilkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Sejak dikeluarkannya Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 terdapat perubahan definisi operasional sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Presentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kampanye Germas Tema Prioritas: 1. Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan berwawasan kesehatan 2. Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung Germas, minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial.	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas): 1. Persentase kabupaten/kota melaksanakan kampanye/gerakan perilaku hidup sehat minimal 8 kali per tahun dengan melibatkan lintas sektor/swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial lainnya

GAMBAR 7.15
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE KESEHATAN (PEMBUDAYAAN GERMAS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas , Kemenkes RI, 2026

Pada tahun 2025, sebanyak 270 kabupaten/kota (52,53%) yang telah melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas) (Gambar 7.15). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2025 yaitu 40% kabupaten/kota yang telah melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas). Terdapat 11 (sebelas) provinsi yang belum mencapai target renstra 40% kab/kota yang telah melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas) . Terdapat 2 (dua) provinsi yang mencapai 100% Kabupaten/Kota yang telah melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas), sedangkan 4 Provinsi (Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya) belum dapat memenuhi kriteria melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas). Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota yang telah melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas) tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 7.13.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODM0Izl=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-desa--persen-.html> (9 Desember 2024)
- Badan Pusat Statistik, 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MiMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-menurut-klasifikasi-desa--persen-.html> (2 Desember 2024)
- Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/statictable/2023/03/31/2219/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html> (Akses Mei 2023)
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Pendidikan, Volume 13, 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2025. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*
- Badan Pusat Statistik, 2025. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV - 2024*
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2013. *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Dalam Negeri, 2025. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*

- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Permenkes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2024 Direktorat Kesehatan Jiwa, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2024. Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023: Potret Indonesia Sehat, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI, 2024. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025.
- Kementerian Kesehatan, 2023. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan\ Tahun 2015-2019*. Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman dan Tatalaksana Covid-19 Edisi 2 Agustus 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Pedoman Surveilans Campak - Rubela*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Petunjuk Teknis Surveilans Tetanus Neonatorum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Profil Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Laporan Perkembangan Kasus AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *National Health Accounts Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.181/M/KPT/2016: Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Sosial. 2022. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 241/HUK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan November Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnianigsih, Titik (2012). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. www.dpr.go.id
- Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 184*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4765/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- UNICEF. 2023. *Executive Summary, The State of The World's Children 2023, For Every Child Vaccination*, Florence, Italy: UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight.
- UNICEF. 2023. *Indonesia Targetkan Daerah dengan Cakupan Vaksinasi Rendah untuk Atasi Penurunan Imunisasi Anak*. [Online]. Available at : <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-targetkan-daerah-dengan-cakupan-vaksinasi-rendah-untuk-atasi-penurunan>. [Accessed 15 Mei 2023]
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases*.
- World Health Organization. *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication*.
- World Health Organization. 2021. *Global Tuberculosis Report 2021*. Geneva: WHO
- World Health Organization. 2018. *Tetanus*.
- <https://www.bps.go.id/>
- <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

* * *

LAMPIRAN



Lampiran 1.1

LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (juta jiwa/per km ²)
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Aceh	56.835,019	18	5	23	290	0	6500	2.825.512	2.800.448	5.625.960	100,89	98,99
2	Sumatera Utara	72.437,755	25	8	33	455	693	5417	7.922.846	7.862.993	15.785.839	100,76	217,92
3	Sumatera Barat	42.107,674	12	7	19	179	230	1035	2.979.709	2.934.587	5.914.296	101,54	140,46
4	Riau	89.900,780	10	2	12	172	271	1591	3.476.706	3.334.452	6.811.158	104,27	75,76
5	Jambi	49.023,037	9	2	11	144	171	1414	1.914.252	1.854.230	3.768.482	103,24	76,87
6	Sumatera Selatan	86.771,918	13	4	17	241	403	2856	4.542.623	4.385.892	8.928.515	103,57	102,90
7	Bengkulu	20.122,210	9	1	10	129	172	1341	1.091.256	1.046.788	2.138.044	104,25	106,25
8	Lampung	33.570,758	13	2	15	229	205	2446	4.857.474	4.665.439	9.522.913	104,12	283,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.670,225	6	1	7	47	84	309	795.194	755.627	1.550.821	105,24	93,03
10	Kepulauan Riau	8.170,375	5	2	7	80	144	275	1.123.787	1.089.669	2.213.456	103,13	270,91
11	DKI Jakarta	661,530	1	5	6	44	267	0	5.360.827	5.317.148	10.677.975	100,82	16.141,33
12	Jawa Barat	37.053,331	18	9	27	627	646	5311	25.682.117	25.076.886	50.759.003	102,41	1.369,89
13	Jawa Tengah	34.347,428	29	6	35	576	753	7810	19.203.434	19.030.499	38.233.933	100,91	1.113,15
14	DI Yogyakarta	3.170,363	4	1	5	78	46	392	1.870.142	1.911.407	3.781.549	97,84	1.192,78
15	Jawa Timur	48.055,876	29	9	38	666	773	7721	20.978.455	21.110.816	42.089.271	99,37	875,84
16	Banten	9.355,763	4	4	8	155	314	1238	6.369.698	6.167.738	12.537.436	103,27	1.340,08
17	Bali	5.582,827	8	1	9	57	80	636	2.234.555	2.226.712	4.461.267	100,35	799,11
18	Nusa Tenggara Barat	19.631,991	8	2	10	117	145	1021	2.878.746	2.852.361	5.731.107	100,93	291,93
19	Nusa Tenggara Timur	46.378,105	21	1	22	315	305	3137	2.871.257	2.871.307	5.742.564	100,00	123,82
20	Kalimantan Barat	147.018,063	12	2	14	174	99	2046	2.957.074	2.808.956	5.766.030	105,27	39,22
21	Kalimantan Tengah	153.430,363	13	1	14	136	139	1432	1.467.139	1.377.853	2.844.992	106,48	18,54
22	Kalimantan Selatan	37.125,426	11	2	13	156	144	1872	2.185.001	2.138.329	4.323.330	102,18	116,45
23	Kalimantan Timur	126.951,758	7	3	10	105	197	841	2.204.410	2.063.188	4.267.598	106,84	33,62
24	Kalimantan Utara	69.900,886	4	1	5	55	35	447	393.130	356.237	749.367	110,36	10,72
25	Sulawesi Utara	14.488,429	11	4	15	171	332	1507	1.388.228	1.333.210	2.721.438	104,13	187,84
26	Sulawesi Tengah	61.496,983	12	1	13	177	175	1842	1.617.220	1.538.882	3.156.102	105,09	51,32
27	Sulawesi Selatan	45.323,975	21	3	24	313	793	2266	4.751.882	4.811.245	9.563.127	98,77	210,99
28	Sulawesi Tenggara	36.139,303	15	2	17	221	377	1908	1.436.259	1.400.479	2.836.738	102,55	78,49
29	Gorontalo	12.024,982	5	1	6	77	72	657	626.063	616.175	1.242.238	101,60	103,30
30	Sulawesi Barat	16.590,667	6	0	6	69	73	575	772.667	752.668	1.525.335	102,66	91,94
31	Maluku	46.133,832	9	2	11	119	35	1200	996.167	974.396	1.970.563	102,23	42,71
32	Maluku Utara	31.465,977	8	2	10	118	118	1067	704.000	669.824	1.373.824	105,10	43,66
33	Papua	81.383,315	8	1	9	105	51	948	560.919	512.718	1.073.637	109,40	13,19
34	Papua Barat	60.308,590	7	0	7	91	21	803	308.424	279.221	587.645	110,46	9,74
35	Papua Selatan	117.858,969	4	0	4	82	13	677	285.041	264.610	549.651	107,72	4,66
36	Papua Tengah	61.079,587	8	0	8	131	36	1172	793.475	698.811	1.492.286	113,55	24,43
37	Papua Pegunungan	52.508,656	8	0	8	252	10	2617	791.069	693.789	1.484.858	114,02	28,28
38	Papua Barat Daya	39.103,058	5	1	6	132	74	939	331.197	305.237	636.434	108,50	16,28
Indonesia		1.890.179,784	416	98	514	7.285	8.496	75.266	143.547.955	140.890.827	284.438.782	101,89	150,48

Sumber: - Kementerian Dalam Negeri, 2025

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2-2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Lampiran 1.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2025

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Luas Wilayah (km ²)	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0 - 4	11.606.435	11.146.134	22.752.569	104,1
2	5 - 9	11.225.320	10.730.150	21.955.470	104,6
3	10 - 14	11.249.972	10.766.145	22.016.117	104,5
4	15 - 19	11.389.399	10.706.253	22.095.652	106,4
5	20 - 24	11.400.678	10.759.965	22.160.643	106,0
6	25 - 29	11.532.338	10.981.856	22.514.194	105,0
7	30 - 34	11.323.787	10.870.467	22.194.254	104,2
8	35 - 39	11.013.411	10.704.869	21.718.280	102,9
9	40 - 44	10.435.771	10.246.747	20.682.518	101,8
10	45 - 49	9.840.112	9.794.457	19.634.569	100,5
11	50 - 54	8.774.993	8.825.256	17.600.249	99,4
12	55 - 59	7.517.870	7.651.793	15.169.663	98,2
13	60 - 64	6.074.370	6.286.925	12.361.295	96,6
14	65 - 69	4.518.628	4.748.796	9.267.424	95,2
15	70 - 74	3.035.664	3.307.956	6.343.620	91,8
16	75+	2.609.207	3.363.058	5.972.265	77,6
Indonesia		143.547.955	140.890.827	284.438.782	101,9
Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)					

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS 2025

Lampiran 1.3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2024 - 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	
		Luas Wilayah (km ²)	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	5.554,8	5.625.960
2	Sumatera Utara	15.588,5	15.785.839
3	Sumatera Barat	5.836,2	5.914.296
4	Riau	6.728,1	6.811.158
5	Jambi	3.724,3	3.768.482
6	Sumatera Selatan	8.837,3	8.928.515
7	Bengkulu	2.112,2	2.138.044
8	Lampung	9.419,6	9.522.913
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.531,5	1.550.821
10	Kepulauan Riau	2.183,3	2.213.456
11	DKI Jakarta	10.684,9	10.677.975
12	Jawa Barat	50.345,2	50.759.003
13	Jawa Tengah	37.892,3	38.233.933
14	D I Yogyakarta	3.759,5	3.781.549
15	Jawa Timur	41.814,5	42.089.271
16	Banten	12.431,4	12.537.436
17	Bali	4.433,3	4.461.267
18	Nusa Tenggara Barat	5.646,0	5.731.107
19	Nusa Tenggara Timur	5.656,0	5.742.564
20	Kalimantan Barat	5.695,5	5.766.030
21	Kalimantan Tengah	2.809,7	2.844.992
22	Kalimantan Selatan	4.273,4	4.323.330
23	Kalimantan Timur	4.045,9	4.267.598
24	Kalimantan Utara	739,8	749.367
25	Sulawesi Utara	2.701,8	2.721.438
26	Sulawesi Tengah	3.121,8	3.156.102
27	Sulawesi Selatan	9.463,4	9.563.127
28	Sulawesi Tenggara	2.793,1	2.836.738
29	Gorontalo	1.227,8	1.242.238
30	Sulawesi Barat	1.503,2	1.525.335
31	Maluku	1.945,6	1.970.563
32	Maluku Utara	1.355,6	1.373.824
33	Papua	1.060,6	1.073.637
34	Papua Barat	578,7	587.645
35	Papua Selatan	542,1	549.651
36	Papua Tengah	1.472,9	1.492.286
37	Papua Pegunungan	1.467,0	1.484.858
38	Papua Barat Daya	627,1	636.434
Indonesia		281.603,9	284.438.782

Sumber : * Statistik Indonesia, BPS 2025

Lampiran 1.4**JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2025**

No	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(2)	(5)
1	Jumlah Bayi (0 tahun)	2.383.058	2.285.839	4.668.897
2	Jumlah Batita (0-2 tahun)	7.043.844	6.766.858	13.810.702
3	Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)	9.223.377	8.860.295	18.083.672
4	Jumlah Balita (0 - 4 tahun)	11.606.435	11.146.134	22.752.569
5	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)	4.506.042	4.309.197	8.815.239
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)	2.242.017	2.140.754	4.382.771
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)	13.453.178	12.880.674	26.333.852
8	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)	34.081.727	32.642.429	66.724.156
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)	99.302.729	96.828.588	196.131.317
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)	10.163.499	11.419.810	21.583.309
11	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	0	74.064.614	74.064.614
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi (15-39 tahun)	0	54.023.410	54.023.410

Sumber : Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan, Kepmenkes HK.01.07/Menkes/140/2024

Lampiran 1.5

**JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2016 - 2025**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Luas Wilayah (km ²)	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364.527	343.647
2	September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372.114	350.420
3	Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385.621	361.496
4	September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400.995	370.910
5	Maret 2018	10,14	15,80	25,94	7,02	13,20	9,82	415.614	383.908
6	September 2018	10,13	15,54	25,67	6,89	13,10	9,66	425.770	392.154
7	Maret 2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41	442.062	404.398
8	September 2019	9,86	14,93	24,79	6,56	12,60	9,22	458.380	418.515
9	Maret 2020	11,16	15,26	26,42	7,38	12,82	9,78	471.822	433.281
10	September 2020	12,04	15,51	27,55	7,88	13,20	10,19	475.477	437.902
11	Maret 2021	12,18	15,37	27,54	7,89	13,10	10,14	489.848	450.185
12	September 2021	11,86	14,64	26,50	7,60	12,53	9,71	502.730	464.474
13	Maret 2022	11,82	14,34	26,16	7,50	12,29	9,54	521.494	484.209
14	September 2022	11,98	14,38	26,36	7,53	12,36	9,57	552.349	513.170
15	Maret 2023	11,74	14,16	25,90	7,29	12,22	9,36	569.299	525.050
16	Maret 2024	11,64	13,58	25,22	7,09	11,79	9,03	601.871	556.874
17	September 2024	11,05	13,01	24,06	6,66	11,34	8,57	615.763	566.655
18	Maret 2025	11,27	12,58	23,85	6,73	11,03	8,47	629.561	580.349
19	September 2025	11,18	12,18	23,36	6,60	10,72	8,25	663.081	610.257

Sumber : Statistik Indonesia 2026, BPS

Keterangan: Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2025

No	Provinsi	Semester II (September)								
		Luas Wilayah (km ²)			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	756.201	168,77	8,15	693.085	534,56	14,51	715.103	703,33	12,22
2	Sumatera Utara	755.041	648,75	7,16	671.746	479,31	7,35	718.220	1.128,06	7,24
3	Sumatera Barat	800.935	115,18	3,75	750.331	197,12	7,03	776.517	312,30	5,31
4	Riau	796.664	171,03	5,61	713.694	304,54	6,76	747.345	475,57	6,30
5	Jambi	812.016	117,84	9,25	664.895	143,41	5,70	713.849	261,25	6,89
6	Sumatera Selatan	654.169	310,56	8,91	582.407	587,68	10,43	609.044	898,24	9,85
7	Bengkulu	787.599	94,51	13,23	675.770	155,69	11,19	712.003	250,20	11,88
8	Lampung	680.646	229,09	7,37	610.729	631,04	10,88	634.062	860,13	9,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	926.156	33,31	3,59	1.025.283	41,35	6,50	992.426	74,66	4,77
10	Kepulauan Riau	835.161	94,77	3,85	844.224	19,79	8,70	870.738	114,56	4,26
11	DKI Jakarta	897.768	439,12	4,03	0	0	0	897.768	439,12	4,03
12	Jawa Barat	578.501	2.826,25	6,66	563.380	724,46	7,28	575.499	3.550,71	6,78
13	Jawa Tengah	580.119	1.740,48	8,99	560.252	1.604,34	9,87	570.870	3.344,82	9,39
14	DI Yogyakarta	681.094	319,12	9,99	555.867	103,67	10,37	649.331	422,79	10,08
15	Jawa Timur	603.726	1.637,78	6,93	561.281	2.166,50	12,55	585.020	3.804,28	9,30
16	Banten	728.161	615,02	5,35	651.175	145,84	6,27	715.288	760,86	5,51
17	Bali	665.796	106,07	3,06	575.268	54,02	4,44	642.986	160,09	3,42
18	Nusa Tenggara Barat	593.069	349,94	11,70	555.647	287,24	11,02	575.856	637,18	11,38
19	Nusa Tenggara Timur	689.568	112,54	6,96	518.016	919,15	21,48	563.052	1.031,69	17,50
20	Kalimantan Barat	707.568	90,28	4,29	619.536	232,27	7,05	652.220	322,55	5,97
21	Kalimantan Tengah	671.568	62,26	4,84	693.943	79,50	5,02	683.664	141,76	4,94
22	Kalimantan Selatan	693.781	67,37	2,91	674.346	101,44	4,58	684.567	168,81	3,73
23	Kalimantan Timur	906.968	116,95	4,31	875.843	85,09	7,24	897.759	202,04	5,19
24	Kalimantan Utara	963.971	29,73	5,86	868.014	12,73	4,72	933.675	42,46	5,47
25	Sulawesi Utara	576.059	58,28	3,95	534.162	113,86	10,11	557.310	172,14	6,62
26	Sulawesi Tengah	673.254	71,84	6,40	660.157	273,53	12,66	664.691	345,37	10,52
27	Sulawesi Selatan	536.363	232,01	5,17	495.282	453,13	9,56	514.958	685,14	7,43
28	Sulawesi Tenggara	561.959	81,03	6,65	489.739	214,27	12,66	519.411	295,30	10,14
29	Gorontalo	526.930	25,88	4,46	512.138	129,88	19,86	519.640	155,76	12,62
30	Sulawesi Barat	505.691	23,86	7,68	512.203	126,02	10,84	510.846	149,88	10,18
31	Maluku	831.696	41,13	4,80	769.195	245,73	24,01	797.060	286,86	15,25
32	Maluku Utara	754.018	22,91	5,71	667.101	51,90	5,54	692.592	74,81	5,59
33	Papua	807.291	33,01	5,85	604.835	127,24	38,00	736.720	160,25	17,82
34	Papua Barat	1.020.087	16,16	9,60	806.356	86,25	24,32	868.631	102,41	19,58
35	Papua Selatan	743.064	9,92	4,93	498.316	94,00	27,79	587.264	103,92	19,26
36	Papua Tengah	1.059.833	20,42	6,54	803.138	289,44	39,14	873.843	309,86	29,45
37	Papua Pegunungan	1.546.609	26,10	13,06	1.186.901	282,09	30,25	1.235.328	308,19	27,21
38	Papua Barat Daya	883.292	24,02	7,27	820.016	78,39	30,77	855.657	102,41	17,50
Indonesia		663.081,00	11.183,29	6,60	610.257	12.176,47	10,72	641.443	23.359,76	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (Susenas September 2025)

Lampiran 1.7

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Semester I (Maret)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Luas Wilayah (km ²)	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1,22	2,53	2,06	0,24	0,68	0,52
2	Sumatera Utara	0,86	0,96	0,90	0,17	0,21	0,19
3	Sumatera Barat	0,41	1,36	0,86	0,07	0,38	0,22
4	Riau	0,98	0,66	0,79	0,23	0,10	0,15
5	Jambi	1,19	0,65	0,83	0,24	0,11	0,15
6	Sumatera Selatan	1,53	1,55	1,54	0,43	0,36	0,38
7	Bengkulu	1,81	1,61	1,67	0,35	0,31	0,32
8	Lampung	0,77	1,47	1,23	0,13	0,30	0,24
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,41	1,01	0,65	0,07	0,25	0,15
10	Kepulauan Riau	0,52	1,45	0,60	0,13	0,33	0,15
11	DKI Jakarta***	0,49	-	0,49	0,10	-	0,10
12	Jawa Barat	1,15	1,08	1,14	0,28	0,22	0,27
13	Jawa Tengah	1,53	1,48	1,51	0,36	0,31	0,34
14	DI Yogyakarta	2,01	1,10	1,79	0,55	0,21	0,47
15	Jawa Timur	0,96	1,74	1,29	0,19	0,36	0,26
16	Banten	1,03	1,03	1,03	0,32	0,29	0,32
17	Bali	0,47	0,88	0,58	0,10	0,22	0,13
18	Nusa Tenggara Barat	1,67	1,45	1,57	0,35	0,30	0,32
19	Nusa Tenggara Timur	0,76	3,70	2,89	0,11	0,97	0,74
20	Kalimantan Barat	0,49	0,88	0,73	0,14	0,16	0,15
21	Kalimantan Tengah	0,58	0,64	0,61	0,10	0,13	0,11
22	Kalimantan Selatan	0,66	0,45	0,56	0,28	0,06	0,17
23	Kalimantan Timur	0,59	1,39	0,83	0,11	0,35	0,18
24	Kalimantan Utara	0,46	0,22	0,38	0,07	0,01	0,05
25	Sulawesi Utara	0,59	1,55	1,01	0,12	0,31	0,20
26	Sulawesi Tengah	1,04	1,56	1,38	0,29	0,28	0,28
27	Sulawesi Selatan	1,08	1,52	1,30	0,28	0,35	0,31
28	Sulawesi Tenggara	0,85	2,15	1,61	0,16	0,50	0,36
29	Gorontalo	0,54	4,05	2,40	0,09	1,07	0,61
30	Sulawesi Barat	1,62	2,07	1,97	0,76	0,48	0,54
31	Maluku	0,61	5,26	3,14	0,13	1,69	0,98
32	Maluku Utara	1,00	0,65	0,75	0,29	0,17	0,21
33	Papua	1,00	8,01	3,61	0,23	2,32	1,01
34	Papua Barat	0,43	3,86	2,75	0,02	0,85	0,58
35	Papua Selatan	0,89	5,96	4,07	0,21	1,66	1,12
36	Papua Tengah	1,15	10,80	7,94	0,44	3,92	2,89
37	Papua Pegunungan	2,56	6,72	5,99	0,62	1,95	1,71
38	Papua Barat Daya	1,24	5,78	3,21	0,30	1,71	0,91
Indonesia		1,04	1,66	1,29	0,25	0,39	0,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (Susenas September 2025)

Keterangan: - Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan.

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 1.8

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021- 2025

No	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0,323	0,291	0,296	0,294	0,274
2	Sumatera Utara	0,313	0,326	0,309	0,306	0,283
3	Sumatera Barat	0,300	0,292	0,280	0,287	0,280
4	Riau	0,327	0,323	0,324	0,306	0,304
5	Jambi	0,315	0,335	0,343	0,315	0,291
6	Sumatera Selatan	0,340	0,330	0,338	0,331	0,298
7	Bengkulu	0,321	0,315	0,333	0,343	0,339
8	Lampung	0,314	0,313	0,324	0,301	0,287
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,247	0,255	0,245	0,235	0,214
10	Kepulauan Riau	0,339	0,325	0,340	0,357	0,385
11	DKI Jakarta	0,411	0,412	0,431	0,431	0,423
12	Jawa Barat	0,406	0,412	0,425	0,428	0,397
13	Jawa Tengah	0,368	0,366	0,369	0,364	0,350
14	DI Yogyakarta	0,436	0,459	0,449	0,428	0,414
15	Jawa Timur	0,364	0,365	0,387	0,373	0,359
16	Banten	0,363	0,377	0,368	0,359	0,312
17	Bali	0,375	0,362	0,362	0,348	0,333
18	Nusa Tenggara Barat	0,384	0,374	0,375	0,364	0,364
19	Nusa Tenggara Timur	0,339	0,340	0,325	0,316	0,322
20	Kalimantan Barat	0,315	0,311	0,321	0,314	0,308
21	Kalimantan Tengah	0,320	0,309	0,317	0,304	0,284
22	Kalimantan Selatan	0,325	0,309	0,313	0,298	0,281
23	Kalimantan Timur	0,331	0,317	0,322	0,310	0,310
24	Kalimantan Utara	0,285	0,270	0,277	0,259	0,251
25	Sulawesi Utara	0,359	0,359	0,370	0,347	0,341
26	Sulawesi Tengah	0,326	0,305	0,304	0,309	0,277
27	Sulawesi Selatan	0,377	0,365	0,377	0,360	0,350
28	Sulawesi Tenggara	0,394	0,366	0,371	0,365	0,357
29	Gorontalo	0,409	0,423	0,417	0,413	0,383
30	Sulawesi Barat	0,366	0,371	0,351	0,330	0,308
31	Maluku	0,316	0,306	0,288	0,291	0,273
32	Maluku Utara	0,278	0,309	0,300	0,296	0,275
33	Papua	0,396	0,393	0,386	0,405	0,397
34	Papua Barat	0,374	0,384	0,370	0,385	0,383
35	Papua Selatan	-	-	-	0,424	0,426
36	Papua Tengah	-	-	-	0,355	0,340
37	Papua Pegunungan	-	-	-	0,346	0,347
38	Papua Barat Daya	-	-	-	0,347	0,361
Indonesia		0,381	0,381	0,388	0,390	0,363

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (Susenas September 2025)

Keterangan: - Indeks Gini pada tahun 2024 merupakan Indeks Gini pada bulan September 2024

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi in

Lampiran 1.9

**RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS
DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2025**

No	Kelompok Barang	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	84.072	96.924	89.278
2	Umbi-umbian	8.193	11.146	9.389
3	Ikan/udang/cumi/kerang	63.539	57.426	61.063
4	Daging	43.213	29.771	37.769
5	Telur dan susu	46.393	30.457	39.939
6	Sayur-sayuran	65.257	63.526	64.556
7	Kacang-kacangan	16.452	13.813	15.383
8	Buah-buahan	50.036	36.370	44.501
9	Minyak dan kelapa	20.353	21.337	20.752
10	Bahan minuman	22.600	23.837	23.101
11	Bumbu-bumbuan	16.529	15.172	15.979
12	Konsumsi lainnya	14.519	12.248	13.599
13	Makanan dan minuman jadi	294.188	181.387	248.501
14	Rokok	88.750	96.053	91.708
	Makanan	834.094	689.467	775.518
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	488.778	266.270	398.657
16	Aneka barang dan jasa	256.949	118.093	200.710
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	44.802	30.880	39.163
18	Barang tahan lama	74.690	45.984	63.063
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	80.203	41.954	64.711
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	32.183	20.044	27.267
	Bukan Makanan	977.605	523.225	793.571
	Total Pengeluaran	1.811.699	1.212.692	1.569.089

Sumber : Statistik Indonesia 2025, BPS

Lampiran 1.10

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025

No	Provinsi	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
		TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5,75	6,03	5,56	5,75	5,50	5,64
2	Sumatera Utara	5,24	5,89	5,10	5,60	5,05	5,32
3	Sumatera Barat	5,90	5,94	5,79	5,75	5,69	5,62
4	Riau	4,25	4,23	3,85	3,70	4,12	4,16
5	Jambi	4,50	4,53	4,45	4,48	4,48	4,26
6	Sumatera Selatan	4,53	4,11	3,97	3,86	3,89	3,69
7	Bengkulu	3,21	3,42	3,17	3,11	3,24	3,41
8	Lampung	4,18	4,23	4,12	4,19	4,07	4,21
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,89	4,56	3,85	4,63	4,17	4,45
10	Kepulauan Riau	7,61	6,80	6,94	6,39	6,89	6,45
11	DKI Jakarta	7,57	6,53	6,03	6,21	6,18	6,05
12	Jawa Barat	7,89	7,44	6,91	6,75	6,74	6,77
13	Jawa Tengah	5,24	5,13	4,39	4,78	4,33	4,66
14	DI Yogyakarta	3,58	3,69	3,24	3,48	3,18	3,46
15	Jawa Timur	4,33	4,88	3,74	4,19	3,61	3,88
16	Banten	7,97	7,52	7,02	6,68	6,64	6,69
17	Bali	3,73	2,69	1,87	1,79	1,58	1,49
18	Nusa Tenggara Barat	3,73	2,80	3,30	2,73	3,22	3,06
19	Nusa Tenggara Timur	3,10	3,14	3,17	3,02	3,23	3,31
20	Kalimantan Barat	4,52	5,05	4,20	4,86	4,23	4,82
21	Kalimantan Tengah	3,84	4,10	3,67	4,01	3,47	3,97
22	Kalimantan Selatan	3,95	4,31	3,89	4,20	3,94	4,16
23	Kalimantan Timur	6,37	5,31	5,75	5,14	5,33	5,18
24	Kalimantan Utara	4,10	4,01	4,01	3,90	3,90	3,85
25	Sulawesi Utara	6,19	6,10	5,98	5,85	6,03	5,99
26	Sulawesi Tengah	3,49	2,95	3,15	2,94	3,02	2,92
27	Sulawesi Selatan	5,26	4,33	4,90	4,19	4,96	4,21
28	Sulawesi Tenggara	3,66	3,15	3,22	3,09	3,27	3,31
29	Gorontalo	3,07	3,06	3,05	3,13	3,12	3,42
30	Sulawesi Barat	3,04	2,27	3,02	2,68	3,17	2,86
31	Maluku	6,08	6,31	5,96	6,11	5,95	6,27
32	Maluku Utara	4,60	4,31	4,16	4,03	4,26	4,55
33	Papua	3,49	2,67	5,81	6,48	6,92	6,96
34	Papua Barat	5,53	5,38	4,31	4,13	4,21	4,55
35	Papua Selatan	-	-	4,75	4,05	4,90	4,04
36	Papua Tengah	-	-	2,49	2,75	3,55	3,62
37	Papua Pegunungan	-	-	1,18	1,32	1,68	1,68
38	Papua Barat Daya	-	-	6,02	6,48	6,61	6,85
Indonesia		5,45	5,32	4,82	4,91	4,76	4,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 1.11

**RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025**

No	Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	9,89	9,95	10,42
2	Sumatera Utara	10,07	10,18	10,29
3	Sumatera Barat	9,59	9,72	10,03
4	Riau	9,60	9,69	9,80
5	Jambi	9,16	9,26	9,32
6	Sumatera Selatan	8,90	8,98	9,28
7	Bengkulu	9,35	9,40	9,71
8	Lampung	8,72	8,80	9,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,66	8,78	9,09
10	Kepulauan Riau	10,52	10,65	10,78
11	DKI Jakarta	11,42	11,49	11,58
12	Jawa Barat	9,16	9,24	9,46
13	Jawa Tengah	8,44	8,47	8,62
14	DI Yogyakarta	10,16	10,23	10,58
15	Jawa Timur	8,53	8,69	8,81
16	Banten	9,48	9,55	9,82
17	Bali	9,74	9,87	10,07
18	Nusa Tenggara Barat	8,39	8,50	8,87
19	Nusa Tenggara Timur	8,31	8,48	8,88
20	Kalimantan Barat	8,17	8,28	8,54
21	Kalimantan Tengah	9,07	9,17	9,36
22	Kalimantan Selatan	8,95	9,02	9,17
23	Kalimantan Timur	10,17	10,22	10,30
24	Kalimantan Utara	9,53	9,58	9,69
25	Sulawesi Utara	9,94	10,02	10,10
26	Sulawesi Tengah	9,22	9,28	9,38
27	Sulawesi Selatan	9,12	9,22	9,38
28	Sulawesi Tenggara	9,62	9,74	9,90
29	Gorontalo	8,48	8,64	8,78
30	Sulawesi Barat	8,48	8,56	8,91
31	Maluku	10,38	10,44	10,63
32	Maluku Utara	9,61	9,70	9,78
34	Papua	7,34	10,70	10,65
33	Papua Barat	10,14	9,87	9,90
35	Papua Selatan	-	8,99	8,87
36	Papua Tengah	-	6,17	6,27
37	Papua Pegunungan	-	5,10	4,76
38	Papua Barat Daya	-	10,48	10,60
Indonesia		9,13	9,22	9,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 1.12

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021 - 2025

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,10	98,90	99,03	98,80	99,44	97,39	97,60	97,67	97,88	98,41	98,24	98,25	98,34	98,34	98,92
2	Sumatera Utara	99,54	99,50	99,49	99,50	99,40	98,84	98,73	98,85	98,68	98,62	99,19	99,11	99,17	99,09	99,01
3	Sumatera Barat	99,54	99,65	99,65	99,60	99,44	99,00	98,93	98,98	99,14	98,72	99,26	99,29	99,31	99,37	99,08
4	Riau	99,46	99,46	99,60	99,53	99,47	98,92	98,88	98,75	98,86	98,51	99,20	99,18	99,18	99,20	99,00
5	Jambi	98,68	98,77	98,89	98,88	98,72	97,47	97,41	97,42	97,15	96,44	98,08	98,10	98,16	98,02	97,59
6	Sumatera Selatan	99,28	99,16	99,24	99,09	99,35	98,27	98,12	98,20	98,26	98,41	98,78	98,65	98,73	98,68	98,89
7	Bengkulu	98,89	98,56	98,74	98,82	98,81	96,83	97,01	97,01	96,97	96,76	97,88	97,80	97,89	97,91	97,80
8	Lampung	98,51	98,05	98,26	98,19	98,65	95,98	96,41	96,37	96,49	96,99	97,28	97,25	97,33	97,36	97,83
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,05	98,72	98,98	99,12	98,96	97,08	97,58	97,47	97,25	97,40	98,10	98,17	98,24	98,20	98,20
10	Kepulauan Riau	99,26	99,48	99,35	99,46	99,74	98,92	98,56	98,74	98,92	99,18	99,09	99,02	99,05	99,20	99,46
11	DKI Jakarta	99,79	99,83	99,74	99,78	99,81	99,67	99,55	99,65	99,52	99,61	99,73	99,69	99,69	99,65	99,71
12	Jawa Barat	99,29	99,03	99,14	98,99	99,43	97,93	97,93	97,88	98,13	98,35	98,62	98,49	98,51	98,57	98,90
13	Jawa Tengah	96,26	96,20	96,68	96,55	97,10	91,39	92,34	92,06	92,51	93,36	93,79	94,26	94,34	94,50	95,20
14	DI Yogyakarta	97,46	97,15	97,46	97,73	97,84	93,05	93,21	93,77	93,64	94,11	95,22	95,15	95,59	95,65	95,93
15	Jawa Timur	95,15	95,41	96,10	95,89	96,96	90,06	91,28	91,39	92,44	92,82	92,56	93,32	93,70	94,13	94,85
16	Banten	98,84	98,76	99,10	98,92	99,49	96,69	97,54	97,36	97,88	98,50	97,78	98,16	98,23	98,41	99,00
17	Bali	97,39	97,45	97,57	97,86	98,25	92,59	93,61	93,63	93,71	94,58	95,00	95,53	95,61	95,79	96,42
18	Nusa Tenggara Barat	91,02	91,38	92,05	92,70	94,18	83,95	86,59	86,31	87,07	88,06	87,39	88,97	89,11	89,83	91,07
19	Nusa Tenggara Timur	94,84	95,26	96,14	95,75	96,52	92,91	94,01	94,13	94,57	95,34	93,85	94,63	95,11	95,15	95,92
20	Kalimantan Barat	95,87	95,48	96,56	96,42	97,58	90,88	92,36	92,99	93,60	94,57	93,41	93,96	94,79	95,03	96,09
21	Kalimantan Tengah	99,34	99,43	99,27	99,17	99,48	98,83	98,78	98,78	98,47	98,86	99,10	99,12	99,03	98,83	99,18
22	Kalimantan Selatan	99,15	99,07	99,10	99,03	98,79	97,37	97,63	97,64	97,65	96,85	98,27	98,36	98,37	98,34	97,82
23	Kalimantan Timur	99,30	99,42	99,46	99,15	99,38	98,48	98,49	98,54	98,75	98,52	98,90	98,97	99,01	98,96	98,96
24	Kalimantan Utara	97,00	98,26	98,34	98,09	98,67	96,04	97,09	97,17	96,57	97,56	96,55	97,71	97,78	97,37	98,14
25	Sulawesi Utara	99,82	99,79	99,78	99,83	99,80	99,78	99,84	99,80	99,65	99,80	99,80	99,81	99,79	99,75	99,80
26	Sulawesi Tengah	98,82	98,46	98,63	98,83	98,87	97,73	97,63	97,65	97,86	97,90	98,28	98,05	98,14	98,35	98,39
27	Sulawesi Selatan	93,88	94,32	95,23	95,18	95,98	91,19	92,35	92,53	93,11	94,19	92,49	93,31	93,83	94,11	95,05
28	Sulawesi Tenggara	96,77	96,69	97,44	97,30	98,45	93,12	94,88	94,66	95,29	96,04	94,94	95,79	96,03	96,29	97,22
29	Gorontalo	98,78	98,40	98,47	98,47	98,09	98,72	98,44	98,52	98,62	98,99	98,75	98,42	98,49	98,55	98,54
30	Sulawesi Barat	95,08	95,72	95,67	96,20	97,14	91,09	91,84	92,99	93,81	94,11	93,09	93,82	94,33	95,00	95,62
31	Maluku	99,46	99,56	99,59	99,79	99,60	99,38	99,24	99,35	99,28	99,10	99,42	99,40	99,47	99,53	99,35
32	Maluku Utara	99,42	99,18	99,47	99,08	99,26	97,98	98,35	98,15	98,53	98,46	98,71	98,78	98,81	98,80	98,86
33	Papua	81,33	82,96	85,80	98,94	98,99	76,17	79,18	82,47	97,76	97,76	78,89	81,19	84,22	98,37	98,39
34	Papua Barat	98,67	98,06	98,42	98,20	98,67	97,08	97,18	97,21	97,54	97,17	97,91	97,64	97,84	97,89	97,96
35	Papua Selatan	-	-	-	95,48	97,11	-	-	-	92,88	93,31	-	-	-	94,21	95,27
36	Papua Tengah	-	-	-	86,20	86,48	-	-	-	83,01	85,07	-	-	-	84,69	85,82
37	Papua Pegunungan	-	-	-	72,69	71,88	-	-	-	67,83	64,38	-	-	-	70,37	68,32
38	Papua Barat Daya	-	-	-	98,36	98,90	-	-	-	97,29	98,23	-	-	-	97,84	98,58
Indonesia		97,43	97,42	97,77	97,69	98,18	94,65	95,26	95,29	95,66	96,03	96,04	96,35	96,53	96,67	97,10

Lampiran 1.13

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025

No	Provinsi	2023				2024				2025			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	99,43	97,72	83,41	35,24	99,42	97,77	81,55	34,81	99,38	97,65	80,94	34,95
2	Sumatera Utara	99,51	96,76	79,25	31,08	99,50	97,35	78,59	30,22	99,54	97,67	77,51	30,48
3	Sumatera Barat	99,76	96,79	84,33	42,19	99,71	96,80	84,40	42,75	99,63	97,00	85,04	38,84
4	Riau	99,65	95,89	78,15	32,32	99,67	95,94	78,49	31,34	99,74	95,47	77,42	33,03
5	Jambi	99,49	96,01	72,46	25,79	99,61	96,25	71,97	25,85	99,45	95,59	74,39	25,23
6	Sumatera Selatan	99,41	95,27	71,71	21,49	99,39	95,45	70,80	20,11	99,50	95,68	73,78	21,24
7	Bengkulu	99,42	97,91	79,57	34,05	99,51	97,93	79,07	35,13	99,29	97,01	80,48	34,18
8	Lampung	99,61	95,93	71,74	23,51	99,50	96,07	72,35	22,53	99,62	95,72	75,35	20,68
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,51	93,20	69,53	19,38	99,66	93,52	72,69	19,74	99,49	92,90	76,03	21,13
10	Kepulauan Riau	99,29	99,07	84,97	22,43	99,47	98,91	85,56	26,28	99,71	98,60	88,24	26,61
11	DKI Jakarta	99,49	98,17	72,50	28,43	99,25	98,36	79,95	32,98	99,32	98,74	88,22	34,21
12	Jawa Barat	99,40	95,75	68,58	26,45	99,46	95,86	71,15	26,59	99,50	96,58	75,80	27,98
13	Jawa Tengah	99,57	97,08	70,87	26,52	99,57	97,12	71,60	25,61	99,54	97,05	77,97	27,44
14	DI Yogyakarta	99,63	98,88	91,17	55,80	99,65	98,90	90,36	54,17	99,61	99,60	93,03	54,72
15	Jawa Timur	99,28	97,64	74,07	28,59	99,34	97,68	76,44	28,88	99,28	97,15	80,96	28,90
16	Banten	99,43	96,65	69,64	24,85	99,52	96,67	71,91	26,04	99,52	97,11	73,84	24,45
17	Bali	99,61	97,95	84,73	34,31	99,65	98,79	85,17	35,39	99,57	98,88	90,68	34,32
18	Nusa Tenggara Barat	99,46	97,95	77,46	28,45	99,47	97,86	77,81	28,88	99,38	96,92	79,21	28,88
19	Nusa Tenggara Timur	98,62	94,89	75,93	33,03	98,81	94,76	75,75	33,24	98,89	95,44	76,65	31,41
20	Kalimantan Barat	98,81	92,92	69,25	27,42	99,00	93,05	69,39	26,98	98,95	94,36	70,95	26,84
21	Kalimantan Tengah	99,13	95,21	66,32	25,49	99,32	95,24	68,33	24,12	99,45	95,74	70,76	24,91
22	Kalimantan Selatan	99,30	94,12	69,95	29,09	99,30	93,70	72,31	29,45	99,14	93,82	75,16	30,91
23	Kalimantan Timur	99,64	98,71	81,50	34,75	99,69	98,73	81,84	33,43	99,64	97,34	84,15	33,15
24	Kalimantan Utara	99,22	96,96	77,03	30,83	98,97	96,57	78,89	30,71	99,14	95,96	81,93	29,25
25	Sulawesi Utara	99,34	95,00	74,55	25,88	99,37	96,24	72,48	25,83	99,28	96,11	71,45	25,57
26	Sulawesi Tengah	98,34	93,13	76,29	30,31	98,47	94,12	74,16	30,38	98,56	94,58	75,36	26,50
27	Sulawesi Selatan	99,49	93,22	71,00	37,89	99,50	93,41	73,17	37,02	99,21	94,22	75,94	33,80
28	Sulawesi Tenggara	99,20	95,00	74,60	33,59	99,06	95,76	75,73	33,37	99,05	96,53	79,58	33,67
29	Gorontalo	98,69	91,85	71,70	35,50	98,79	91,35	72,70	34,43	98,85	92,35	72,00	35,02
30	Sulawesi Barat	98,31	89,47	71,57	25,42	98,49	91,24	72,09	25,32	98,56	92,30	73,22	23,55
31	Maluku	99,59	97,97	79,90	40,27	99,49	97,83	77,70	39,58	99,56	97,75	77,28	29,66
32	Maluku Utara	99,12	97,51	78,38	32,19	99,11	96,68	76,02	29,50	99,04	97,08	79,62	25,38
33	Papua	83,61	80,91	64,15	26,06	97,09	96,98	80,38	38,17	97,51	97,32	81,78	38,16
34	Papua Barat	98,41	97,42	80,58	35,74	97,60	95,61	75,32	31,18	97,59	96,22	77,53	34,53
35	Papua Selatan	-	-	-	-	90,47	85,51	71,68	31,73	91,65	89,29	66,97	27,57
36	Papua Tengah	-	-	-	-	74,63	68,42	47,65	17,96	80,13	67,86	44,61	15,48
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	79,98	73,12	56,09	17,84	82,24	71,08	50,79	12,48
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	99,17	95,82	81,14	37,35	98,67	96,38	81,70	35,19
Indonesia		99,16	96,10	73,42	28,96	99,19	96,17	74,64	29,01	99,23	96,30	77,86	29,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 1.14

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2025

No	Provinsi	2021			2022			2023			2024			2025		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	108,10	97,74	92,63	108,34	95,02	92,53	108,48	95,51	93,80	108,57	94,30	96,60	108,27	96,12	98,46
2	Sumatera Utara	107,85	91,87	96,75	108,31	90,31	97,23	106,85	92,11	98,02	108,11	91,79	97,43	106,04	90,73	98,33
3	Sumatera Barat	108,66	93,24	90,38	108,47	92,57	90,66	108,03	92,66	92,00	107,74	96,24	93,65	106,47	94,87	95,34
4	Riau	105,52	95,25	84,11	105,82	94,45	84,85	105,35	92,91	85,12	107,47	92,63	87,69	107,92	93,96	86,01
5	Jambi	109,48	88,96	84,47	109,55	87,84	84,33	108,29	88,20	85,23	107,13	89,97	85,18	107,38	92,72	89,28
6	Sumatera Selatan	111,39	89,44	82,30	112,00	89,41	81,11	110,51	89,78	82,26	107,41	85,46	85,20	107,69	87,24	88,90
7	Bengkulu	109,31	92,11	93,79	109,23	90,79	93,97	107,67	93,10	94,53	107,16	92,24	97,41	106,86	92,57	96,07
8	Lampung	105,63	93,12	88,38	105,91	92,37	87,40	105,31	91,19	89,12	104,60	90,85	89,54	105,19	89,19	87,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	107,16	88,44	86,49	107,26	87,85	86,50	106,09	88,51	88,28	106,47	88,74	87,02	106,87	87,77	86,87
10	Kepulauan Riau	106,60	94,12	86,31	106,26	93,27	87,08	105,96	92,58	90,58	105,55	92,82	95,73	109,49	95,78	90,65
11	DKI Jakarta	103,17	91,56	77,08	103,34	89,89	76,91	103,63	95,78	77,40	102,49	98,63	78,52	103,49	98,76	86,70
12	Jawa Barat	104,57	93,33	78,10	104,55	93,46	78,86	104,53	94,69	79,07	102,99	95,60	80,56	103,64	97,20	86,41
13	Jawa Tengah	106,40	94,00	86,65	106,19	94,05	86,83	105,01	92,80	87,84	103,86	90,89	88,54	103,65	91,73	91,11
14	DI Yogyakarta	105,15	95,54	90,50	104,96	94,02	89,93	104,52	94,28	90,82	102,11	98,43	91,88	101,78	96,77	98,92
15	Jawa Timur	104,52	97,17	87,55	104,68	95,95	87,37	103,71	94,74	89,26	102,54	93,89	88,67	102,61	93,01	89,03
16	Banten	106,91	94,88	75,66	106,89	94,05	75,49	106,96	95,71	75,02	107,04	93,32	79,42	105,29	93,01	82,97
17	Bali	103,09	98,68	89,87	103,16	96,23	90,82	102,70	98,18	93,40	104,51	95,25	94,16	104,07	95,94	92,58
18	Nusa Tenggara Barat	107,23	93,72	93,75	107,21	92,59	93,68	107,07	93,32	93,23	105,80	92,28	95,79	106,15	92,98	91,23
19	Nusa Tenggara Timur	113,55	90,78	86,36	113,36	89,88	86,38	111,35	90,41	88,66	110,58	91,73	89,20	110,24	93,60	91,14
20	Kalimantan Barat	111,01	85,45	85,21	111,84	84,59	84,79	109,46	84,49	88,52	109,71	83,94	86,33	107,79	88,78	90,85
21	Kalimantan Tengah	108,21	91,07	83,07	107,39	89,70	83,97	106,98	88,06	85,63	106,34	88,28	86,17	106,78	90,11	87,24
22	Kalimantan Selatan	107,14	86,04	80,77	107,18	86,40	80,97	107,41	86,44	82,21	105,32	90,22	82,17	106,34	93,20	86,97
23	Kalimantan Timur	105,26	92,03	95,52	105,21	91,47	95,09	106,46	92,28	95,16	105,31	91,72	98,75	104,57	94,32	99,59
24	Kalimantan Utara	99,78	100,90	96,55	100,70	99,85	97,57	101,52	97,60	97,78	103,23	96,35	95,36	106,86	95,59	97,87
25	Sulawesi Utara	106,56	90,45	86,17	106,48	89,63	86,03	105,41	90,12	86,03	107,21	89,45	86,12	106,75	89,67	89,31
26	Sulawesi Tengah	103,68	93,17	88,06	103,55	92,86	87,99	102,66	93,06	88,69	103,16	90,64	88,39	102,67	92,55	91,65
27	Sulawesi Selatan	106,85	86,82	87,07	106,71	86,19	86,49	106,65	87,15	88,04	105,98	86,57	90,49	105,81	90,01	89,71
28	Sulawesi Tenggara	108,22	87,54	89,50	108,48	86,04	89,14	108,23	85,28	90,31	107,33	85,61	91,83	107,51	87,94	93,74
29	Gorontalo	108,44	79,37	87,97	108,70	79,37	87,83	108,75	79,66	89,11	105,52	82,15	89,80	105,58	83,85	90,58
30	Sulawesi Barat	105,09	85,27	87,81	106,08	84,58	87,86	104,23	84,95	89,18	104,78	82,07	86,07	105,35	86,68	87,34
31	Maluku	110,79	90,57	95,74	111,05	87,85	95,96	108,90	90,35	95,96	107,62	88,79	95,86	108,83	91,17	93,64
32	Maluku Utara	108,07	87,99	95,04	108,05	88,35	95,40	107,81	88,17	95,64	106,94	92,44	91,01	110,57	91,67	92,62
33	Papua	93,07	81,68	75,05	94,26	83,51	77,06	91,10	81,91	73,90	103,25	100,21	92,15	110,99	102,68	86,30
34	Papua Barat	111,02	90,55	97,25	110,42	90,45	97,71	109,24	91,41	96,79	108,57	90,92	93,26	109,18	93,08	95,42
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,01	82,56	80,28	111,21	87,71	77,63
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,02	76,94	53,66	82,52	71,89	54,82
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,98	76,56	64,27	84,31	78,11	54,52
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,03	92,48	98,09	111,22	95,56	87,95
Indonesia		106,20	92,80	85,23	106,27	92,11	85,49	105,62	92,51	86,34	104,82	92,21	87,29	104,90	93,02	89,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 1.15

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	107,24	98,12	99,22	38,41	109,33	93,96	98,70	47,48	108,27	96,12	98,46	42,81
2	Sumatera Utara	106,15	92,71	95,28	29,37	105,92	88,90	101,66	36,89	106,04	90,73	98,33	33,04
3	Sumatera Barat	107,25	94,49	92,10	35,81	105,66	95,25	98,63	49,02	106,47	94,87	95,34	42,32
4	Riau	109,78	89,96	87,45	32,28	106,07	98,30	84,45	38,40	107,92	93,96	86,01	35,30
5	Jambi	108,99	90,74	87,35	29,57	105,77	94,90	91,24	37,73	107,38	92,72	89,28	33,58
6	Sumatera Selatan	106,89	90,34	91,94	21,88	108,48	83,98	85,95	33,67	107,69	87,24	88,90	27,41
7	Bengkulu	107,10	90,98	96,99	30,50	106,61	94,05	95,09	47,50	106,86	92,57	96,07	38,94
8	Lampung	104,70	90,36	87,25	18,54	105,71	87,86	88,07	30,69	105,19	89,19	87,67	24,38
9	Kepulauan Bangka Belitung	109,62	86,60	82,12	16,72	104,11	89,00	91,35	25,37	106,87	87,77	86,87	20,89
10	Kepulauan Riau	109,26	96,39	91,95	25,94	109,75	95,16	89,29	33,45	109,49	95,78	90,65	29,64
11	DKI Jakarta	103,40	97,30	89,52	37,94	103,58	100,36	84,05	45,49	103,49	98,76	86,70	41,78
12	Jawa Barat	103,08	97,32	84,63	26,40	104,23	97,08	88,22	30,38	103,64	97,20	86,41	28,36
13	Jawa Tengah	103,38	92,20	91,57	26,70	103,92	91,20	90,61	32,70	103,65	91,73	91,11	29,70
14	DI Yogyakarta	101,91	97,01	96,12	71,88	101,64	96,51	101,79	77,49	101,78	96,77	98,92	74,70
15	Jawa Timur	102,41	94,24	89,04	29,37	102,81	91,74	89,03	35,53	102,61	93,01	89,03	32,40
16	Banten	106,63	90,85	83,02	34,75	103,92	95,34	82,92	33,92	105,29	93,01	89,03	34,33
17	Bali	102,50	98,41	91,26	39,59	105,85	93,48	94,04	41,82	104,07	95,94	92,58	40,69
18	Nusa Tenggara Barat	105,36	93,27	89,16	39,30	106,92	92,68	93,40	33,85	106,15	92,98	91,23	36,49
19	Nusa Tenggara Timur	110,13	95,04	88,86	30,19	110,37	92,24	93,45	34,07	110,24	93,60	91,14	32,09
20	Kalimantan Barat	107,65	86,47	83,97	22,47	107,94	91,30	97,73	25,49	107,79	88,78	90,85	23,99
21	Kalimantan Tengah	107,47	86,66	81,33	25,10	106,06	93,77	93,52	25,89	106,78	90,11	87,24	25,49
22	Kalimantan Selatan	105,57	95,57	84,88	22,51	107,16	90,84	89,18	34,22	106,34	93,20	86,97	28,12
23	Kalimantan Timur	105,36	96,10	95,59	39,74	103,78	92,33	103,70	41,15	104,57	94,32	99,59	40,44
24	Kalimantan Utara	107,48	96,68	105,75	16,06	106,21	94,54	90,31	41,79	106,86	95,59	97,87	27,93
25	Sulawesi Utara	107,34	89,66	87,67	26,69	106,12	89,68	91,05	41,39	106,75	89,67	89,31	33,51
26	Sulawesi Tengah	103,97	95,36	83,35	34,92	101,28	89,67	99,40	41,50	102,67	92,55	91,65	38,14
27	Sulawesi Selatan	105,79	88,78	90,46	35,32	105,83	91,25	88,95	45,20	105,81	90,01	89,71	40,28
28	Sulawesi Tenggara	108,46	87,43	95,09	35,56	106,52	88,52	92,43	43,21	107,51	87,94	93,74	39,27
29	Gorontalo	105,71	79,97	81,92	32,87	105,45	87,55	100,02	42,81	105,58	83,85	90,58	37,75
30	Sulawesi Barat	105,08	87,52	82,48	24,83	105,62	85,81	91,92	31,98	105,35	86,68	87,34	28,22
31	Maluku	110,76	90,82	91,49	38,16	106,84	91,56	95,82	47,88	108,83	91,17	93,64	42,89
32	Maluku Utara	111,64	91,22	92,94	38,45	109,48	92,12	92,27	39,77	110,57	91,67	92,62	39,08
33	Papua	110,72	105,27	82,12	30,79	111,25	100,13	91,87	37,87	110,99	102,68	86,30	34,08
34	Papua Barat	108,24	94,06	94,09	25,36	110,21	91,99	97,09	30,87	109,18	93,08	95,42	27,99
35	Papua Selatan	108,36	89,83	87,22	27,62	114,42	85,79	67,56	20,01	111,21	87,71	77,63	24,15
36	Papua Tengah	81,92	71,53	54,38	12,42	83,18	72,37	55,25	15,15	82,52	71,89	54,82	13,62
37	Papua Pegunungan	81,99	80,53	51,96	15,98	86,98	75,54	57,60	9,91	84,31	78,11	54,52	13,34
38	Papua Barat Daya	111,45	95,73	83,86	37,33	110,96	95,39	93,06	39,21	111,22	95,56	87,95	38,22
Indonesia		104,84	93,28	88,62	29,88	104,97	92,73	90,47	35,98	104,90	93,02	89,53	32,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 1.16
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2025

No	Provinsi	2021			2022			2023			2024			2025		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	98,95	86,95	70,80	99,07	88,21	71,16	98,97	84,85	71,70	97,96	84,22	70,94	96,32	81,37	70,36
2	Sumatera Utara	97,69	81,13	67,99	98,00	81,84	68,27	97,95	82,09	68,67	97,68	82,15	69,72	95,99	77,41	70,40
3	Sumatera Barat	98,82	78,75	68,99	98,80	78,86	68,38	98,89	80,22	69,18	98,89	82,94	72,50	97,06	82,70	71,57
4	Riau	97,85	80,52	64,00	97,80	80,43	63,87	98,13	80,76	64,81	98,45	81,14	68,04	97,54	81,40	65,22
5	Jambi	99,41	79,88	61,56	99,33	79,93	60,73	99,33	80,23	60,60	98,17	79,65	62,48	97,02	78,47	63,05
6	Sumatera Selatan	98,00	78,31	60,53	98,08	78,68	61,00	98,12	79,12	61,24	97,53	77,58	62,70	95,98	74,27	63,08
7	Bengkulu	98,61	80,25	66,08	98,60	80,25	66,61	98,61	81,08	67,09	98,33	82,36	69,14	96,12	78,83	69,32
8	Lampung	99,10	82,03	60,31	99,29	82,07	61,96	99,22	80,64	62,84	98,33	81,40	64,54	97,64	78,47	67,22
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,89	74,60	58,79	98,01	74,68	59,65	98,11	77,00	60,72	98,29	77,59	61,71	97,00	74,06	65,94
10	Kepulauan Riau	99,26	86,60	73,36	99,20	86,76	73,54	99,29	86,78	74,11	98,71	87,10	77,54	98,20	83,55	76,54
11	DKI Jakarta	98,22	83,01	60,53	98,37	84,22	60,88	98,44	84,95	60,81	98,39	88,67	64,85	98,47	87,55	69,90
12	Jawa Barat	98,37	82,88	58,58	98,29	82,80	58,60	98,20	83,61	59,01	98,53	84,61	60,68	98,02	83,84	67,33
13	Jawa Tengah	98,22	80,99	60,46	98,39	81,02	61,17	98,46	81,56	61,46	98,39	81,03	62,56	97,21	80,29	67,81
14	DI Yogyakarta	99,44	83,62	71,42	99,43	85,28	74,50	99,36	85,62	76,37	99,43	90,14	77,86	98,77	88,67	78,42
15	Jawa Timur	97,90	83,80	62,63	98,09	83,80	62,10	98,04	83,91	62,59	98,81	84,52	64,77	98,22	84,49	70,64
16	Banten	98,15	84,28	59,69	97,93	84,67	59,54	97,97	85,43	60,42	98,09	83,68	63,50	97,09	81,28	65,28
17	Bali	97,20	87,11	74,82	97,46	86,88	74,73	97,77	84,78	75,60	98,70	86,30	74,19	97,05	84,81	76,06
18	Nusa Tenggara Barat	98,81	85,28	67,09	98,83	86,05	67,61	98,76	84,03	68,04	98,57	83,55	71,09	97,62	82,54	70,43
19	Nusa Tenggara Timur	96,04	69,99	54,29	96,08	70,05	56,00	95,98	73,47	58,15	97,01	73,72	60,73	95,45	77,28	62,88
20	Kalimantan Barat	97,42	68,11	51,77	97,52	68,32	51,87	97,70	70,85	54,76	98,60	72,90	57,18	95,65	72,48	57,60
21	Kalimantan Tengah	99,01	78,80	54,25	99,11	78,75	55,69	99,05	79,07	55,63	98,35	80,49	58,05	97,55	78,91	63,31
22	Kalimantan Selatan	98,94	75,88	58,37	99,12	76,28	59,61	99,14	77,44	59,83	98,68	78,14	60,26	97,79	78,54	59,77
23	Kalimantan Timur	98,36	81,30	69,29	98,45	82,65	69,10	98,53	83,36	69,89	98,59	83,70	72,37	97,68	82,01	73,96
24	Kalimantan Utara	93,38	79,21	65,37	93,69	79,38	65,65	94,73	80,53	66,70	95,18	81,61	67,90	97,05	81,49	73,13
25	Sulawesi Utara	95,39	74,94	63,33	95,44	76,11	63,30	95,68	76,56	63,86	95,87	77,27	65,47	96,00	75,05	61,26
26	Sulawesi Tengah	93,33	74,99	65,44	93,25	75,63	65,72	93,31	76,80	66,18	94,84	77,55	65,62	94,67	78,28	68,68
27	Sulawesi Selatan	98,26	77,02	60,35	98,41	77,42	60,44	98,41	77,98	60,57	97,81	76,84	62,71	96,46	78,45	68,10
28	Sulawesi Tenggara	98,15	77,86	63,70	98,27	77,77	64,11	98,48	76,54	64,00	97,33	77,12	66,66	95,89	74,78	63,31
29	Gorontalo	98,65	71,15	58,21	98,74	71,66	58,47	98,69	73,55	60,18	98,20	72,51	61,23	95,75	72,95	64,63
30	Sulawesi Barat	95,68	70,03	59,77	95,81	70,34	60,24	95,92	72,39	61,17	96,82	71,77	62,10	95,99	75,49	60,89
31	Maluku	96,92	75,53	64,71	96,90	78,37	64,57	97,27	78,58	66,16	97,27	79,72	69,61	95,29	77,02	66,29
32	Maluku Utara	97,20	77,03	64,11	97,27	77,41	65,35	97,36	78,53	65,75	96,41	79,34	68,02	95,90	78,65	62,32
33	Papua	80,38	57,93	44,41	81,66	59,14	47,63	80,67	60,23	48,32	92,52	75,41	61,33	91,81	77,95	56,13
34	Papua Barat	94,09	70,52	63,51	94,31	71,38	63,66	94,52	74,70	65,92	95,15	72,10	61,18	94,00	72,24	57,63
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,86	52,03	44,79	87,64	57,72	45,48
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,03	57,49	36,84	72,55	54,33	35,59
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,40	58,83	45,60	74,85	56,16	39,87
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,39	72,31	68,52	94,21	75,13	58,71
Indonesia		97,80	80,59	61,65	97,88	80,89	61,97	97,89	81,35	62,53	97,94	81,73	64,32	97,00	80,65	67,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 1.17
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2025

No	Provinsi	IPM			
		2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	74,11	74,70	75,36	76,23
2	Sumatera Utara	74,51	75,13	75,76	76,47
3	Sumatera Barat	75,16	75,64	76,43	77,27
4	Riau	74,45	74,95	75,67	76,31
5	Jambi	73,11	73,73	74,36	75,13
6	Sumatera Selatan	72,48	73,18	73,84	74,76
7	Bengkulu	73,68	74,30	74,91	75,68
8	Lampung	71,79	72,48	73,13	73,98
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,50	74,09	74,55	75,26
10	Kepulauan Riau	78,48	79,08	79,89	80,53
11	DKI Jakarta	82,77	83,55	84,15	85,05
12	Jawa Barat	73,63	74,24	74,92	75,90
13	Jawa Tengah	72,80	73,39	73,87	74,77
14	DI Yogyakarta	80,65	81,09	81,62	82,48
15	Jawa Timur	74,05	74,65	75,35	76,13
16	Banten	75,25	75,77	76,35	77,25
17	Bali	77,40	78,01	78,63	79,37
18	Nusa Tenggara Barat	71,65	72,37	73,10	73,97
19	Nusa Tenggara Timur	67,63	68,40	69,14	69,89
20	Kalimantan Barat	69,71	70,47	71,19	72,09
21	Kalimantan Tengah	73,17	73,73	74,28	74,86
22	Kalimantan Selatan	74,00	74,66	75,19	76,10
23	Kalimantan Timur	77,36	78,20	78,79	79,39
24	Kalimantan Utara	72,21	72,88	73,41	74,04
25	Sulawesi Utara	74,52	75,04	75,68	76,32
26	Sulawesi Tengah	71,01	71,66	72,24	72,82
27	Sulawesi Selatan	73,96	74,60	75,18	75,92
28	Sulawesi Tenggara	72,38	72,94	73,62	74,25
29	Gorontalo	70,62	71,25	72,01	72,62
30	Sulawesi Barat	69,19	69,80	70,46	71,16
31	Maluku	72,04	72,75	73,40	74,09
32	Maluku Utara	70,26	70,98	71,84	72,52
33	Papua	62,16	63,01	73,83	74,69
34	Papua Barat	66,72	67,47	67,69	68,48
35	Papua Selatan	-	-	68,86	69,54
36	Papua Tengah	-	-	60,25	60,64
37	Papua Pegunungan	-	-	54,43	54,91
38	Papua Barat Daya	-	-	69,65	70,55
Indonesia		73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Catatan:

Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Lampiran 1.18

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2024-2025

No	Provinsi	IPM		Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	75,36	76,23	73,20	73,48	14,39	14,40	9,64	9,95	10.811	11.191
2	Sumatera Utara	76,76	76,47	73,90	74,69	13,49	13,50	9,93	10,08	11.460	11.898
3	Sumatera Barat	76,43	77,27	74,37	74,19	14,30	14,31	9,44	9,77	11.718	12.041
4	Riau	75,67	76,31	74,41	74,74	13,42	13,44	9,43	9,55	11.857	12.233
5	Jambi	74,36	75,13	74,06	74,39	13,14	13,34	8,90	8,95	11.621	12.018
6	Sumatera Selatan	73,84	74,76	74,26	74,58	12,64	12,65	8,57	8,91	12.015	12.416
7	Bengkulu	74,91	75,68	73,31	73,59	13,75	13,76	9,04	9,23	11.733	12.197
8	Lampung	73,13	73,98	74,39	74,71	12,78	12,79	8,36	8,61	11.258	11.683
9	Kepulauan Bangka Belitung	74,55	75,26	74,12	74,46	12,49	12,50	8,33	8,65	13.667	13.837
10	Kepulauan Riau	79,89	80,53	75,12	75,46	13,27	13,28	10,50	10,72	15.573	15.881
11	DKI Jakarta	84,15	85,05	75,99	76,27	13,51	13,80	11,49	11,59	19.953	20.676
12	Jawa Barat	74,92	75,90	75,16	75,53	12,80	13,02	8,87	9,14	12.157	12.447
13	Jawa Tengah	73,87	74,77	74,91	75,24	12,86	13,05	8,02	8,15	12.276	12.746
14	DI Yogyakarta	81,62	82,48	75,36	75,64	15,70	15,78	9,92	10,20	15.361	15.855
15	Jawa Timur	75,35	76,13	75,07	75,36	13,43	13,44	8,28	8,39	12.852	13.509
16	Banten	76,35	77,25	74,97	75,33	13,10	13,11	9,23	9,56	13.097	13.498
17	Bali	78,63	79,37	75,10	75,46	13,62	13,63	9,54	9,75	14.920	15.383
18	Nusa Tenggara Barat	73,10	73,97	72,25	72,60	13,98	13,99	7,87	8,21	11.606	11.922
19	Nusa Tenggara Timur	69,14	69,89	71,83	72,16	13,23	13,34	8,02	8,22	8.534	8.375
20	Kalimantan Barat	71,19	72,09	73,94	74,28	12,68	12,69	7,78	8,07	10.321	10.689
21	Kalimantan Tengah	74,28	74,86	73,73	74,01	12,77	12,78	8,81	8,96	12.303	12.612
22	Kalimantan Selatan	75,19	76,10	74,18	74,49	12,87	13,12	8,62	8,81	13.399	13.757
23	Kalimantan Timur	78,79	79,39	74,94	75,28	14,03	14,04	10,02	10,10	13.793	14.254
24	Kalimantan Utara	73,41	74,04	73,57	73,68	13,21	13,31	9,35	9,44	10.197	10.568
25	Sulawesi Utara	75,68	76,32	74,08	74,44	12,97	12,98	9,84	9,91	11.998	12.450
26	Sulawesi Tengah	72,24	72,82	70,84	71,10	13,34	13,35	9,04	9,10	10.536	10.934
27	Sulawesi Selatan	75,18	75,92	73,83	74,15	13,55	13,56	8,86	9,00	12.275	12.773
28	Sulawesi Tenggara	73,62	74,25	71,88	72,06	13,71	13,72	9,42	9,56	10.606	10.992
29	Gorontalo	72,01	72,62	70,73	71,06	13,17	13,18	8,29	8,38	11.539	11.937
30	Sulawesi Barat	70,46	71,16	71,03	71,44	12,89	12,90	8,15	8,31	10.208	10.516
31	Maluku	73,40	74,09	70,68	71,02	14,09	14,10	10,26	10,51	9.684	9.900
32	Maluku Utara	71,84	72,52	71,05	71,47	13,75	13,76	9,37	9,50	9.320	9.613
33	Papua	73,83	74,69	70,47	70,77	13,72	13,94	9,82	10,01	11.037	11.342
34	Papua Barat	67,69	68,48	68,47	68,76	13,17	13,21	7,86	8,07	8.805	9.115
35	Papua Selatan	68,86	69,54	68,46	68,71	12,67	12,68	8,38	8,64	9.756	9.983
36	Papua Tengah	60,25	60,64	68,18	68,38	9,63	9,64	6,12	6,13	7.809	8.036
37	Papua Pegunungan	54,43	54,91	67,39	67,55	9,97	9,98	4,21	4,30	5.707	5.861
38	Papua Barat Daya	69,65	70,55	70,02	70,31	13,88	13,89	8,39	8,69	8.733	9.076
Indonesia		75,02	75,90	74,15	74,47	13,21	13,30	8,85	9,07	12.341	12.802

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Catatan:

Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Lampiran 2.1

JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2021- 2025

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	360	362	365	366	366
2	Sumatera Utara	615	615	619	619	619
3	Sumatera Barat	279	280	280	280	280
4	Riau	234	238	239	241	242
5	Jambi	207	207	208	208	208
6	Sumatera Selatan	345	348	350	354	354
7	Bengkulu	179	179	179	179	179
8	Lampung	315	318	320	322	322
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	64	64
10	Kepulauan Riau	93	93	95	96	96
11	DKI Jakarta	315	315	44	44	44
12	Jawa Barat	1.086	1.100	1.100	1.106	1.106
13	Jawa Tengah	880	880	881	881	881
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	971	969	972	973	976
16	Banten	245	247	253	253	253
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	175	176	176	177	177
19	Nusa Tenggara Timur	421	429	435	440	441
20	Kalimantan Barat	247	248	249	249	252
21	Kalimantan Tengah	205	204	204	205	205
22	Kalimantan Selatan	237	241	242	242	242
23	Kalimantan Timur	188	188	188	188	188
24	Kalimantan Utara	56	57	58	58	58
25	Sulawesi Utara	198	199	199	201	203
26	Sulawesi Tengah	215	218	218	219	219
27	Sulawesi Selatan	469	472	474	474	474
28	Sulawesi Tenggara	293	302	307	308	308
29	Gorontalo	93	93	95	95	95
30	Sulawesi Barat	98	98	98	98	98
31	Maluku	222	228	229	241	241
32	Maluku Utara	147	148	150	150	150
33	Papua	437	454	121	123	123
34	Papua Barat	162	163	76	80	81
35	Papua Selatan	-	-	85	85	85
36	Papua Tengah	-	-	118	125	127
37	Papua Pegunungan	-	-	153	179	183
38	Papua Barat Daya	-	-	95	104	119
Indonesia		10.292	10.374	10.180	10.268	10.300

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.2

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2021 - 2025

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	180	179	171	174	174	180	183	194	192	192
2	Sumatera Utara	191	194	185	178	178	424	421	434	441	441
3	Sumatera Barat	113	115	109	108	108	166	165	171	172	172
4	Riau	109	116	118	120	120	125	122	121	121	122
5	Jambi	92	96	97	98	98	115	111	111	110	110
6	Sumatera Selatan	114	118	117	111	110	231	230	233	243	244
7	Bengkulu	53	52	52	52	52	126	127	127	127	127
8	Lampung	155	157	162	162	162	160	161	158	160	160
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	27	25	25	25	38	37	39	39	39
10	Kepulauan Riau	41	32	30	28	28	52	61	65	68	68
11	DKI Jakarta	6	6	2	2	2	309	309	42	42	42
12	Jawa Barat	299	309	276	278	279	787	791	824	828	827
13	Jawa Tengah	371	377	373	369	369	509	503	508	512	512
14	DI Yogyakarta	49	49	47	47	47	72	72	74	74	74
15	Jawa Timur	588	616	625	619	622	383	353	347	354	354
16	Banten	78	76	70	63	63	167	171	183	190	190
17	Bali	40	41	37	39	38	80	79	83	81	82
18	Nusa Tenggara Barat	143	146	144	152	154	32	30	32	25	23
19	Nusa Tenggara Timur	177	190	175	186	186	244	239	260	254	255
20	Kalimantan Barat	130	131	133	138	140	117	117	116	111	112
21	Kalimantan Tengah	87	88	87	86	85	118	116	117	119	120
22	Kalimantan Selatan	52	51	51	52	52	185	190	191	190	190
23	Kalimantan Timur	99	99	99	97	91	89	89	89	91	97
24	Kalimantan Utara	22	22	20	20	20	34	35	38	38	38
25	Sulawesi Utara	96	99	94	95	99	102	100	105	106	104
26	Sulawesi Tengah	104	110	116	120	125	111	108	102	99	94
27	Sulawesi Selatan	316	316	286	302	306	153	156	188	172	168
28	Sulawesi Tenggara	92	100	100	101	109	201	202	207	207	199
29	Gorontalo	27	27	25	25	24	66	66	70	70	71
30	Sulawesi Barat	61	61	45	55	59	37	37	53	43	39
31	Maluku	65	73	92	94	94	157	155	137	147	147
32	Maluku Utara	53	52	52	57	57	94	96	98	93	93
33	Papua	126	132	43	44	44	311	322	78	79	79
34	Papua Barat	45	45	26	26	26	117	118	50	54	55
35	Papua Selatan	-	-	59	59	59	-	-	26	26	26
36	Papua Tengah	-	-	26	29	29	-	-	92	96	98
37	Papua Pegunungan	-	-	23	23	23	-	-	130	156	160
38	Papua Barat Daya	-	-	18	18	18	-	-	77	86	101
Indonesia		4.200	4.302	4.210	4.252	4.275	6.092	6.072	5.970	6.016	6.025

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.3

**RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	366	290	1,26
2	Sumatera Utara	619	455	1,36
3	Sumatera Barat	280	179	1,56
4	Riau	242	172	1,41
5	Jambi	208	144	1,44
6	Sumatera Selatan	354	241	1,47
7	Bengkulu	179	129	1,39
8	Lampung	322	229	1,41
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,36
10	Kepulauan Riau	96	80	1,20
11	DKI Jakarta	44	44	1,00
12	Jawa Barat	1.106	627	1,76
13	Jawa Tengah	881	576	1,53
14	DI Yogyakarta	121	78	1,55
15	Jawa Timur	976	666	1,47
16	Banten	253	155	1,63
17	Bali	120	57	2,11
18	Nusa Tenggara Barat	177	117	1,51
19	Nusa Tenggara Timur	441	315	1,40
20	Kalimantan Barat	252	174	1,45
21	Kalimantan Tengah	205	136	1,51
22	Kalimantan Selatan	242	156	1,55
23	Kalimantan Timur	188	105	1,79
24	Kalimantan Utara	58	55	1,05
25	Sulawesi Utara	203	171	1,19
26	Sulawesi Tengah	219	177	1,24
27	Sulawesi Selatan	474	313	1,51
28	Sulawesi Tenggara	308	221	1,39
29	Gorontalo	95	77	1,23
30	Sulawesi Barat	98	69	1,42
31	Maluku	241	119	2,03
32	Maluku Utara	150	118	1,27
33	Papua	123	105	1,17
34	Papua Barat	81	91	0,89
35	Papua Selatan	85	82	1,04
36	Papua Tengah	127	131	0,97
37	Papua Pegunungan	183	252	0,73
38	Papua Barat Daya	119	132	0,90
Indonesia		10.300	7.285	1,41

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2025;
Jumlah kecamatan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019

Lampiran 2.4

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
						Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	366	366	23	100,0	0	48	153	165	0
2	Sumatera Utara	619	619	33	100,0	11	68	247	293	0
3	Sumatera Barat	280	280	19	100,0	0	21	99	160	0
4	Riau	242	238	7	98,3	2	40	103	93	4
5	Jambi	208	208	11	100,0	0	24	116	68	0
6	Sumatera Selatan	354	351	17	99,2	0	15	134	202	3
7	Bengkulu	179	179	10	100,0	0	15	100	64	0
8	Lampung	322	319	15	99,1	0	13	157	149	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	100,0	0	0	9	55	0
10	Kepulauan Riau	96	94	7	97,9	2	9	28	55	2
11	DKI Jakarta	44	44	6	100,0	0	0	0	44	0
12	Jawa Barat	1.106	1106	27	100,0	0	5	135	966	0
13	Jawa Tengah	881	881	35	100,0	0	3	43	835	0
14	DI Yogyakarta	121	121	5	100,0	0	0	2	119	0
15	Jawa Timur	976	973	38	99,7	0	0	54	919	3
16	Banten	253	253	8	100,0	1	7	59	186	0
17	Bali	120	120	9	100,0	0	0	11	109	0
18	Nusa Tenggara Barat	177	177	10	100,0	0	0	27	150	0
19	Nusa Tenggara Timur	441	436	22	98,9	11	100	156	169	5
20	Kalimantan Barat	252	249	14	98,8	0	15	86	148	3
21	Kalimantan Tengah	205	202	14	98,5	0	19	81	102	3
22	Kalimantan Selatan	242	241	13	99,6	0	15	75	151	1
23	Kalimantan Timur	188	188	10	100,0	0	0	26	162	0
24	Kalimantan Utara	58	57	5	98,3	0	6	12	39	1
25	Sulawesi Utara	203	201	15	99,0	1	42	79	79	2
26	Sulawesi Tengah	219	219	13	100,0	0	20	94	105	0
27	Sulawesi Selatan	474	474	24	100,0	0	5	97	372	0
28	Sulawesi Tenggara	308	307	17	99,7	0	42	144	121	1
29	Gorontalo	95	95	6	100,0	0	1	17	77	0
30	Sulawesi Barat	98	98	6	100,0	0	12	49	37	0
31	Maluku	241	226	11	93,8	7	55	102	62	15
32	Maluku Utara	150	150	10	100,0	1	45	60	44	0
33	Papua	123	120	9	97,6	17	43	38	22	3
34	Papua Barat	81	74	7	91,4	19	34	14	7	7
35	Papua Selatan	85	81	4	95,3	12	29	26	14	4
36	Papua Tengah	127	58	7	45,7	17	24	10	7	69
37	Papua Pegunungan	183	115	8	62,8	66	33	12	4	68
38	Papua Barat Daya	119	88	6	73,9	7	36	33	12	31
Indonesia		10.300	10.072	508	97,8	174	844	2.688	6.366	228

Sumber: Ditjen. Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.5

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas	% Memenuhi
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	79	287	366	78,4
2	Sumatera Utara	341	278	619	44,9
3	Sumatera Barat	88	192	280	68,6
4	Riau	80	162	242	66,9
5	Jambi	100	108	208	51,9
6	Sumatera Selatan	162	192	354	54,2
7	Bengkulu	89	90	179	50,3
8	Lampung	219	103	322	32,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	54	64	84,4
10	Kepulauan Riau	52	44	96	45,8
11	DKI Jakarta		44	44	100,0
12	Jawa Barat	688	418	1.106	37,8
13	Jawa Tengah	233	648	881	73,6
14	DI Yogyakarta	42	79	121	65,3
15	Jawa Timur	439	537	976	55,0
16	Banten	124	129	253	51,0
17	Bali	33	87	120	72,5
18	Nusa Tenggara Barat	25	152	177	85,9
19	Nusa Tenggara Timur	320	121	441	27,4
20	Kalimantan Barat	152	100	252	39,7
21	Kalimantan Tengah	125	80	205	39,0
22	Kalimantan Selatan	29	213	242	88,0
23	Kalimantan Timur	94	94	188	50,0
24	Kalimantan Utara	22	36	58	62,1
25	Sulawesi Utara	136	67	203	33,0
26	Sulawesi Tengah	121	98	219	44,8
27	Sulawesi Selatan	158	316	474	66,7
28	Sulawesi Tenggara	129	179	308	58,1
29	Gorontalo	42	53	95	55,8
30	Sulawesi Barat	40	58	98	59,2
31	Maluku	192	49	241	20,3
32	Maluku Utara	96	54	150	36,0
33	Papua	101	22	123	17,9
34	Papua Barat	67	14	81	17,3
35	Papua Selatan	78	7	85	8,2
36	Papua Tengah	116	11	127	8,7
37	Papua Pegunungan	182	1	183	0,6
38	Papua Barat Daya	107	12	119	10,1
Indonesia		5.111	5.189	10.300	50,4

Sumber: SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2025

**) Perhitungan prosentase adalah jumlah puskesmas yang memenuhi dibanding jumlah puskesmas per provinsi (berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2025)

Lampiran 2.6

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas Baseline*)	% Dengan Dokter	% Tanpa Dokter
		Tidak Ada Dokter	Ada Dokter			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2	364	366	99,5	0,55
2	Sumatera Utara	7	612	619	98,9	1,13
3	Sumatera Barat	5	275	280	98,2	1,79
4	Riau	1	241	242	99,6	0,41
5	Jambi	3	205	208	98,6	1,44
6	Sumatera Selatan	2	352	354	99,4	0,56
7	Bengkulu	6	173	179	96,7	3,35
8	Lampung	2	320	322	99,4	0,62
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	64	64	100,0	0,00
10	Kepulauan Riau	1	95	96	99,0	1,04
11	DKI Jakarta	0	44	44	100,0	0,00
12	Jawa Barat	2	1104	1.106	99,8	0,18
13	Jawa Tengah	0	881	881	100,0	0,00
14	DI Yogyakarta	0	121	121	100,0	0,00
15	Jawa Timur	1	975	976	99,9	0,10
16	Banten	0	253	253	100,0	0,00
17	Bali	0	120	120	100,0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	2	175	177	98,9	1,13
19	Nusa Tenggara Timur	49	392	441	88,9	11,11
20	Kalimantan Barat	5	247	252	98,0	1,98
21	Kalimantan Tengah	4	201	205	98,1	1,95
22	Kalimantan Selatan	0	242	242	100,0	0,00
23	Kalimantan Timur	4	184	188	97,9	2,13
24	Kalimantan Utara	2	56	58	96,6	3,45
25	Sulawesi Utara	2	201	203	99,0	0,99
26	Sulawesi Tengah	5	214	219	97,7	2,28
27	Sulawesi Selatan	6	468	474	98,7	1,27
28	Sulawesi Tenggara	7	301	308	97,7	2,27
29	Gorontalo	3	92	95	96,8	3,16
30	Sulawesi Barat	1	97	98	99,0	1,02
31	Maluku	18	223	241	92,5	7,47
32	Maluku Utara	7	143	150	95,3	4,67
33	Papua	15	108	123	87,8	12,20
34	Papua Barat	9	72	81	88,9	11,11
35	Papua Selatan	21	64	85	75,3	24,71
36	Papua Tengah	42	85	127	66,9	33,07
37	Papua Pegunungan	122	61	183	33,3	66,67
38	Papua Barat Daya	29	90	119	75,6	24,37
Indonesia		385	9.915	10.300	96,3	3,74

Sumber: SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2023

Lampiran 2.7

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota dengan Penyedia dan atau Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar mutu	Persentase Kabupaten/Kota dengan Penyedia dan atau Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar mutu
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)
1	Aceh	23	2	8,7
2	Sumatera Utara	33	1	3,0
3	Sumatera Barat	19	1	5,3
4	Riau	12	1	8,3
5	Jambi	11	1	9,1
6	Sumatera Selatan	17	1	5,9
7	Bengkulu	10	1	10,0
8	Lampung	15	1	6,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	1	14,3
10	Kepulauan Riau	7	1	14,3
11	DKI Jakarta	6	3	50,0
12	Jawa Barat	27	3	11,1
13	Jawa Tengah	35	5	14,3
14	DI Yogyakarta	5	1	20,0
15	Jawa Timur	38	6	15,8
16	Banten	8	2	25,0
17	Bali	9	5	55,6
18	Nusa Tenggara Barat	10	1	10,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,5
20	Kalimantan Barat	14	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	14	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	13	1	7,7
23	Kalimantan Timur	10	1	10,0
24	Kalimantan Utara	5	0	0,0
25	Sulawesi Utara	15	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	13	1	7,7
27	Sulawesi Selatan	24	3	12,5
28	Sulawesi Tenggara	17	0	0,0
29	Gorontalo	6	0	0,0
30	Sulawesi Barat	6	0	0,0
31	Maluku	11	1	9,1
32	Maluku Utara	10	1	10,0
33	Papua	9	1	11,1
34	Papua Barat	7	0	0,0
35	Papua Selatan	4	0	0,0
36	Papua Tengah	8	0	0,0
37	Papua Pegunungan	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	0	0,0
Indonesia		514	47	9,1

Sumber: Ditjen. Kesprimkom, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: *) Kab/kota yg memiliki PKM yg melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

Lampiran 2.8

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREKISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN
DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama									
		Pemerintah		TNI		POLRI		Masyarakat		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	69	3	27	0	25	0	290	60	411	63
2	Sumatera Utara	161	9	27	0	37	0	816	101	1041	110
3	Sumatera Barat	58	4	17	0	19	0	211	46	305	50
4	Riau	89	5	12	0	15	0	483	47	599	52
5	Jambi	39	1	6	0	12	0	168	16	225	17
6	Sumatera Selatan	99	4	16	0	20	0	450	57	585	61
7	Bengkulu	29	1	4	0	15	0	88	9	136	10
8	Lampung	77	3	13	0	15	0	478	44	583	47
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	0	3	0	7	0	80	22	111	22
10	Kepulauan Riau	41	1	19	0	8	0	276	54	344	55
11	DKI Jakarta	296	58	34	2	21	0	1531	823	1882	883
12	Jawa Barat	503	53	51	1	36	0	3238	531	3828	585
13	Jawa Tengah	156	21	45	0	42	0	1637	356	1880	377
14	DI Yogyakarta	40	11	7	0	6	0	274	81	327	92
15	Jawa Timur	238	20	70	0	44	0	1699	373	2051	393
16	Banten	167	24	5	0	15	0	1230	199	1417	223
17	Bali	38	0	5	0	11	0	241	119	295	119
18	Nusa Tenggara Barat	48	2	8	0	11	0	153	42	220	44
19	Nusa Tenggara Timur	29	4	7	0	19	0	119	20	174	24
20	Kalimantan Barat	55	7	12	0	15	0	157	32	239	39
21	Kalimantan Tengah	38	1	3	0	17	0	151	20	209	21
22	Kalimantan Selatan	60	3	18	0	17	0	205	38	300	41
23	Kalimantan Timur	77	2	21	0	12	0	380	49	490	51
24	Kalimantan Utara	10	0	8	0	5	0	38	4	61	4
25	Sulawesi Utara	33	4	12	0	13	0	76	24	134	28
26	Sulawesi Tengah	34	0	8	0	13	0	91	17	146	17
27	Sulawesi Selatan	69	10	37	1	29	0	298	101	433	112
28	Sulawesi Tenggara	20	3	9	0	17	0	67	24	113	27
29	Gorontalo	18	1	4	0	8	0	34	7	64	8
30	Sulawesi Barat	11	0	3	0	7	0	17	2	38	2
31	Maluku	22	2	14	0	9	0	29	5	74	7
32	Maluku Utara	21	0	5	0	9	0	35	7	70	7
33	Papua	12	0	8	0	8	0	32	4	60	4
34	Papua Barat	7	0	3	0	3	0	12	5	25	5
35	Papua Selatan		0	1	0		0	6	0	7	0
36	Papua Tengah	3	1	3	0		0	13	0	19	1
37	Papua Pegunungan		0		0		0		0	0	0
38	Papua Barat Daya	4	0	1	0		0	12	0	17	0
Indonesia		2.692	258	546	4	560	0	15.115	3.339	18.913	3.601

Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: *: Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Lampiran 2.9

JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	54	5
2	Sumatera Utara	109	12
3	Sumatera Barat	101	39
4	Riau	68	18
5	Jambi	59	19
6	Sumatera Selatan	217	33
7	Bengkulu	96	17
8	Lampung	109	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	6
10	Kepulauan Riau	6	1
11	DKI Jakarta	9	1
12	Jawa Barat	409	55
13	Jawa Tengah	1048	309
14	D.I. Yogyakarta	93	36
15	Jawa Timur	637	222
16	Banten	7	1
17	Bali	277	95
18	Nusa Tenggara Barat	86	12
19	Nusa Tenggara Timur	79	24
20	Kalimantan Barat	87	17
21	Kalimantan Tengah	58	8
22	Kalimantan Selatan	142	38
23	Kalimantan Timur	98	40
24	Kalimantan Utara	26	6
25	Sulawesi Utara	138	35
26	Sulawesi Tengah	37	9
27	Sulawesi Selatan	154	66
28	Sulawesi Tenggara	55	15
29	Gorontalo	22	7
30	Sulawesi Barat	31	9
31	Maluku	30	6
32	Maluku Utara	30	7
33	Papua	27	6
34	Papua Barat	4	
35	Papua Selatan	6	
36	Papua Tengah	10	2
37	Papua Pegunungan	1	
38	Papua Barat Daya	13	2
Indonesia		4.456	1.184

Sumber: Data BPJS Kesehatan diolah oleh Ditjen Keslan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.10

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Kepemilikan/Pengelola										Jumlah
		Sudah Terakreditasi				Belum Terakreditasi				Sudah Terakreditasi	Belum Terakreditasi	
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	Sudah Terakreditasi	Belum Terakreditasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	12	8	0	20	20
2	Sumatera Utara	1	0	20	2	4	0	19	0	23	23	46
3	Sumatera Barat	0	0	7	0	0	0	5	0	7	5	12
4	Riau	0	0	7	1	0	0	7	0	8	7	15
5	Jambi	0	0	6	0	0	0	8	0	6	8	14
6	Sumatera Selatan	0	1	8	0	2	0	10	0	9	12	21
7	Bengkulu	0	0	1	0	1	0	6	0	1	7	8
8	Lampung	0	0	4	0	2	1	10	0	4	13	17
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	1	0	0	0	4	0	1	4	5
10	Kepulauan Riau	1	0	6	0	0	0	7	0	7	7	14
11	DKI Jakarta	10	12	18	4	6	14	11	5	44	36	80
12	Jawa Barat	9	6	58	2	11	4	59	2	75	76	151
13	Jawa Tengah	7	6	55	3	6	2	37	1	71	46	117
14	DI Yogyakarta	3	3	6	1	0	2	2	0	13	4	17
15	Jawa Timur	19	13	56	2	16	2	56	2	90	76	166
16	Banten	2	0	17	0	8	1	40	2	19	51	70
17	Bali	3	2	12	2	0	1	10	0	19	11	30
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	5	0	1	0	7	0	5	8	13
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	3	0	0	0	8	0	4	8	12
20	Kalimantan Barat	0	0	8	0	0	0	11	1	8	12	20
21	Kalimantan Tengah	2	0	1	0	0	0	10	1	3	11	14
22	Kalimantan Selatan	0	0	8	0	1	0	13	0	8	14	22
23	Kalimantan Timur	0	1	7	0	0	0	11	0	8	11	19
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	3
25	Sulawesi Utara	1	1	6	0	0	1	5	1	8	7	15
26	Sulawesi Tengah	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
27	Sulawesi Selatan	0	1	6	0	4	0	15	0	7	19	26
28	Sulawesi Tenggara	0	0	2	0	0	0	8	1	2	9	11
29	Gorontalo	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
31	Maluku	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	3
32	Maluku Utara	0	0	3	0	1	1	6	0	3	8	11
33	Papua	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		58	49	337	17	63	30	404	24	461	521	982

Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 2.11

**JUMLAH UNIT PENGELOLA DARAH TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah UPD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	20	5	25
2	Sumatera Utara	28	17	45
3	Sumatera Barat	20	5	25
4	Riau	8	7	15
5	Jambi	10	1	11
6	Sumatera Selatan	13	8	21
7	Bengkulu	7	4	11
8	Lampung	8	8	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	3	8
10	Kepulauan Riau	7	3	10
11	DKI Jakarta	6	2	8
12	Jawa Barat	10	26	36
13	Jawa Tengah	6	36	42
14	DI Yogyakarta	2	5	7
15	Jawa Timur	6	37	43
16	Banten	0	8	8
17	Bali	2	10	12
18	Nusa Tenggara Barat	11	4	15
19	Nusa Tenggara Timur	18	8	26
20	Kalimantan Barat	13	4	17
21	Kalimantan Tengah	12	3	15
22	Kalimantan Selatan	10	5	15
23	Kalimantan Timur	7	7	14
24	Kalimantan Utara	3	3	6
25	Sulawesi Utara	12	5	17
26	Sulawesi Tengah	9	6	15
27	Sulawesi Selatan	22	6	28
28	Sulawesi Tenggara	19	3	22
29	Gorontalo	4	3	7
30	Sulawesi Barat	6	1	7
31	Maluku	12	1	13
32	Maluku Utara	10	1	11
33	Papua	6	4	10
34	Papua Barat	6	1	7
35	Papua Selatan	3	1	4
36	Papua Tengah	6	0	6
37	Papua Pegunungan	6	0	6
38	Papua Barat Daya	4	1	5
Indonesia		357	252	609

Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.12

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN/Kementerian Lain		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	0	0	2	2	26	0	5	0	5	1	39	7	77	10
2	Sumatera Utara	1	0	2	3	42	0	9	0	9	1	122	19	185	23
3	Sumatera Barat	1	1	3	3	25	0	5	0	1	1	18	22	53	27
4	Riau	0	0	2	1	18	0	4	0	3	0	40	13	67	14
5	Jambi	0	0	1	1	20	0	2	0	0	0	19	2	42	3
6	Sumatera Selatan	2	0	1	3	33	0	4	0	3	0	29	14	72	17
7	Bengkulu	0	0	1	1	13	1	2	0	0	0	9	1	25	3
8	Lampung	0	0	2	1	17	0	2	0	0	0	43	18	64	19
9	Kepulauan Bangka	0	0	1	1	11	0	2	0	0	0	11	3	25	4
10	Kepulauan Riau	0	0	1	1	11	0	3	0	1	0	18	4	34	5
11	DKI Jakarta	3	7	30	1	0	0	9	2	8	3	91	41	141	54
12	Jawa Barat	1	4	4	2	64	1	15	0	6	1	291	47	381	55
13	Jawa Tengah	3	4	4	4	63	1	14	0	5	1	228	42	317	52
14	DI Yogyakarta	1	0	0	2	10	0	3	0	1	1	49	13	64	16
15	Jawa Timur	1	1	10	4	75	0	26	1	6	3	244	75	362	84
16	Banten	1	0	4	0	15	0	3	0	2	0	86	25	111	25
17	Bali	1	0	2	2	17	0	3	0	1	0	44	14	68	16
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	3	2	16	0	3	0	0	0	17	5	39	7
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	1	35	0	4	0	2	0	23	2	66	3
20	Kalimantan Barat	0	0	1	1	24	1	6	0	1	0	19	6	51	8
21	Kalimantan Tengah	0	0	2	1	20	0	2	0	0	0	7	2	31	3
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2	17	0	4	0	1	0	20	6	44	8
23	Kalimantan Timur	1	0	3	2	19	1	4	0	1	1	26	8	54	12
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	11	0	3	0	1	0	1	0	17	0
25	Sulawesi Utara	2	0	3	3	19	1	4	0	1	1	23	3	52	8
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	25	0	3	0	1	0	6	4	37	4
27	Sulawesi Selatan	3	1	4	4	43	0	6	1	3	2	42	16	101	24
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	2	18	0	2	0	1	0	14	2	36	4
29	Gorontalo	0	0	1	0	12	0	2	0	0	0	5	1	20	1
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	3	2	14	2
31	Maluku	1	0	2	1	17	0	3	0	0	0	6	0	29	1
32	Maluku Utara	0	0	2	1	13	0	2	0	0	0	4	1	21	2
33	Papua	1	0	2	1	8	0	4	0	0	0	2	0	17	1
34	Papua Barat	0	0	1	0	9	0	3	0	0	0	1	0	14	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	8	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	8	0	2	0	1	0	3	0	14	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	3	0	12	0
Indonesia		24	18	102	53	801	6	173	4	66	16	1.607	418	2.773	515

Sumber: Ditjen. Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI 2025

Lampiran 2.13

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D (Kelas D dan Kelas D Pratama)			Belum Ditetapkan Kelas		
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	2	2,3	1494	13	14,9	3190	40	46,0	4805	32	36,8	1833		0,0	
2	Sumatera Utara	3	1,4	1565	28	13,5	6044	118	56,7	12878	59	28,4	3457		0,0	
3	Sumatera Barat	4	5,0	1573	6	7,5	753	54	67,5	4681	16	20,0	804		0,0	
4	Riau	2	2,5	662	6	7,4	1597	46	56,8	4845	27	33,3	1493		0,0	
5	Jambi		0,0		4	8,9	961	24	53,3	2701	16	35,6	841	1	2,2	0
6	Sumatera Selatan	2	2,2	1123	7	7,9	1648	58	65,2	6403	22	24,7	1184		0,0	
7	Bengkulu		0,0		2	7,1	487	17	60,7	1905	9	32,1	492		0,0	
8	Lampung	2	2,4	1171	6	7,2	1218	55	66,3	5717	20	24,1	1354		0,0	
9	Kep. Bangka Belitung		0,0		2	6,9	357	16	55,2	1697	11	37,9	508		0,0	
10	Kepulauan Riau	1	2,6	244	7	17,9	1389	21	53,8	2127	10	25,6	464		0,0	
11	DKI Jakarta	18	9,2	7639	62	31,8	12572	91	46,7	7554	24	12,3	1287		0,0	
12	Jawa Barat	11	2,5	3686	80	18,3	21527	265	60,8	31361	80	18,3	5118		0,0	
13	Jawa Tengah	12	3,3	4177	36	9,8	10885	204	55,3	25055	117	31,7	7902		0,0	
14	DI Yogyakarta	3	3,8	1263	14	17,5	3105	27	33,8	2138	36	45,0	2038		0,0	
15	Jawa Timur	8	1,8	5228	64	14,3	15769	234	52,5	22360	140	31,4	8619		0,0	
16	Banten		0,0		23	16,9	5178	94	69,1	9789	19	14,0	1195		0,0	
17	Bali	4	4,8	1193	12	14,3	2280	53	63,1	4708	15	17,9	806		0,0	
18	Nusa Tenggara Barat	1	2,2	673	4	8,7	906	24	52,2	2547	17	37,0	1085		0,0	
19	Nusa Tenggara Timur		0,0		3	4,3	681	32	46,4	3818	33	47,8	1617	1	1,4	30
20	Kalimantan Barat	1	1,7	696	4	6,8	1245	30	50,8	3460	24	40,7	1272		0,0	
21	Kalimantan Tengah		0,0		4	11,8	1058	20	58,8	2047	10	29,4	381		0,0	
22	Kalimantan Selatan	2	3,8	1008	7	13,5	1305	27	51,9	3490	16	30,8	825		0,0	
23	Kalimantan Timur	3	4,5	1337	5	7,6	1259	33	50,0	3386	24	36,4	1397	1	1,5	50
24	Kalimantan Utara		0,0		1	5,9	361	5	29,4	818	11	64,7	408		0,0	
25	Sulawesi Utara	1	1,7	730	6	10,0	1034	38	63,3	4424	15	25,0	1187		0,0	
26	Sulawesi Tengah		0,0		4	9,8	1227	23	56,1	2983	13	31,7	652	1	2,4	50
27	Sulawesi Selatan	3	2,4	1600	27	21,6	5617	69	55,2	7923	26	20,8	1409		0,0	
28	Sulawesi Tenggara		0,0		4	10,0	897	17	42,5	2106	19	47,5	1005		0,0	
29	Gorontalo		0,0		2	9,5	989	9	42,9	1152	10	47,6	604		0,0	
30	Sulawesi Barat		0,0		1	6,3	421	8	50,0	914	7	43,8	447		0,0	
31	Maluku		0,0		3	10,0	603	10	33,3	1037	17	56,7	877		0,0	
32	Maluku Utara		0,0		3	13,0	673	5	21,7	402	15	65,2	785		0,0	
33	Papua		0,0		3	16,7	554	10	55,6	1477	5	27,8	294		0,0	
34	Papua Barat		0,0			0,0		8	57,1	858	6	42,9	265		0,0	
35	Papua Selatan		0,0		1	12,5	213	1	12,5	110	6	75,0	504		0,0	
36	Papua Tengah		0,0			0,0		4	28,6	676	10	71,4	357		0,0	
37	Papua Pegunungan		0,0			0,0		1	12,5	188	7	87,5	309		0,0	
38	Papua Barat Daya		0,0			0,0		3	25,0	474	9	75,0	521		0,0	
Indonesia		83	2,5	37.062	454	13,8	108.003	1.794	54,6	195.014	953	29,0	55.596	4	0,1	130

Sumber: Ditjen. Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI 2025

Lampiran 2.14

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024 - 2025

No	Provinsi	2024				2025			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2023	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2024	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.554.815	81	10862	2,0	5.625.960	87	11.353	2,0
2	Sumatera Utara	15.588.525	210	24386	1,6	15.785.839	208	24.019	1,5
3	Sumatera Barat	5.836.156	78	8137	1,4	5.914.296	80	7.786	1,3
4	Riau	6.728.053	83	9225	1,4	6.811.158	81	8.580	1,3
5	Jambi	3.724.284	44	4575	1,2	3.768.482	45	4.504	1,2
6	Sumatera Selatan	8.837.301	88	10267	1,2	8.928.515	89	10.399	1,2
7	Bengkulu	2.112.235	26	2629	1,2	2.138.044	28	2.884	1,3
8	Lampung	9.419.582	82	9200	1,0	9.522.913	83	9.449	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.531.530	29	2520	1,6	1.550.821	29	2.561	1,7
10	Kepulauan Riau	2.183.292	36	4170	1,9	2.213.456	39	4.227	1,9
11	DKI Jakarta	10.684.946	190	28220	2,6	10.677.975	195	28.822	2,7
12	Jawa Barat	50.345.189	430	59611	1,2	50.759.003	436	61.845	1,2
13	Jawa Tengah	37.892.283	360	47447	1,3	38.233.933	369	48.302	1,3
14	DI Yogyakarta	3.759.503	79	7829	2,1	3.781.549	80	8.617	2,3
15	Jawa Timur	41.814.499	439	52006	1,2	42.089.271	446	52.115	1,2
16	Banten	12.431.391	131	15349	1,2	12.537.436	136	16.168	1,3
17	Bali	4.433.262	82	8947	2,0	4.461.267	84	8.988	2,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.646.015	46	5360	0,9	5.731.107	46	5.217	0,9
19	Nusa Tenggara Timur	5.656.039	66	6285	1,1	5.742.564	69	6.145	1,1
20	Kalimantan Barat	5.695.475	58	6580	1,2	5.766.030	59	6.667	1,2
21	Kalimantan Tengah	2.809.698	33	3514	1,3	2.844.992	34	3.483	1,2
22	Kalimantan Selatan	4.273.400	51	6433	1,5	4.323.330	52	6.628	1,5
23	Kalimantan Timur	4.045.858	62	6852	1,7	4.267.598	66	7.420	1,7
24	Kalimantan Utara	739.778	17	1750	2,4	749.367	17	1.587	2,1
25	Sulawesi Utara	2.701.777	58	7122	2,6	2.721.438	60	7.375	2,7
26	Sulawesi Tengah	3.121.753	40	4807	1,5	3.156.102	41	4.914	1,6
27	Sulawesi Selatan	9.463.385	126	16465	1,7	9.563.127	125	16.331	1,7
28	Sulawesi Tenggara	2.793.072	40	3875	1,4	2.836.738	40	3.842	1,4
29	Gorontalo	1.227.794	20	2351	1,9	1.242.238	21	2.742	2,2
30	Sulawesi Barat	1.503.232	16	1722	1,1	1.525.335	16	1.766	1,2
31	Maluku	1.945.648	30	2888	1,5	1.970.563	30	2.513	1,3
32	Maluku Utara	1.355.622	23	1766	1,3	1.373.824	23	1.860	1,4
33	Papua	1.060.551	18	2252	2,1	1.073.637	18	2.320	2,2
34	Papua Barat	578.696	12	1018	1,8	587.645	14	1.123	1,9
35	Papua Selatan	542.075	8	829	1,5	549.651	9	827	1,5
36	Papua Tengah	1.472.912	15	1007	0,7	1.492.286	13	1.033	0,7
37	Papua Pegunungan	1.467.046	9	572	0,4	1.484.858	8	497	0,3
38	Papua Barat Daya	627.127	12	1014	1,6	636.434	12	995	1,6
Indonesia		281.603.799	3.228,0	389.842	1,4	284.438.782	3.288,0	395.904	1,4

Sumber: Ditjen. Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI 2025

Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

2. Estimasi Jumlah Penduduk 2023: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 (BPS diolah Pusdatin)

3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 2.15

**PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C *)	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	14	12	85,7
2	Sumatera Utara	25	21	84,0
3	Sumatera Barat	17	17	100,0
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	9	8	88,9
6	Sumatera Selatan	13	12	92,3
7	Bengkulu	9	7	77,8
8	Lampung	13	11	84,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	5	3	60,0
11	DKI Jakarta	7	7	100,0
12	Jawa Barat	18	16	88,9
13	Jawa Tengah	32	31	96,9
14	DI Yogyakarta	2	2	100,0
15	Jawa Timur	35	32	91,4
16	Banten	10	10	100,0
17	Bali	6	5	83,3
18	Nusa Tenggara Barat	7	6	85,7
19	Nusa Tenggara Timur	18	11	61,1
20	Kalimantan Barat	12	10	83,3
21	Kalimantan Tengah	13	8	61,5
22	Kalimantan Selatan	10	10	100,0
23	Kalimantan Timur	6	6	100,0
24	Kalimantan Utara	4	4	100,0
25	Sulawesi Utara	13	10	76,9
26	Sulawesi Tengah	12	10	83,3
27	Sulawesi Selatan	21	18	85,7
28	Sulawesi Tenggara	10	6	60,0
29	Gorontalo	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	4	4	100,0
31	Maluku	5	3	60,0
32	Maluku Utara	3	1	33,3
33	Papua	4	3	75,0
34	Papua Barat	7	4	57,1
35	Papua Selatan	0	0	0,0
36	Papua Tengah	3	3	100,0
37	Papua Pegunungan	1	1	100,0
38	Papua Barat Daya	3	2	66,7
Indonesia		396	337	85,1

Sumber: SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Jumlah Rumah Sakit yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2025

Lampiran 2.16

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	87	38	43	81	93%
2	Sumatera Utara	208	61	136	197	95%
3	Sumatera Barat	80	39	40	79	99%
4	Riau	81	27	53	80	99%
5	Jambi	45	20	20	40	89%
6	Sumatera Selatan	89	43	42	85	96%
7	Bengkulu	28	16	9	25	89%
8	Lampung	83	21	61	82	99%
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	15	14	29	100%
10	Kepulauan Riau	39	17	20	37	95%
11	DKI Jakarta	195	60	124	184	94%
12	Jawa Barat	436	94	335	429	98%
13	Jawa Tengah	369	95	266	361	98%
14	DI Yogyakarta	80	18	62	80	100%
15	Jawa Timur	446	124	315	439	98%
16	Banten	136	24	109	133	98%
17	Bali	84	24	55	79	94%
18	Nusa Tenggara Barat	46	24	22	46	100%
19	Nusa Tenggara Timur	69	37	25	62	90%
20	Kalimantan Barat	59	31	22	53	90%
21	Kalimantan Tengah	34	24	9	33	97%
22	Kalimantan Selatan	52	26	26	52	100%
23	Kalimantan Timur	66	30	31	61	92%
24	Kalimantan Utara	17	16	1	17	100%
25	Sulawesi Utara	60	31	26	57	95%
26	Sulawesi Tengah	41	28	10	38	93%
27	Sulawesi Selatan	125	65	57	122	98%
28	Sulawesi Tenggara	40	24	14	38	95%
29	Gorontalo	21	15	6	21	100%
30	Sulawesi Barat	16	10	5	15	94%
31	Maluku	30	23	6	29	97%
32	Maluku Utara	23	16	5	21	91%
33	Papua	18	16	2	18	100%
34	Papua Barat	14	11	1	12	86%
35	Papua Selatan	9	8	1	9	100%
36	Papua Tengah	13	6	3	9	69%
37	Papua Pegunungan	8	7	0	7	88%
38	Papua Barat Daya	12	8	3	11	92%
Indonesia		3.288	1.192	1.979	3.171	96,4

Sumber: Ditjen Kesehatan Lanjutan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.18

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IMUNISASI RUTIN LENGKAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL**	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	366	142	38,80
2	Sumatera Utara	619	390	63,00
3	Sumatera Barat	280	257	91,79
4	Riau	241	220	91,29
5	Jambi	208	174	83,65
6	Sumatera Selatan	354	207	58,47
7	Bengkulu	179	142	79,33
8	Lampung	322	298	92,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	63	98,44
10	Kepulauan Riau	96	82	85,42
11	DKI Jakarta	44	44	100,00
12	Jawa Barat	1.106	1.011	91,41
13	Jawa Tengah	881	818	92,85
14	D.I. Yogyakarta	121	121	100,00
15	Jawa Timur	973	966	99,28
16	Banten	253	239	94,47
17	Bali	120	118	98,33
18	Nusa Tenggara Barat	177	170	96,05
19	Nusa Tenggara Timur	440	222	50,45
20	Kalimantan Barat	249	218	87,55
21	Kalimantan Tengah	205	141	68,78
22	Kalimantan Selatan	242	222	91,74
23	Kalimantan Timur	188	177	94,15
24	Kalimantan Utara	58	54	93,10
25	Sulawesi Utara	201	130	64,68
26	Sulawesi Tengah	219	171	78,08
27	Sulawesi Selatan	474	339	71,52
28	Sulawesi Tenggara	308	221	71,75
29	Gorontalo	95	79	83,16
30	Sulawesi Barat	98	57	58,16
31	Maluku	241	101	41,91
32	Maluku Utara	150	65	43,33
33	Papua	123	89	72,36
34	Papua Barat	80	16	20,00
35	Papua Selatan	85	45	52,94
36	Papua Tengah	125	27	21,60
37	Papua Pegunungan	179	23	12,85
38	Papua Barat Daya	104	36	34,62
Indonesia		10.268	7.895	76,89

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

**) Isi dengan jumlah Puskesmas yang memiliki obat esensial ≥90%

Lampiran 2.17

**JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG TERKONEKSI DENGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik	Apotek	Laboratorium Kesehatan	Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan	Unit Transfusi Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	366	86	492	816	29	724	20
2	Sumatera Utara	619	209	1206	1520	37	2033	11
3	Sumatera Barat	280	83	378	1038	82	1665	6
4	Riau	244	81	693	1223	14	536	10
5	Jambi	208	45	262	844	87	2240	6
6	Sumatera Selatan	354	89	685	1265	7	101	6
7	Bengkulu	179	28	152	523	17	976	4
8	Lampung	322	83	652	1663	169	9312	27
9	Kep. Bangka Belitung	64	30	129	351	148	8318	36
10	Kepulauan Riau	97	40	418	428	191	12846	38
11	DKI Jakarta	44	196	3008	2051	28	659	9
12	Jawa Barat	1116	437	4691	7621	27	699	13
13	Jawa Tengah	883	369	2338	6230	22	475	8
14	DI Yogyakarta	121	80	458	921	25	547	8
15	Jawa Timur	976	457	2575	6095	4	187	3
16	Banten	254	135	1785	1870	10	295	7
17	Bali	121	83	465	1278	17	607	5
18	Nusa Tenggara Barat	177	46	275	958	20	2434	14
19	Nusa Tenggara Timur	444	67	209	566	7	107	6
20	Kalimantan Barat	252	59	296	782	12	81	5
21	Kalimantan Tengah	207	34	236	618	19	664	11
22	Kalimantan Selatan	242	52	357	952	23	189	8
23	Kalimantan Timur	188	66	558	1086	4	48	0
24	Kalimantan Utara	58	17	68	199	0	18	1
25	Sulawesi Utara	203	60	172	477	0	17	2
26	Sulawesi Tengah	221	40	172	825	0	1	0
27	Sulawesi Selatan	476	125	575	2209	0	56	1
28	Sulawesi Tenggara	310	43	143	890	1	28	0
29	Gorontalo	95	22	74	279	24	2715	12
30	Sulawesi Barat	98	16	42	268	2	68	3
31	Maluku	241	31	87	223	43	875	24
32	Maluku Utara	150	23	81	211	7	229	13
33	Papua	123	19	74	244	16	217	3
34	Papua Barat	82	14	35	184	18	444	7
35	Papua Selatan	85	8	32	88	23	889	15
36	Papua Tengah	127	14	50	124	30	1501	16
37	Papua Pegunungan	188	8	6	47	53	1192	29
38	Papua Barat Daya	128	12	53	163	26	796	6
Indonesia		9977	3221	23490	46314	1213	54065	373

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.19

**JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Obat	Distributor Alat Kesehatan (DAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	36	785	542	61
2	Sumatera Utara	103	1495	805	198
3	Sumatera Barat	46	1015	200	76
4	Riau	60	1213	257	71
5	Jambi	32	834	186	36
6	Sumatera Selatan	66	1247	146	108
7	Bengkulu	17	520	111	31
8	Lampung	47	1651	85	79
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	347	86	14
10	Kepulauan Riau	31	386	216	56
11	DKI Jakarta	459	1990	513	2406
12	Jawa Barat	472	7416	1042	1397
13	Jawa Tengah	300	6150	341	403
14	D.I. Yogyakarta	61	887	57	124
15	Jawa Timur	367	5965	471	650
16	Banten	164	1819	225	642
17	Bali	75	1201	108	110
18	Nusa Tenggara Barat	27	936	71	33
19	Nusa Tenggara Timur	49	549	62	39
20	Kalimantan Barat	43	773	249	55
21	Kalimantan Tengah	13	603	203	17
22	Kalimantan Selatan	54	926	332	78
23	Kalimantan Timur	59	1029	145	89
24	Kalimantan Utara	4	195	28	4
25	Sulawesi Utara	47	450	76	45
26	Sulawesi Tengah	26	814	145	22
27	Sulawesi Selatan	134	2174	239	197
28	Sulawesi Tenggara	48	868	82	30
29	Gorontalo	16	268	39	9
30	Sulawesi Barat	5	267	27	2
31	Maluku	18	219	90	15
32	Maluku Utara	7	192	18	5
33	Papua	40	237	32	35
34	Papua Barat	12	183	10	11
35	Papua Selatan	2	85	1	6
36	Papua Tengah	7	123	5	15
37	Papua Pegunungan	2	47	0	0
38	Papua Barat Daya	11	159	1	4
Indonesia		2.975	46.018	7.246	7.173

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 2.20

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 75%
POSYANDU SIKLUS HIDUP YANG AKTIF

NO	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	% Kab/Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup Aktif	
			Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	12	52,17%
2	Sumatera Utara	33	17	51,52%
3	Sumatera Barat	19	17	89,47%
4	Riau	12	9	75,00%
5	Jambi	11	11	100,00%
6	Sumatera Selatan	17	14	82,35%
7	Bengkulu	10	10	100,00%
8	Lampung	15	15	100,00%
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,00%
10	Kepulauan Riau	7	6	85,71%
11	DKI Jakarta	6	0	0,00%
12	Jawa Barat	27	21	77,78%
13	Jawa Tengah	35	35	100,00%
14	D.I. Yogyakarta	5	5	100,00%
15	Jawa Timur	38	36	94,74%
16	Banten	8	5	62,50%
17	Bali	9	7	77,78%
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00%
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	40,91%
20	Kalimantan Barat	14	6	42,86%
21	Kalimantan Tengah	14	9	64,29%
22	Kalimantan Selatan	13	7	53,85%
23	Kalimantan Timur	10	6	60,00%
24	Kalimantan Utara	5	2	40,00%
25	Sulawesi Utara	15	8	53,33%
26	Sulawesi Tengah	13	10	76,92%
27	Sulawesi Selatan	24	18	75,00%
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00%
29	Gorontalo	6	6	100,00%
30	Sulawesi Barat	6	2	33,33%
31	Maluku	11	5	45,45%
32	Maluku Utara	10	5	50,00%
33	Papua	9	0	0,00%
34	Papua Barat	7	0	25,00%
35	Papua Selatan	4	0	0,00%
36	Papua Tengah	8	1	12,50%
37	Papua Pegunungan	8	1	0,00%
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00%
Indonesia		514	349	67,90%

Sumber: Ditjen Kesprimkom, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 3.1

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025**

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	682	673	1.355	938	2.469	3.407	1.620	3.142	4.762	16	45	61	127	645	772	143	690	833
2	Sumatera Utara	1.561	1.201	2.762	2.459	4.618	7.077	4.020	5.819	9.839	58	122	180	320	1.336	1.656	378	1.458	1.836
3	Sumatera Barat	602	631	1.233	711	2.137	2.848	1.313	2.768	4.081	15	42	57	151	799	950	166	841	1.007
4	Riau	812	538	1.350	1.141	2.827	3.968	1.953	3.365	5.318	24	52	76	139	832	971	163	884	1.047
5	Jambi	273	218	491	488	1.271	1.759	761	1.489	2.250	12	17	29	75	299	374	87	316	403
6	Sumatera Selatan	689	666	1.355	1.034	2.544	3.578	1.723	3.210	4.933	27	48	75	134	608	742	161	656	817
7	Bengkulu	153	138	291	270	668	938	423	806	1.229	2	8	10	32	171	203	34	179	213
8	Lampung	552	398	950	844	1.963	2.807	1.396	2.361	3.757	20	26	46	76	332	408	96	358	454
9	Kep. Bangka Belitung	152	119	271	296	549	845	448	668	1.116	5	21	26	47	131	178	52	152	204
10	Kepulauan Riau	340	235	575	518	1.098	1.616	858	1.333	2.191	21	24	45	97	363	460	118	387	505
11	DKI Jakarta	4.418	4.322	8.740	4.009	9.165	13.174	8.427	13.487	21.914	389	973	1.362	864	3.874	4.738	1.253	4.847	6.100
12	Jawa Barat	5.067	4.185	9.252	6.209	11.699	17.908	11.276	15.884	27.160	319	718	1.037	885	4.469	5.354	1.204	5.187	6.391
13	Jawa Tengah	3.251	2.418	5.669	4.313	8.071	12.384	7.564	10.489	18.053	158	290	448	695	2.550	3.245	853	2.840	3.693
14	DI Yogyakarta	830	783	1.613	1.147	2.116	3.263	1.977	2.899	4.876	87	223	310	211	888	1.099	298	1.111	1.409
15	Jawa Timur	3.954	3.053	7.007	4.832	8.731	13.563	8.786	11.784	20.570	317	604	921	1.017	3.729	4.746	1.334	4.333	5.667
16	Banten	1.924	1.708	3.632	1.953	4.110	6.063	3.877	5.818	9.695	128	310	438	263	1.706	1.969	391	2.016	2.407
17	Bali	1.287	895	2.182	1.903	2.560	4.463	3.190	3.455	6.645	60	68	128	355	940	1.295	415	1.008	1.423
18	Nusa Tenggara Barat	335	244	579	600	1.194	1.794	935	1.438	2.373	13	29	42	78	275	353	91	304	395
19	Nusa Tenggara Timur	275	269	544	515	1.026	1.541	790	1.295	2.085	4	21	25	67	235	302	71	256	327
20	Kalimantan Barat	353	233	586	669	919	1.588	1.022	1.152	2.174	20	20	40	110	274	384	130	294	424
21	Kalimantan Tengah	234	174	408	442	718	1.160	676	892	1.568	12	26	38	80	219	299	92	245	337
22	Kalimantan Selatan	455	342	797	663	1.191	1.854	1.118	1.533	2.651	25	45	70	209	507	716	234	552	786
23	Kalimantan Timur	559	478	1.037	814	1.645	2.459	1.373	2.123	3.496	36	71	107	168	573	741	204	644	848
24	Kalimantan Utara	104	72	176	185	277	462	289	349	638	10	17	27	32	65	97	42	82	124
25	Sulawesi Utara	375	408	783	878	1.487	2.365	1.253	1.895	3.148	5	15	20	96	241	337	101	256	357
26	Sulawesi Tengah	189	218	407	364	824	1.188	553	1.042	1.595	3	25	28	47	182	229	50	207	257
27	Sulawesi Selatan	894	1.207	2.101	938	2.620	3.558	1.832	3.827	5.659	79	191	270	286	1.195	1.481	365	1.386	1.751
28	Sulawesi Tenggara	188	195	383	378	988	1.366	566	1.183	1.749	16	29	45	69	334	403	85	363	448
29	Gorontalo	104	95	199	164	291	455	268	386	654	3	4	7	23	73	96	26	77	103
30	Sulawesi Barat	67	87	154	93	281	374	160	368	528	4	15	19	23	101	124	27	116	143
31	Maluku	96	125	221	201	543	744	297	668	965	8	15	23	27	110	137	35	125	160
32	Maluku Utara	92	76	168	186	366	552	278	442	720	6	6	12	32	77	109	38	83	121
33	Papua	112	114	226	183	434	617	295	548	843	3	9	12	23	60	83	26	69	95
34	Papua Barat	50	46	96	107	182	289	157	228	385	1	4	5	16	33	49	17	37	54
35	Papua Selatan	34	41	75	71	149	220	105	190	295	1	4	5	6	19	25	7	23	30
36	Papua Tengah	58	48	106	130	236	366	188	284	472	1	2	3	10	40	50	11	42	53
37	Papua Pegunungan	25	22	47	72	80	152	97	102	199	0	2	2	4	17	21	4	19	23
38	Papua Barat Daya	54	31	85	93	200	293	147	231	378	0	3	3	19	30	49	19	33	52
Indonesia		31.200	26.706	57.906	40.811	82.247	123.058	72.011	108.953	180.964	1.908	4.144	6.052	6.913	28.332	35.245	8.821	32.476	41.297

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.2

JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	1	7	8	301	1.032	1.333	302	1.039	1.341	0	0	0	65	397	462	65	397	462
2	Sumatera Utara	2	4	6	660	1.634	2.294	662	1.638	2.300	0	3	3	95	606	701	95	609	704
3	Sumatera Barat	1	10	11	212	784	996	213	794	1.007	0	0	0	69	385	454	69	385	454
4	Riau	4	7	11	280	933	1.213	284	940	1.224	0	0	0	47	336	383	47	336	383
5	Jambi	2	2	4	165	524	689	167	526	693	1	0	1	34	162	196	35	162	197
6	Sumatera Selatan	1	9	10	293	876	1.169	294	885	1.179	0	0	0	49	242	291	49	242	291
7	Bengkulu	0	0	0	121	314	435	121	314	435	0	0	0	15	113	128	15	113	128
8	Lampung	6	15	21	309	777	1.086	315	792	1.107	0	0	0	23	175	198	23	175	198
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	118	216	334	118	216	334	0	0	0	25	60	85	25	60	85
10	Kepulauan Riau	0	0	0	130	355	485	130	355	485	0	0	0	18	108	126	18	108	126
11	DKI Jakarta	0	8	8	395	1.108	1.503	395	1.116	1.511	0	0	0	43	235	278	43	235	278
12	Jawa Barat	2	1	3	1.160	2.735	3.895	1.162	2.736	3.898	0	0	0	201	1.007	1.208	201	1.007	1.208
13	Jawa Tengah	2	1	3	1.150	2.631	3.781	1.152	2.632	3.784	0	0	0	213	1.025	1.238	213	1.025	1.238
14	DI Yogyakarta	2	1	3	163	534	697	165	535	700	1	1	2	22	232	254	23	233	256
15	Jawa Timur	0	1	1	1.183	2.637	3.820	1.183	2.638	3.821	0	1	1	238	1.139	1.377	238	1.140	1.378
16	Banten	1	1	2	307	849	1.156	308	850	1.158	0	0	0	55	380	435	55	380	435
17	Bali	0	4	4	403	607	1.010	403	611	1.014	0	0	0	97	272	369	97	272	369
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	210	492	702	210	492	702	0	0	0	44	164	208	44	164	208
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	236	469	705	236	469	705	0	0	0	39	158	197	39	158	197
20	Kalimantan Barat	0	1	1	240	373	613	240	374	614	1	0	1	44	118	162	45	118	163
21	Kalimantan Tengah	0	1	1	172	301	473	172	302	474	0	0	0	40	125	165	40	125	165
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	200	498	698	200	498	698	0	0	0	90	246	336	90	246	336
23	Kalimantan Timur	0	0	0	205	501	706	205	501	706	0	0	0	49	227	276	49	227	276
24	Kalimantan Utara	0	1	1	60	133	193	60	134	194	0	0	0	14	36	50	14	36	50
25	Sulawesi Utara	0	0	0	189	531	720	189	531	720	0	0	0	40	116	156	40	116	156
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	141	411	552	141	411	552	0	0	0	23	128	151	23	128	151
27	Sulawesi Selatan	0	1	1	304	1.103	1.407	304	1.104	1.408	0	0	0	95	586	681	95	586	681
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	169	557	726	169	557	726	0	0	0	43	217	260	43	217	260
29	Gorontalo	0	1	1	72	121	193	72	122	194	0	0	0	14	53	67	14	53	67
30	Sulawesi Barat	0	0	0	56	189	245	56	189	245	0	0	0	18	82	100	18	82	100
31	Maluku	0	0	0	96	309	405	96	309	405	0	0	0	11	64	75	11	64	75
32	Maluku Utara	0	0	0	81	185	266	81	185	266	0	0	0	21	56	77	21	56	77
33	Papua	0	0	0	63	178	241	63	178	241	0	0	0	7	21	28	7	21	28
34	Papua Barat	0	0	0	47	72	119	47	72	119	0	0	0	6	19	25	6	19	25
35	Papua Selatan	0	0	0	21	82	103	21	82	103	0	0	0	0	13	13	0	13	13
36	Papua Tengah	0	0	0	50	125	175	50	125	175	0	0	0	1	22	23	1	22	23
37	Papua Pegunungan	0	0	0	40	35	75	40	35	75	0	0	0	2	13	15	2	13	15
38	Papua Barat Daya	0	0	0	31	101	132	31	101	132	0	0	0	5	15	20	5	15	20
Indonesia		24	76	100	10.033	25.312	35.345	10.057	25.388	35.445	3	5	8	1.915	9.353	11.268	1.918	9.358	11.276

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.3

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	668	655	1.323	618	1.253	1.871	1.286	1.908	3.194	15	45	60	46	142	188	61	187	248
2	Sumatera Utara	1.526	1.143	2.669	1.463	2.158	3.621	2.989	3.301	6.290	42	101	143	89	306	395	131	407	538
3	Sumatera Barat	587	600	1.187	428	1.085	1.513	1.015	1.685	2.700	15	40	55	53	229	282	68	269	337
4	Riau	796	519	1.315	541	1.111	1.652	1.337	1.630	2.967	20	46	66	41	161	202	61	207	268
5	Jambi	264	213	477	234	551	785	498	764	1.262	12	16	28	22	63	85	34	79	113
6	Sumatera Selatan	678	648	1.326	597	1.245	1.842	1.275	1.893	3.168	21	43	64	31	161	192	52	204	256
7	Bengkulu	153	134	287	138	323	461	291	457	748	2	8	10	6	38	44	8	46	54
8	Lampung	529	357	886	399	817	1.216	928	1.174	2.102	16	22	38	23	74	97	39	96	135
9	Kep. Bangka Belitung	150	115	265	138	232	370	288	347	635	5	21	26	15	34	49	20	55	75
10	Kepulauan Riau	328	222	550	252	466	718	580	688	1.268	16	20	36	14	68	82	30	88	118
11	DKI Jakarta	4.084	3.835	7.919	1.836	3.590	5.426	5.920	7.425	13.345	253	605	858	211	879	1.090	464	1.484	1.948
12	Jawa Barat	4.873	3.926	8.799	2.923	5.014	7.937	7.796	8.940	16.736	279	531	810	265	1.007	1.272	544	1.538	2.082
13	Jawa Tengah	3.178	2.338	5.516	2.388	3.846	6.234	5.566	6.184	11.750	126	232	358	210	652	862	336	884	1.220
14	DI Yogyakarta	798	750	1.548	837	1.189	2.026	1.635	1.939	3.574	71	165	236	122	317	439	193	482	675
15	Jawa Timur	3.779	2.893	6.672	2.468	3.878	6.346	6.247	6.771	13.018	238	466	704	300	960	1.260	538	1.426	1.964
16	Banten	1.852	1.587	3.439	981	1.807	2.788	2.833	3.394	6.227	83	213	296	60	358	418	143	571	714
17	Bali	1.239	840	2.079	1.067	1.480	2.547	2.306	2.320	4.626	35	44	79	86	242	328	121	286	407
18	Nusa Tenggara Barat	322	239	561	336	621	957	658	860	1.518	12	29	41	19	80	99	31	109	140
19	Nusa Tenggara Timur	268	264	532	281	522	803	549	786	1.335	4	20	24	13	53	66	17	73	90
20	Kalimantan Barat	345	224	569	293	436	729	638	660	1.298	18	20	38	46	101	147	64	121	185
21	Kalimantan Tengah	224	164	388	179	308	487	403	472	875	12	23	35	22	43	65	34	66	100
22	Kalimantan Selatan	419	323	742	397	546	943	816	869	1.685	23	39	62	60	121	181	83	160	243
23	Kalimantan Timur	541	459	1.000	386	765	1.151	927	1.224	2.151	31	62	93	51	141	192	82	203	285
24	Kalimantan Utara	102	71	173	92	133	225	194	204	398	9	17	26	5	14	19	14	31	45
25	Sulawesi Utara	362	391	753	677	914	1.591	1.039	1.305	2.344	5	15	20	29	99	128	34	114	148
26	Sulawesi Tengah	182	214	396	164	368	532	346	582	928	2	22	24	13	39	52	15	61	76
27	Sulawesi Selatan	877	1.177	2.054	583	1.288	1.871	1.460	2.465	3.925	74	182	256	141	400	541	215	582	797
28	Sulawesi Tenggara	179	189	368	224	466	690	403	655	1.058	15	28	43	30	110	140	45	138	183
29	Gorontalo	104	93	197	105	160	265	209	253	462	3	4	7	5	14	19	8	18	26
30	Sulawesi Barat	67	85	152	46	102	148	113	187	300	4	15	19	4	14	18	8	29	37
31	Maluku	94	118	212	96	239	335	190	357	547	6	13	19	10	36	46	16	49	65
32	Maluku Utara	88	74	162	80	159	239	168	233	401	6	6	12	9	21	30	15	27	42
33	Papua	109	109	218	104	224	328	213	333	546	3	9	12	15	32	47	18	41	59
34	Papua Barat	50	46	96	46	97	143	96	143	239	1	4	5	8	10	18	9	14	23
35	Papua Selatan	34	41	75	38	56	94	72	97	169	0	4	4	4	5	9	4	9	13
36	Papua Tengah	54	46	100	58	88	146	112	134	246	1	2	3	3	9	12	4	11	15
37	Papua Pegunungan	25	22	47	25	45	70	50	67	117	0	2	2	2	5	7	2	7	9
38	Papua Barat Daya	50	30	80	44	78	122	94	108	202	0	3	3	10	13	23	10	16	26
Indonesia		29.978	25.154	55.132	21.562	37.660	59.222	51.540	62.814	114.354	1.478	3.137	4.615	2.093	7.051	9.144	3.571	10.188	13.759

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.4

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	156	119	138	90	36	101	22	47	5	609	60	1.383
2	Sumatera Utara	285	284	268	180	86	146	70	131	4	1.215	143	2.812
3	Sumatera Barat	121	119	97	76	31	70	33	65	2	573	55	1.242
4	Riau	129	155	114	105	52	84	27	51	2	596	66	1.381
5	Jambi	54	58	42	35	20	36	10	25	2	195	28	505
6	Sumatera Selatan	143	166	122	83	41	72	38	46	3	612	64	1.390
7	Bengkulu	29	35	29	26	15	18	7	15	1	112	10	297
8	Lampung	91	105	80	67	40	55	17	42	3	386	38	924
9	Kep. Bangka Belitung	26	26	28	22	15	16	6	18	1	107	26	291
10	Kepulauan Riau	56	55	51	48	24	41	11	25	1	238	36	586
11	DKI Jakarta	623	636	657	314	298	469	112	214	23	4.573	858	8.777
12	Jawa Barat	835	883	827	529	396	580	121	311	34	4.283	810	9.609
13	Jawa Tengah	594	500	466	344	254	401	72	214	20	2.651	358	5.874
14	DI Yogyakarta	132	105	126	92	68	89	22	60	1	853	236	1.784
15	Jawa Timur	654	608	566	379	295	441	121	228	20	3.360	704	7.376
16	Banten	297	373	348	194	156	221	38	101	15	1.696	296	3.735
17	Bali	202	210	196	143	76	131	37	53	3	1.028	79	2.158
18	Nusa Tenggara Barat	54	58	47	42	26	35	12	23	0	264	41	602
19	Nusa Tenggara Timur	68	62	57	49	34	49	13	30	1	169	24	556
20	Kalimantan Barat	59	70	61	48	27	41	12	23	2	226	38	607
21	Kalimantan Tengah	38	39	39	33	23	34	7	24	2	149	35	423
22	Kalimantan Selatan	80	70	62	44	27	49	19	30	1	360	62	804
23	Kalimantan Timur	101	91	92	68	40	80	23	45	3	457	93	1.093
24	Kalimantan Utara	16	15	21	18	10	13	2	5	1	72	26	199
25	Sulawesi Utara	114	78	76	51	25	41	4	27	2	335	20	773
26	Sulawesi Tengah	47	47	36	32	23	27	7	26	1	150	24	420
27	Sulawesi Selatan	203	182	156	119	98	112	46	95	5	1.038	256	2.310
28	Sulawesi Tenggara	52	36	38	27	21	28	2	22	1	141	43	411
29	Gorontalo	30	19	20	16	10	14	5	11	0	72	7	204
30	Sulawesi Barat	16	13	14	15	9	11	2	9	1	62	19	171
31	Maluku	20	20	19	19	14	13	8	16	0	83	19	231
32	Maluku Utara	21	20	19	20	7	13	3	8	2	49	12	174
33	Papua	19	23	20	20	12	14	1	11	1	97	12	230
34	Papua Barat	14	12	16	12	5	9	2	7	0	19	5	101
35	Papua Selatan	10	7	6	7	5	6	1	7	0	26	4	79
36	Papua Tengah	12	12	12	10	4	12	1	10	0	27	3	103
37	Papua Pegunungan	5	7	7	6	2	2	0	5	0	13	2	49
38	Papua Barat Daya	11	14	10	8	2	4	2	4	0	25	3	83
Indonesia		5.417	5.332	4.983	3.391	2.327	3.578	936	2.084	163	26.921	4.615	59.747

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.5

KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	16,94%	3,28%	79,78%	65,57%	6,28%	28,14%	0,27%	0,27%	99,45%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Sumatera Utara	15,67%	3,39%	80,94%	57,67%	17,45%	24,88%	6,95%	10,02%	83,04%	0,65%	0,48%	98,87%
3	Sumatera Barat	17,14%	6,07%	76,79%	57,86%	1,79%	40,36%	7,14%	10,36%	82,50%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Riau	9,92%	4,55%	85,54%	51,24%	6,61%	42,15%	1,65%	2,07%	96,28%	0,00%	0,00%	100,00%
5	Jambi	24,04%	3,85%	72,12%	66,83%	21,63%	11,54%	1,44%	1,44%	97,12%	0,00%	0,00%	100,00%
6	Sumatera Selatan	24,86%	6,21%	68,93%	44,07%	38,14%	17,80%	1,41%	1,98%	96,61%	0,00%	0,00%	100,00%
7	Bengkulu	37,99%	11,73%	50,28%	56,98%	36,31%	6,70%	3,35%	2,23%	94,41%	0,56%	0,00%	99,44%
8	Lampung	20,81%	3,73%	75,47%	40,99%	51,24%	7,76%	4,04%	4,04%	91,93%	0,31%	0,62%	99,07%
9	Kep. Bangka Belitung	7,81%	0,00%	92,19%	70,31%	7,81%	21,88%	0,00%	1,56%	98,44%	0,00%	0,00%	100,00%
10	Kepulauan Riau	23,96%	4,17%	71,88%	52,08%	16,67%	31,25%	2,08%	5,21%	92,71%	1,04%	1,04%	97,92%
11	DKI Jakarta	0,00%	0,00%	100,00%	2,27%	0,00%	97,73%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	Jawa Barat	14,65%	1,63%	83,73%	67,36%	16,73%	15,91%	9,86%	14,92%	75,23%	4,97%	3,44%	91,59%
13	Jawa Tengah	11,58%	1,48%	86,95%	74,12%	3,86%	22,02%	6,47%	3,63%	89,90%	0,68%	0,23%	99,09%
14	DI Yogyakarta	7,44%	0,83%	91,74%	48,76%	0,00%	51,24%	15,70%	17,36%	66,94%	10,74%	12,40%	76,86%
15	Jawa Timur	22,75%	5,12%	72,13%	68,24%	2,46%	29,30%	1,95%	0,61%	97,44%	0,41%	0,00%	99,59%
16	Banten	7,11%	1,58%	91,30%	42,69%	10,28%	47,04%	5,53%	2,77%	91,70%	0,00%	0,00%	100,00%
17	Bali	5,00%	0,00%	95,00%	28,33%	0,83%	70,83%	2,50%	1,67%	95,83%	0,00%	0,00%	100,00%
18	Nusa Tenggara Barat	20,90%	6,21%	72,88%	76,27%	9,60%	14,12%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	Nusa Tenggara Timur	43,54%	35,37%	21,09%	41,95%	55,33%	2,72%	0,00%	0,91%	99,09%	1,13%	0,45%	98,41%
20	Kalimantan Barat	33,33%	16,27%	50,40%	49,60%	44,44%	5,95%	4,76%	5,16%	90,08%	3,17%	1,59%	95,24%
21	Kalimantan Tengah	30,73%	23,41%	45,85%	51,22%	36,10%	12,68%	0,00%	1,46%	98,54%	0,98%	1,95%	97,07%
22	Kalimantan Selatan	23,97%	3,72%	72,31%	64,05%	4,55%	31,40%	3,31%	1,24%	95,45%	0,83%	0,41%	98,76%
23	Kalimantan Timur	20,21%	13,83%	65,96%	57,45%	9,04%	33,51%	5,32%	7,45%	87,23%	4,79%	1,06%	94,15%
24	Kalimantan Utara	17,24%	12,07%	70,69%	53,45%	27,59%	18,97%	3,45%	1,72%	94,83%	5,17%	3,45%	91,38%
25	Sulawesi Utara	23,65%	12,81%	63,55%	56,65%	33,00%	10,34%	6,90%	6,90%	86,21%	8,37%	17,73%	73,89%
26	Sulawesi Tengah	35,62%	21,00%	43,38%	46,58%	41,55%	11,87%	1,37%	1,37%	97,26%	0,91%	0,00%	99,09%
27	Sulawesi Selatan	30,38%	12,24%	57,38%	57,81%	3,80%	38,40%	0,84%	0,42%	98,73%	0,00%	0,42%	99,58%
28	Sulawesi Tenggara	42,53%	8,44%	49,03%	61,36%	29,55%	9,09%	0,97%	1,62%	97,40%	0,00%	0,65%	99,35%
29	Gorontalo	52,63%	7,37%	40,00%	65,26%	30,53%	4,21%	3,16%	2,11%	94,74%	0,00%	0,00%	100,00%
30	Sulawesi Barat	39,80%	11,22%	48,98%	63,27%	17,35%	19,39%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
31	Maluku	47,72%	26,56%	25,73%	26,14%	72,20%	1,66%	2,90%	9,13%	87,97%	7,47%	14,11%	78,42%
32	Maluku Utara	42,67%	18,00%	39,33%	47,33%	50,67%	2,00%	2,00%	4,00%	94,00%	0,00%	0,00%	100,00%
33	Papua	30,89%	30,08%	39,02%	21,14%	78,05%	0,81%	1,63%	4,07%	94,31%	5,69%	21,95%	72,36%
34	Papua Barat	46,91%	25,93%	27,16%	17,28%	74,07%	8,64%	3,70%	9,88%	86,42%	4,94%	11,11%	83,95%
35	Papua Selatan	22,35%	61,18%	16,47%	11,76%	87,06%	1,18%	9,41%	14,12%	76,47%	9,41%	25,88%	64,71%
36	Papua Tengah	34,65%	40,16%	25,20%	12,60%	84,25%	3,15%	2,36%	19,69%	77,95%	8,66%	40,94%	50,39%
37	Papua Pegunungan	20,77%	72,13%	7,10%	6,56%	92,35%	1,09%	7,65%	57,38%	34,97%	6,56%	73,77%	19,67%
38	Papua Barat Daya	43,70%	32,77%	23,53%	13,45%	83,19%	3,36%	5,88%	21,01%	73,11%	6,72%	29,41%	63,87%
Indonesia		25,57%	14,43%	59,99%	47,28%	31,64%	21,08%	3,58%	6,57%	89,85%	2,48%	6,92%	90,60%

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026
Keterangan : Perhitungan kecukupan berdasarkan standar Ketegaan Minimum sesuai Permenkes No 43 Tahun 2019

Lampiran 3.6

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kesehatan																Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Sumatera Utara	4	14	150	0	33	3	1.621	2.054	216	302	59	95	19	114	115	0	4.795	503	5.298
2	Sumatera Barat	1	7	31	0	14	0	391	292	40	83	12	32	4	17	27	0	950	421	1.371
3	Sumatera Selatan	1	10	55	0	9	1	306	381	74	55	14	22	4	31	36	0	998	224	1.222
4	Lampung	1	10	46	0	1	0	204	369	57	34	25	23	1	33	36	0	839	171	1.010
5	Nusa Tenggara Barat	1	19	126	3	11	1	494	293	125	75	21	47	2	73	92	0	1.382	482	1.864
6	Nusa Tenggara Timur	13	182	686	7	146	2	7.270	5.810	1.097	1.494	592	822	56	714	822	0	19.700	4.449	24.149
7	Sulawesi Tengah	3	58	196	6	36	7	1.636	1.498	315	689	186	138	16	65	147	0	4.993	830	5.823
8	Maluku	6	38	226	6	29	2	3.006	1.728	299	767	303	329	9	59	263	0	7.064	959	8.023
9	Maluku Utara	2	9	34	1	5	0	513	511	78	209	27	39	0	22	51	0	1.499	204	1.703
10	Papua	4	14	79	2	10	0	866	377	101	130	49	65	2	20	119	0	1.834	441	2.275
11	Papua Barat	4	29	106	0	15	0	821	503	113	135	34	69	6	29	107	0	1.967	601	2.568
12	Papua Selatan	3	28	87	1	6	1	859	548	119	156	47	64	5	31	100	0	2.052	393	2.445
13	Papua Tengah	7	49	176	1	22	1	1.697	725	237	327	77	72	11	36	145	0	3.576	1.220	4.796
14	Papua Pegunungan	8	47	152	2	21	1	1.410	605	184	321	65	66	5	20	112	63	3.074	922	3.996
15	Papua Barat Daya	4	33	131	2	16	1	1.156	665	174	261	86	146	6	25	107	0	2.809	700	3.509
Indonesia		62	547	2.281	31	374	20	22.250	16.359	3.229	5.038	1.597	2.029	146	1.289	2.279	63	57.532	12.520	70.052

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: *berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

Lampiran 3.7

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA MEDIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	992	276	14	286	1.568
2	Sumatera Utara	2.675	958	56	599	4.288
3	Sumatera Barat	1.119	393	14	269	1.795
4	Riau	1.373	314	14	246	1.947
5	Jambi	614	99	6	90	809
6	Sumatera Selatan	1.173	262	19	352	1.806
7	Bengkulu	290	62	2	57	411
8	Lampung	1.050	116	6	164	1.336
9	Kepulauan Bangka Belitung	176	53	5	38	272
10	Kepulauan Riau	424	158	12	82	676
11	DKI Jakarta	4.373	1.313	257	1.974	7.917
12	Jawa Barat	6.661	1.839	215	1.505	10.220
13	Jawa Tengah	4.159	1.355	67	1.168	6.749
14	DI Yogyakarta	1.173	429	79	447	2.128
15	Jawa Timur	4.926	1.781	256	1.559	8.522
16	Banten	2.254	673	73	501	3.501
17	Bali	1.815	542	25	531	2.913
18	Nusa Tenggara Barat	600	106	11	97	814
19	Nusa Tenggara Timur	530	54	6	72	662
20	Kalimantan Barat	635	113	10	98	856
21	Kalimantan Tengah	425	78	4	70	577
22	Kalimantan Selatan	545	291	20	152	1.008
23	Kalimantan Timur	792	262	13	198	1.265
24	Kalimantan Utara	136	30	4	27	197
25	Sulawesi Utara	699	163	3	194	1.059
26	Sulawesi Tengah	490	66	8	61	625
27	Sulawesi Selatan	2.291	620	123	663	3.697
28	Sulawesi Tenggara	525	86	11	68	690
29	Gorontalo	140	26	3	36	205
30	Sulawesi Barat	105	39	1	16	161
31	Maluku	373	34	2	34	443
32	Maluku Utara	177	23	1	21	222
33	Papua	338	46	2	34	420
34	Papua Barat	18	1	0	3	22
35	Papua Selatan	39	5	0	1	45
36	Papua Tengah	324	38	3	42	407
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	2	0	0	0	2
Indonesia		44.431	12.704	1.345	11.755	70.235

Sumber : Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Lampiran 3.8

**JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025**

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	4.590	972	64	1.311	6.937
2	Sumatera Utara	11.510	2.983	242	3.246	17.981
3	Sumatera Barat	4.512	1.457	63	1.367	7.399
4	Riau	6.053	1.241	68	1.204	8.566
5	Jambi	2.558	424	26	470	3.478
6	Sumatera Selatan	5.006	929	71	1.439	7.445
7	Bengkulu	1.282	245	9	247	1.783
8	Lampung	3.714	421	34	827	4.996
9	Kepulauan Bangka Belitung	737	189	24	229	1.179
10	Kepulauan Riau	1.617	423	34	422	2.496
11	DKI Jakarta	18.971	5.536	1.288	9.098	34.893
12	Jawa Barat	26.666	6.805	990	7.220	41.681
13	Jawa Tengah	16.074	3.964	389	5.253	25.680
14	DI Yogyakarta	4.657	1.438	409	2.043	8.547
15	Jawa Timur	19.467	6.675	1.186	7.331	34.659
16	Banten	9.361	2.819	336	2.524	15.040
17	Bali	5.983	1.700	110	2.415	10.208
18	Nusa Tenggara Barat	2.212	350	35	501	3.098
19	Nusa Tenggara Timur	1.521	248	22	360	2.151
20	Kalimantan Barat	2.099	352	33	483	2.967
21	Kalimantan Tengah	1.423	294	26	320	2.063
22	Kalimantan Selatan	2.117	913	58	687	3.775
23	Kalimantan Timur	2.898	829	94	911	4.732
24	Kalimantan Utara	452	102	21	124	699
25	Sulawesi Utara	3.020	498	19	891	4.428
26	Sulawesi Tengah	1.615	205	26	312	2.158
27	Sulawesi Selatan	7.008	2.282	368	2.668	12.326
28	Sulawesi Tenggara	1.577	299	29	282	2.187
29	Gorontalo	476	85	8	157	726
30	Sulawesi Barat	306	120	16	96	538
31	Maluku	968	113	16	176	1.273
32	Maluku Utara	508	68	8	110	694
33	Papua	770	102	6	156	1.034
34	Papua Barat	23	2	0	3	28
35	Papua Selatan	44	5	0	1	50
36	Papua Tengah	1.518	165	15	274	1.972
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	2	0	0	0	2
Indonesia		173.315	45.253	6.143	55.158	279.869

Sumber : Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Lampiran 3.9

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	0	0	0
2	Sumatera Utara	1	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0
4	Riau	0	0	0
5	Jambi	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	0	0
7	Bengkulu	0	0	0
8	Lampung	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0
10	Kepulauan Riau	2	2	2
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0
16	Banten	0	0	0
17	Bali	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	2	2
21	Kalimantan Tengah	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0
23	Kalimantan Timur	2	1	2
24	Kalimantan Utara	0	0	1
25	Sulawesi Utara	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	3	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	3	1	1
29	Gorontalo	1	0	0
30	Sulawesi Barat	1	0	0
31	Maluku	2	3	2
32	Maluku Utara	4	0	1
33	Papua	2	1	1
34	Papua Barat	1	0	0
35	Papua Selatan	0	0	1
36	Papua Tengah	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0
Indonesia		23	10	13

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 3.10

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN
PERIODE I-II TAHUN 2025**

No	Provinsi	Periode I Tahun 2025		Periode II Tahun 2025	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	12	32	13	41
2	Sumatera Utara	24	100	18	104
3	Sumatera Barat	10	32	8	26
4	Riau	9	18	8	22
5	Jambi	7	23	8	22
6	Sumatera Selatan	10	35	9	26
7	Bengkulu	7	22	6	19
8	Lampung	12	36	6	22
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	2
10	Kepulauan Riau	5	20	4	16
11	Kalimantan Barat	11	28	9	21
12	Kalimantan Tengah	11	30	11	47
13	Kalimantan Selatan	4	6	5	16
14	Kalimantan Timur	4	17	5	19
15	Kalimantan Utara	3	4	2	8
16	Gorontalo	5	19	4	17
17	Maluku	8	46	10	74
18	Maluku Utara	7	26	6	28
19	Nusa Tenggara Barat	5	10	5	12
20	Nusa Tenggara Timur	16	55	19	76
21	Sulawesi Utara	6	31	9	39
22	Sulawesi Tengah	11	32	11	35
23	Sulawesi Selatan	10	25	13	40
24	Sulawesi Tenggara	14	53	13	40
25	Sulawesi Barat	3	5	4	18
26	Papua	6	17	4	13
27	Papua Barat	4	7	2	8
28	Papua Selatan	3	14	2	13
29	Papua Tengah	3	6	4	28
30	Papua Barat Daya	4	22	4	29
Indonesia		235	772	223	881

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.11

JUMLAH PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN PERIODE I SAMPAI DENGAN II
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Tenaga										Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Terapis Gigi dan Mulut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	9	24	0	0	4	6	12	1	17	10	83
2	Sumatera Utara	19	38	0	0	61	39	57	12	64	38	328
3	Sumatera Barat	3	15	0	0	4	5	16	10	9	9	71
4	Riau	0	8	0	0	10	2	13	5	5	12	55
5	Jambi	3	13	0	0	9	2	10	2	5	8	52
6	Sumatera Selatan	8	8	0	0	10	8	11	3	17	17	82
7	Bengkulu	2	14	0	0	2	4	11	1	4	12	50
8	Lampung	1	15	0	0	10	5	16	10	12	9	78
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
10	Kepulauan Riau	5	10	0	0	3	2	5	0	13	8	46
11	Kalimantan Barat	6	17	0	0	4	3	19	10	5	6	70
12	Kalimantan Tengah	9	20	0	0	7	2	32	9	7	23	109
13	Kalimantan Selatan	8	6	0	0	0	7	2	0	2	5	30
14	Kalimantan Timur	5	13	0	0	9	0	9	0	0	11	47
15	Kalimantan Utara	1	0	0	0	3	1	5	1	2	2	15
16	Gorontalo	0	17	0	0	0	3	6	0	3	14	43
17	Maluku	36	16	0	0	17	39	20	6	36	25	195
18	Maluku Utara	11	17	0	0	5	10	12	2	6	9	72
19	Nusa Tenggara Barat	5	11	0	0	5	1	4	1	0	1	28
20	Nusa Tenggara Timur	46	39	0	0	6	7	16	4	11	32	161
21	Sulawesi Utara	5	27	0	0	8	11	7	4	26	13	101
22	Sulawesi Tengah	5	23	0	0	7	6	12	1	16	13	83
23	Sulawesi Selatan	12	19	0	0	9	5	7	4	11	10	77
24	Sulawesi Tenggara	19	34	0	0	9	4	11	0	18	20	115
25	Sulawesi Barat	5	9	0	0	1	0	2	0	0	10	27
26	Papua	11	2	0	0	2	7	8	4	5	1	40
27	Papua Barat	6	1	0	0	3	3	6	2	2	4	27
28	Papua Selatan	7	0	0	0	3	5	14	4	4	1	38
29	Papua Tengah	2	2	0	0	12	10	20	11	10	2	69
30	Papua Barat Daya	12	0	0	0	5	17	22	8	7	11	82
Indonesia		261	419	0	0	228	214	387	115	317	336	2277

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.12

JUMLAH DOKTER INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Internship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	64	44	111	89	308
2	Sumatera Utara	120	105	69	245	539
3	Sumatera Barat	61	82	63	103	309
4	Riau	69	69	32	108	278
5	Jambi	47	40	48	76	211
6	Sumatera Selatan	93	81	155	168	497
7	Bengkulu	42	27	55	55	179
8	Lampung	77	44	61	47	229
9	Kepulauan Bangka Belitung	37	16	85	40	178
10	Kepulauan Riau	67	55	48	64	234
11	DKI Jakarta	79	48	252	128	507
12	Jawa Barat	176	266	465	498	1405
13	Jawa Tengah	287	275	550	489	1601
14	DI Yogyakarta	62	80	127	95	364
15	Jawa Timur	166	299	675	514	1654
16	Banten	111	48	124	166	449
17	Bali	95	112	318	144	669
18	Nusa Tenggara Barat	79	49	77	35	240
19	Nusa Tenggara Timur	70	33	119	76	298
20	Kalimantan Barat	21	31	77	28	157
21	Kalimantan Tengah	36	17	32	26	111
22	Kalimantan Selatan	42	50	52	43	187
23	Kalimantan Timur	106	71	59	87	323
24	Kalimantan Utara	7	14	40	0	61
25	Sulawesi Utara	48	51	65	76	240
26	Sulawesi Tengah	16	12	60	48	136
27	Sulawesi Selatan	84	28	133	144	389
28	Sulawesi Tenggara	87	100	61	44	292
29	Gorontalo	28	0	20	28	76
30	Sulawesi Barat	15	7	11	20	53
31	Maluku	36	21	46	27	130
32	Maluku Utara	15	5	8	23	51
33	Papua	7	0	12	48	67
34	Papua Barat	0	0	27	0	27
35	Papua Selatan	0	0	0	7	7
36	Papua Tengah	0	17	0	10	27
37	Papua Pegunungan	0	0	6	0	6
38	Papua Barat Daya	7	16	7	0	30
Indonesia		2.357	2.213	4.150	3.799	12.519

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 3.13

**JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Gigi Internship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	14	17	8	16	55
2	Sumatera Utara	46	26	14	16	102
3	Sumatera Barat	72	50	46	46	214
4	Riau	20	0	16	0	36
5	Jambi	12	0	9	10	31
6	Sumatera Selatan	19	21	8	20	68
7	Bengkulu	0	0	6	0	6
8	Lampung	20	14	16	7	57
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	8	8	10	26
10	Kepulauan Riau	0	14	0	10	24
11	DKI Jakarta	28	36	8	54	126
12	Jawa Barat	122	136	40	130	428
13	Jawa Tengah	166	171	107	159	603
14	DI Yogyakarta	32	40	16	64	152
15	Jawa Timur	104	111	40	109	364
16	Banten	46	27	18	37	128
17	Bali	56	38	16	57	167
18	Nusa Tenggara Barat	31	20	22	18	91
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	31	14	28	20	93
21	Kalimantan Tengah	8	0	8	0	16
22	Kalimantan Selatan	40	15	32	16	103
23	Kalimantan Timur	28	24	23	31	106
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	12	0	12	0	24
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	32	34	30	40	136
28	Sulawesi Tenggara	48	14	30	8	100
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	8	6	8	0	22
31	Maluku	9	7	5	7	28
32	Maluku Utara	0	0	0	7	7
33	Papua	0	5	0	4	9
34	Papua Barat	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Indonesia		1.004	848	574	896	3.322

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2025

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Spesialis Anak	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Bedah	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Radiologi	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis Kedokteran Jwa	Spesialis Mata	Spesialis Onkologi Radiasi	Spesialis Paru	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Syaraf	Spesialis THT-RL	Spesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika	Spesialis Gizi Klinik	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Spesialis Kedokteran Nuklir	Spesialis Mikrobiologi Klinik	Spesialis Urologi	Spesialis Kedokteran Gigi	Spesialis Ortopedi dan Traumatologi	Spesialis Kedokteran Okupasi	Spesialis Kedokteran Akupunktur	Spesialis Ilmu Kedokteran Andrologi	Spesialis Forensik dan Studi Medis Legal	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
1	Aceh	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	1	1	3	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	
2	Sumatera Utara	2	0	1	1	1	0	0	2	3	0	0	0	2	3	3	0	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	26
3	Sumatera Barat	2	2	3	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18
4	Riau	2	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	17
5	Jambi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	Sumatera Selatan	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	11
7	Bengkulu	3	2	4	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
8	Lampung	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	9
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6
10	Kepulauan Riau	1	3	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
11	DKI Jakarta	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
12	Jawa Barat	0	4	1	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	20
13	Jawa Tengah	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	0	0	1	1	0	28	
14	DI Yogyakarta	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
15	Jawa Timur	3	1	2	4	1	0	3	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	1	28	
16	Banten	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
17	Bali	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	13
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	2	1	2	2	1	1	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	20
19	Nusa Tenggara Timur	5	5	4	5	6	1	0	0	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	42
20	Kalimantan Barat	4	3	4	0	2	2	1	0	2	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	26
21	Kalimantan Tengah	0	6	1	2	1	3	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21
22	Kalimantan Selatan	1	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	18
23	Kalimantan Timur	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	15
24	Kalimantan Utara	2	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	20
25	Sulawesi Utara	2	1	2	1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16
26	Sulawesi Tengah	1	2	4	4	0	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	22
27	Sulawesi Selatan	1	1	0	4	3	1	1	2	4	4	0	6	2	4	0	0	3	4	0	3	0	36	0	0	0	0	0	0	79
28	Sulawesi Tenggara	6	3	5	7	8	2	2	2	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	50
29	Gorontalo	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	9
30	Sulawesi Barat	1	1	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	12
31	Maluku	3	3	3	4	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	26
32	Maluku Utara	3	4	4	4	3	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
33	Papua	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
34	Papua Barat	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
35	Papua Selatan	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
36	Papua Tengah	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37	Papua Pegunungan	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39	TNI/POLRI dan K/L lainnya	1	0	7	4	2	3	2	4	2	2	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	1	17	2	1	0	0	0	0	54
Indonesia		53	57	71	68	43	37	21	20	28	17	3	36	17	38	14	10	20	14	3	17	2	128	6	2	1	1	8	735	

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.15

**JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025**

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2.320	6.678	8.998	15.777	3.330	7.921	11.251	4.579	396	714	1.110	651	6.046	15.313	21.359	21.007
2	Sumatera Utara	2.075	5.240	7.315	16.673	3.394	10.514	13.908	5.441	500	1.063	1.563	2.051	5.969	16.817	22.786	24.165
3	Sumatera Barat	535	2.747	3.282	6.443	1.375	6.708	8.083	1.828	138	594	732	729	2.048	10.049	12.097	9.000
4	Riau	940	2.863	3.803	6.242	1.920	5.885	7.805	2.240	283	754	1.037	1.773	3.143	9.502	12.645	10.255
5	Jambi	889	2.352	3.241	5.133	1.144	3.250	4.394	1.423	181	397	578	652	2.214	5.999	8.213	7.208
6	Sumatera Selatan	1.487	4.837	6.324	11.116	1.940	7.298	9.238	2.767	424	1.037	1.461	1.302	3.851	13.172	17.023	15.185
7	Bengkulu	557	1.560	2.117	3.311	816	1.954	2.770	1.150	115	229	344	309	1.488	3.743	5.231	4.770
8	Lampung	1.571	2.560	4.131	7.473	2.581	5.240	7.821	2.052	473	861	1.334	1.426	4.625	8.661	13.286	10.951
9	Kep. Bangka Belitung	327	777	1.104	1.017	656	1.657	2.313	504	116	283	399	225	1.099	2.717	3.816	1.746
10	Kepulauan Riau	288	874	1.162	1.365	757	2.832	3.589	902	182	469	651	731	1.227	4.175	5.402	2.998
11	DKI Jakarta	502	1.353	1.855	1.809	5.769	25.478	31.247	3.409	1.368	3.926	5.294	2.066	7.639	30.757	38.396	7.284
12	Jawa Barat	4.498	6.227	10.725	15.939	15.291	39.221	54.512	9.148	2.228	5.064	7.292	7.957	22.017	50.512	72.529	33.044
13	Jawa Tengah	3.458	6.765	10.223	16.722	13.841	35.087	48.928	8.407	1.668	5.728	7.396	5.156	18.967	47.580	66.547	30.285
14	DI Yogyakarta	213	663	876	892	2.018	7.491	9.509	1.100	221	958	1.179	840	2.452	9.112	11.564	2.832
15	Jawa Timur	6.399	9.670	16.069	17.667	15.445	33.081	48.526	9.075	2.607	6.031	8.638	5.952	24.451	48.782	73.233	32.694
16	Banten	1.095	1.541	2.636	4.326	3.173	10.926	14.099	2.724	442	1.312	1.754	2.364	4.710	13.779	18.489	9.414
17	Bali	535	1.210	1.745	2.537	2.710	7.587	10.297	2.396	388	1.205	1.593	860	3.633	10.002	13.635	5.793
18	Nusa Tenggara Barat	2.368	3.917	6.285	5.946	2.037	3.680	5.717	1.791	387	474	861	234	4.792	8.071	12.863	7.971
19	Nusa Tenggara Timur	2.546	6.131	8.677	9.862	1.442	4.539	5.981	2.192	158	427	585	212	4.146	11.097	15.243	12.266
20	Kalimantan Barat	1.963	2.396	4.359	4.195	1.933	3.974	5.907	1.410	449	527	976	891	4.345	6.897	11.242	6.496
21	Kalimantan Tengah	1.500	2.275	3.775	3.489	1.144	2.360	3.504	1.022	356	378	734	567	3.000	5.013	8.013	5.078
22	Kalimantan Selatan	1.115	1.758	2.873	3.960	2.377	4.053	6.430	1.659	360	520	880	465	3.852	6.331	10.183	6.084
23	Kalimantan Timur	802	1.817	2.619	2.750	1.867	5.407	7.274	1.502	540	928	1.468	968	3.209	8.152	11.361	5.220
24	Kalimantan Utara	273	647	920	745	451	1.167	1.618	458	62	86	148	110	786	1.900	2.686	1.313
25	Sulawesi Utara	443	2.345	2.788	1.956	1.436	5.309	6.745	1.102	141	387	528	109	2.020	8.041	10.061	3.167
26	Sulawesi Tengah	1.092	2.826	3.918	4.961	1.293	3.500	4.793	1.757	223	325	548	171	2.608	6.651	9.259	6.889
27	Sulawesi Selatan	1.797	8.508	10.305	14.775	2.887	12.184	15.071	4.456	522	1.422	1.944	861	5.206	22.114	27.320	20.092
28	Sulawesi Tenggara	1.327	4.635	5.962	6.948	944	2.821	3.765	1.374	162	294	456	145	2.433	7.750	10.183	8.467
29	Gorontalo	301	856	1.157	1.350	646	1.643	2.289	783	83	123	206	77	1.030	2.622	3.652	2.210
30	Sulawesi Barat	511	1.619	2.130	3.023	414	1.188	1.602	754	56	65	121	49	981	2.872	3.853	3.826
31	Maluku	927	2.882	3.809	2.572	577	2.333	2.910	834	83	219	302	107	1.587	5.434	7.021	3.513
32	Maluku Utara	518	1.457	1.975	3.067	395	1.255	1.650	705	240	189	429	69	1.153	2.901	4.054	3.841
33	Papua	640	1.136	1.776	1.068	599	1.841	2.440	490	92	115	207	64	1.331	3.092	4.423	1.622
34	Papua Barat	477	763	1.240	891	314	718	1.032	393	50	35	85	27	841	1.516	2.357	1.311
35	Papua Selatan	312	507	819	690	132	554	686	247	65	75	140	47	509	1.136	1.645	984
36	Papua Tengah	525	1.118	1.643	949	341	840	1.181	281	83	135	218	130	949	2.093	3.042	1.360
37	Papua Pegunungan	444	476	920	451	118	263	381	116	48	60	108	38	610	799	1.409	605
38	Papua Barat Daya	324	955	1.279	908	190	536	726	216	55	60	115	44	569	1.551	2.120	1.168
Indonesia		47.894	106.941	154.835	208.998	97.697	272.295	369.992	82.687	15.945	37.469	53.414	40.429	161.536	416.705	578.241	332.114

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.16

**JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan		Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteneknisan Medik							Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional				Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Kefarmasian		Total
				Kesehatan Masyarakat	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Epidemiologi Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja	Entomologi Kesehatan	Tenaga Sanitasi Lingkungan		Fisioterapi	Terapi Okupasional	Terapi Wicara	Akupunktur	Perkam Medik dan Informasi Kesehatan	Tekniksi Kardiovaskular	Tekniksi Pelayanan Darah	Optometris	Tekniksi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radio grafer	Elektromedis	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medik	Ortotik Prostetik	Tenaga Kesehatan Pengobatan Tradisional	Tenaga Kesehatan Raman Juru Baman Jamu	Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental		Tenaga Vokasi Farmasi	Apoteker	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1	Aceh	3.470	2.903	0	0	0	0	0	168	206	69	1	1	0	126	0	9	37	3	27	298	0	110	53	183	0	0	0	0	0	13	410	458	8.545
2	Sumatera Utara	5.942	6.883	0	1	0	0	0	221	408	206	7	10	0	357	1	4	112	6	46	282	0	233	106	719	0	4	1	0	0	21	831	1.089	17.490
3	Sumatera Barat	3.054	1.970	0	44	0	0	0	185	232	140	20	53	8	330	0	21	82	4	78	171	0	136	71	313	2	3	1	0	0	31	545	512	8.006
4	Riau	2.651	2.602	0	1	0	0	0	33	135	172	13	22	3	201	1	7	50	3	37	34	0	168	23	436	0	0	0	0	1	38	370	708	7.709
5	Jambi	1.633	1.494	0	29	0	0	0	154	28	72	2	6	0	58	0	0	24	1	30	175	0	48	12	447	0	1	0	0	0	15	293	322	4.844
6	Sumatera Selatan	2.766	3.048	0	35	14	0	0	201	292	87	6	9	5	217	1	12	49	5	83	297	0	75	29	526	2	4	0	0	0	31	525	467	8.786
7	Bengkulu	1.233	951	0	228	0	0	0	113	183	19	4	3	2	101	0	2	14	3	48	37	0	59	20	272	0	0	0	0	12	349	199	3.852	
8	Lampung	3.094	2.837	0	1	0	0	1	256	170	151	19	14	6	111	2	14	37	44	44	193	2	134	30	369	0	5	0	0	0	21	370	676	8.601
9	Kep. Bangka Belitung	713	298	0	0	1	0	1	9	62	20	4	8	0	27	0	1	7	1	13	20	0	23	7	64	0	0	1	0	0	8	82	57	1.427
10	Kepulauan Riau	866	675	0	0	0	0	0	88	25	17	3	2	0	45	0	4	18	3	12	27	3	48	7	104	1	0	0	0	0	10	99	189	2.246
11	DKI Jakarta	6.389	1.501	0	28	0	0	0	192	221	295	62	67	14	260	13	36	225	43	33	154	6	381	190	762	2	17	0	0	17	246	790	1.454	13.398
12	Jawa Barat	17.980	9.088	0	123	0	0	2	439	654	488	91	95	20	1.202	6	59	299	22	244	637	1	631	147	2.353	5	11	4	2	6	301	2.747	3.909	41.566
13	Jawa Tengah	17.434	6.728	0	2	0	0	3	521	489	839	254	155	102	1.641	5	97	192	2	198	519	1	726	317	1.910	7	105	3	44	2	164	2.527	3.317	38.304
14	DI Yogyakarta	2.459	750	0	2	0	0	0	206	185	115	18	10	7	349	0	25	27	5	28	149	1	129	52	359	1	4	5	1	2	102	477	756	6.224
15	Jawa Timur	17.635	7.217	0	59	1	0	1	462	873	506	63	49	55	1.342	0	143	230	79	95	312	0	522	209	1.869	10	27	67	4	6	196	2.718	3.278	38.028
16	Banten	4.231	2.603	0	5	0	0	0	75	91	177	29	24	3	188	6	20	104	16	27	92	0	119	55	543	0	7	0	1	1	77	611	803	9.908
17	Bali	2.590	1.254	0	2	0	0	0	108	190	196	5	5	2	45	0	13	12	2	69	132	2	105	23	408	2	1	1	0	1	56	457	500	6.181
18	Nusa Tenggara Barat	2.298	2.075	0	2	0	0	0	120	280	79	8	11	0	220	0	22	20	2	36	111	0	128	54	580	0	1	0	0	0	33	381	483	6.944
19	Nusa Tenggara Timur	3.357	2.836	0	3	0	0	0	197	178	46	0	0	0	215	1	27	7	32	277	1	128	46	492	0	0	0	1	1	6	556	327	8.741	
20	Kalimantan Barat	2.636	1.366	0	0	0	0	0	175	177	75	5	4	3	133	0	9	17	2	30	235	0	59	23	277	0	1	0	1	1	7	274	421	5.931
21	Kalimantan Tengah	1.770	1.050	0	1	0	0	0	39	119	59	3	4	0	64	0	5	8	4	18	103	2	63	23	226	0	0	0	0	0	13	271	354	4.199
22	Kalimantan Selatan	1.917	1.273	0	0	0	0	0	189	141	88	5	7	1	199	0	5	29	1	20	163	0	58	36	355	0	1	1	0	0	22	390	611	5.512
23	Kalimantan Timur	2.493	1.287	0	76	0	0	0	63	124	119	19	10	2	121	0	10	31	0	13	40	0	80	24	429	0	1	1	0	0	33	313	601	5.890
24	Kalimantan Utara	743	290	0	7	0	0	0	15	19	18	1	0	0	13	0	3	3	0	3	13	0	22	8	62	0	0	0	0	0	8	119	245	1.592
25	Sulawesi Utara	2.490	715	0	14	0	0	0	98	144	29	1	0	0	27	0	6	5	1	13	110	0	101	5	156	1	3	0	0	0	6	230	165	4.320
26	Sulawesi Tengah	2.083	1.659	0	0	0	0	1	100	167	33	1	1	1	33	0	22	3	2	32	70	1	75	21	225	0	0	1	0	0	12	239	327	5.109
27	Sulawesi Selatan	5.286	4.196	0	0	0	0	0	226	230	334	3	2	0	356	4	14	21	9	35	433	1	273	107	627	5	0	0	0	0	30	891	1.174	14.257
28	Sulawesi Tenggara	1.748	1.485	0	0	0	0	0	73	182	58	0	1	1	132	1	12	6	8	27	208	0	78	49	366	0	0	0	0	0	9	314	695	5.453
29	Gorontalo	827	315	0	0	0	0	0	39	108	11	0	0	0	76	0	7	6	0	18	45	0	58	8	173	0	0	0	0	0	4	192	92	1.979
30	Sulawesi Barat	699	703	0	0	0	0	0	46	67	22	0	0	0	17	0	0	2	1	1	27	0	26	4	57	0	0	0	0	0	8	135	103	1.918
31	Maluku	1.751	1.045	0	0	0	0	0	129	135	23	1	1	0	23	2	23	4	3	15	45	0	56	10	242	0	0	0	0	0	3	39	439	3.989
32	Maluku Utara	766	702	0	1	0	0	0	83	81	12	1	0	0	15	1	5	2	5	18	25	0	31	11	148	1	0	0	0	0	5	97	59	2.069
33	Papua	1.758	911	0	1	0	0	0	62	84	34	2	0	0	21	0	6	2	0	11	30	0	33	14	360	0	0	0	0	0	3	228	935	4.495
34	Papua Barat	818	548	0	0	0	0	0	9	51	17	0	0	1	18	0	6	2	0	13	12	0	26	7	74	0	0	0	0	1	1	61	1.048	2.713
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365
36	Papua Tengah	117	84	0	0	0	0	0	14	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	1	35	0	0	0	0	0	32	128	420	
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	(blank)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3.693	3.696	
Indonesia		127.697	75.342	0	665	16	0	9	5.108	6.732	4.627	651	574	236	8.283	44	649	1.688	287	1.448	5.476	21	4.947	1.802	16.521	39	196	86	54	39	1.545	18.966	30.959	314.707

Sumber : Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi, 2026

Keterangan:

• Jumlah STR yang diterbitkan pada tahun 2025

• Terdapat beberapa data apoteker yang provinsinya tidak terdefinisi, karena terdapat data apoteker lama yang belum diinputkan informasi provinsinya. Pada saat pembaruan STR di Satusahat SDMK, tidak tersedia kolom untuk pengisian provinsi, sehingga data tersebut tidak terdefinisi."

• Tenaga kesehatan masyarakat dan pembimbing kesehatan kerja tidak ada penerbitan karena lulusan akademik

Lampiran 3.17

JUMLAH TENAGA KESEHATAN
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI 2025
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional		Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Kefarmasian		Total		
				Kesehatan Masyarakat	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Epidemiologi Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja	Entomologi Kesehatan		Tenaga Sanitasi Lingkungan	Fisioterapi	Terapis Okupasional	Terapis Wicara	Akupunktur Terapis	Perilaku Medis dan Informasi Kesehatan	Tekniksi Kardiovaskular	Tekniksi Pelayanan Darah	Optometris	Tekniksi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medik	Ortodontik Prostetik	Tenaga Kesehatan Pengobatan Tradisional		Tenaga Kesehatan Ramuan Jamu Ramuan Jinu	Tenaga Kesehatan Tradisional Interkomplemental		Tenaga Vokasi Farmasi	Apoteker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1	Aceh	30.552	29.645	1.495	917	417	6	11	1.905	1.934	654	6	4	0	690	1	33	250	10	180	1.966	0	661	326	2.032	2	6	0	0	1	53	3.661	1.596	79.014
2	Sumatera Utara	38.068	48.532	1.301	865	112	16	10	1.182	2.369	1.004	20	44	7	1.452	1	26	591	20	277	1.404	1	1.356	565	4.012	21	8	2	0	8	77	4.045	4.553	111.949
3	Sumatera Barat	19.996	17.066	736	368	95	18	10	1.302	2.017	789	48	178	8	2.044	3	72	435	28	336	1.017	0	653	454	1.923	19	11	2	0	0	75	2.734	2.215	54.652
4	Riau	16.733	17.956	569	247	126	13	6	270	1.198	789	38	58	2	1.192	3	29	190	39	201	391	2	606	171	2.199	11	10	1	0	4	91	2.263	2.488	47.896
5	Jambi	12.227	11.630	352	200	75	15	11	757	588	404	10	14	5	316	2	6	100	13	131	908	0	265	61	1.605	2	6	0	0	0	35	1.623	17.269	48.630
6	Sumatera Selatan	24.921	25.903	593	768	154	3	9	1.597	1.879	647	32	42	16	1.047	1	77	248	23	334	1.353	1	708	137	2.941	9	16	2	1	2	88	3.441	2.135	69.128
7	Bengkulu	8.247	8.213	281	589	22	10	10	656	1.184	113	9	8	14	353	1	6	45	7	161	117	0	266	86	1.522	3	1	0	0	0	29	1.412	946	24.311
8	Lampung	18.296	17.681	162	259	73	9	9	1.479	1.109	460	55	55	30	464	7	44	176	191	266	867	9	788	159	2.220	7	18	0	3	0	48	1.858	2.266	49.068
9	Kep. Bangka Belitung	4.997	2.655	68	117	15	18	1	158	470	128	4	25	2	175	5	28	39	14	65	162	0	152	40	486	8	1	1	0	1	25	671	407	10.938
10	Kepulauan Riau	6.082	4.921	116	84	50	13	26	678	244	112	21	7	7	236	0	29	73	11	65	147	5	178	46	576	2	3	2	0	6	29	615	768	15.152
11	DKI Jakarta	39.551	12.588	484	124	164	66	7	1.006	2.234	1.765	323	388	122	1.523	100	265	965	235	179	1.213	54	1.770	1.220	4.622	69	72	5	4	55	591	4.670	3.670	80.104
12	Jawa Barat	92.988	56.957	1.132	1.389	496	94	22	2.328	4.775	2.518	399	540	121	6.825	33	317	1.279	88	913	2.914	12	3.102	835	12.087	85	65	6	7	25	678	14.204	16.187	223.421
13	Jawa Tengah	92.811	44.773	808	1.460	793	100	38	2.871	4.605	3.995	963	888	541	9.001	11	598	926	23	747	2.415	6	3.351	1.486	9.839	101	466	7	353	5	451	13.608	13.573	211.613
14	DI Yogyakarta	14.689	5.772	110	121	89	10	9	829	1.266	696	55	60	21	1.803	0	204	123	9	177	743	0	607	267	1.646	10	7	5	6	3	280	1.829	3.115	34.561
15	Jawa Timur	98.437	53.664	876	1.211	272	19	22	2.625	6.235	2.438	245	240	307	7.275	0	571	1.076	339	454	1.952	2	2.113	1.373	10.455	95	111	253	32	42	463	13.373	12.254	218.824
16	Banten	21.530	16.998	487	202	60	12	7	505	998	644	113	111	24	915	52	127	374	62	116	444	2	662	313	2.505	20	33	2	1	5	185	3.536	3.311	54.376
17	Bali	16.131	8.169	166	175	49	2	13	657	1.237	608	16	16	27	265	0	46	77	16	315	816	2	641	125	1.915	18	7	2	0	1	104	2.052	2.034	35.702
18	Nusa Tenggara Barat	15.265	10.427	137	501	70	8	14	577	1.590	421	24	24	3	1.096	7	136	83	9	217	720	0	423	234	2.399	16	2	3	1	1	54	2.260	1.451	38.173
19	Nusa Tenggara Timur	19.831	15.097	869	531	212	1	3	1.481	1.858	263	2	5	4	860	2	148	55	12	121	1.155	2	348	168	2.277	2	0	0	1	1	17	2.279	1.272	48.877
20	Kalimantan Barat	14.938	10.571	194	346	107	30	7	977	1.437	279	16	29	8	592	0	39	105	3	109	1.113	1	286	105	1.773	2	2	1	1	3	38	1.343	1.399	35.854
21	Kalimantan Tengah	9.865	7.055	172	194	48	2	2	219	899	175	24	16	5	292	0	35	36	12	75	328	3	219	77	1.225	3	2	0	1	0	37	1.228	1.136	23.385
22	Kalimantan Selatan	12.571	8.806	288	498	120	23	7	1.023	1.410	355	23	18	6	700	1	26	104	13	98	1.036	2	341	199	2.047	5	5	1	1	0	62	2.322	2.016	34.127
23	Kalimantan Timur	14.337	8.503	162	395	171	12	6	397	784	458	49	54	10	425	6	40	91	10	122	282	2	312	126	2.123	8	9	1	1	1	74	1.886	2.168	33.025
24	Kalimantan Utara	3.224	1.913	77	65	59	4	1	102	117	62	3	3	0	75	1	13	5	1	26	81	0	73	42	258	1	0	0	0	0	10	498	492	7.206
25	Sulawesi Utara	13.903	4.894	329	223	285	6	4	749	936	227	11	5	3	100	0	71	38	7	89	548	0	203	48	863	7	4	0	0	0	13	1.229	708	25.503
26	Sulawesi Tengah	12.013	9.700	1.062	296	527	1	5	788	932	147	4	5	1	145	22	99	24	10	108	318	1	259	75	1.053	7	2	1	0	0	31	1.556	2.705	31.897
27	Sulawesi Selatan	41.018	34.771	684	510	782	69	27	2.069	2.091	1.370	27	24	3	1.725	90	74	98	107	177	2.206	1	1.141	494	4.623	43	9	1	0	0	65	5.902	4.917	105.118
28	Sulawesi Tenggara	12.237	11.503	790	590	773	21	7	753	1.403	208	3	1	1	503	17	50	26	25	122	853	1	209	248	1.955	3	0	0	0	0	18	1.625	1.957	35.902
29	Gorontalo	5.329	3.400	426	112	244	11	3	254	890	50	1	2	0	212	4	29	12	1	57	104	0	151	29	657	2	1	0	0	0	12	786	421	13.200
30	Sulawesi Barat	5.040	5.341	114	120	89	1	1	361	474	82	0	2	0	70	4	1	7	9	10	127	0	81	22	289	2	0	0	0	0	11	626	407	13.291
31	Maluku	9.434	5.040	495	100	119	2	2	846	910	82	1	4	0	85	9	45	15	13	61	138	0	154	38	1.110	1	0	0	0	0	10	315	677	19.706
32	Maluku Utara	5.033	5.229	289	173	209	0	1	428	675	84	9	0	0	78	24	20	6	16	56	140	0	113	41	959	3	0	0	0	0	12	521	352	14.471
33	Papua	11.328	5.820	590	50	81	1	3	607	596	123	5	1	0	119	5	14	18	10	65	97	0	112	52	1.746	1	0	0	0	0	11	1.117	1.724	24.296
34	Papua Barat	4.808	3.018	221	14	59	2	7	102	455	54	1	0	2	66	2	19	17	5	33	57	1	67	30	509	0	1	0	0	0	6	286	1.412	11.254
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	498
36	Papua Tengah	117	82	0	0	0	0	0	14	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	1	35	0	0	0	0	0	0	32	188	478
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	(blank)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	40.033	40.039
Indonesia		766.547	534.293	16.635	13.814	7.017	61																											

Lampiran 3.18

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	1.017	3.519	4.536	276	1.084	1.360	92	1.252	1.344
2	Sumatera Utara	648	3.294	3.942	229	664	893	90	1.274	1.364
3	Sumatera Barat	299	1.510	1.809	130	485	615	34	950	984
4	Riau	387	1.391	1.778	128	326	454	37	654	691
5	Jambi	335	1.013	1.348	145	306	451	48	435	483
6	Sumatera Selatan	591	2.542	3.133	210	816	1.026	63	1.002	1.065
7	Bengkulu	383	1.098	1.481	109	207	316	54	468	522
8	Lampung	281	865	1.146	184	524	708	70	639	709
9	Kep. Bangka Belitung	137	345	482	38	113	151	32	209	241
10	Kepulauan Riau	143	369	512	109	211	320	24	207	231
11	DKI Jakarta	568	1.678	2.246	234	477	711	107	1.124	1.231
12	Jawa Barat	1.114	2.853	3.967	513	1.223	1.736	176	2.515	2.691
13	Jawa Tengah	816	3.153	3.969	566	1.400	1.966	215	2.653	2.868
14	DI Yogyakarta	101	389	490	124	251	375	53	514	567
15	Jawa Timur	685	3.298	3.983	423	1.371	1.794	304	3.152	3.456
16	Banten	266	781	1.047	140	360	500	47	658	705
17	Bali	244	859	1.103	192	285	477	65	622	687
18	Nusa Tenggara Barat	386	899	1.285	193	389	582	122	950	1.072
19	Nusa Tenggara Timur	937	1.853	2.790	458	667	1.125	295	1.229	1.524
20	Kalimantan Barat	354	728	1.082	265	360	625	127	687	814
21	Kalimantan Tengah	205	537	742	105	206	311	71	501	572
22	Kalimantan Selatan	392	823	1.215	180	447	627	141	886	1.027
23	Kalimantan Timur	302	804	1.106	114	241	355	78	401	479
24	Kalimantan Utara	115	244	359	48	77	125	26	104	130
25	Sulawesi Utara	281	1.100	1.381	187	327	514	114	529	643
26	Sulawesi Tengah	759	2.389	3.148	214	451	665	86	569	655
27	Sulawesi Selatan	908	4.004	4.912	309	1.098	1.407	119	1.447	1.566
28	Sulawesi Tenggara	770	3.146	3.916	204	558	762	121	966	1.087
29	Gorontalo	201	853	1.054	55	185	240	86	474	560
30	Sulawesi Barat	201	749	950	84	173	257	22	297	319
31	Maluku	386	1.179	1.565	237	384	621	82	616	698
32	Maluku Utara	334	1.252	1.586	92	203	295	38	434	472
33	Papua	181	489	670	90	116	206	49	248	297
34	Papua Barat	96	245	341	32	51	83	22	148	170
35	Papua Selatan	84	191	275	33	51	84	22	95	117
36	Papua Tengah	153	347	500	75	105	180	15	112	127
37	Papua Pegunungan	129	192	321	36	29	65	8	58	66
38	Papua Barat Daya	90	345	435	51	85	136	20	205	225
Indonesia		15.279	51.326	66.605	6.812	16.306	23.118	3.175	29.284	32.459

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.19

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	530	2.319	2.849	149	766	915	57	787	844
2	Sumatera Utara	341	1.921	2.262	128	493	621	56	728	784
3	Sumatera Barat	137	756	893	81	310	391	18	539	557
4	Riau	177	667	844	82	224	306	25	345	370
5	Jambi	142	471	613	68	214	282	27	261	288
6	Sumatera Selatan	316	1.394	1.710	128	538	666	41	571	612
7	Bengkulu	194	571	765	70	152	222	22	283	305
8	Lampung	172	523	695	99	329	428	49	388	437
9	Kep. Bangka Belitung	61	137	198	19	69	88	20	118	138
10	Kepulauan Riau	57	149	206	40	117	157	13	110	123
11	DKI Jakarta	23	158	181	63	79	142	12	137	149
12	Jawa Barat	546	1.479	2.025	284	777	1.061	79	1.048	1.127
13	Jawa Tengah	374	1.729	2.103	289	817	1.106	128	1.243	1.371
14	DI Yogyakarta	44	195	239	40	121	161	23	218	241
15	Jawa Timur	260	1.423	1.683	190	754	944	169	1.356	1.525
16	Banten	113	364	477	49	196	245	21	265	286
17	Bali	67	217	284	89	124	213	25	185	210
18	Nusa Tenggara Barat	229	545	774	115	285	400	84	606	690
19	Nusa Tenggara Timur	677	1.262	1.939	335	539	874	221	929	1.150
20	Kalimantan Barat	195	419	614	149	248	397	84	437	521
21	Kalimantan Tengah	111	322	433	70	151	221	43	315	358
22	Kalimantan Selatan	235	496	731	115	324	439	102	572	674
23	Kalimantan Timur	152	421	573	53	146	199	44	210	254
24	Kalimantan Utara	61	123	184	26	49	75	14	58	72
25	Sulawesi Utara	118	563	681	102	205	307	56	300	356
26	Sulawesi Tengah	384	1.266	1.650	108	280	388	66	372	438
27	Sulawesi Selatan	419	2.148	2.567	158	721	879	66	789	855
28	Sulawesi Tenggara	477	1.984	2.461	142	421	563	83	710	793
29	Gorontalo	91	441	532	26	119	145	55	264	319
30	Sulawesi Barat	107	510	617	54	127	181	20	201	221
31	Maluku	217	727	944	157	259	416	53	415	468
32	Maluku Utara	168	757	925	51	152	203	29	277	306
33	Papua	85	253	338	60	70	130	31	138	169
34	Papua Barat	50	134	184	22	34	56	13	85	98
35	Papua Selatan	50	77	127	21	38	59	13	60	73
36	Papua Tengah	82	207	289	57	79	136	5	71	76
37	Papua Pegunungan	79	115	194	25	23	48	5	36	41
38	Papua Barat Daya	62	235	297	38	64	102	13	167	180
Indonesia		7.603	27.478	35.081	3.752	10.414	14.166	1.885	15.594	18.977

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.20
**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2025**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	221	635	856	73	230	303	24	413	437
2	Sumatera Utara	116	644	760	59	108	167	25	494	519
3	Sumatera Barat	65	304	369	37	121	158	14	364	378
4	Riau	72	306	378	19	48	67	9	271	280
5	Jambi	52	190	242	43	54	97	17	145	162
6	Sumatera Selatan	89	361	450	36	175	211	18	359	377
7	Bengkulu	69	255	324	21	30	51	23	163	186
8	Lampung	29	123	152	48	110	158	12	202	214
9	Kep. Bangka Belitung	33	70	103	7	28	35	9	79	88
10	Kepulauan Riau	17	59	76	20	44	64	11	93	104
11	DKI Jakarta	104	343	447	78	198	276	74	730	804
12	Jawa Barat	256	500	756	171	362	533	83	1.241	1.324
13	Jawa Tengah	101	328	429	163	422	585	72	1.193	1.265
14	DI Yogyakarta	15	56	71	61	97	158	23	260	283
15	Jawa Timur	158	779	937	159	500	659	118	1.545	1.663
16	Banten	73	163	236	52	116	168	18	354	372
17	Bali	54	210	264	52	108	160	36	407	443
18	Nusa Tenggara Barat	49	142	191	39	64	103	29	310	339
19	Nusa Tenggara Timur	88	240	328	64	79	143	53	246	299
20	Kalimantan Barat	45	121	166	63	63	126	35	210	245
21	Kalimantan Tengah	29	84	113	20	34	54	24	171	195
22	Kalimantan Selatan	55	124	179	40	91	131	33	300	333
23	Kalimantan Timur	56	132	188	33	59	92	29	178	207
24	Kalimantan Utara	18	50	68	12	15	27	11	42	53
25	Sulawesi Utara	82	296	378	57	80	137	49	215	264
26	Sulawesi Tengah	145	523	668	61	95	156	16	166	182
27	Sulawesi Selatan	218	973	1.191	83	209	292	45	588	633
28	Sulawesi Tenggara	96	524	620	26	78	104	24	223	247
29	Gorontalo	37	201	238	11	27	38	20	159	179
30	Sulawesi Barat	23	86	109	15	25	40	2	80	82
31	Maluku	62	201	263	40	67	107	22	152	174
32	Maluku Utara	57	254	311	21	31	52	5	129	134
33	Papua	30	112	142	18	28	46	15	99	114
34	Papua Barat	23	73	96	2	11	13	8	58	66
35	Papua Selatan	9	26	35	4	7	11	8	25	33
36	Papua Tengah	21	64	85	11	16	27	9	33	42
37	Papua Pegunungan	9	42	51	9	1	10	3	17	20
38	Papua Barat Daya	11	54	65	5	12	17	7	35	42
Indonesia		2.687	9.648	12.335	1.733	3.843	5.576	1.033	11.749	12.782

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.21

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	252	2.182	2.434	158	1.014	1.172	410	3.196	3.606
2	Sumatera Utara	273	2.068	2.341	343	1.897	2.240	616	3.965	4.581
3	Sumatera Barat	210	1.591	1.801	176	1.165	1.341	386	2.756	3.142
4	Riau	168	1.360	1.528	245	1.571	1.816	413	2.931	3.344
5	Jambi	124	1.007	1.131	147	914	1.061	271	1.921	2.192
6	Sumatera Selatan	269	2.070	2.339	265	1.224	1.489	534	3.294	3.828
7	Bengkulu	87	595	682	97	539	636	184	1.134	1.318
8	Lampung	187	915	1.102	344	1.231	1.575	531	2.146	2.677
9	Kep. Bangka Belitung	91	457	548	87	335	422	178	792	970
10	Kepulauan Riau	156	601	757	174	667	841	330	1.268	1.598
11	DKI Jakarta	1.063	5.142	6.205	1.136	4.155	5.291	2.199	9.297	11.496
12	Jawa Barat	1.777	8.597	10.374	2.710	9.004	11.714	4.487	17.601	22.088
13	Jawa Tengah	1.177	9.044	10.221	1.774	9.182	10.956	2.951	18.226	21.177
14	DI Yogyakarta	191	1.604	1.795	289	1.924	2.213	480	3.528	4.008
15	Jawa Timur	1.266	8.430	9.696	1.621	8.157	9.778	2.887	16.587	19.474
16	Banten	456	2.222	2.678	559	2.413	2.972	1.015	4.635	5.650
17	Bali	259	1.371	1.630	516	1.265	1.781	775	2.636	3.411
18	Nusa Tenggara Barat	382	1.094	1.476	279	873	1.152	661	1.967	2.628
19	Nusa Tenggara Timur	281	1.360	1.641	189	910	1.099	470	2.270	2.740
20	Kalimantan Barat	227	779	1.006	251	826	1.077	478	1.605	2.083
21	Kalimantan Tengah	169	652	821	191	727	918	360	1.379	1.739
22	Kalimantan Selatan	345	1.396	1.741	373	1.136	1.509	718	2.532	3.250
23	Kalimantan Timur	293	1.240	1.533	375	1.477	1.852	668	2.717	3.385
24	Kalimantan Utara	72	288	360	77	250	327	149	538	687
25	Sulawesi Utara	190	717	907	158	536	694	348	1.253	1.601
26	Sulawesi Tengah	197	839	1.036	169	756	925	366	1.595	1.961
27	Sulawesi Selatan	326	2.579	2.905	443	2.518	2.961	769	5.097	5.866
28	Sulawesi Tenggara	143	1.071	1.214	240	1.167	1.407	383	2.238	2.621
29	Gorontalo	53	373	426	52	231	283	105	604	709
30	Sulawesi Barat	29	320	349	48	264	312	77	584	661
31	Maluku	58	371	429	58	344	402	116	715	831
32	Maluku Utara	52	326	378	59	291	350	111	617	728
33	Papua	104	393	497	76	345	421	180	738	918
34	Papua Barat	39	119	158	38	220	258	77	339	416
35	Papua Selatan	26	93	119	38	95	133	64	188	252
36	Papua Tengah	28	163	191	47	243	290	75	406	481
37	Papua Pegunungan	26	75	101	19	64	83	45	139	184
38	Papua Barat Daya	20	97	117	57	201	258	77	298	375
Indonesia		11.066	63.601	74.667	13.878	60.131	74.009	24.944	123.732	148.676

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 3.22

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	69	769	838	41	334	375	110	1.103	1.213
2	Sumatera Utara	96	551	647	51	527	578	147	1.078	1.225
3	Sumatera Barat	35	345	380	26	216	242	61	561	622
4	Riau	42	356	398	42	253	295	84	609	693
5	Jambi	27	249	276	34	222	256	61	471	532
6	Sumatera Selatan	60	529	589	73	299	372	133	828	961
7	Bengkulu	21	187	208	21	153	174	42	340	382
8	Lampung	45	203	248	63	272	335	108	475	583
9	Kep. Bangka Belitung	10	90	100	24	70	94	34	160	194
10	Kepulauan Riau	16	62	78	20	96	116	36	158	194
11	DKI Jakarta	118	276	394	51	123	174	169	399	568
12	Jawa Barat	190	827	1.017	289	907	1.196	479	1.734	2.213
13	Jawa Tengah	166	1.017	1.183	153	793	946	319	1.810	2.129
14	DI Yogyakarta	24	149	173	17	131	148	41	280	321
15	Jawa Timur	137	934	1.071	158	757	915	295	1.691	1.986
16	Banten	47	180	227	60	263	323	107	443	550
17	Bali	29	148	177	44	103	147	73	251	324
18	Nusa Tenggara Barat	116	373	489	58	215	273	174	588	762
19	Nusa Tenggara Timur	127	592	719	65	312	377	192	904	1.096
20	Kalimantan Barat	69	245	314	61	192	253	130	437	567
21	Kalimantan Tengah	60	211	271	52	188	240	112	399	511
22	Kalimantan Selatan	69	313	382	96	243	339	165	556	721
23	Kalimantan Timur	46	233	279	54	180	234	100	413	513
24	Kalimantan Utara	15	73	88	22	47	69	37	120	157
25	Sulawesi Utara	29	191	220	27	119	146	56	310	366
26	Sulawesi Tengah	57	341	398	50	207	257	107	548	655
27	Sulawesi Selatan	59	735	794	85	597	682	144	1.332	1.476
28	Sulawesi Tenggara	67	596	663	84	420	504	151	1.016	1.167
29	Gorontalo	11	120	131	11	74	85	22	194	216
30	Sulawesi Barat	13	168	181	26	90	116	39	258	297
31	Maluku	30	166	196	29	134	163	59	300	359
32	Maluku Utara	18	162	180	21	105	126	39	267	306
33	Papua	30	105	135	12	56	68	42	161	203
34	Papua Barat	14	46	60	11	70	81	25	116	141
35	Papua Selatan	15	42	57	11	32	43	26	74	100
36	Papua Tengah	9	52	61	11	80	91	20	132	152
37	Papua Pegunungan	18	43	61	5	25	30	23	68	91
38	Papua Barat Daya	11	42	53	16	74	90	27	116	143
Indonesia		2.015	11.721	13.736	1.974	8.979	10.953	3.989	20.700	24.689

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 3.23

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	127	1.030	1.157	59	433	492	186	1.463	1.649
2	Sumatera Utara	126	1.187	1.313	121	650	771	247	1.837	2.084
3	Sumatera Barat	129	880	1.009	65	411	476	194	1.291	1.485
4	Riau	93	727	820	60	489	549	153	1.216	1.369
5	Jambi	41	413	454	37	263	300	78	676	754
6	Sumatera Selatan	149	1.002	1.151	81	408	489	230	1.410	1.640
7	Bengkulu	36	221	257	38	165	203	74	386	460
8	Lampung	94	438	532	91	323	414	185	761	946
9	Kep. Bangka Belitung	47	205	252	22	97	119	69	302	371
10	Kepulauan Riau	65	243	308	53	200	253	118	443	561
11	DKI Jakarta	712	3.243	3.955	356	1.310	1.666	1.068	4.553	5.621
12	Jawa Barat	1.054	4.796	5.850	578	2.382	2.960	1.632	7.178	8.810
13	Jawa Tengah	688	4.674	5.362	363	2.128	2.491	1.051	6.802	7.853
14	DI Yogyakarta	125	1.015	1.140	71	502	573	196	1.517	1.713
15	Jawa Timur	710	4.549	5.259	395	2.099	2.494	1.105	6.648	7.753
16	Banten	279	1.288	1.567	155	829	984	434	2.117	2.551
17	Bali	126	735	861	135	369	504	261	1.104	1.365
18	Nusa Tenggara Barat	185	435	620	94	286	380	279	721	1.000
19	Nusa Tenggara Timur	75	404	479	51	273	324	126	677	803
20	Kalimantan Barat	114	344	458	77	251	328	191	595	786
21	Kalimantan Tengah	69	245	314	40	204	244	109	449	558
22	Kalimantan Selatan	172	550	722	97	314	411	269	864	1.133
23	Kalimantan Timur	174	608	782	92	372	464	266	980	1.246
24	Kalimantan Utara	37	157	194	24	99	123	61	256	317
25	Sulawesi Utara	112	337	449	66	227	293	178	564	742
26	Sulawesi Tengah	89	332	421	44	228	272	133	560	693
27	Sulawesi Selatan	170	1.105	1.275	158	894	1.052	328	1.999	2.327
28	Sulawesi Tenggara	39	243	282	58	306	364	97	549	646
29	Gorontalo	30	175	205	23	81	104	53	256	309
30	Sulawesi Barat	13	110	123	11	88	99	24	198	222
31	Maluku	14	102	116	11	111	122	25	213	238
32	Maluku Utara	15	123	138	17	112	129	32	235	267
33	Papua	34	136	170	30	124	154	64	260	324
34	Papua Barat	15	53	68	6	62	68	21	115	136
35	Papua Selatan	8	34	42	11	28	39	19	62	81
36	Papua Tengah	10	49	59	13	66	79	23	115	138
37	Papua Pegunungan	7	24	31	10	26	36	17	50	67
38	Papua Barat Daya	8	34	42	9	44	53	17	78	95
Indonesia		5.991	32.246	38.237	3.622	17.254	20.876	9.613	49.500	59.113

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 3.24

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterampilan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	168	1.413	1.581	358	412	770	94	399	493	400	1.518	1.918
2	Sumatera Utara	292	1.976	2.268	455	607	1.062	198	317	515	410	1.460	1.870
3	Sumatera Barat	218	1.201	1.419	303	306	609	110	279	389	410	1.785	2.195
4	Riau	202	1.202	1.404	220	309	529	130	351	481	350	857	1.207
5	Jambi	155	853	1.008	123	142	265	43	183	226	142	682	824
6	Sumatera Selatan	272	1.520	1.792	289	343	632	93	326	419	412	1.394	1.806
7	Bengkulu	143	568	711	90	90	180	22	65	87	111	257	368
8	Lampung	246	1.255	1.501	272	241	513	96	236	332	351	771	1.122
9	Kep. Bangka Belitung	97	325	422	93	70	163	18	98	116	101	303	404
10	Kepulauan Riau	106	418	524	135	145	280	37	105	142	156	371	527
11	DKI Jakarta	1.220	3.775	4.995	1.446	1.331	2.777	725	1.357	2.082	1.449	3.255	4.704
12	Jawa Barat	1.718	6.415	8.133	1.887	1.492	3.379	713	1.749	2.462	2.568	5.900	8.468
13	Jawa Tengah	1.142	5.690	6.832	1.597	1.566	3.163	792	2.008	2.800	1.988	6.376	8.364
14	DI Yogyakarta	242	1.127	1.369	370	348	718	186	436	622	387	1.588	1.975
15	Jawa Timur	1.324	6.246	7.570	1.488	1.453	2.941	600	1.243	1.843	2.065	5.287	7.352
16	Banten	373	1.619	1.992	482	464	946	221	555	776	478	1.193	1.671
17	Bali	325	1.126	1.451	412	290	702	195	246	441	337	879	1.216
18	Nusa Tenggara Barat	320	1.359	1.679	280	230	510	84	218	302	542	1.054	1.596
19	Nusa Tenggara Timur	368	1.314	1.682	188	170	358	48	141	189	371	1.227	1.598
20	Kalimantan Barat	312	955	1.267	193	134	327	56	146	202	420	838	1.258
21	Kalimantan Tengah	219	704	923	149	96	245	36	113	149	187	420	607
22	Kalimantan Selatan	316	1.259	1.575	245	183	428	94	175	269	403	1.056	1.459
23	Kalimantan Timur	333	1.153	1.486	260	206	466	117	295	412	292	620	912
24	Kalimantan Utara	61	182	243	65	42	107	13	38	51	81	129	210
25	Sulawesi Utara	165	475	640	130	98	228	71	146	217	157	420	577
26	Sulawesi Tengah	161	627	788	92	130	222	29	105	134	179	371	550
27	Sulawesi Selatan	442	2.209	2.651	402	625	1.027	167	450	617	513	1.917	2.430
28	Sulawesi Tenggara	198	1.070	1.268	98	184	282	22	120	142	189	775	964
29	Gorontalo	77	293	370	48	63	111	16	23	39	53	171	224
30	Sulawesi Barat	59	194	253	25	57	82	7	50	57	35	131	166
31	Maluku	97	542	639	44	81	125	15	48	63	49	163	212
32	Maluku Utara	127	473	600	64	94	158	12	44	56	64	179	243
33	Papua	153	474	627	42	38	80	8	34	42	46	111	157
34	Papua Barat	66	181	247	27	31	58	7	19	26	26	66	92
35	Papua Selatan	50	123	173	10	14	24	9	8	17	30	34	64
36	Papua Tengah	83	214	297	30	18	48	5	16	21	30	56	86
37	Papua Pegunungan	36	67	103	6	3	9	2	3	5	7	13	20
38	Papua Barat Daya	44	133	177	13	16	29	5	8	13	16	55	71
Indonesia		11.930	50.730	62.660	12.431	12.122	24.553	5.096	12.153	17.249	15.805	43.682	59.487

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.25

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2025**

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterampilan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	53	591	644	8	15	23	22	129	151	131	784	915
2	Sumatera Utara	78	624	702	1	5	6	15	12	27	102	604	706
3	Sumatera Barat	65	407	472	10	0	10	3	45	48	96	681	777
4	Riau	51	349	400	0	11	11	9	50	59	65	288	353
5	Jambi	37	291	328	0	0	0	3	14	17	50	317	367
6	Sumatera Selatan	86	512	598	2	5	7	2	21	23	79	614	693
7	Bengkulu	50	236	286	0	1	1	1	1	2	14	103	117
8	Lampung	77	372	449	1	3	4	1	6	7	102	353	455
9	Kep. Bangka Belitung	21	99	120	1	0	1	1	1	2	32	117	149
10	Kepulauan Riau	21	94	115	0	0	0	0	1	1	17	102	119
11	DKI Jakarta	139	221	360	1	0	1	0	1	1	83	201	284
12	Jawa Barat	323	1.232	1.555	3	14	17	15	20	35	414	1.415	1.829
13	Jawa Tengah	248	1.276	1.524	14	14	28	75	208	283	420	1.739	2.159
14	DI Yogyakarta	33	211	244	0	3	3	21	39	60	55	316	371
15	Jawa Timur	262	1.408	1.670	7	13	20	34	56	90	391	1.364	1.755
16	Banten	58	263	321	2	2	4	0	3	3	65	239	304
17	Bali	48	158	206	6	3	9	2	1	3	50	224	274
18	Nusa Tenggara Barat	123	546	669	25	8	33	4	17	21	210	453	663
19	Nusa Tenggara Timur	207	691	898	18	5	23	10	33	43	214	724	938
20	Kalimantan Barat	98	345	443	3	1	4	0	3	3	183	429	612
21	Kalimantan Tengah	78	265	343	2	1	3	2	1	3	78	207	285
22	Kalimantan Selatan	104	457	561	1	0	1	5	9	14	129	524	653
23	Kalimantan Timur	74	287	361	0	1	1	5	13	18	63	196	259
24	Kalimantan Utara	23	56	79	3	0	3	0	0	0	25	40	65
25	Sulawesi Utara	47	136	183	4	2	6	5	20	25	30	197	227
26	Sulawesi Tengah	56	268	324	3	0	3	4	6	10	60	165	225
27	Sulawesi Selatan	108	794	902	3	7	10	6	23	29	140	792	932
28	Sulawesi Tenggara	81	575	656	5	13	18	3	13	16	75	482	557
29	Gorontalo	21	123	144	0	0	0	0	0	0	8	61	69
30	Sulawesi Barat	26	92	118	0	0	0	0	11	11	14	56	70
31	Maluku	45	304	349	0	1	1	1	3	4	14	60	74
32	Maluku Utara	55	218	273	3	3	6	2	3	5	17	76	93
33	Papua	56	185	241	0	0	0	0	0	0	6	29	35
34	Papua Barat	31	85	116	1	1	2	1	1	2	7	26	33
35	Papua Selatan	26	58	84	0	0	0	1	1	2	3	9	12
36	Papua Tengah	32	115	147	0	0	0	1	5	6	5	25	30
37	Papua Pegunungan	19	41	60	0	0	0	0	0	0	1	4	5
38	Papua Barat Daya	26	77	103	0	0	0	0	0	0	5	12	17
Indonesia		2.986	14.062	17.048	127	132	259	254	770	1.024	3.453	14.028	17.481

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.26

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterampilan Fisik			Keteknisian Medik		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	95	704	799	333	378	711	67	262	329	228	654	882
2	Sumatera Utara	132	1.045	1.177	404	560	964	171	283	454	269	755	1.024
3	Sumatera Barat	130	637	767	289	303	592	95	212	307	244	930	1.174
4	Riau	119	703	822	210	287	497	116	280	396	220	476	696
5	Jambi	85	405	490	114	140	254	35	151	186	65	291	356
6	Sumatera Selatan	130	790	920	274	322	596	84	281	365	279	632	911
7	Bengkulu	76	230	306	88	89	177	19	55	74	84	147	231
8	Lampung	133	656	789	254	224	478	80	193	273	187	334	521
9	Kep. Bangka Belitung	52	169	221	91	67	158	14	76	90	59	169	228
10	Kepulauan Riau	61	245	306	129	126	255	34	93	127	95	210	305
11	DKI Jakarta	744	2.301	3.045	1.207	1.050	2.257	485	873	1.358	975	2.071	3.046
12	Jawa Barat	1.055	3.776	4.831	1.740	1.351	3.091	613	1.503	2.116	1.669	3.549	5.218
13	Jawa Tengah	680	3.146	3.826	1.472	1.422	2.894	579	1.341	1.920	1.295	3.735	5.030
14	DI Yogyakarta	141	632	773	350	312	662	140	298	438	286	1.030	1.316
15	Jawa Timur	796	3.286	4.082	1.365	1.328	2.693	491	944	1.435	1.254	3.110	4.364
16	Banten	238	1.068	1.306	448	431	879	190	472	662	316	764	1.080
17	Bali	204	707	911	380	265	645	135	160	295	208	482	690
18	Nusa Tenggara Barat	146	588	734	231	202	433	73	188	261	302	537	839
19	Nusa Tenggara Timur	132	486	618	164	160	324	37	95	132	144	443	587
20	Kalimantan Barat	161	465	626	184	124	308	38	95	133	192	323	515
21	Kalimantan Tengah	108	325	433	140	92	232	31	85	116	81	188	269
22	Kalimantan Selatan	158	581	739	220	168	388	69	132	201	239	434	673
23	Kalimantan Timur	176	547	723	228	170	398	90	211	301	179	330	509
24	Kalimantan Utara	35	109	144	57	42	99	11	36	47	50	86	136
25	Sulawesi Utara	96	281	377	122	86	208	60	117	177	106	185	291
26	Sulawesi Tengah	82	293	375	79	115	194	21	86	107	95	166	261
27	Sulawesi Selatan	253	1.087	1.340	342	580	922	136	369	505	316	924	1.240
28	Sulawesi Tenggara	88	365	453	84	162	246	11	95	106	104	257	361
29	Gorontalo	45	148	193	46	63	109	10	19	29	40	99	139
30	Sulawesi Barat	29	88	117	24	57	81	7	34	41	19	72	91
31	Maluku	41	178	219	40	74	114	14	43	57	32	93	125
32	Maluku Utara	41	194	235	48	85	133	10	39	49	35	94	129
33	Papua	63	193	256	40	36	76	8	34	42	35	80	115
34	Papua Barat	30	85	115	22	29	51	5	18	23	19	35	54
35	Papua Selatan	17	51	68	10	14	24	8	7	15	24	21	45
36	Papua Tengah	38	63	101	28	16	44	3	10	13	19	28	47
37	Papua Pegunungan	15	21	36	6	3	9	2	3	5	6	9	15
38	Papua Barat Daya	15	42	57	13	15	28	4	6	10	8	44	52
Indonesia		6.640	26.690	33.330	11.276	10.948	22.224	3.996	9.199	13.195	9.778	23.787	33.565

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.27

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	371	369	740	29	41	70	6.411	6.108	12.519	6.811	6.518	13.329
2	Sumatera Utara	481	719	1.200	28	57	85	7.492	9.925	17.417	8.001	10.701	18.702
3	Sumatera Barat	252	546	798	19	37	56	3.992	5.129	9.121	4.263	5.712	9.975
4	Riau	208	292	500	14	17	31	5.246	6.214	11.460	5.468	6.523	11.991
5	Jambi	234	195	429	18	19	37	2.933	3.507	6.440	3.185	3.721	6.906
6	Sumatera Selatan	319	513	832	14	40	54	5.963	6.898	12.861	6.296	7.451	13.747
7	Bengkulu	139	196	335	25	49	74	1.237	1.841	3.078	1.401	2.086	3.487
8	Lampung	443	464	907	25	38	63	5.782	7.104	12.886	6.250	7.606	13.856
9	Kep. Bangka Belitung	126	161	287	4	8	12	1.858	2.324	4.182	1.988	2.493	4.481
10	Kepulauan Riau	224	219	443	13	34	47	2.551	2.981	5.532	2.788	3.234	6.022
11	DKI Jakarta	579	762	1.341	94	183	277	25.794	23.809	49.603	26.467	24.754	51.221
12	Jawa Barat	1.635	1.766	3.401	82	149	231	40.945	34.520	75.465	42.662	36.435	79.097
13	Jawa Tengah	1.220	1.235	2.455	92	154	246	37.463	34.139	71.602	38.775	35.528	74.303
14	DI Yogyakarta	237	345	582	20	33	53	5.909	6.558	12.467	6.166	6.936	13.102
15	Jawa Timur	1.385	1.485	2.870	102	125	227	41.524	36.348	77.872	43.011	37.958	80.969
16	Banten	430	622	1.052	14	28	42	10.029	9.654	19.683	10.473	10.304	20.777
17	Bali	272	287	559	36	40	76	6.718	8.348	15.066	7.026	8.675	15.701
18	Nusa Tenggara Barat	304	220	524	44	60	104	5.146	4.102	9.248	5.494	4.382	9.876
19	Nusa Tenggara Timur	227	309	536	11	35	46	4.491	4.205	8.696	4.729	4.549	9.278
20	Kalimantan Barat	339	235	574	22	31	53	3.395	4.039	7.434	3.756	4.305	8.061
21	Kalimantan Tengah	212	172	384	15	39	54	2.621	3.246	5.867	2.848	3.457	6.305
22	Kalimantan Selatan	324	283	607	51	63	114	4.420	4.406	8.826	4.795	4.752	9.547
23	Kalimantan Timur	323	330	653	8	25	33	5.366	6.126	11.492	5.697	6.481	12.178
24	Kalimantan Utara	95	80	175	2	77	79	1.350	1.356	2.706	1.447	1.513	2.960
25	Sulawesi Utara	172	309	481	14	16	30	2.553	2.762	5.315	2.739	3.087	5.826
26	Sulawesi Tengah	194	248	442	2	7	9	2.296	2.903	5.199	2.492	3.158	5.650
27	Sulawesi Selatan	333	471	804	22	32	54	5.980	7.654	13.634	6.335	8.157	14.492
28	Sulawesi Tenggara	242	283	525	8	24	32	2.063	2.777	4.840	2.313	3.084	5.397
29	Gorontalo	94	139	233	3	6	9	1.037	1.377	2.414	1.134	1.522	2.656
30	Sulawesi Barat	79	96	175	4	3	7	912	1.225	2.137	995	1.324	2.319
31	Maluku	111	135	246	10	12	22	1.378	1.654	3.032	1.499	1.801	3.300
32	Maluku Utara	101	130	231	10	36	46	727	1.042	1.769	838	1.208	2.046
33	Papua	140	123	263	38	50	88	1.067	1.211	2.278	1.245	1.384	2.629
34	Papua Barat	103	73	176	0	0	0	859	836	1.695	962	909	1.871
35	Papua Selatan	46	41	87	0	0	0	330	419	749	376	460	836
36	Papua Tengah	150	100	250	3	3	6	808	938	1.746	961	1.041	2.002
37	Papua Pegunungan	124	88	212	1	0	1	399	310	709	524	398	922
38	Papua Barat Daya	69	68	137	12	29	41	593	697	1.290	674	794	1.468
Indonesia		12.337	14.109	26.446	909	1.600	2.509	259.638	258.692	518.330	272.884	274.401	547.285

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.28

JUALAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	68	72	140	2	0	2	1.252	1.539	2.791	1.322	1.611	2.933
2	Sumatera Utara	50	102	152	1	0	1	843	1.043	1.886	894	1.145	2.039
3	Sumatera Barat	22	86	108	0	0	0	895	1.210	2.105	917	1.296	2.213
4	Riau	29	31	60	1	0	1	1.005	978	1.983	1.035	1.009	2.044
5	Jambi	40	30	70	1	0	1	364	452	816	405	482	887
6	Sumatera Selatan	63	114	177	0	0	0	1.024	1.282	2.306	1.087	1.396	2.483
7	Bengkulu	35	69	104	0	0	0	259	490	749	294	559	853
8	Lampung	74	95	169	0	0	0	933	1.230	2.163	1.007	1.325	2.332
9	Kep. Bangka Belitung	20	29	49	0	0	0	325	370	695	345	399	744
10	Kepulauan Riau	41	50	91	0	0	0	449	433	882	490	483	973
11	DKI Jakarta	14	32	46	0	0	0	1.927	931	2.858	1.941	963	2.904
12	Jawa Barat	323	327	650	1	1	2	5.144	4.072	9.216	5.468	4.400	9.868
13	Jawa Tengah	83	150	233	0	0	0	4.658	3.413	8.071	4.741	3.563	8.304
14	DI Yogyakarta	27	73	100	0	0	0	721	607	1.328	748	680	1.428
15	Jawa Timur	28	48	76	0	0	0	5.704	4.257	9.961	5.732	4.305	10.037
16	Banten	74	146	220	0	0	0	1.797	1.008	2.805	1.871	1.154	3.025
17	Bali	24	32	56	0	0	0	1.315	1.376	2.691	1.339	1.408	2.747
18	Nusa Tenggara Barat	98	67	165	0	0	0	1.226	1.030	2.256	1.324	1.097	2.421
19	Nusa Tenggara Timur	37	28	65	0	1	1	1.446	1.106	2.552	1.483	1.135	2.618
20	Kalimantan Barat	74	46	120	1	1	2	715	917	1.632	790	964	1.754
21	Kalimantan Tengah	39	9	48	0	0	0	575	723	1.298	614	732	1.346
22	Kalimantan Selatan	60	52	112	0	0	0	764	839	1.603	824	891	1.715
23	Kalimantan Timur	73	69	142	0	0	0	800	1.041	1.841	873	1.110	1.983
24	Kalimantan Utara	24	18	42	0	55	55	268	246	514	292	319	611
25	Sulawesi Utara	8	23	31	0	1	1	269	381	650	277	405	682
26	Sulawesi Tengah	35	34	69	0	0	0	547	686	1.233	582	720	1.302
27	Sulawesi Selatan	16	31	47	0	3	3	1.082	1.452	2.534	1.098	1.486	2.584
28	Sulawesi Tenggara	62	69	131	1	1	2	565	737	1.302	628	807	1.435
29	Gorontalo	12	24	36	0	0	0	214	385	599	226	409	635
30	Sulawesi Barat	27	29	56	0	0	0	349	572	921	376	601	977
31	Maluku	14	25	39	0	1	1	293	331	624	307	357	664
32	Maluku Utara	26	29	55	0	0	0	163	268	431	189	297	486
33	Papua	12	16	28	0	0	0	164	153	317	176	169	345
34	Papua Barat	11	6	17	0	0	0	193	190	383	204	196	400
35	Papua Selatan	6	3	9	0	0	0	66	72	138	72	75	147
36	Papua Tengah	60	29	89	1	0	1	158	159	317	219	188	407
37	Papua Pegunungan	59	27	86	1	0	1	140	79	219	200	106	306
38	Papua Barat Daya	11	13	24	0	1	1	164	206	370	175	220	395
Indonesia		1.779	2.133	3.912	10	65	75	38.776	36.264	75.040	40.565	38.462	79.027

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.29

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	183	180	363	6	1	7	4.146	3.356	7.502	4.335	3.537	7.872
2	Sumatera Utara	250	372	622	9	7	16	5.000	6.516	11.516	5.259	6.895	12.154
3	Sumatera Barat	150	321	471	1	0	1	2.423	2.897	5.320	2.574	3.218	5.792
4	Riau	112	159	271	5	2	7	3.231	3.684	6.915	3.348	3.845	7.193
5	Jambi	87	100	187	0	1	1	1.524	1.940	3.464	1.611	2.041	3.652
6	Sumatera Selatan	147	238	385	2	1	3	4.015	4.170	8.185	4.164	4.409	8.573
7	Bengkulu	47	84	131	0	0	0	658	814	1.472	705	898	1.603
8	Lampung	123	199	322	0	0	0	3.382	3.601	6.983	3.505	3.800	7.305
9	Kep. Bangka Belitung	63	74	137	0	1	1	1.060	1.019	2.079	1.123	1.094	2.217
10	Kepulauan Riau	77	97	174	4	1	5	1.373	1.463	2.836	1.454	1.561	3.015
11	DKI Jakarta	474	608	1.082	17	18	35	16.854	13.942	30.796	17.345	14.568	31.913
12	Jawa Barat	701	826	1.527	14	23	37	25.266	19.574	44.840	25.981	20.423	46.404
13	Jawa Tengah	760	647	1.407	10	8	18	20.726	16.965	37.691	21.496	17.620	39.116
14	DI Yogyakarta	124	159	283	3	3	6	3.504	3.199	6.703	3.631	3.361	6.992
15	Jawa Timur	707	817	1.524	17	19	36	21.707	17.229	38.936	22.431	18.065	40.496
16	Banten	168	246	414	7	8	15	6.050	5.678	11.728	6.225	5.932	12.157
17	Bali	181	181	362	2	3	5	4.022	5.153	9.175	4.205	5.337	9.542
18	Nusa Tenggara Barat	126	109	235	3	4	7	2.949	2.139	5.088	3.078	2.252	5.330
19	Nusa Tenggara Timur	97	140	237	0	0	0	2.177	2.169	4.346	2.274	2.309	4.583
20	Kalimantan Barat	122	116	238	2	0	2	1.683	2.125	3.808	1.807	2.241	4.048
21	Kalimantan Tengah	97	97	194	0	0	0	1.366	1.566	2.932	1.463	1.663	3.126
22	Kalimantan Selatan	160	108	268	1	2	3	2.695	2.417	5.112	2.856	2.527	5.383
23	Kalimantan Timur	124	146	270	0	1	1	3.022	3.095	6.117	3.146	3.242	6.388
24	Kalimantan Utara	35	27	62	0	0	0	819	771	1.590	854	798	1.652
25	Sulawesi Utara	93	174	267	2	1	3	1.790	1.768	3.558	1.885	1.943	3.828
26	Sulawesi Tengah	83	138	221	1	1	2	1.300	1.541	2.841	1.384	1.680	3.064
27	Sulawesi Selatan	191	290	481	2	5	7	3.797	4.813	8.610	3.990	5.108	9.098
28	Sulawesi Tenggara	81	117	198	0	0	0	948	1.155	2.103	1.029	1.272	2.301
29	Gorontalo	46	79	125	0	0	0	654	739	1.393	700	818	1.518
30	Sulawesi Barat	21	39	60	0	0	0	389	457	846	410	496	906
31	Maluku	49	46	95	0	1	1	698	823	1.521	747	870	1.617
32	Maluku Utara	29	38	67	0	1	1	401	575	976	430	614	1.044
33	Papua	45	45	90	2	1	3	610	731	1.341	657	777	1.434
34	Papua Barat	28	21	49	0	0	0	421	380	801	449	401	850
35	Papua Selatan	4	5	9	0	0	0	173	251	424	177	256	433
36	Papua Tengah	18	11	29	1	1	2	412	495	907	431	507	938
37	Papua Pegunungan	2	6	8	0	0	0	145	119	264	147	125	272
38	Papua Barat Daya	18	12	30	0	0	0	272	343	615	290	355	645
Indonesia		5.823	7.072	12.895	111	114	225	151.662	139.672	291.334	157.596	146.858	304.454

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.30

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	11	68	79	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	4	41	45	0	0	0	1	9	10
3	Sumatera Barat	2	29	31	0	0	0	0	2	2
4	Riau	6	54	60	0	0	0	2	0	2
5	Jambi	0	30	30	0	0	0	1	8	9
6	Sumatera Selatan	8	44	52	0	0	0	1	0	1
7	Bengkulu	4	12	16	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	2	23	25	0	3	3	2	52	54
9	Kep. Bangka Belitung	5	15	20	0	0	0	0	1	1
10	Kepulauan Riau	5	20	25	0	0	0	0	1	1
11	DKI Jakarta	30	306	336	19	19	38	30	96	126
12	Jawa Barat	23	242	265	0	0	0	6	33	39
13	Jawa Tengah	37	213	250	5	15	20	3	10	13
14	DI Yogyakarta	21	161	182	1	2	3	0	0	0
15	Jawa Timur	37	195	232	0	4	4	9	85	94
16	Banten	12	80	92	0	0	0	2	8	10
17	Bali	5	49	54	2	1	3	2	6	8
18	Nusa Tenggara Barat	3	25	28	1	0	1	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	11	11	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	5	20	25	0	0	0	0	1	1
21	Kalimantan Tengah	4	22	26	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	5	52	57	0	1	1	0	1	1
23	Kalimantan Timur	5	37	42	0	0	0	0	6	6
24	Kalimantan Utara	2	4	6	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	15	17	1	0	1	0	1	1
26	Sulawesi Tengah	10	21	31	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	6	15	21	0	0	0	4	1	5
28	Sulawesi Tenggara	5	12	17	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	1	2	3	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	11	11	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	2	2	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	1	2	3	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	2	2	4	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	1	1	0	0	0	29	34	63
38	Papua Barat Daya	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Indonesia		263	1.844	2.107	29	45	74	92	355	447

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.31

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	2	17	19	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	1	3	4	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	1	2	3	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	4	6	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	2	2	0	0	0	0	1	1
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	5	40	45	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14	DI Yogyakarta	6	52	58	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	3	28	31	0	1	1	1	12	13
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	1	1	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	2	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	1	3	4	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	5	5	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	1	0	1	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	29	34	63
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		22	163	185	0	2	2	30	47	77

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.32

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
		L	P	L + P	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
					L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	4	39	43	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	3	27	30	0	0	0	0	2	2
3	Sumatera Barat	0	23	23	0	0	0	0	0	0
4	Riau	3	35	38	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	17	17	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	6	30	36	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	3	9	12	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	2	11	13	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	9	9	0	0	0	0	1	1
10	Kepulauan Riau	2	13	15	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	13	146	159	0	0	0	4	1	5
12	Jawa Barat	16	135	151	0	0	0	0	1	1
13	Jawa Tengah	29	149	178	0	3	3	1	0	1
14	DI Yogyakarta	6	46	52	1	2	3	0	0	0
15	Jawa Timur	23	107	130	0	1	1	1	3	4
16	Banten	7	58	65	0	0	0	0	0	0
17	Bali	2	23	25	0	0	0	0	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	1	19	20	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	6	6	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	2	10	12	0	0	0	0	1	1
21	Kalimantan Tengah	1	13	14	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	4	38	42	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	2	19	21	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	1	2	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	10	12	1	0	1	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	9	16	25	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	5	6	11	0	0	0	4	0	4
28	Sulawesi Tenggara	2	6	8	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	1	1	2	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	5	5	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	2	2	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	1	2	3	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	1	2	3	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	1	1	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Indonesia		151	1.039	1.190	2	6	8	10	10	20

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.33

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2025**

No	Poltekkes	Program Studi																						Total
		Keperawatan	Kebidanan	Kesehatan Gigi	Analisis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Sanitasi	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Asuransi Kesehatan	Teknik Gigi	Radiologi	Rekam dan Informasi Kesehatan	Teknologi Elektro Medis	Ortetik Prostetik	Teknologi Bank Darah	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Pengawasan Epidemiologi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	391	176	85	-	102	-	32	50	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
2	Medan	241	171	116	-	215	-	37	135	-	-	-	-	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189
3	Padang	153	188	100	-	-	-	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577
4	Riau	167	111	-	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
5	Jambi	92	75	47	-	99	-	62	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
6	Palembang	337	181	81	-	80	-	75	80	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	44	949
7	Bengkulu	139	90	-	-	91	-	72	93	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592
8	Tanjung Karang	191	263	77	-	87	-	117	138	-	-	-	-	95	-	31	-	-	-	-	-	-	-	999
9	Tanjung Pinang	79	71	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
10	Pangkal Pinang	78	35	-	-	37	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
11	Jakarta I	38	69	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
12	Jakarta II	-	-	-	73	83	-	62	62	-	-	-	-	-	-	64	56	-	51	-	-	-	-	451
13	Jakarta III	88	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
14	Bandung	233	212	49	-	84	-	81	94	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887
15	Tasikmalaya	236	157	77	-	77	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	857
16	Semarang	871	271	101	-	-	-	105	59	-	-	-	-	84	-	-	74	159	-	-	46	85	-	1.855
17	Surakarta	77	46	-	87	110	46	-	-	95	102	89	42	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	736
18	Yogyakarta	59	47	76	-	-	-	117	95	-	-	-	-	117	-	-	-	45	-	-	-	-	-	556
19	Surabaya	279	169	50	-	-	-	147	96	-	-	-	-	42	-	-	-	-	89	-	-	-	-	872
20	Malang	466	95	-	77	-	-	-	89	-	-	-	-	-	49	-	-	121	-	-	92	-	-	989
21	Banten	95	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511
22	Denpasar	118	55	59	-	-	-	16	47	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399
23	Mataram	174	71	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
24	Kupang	450	125	121	-	141	-	99	12	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.047
25	Pontianak	116	41	94	-	-	-	35	60	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
26	Palangkaraya	98	38	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
27	Banjarmasin	37	65	72	-	-	-	56	49	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336
28	Kalimantan Timur	121	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
29	Manado	76	102	47	-	101	-	20	43	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484
30	Palu	181	129	-	-	-	-	35	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414
31	Makassar	227	60	96	-	96	-	29	54	43	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
32	Kendari	167	146	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464
33	Gorontalo	96	94	-	-	78	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
34	Mamuju	25	16	-	-	-	-	22	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
35	Maluku	219	133	-	-	-	-	54	59	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556
36	Ternate	83	83	-	-	-	-	51	48	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
37	Jayapura	406	111	-	-	56	-	12	19	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
38	Sorong	127	73	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249
Total		7.031	4.115	1.426	237	1.537	46	1.474	2.092	138	102	89	42	2.487	49	95	130	482	140	42	138	85	44	22.021

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.34

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan	Keteknisian Medis		Kefarmasian	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan Masyarakat		Gizi	Keterampilan Fisik				Teknik Biomedika				Jumlah
				Penata Anastesi	Terapis Gigi			Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Promosi Kesehatan		Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Teknologi Laboratorium Medis	Teknologi Rekayasa Elektromedis	Teknologi Radiologi Pencitraan	Ortotik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	89	4	-	129	-	77	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	389
2	Medan	128	92	-	-	-	92	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	477
3	Padang	-	33	-	-	-	74	-	32	69	-	-	-	-	-	-	-	-	208
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Jambi	631	140	-	483	-	152	-	50	-	-	-	-	-	378	-	-	-	1.834
6	Palembang	307	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	234	-	-	-	630
7	Bengkulu	122	106	-	-	-	-	-	83	86	-	-	-	-	-	-	-	-	397
8	Tanjung Karang	171	90	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	137	-	-	-	480
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Jakarta I	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	86
12	Jakarta II	-	-	-	-	-	75	-	-	64	-	-	-	-	-	103	148	-	390
13	Jakarta III	130	124	-	-	-	-	-	81	-	90	-	-	-	131	-	-	-	556
14	Bandung	55	40	-	81	-	90	-	81	99	-	-	-	-	126	-	-	-	572
15	Tasikmalaya	115	75	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
16	Semarang	370	156	-	239	-	81	-	-	107	-	-	-	-	85	-	167	-	1.205
17	Surakarta	102	139	-	-	-	-	-	-	-	114	95	106	39	-	-	-	70	665
18	Yogyakarta	155	66	34	114	-	116	-	-	81	-	-	-	-	131	-	-	-	697
19	Surabaya	169	139	-	75	-	86	-	-	-	-	-	-	-	127	52	-	-	648
20	Malang	278	137	-	-	-	-	63	60	91	-	-	-	-	-	-	-	-	629
21	Banten	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
22	Denpasar	168	168	-	-	-	95	-	-	114	-	-	-	-	84	-	-	-	629
23	Mataram	171	91	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	175	-	-	-	536
24	Kupang	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
25	Pontianak	79	119	-	-	-	42	-	-	67	-	-	-	-	65	-	-	-	372
26	Palangka Raya	164	17	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	233
27	Banjarmasin	270	42	-	214	-	92	-	-	52	-	-	-	-	234	-	-	-	904
28	Kalimantan Timur	225	71	-	-	-	-	-	36	107	-	-	-	-	-	-	-	-	439
29	Manado	23	35	-	-	-	49	-	28	46	-	-	-	-	-	-	-	-	181
30	Palu	67	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
31	Makassar	146	-	-	151	50	92	-	-	93	83	-	-	-	111	-	-	-	726
32	Kendari	89	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	161
33	Gorontalo	-	-	-	-	-	39	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	77
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	Jayapura	-	55	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	75
38	Sorong	49	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
Total		4.273	2.415	34	1.563	50	1.334	63	451	1.701	287	95	106	39	2.018	155	315	84	14.983

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.35

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Poltekkes	Profesi Bidan	Keperawatan	Gizi	Keterampilan Fisik	Jumlah
			Ners	Dietisien	Fisioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	-	-	-	-	0
2	Medan	80	77	-	-	157
3	Padang	-	38	-	-	38
4	Riau	-	-	-	-	0
5	Jambi	657	141	-	-	798
6	Palembang	185	-	-	-	185
7	Bengkulu	137	78	-	-	215
8	Tanjung Karang	-	97	-	-	97
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	0
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	0
11	Jakarta I	-	32	-	-	32
12	Jakarta II	-	-	-	-	0
13	Jakarta III	174	126	-	58	358
14	Bandung	44	34	49	-	127
15	Tasikmalaya	202	48	-	-	250
16	Semarang	575	172	13	-	760
17	Surakarta	259	123	-	154	536
18	Yogyakarta	66	75	54	-	195
19	Surabaya	230	89	-	-	319
20	Malang	179	143	94	-	416
21	Banten	-	45	-	-	45
22	Denpasar	192	112	-	-	304
23	Mataram	105	144	-	-	249
24	Kupang	-	126	-	-	126
25	Pontianak	169	145	-	-	314
26	Palangkaraya	149	-	-	-	149
27	Banjarmasin	-	-	-	-	0
28	Kalimantan Timur	280	142	-	-	422
29	Manado	-	51	-	-	51
30	Palu	-	97	-	-	97
31	Makassar	253	-	107	60	420
32	Kendari	-	-	-	-	0
33	Gorontalo	-	-	-	-	0
34	Mamuju	-	-	-	-	0
35	Maluku	-	-	-	-	0
36	Ternate	-	-	-	-	0
37	Jayapura	-	121	-	-	121
38	Sorong	-	-	-	-	0
Total		3.936	2.256	317	272	6.781

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.36

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM MAGISTER (S2 DAN S2 TERAPAN) POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan	Teknik Biomedika	Keteknisian Medis	Jumlah
				Radiografer	Terapis Gigi dan Mulut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Semarang	57	14	36	19	126
2	Palu	-	-	-	-	0
Total		57	14	36	19	126

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 3.37

**JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI*
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Rumpun Tenaga Kesehatan														Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Dokter Gigi Spesialis	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	697	170	57	-	3338	1358	607	739	117	292	428	5	109	-	7.917
2	Sumatera Utara	2022	505	228	31	5862	7731	3821	2479	120	574	331	364	587	-	24.655
3	Sumatera Barat	904	442	124	-	3552	2683	1801	988	219	422	567	66	376	-	12.144
4	Riau	391	-	26	-	2999	2325	898	405	-	306	1	54	319	-	7.724
5	Jambi	274	-	-	-	1221	1708	388	404	198	81	639	19	88	-	5.020
6	Sumatera Selatan	706	204	158	-	1435	1867	707	637	155	249	157	-	239	-	6.514
7	Bengkulu	109	-	-	-	1325	795	456	301	72	179	1	-	182	-	3.420
8	Lampung	773	-	7	-	2019	1591	811	135	200	317	414	27	204	-	6.498
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	485	95	39	47	-	35	-	-	-	-	701
10	Kepulauan Riau	148	-	-	-	493	507	164	68	140	4	-	-	10	-	1.534
11	DKI Jakarta	4112	1013	661	95	7647	4940	3924	2859	200	972	361	474	758	-	28.016
12	Jawa Barat	2284	680	342	78	14877	8111	5990	1224	146	1056	1079	291	1471	8	37.637
13	Jawa Tengah	2471	805	413	-	14959	6965	6242	2570	278	1566	1038	1457	2385	46	41.195
14	DI Yogyakarta	1503	599	351	58	3690	1970	2933	1060	209	966	617	364	989	42	15.351
15	Jawa Timur	3806	1370	713	75	17280	10784	5384	2204	270	1406	614	531	1587	112	46.136
16	Banten	298	-	-	-	3922	1443	1099	336	-	37	109	10	568	-	7.822
17	Bali	861	339	292	-	2380	1827	961	286	111	170	280	196	341	10	8.054
18	Nusa Tenggara Barat	439	-	-	-	1265	1222	707	232	27	194	40	-	252	-	4.378
19	Nusa Tenggara Timur	184	-	-	-	1994	439	261	363	128	56	133	-	104	-	3.662
20	Kalimantan Barat	220	-	-	-	1456	689	407	259	100	139	231	-	63	-	3.564
21	Kalimantan Tengah	195	-	-	-	138	193	136	-	-	84	-	-	63	-	809
22	Kalimantan Selatan	337	145	43	-	1529	844	1383	614	141	133	511	55	320	-	6.055
23	Kalimantan Timur	201	43	6	-	1436	980	914	728	72	107	28	29	102	-	4.646
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	188	94	71	7	-	-	-	-	-	-	360
25	Sulawesi Utara	397	98	117	-	1853	360	549	546	69	116	47	4	95	-	4.251
26	Sulawesi Tengah	453	-	-	-	1349	666	307	647	62	327	-	-	-	-	3.811
27	Sulawesi Selatan	1569	496	401	62	5828	4074	3639	2350	142	707	673	372	964	-	21.277
28	Sulawesi Tenggara	249	-	-	-	715	556	1067	673	65	213	210	36	189	-	3.973
29	Gorontalo	86	-	-	-	956	163	274	301	31	105	86	-	136	-	2.138
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	532	231	59	203	22	71	-	-	-	-	1.118
31	Maluku	232	-	-	-	1015	317	163	143	54	59	-	-	91	-	2.074
32	Maluku Utara	90	-	-	-	150	115	82	92	51	48	-	-	96	-	724
33	Papua	213	-	-	-	799	174	192	335	79	56	-	-	147	-	1.995
34	Papua Barat	29	-	-	-	312	122	47	42	-	49	-	-	-	-	601
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Indonesia		26.253	6.909	3.939	399	108.999	67.939	46.483	24.277	3.478	11.096	8.595	4.354	12.835	218	325.774

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2026
Keterangan : * = lulusan jenjang vokasi, S1, S2, S3, spesialis, dan profesi

Lampiran 3.38

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI TERKAIT KESEHATAN
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	D3	D4	S1	S2	S2 Terapan	S3	Profesi	Spesialis 1	Spesialis 2	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	2.087	519	3.225	93	-	5	1.931	57	-	7.917
2	Sumatera Utara	3.636	914	10.849	998	-	62	7.937	258	1	24.655
3	Sumatera Barat	2.414	828	5.240	181	-	18	3.339	123	1	12.144
4	Riau	1.610	1	3.840	77	-	-	2.170	26	-	7.724
5	Jambi	704	1.677	1.303	-	-	-	1.336	-	-	5.020
6	Sumatera Selatan	1.668	487	2.669	186	-	-	1.346	139	19	6.514
7	Bengkulu	1.441	380	1.054	25	-	-	520	-	-	3.420
8	Lampung	2.048	604	2.208	128	-	-	1.503	7	-	6.498
9	Kep. Bangka Belitung	316	-	267	-	-	-	118	-	-	701
10	Kepulauan Riau	506	-	653	-	-	-	375	-	-	1.534
11	DKI Jakarta	3.035	1.279	11.287	1.988	-	132	9.313	775	207	28.016
12	Jawa Barat	8.211	2.855	13.609	594	-	117	11.831	342	78	37.637
13	Jawa Tengah	8.696	3.358	15.835	921	62	104	11.806	408	5	41.195
14	DI Yogyakarta	2.529	1.100	5.926	780	-	34	4.573	331	78	15.351
15	Jawa Timur	7.152	2.231	19.244	1.042	5	165	15.504	742	51	46.136
16	Banten	2.213	130	3.588	21	-	-	1.870	-	-	7.822
17	Bali	814	1.032	2.835	71	-	-	3.010	292	-	8.054
18	Nusa Tenggara Barat	1.009	361	1.805	41	-	-	1.162	-	-	4.378
19	Nusa Tenggara Timur	1.619	131	1.247	38	-	-	627	-	-	3.662
20	Kalimantan Barat	1.255	434	854	18	-	-	1.003	-	-	3.564
21	Kalimantan Tengah	416	129	170	-	-	-	94	-	-	809
22	Kalimantan Selatan	1.351	934	2.319	68	-	2	1.338	43	-	6.055
23	Kalimantan Timur	765	701	1.928	58	-	-	1.188	6	-	4.646
24	Kalimantan Utara	186	7	94	-	-	-	73	-	-	360
25	Sulawesi Utara	1.153	189	1.813	66	-	-	913	117	-	4.251
26	Sulawesi Tengah	1.305	384	1.450	81	-	-	591	-	-	3.811
27	Sulawesi Selatan	4.117	977	8.934	965	-	66	5.735	458	25	21.277
28	Sulawesi Tenggara	1.107	326	1.810	142	-	-	588	-	-	3.973
29	Gorontalo	480	146	1.077	10	-	-	425	-	-	2.138
30	Sulawesi Barat	428	-	489	-	-	-	201	-	-	1.118
31	Maluku	828	-	916	-	-	-	330	-	-	2.074
32	Maluku Utara	419	-	244	-	-	-	61	-	-	724
33	Papua	1.002	99	491	74	-	-	329	-	-	1.995
34	Papua Barat	249	114	176	-	-	-	62	-	-	601
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		66.769	22.327	129.449	8.666	67	705	93.202	4.124	465	325.774

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2026

Lampiran 4.1

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2025

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan								
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)
1	Sekretariat Jenderal	51.669.604.074.000	51.444.502.831.334	99,56			-	51.669.604.074.000	51.444.502.831.334	99,56
2	Inspektorat Jenderal	28.249.290.000	17.541.134.781	62,09			-	28.249.290.000	17.541.134.781	62,09
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	3.728.138.911.000	562.393.219.900	15,09	516.442.473.000	448.599.015.587	86,86%	4.244.581.384.000	1.010.992.235.487	23,82
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	7.892.278.280.000	4.151.768.018.427	52,61	26.537.687.124.000	24.479.692.332.370	92,25%	34.429.965.404.000	28.631.460.350.797	83,16
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	6.951.021.368.000	1.639.607.750.517	23,59	917.050.170.000	752.810.855.513	82,09%	7.868.071.538.000	2.392.418.606.030	30,41
6	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9.930.109.770.000	6.382.180.582.253	64,27	238.768.201.000	171.999.656.848	72,04%	10.168.877.971.000	6.554.180.239.101	64,45
7	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	224.908.820.000	167.032.181.751	74,27			-	224.908.820.000	167.032.181.751	74,27
8	Ditjen Tenaga Kesehatan	1.598.510.944.000	1.304.468.879.063	81,61	3.833.672.967.000	3.094.776.491.850	80,73%	5.432.183.911.000	4.399.245.370.913	80,98
Kementerian Kesehatan		82.022.821.457.000	65.669.494.598.026	80,06	32.043.620.935.000	28.947.878.352.168	90,34%	114.066.442.392.000	94.617.372.950.194	82,95

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 4.2

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	1.313.280.197.000		202.183.744.000	3.072.878.943.000	527.540.705.000	63.713.454.000		1.162.741.674.000	6.342.338.717.000
	Realisasi	1.303.283.716.501		192.816.769.439	3.012.417.599.474	522.772.411.705	60.965.852.466		1.141.298.619.279	6.233.554.968.864
	%	99,24%	-	95,37	98,03	99,10	95,69		98,16	98,28
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	3.958.505.565.000	28.249.290.000	3.646.682.775.000	26.293.057.073.000	7.304.623.283.000	10.007.080.217.000	218.939.117.000	3.798.518.377.000	55.255.655.697.000
	Realisasi	3.851.376.315.459	17.541.134.781	811.466.962.027	21.461.094.088.566	1.847.235.935.876	6.426.764.980.818	161.690.535.726	3.030.336.505.900	37.607.506.459.153
	%	97,29	62,09	22,25	81,62	25,29	64,22	73,85	79,78	68,06
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	28.502.719.000		395.714.865.000	5.064.029.388.000	35.907.550.000	98.084.300.000	5.969.703.000	470.923.860.000	6.099.132.385.000
	Realisasi	25.913.516.474		6.708.504.021	4.157.948.662.757	22.410.258.449	66.449.405.817	5.341.646.025	227.610.245.734	4.512.382.239.277
	%	90,92%	-	1,70	82,11	62,41	67,75	89,48	48,33	73,98
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	46.369.315.593.000								46.369.315.593.000
	Realisasi	46.263.929.282.900								46.263.929.282.900
	%	99,77%	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	99,77
	Total Anggaran	51.669.604.074.000	28.249.290.000	4.244.581.384.000	34.429.965.404.000	7.868.071.538.000	10.168.877.971.000	224.908.820.000	5.432.183.911.000	114.066.442.392.000
	Realisasi	51.444.502.831.334	17.541.134.781	1.010.992.235.487	28.631.460.350.797	2.392.418.606.030	6.554.180.239.101	167.032.181.751	4.399.245.370.913	94.617.372.950.194
	%	99,56	62,09	23,82	83,16	30,41	64,45	74,27	80,98	82,95

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 4.3

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	51.513.523.757.000	28.249.290.000	1.402.748.460.000	8.492.816.855.000	6.770.907.060.000	10.064.140.324.000	223.830.663.000	3.760.419.910.000	82.256.636.319.000
	Realisasi	51.304.368.153.154	17.541.134.781	707.280.994.061	7.217.511.980.890	1.348.560.010.128	6.511.565.605.652	165.954.025.742	3.036.361.068.056	70.309.142.972.464
	%	99,59	62,09	50,42	84,98	19,92	64,70	74,14	80,75	85,48
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran			2.710.629.279.000	4.733.264.805.000					7.443.894.084.000
	Realisasi			183.516.068.149	1.924.335.724.771					2.107.851.792.920
	%	-	-	6,77	40,66	-	-	-	-	28,32
C.	PENERIMAAN BUKAN PAJAK									
	Anggaran			8.590.116.000	109.310.085.000	81.319.306.000	60.788.653.000		56.510.420.000	316.518.580.000
	Realisasi			7.211.709.472	99.680.492.608	38.684.283.008	18.927.898.937		20.169.506.273	184.673.890.298
	%	-	-	83,95	91,19	47,57	31,14		35,69	58,35
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran			69.678.474.000	21.092.522.111.000		43.948.994.000		1.610.384.934.000	22.816.534.513.000
	Realisasi			64.566.618.274	19.387.902.978.456		23.686.734.512		1.337.905.396.834	20.814.061.728.076
	%	-	-	92,66	91,92	-	53,90	-	83,08	91,22
E.	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI (HLDN)									
	Anggaran				18.000.000				1.000.000.000	1.018.000.000
	Realisasi								947.682.750	947.682.750
	%	-	-	-	-	-	-	-	94,77	93,09
F.	HIBAH LUAR NEGERI (HLN)									
	Anggaran	32.674.060.000		33.270.445.000						65.944.505.000
	Realisasi	16.842.349.101		28.975.228.067						45.817.577.168
	%	51,55		87,09						69%
G.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLLN)									
	Anggaran	123.406.257.000		19.664.610.000	2.033.548.000	1.015.845.172.000		1.078.157.000	3.868.647.000	1.165.896.391.000
	Realisasi	123.292.329.079		19.441.617.464	2.029.174.072	1.005.174.312.894		1.078.156.009	3.861.717.000	1.154.877.306.518
	%	99,91	-	98,87	99,78	98,95	#DIV/0!	100,00	99,82	99,05
	Total Anggaran	51.669.604.074.000	28.249.290.000	4.244.581.384.000	34.429.965.404.000	7.868.071.538.000	10.168.877.971.000	224.908.820.000	5.432.183.911.000	114.066.442.392.000
	Realisasi	51.444.502.831.334	17.541.134.781	1.010.992.235.487	28.631.460.350.797	2.392.418.606.030	6.554.180.239.101	167.032.181.751	4.399.245.370.913	94.617.372.950.194
	%	99,56%	62,09%	23,82	83,16	30,41	64,45	74,27	80,98	82,95

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 4.4

**ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	DAK Fisik					DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Kontrak (Rp)	%	Penyerapan (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	413.108.682.000	390.654.886.681	94,56	206.345.061.869	49,95	478.287.747.340	422.220.037.499	88,28
2	Sumatera Utara	510.501.344.000	477.627.125.520	93,56	250.904.527.696	49,15	727.584.455.936	631.591.455.511	86,81
3	Sumatera Barat	287.765.408.000	264.275.630.341	91,84	114.201.376.807	39,69	328.686.418.162	281.763.582.665	85,72
4	Riau	144.383.699.000	99.367.881.169	68,82	57.506.302.837	39,83	267.181.506.471	238.964.590.087	89,44
5	Jambi	209.777.056.000	203.032.221.451	96,78	75.069.600.554	35,79	251.431.589.676	217.304.812.654	86,43
6	Sumatera Selatan	303.587.060.000	297.028.610.632	97,84	164.495.552.649	54,18	415.476.022.079	367.201.739.927	88,38
7	Bengkulu	212.677.580.000	208.171.062.482	97,88	119.841.678.491	56,35	191.075.495.964	154.189.103.015	80,70
8	Lampung	269.546.146.000	262.313.983.087	97,32	170.405.669.156	63,22	405.573.335.590	363.538.067.864	89,64
9	Bangka Belitung	228.497.603.000	211.537.138.251	92,58	150.786.892.785	65,99	90.479.293.174	82.674.510.530	91,37
10	Kepulauan Riau	215.122.428.000	206.758.950.705	96,11	111.557.756.290	51,86	114.165.911.756	92.600.961.531	81,11
11	DKI Jakarta			-		-	-	-	-
12	Jawa Barat	558.389.285.000	539.962.697.709	96,70	326.533.203.717	58,48	1.202.329.321.434	1.113.074.694.803	92,58
13	Jawa Tengah	547.731.031.000	519.665.711.129	94,88	276.446.739.428	50,47	1.068.457.897.366	1.004.452.353.331	94,01
14	DI Yogyakarta	69.335.830.000	62.038.507.700	89,48	40.034.506.615	57,74	128.074.125.799	119.990.371.116	93,69
15	Jawa Timur	330.525.733.000	304.902.333.136	92,25	185.508.444.647	56,13	1.012.615.048.344	927.425.688.820	91,59
16	Banten	73.056.222.000	70.544.038.295	96,56	39.253.872.789	53,73	297.508.455.708	285.019.140.048	95,80
17	Bali	161.009.970.000	152.016.105.048	94,41	135.581.720.285	84,21	116.136.554.542	98.348.577.783	84,68
18	Nusa Tenggara Barat	435.372.128.000	411.910.688.606	94,61	185.350.895.698	42,57	259.804.151.445	237.770.758.594	91,52
19	Nusa Tenggara Timur	552.527.999.000	529.050.618.978	95,75	283.972.753.422	51,40	647.542.151.179	556.882.554.690	86,00
20	Kalimantan Barat	483.426.003.000	463.453.520.020	95,87	292.435.340.541	60,49	378.482.434.894	330.354.154.622	87,28
21	Kalimantan Tengah	292.100.595.000	284.176.674.674	97,29	127.445.935.944	43,63	279.615.195.877	234.204.215.486	83,76
22	Kalimantan Selatan	278.032.704.000	266.846.106.204	95,98	178.400.373.942	64,17	269.980.806.281	227.354.704.012	84,21
23	Kalimantan Timur	116.974.055.000	109.449.871.124	93,57	24.972.165.226	21,35	207.692.657.817	157.818.803.390	75,99
24	Kalimantan Utara	28.658.002.000	27.628.813.045	96,41	16.409.939.781	57,26	77.122.736.067	65.917.358.251	85,47
25	Sulawesi Utara	580.101.300.000	572.073.753.523	98,62	283.416.242.262	48,86	245.081.433.151	204.121.845.113	83,29
26	Sulawesi Tengah	168.204.106.000	163.610.756.027	97,27	92.043.576.102	54,72	321.143.718.947	295.862.769.706	92,13
27	Sulawesi Selatan	574.932.989.000	550.207.706.935	95,70	255.878.868.763	44,51	611.709.524.281	541.222.195.260	88,48
28	Sulawesi Tenggara	1.035.254.907.000	966.462.733.560	93,36	542.272.479.045	52,38	398.506.252.895	358.093.709.372	89,86
29	Gorontalo	230.805.474.000	223.113.100.206	96,67	113.886.575.183	49,34	125.856.835.164	110.827.786.259	88,06
30	Sulawesi Barat	188.953.624.000	182.927.059.951	96,81	93.013.378.548	49,23	142.920.947.041	125.061.933.910	87,50
31	Maluku	363.024.370.000	351.156.919.338	96,73	210.238.036.319	57,91	320.725.128.282	271.081.343.440	84,52
32	Maluku Utara	442.749.885.000	436.510.908.225	98,59	272.620.062.476	61,57	223.673.394.144	206.323.150.981	92,24
33	Papua	332.535.917.000	320.829.545.889	96,48	218.983.384.931	65,85	215.253.901.477	204.259.368.338	94,89
34	Papua Barat	61.297.616.000	54.985.355.051	89,70	33.445.091.268	54,56	114.430.594.550	99.619.804.315	87,06
35	Papua Selatan	130.339.063.000	125.366.122.929	96,18	93.115.910.003	71,44	129.784.201.636	106.240.610.853	81,86
36	Papua Tengah	224.984.813.000	192.121.719.950	85,39	132.797.252.101	59,02	233.629.465.560	215.529.172.752	92,25
37	Papua Pegunungan	119.664.014.000	118.979.557.825	99,43	72.584.574.498	60,66	214.412.966.967	197.041.942.682	91,90
38	Papua Barat Daya	335.039.328.000	329.521.990.224	98,35	176.167.108.332	52,58	130.164.246.193	116.731.873.219	89,68
TOTAL		11.509.993.969.000	10.950.280.405.620	95,14	6.123.922.851.000	53,21	12.642.595.923.188	11.262.679.742.429	89,09

Sumber: Biro Perencanaan, Kemenkes RI, 2026

Erenggar DAK Nonfisik TA 2026

Lampiran 4.5

**ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025**

No	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan	
		Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	114.066.442.392.000	82,47
	Rupiah Murni	82.256.636.319.000	
	Pinjaman Luar Negeri	7.443.894.084.000	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	316.518.580.000	
	Badan Layanan Umum	22.816.534.513.000	
	Hibah Luar Negeri	65.944.505.000	
	Hibah Langsung Dalam Negeri	1.018.000.000	
	Hibah Langsung Luar Negeri	1.165.896.391.000	
2	DANA ALOKASI KHUSUS	24.238.666.121.000	0,18
	a. DAK Fisik	11.509.993.969.000	
	b. DAK Nonfisik	12.728.672.152.000	
Total Anggaran Kementerian Kesehatan		138.305.108.513.000	
Total APBN		3.621.300.000.000.000	
% APBN Kementerian Kesehatan THD APBN Indonesia			3,82

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2026

Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 4.6

CAKUPAN KEPESERTAAN /AMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk *	PBI		Penduduk yang Didaftarkan Pemda		Bukan PBI						Peserta Aktif		Peserta Tidak Aktif		Total Peserta	%
			Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Pekerja Penerima Upah (PPU)		Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)		Bukan Pekerja		Total	%	Total	%		
							Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	5.626.000	2.860.001	238.844	1.455.622	37.473	915.063	25.544	18.434	13.003	109.833	5.951	5.358.953	95,25	320.815	5,70	5.679.768	100,96
2	Sumatera Utara	15.785.800	4.723.528	733.075	3.785.353	207.419	2.509.783	405.281	1.000.151	1.132.312	346.904	42.008	12.365.719	78,33	2.520.095	15,96	14.885.814	94,30
3	Sumatera Barat	5.914.300	1.765.169	264.560	1.100.070	186.822	926.219	93.836	371.010	474.211	110.484	9.422	4.272.952	72,25	1.028.851	17,40	5.301.803	89,64
4	Riau	6.811.200	2.024.714	337.804	1.907.013	95.540	1.576.778	303.624	453.255	349.390	82.825	7.847	6.044.585	88,74	1.094.205	16,06	7.138.790	104,81
5	Jambi	3.768.500	1.060.344	210.077	693.008	46.588	670.474	117.140	319.497	381.330	71.528	5.523	2.814.851	74,69	760.658	20,18	3.575.509	94,88
6	Sumatera Selatan	8.928.500	3.620.882	627.146	1.986.883	145.836	1.331.772	184.709	345.057	351.367	133.626	9.711	7.418.220	83,08	1.318.769	14,77	8.736.989	97,86
7	Bengkulu	2.138.000	1.013.074	88.750	327.834	27.702	374.346	34.756	88.592	99.375	40.115	1.771	1.843.961	86,25	252.354	11,80	2.096.315	98,05
8	Lampung	9.522.900	3.694.239	733.604	1.044.020	534.269	941.800	129.974	537.400	656.430	148.966	12.834	6.366.425	66,85	2.067.111	21,71	8.433.536	88,56
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.550.800	299.939	44.562	569.433	35.469	286.175	34.566	126.660	103.279	25.424	1.178	1.307.631	84,32	219.054	14,13	1.526.685	98,44
10	Kepulauan Riau	2.213.500	514.797	58.343	300.754	12.494	850.077	181.714	263.697	164.390	17.297	1.591	1.946.622	87,94	418.532	18,91	2.365.154	106,85
11	DKI Jakarta	10.678.000	1.699.933	112.901	4.311.572	292.964	10.597.074	1.654.130	803.869	296.641	307.556	13.847	17.720.004	165,95	2.370.483	22,20	20.090.487	188,15
12	Jawa Barat	50.759.000	15.044.953	3.943.848	9.303.094	1.180.056	8.425.341	1.528.266	3.461.734	3.696.574	847.085	83.667	37.082.207	73,06	10.432.411	20,55	47.514.618	93,61
13	Jawa Tengah	38.233.900	14.309.887	2.797.159	4.141.150	1.974.217	5.968.815	889.528	2.933.220	2.083.892	637.898	46.178	27.990.970	73,21	7.790.974	20,38	35.781.944	93,59
14	D I Yogyakarta	3.781.500	1.624.729	124.094	472.418	22.189	855.730	68.672	240.638	94.378	129.608	5.865	3.323.123	87,88	315.198	8,34	3.638.321	96,21
15	Jawa Timur	42.089.300	15.361.074	2.759.842	7.504.228	1.725.551	6.109.127	825.130	2.663.361	1.912.275	761.465	69.737	32.399.255	76,98	7.292.535	17,33	39.691.790	94,30
16	Banten	12.537.400	3.263.921	588.782	2.719.417	260.865	3.659.498	642.504	909.349	836.455	155.810	13.675	10.707.995	85,41	2.342.281	18,68	13.050.276	104,09
17	Bali	4.461.300	772.937	100.566	1.311.396	82.999	1.263.797	128.492	504.734	177.985	94.997	2.971	3.947.861	88,49	493.013	11,05	4.440.874	99,54
18	Nusa Tenggara Barat	5.731.100	2.645.749	475.989	1.236.705	39.999	702.621	60.907	93.773	174.653	64.922	5.993	4.743.770	82,77	757.541	13,22	5.501.311	95,99
19	Nusa Tenggara Timur	5.742.600	3.482.870	313.446	683.446	58.952	736.165	32.537	73.252	105.158	101.495	7.834	5.077.228	88,41	517.927	9,02	5.595.155	97,43
20	Kalimantan Barat	5.766.000	1.574.680	305.117	881.575	154.609	1.176.624	258.791	388.595	444.781	82.006	7.453	4.103.480	71,17	1.170.751	20,30	5.274.231	91,47
21	Kalimantan Tengah	2.845.000	575.108	82.183	828.507	158.353	867.529	233.190	119.489	147.932	45.257	3.531	2.435.890	85,62	625.189	21,98	3.061.079	107,60
22	Kalimantan Selatan	4.323.300	790.439	132.871	1.577.026	53.406	927.045	145.789	269.716	235.801	80.646	6.538	3.644.872	84,31	574.405	13,29	4.219.277	97,59
23	Kalimantan Timur	4.267.600	789.293	62.539	1.179.408	38.156	1.523.846	235.154	334.718	188.823	56.337	3.197	3.883.602	91,00	527.869	12,37	4.411.471	103,37
24	Kalimantan Utara	749.400	179.276	21.352	214.448	9.796	231.702	35.714	50.555	49.856	8.723	413	684.704	91,37	117.131	15,63	801.835	107,00
25	Sulawesi Utara	2.721.400	756.629	84.004	509.999	94.848	480.115	44.247	222.784	217.917	76.579	2.641	2.046.106	75,19	443.657	16,30	2.489.763	91,49
26	Sulawesi Tengah	3.156.100	1.388.928	129.966	720.600	42.282	749.660	58.851	99.099	122.224	51.300	3.445	3.009.587	95,36	356.768	11,30	3.366.355	106,66
27	Sulawesi Selatan	9.563.100	3.116.259	506.607	2.338.812	194.590	1.352.399	93.491	569.177	524.926	216.119	14.900	7.592.766	79,40	1.334.514	13,95	8.927.280	93,35
28	Sulawesi Tenggara	2.836.700	1.199.708	139.523	604.227	29.932	533.518	34.559	73.057	76.375	57.351	3.739	2.467.861	87,00	284.128	10,02	2.751.989	97,01
29	Gorontalo	1.242.200	650.717	19.986	292.329	13.436	197.700	5.759	23.102	19.662	11.469	272	1.175.317	94,62	59.115	4,76	1.234.432	99,37
30	Sulawesi Barat	1.525.300	624.280	92.876	324.935	15.089	204.392	13.088	52.812	66.623	19.187	1.795	1.225.606	80,35	189.471	12,42	1.415.077	92,77
31	Maluku	1.970.600	1.040.879	115.551	213.746	12.889	325.036	23.637	49.494	80.576	46.338	6.085	1.675.493	85,02	238.738	12,11	1.914.231	97,14
32	Maluku Utara	1.373.800	366.295	67.379	372.822	43.679	445.905	70.294	33.863	60.269	14.165	1.292	1.233.050	89,75	242.913	17,68	1.475.963	107,44
33	Papua	4.600.500	3.135.928	505.264	502.485	44.145	615.056	42.622	55.295	66.064	39.812	1.692	4.348.576	94,52	659.787	14,34	5.008.363	108,87
34	Papua Barat	1.224.000	722.208	43.728	232.611	2.908	272.952	16.179	18.610	16.204	17.309	264	1.263.690	103,24	79.283	6,48	1.342.973	109,72
Indonesia		284.438.600	96.693.367	16.862.338	55.646.946	7.875.522	58.604.134	8.652.675	17.568.049	15.421.131	5.010.436	404.860	233.522.932	82,1	49.216.526	17,30	282.739.458	99,40

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2024

Lampiran 4.7

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Aceh	54	213	364	1	6	638
2	Sumatera Utara	109	579	619	-	12	1.319
3	Sumatera Barat	100	156	279	2	39	576
4	Riau	70	289	238	-	19	616
5	Jambi	60	87	206	-	19	372
6	Sumatera Selatan	217	271	350	1	34	873
7	Bengkulu	97	59	179	-	18	353
8	Lampung	109	253	320	-	6	688
9	Kepulauan Bangka Belitung	24	41	64	1	6	136
10	Kepulauan Riau	6	139	92	1	1	239
11	DKI Jakarta	9	375	44	-	2	430
12	Jawa Barat	411	1.538	1.099	-	55	3.103
13	Jawa Tengah	1.048	895	882	-	308	3.133
14	D I Yogyakarta	94	144	121	-	36	395
15	Jawa Timur	637	970	974	-	228	2.809
16	Banten	7	450	253	-	1	711
17	Bali	282	145	120	1	99	647
18	Nusa Tenggara Barat	86	87	177	1	12	363
19	Nusa Tenggara Timur	82	86	435	9	26	638
20	Kalimantan Barat	93	80	249	-	17	439
21	Kalimantan Tengah	58	75	204	5	8	350
22	Kalimantan Selatan	143	109	242	-	38	532
23	Kalimantan Timur	100	182	188	1	40	511
24	Kalimantan Utara	26	23	58	6	6	119
25	Sulawesi Utara	139	67	198	-	39	443
26	Sulawesi Tengah	38	61	218	4	9	330
27	Sulawesi Selatan	157	253	474	7	68	959
28	Sulawesi Tenggara	56	43	308	-	15	422
29	Gorontalo	22	38	95	1	7	163
30	Sulawesi Barat	31	20	98	1	10	160
31	Maluku	30	27	225	1	6	289
32	Maluku Utara	30	22	150	2	7	211
33	Papua	44	70	461	6	8	589
34	Papua Barat	17	27	167	1	2	214
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		4.486	7.874	10.151	52	1.207	23.770

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Lampiran 4.8

FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	RS TNI POLRI	RS Khusus	Klinik Utama	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	26	35	5	5	16	87
2	Sumatera Utara	39	103	8	14	8	172
3	Sumatera Barat	28	17	5	24	11	85
4	Riau	19	38	3	10	7	77
5	Jambi	15	17	2	3	2	39
6	Sumatera Selatan	30	30	4	13	9	86
7	Bengkulu	12	8	2	3	4	29
8	Lampung	18	41	2	16	8	85
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	7	2	4	4	27
10	Kepulauan Riau	12	15	3	4	6	40
11	DKI Jakarta	34	72	10	20	38	174
12	Jawa Barat	66	260	15	40	100	481
13	Jawa Tengah	68	211	13	28	37	357
14	D I Yogyakarta	12	46	3	9	5	75
15	Jawa Timur	86	220	24	52	52	434
16	Banten	20	68	3	17	17	125
17	Bali	18	39	3	8	14	82
18	Nusa Tenggara Barat	19	15	3	6	3	46
19	Nusa Tenggara Timur	24	20	4	3	6	57
20	Kalimantan Barat	21	10	5	7	17	60
21	Kalimantan Tengah	16	4	2	3	3	28
22	Kalimantan Selatan	18	16	4	7	10	55
23	Kalimantan Timur	21	21	4	10	10	66
24	Kalimantan Utara	6	2	3	0	0	11
25	Sulawesi Utara	22	20	4	5	9	60
26	Sulawesi Tengah	20	6	3	4	7	40
27	Sulawesi Selatan	40	38	6	20	30	134
28	Sulawesi Tenggara	19	12	2	2	3	38
29	Gorontalo	12	5	2	1	4	24
30	Sulawesi Barat	8	2	2	2	2	16
31	Maluku	15	6	3	1	4	29
32	Maluku Utara	11	4	1	0	1	17
33	Papua	23	5	7	1	0	36
34	Papua Barat	11	4	5	0	2	22
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		819	1.417	167	342	449	3.194

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Lampiran 4.9

FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Apotek	Optik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	118	40	158
2	Sumatera Utara	245	60	305
3	Sumatera Barat	112	53	165
4	Riau	108	32	140
5	Jambi	59	21	80
6	Sumatera Selatan	121	35	156
7	Bengkulu	40	13	53
8	Lampung	112	27	139
9	Kepulauan Bangka Belitung	34	11	45
10	Kepulauan Riau	75	18	93
11	DKI Jakarta	215	34	249
12	Jawa Barat	704	143	847
13	Jawa Tengah	733	148	881
14	D I Yogyakarta	104	8	112
15	Jawa Timur	746	272	1.018
16	Banten	153	20	173
17	Bali	167	29	196
18	Nusa Tenggara Barat	93	22	115
19	Nusa Tenggara Timur	96	20	116
20	Kalimantan Barat	72	32	104
21	Kalimantan Tengah	46	10	56
22	Kalimantan Selatan	103	27	130
23	Kalimantan Timur	114	23	137
24	Kalimantan Utara	18	5	23
25	Sulawesi Utara	97	25	122
26	Sulawesi Tengah	64	16	80
27	Sulawesi Selatan	167	47	214
28	Sulawesi Tenggara	56	12	68
29	Gorontalo	27	9	36
30	Sulawesi Barat	27	5	32
31	Maluku	29	5	34
32	Maluku Utara	30	9	39
33	Papua	29	14	43
34	Papua Barat	24	7	31
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		4.938	1.252	6.190

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Lampiran 5.1

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	62.339	408	62.747
2	Sumatera Utara	259.044	412	259.456
3	Sumatera Barat	47.519	276	47.795
4	Riau	90.858	332	91.190
5	Jambi	45.320	103	45.423
6	Sumatera Selatan	135.330	255	135.585
7	Bengkulu	21.078	89	21.167
8	Lampung	124.162	316	124.478
9	Kepulauan Bangka Belitung	18.713	70	18.783
10	Kepulauan Riau	31.371	132	31.503
11	DKI Jakarta	254.075	324	254.399
12	Jawa Barat	786.814	1.764	788.578
13	Jawa Tengah	362.399	1.613	364.012
14	DI Yogyakarta	29.605	155	29.760
15	Jawa Timur	469.978	1.303	471.281
16	Banten	216.412	452	216.864
17	Bali	52.569	249	52.818
18	Nusa Tenggara Barat	77.427	195	77.622
19	Nusa Tenggara Timur	82.526	768	83.294
20	Kalimantan Barat	103.997	345	104.342
21	Kalimantan Tengah	89.562	165	89.727
22	Kalimantan Selatan	57.368	266	57.634
23	Kalimantan Timur	58.697	281	58.978
24	Kalimantan Utara	11.632	71	11.703
25	Sulawesi Utara	30.189	112	30.301
26	Sulawesi Tengah	45.661	288	45.949
27	Sulawesi Selatan	127.814	561	128.375
28	Sulawesi Tenggara	41.549	235	41.784
29	Gorontalo	8.017	84	8.101
30	Sulawesi Barat	21.012	148	21.160
31	Maluku	35.247	256	35.503
32	Maluku Utara	1.776	291	2.067
33	Papua	16.587	167	16.754
34	Papua Barat	3.478	77	3.555
35	Papua Selatan	11.065	183	11.248
36	Papua Tengah	8.463	91	8.554
37	Papua Pegunungan	1.883	95	1.978
38	Papua Barat Daya	1.107	78	1.185
39	Luar Negeri		67	67
40	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)		3	3
Indonesia		3.842.643	13.080	3.855.723
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)		3,39		

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025
Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 5.2

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023 - 2025

No	Provinsi	2023		2024		2025	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	84.158	134	105.074	100	62.339	131
2	Sumatera Utara	228.416	202	294.912	154	259.044	132
3	Sumatera Barat	82.561	118	108.687	92	47.519	99
4	Riau	111.873	136	118.754	109	90.858	95
5	Jambi	57.448	50	65.774	47	45.320	53
6	Sumatera Selatan	152.646	106	146.996	109	135.330	95
7	Bengkulu	31.233	38	37.540	28	21.078	20
8	Lampung	129.468	110	161.132	100	124.162	86
9	Kepulauan Bangka Belitung	22.880	39	26.746	32	18.713	28
10	Kepulauan Riau	47.832	49	38.532	32	31.371	48
11	DKI Jakarta	162.338	115	147.040	108	254.075	104
12	Jawa Barat	825.157	792	798.315	749	786.814	646
13	Jawa Tengah	460.916	466	562.560	438	362.399	337
14	DI Yogyakarta	35.083	26	32.946	29	29.605	28
15	Jawa Timur	510.566	499	586.849	484	469.978	399
16	Banten	230.488	209	205.697	205	216.412	139
17	Bali	62.601	40	57.214	58	52.569	47
18	Nusa Tenggara Barat	88.770	97	104.803	84	77.427	82
19	Nusa Tenggara Timur	73.350	135	121.633	126	82.526	141
20	Kalimantan Barat	81.811	136	102.252	110	103.997	95
21	Kalimantan Tengah	40.711	77	51.676	60	89.562	54
22	Kalimantan Selatan	62.670	102	73.302	92	57.368	84
23	Kalimantan Timur	60.269	83	70.338	74	58.697	53
24	Kalimantan Utara	12.633	20	13.671	8	11.632	18
25	Sulawesi Utara	26.112	42	41.068	43	30.189	47
26	Sulawesi Tengah	36.259	67	55.028	73	45.661	73
27	Sulawesi Selatan	137.884	184	167.177	172	127.814	137
28	Sulawesi Tenggara	43.407	74	56.284	65	41.549	72
29	Gorontalo	18.713	23	22.822	30	8.017	28
30	Sulawesi Barat	24.034	48	30.935	40	21.012	36
31	Maluku	27.372	77	40.054	75	35.247	61
32	Maluku Utara	20.719	50	25.501	48	1.776	35
33	Papua	14.745	29	20.631	37	16.587	41
34	Papua Barat	5.884	31	12.296	17	3.478	22
35	Papua Selatan	9.614	23	11.573	48	11.065	31
36	Papua Tengah	9.112	13	30.397	14	8.463	45
37	Papua Pegunungan	400	9	31.153	4	1.883	44
38	Papua Barat Daya	862	11	13.767	21	1.107	11
39	Luar Negeri	400	-	0	14	0	9
40	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	862	-	0	21	0	31
Indonesia		4.032.257	4.460	4.591.129	4.150	3.842.643	3.737

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.3

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu						
		Kehamilan dengan komplikasi abortus	Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas	Perdarahan obstetrik	Infeksi terkait kehamilan	Komplikasi obstetrik lain	Komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi	Komplikasi non obstetrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	7	28	50	2	14	2	28
2	Sumatera Utara	5	40	33	2	9	3	40
3	Sumatera Barat	1	18	9	3	10	2	56
4	Riau	1	31	20	1	10		32
5	Jambi	1	14	10	3	4		21
6	Sumatera Selatan	1	19	30	3	4	3	35
7	Bengkulu		5	4	1	3		7
8	Lampung	3	18	23	1	9		32
9	Kepulauan Bangka Belitung		4	9	1	2		12
10	Kepulauan Riau	2	6	12	2	7		19
11	DKI Jakarta	3	30	14	4	13	1	39
12	Jawa Barat	11	171	174	23	57	4	206
13	Jawa Tengah	5	78	57	14	42	4	137
14	DI Yogyakarta		6	5	5	3		9
15	Jawa Timur	6	101	72	6	45	1	168
16	Banten	5	31	33	10	13	3	44
17	Bali		6	14		1		26
18	Nusa Tenggara Barat	4	19	18	5	6		30
19	Nusa Tenggara Timur	4	24	36	14	12		51
20	Kalimantan Barat	3	23	20	2	14	1	32
21	Kalimantan Tengah		17	13	4	6	1	13
22	Kalimantan Selatan		32	17	1	4		30
23	Kalimantan Timur		16	14	1	4		18
24	Kalimantan Utara		3	5	1	3		6
25	Sulawesi Utara	2	11	11	5	3	1	14
26	Sulawesi Tengah	3	20	14	4	11		21
27	Sulawesi Selatan	7	30	37	3	19	1	40
28	Sulawesi Tenggara	1	22	22	2	5		20
29	Gorontalo		8	7	1	2		10
30	Sulawesi Barat		7	11	1	4	1	12
31	Maluku	1	13	20	13	5		9
32	Maluku Utara	1	9	6	7	5		7
33	Papua	1	5	12	4	7		12
34	Papua Barat		3	13	1	1	1	3
35	Papua Selatan		3	5	3	3		17
36	Papua Tengah	2	5	11	7	8	2	10
37	Papua Pegunungan	3	4	19		5		13
38	Papua Barat Daya	1	1		2		1	6
39	Luar Negeri	1	1	1		2		4
40	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	1	8	8	1	2		11
Indonesia		86	890	889	163	377	32	1.300

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.4

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Ibu Hamil					Ibu Bersalin/Nifas								
		Jumlah	K1		K6		Jumlah	Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF Lengkap		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Aceh	116.530	82.230	70,57	62.429	54,12	115.356	74.100	64,24	41.038	35,58	53.293	46,20	92.403	80,10
2	Sumatera Utara	305.803	243.458	79,61	240.582	79,16	303.914	242.812	79,89	225.334	74,14	231.390	76,14	239.918	78,94
3	Sumatera Barat	104.778	78.338	74,77	66.234	63,71	103.958	72.467	69,71	41.700	40,11	47.130	45,34	41.857	40,26
4	Riau	123.437	107.697	87,25	106.385	86,64	122.783	104.838	85,38	98.462	80,19	99.248	80,83	101.632	82,77
5	Jambi	67.218	44.373	66,01	48.494	72,67	66.728	51.268	76,83	35.773	53,61	40.070	60,05	44.732	67,04
6	Sumatera Selatan	153.616	137.873	89,75	134.295	88,82	151.193	136.130	90,04	129.832	85,87	133.210	88,11	134.964	89,27
7	Bengkulu	39.776	29.672	74,60	27.246	68,98	39.498	30.252	76,59	28.455	72,04	28.119	71,19	22.712	57,50
8	Lampung	165.731	132.174	79,75	129.522	79,05	163.851	129.669	79,14	108.998	66,52	109.380	66,76	122.652	74,86
9	Kep. Bangka Belitung	28.244	19.615	69,45	18.479	65,67	28.141	19.197	68,22	19.252	68,41	19.034	67,64	15.903	56,51
10	Kepulauan Riau	40.446	33.106	81,85	31.237	77,64	40.231	31.330	77,88	31.416	78,09	30.151	74,94	31.374	77,98
11	DKI Jakarta	150.961	233.503	154,68	189.724	126,27	150.258	182.065	121,17	154.443	102,79	150.966	100,47	245.753	163,55
12	Jawa Barat	813.959	685.727	84,25	729.353	90,23	808.314	733.111	90,70	697.563	86,30	697.298	86,27	699.874	86,58
13	Jawa Tengah	505.911	337.919	66,79	356.523	72,20	493.818	380.233	77,00	327.763	66,37	344.550	69,77	326.533	66,12
14	DI Yogyakarta	44.387	31.162	70,21	28.994	65,69	44.135	29.316	66,42	29.838	67,61	29.119	65,98	29.540	66,93
15	Jawa Timur	569.073	454.408	79,85	460.520	82,07	561.137	473.129	84,32	451.459	80,45	447.926	79,82	421.429	75,10
16	Banten	199.935	219.935	110,00	213.222	101,47	210.139	211.300	100,55	198.616	94,52	211.145	100,48	211.080	100,45
17	Bali	55.929	49.455	88,42	50.414	93,41	53.970	52.100	96,54	52.105	96,54	51.405	95,25	48.404	89,69
18	Nusa Tenggara Barat	100.167	77.466	77,34	74.106	75,60	98.018	79.085	80,68	71.389	72,83	76.148	77,69	76.288	77,83
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	68.146	53,73	63.371	50,59	125.269	79.182	63,21	68.588	54,75	69.245	55,28	82.833	66,12
20	Kalimantan Barat	106.600	73.213	68,68	69.250	65,34	105.985	74.932	70,70	57.853	54,59	55.468	52,34	72.867	68,75
21	Kalimantan Tengah	53.778	44.933	83,55	37.134	69,56	53.382	36.193	67,80	38.144	71,45	32.057	60,05	46.423	86,96
22	Kalimantan Selatan	74.421	54.440	73,15	52.254	71,00	73.597	54.726	74,36	54.465	74,00	52.950	71,95	55.840	75,87
23	Kalimantan Timur	68.839	58.244	84,61	55.719	83,04	67.098	59.785	89,10	66.957	99,79	56.995	84,94	58.004	86,45
24	Kalimantan Utara	14.210	12.011	84,52	11.663	82,58	14.124	11.618	82,26	11.049	78,23	10.972	77,68	11.618	82,26
25	Sulawesi Utara	43.357	17.577	40,54	27.681	64,42	42.967	34.335	79,91	23.523	54,75	24.872	57,89	29.436	68,51
26	Sulawesi Tengah	57.259	45.899	80,16	39.941	70,16	56.928	45.190	79,38	46.205	81,16	44.513	78,19	47.823	84,01
27	Sulawesi Selatan	166.445	118.216	71,02	117.975	71,64	164.672	128.041	77,76	128.335	77,93	125.106	75,97	126.447	76,79
28	Sulawesi Tenggara	59.033	37.099	62,84	33.235	56,61	58.707	41.247	70,26	41.482	70,66	39.692	67,61	41.886	71,35
29	Gorontalo	24.224	7.641	31,54	10.722	44,62	24.027	14.180	59,02	9.184	38,22	10.913	45,42	8.031	33,42
30	Sulawesi Barat	32.453	18.094	55,75	15.675	48,57	32.271	19.827	61,44	18.754	58,11	20.024	62,05	20.424	63,29
31	Maluku	42.230	27.624	65,41	21.850	52,39	41.704	25.466	61,06	21.717	52,07	19.618	47,04	32.618	78,21
32	Maluku Utara	26.157	1.659	6,34	15.977	61,69	25.897	16.801	64,88	2.540	9,81	2.476	9,56	1.702	6,57
33	Papua	21.600	12.917	59,80	12.651	59,28	21.342	16.741	78,44	13.984	65,52	8.715	40,83	12.491	58,53
34	Papua Barat	12.565	3.031	24,12	2.323	18,65	12.458	10.388	83,38	2.282	18,32	1.651	13,25	4.421	35,49
35	Papua Selatan	11.843	5.519	46,60	2.525	21,44	11.776	9.091	77,20	9.382	79,67	6.652	56,49	9.361	79,49
36	Papua Tengah	30.870	5.662	18,34	3.670	12,09	30.350	7.314	24,10	5.768	19,00	4.090	13,48	6.459	21,28
37	Papua Pegunungan	32.521	1.238	3,81	491	1,52	32.330	1.857	5,74	1.010	3,12	2.429	7,51	1.574	4,87
38	Papua Barat Daya	14.146	974	6,89	7.857	55,93	14.049	13.786	98,13	4.474	31,85	4.570	32,53	1.305	9,29
Indonesia		4.605.271	3.612.248	78,44	3.569.723	78,21	4.564.375	3.733.102	81,79	3.369.132	73,81	3.392.590	74,33	3.578.611	78,40

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.5

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (IBU HAMIL) MENURUT PROVINSI

TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	T2+	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	109.546	56.473	51,55
2	Sumatera Utara	305.803	193.547	63,29
3	Sumatera Barat	116.126	67.108	57,79
4	Riau	123.437	78.553	63,64
5	Jambi	68.714	50.496	73,49
6	Sumatera Selatan	154.312	134.263	87,01
7	Bengkulu	39.776	21.855	54,95
8	Lampung	169.881	112.067	65,97
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.244	20.099	71,16
10	Kepulauan Riau	40.446	26.675	65,95
11	DKI Jakarta	150.961	155.402	102,94
12	Jawa Barat	824.638	735.383	89,18
13	Jawa Tengah	610.496	401.982	65,85
14	DI Yogyakarta	52.179	32.419	62,13
15	Jawa Timur	613.960	492.254	80,18
16	Banten	199.935	226.578	113,33
17	Bali	68.227	56.614	82,98
18	Nusa Tenggara Barat	112.438	74.774	66,50
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	53.114	41,88
20	Kalimantan Barat	106.600	54.404	51,04
21	Kalimantan Tengah	53.778	27.935	51,95
22	Kalimantan Selatan	77.991	58.035	74,41
23	Kalimantan Timur	79.725	43.104	54,07
24	Kalimantan Utara	14.210	11.473	80,74
25	Sulawesi Utara	43.357	15.920	36,72
26	Sulawesi Tengah	57.259	36.974	64,57
27	Sulawesi Selatan	176.501	114.738	65,01
28	Sulawesi Tenggara	59.033	35.571	60,26
29	Gorontalo	24.224	18.221	75,22
30	Sulawesi Barat	33.152	11.764	35,49
31	Maluku	42.230	20.227	47,90
32	Maluku Utara	26.157	13.096	50,07
33	Papua	21.600	9.026	41,79
34	Papua Barat	12.565	10.189	81,09
35	Papua Selatan	11.843	5.752	48,57
36	Papua Tengah	30.870	5.674	18,38
37	Papua Pegunungan	32.521	2.479	7,62
38	Papua Barat Daya	14.146	6.844	48,38
Indonesia		4.833.700	3.491.082	72,22

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 5.6

PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Persentase Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase Ibu Hamil Positif HIV (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	109.546	76.521	70	4	0,01
2	Sumatera Utara	305.803	156.814	51	68	0,04
3	Sumatera Barat	116.126	75.128	65	8	0,01
4	Riau	123.437	103.448	84	28	0,03
5	Jambi	68.714	45.896	67	3	0,01
6	Sumatera Selatan	154.312	148.025	96	30	0,02
7	Bengkulu	39.776	19.489	49	5	0,03
8	Lampung	169.881	109.864	65	49	0,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.244	22.017	78	8	0,04
10	Kepulauan Riau	40.446	24.528	61	18	0,07
11	DKI Jakarta	150.961	152.280	101	90	0,06
12	Jawa Barat	824.638	645.545	78	455	0,07
13	Jawa Tengah	610.496	443.594	73	177	0,04
14	DI Yogyakarta	52.179	40.496	78	17	0,04
15	Jawa Timur	613.960	472.532	77	470	0,10
16	Banten	199.935	247.960	124	98	0,04
17	Bali	68.227	59.650	87	104	0,17
18	Nusa Tenggara Barat	112.438	91.367	81	25	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	70.208	55	93	0,13
20	Kalimantan Barat	106.600	57.258	54	49	0,09
21	Kalimantan Tengah	53.778	32.712	61	41	0,13
22	Kalimantan Selatan	77.991	61.078	78	28	0,05
23	Kalimantan Timur	79.725	63.061	79	68	0,11
24	Kalimantan Utara	14.210	11.114	78	11	0,10
25	Sulawesi Utara	43.357	27.878	64	25	0,09
26	Sulawesi Tengah	57.259	37.823	66	28	0,07
27	Sulawesi Selatan	176.501	121.485	69	63	0,05
28	Sulawesi Tenggara	59.033	39.127	66	32	0,08
29	Gorontalo	24.224	18.033	74	9	0,05
30	Sulawesi Barat	33.152	20.427	62	7	0,03
31	Maluku	42.230	22.930	54	60	0,26
32	Maluku Utara	26.157	17.664	68	53	0,30
33	Papua	21.600	18.346	85	246	1,34
34	Papua Barat	12.565	7.837	62	109	1,39
35	Papua Selatan	11.843	9.975	84	27	0,27
36	Papua Tengah	30.870	10.946	35	100	0,91
37	Papua Pegunungan	32.521	2.849	9	32	1,12
38	Papua Barat Daya	14.146	8.186	58	55	0,67
Indonesia		4.833.700	3.594.091	74,35	2.793	0,08

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.7

PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	109.546	65.817	60,08	551	0,84
2	Sumatera Utara	305.803	129.093	42,21	1.295	1,00
3	Sumatera Barat	116.126	79.412	68,38	505	0,64
4	Riau	123.437	102.312	82,89	1.058	1,03
5	Jambi	68.714	41.055	59,75	428	1,04
6	Sumatera Selatan	154.312	146.009	94,62	913	0,63
7	Bengkulu	39.776	17.919	45,05	249	1,39
8	Lampung	169.881	124.670	73,39	1.117	0,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.244	19.790	70,07	389	1,97
10	Kepulauan Riau	40.446	24.659	60,97	352	1,43
11	DKI Jakarta	150.961	173.429	114,88	1.389	0,80
12	Jawa Barat	824.638	663.816	80,50	6.472	0,97
13	Jawa Tengah	610.496	397.219	65,06	3.972	1,00
14	DI Yogyakarta	52.179	35.652	68,33	237	0,66
15	Jawa Timur	613.960	461.151	75,11	7.186	1,56
16	Banten	199.935	217.344	108,71	2.376	1,09
17	Bali	68.227	54.792	80,31	601	1,10
18	Nusa Tenggara Barat	112.438	79.424	70,64	1.836	2,31
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	86.294	68,05	3.182	3,69
20	Kalimantan Barat	106.600	53.980	50,64	1.416	2,62
21	Kalimantan Tengah	53.778	31.936	59,38	946	2,96
22	Kalimantan Selatan	77.991	54.543	69,93	903	1,66
23	Kalimantan Timur	79.725	56.028	70,28	1.182	2,11
24	Kalimantan Utara	14.210	10.632	74,82	141	1,33
25	Sulawesi Utara	43.357	17.298	39,90	297	1,72
26	Sulawesi Tengah	57.259	43.635	76,21	872	2,00
27	Sulawesi Selatan	176.501	122.810	69,58	2.353	1,92
28	Sulawesi Tenggara	59.033	34.602	58,61	1.075	3,11
29	Gorontalo	24.224	17.595	72,63	406	2,31
30	Sulawesi Barat	33.152	10.166	30,66	220	2,16
31	Maluku	42.230	21.782	51,58	752	3,45
32	Maluku Utara	26.157	19.416	74,23	683	3,52
33	Papua	21.600	13.832	97,78	435	3,14
34	Papua Barat	12.565	7.309	58,17	282	3,86
35	Papua Selatan	11.843	7.250	61,22	289	3,99
36	Papua Tengah	30.870	9.421	30,52	412	4,37
37	Papua Pegunungan	32.521	3.019	9,28	130	4,31
38	Papua Barat Daya	14.146	6.291	44,47	179	2,85
Indonesia		4.833.700	3.461.402	71,61	47.081	1,36

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.8

PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Persentase Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Positif Sifilis	Persentase Ibu Hamil Positif Sifilis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	109.546	73.541	67,13	10	0,01
2	Sumatera Utara	305.803	129.606	42,38	63	0,02
3	Sumatera Barat	116.126	62.631	53,93	5	0,00
4	Riau	123.437	98.228	79,58	40	0,03
5	Jambi	68.714	43.177	62,84	4	0,01
6	Sumatera Selatan	154.312	142.014	92,03	12	0,01
7	Bengkulu	39.776	15.792	39,70	1	0,00
8	Lampung	169.881	105.939	62,36	20	0,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.244	21.208	75,09	16	0,06
10	Kepulauan Riau	40.446	21.803	53,91	44	0,11
11	DKI Jakarta	150.961	125.945	83,43	420	0,28
12	Jawa Barat	824.638	616.275	74,73	1.084	0,13
13	Jawa Tengah	610.496	415.856	68,12	158	0,03
14	DI Yogyakarta	52.179	35.757	68,53	26	0,05
15	Jawa Timur	613.960	451.781	73,58	164	0,03
16	Banten	199.935	237.565	118,82	272	0,14
17	Bali	68.227	58.261	85,39	302	0,44
18	Nusa Tenggara Barat	112.438	84.569	75,21	29	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	60.894	48,02	171	0,13
20	Kalimantan Barat	106.600	49.441	46,38	78	0,07
21	Kalimantan Tengah	53.778	29.419	54,70	18	0,03
22	Kalimantan Selatan	77.991	54.188	69,48	3	0,00
23	Kalimantan Timur	79.725	57.320	71,90	163	0,20
24	Kalimantan Utara	14.210	10.812	76,09	32	0,23
25	Sulawesi Utara	43.357	21.033	48,51	42	0,10
26	Sulawesi Tengah	57.259	35.303	61,65	28	0,05
27	Sulawesi Selatan	176.501	116.125	65,79	86	0,05
28	Sulawesi Tenggara	59.033	38.181	64,68	47	0,08
29	Gorontalo	24.224	16.975	70,08	35	0,14
30	Sulawesi Barat	33.152	20.097	60,62	7	0,02
31	Maluku	42.230	20.522	48,60	468	1,11
32	Maluku Utara	26.157	16.002	61,18	91	0,35
33	Papua	21.600	13.979	64,72	686	3,18
34	Papua Barat	12.565	6.952	55,33	233	1,85
35	Papua Selatan	11.843	9.485	80,09	218	1,84
36	Papua Tengah	30.870	10.571	34,24	529	1,71
37	Papua Pegunungan	32.521	2.410	7,41	76	0,23
38	Papua Barat Daya	14.146	7.628	53,92	262	1,85
Indonesia		4.833.700	3.337.285	69,04	5.943	0,18

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.9

PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TTD DAN IBU HAMIL MENDAPAT SUPLEMENTASI GIZI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun)			Ibu Hamil		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD minimal 26 tablet	%	Jumlah	Jumlah mendapat suplementasi gizi minimal 180 Tablet	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	297.015	199.019	67,01	86.491	22.544	26,07
2	Sumatera Utara	754.594	583.067	77,27	238.675	86.323	36,17
3	Sumatera Barat	297.264	264.635	89,02	97.842	69.742	71,28
4	Riau	340.954	240.026	70,40	123.305	77.653	62,98
5	Jambi	166.818	106.915	64,09	62.758	41.502	66,13
6	Sumatera Selatan	456.883	351.497	76,93	139.937	99.448	71,07
7	Bengkulu	98.838	81.942	82,91	35.383	20.769	58,70
8	Lampung	492.231	375.975	76,38	148.161	97.289	65,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	71.098	67.499	94,94	22.856	16.903	73,95
10	Kepulauan Riau	103.013	92.160	89,46	36.140	30.316	83,88
11	DKI Jakarta	396.463	371.640	93,74	164.753	56.470	34,28
12	Jawa Barat	2.169.942	2.053.700	94,64	801.713	756.217	94,33
13	Jawa Tengah	1.569.947	1.443.692	91,96	406.347	368.681	90,73
14	DI Yogyakarta	172.375	170.907	99,15	35.671	26.687	74,81
15	Jawa Timur	1.645.136	1.525.206	92,71	572.799	429.205	74,93
16	Banten	548.750	506.770	92,35	225.987	233.721	103,42
17	Bali	184.828	184.652	99,90	56.732	48.551	85,58
18	Nusa Tenggara Barat	280.019	263.447	94,08	96.339	74.824	77,67
19	Nusa Tenggara Timur	309.071	246.378	79,72	86.585	56.813	65,62
20	Kalimantan Barat	292.725	266.707	91,11	99.666	57.715	57,91
21	Kalimantan Tengah	123.795	86.859	70,16	45.030	16.839	37,40
22	Kalimantan Selatan	177.306	154.618	87,20	67.655	56.685	83,79
23	Kalimantan Timur	174.291	164.421	94,34	66.789	56.636	84,80
24	Kalimantan Utara	31.063	24.508	78,90	13.927	8.990	64,55
25	Sulawesi Utara	93.896	29.106	31,00	34.496	14.528	42,12
26	Sulawesi Tengah	148.422	91.278	61,50	49.721	39.378	79,20
27	Sulawesi Selatan	402.657	296.237	73,57	127.883	79.889	62,47
28	Sulawesi Tenggara	142.570	80.795	56,67	47.711	21.411	44,88
29	Gorontalo	59.269	47.683	80,45	21.910	16.607	75,80
30	Sulawesi Barat	64.098	49.404	77,08	26.092	18.836	72,19
31	Maluku	100.828	40.411	40,08	37.995	15.616	41,10
32	Maluku Utara	65.722	33.797	51,42	21.600	10.967	50,77
33	Papua	45.076	20.612	45,73	18.478	4.017	21,74
34	Papua Barat	19.471	3.243	16,66	7.612	1.544	20,28
35	Papua Selatan	40.480	7.346	18,15	11.644	3.586	30,80
36	Papua Tengah	43.192	2.833	6,56	13.834	3.007	21,74
37	Papua Pegunungan	31.444	2.489	7,92	10.121	1.554	15,35
38	Papua Barat Daya	18.152	3.798	20,92	8.751	4.673	53,40
Indonesia		12.429.696	10.535.272	84,76	4.169.389	3.046.136	73,06

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.10

**PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KEK & RISIKO KEK*
MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Gizi Kurang	Ibu Hamil KEK dan Risiko KEK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	47,40	82,59
2	Sumatera Utara	60,80	84,25
3	Sumatera Barat	61,60	71,88
4	Riau	62,14	70,67
5	Jambi	75,60	79,70
6	Sumatera Selatan	79,15	82,98
7	Bengkulu	65,29	64,19
8	Lampung	70,40	85,92
9	Kepulauan Bangka Belitung	53,03	70,04
10	Kepulauan Riau	62,7	56,28
11	DKI Jakarta	81,61	93,18
12	Jawa Barat	52,66	67,89
13	Jawa Tengah	59,81	72,09
14	DI Yogyakarta	93,29	75,30
15	Jawa Timur	54,39	70,50
16	Banten	65,88	66,88
17	Bali	45,16	58,08
18	Nusa Tenggara Barat	40,67	72,77
19	Nusa Tenggara Timur	30,22	48,88
20	Kalimantan Barat	56,79	65,81
21	Kalimantan Tengah	62,9	61,72
22	Kalimantan Selatan	51,55	81,66
23	Kalimantan Timur	37,55	61,91
24	Kalimantan Utara	47,88	43,42
25	Sulawesi Utara	65,35	68,37
26	Sulawesi Tengah	69,06	78,87
27	Sulawesi Selatan	60,31	73,06
28	Sulawesi Tenggara	58,86	70,69
29	Gorontalo	45,08	73,89
30	Sulawesi Barat	20,56	56,65
31	Maluku	59,38	64,63
32	Maluku Utara	58,17	81,06
33	Papua	46,76	58,05
34	Papua Barat	32,34	56,65
35	Papua Selatan	50,22	74,34
36	Papua Tengah	60,6	76,60
37	Papua Pegunungan	61,43	88,84
38	Papua Barat Daya	69,00	68,37
Indonesia		53,65	70,29

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 5.11

**JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah PUS	PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi																			Prevalensi KB			
			Peserta KB Modern																Peserta KB Tradisional		Jumlah PUS Peserta KB				
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Aceh	951.491	32.830	3,45	325.816	34	81.216	8,54	28.154	2,96	445	0,05	26.996	2,84	41.889	4,40	1.880	0,20	539.226	56,67	7.107	0,75	546.333	57,42	
2	Sumatera Utara	2.278.537	53.730	2,36	479.545	21	139.311	6,11	54.473	2,39	2.856	0,13	114.895	5,04	303.324	13,31	2.945	0,13	1.151.079	50,52	9.833	0,43	1.160.912	50,95	
3	Sumatera Barat	839.054	46.071	5,49	234.841	27,99	42.653	5,08	47.766	5,69	1.080	0,13	32.762	3,90	84.992	10,13	1.300	0,15	491.465	58,57	13.174	1,57	504.639	60,14	
4	Riau	1.108.611	36.712	3,31	361.549	32,61	90.819	8,19	36.816	3,32	758	0,07	30.333	2,74	81.373	7,34	1.015	0,09	639.375	57,67	10.789	0,97	650.164	58,65	
5	Jambi	653.389	9.435	1,44	290.916	44,52	61.559	9,42	15.842	2,42	216	0,03	11.992	1,84	61.811	9,46	1.774	0,27	453.545	69,41	2.278	0,35	455.823	69,76	
6	Sumatera Selatan	1.455.519	21.015	1,44	612.628	42,09	67.310	4,62	24.117	1,66	502	0,03	17.517	1,20	231.656	15,92	1.553	0,11	976.298	67,08	5.373	0,37	981.671	67,44	
7	Bengkulu	364.208	11.728	3,22	150.365	41,29	18.842	5,17	11.016	3,02	142	0,04	8.194	2,25	53.294	14,63	550	0,15	254.131	69,78	1.440	0,40	255.571	70,17	
8	Lampung	1.595.538	14.748	0,92	673.768	42,23	94.272	5,91	43.941	2,75	819	0,05	17.628	1,10	205.144	12,86	2.750	0,17	1.053.070	66,00	3.820	0,24	1.056.890	66,24	
9	Kep. Bangka Belitung	266.366	7.428	2,79	112.550	42,25	35.493	13,32	9.327	3,50	308	0,12	9.000	3,38	20.342	7,64	217	0,08	194.665	73,08	1.888	0,71	196.553	73,79	
10	Kepulauan Riau	371.383	27.575	7,42	88.541	23,84	31.763	8,55	18.132	4,88	79	0,02	14.895	4,01	25.707	6,92	396	0,11	207.088	55,76	4.250	1,14	211.338	56,91	
11	DKI Jakarta	2.978.927	44.924	1,51	573.153	19,24	137.173	4,60	320.370	10,75	1.591	0,05	99.528	3,34	74.363	2,50	3.128	0,11	1.254.230	42,10	143.154	4,81	1.397.384	46,91	
12	Jawa Barat	8.195.428	114.674	1,40	3.126.415	38,15	676.210	8,25	675.182	8,24	5.123	0,06	210.701	2,57	374.053	4,56	9.930	0,12	5.192.288	63,36	32.836	0,40	5.225.124	63,76	
13	Jawa Tengah	5.922.012	186.707	3,15	2.198.144	37,12	263.617	4,45	436.854	7,38	7.653	0,13	192.375	3,25	659.600	11,14	6.432	0,11	3.951.382	66,72	32.865	0,55	3.984.247	67,28	
14	DI Yogyakarta	527.344	54.704	10,37	82.857	15,71	15.947	3,02	100.671	19,09	1.162	0,22	20.253	3,84	33.409	6,34	823	0,16	309.826	58,75	2.788	0,53	312.614	59,28	
15	Jawa Timur	6.599.296	108.553	1,64	2.812.917	42,62	498.075	7,55	465.041	7,05	5.599	0,09	222.354	3,37	475.609	7,21	7.966	0,12	4.596.474	69,65	24.283	0,37	4.620.757	70,02	
16	Banten	2.145.715	31.703	1,48	1.005.002	46,84	116.053	5,41	99.340	4,63	2.423	0,11	33.570	1,56	123.845	5,77	3.603	0,17	1.415.539	65,97	5.658	0,26	1.421.197	66,23	
17	Bali	653.025	26.938	4,13	138.578	21,22	25.301	3,87	141.371	21,65	1.107	0,17	35.240	5,40	19.501	2,99	502	0,08	388.538	59,50	8.228	1,26	396.766	60,76	
18	Nusa Tenggara Barat	1.004.491	5.841	0,58	360.500	35,89	18.368	1,83	46.197	4,60	559	0,06	13.159	1,31	148.300	14,76	649	0,06	593.573	59,09	2.227	0,22	595.800	59,31	
19	Nusa Tenggara Timur	770.037	1.198	0,16	105.999	13,77	13.396	1,74	23.979	3,11	533	0,07	34.789	4,52	127.407	16,55	667	0,09	307.968	39,99	5.629	0,73	313.597	40,72	
20	Kalimantan Barat	968.889	3.300	0,34	388.224	40,07	134.172	13,85	17.919	1,85	272	0,03	14.978	1,55	39.756	4,10	1.220	0,13	599.841	61,91	3.386	0,35	603.227	62,26	
21	Kalimantan Tengah	569.920	2.641	0,46	276.798	48,57	73.588	12,91	3.940	0,69	188	0,03	5.369	0,94	41.710	7,32	397	0,07	404.631	71,00	1.794	0,31	406.425	71,31	
22	Kalimantan Selatan	708.845	4.730	0,67	274.388	38,71	161.427	22,77	14.213	2,01	338	0,05	10.601	1,50	39.824	5,62	706	0,10	506.227	71,42	1.891	0,27	508.118	71,68	
23	Kalimantan Timur	671.929	17.564	2,61	179.792	26,76	83.613	12,44	38.113	5,67	207	0,03	20.627	3,07	39.709	5,91	740	0,11	380.365	56,61	3.795	0,56	384.160	57,17	
24	Kalimantan Utara	117.817	1.753	1,49	33.533	28,46	10.346	8,78	4.894	4,15	-	-	3.591	3,05	9.110	7,73	53	0,04	63.280	53,71	648	0,55	63.928	54,26	
25	Sulawesi Utara	376.734	637	0,17	108.192	28,72	23.781	6,31	12.851	3,41	228	0,06	10.241	2,72	54.653	14,51	627	0,17	211.210	56,06	2.003	0,53	213.213	56,60	
26	Sulawesi Tengah	510.906	1.529	0,30	124.992	24,46	57.428	11,24	25.621	5,01	423	0,08	13.121	2,57	72.649	14,22	695	0,14	296.458	58,03	1.768	0,35	298.226	58,37	
27	Sulawesi Selatan	1.359.388	9.318	0,69	400.028	29,43	133.621	9,83	38.222	2,81	725	0,05	32.103	2,36	200.078	14,72	2.177	0,16	816.272	60,05	5.428	0,40	821.700	60,45	
28	Sulawesi Tenggara	431.601	2.316	0,54	99.114	22,96	49.700	11,52	8.051	1,87	125	0,03	5.370	1,24	53.689	12,44	676	0,16	219.041	50,75	948	0,22	219.989	50,97	
29	Gorontalo	206.488	591	0,29	54.330	26,31	17.753	8,60	8.636	4,18	442	0,21	4.706	2,28	44.165	21,39	105	0,05	130.728	63,31	409	0,20	131.137	63,51	
30	Sulawesi Barat	242.631	2.536	1,05	49.135	20,25	27.570	11,36	4.196	1,73	265	0,11	4.685	1,93	34.705	14,30	275	0,11	123.367	50,85	1.333	0,55	124.700	51,39	
31	Maluku	261.799	320	0,12	68.691	26,24	8.803	3,36	1.737	0,66	-	-	3.228	1,23	30.725	11,74	36	0,01	113.540	43,37	1.306	0,50	114.846	43,87	
32	Maluku Utara	274.464	181	0,07	82.500	30,06	4.625	1,69	1.493	0,54	-	-	2.596	0,95	53.477	19,48	265	0,10	145.137	52,88	510	0,19	145.647	53,07	
33	Papua	159.419	654	0,41	14.033	8,80	2.375	1,49	235	0,15	17	0,01	1.922	1,21	9.615	6,03	251	0,16	29.102	18,26	1.220	0,77	30.322	19,02	
34	Papua Barat	98.090	96	0,10	25.102	25,59	7.321	7,46	444	0,45	48	0,05	1.286	1,31	4.664	4,75	65	0,07	39.026	39,79	2.652	2,70	41.678	42,49	
35	Papua Selatan	71.423	75	0,11	11.804	16,53	2.763	3,87	72	0,10	-	-	527	0,74	4.981	6,97	42	0,06	20.264	28,37	201	0,28	20.465	28,65	
36	Papua Tengah	250.424	440	0,18	24.398	9,74	3.750	1,50	1.306	0,52	-	-	4.239	1,69	8.842	3,53	-	-	42.975	17,16	945	0,38	43.920	17,54	
37	Papua Pegunungan	249.566	12	0,00	8.436	3,38	1.961	0,79	562	0,23	-	-	130	0,05	5.440	2,18	-	-	16.541	6,63	89	0,04	16.630	6,66	
38	Papua Barat Daya	93.748	38	0,04	13.529	14,43	2.121	2,26	-	-	-	-	611	0,65	6.581	7,02	360	0,38	23.240	24,79	83	0,09	23.323	24,88	
Indonesia			46.304.452	885.245	1,91	15.971.103	35,32	3.234.096	7,49	2.781.094	6,04	36.593	0,08	1.286.112	2,65	3.899.992	8,66	56.770	0,81	28.151.005	61,16	348.029	0,66	28.499.034	61,91

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga (dengan weighting), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, 2025

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

MAL : Metode Amenorea Laktasi

- : Tidak ada data

Lampiran 5.12

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	PUS Peserta KB Modern														
		Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Klinik Utama	Puskesmas	Praktik Dokter	Klinik Pratama	RS Tipe D Pratama	Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB)	Pustu	Pusling	Poskesdes/ Polindes	Mobil Pelayanan Kontrasepsi	Toko Obat/ Apotek	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	49.075	6.004	12.008	171.027	21.692	3.792	94	161.185	16.986	224	65.260	1.240	30.131	508	539.226
2	Sumatera Utara	138.036	13.869	49.397	396.433	18.549	37.195	1.218	327.290	34.852	430	44.487	15.608	73.493	222	1.151.079
3	Sumatera Barat	46.395	9.373	12.954	116.625	7.830	4.986	424	104.481	69.419	388	64.212	4.787	49.006	585	491.465
4	Riau	34.053	12.084	25.128	131.558	22.586	12.961	1.715	221.743	67.478	168	49.986	4.889	54.701	325	639.375
5	Jambi	15.959	3.043	6.040	80.033	10.331	2.442	159	154.515	54.936	1.525	72.758	21.139	30.408	257	453.545
6	Sumatera Selatan	36.275	4.091	11.996	183.647	18.188	7.702	967	322.667	47.623	1.187	297.915	20.310	23.194	536	976.298
7	Bengkulu	11.016	1.643	3.245	87.935	6.246	2.160	240	96.770	12.612	304	21.747	1.971	8.044	198	254.131
8	Lampung	28.323	8.757	16.680	185.940	35.228	10.513	646	617.890	33.055	1.231	51.004	17.930	45.646	227	1.053.070
9	Kep. Bangka Belitung	9.618	2.329	2.216	28.865	3.341	447	84	57.478	11.561	323	56.608	2.338	19.399	58	194.665
10	Kepulauan Riau	25.557	1.506	6.771	50.119	5.108	3.389	266	44.670	20.262	107	15.682	5.690	27.899	62	207.088
11	DKI Jakarta**	223.651	15.018	209.256	306.667	26.960	-	1.942	322.960	4.339	-	-	2.099	112.955	28.383	1.254.230
12	Jawa Barat	433.911	68.747	155.884	950.512	93.127	85.214	17.114	2.578.793	108.648	2.936	159.463	12.532	523.331	2.076	5.192.288
13	Jawa Tengah	393.259	31.881	56.942	951.218	94.335	70.720	4.167	1.703.073	85.355	1.576	235.157	19.276	301.203	3.220	3.951.382
14	DI Yogyakarta	56.618	5.732	7.917	54.101	10.084	11.808	965	103.395	3.141	439	879	398	53.611	738	309.826
15	Jawa Timur	427.266	52.599	67.955	766.989	142.860	44.471	3.045	1.795.798	221.936	1.337	670.046	9.753	391.110	1.309	4.596.474
16	Banten	68.794	13.485	93.205	440.969	43.303	58.003	1.505	586.359	23.621	3.953	22.895	4.217	54.640	590	1.415.539
17	Bali	84.535	9.433	7.137	70.501	30.780	6.181	416	129.499	14.489	-	9.215	1.078	25.127	147	388.538
18	Nusa Tenggara Barat	29.920	3.403	3.937	116.346	14.372	2.591	463	104.938	47.728	1.421	255.381	3.707	9.087	279	593.573
19	Nusa Tenggara Timur	43.511	1.537	1.437	141.693	1.270	639	44	4.070	48.251	163	63.655	314	1.338	46	307.968
20	Kalimantan Barat	30.758	2.785	7.665	138.103	8.445	2.762	157	124.640	48.969	1.245	194.329	1.338	38.550	95	599.841
21	Kalimantan Tengah	8.397	381	1.537	73.179	3.652	1.994	195	75.691	121.709	2.929	85.814	2.723	26.430	-	404.631
22	Kalimantan Selatan	20.736	1.012	4.044	90.586	8.728	2.284	224	130.878	17.966	538	126.006	7.534	95.538	153	506.227
23	Kalimantan Timur	35.591	5.804	11.419	95.426	14.621	5.301	540	81.577	35.526	113	41.376	324	52.509	238	380.365
24	Kalimantan Utara	6.043	49	575	26.222	3.971	4	-	10.198	10.527	156	353	-	5.182	-	63.280
25	Sulawesi Utara	25.137	1.974	3.783	87.225	8.925	2.907	43	43.888	14.814	160	8.668	3.106	10.580	-	211.210
26	Sulawesi Tengah	25.423	1.652	2.095	93.224	3.372	1.087	298	23.488	45.848	736	80.239	3.543	15.453	-	296.458
27	Sulawesi Selatan	66.223	6.445	10.229	328.330	11.961	5.844	716	112.483	133.895	1.266	65.691	8.420	64.631	138	816.272
28	Sulawesi Tenggara	10.603	916	3.546	94.216	3.225	942	110	39.228	23.723	602	18.930	7.572	15.404	24	219.041
29	Gorontalo	11.195	327	2.417	71.902	2.460	802	64	18.763	10.161	190	4.331	334	7.692	90	130.728
30	Sulawesi Barat	6.716	428	552	40.434	693	89	-	11.167	44.076	133	10.606	864	7.581	28	123.367
31	Maluku	5.840	811	484	54.116	630	239	-	21.615	15.169	964	9.042	3.329	1.301	-	113.540
32	Maluku Utara	5.595	131	375	66.329	268	697	14	17.571	22.942	929	27.471	2.113	702	-	145.137
33	Papua	2.686	182	214	19.349	1.007	910	-	2.587	1.695	120	-	-	352	-	29.102
34	Papua Barat	2.362	13	387	29.987	231	157	48	813	1.538	1.207	848	-	1.435	-	39.026
35	Papua Selatan	695	-	35	5.234	-	213	-	917	10.437	1.788	116	-	829	-	20.264
36	Papua Tengah	7.751	-	193	30.334	1.105	543	-	1.763	409	-	543	32	302	-	42.975
37	Papua Pegunungan	6.926	11	-	9.489	-	-	-	11	104	-	-	-	-	-	16.541
38	Papua Barat Daya	1.408	-	40	16.603	224	-	-	2.319	975	46	468	182	975	-	23.240
Indonesia		2.435.857	287.455	799.695	6.601.466	679.708	391.989	37.883	10.157.171	1.486.775	30.834	2.831.181	190.690	2.179.769	40.532	28.151.005

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga (dengan weighting), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, 2025

Keterangan:

- : Tidak ada data

**Data DKI Jakarta tidak ada pemilahan PUS Peserta KB Modern menurut Tempat Pelayanan

Lampiran 5.13

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran dan Bersalin	Persalinan di Fasilitas	PUS	mCPR	%	Metode KB Modern (mCPR)															Peserta KB Pasca Persalinan (KBP)		Peserta KB Pasca Persalinan																		
							Kondom	%	PII	%	Suntik	%	AKDR	%	Implan	%	MOW	%	MOP	%	MAL	%	Kondom	%	PII	%	Suntik	%	AKDR	%	Implan	%	MOW	%	MOP	%	MAL	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
1	Aceh	115.356	74.100	879.901	162.906	18,51	7.889	4,84	42.070	25,82	83.729	51,40	5.501	3,38	13.341	8,19	5.630	3,46	23	0,01	4.723	2,90	9.459	12,77	643	6,80	1.535	16,23	3.099	32,76	286	3,02	432	4,57	358	3,78	-	-	3.106	32,84		
2	Sumatera Utara	303.914	242.812	2.331.071	129.255	5,54	14.908	11,53	32.564	25,19	37.259	28,83	6.532	5,05	23.508	18,19	8.371	6,48	489	0,38	5.624	4,35	23.005	9,47	2.594	10,08	4.885	21,15	5.121	22,26	1.253	5,45	4.039	17,56	705	3,06	74	0,32	4.444	19,32		
3	Sumatera Barat	103.958	72.467	856.089	363.491	42,46	37.785	18,39	60.317	16,59	171.828	47,27	29.137	8,02	47.269	13,04	13.329	3,67	718	0,20	3.118	0,86	17.952	24,77	2.083	11,60	3.339	18,60	5.819	32,41	3.624	20,19	1.785	9,94	613	3,41	3	0,02	686	3,82		
4	Riau	122.783	104.808	199.114	17.134	14,585	7,32	49.018	24,62	99.162	49,80	8.485	4,26	22.825	11,46	2.318	1,16	331	0,17	2.398	1,20	23.744	22,65	2.839	11,91	5.498	23,16	10.749	45,27	1.255	5,29	2.513	10,58	423	1,78	10	0,04	467	1,97			
5	Jambi	66.728	51.268	665.763	232.615	34,94	12.147	5,22	42.499	18,27	146.192	62,85	7.524	3,23	19.904	8,56	3.997	1,33	175	0,08	1.077	0,46	14.706	28,68	883	6,00	2.635	17,92	9.062	61,62	562	3,82	715	4,86	143	0,97	-	-	706	4,80		
6	Sumatera Selatan	151.193	136.130	1.493.070	185.107	12,40	18.378	9,93	38.684	20,90	93.454	50,49	3.720	2,01	27.359	14,78	663	0,36	137	0,07	2.712	1,47	11.012	8,09	944	8,57	2.660	24,16	4.622	41,97	675	6,13	1.788	16,24	78	0,71	14	0,13	231	2,10		
7	Bengkulu	39.498	30.252	362.987	139.320	38,38	10.088	7,24	26.559	19,06	72.797	52,25	7.057	5,07	19.752	14,18	2.431	1,74	262	0,19	374	0,27	10.499	34,71	910	8,67	1.521	14,49	5.843	55,65	563	5,36	1.353	12,89	81	0,77	-	-	228	2,17		
8	Lampung	163.851	129.669	1.600.679	412.765	25,79	22.362	5,42	75.564	18,31	222.752	53,97	32.827	7,95	51.372	12,45	3.923	0,95	1.012	0,25	2.953	0,72	25.349	19,55	2.879	11,36	4.739	18,70	11.019	43,47	2.630	10,38	1.915	7,55	168	0,66	23	0,09	1.976	7,80		
9	Kep. Bangka Belitung	28.141	19.197	263.568	145.480	55,20	4.897	3,37	30.555	21,00	83.256	57,23	6.615	4,55	13.640	9,25	5.644	3,88	448	0,31	605	0,42	2.519	13,12	28	1,11	540	21,44	1.587	63,00	45	1,79	161	6,39	138	5,48	1	0,04	19	0,75		
10	Kepulauan Riau	40.231	31.330	390.363	68.748	17,61	2.704	3,93	13.466	19,59	36.004	52,37	3.435	5,00	8.551	12,44	3.809	5,54	83	0,12	696	1,01	4.742	15,14	333	7,02	619	13,05	1.779	37,52	555	11,70	817	17,23	306	6,45	17	0,36	316	6,66		
11	DKI Jakarta	150.258	182.065	1.522.715	712.622	46,80	50.026	7,02	72.105	10,12	348.873	48,96	130.528	18,32	86.912	12,20	16.647	2,34	1.891	0,27	5.640	0,79	6.691	3,68	530	7,92	718	10,73	2.645	39,53	1.343	20,07	723	10,81	227	3,39	3	0,04	502	7,50		
12	Jawa Barat	733.111	680.526	8.580.526	4.209.088	49,95	138.676	3,29	802.244	19,06	2.331.143	55,38	437.839	10,40	348.608	8,28	123.736	2,94	10.792	0,26	16.050	0,38	121.050	16,51	5.634	4,65	18.240	15,07	66.114	54,62	14.351	11,86	10.287	8,50	1.758	1,45	52	0,04	4.614	3,81		
13	Jawa Tengah	491.018	388.233	6.273.980	1.055.752	16,83	50.814	4,81	106.555	10,09	579.938	54,93	93.609	8,87	169.672	16,07	41.045	3,89	4.954	0,47	9.185	0,87	46.600	12,26	3.870	8,30	3.168	6,80	18.667	40,06	6.887	14,70	10.384	22,28	1.225	2,63	31	0,07	2.368	5,08		
14	DI Yogyakarta	44.135	29.316	569.068	376.110	66,09	63.084	16,77	31.570	8,39	125.316	33,32	99.624	26,49	35.154	9,35	18.672	4,96	2.594	0,69	96	0,03	6.776	23,11	1.949	28,76	337	4,97	725	10,70	2.230	32,91	954	14,08	463	6,83	7	0,10	111	1,64		
15	Jawa Timur	561.137	473.129	6.935.265	4.333.909	62,49	110.621	2,55	587.955	13,57	2.464.297	56,86	431.210	9,95	519.455	11,99	171.644	3,96	12.448	0,29	36.279	0,84	85.476	18,07	4.255	4,98	6.511	7,62	49.200	57,56	8.662	10,13	7.556	8,84	3.004	3,51	44	0,05	6.244	7,30		
16	Banten	210.139	211.300	2.165.794	72.533	3,35	6.137	8,46	12.480	17,21	34.433	47,47	4.681	6,45	13.645	18,81	655	0,90	49	0,07	453	0,62	13.691	6,48	671	4,90	2.316	16,92	7.272	53,12	536	3,91	2.309	16,87	145	1,06	3	0,02	439	3,21		
17	Bali	53.970	52.100	679.043	95.539	14,07	10.552	11,04	11.315	11,84	39.733	41,59	21.704	22,72	4.190	4,39	4.812	5,04	1.019	1,07	2.214	2,32	4.572	8,78	962	21,04	252	5,51	1.163	25,44	721	15,77	264	5,77	335	7,33	1	0,02	874	19,12		
18	Nusa Tenggara Barat	98.018	79.085	996.390	261.309	26,23	5.053	1,93	32.686	12,51	158.826	60,78	25.668	9,82	26.164	10,01	2.294	0,88	311	0,12	10.307	3,94	8.387	10,61	34	0,41	51	0,61	3.141	37,45	772	9,20	1.098	13,09	241	2,87	8	0,10	3.042	36,27		
19	Nusa Tenggara Timur	125.269	79.182	788.337	149.893	19,01	799	0,53	10.875	7,26	55.755	37,20	18.024	12,02	46.861	31,26	16.274	10,86	307	0,20	998	0,67	4.307	5,44	78	1,81	589	13,68	2.476	57,49	150	3,48	551	12,79	283	6,57	1	0,02	179	4,16		
20	Kalimantan Barat	105.985	74.932	924.830	43.310	4,68	1.071	2,47	9.358	21,61	26.465	61,11	847	1,96	934	2,16	89	0,21	8	0,02	4.538	10,48	8.466	11,30	199	2,35	771	9,11	2.038	24,07	219	2,59	186	2,20	52	0,61	79	0,93	4.922	58,14		
21	Kalimantan Tengah	53.382	36.193	532.308	49.654	9,33	692	1,39	8.582	17,28	29.643	59,70	2.205	4,44	7.250	14,68	1.088	2,19	27	0,05	167	0,34	7.526	20,79	155	2,06	671	8,92	4.905	65,17	241	3,20	1.048	13,93	189	2,51	2	0,03	315	4,19		
22	Kalimantan Selatan	73.997	54.726	731.057	157.808	21,59	3.221	2,04	48.468	30,73	90.169	57,14	3.379	2,14	9.122	5,78	2.956	1,87	80	0,05	413	0,26	12.283	22,44	180	1,47	2.283	18,59	7.976	64,94	438	3,57	514	4,18	484	3,94	10	0,08	398	3,24		
23	Kalimantan Timur	67.098	59.785	655.939	154.135	23,50	5.453	2,54	24.615	15,97	94.003	60,99	11.287	7,32	13.036	8,46	4.142	2,69	116	0,08	1.483	0,96	4.390	7,34	245	5,58	395	9,00	1.723	39,25	725	16,51	571	13,01	294	6,70	1	0,02	436	9,93		
24	Kalimantan Utara	14.124	11.618	115.780	21.243	18,35	501	2,36	2.718	12,79	12.702	59,79	1.217	5,73	3.289	15,48	564	2,65	4	0,02	248	1,17	775	6,67	46	5,94	39	5,03	136	17,55	68	8,77	65	8,39	22	2,84	-	-	399	51,48		
25	Sulawesi Utara	42.967	34.335	392.171	159.209	40,60	3.967	2,49	34.502	21,67	89.854	56,44	7.501	4,71	20.766	13,04	2.174	1,37	340	0,21	105	0,07	4.991	14,54	221	4,43	808	16,19	2.186	43,80	307	6,15	1.167	23,38	135	2,70	11	0,22	156	3,13		
26	Sulawesi Tengah	56.928	45.190	498.813	74.609	14,96	657	0,88	19.447	26,07	33.901	45,44	3.865	5,18	12.198	16,35	4.221	5,66	151	0,20	169	0,23	8.145	18,02	164	2,01	2.096	25,73	2.926	35,92	520	6,38	1.504	18,47	615	7,55	50	0,61	270	3,31		
27	Sulawesi Selatan	164.672	128.041	1.410.521	309.436	21,94	18.661	6,03	132.361	42,77	113.177	36,58	10.995	3,55	27.875	9,01	4.065	1,31	877	0,28	1.425	0,46	18.241	14,25	400	2,19	2.055	11,27	8.190	44,90	1.945	10,66	4.392	24,08	423	2,32	17	0,09	819	4,49		
28	Sulawesi Tenggara	58.707	41.247	433.430	133.350	30,77	3.085	2,31	40.727	30,54	58.946	44,20	4.184	3,14	19.225	14,42	1.790</																									

Lampiran 5.14

**PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Komplikasi Kebidanan								Jumlah Komplikasi Pasca Persalinan (Nifas)
			Anemia	Risiko KEK/Kurang Energi Kronis (KEK)	Infeksi	Penyakit Jantung	Diabetes Melitus	Keguguran	Malaria	Tuberkulosis	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)
1	Aceh	116.530	2.142	1.941	109	90	182	1.869	15	60	910
2	Sumatera Utara	305.803	7.441	4.966	216	11	52	598	11	21	405
3	Sumatera Barat	104.778	7.419	7.525	22	24	198	1.545	-	24	217
4	Riau	123.437	7.006	4.401	178	8	209	788	10	14	851
5	Jambi	67.218	2.989	3.778	18	9	116	786	1	60	263
6	Sumatera Selatan	153.616	6.619	8.563	108	84	112	676	9	33	295
7	Bengkulu	39.776	1.309	2.251	13	2	26	151	-	-	28
8	Lampung	165.731	7.957	7.043	59	67	159	1.215	1	16	1.836
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.244	1.819	1.649	39	11	25	617	-	1	119
10	Kepulauan Riau	40.446	2.641	1.466	83	15	107	276	-	11	145
11	DKI Jakarta	150.961	2.578	1.979	387	156	1.211	2.921	202	172	297
12	Jawa Barat	813.959	53.969	50.887	2.205	442	1.526	10.818	13	367	3.021
13	Jawa Tengah	505.911	34.704	39.853	1.565	258	1.296	8.111	10	155	1.878
14	D I Yogyakarta	44.387	2.956	3.660	74	67	215	646	-	6	84
15	Jawa Timur	569.073	34.748	37.306	1.582	287	1.670	13.523	-	207	1.275
16	Banten	199.935	16.748	14.215	327	41	136	2.246	1	52	963
17	Bali	55.929	6.119	3.996	287	33	100	1.550	-	3	202
18	Nusa Tenggara Barat	100.167	8.016	10.783	3.976	41	90	3.895	1	25	535
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	13.210	12.738	321	109	120	1.573	44	69	262
20	Kalimantan Barat	106.600	7.365	6.171	267	18	345	1.314	12	26	538
21	Kalimantan Tengah	53.778	2.994	2.061	54	-	87	387	-	18	154
22	Kalimantan Selatan	74.421	8.507	6.694	56	25	473	2.365	5	19	596
23	Kalimantan Timur	68.839	8.124	4.692	132	42	447	2.147	6	27	349
24	Kalimantan Utara	14.210	1.342	882	61	7	59	417	-	4	90
25	Sulawesi Utara	43.357	936	1.445	32	1	51	294	4	10	44
26	Sulawesi Tengah	57.259	6.348	5.982	62	14	175	754	15	49	361
27	Sulawesi Selatan	166.445	7.488	8.890	56	14	119	3.202	8	29	722
28	Sulawesi Tenggara	59.033	4.918	4.637	48	5	24	526	-	2	280
29	Gorontalo	24.224	1.850	1.984	1	3	8	151	1	3	12
30	Sulawesi Barat	32.453	2.300	3.972	7	7	50	918	25	32	156
31	Maluku	42.230	2.578	4.153	759	10	79	244	9	4	135
32	Maluku Utara	26.157	1.126	1.996	3	-	3	42	-	-	5
33	Papua	21.600	2.946	1.802	44	12	4	188	401	21	17
34	Papua Barat	12.565	963	549	114	-	8	81	28	8	109
35	Papua Selatan	11.843	3.214	2.880	46	2	10	191	192	9	168
36	Papua Tengah	30.870	2.291	1.013	30	7	241	427	1.101	25	8
37	Papua Pegunungan	32.521	698	842	1	-	5	97	51	8	4
38	Papua Barat Daya	14.146	1.808	1.214	-	-	-	4	5	-	2
Indonesia		4.605.271	288186	280859	13342	1922	9738	67553	2181	1590	17336

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.15

PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Komplikasi pada Neonatal					
		BBLR		Asfiksia		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	457	3,38	1145	1,84	1602	2,57
2	Sumatera Utara	354	1,48	1634	0,63	1988	0,77
3	Sumatera Barat	2544	5,15	305	0,64	2849	6,00
4	Riau	371	2,71	218	0,24	589	0,65
5	Jambi	230	3,37	347	0,77	577	1,27
6	Sumatera Selatan	1067	2,35	428	0,32	1495	1,10
7	Bengkulu	591	5,63	93	0,44	684	3,25
8	Lampung	1343	2,93	657	0,53	2000	1,61
9	Kepulauan Bangka Belitung	691	5,86	239	1,28	930	4,97
10	Kepulauan Riau	924	4,84	81	0,26	1005	3,20
11	DKI Jakarta	17	5,38	128	0,05	145	0,06
12	Jawa Barat	12383	4,86	10979	1,40	23362	2,97
13	Jawa Tengah	8791	6,00	5086	1,40	13877	3,83
14	D I Yogyakarta	385	6,50	325	1,10	710	2,40
15	Jawa Timur	9459	5,97	12100	2,57	21559	4,59
16	Banten	2224	2,81	3332	1,54	5556	2,57
17	Bali	1434	5,28	929	1,77	2363	4,50
18	Nusa Tenggara Barat	1988	4,85	918	1,19	2906	3,75
19	Nusa Tenggara Timur	1507	7,18	905	1,10	2412	2,92
20	Kalimantan Barat	1622	6,57	429	0,41	2051	1,97
21	Kalimantan Tengah	291	5,66	545	0,61	836	0,93
22	Kalimantan Selatan	2851	7,47	429	0,75	3280	5,72
23	Kalimantan Timur	1086	6,07	621	1,06	1707	2,91
24	Kalimantan Utara	244	7,50	74	0,64	318	2,73
25	Sulawesi Utara	267	5,39	358	1,19	625	2,07
26	Sulawesi Tengah	1299	7,55	363	0,79	1662	3,64
27	Sulawesi Selatan	2543	6,08	1201	0,94	3744	2,93
28	Sulawesi Tenggara	616	4,17	432	1,04	1048	2,52
29	Gorontalo	629	6,09	23	0,29	652	8,13
30	Sulawesi Barat	1901	9,11	88	0,42	1989	9,47
31	Maluku	227	3,10	122	0,35	349	0,99
32	Maluku Utara	352	4,86	16	0,90	368	20,72
33	Papua	83	3,39	167	1,01	250	1,51
34	Papua Barat	157	12,27	13	0,37	170	4,89
35	Papua Selatan	130	5,39	50	0,45	180	1,63
36	Papua Tengah	23	1,22	163	1,93	186	2,20
37	Papua Pegunungan	48	9,45	168	8,92	216	11,47
38	Papua Barat Daya	123	18,25	5	0,45	128	11,56
Indonesia		61.252	5,12	45.116	1,17	106.368	2,77

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.16

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Neonatal (0-28 hari)	Bayi	Anak Balita	Balita
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	889	1.017	53	1.070
2	Sumatera Utara	850	925	23	948
3	Sumatera Barat	615	783	57	840
4	Riau	706	808	40	848
5	Jambi	345	379	8	387
6	Sumatera Selatan	713	800	31	831
7	Bengkulu	210	234	6	240
8	Lampung	667	720	9	729
9	Kepulauan Bangka Belitung	141	183	10	193
10	Kepulauan Riau	266	312	15	327
11	DKI Jakarta	770	925	72	997
12	Jawa Barat	4.403	5.036	264	5.300
13	Jawa Tengah	2.842	3.649	466	4.115
14	D I Yogyakarta	224	261	11	272
15	Jawa Timur	3.159	3.695	227	3.922
16	Banten	1.028	1.161	59	1.220
17	Bali	417	573	72	645
18	Nusa Tenggara Barat	620	718	20	738
19	Nusa Tenggara Timur	860	986	34	1.020
20	Kalimantan Barat	738	876	42	918
21	Kalimantan Tengah	380	435	13	448
22	Kalimantan Selatan	539	624	33	657
23	Kalimantan Timur	471	614	68	682
24	Kalimantan Utara	127	146	17	163
25	Sulawesi Utara	362	431	31	462
26	Sulawesi Tengah	532	585	10	595
27	Sulawesi Selatan	1.137	1.318	68	1.386
28	Sulawesi Tenggara	482	566	36	602
29	Gorontalo	179	209	6	215
30	Sulawesi Barat	290	343	21	364
31	Maluku	202	242	19	261
32	Maluku Utara	238	301	23	324
33	Papua	221	250	8	258
34	Papua Barat	152	179	7	186
35	Papua Selatan	143	237	43	280
36	Papua Tengah	158	199	29	228
37	Papua Pegunungan	90	120	15	135
38	Papua Barat Daya	109	119	1	120
39	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	41	50	1	51
40	Luar Negeri	98	121	11	132
Indonesia		26.414	31.130	1.979	33.109

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Keterangan : *= kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

Lampiran 5.17

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)											Penyebab Kematian Bayi (0 Hari-11 Bulan)											Penyebab Kematian Balita (0-59 Bulan)														
		N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of Intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	N11: Neonatal death of unspecified cause	Lainnya	N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of Intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	N11: Neonatal death of unspecified cause	P1 - P20	N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of Intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	N11: Neonatal death of unspecified cause	P1 - P20	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(51)
1	Aceh	41	8	4	38	10	49	521	11	185	1	21	0	41	8	4	38	10	49	521	11	185	1	21	128	41	8	4	38	10	49	521	11	185	1	21	178	0
2	Sumatera Utara	66	7	13	36	14	52	434	11	183		34	0	66	7	13	36	14	52	434	11	183		34	75	66	7	13	36	14	52	434	11	183		34	97	0
3	Sumatera Barat	49	5	5	30	3	41	325	14	111	1	31	0	49	5	5	30	3	41	325	14	111	1	31	168	49	5	5	30	3	41	325	14	111	1	31	221	0
4	Riau	55	3	2	52	6	87	336	9	143		13	0	55	3	2	52	6	87	336	9	143		13	102	55	3	2	52	6	87	336	9	143		13	141	0
5	Jambi	18	1	3	17	2	27	179	5	84		9	0	18	1	3	17	2	27	179	5	84		9	34	18	1	3	17	2	27	179	5	84		9	42	0
6	Sumatera Selatan	43	10	1	24	7	64	338	9	177	1	38	1	43	10	1	24	7	64	338	9	177	1	38	87	43	10	1	24	7	64	338	9	177	1	38	117	1
7	Bengkulu	21	1	5	8	2	43	70	3	46	2	9	0	21	1	5	8	2	43	70	3	46	2	9	24	21	1	5	8	2	43	70	3	46	2	9	30	0
8	Lampung	95	3	9	60	2	35	306	10	122		25	0	95	3	9	60	2	35	306	10	122		25	53	95	3	9	60	2	35	306	10	122		25	60	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	9	2		5		6	47	8	62		2	0	9	2		5		6	47	8	62		2	42	9	2		5		6	47	8	62		2	52	0
10	Kepulauan Riau	26	2		6	4	27	107	2	86		6	0	26	2		6	4	27	107	2	86		6	46	26	2		6	4	27	107	2	86		6	61	0
11	DKI Jakarta	91	1	2	24	6	143	251	31	189	2	30	0	91	1	2	24	6	143	251	31	189	2	30	155	91	1	2	24	6	143	251	31	189	2	30	225	0
12	Jawa Barat	346	24	12	307	26	590	1897	79	992	12	117	1	346	24	12	307	26	590	1897	79	992	12	117	633	346	24	12	307	26	590	1897	79	992	12	117	895	1
13	Jawa Tengah	343	23	7	207	26	403	885	60	822	2	64	0	343	23	7	207	26	403	885	60	822	2	64	807	343	23	7	207	26	403	885	60	822	2	64	1255	0
14	DI Yogyakarta	38	2	2	10	2	42	55	8	56		9	0	38	2	2	10	2	42	55	8	56		9	37	38	2	2	10	2	42	55	8	56		9	46	0
15	Jawa Timur	262	19	7	157	30	438	1331	60	789		66	0	262	19	7	157	30	438	1331	60	789		66	536	262	19	7	157	30	438	1331	60	789		66	759	1
16	Banten	140	7	2	68	12	142	380	24	220	2	30	1	140	7	2	68	12	142	380	24	220	2	30	134	140	7	2	68	12	142	380	24	220	2	30	193	0
17	Bali	61	2	2	20	3	68	112	11	118		19	1	61	2	2	20	3	68	112	11	118		19	156	61	2	2	20	3	68	112	11	118		19	227	1
18	Nusa Tenggara Barat	57	4	2	66	11	86	202	13	172	1	5	1	57	4	2	66	11	86	202	13	172	1	5	98	57	4	2	66	11	86	202	13	172	1	5	117	1
19	Nusa Tenggara Timur	63	9		57	9	131	343	19	180	4	45	0	63	9		57	9	131	343	19	180	4	45	126	63	9		57	9	131	343	19	180	4	45	156	0
20	Kalimantan Barat	64	2	7	40	3	57	310	17	215	1	22	0	64	2	7	40	3	57	310	17	215	1	22	138	64	2	7	40	3	57	310	17	215	1	22	177	0
21	Kalimantan Tengah	29	3	4	24	6	51	145	10	100		8	0	29	3	4	24	6	51	145	10	100		8	55	29	3	4	24	6	51	145	10	100		8	68	0
22	Kalimantan Selatan	37	3	3	40	2	48	179	12	204		11	0	37	3	3	40	2	48	179	12	204		11	85	37	3	3	40	2	48	179	12	204		11	115	0
23	Kalimantan Timur	37	4	2	37	6	42	219	5	98	1	20	0	37	4	2	37	6	42	219	5	98	1	20	143	37	4	2	37	6	42	219	5	98	1	20	203	0
24	Kalimantan Utara	4			7	1	10	57	4	41		3	0	4			7	1	10	57	4	41		3	19	4			7	1	10	57	4	41		3	35	0
25	Sulawesi Utara	27	2		10	2	73	86	5	140		17	0	27	2		10	2	73	86	5	140		17	69	27	2		10	2	73	86	5	140		17	99	0
26	Sulawesi Tengah	30	5	7	31	7	54	225	5	154		14	0	30	5	7	31	7	54	225	5	154		14	53	30	5	7	31	7	54	225	5	154		14	62	0
27	Sulawesi Selatan	78	12	6	102	18	177	388	19	300		37	0	78	12	6	102	18	177	388	19	300		37	181	78	12	6	102	18	177	388	19	300		37	247	0
28	Sulawesi Tenggara	37	9	4	38	5	26	188	13	139	1	22	0	37	9	4	38	5	26	188	13	139	1	22	84	37	9	4	38	5	26	188	13	139	1	22	117	0
29	Gorontalo	11	2		10	1	24	69	3	46	1	12	0	11	2		10	1	24	69	3	46	1	12	30	11	2		10	1	24	69	3	46	1	12	34	0
30	Sulawesi Barat	12	4	4	20	3	17	116	5	91	3	15	0	12	4	4	20	3	17	116	5	91	3	15	53	12	4	4	20	3	17	116	5	91	3	15	74	0
31	Maluku	13	2	10	18	4	24	61	10	48	1	10	1	13	2	10	18	4	24	61	10	48	1	10	40	13	2	10	18	4	24	61	10	48	1	10	53	1
32	Maluku Utara	13	3	6	10	2	18	115	3	58	1	9	0	13	3	6	10	2	18	115	3	58	1	9	63	13	3	6	10	2	18	115	3	58	1	9	86	0
33	Papua	16		1	10	2	25	115	2	38	1	11	0	16		1	10	2	25	115	2	38	1	11	29	16		1	10	2	25	115	2	38	1	11	35	0
34	Papua Barat	5			28		25	49	2	36	1	6	0	5			28		25	49	2	36	1	6	27	5			28		25	49	2	36	1	6	33	0
35	Papua Selatan	5	2	2	6	1	23	58	4	32		10	0	5	2	2	6	1	23	58	4	32		10	94	5	2	2	6	1	23	58	4	32		10	136	0
36	Papua Tengah	1	3	4	12		30	52	3	39	1	13	0	1	3	4	12		30	52	3	39	1	13	41	1	3	4	12		30	52	3	39	1	13	66	0
37	Papua Pegunungan	2	4	6	2	1	11	27	1	26		10	0	2	4	6	2	1	11	27	1	26		10	30	2	4	6	2	1	11	27	1	26		10	43	0
38	Papua Barat Daya	8	1		5	1	7	50	2	31		4	0	8	1		5	1	7	50</																		

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.18

**BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025**

No	Provinsi	BBLR		Prematur	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	457	3,38	1.789	13,22
2	Sumatera Utara	354	1,48	3.054	12,74
3	Sumatera Barat	2.544	5,15	2.864	5,79
4	Riau	371	2,71	1.567	11,44
5	Jambi	230	3,37	555	8,13
6	Sumatera Selatan	1.067	2,35	1.969	4,33
7	Bengkulu	591	5,63	547	5,21
8	Lampung	1.343	2,93	3.671	8,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	691	5,86	964	8,17
10	Kepulauan Riau	924	4,84	1.239	6,49
11	DKI Jakarta	17	5,38	29	9,18
12	Jawa Barat	12.383	4,86	25.302	9,93
13	Jawa Tengah	8.791	6,00	10.187	6,96
14	D I Yogyakarta	385	6,50	563	9,51
15	Jawa Timur	9.459	5,97	16.092	10,15
16	Banten	2.224	2,81	4.771	6,03
17	Bali	1.434	5,28	1.364	5,03
18	Nusa Tenggara Barat	1.988	4,85	3.098	7,56
19	Nusa Tenggara Timur	1.507	7,18	2.418	11,53
20	Kalimantan Barat	1.622	6,57	1.334	5,41
21	Kalimantan Tengah	291	5,66	366	7,12
22	Kalimantan Selatan	2.851	7,47	2.500	6,55
23	Kalimantan Timur	1.086	6,07	1.098	6,14
24	Kalimantan Utara	244	7,50	199	6,11
25	Sulawesi Utara	267	5,39	582	11,76
26	Sulawesi Tengah	1.299	7,55	2.175	12,64
27	Sulawesi Selatan	2.543	6,08	3.427	8,20
28	Sulawesi Tenggara	616	4,17	1.620	10,96
29	Gorontalo	629	6,09	873	8,46
30	Sulawesi Barat	1.901	9,11	2.104	10,09
31	Maluku	227	3,10	1.435	19,60
32	Maluku Utara	352	4,86	1.366	18,85
33	Papua	130	3,39	711	29,04
34	Papua Barat	83	12,27	217	16,95
35	Papua Selatan	157	5,39	512	21,24
36	Papua Tengah	123	1,22	440	23,28
37	Papua Pegunungan	23	9,45	152	29,92
38	Papua Barat Daya	48	18,25	165	24,48
Indonesia		61.252	5,12	103.319	8,63

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.19

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)		Bayi Baru Lahir yang Dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	78.740	70,74	47.033	42,26
2	Sumatera Utara	239.665	81,86	111.435	38,06
3	Sumatera Barat	72.555	57,90	66.806	53,31
4	Riau	104.141	88,49	53.765	45,69
5	Jambi	50.911	79,55	29.719	46,44
6	Sumatera Selatan	129.896	90,29	89.654	62,32
7	Bengkulu	29.460	78,76	16.002	42,78
8	Lampung	129.137	82,99	83.656	53,76
9	Kepulauan Bangka Belitung	18.829	70,60	17.158	64,34
10	Kepulauan Riau	30.911	80,48	26.681	69,47
11	DKI Jakarta	222.272	154,33	127.015	88,19
12	Jawa Barat	731.377	93,92	522.646	67,11
13	Jawa Tengah	397.115	84,30	374.784	79,56
14	D I Yogyakarta	27.962	68,63	29.444	72,27
15	Jawa Timur	474.129	87,83	437.749	81,09
16	Banten	209.171	102,81	103.548	50,89
17	Bali	51.653	99,31	51.069	98,18
18	Nusa Tenggara Barat	74.505	80,72	57.914	62,74
19	Nusa Tenggara Timur	83.263	69,12	49.575	41,15
20	Kalimantan Barat	76.530	75,50	58.148	57,37
21	Kalimantan Tengah	35.169	68,32	29.688	57,67
22	Kalimantan Selatan	54.526	78,33	47.595	68,37
23	Kalimantan Timur	57.060	88,87	58.148	90,56
24	Kalimantan Utara	11.408	83,89	9.798	72,05
25	Sulawesi Utara	40.153	98,17	21.606	52,83
26	Sulawesi Tengah	44.353	81,29	39.214	71,87
27	Sulawesi Selatan	126.769	81,01	116.570	74,49
28	Sulawesi Tenggara	41.214	73,61	45.984	82,13
29	Gorontalo	13.654	59,90	6.623	29,05
30	Sulawesi Barat	18.763	61,88	19.224	63,40
31	Maluku	23.209	58,32	4.608	11,58
32	Maluku Utara	17.693	70,55	10.924	43,56
33	Papua	15.543	75,93	7.932	38,75
34	Papua Barat	4.792	39,23	5.997	49,10
35	Papua Selatan	7.290	63,20	2.048	17,75
36	Papua Tengah	4.026	13,56	6.895	23,22
37	Papua Pegunungan	2.369	7,76	-	-
38	Papua Barat Daya	13.982	102,58	6.024	44,20
Indonesia		3.764.195	85,55	2.792.679	63,47

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.33

PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir (0-28 hari)			Bayi Usia 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif Sampai 6 Bulan	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	22.774	19.675	86,39	38.297	3.944	10,30
2	Sumatera Utara	37.691	35.600	94,45	78.777	17.561	22,29
3	Sumatera Barat	49.329	44.291	89,79	60.344	30.191	50,03
4	Riau	21.549	20.483	95,05	47.052	12.114	25,75
5	Jambi	10.231	10.159	99,30	23.868	8.041	33,69
6	Sumatera Selatan	48.740	47.942	98,36	67.380	45.118	66,96
7	Bengkulu	11.366	10.398	91,48	15.624	7.303	46,74
8	Lampung	48.576	46.360	95,44	65.038	33.711	51,83
9	Kep. Bangka Belitung	13.358	12.345	92,42	16.086	6.799	42,27
10	Kepulauan Riau	17.986	15.958	88,72	20.358	9.725	47,77
11	DKI Jakarta	3.692	3.608	97,72	21.598	14.960	69,27
12	Jawa Barat	290.424	276.467	95,19	416.955	221.542	53,13
13	Jawa Tengah	187.584	179.618	95,75	301.065	154.905	51,45
14	DI Yogyakarta	10.776	10.764	99,89	22.784	15.157	66,52
15	Jawa Timur	229.959	214.751	93,39	338.753	207.574	61,28
16	Banten	87.918	85.094	96,79	109.009	79.264	72,71
17	Bali	25.034	19.846	79,28	28.076	16.787	59,79
18	Nusa Tenggara Barat	38.244	35.111	91,81	65.205	32.158	49,32
19	Nusa Tenggara Timur	32.941	32.205	97,77	69.878	22.177	31,74
20	Kalimantan Barat	29.105	27.205	93,47	55.178	15.263	27,66
21	Kalimantan Tengah	7.480	7.203	96,30	22.322	5.236	23,46
22	Kalimantan Selatan	37.019	33.650	90,90	46.091	18.679	40,53
23	Kalimantan Timur	20.014	18.866	94,26	38.641	11.899	30,79
24	Kalimantan Utara	4.000	3.624	90,60	7.416	2.648	35,71
25	Sulawesi Utara	5.880	5.146	87,52	17.268	2.553	14,78
26	Sulawesi Tengah	19.200	17.726	92,32	33.269	10.767	32,36
27	Sulawesi Selatan	52.696	50.016	94,91	79.485	35.226	44,32
28	Sulawesi Tenggara	17.850	17.062	95,59	31.984	8.175	25,56
29	Gorontalo	10.028	9.410	93,84	14.867	3.876	26,07
30	Sulawesi Barat	20.595	18.202	88,38	20.261	8.688	42,88
31	Maluku	7.461	6.824	91,46	18.893	4.340	22,97
32	Maluku Utara	7.493	7.283	97,20	16.788	4.213	25,10
33	Papua	4.815	4.553	94,56	13.028	1.246	9,56
34	Papua Barat	1.861	1.566	84,15	5.446	775	14,23
35	Papua Selatan	5.595	4.750	84,90	11.368	1.325	11,66
36	Papua Tengah	2.185	2.032	93,00	7.076	1.344	18,99
37	Papua Pegunungan	743	650	87,48	2.482	679	27,36
38	Papua Barat Daya	1.825	1.552	85,04	5.688	791	13,91
Indonesia		1.444.017	1.357.995	94,04	2.253.698	1.076.754	47,78

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.21
**CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi di Imunisasi HB0		Bayi di Imunisasi BCG	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	104.564	65.600	62,74	46.558	44,53
2	Sumatera Utara	292.775	216.039	73,79	234.261	80,01
3	Sumatera Barat	108.407	70.570	65,10	60.219	55,55
4	Riau	117.681	101.713	86,43	94.342	80,17
5	Jambi	65.480	62.897	96,06	56.010	85,54
6	Sumatera Selatan	145.712	129.805	89,08	132.657	91,04
7	Bengkulu	37.405	26.387	70,54	26.941	72,03
8	Lampung	160.103	119.600	74,70	122.254	76,36
9	Kep. Bangka Belitung	26.669	18.958	71,09	18.606	69,77
10	Kepulauan Riau	38.407	28.592	74,44	31.988	83,29
11	DKI Jakarta	144.022	161.772	112,32	163.314	113,40
12	Jawa Barat	787.736	724.112	91,92	712.222	90,41
13	Jawa Tengah	568.168	387.657	68,23	406.060	71,47
14	D I Yogyakarta	47.172	33.740	71,53	32.377	68,64
15	Jawa Timur	581.652	475.026	81,67	466.339	80,17
16	Banten	191.376	231.476	120,95	228.294	119,29
17	Bali	65.107	79.265	121,75	67.323	103,40
18	Nusa Tenggara Barat	104.318	75.985	72,84	76.306	73,15
19	Nusa Tenggara Timur	121.278	88.726	73,16	89.244	73,59
20	Kalimantan Barat	101.362	68.247	67,33	67.833	66,92
21	Kalimantan Tengah	51.476	36.093	70,12	36.364	70,64
22	Kalimantan Selatan	72.868	57.829	79,36	52.306	71,78
23	Kalimantan Timur	75.998	56.992	74,99	53.558	70,47
24	Kalimantan Utara	13.598	11.086	81,53	10.263	75,47
25	Sulawesi Utara	40.900	28.052	68,59	31.298	76,52
26	Sulawesi Tengah	54.563	44.099	80,82	41.514	76,08
27	Sulawesi Selatan	166.671	125.893	75,53	131.920	79,15
28	Sulawesi Tenggara	55.989	36.091	64,46	41.729	74,53
29	Gorontalo	22.795	16.947	74,35	17.762	77,92
30	Sulawesi Barat	30.991	21.785	70,29	17.552	56,64
31	Maluku	39.793	22.923	57,61	25.567	64,25
32	Maluku Utara	25.079	17.647	70,37	18.130	72,29
33	Papua	20.470	11.166	54,55	15.558	76,00
34	Papua Barat	12.214	9.290	76,06	9.802	80,25
35	Papua Selatan	11.535	8.854	76,76	11.995	103,99
36	Papua Tengah	29.690	8.017	27,00	8.807	29,66
37	Papua Pegunungan	30.538	3.159	10,34	4.674	15,31
38	Papua Barat Daya	13.630	8.449	61,99	8.049	59,05
Indonesia		4.578.192	3.690.539	80,61	3.669.996	80,16

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.22

CAKUPAN IMUNISASI PADA BAYI (SURVIVING INFANT) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Bayi (Surviving Infant)	Bayi Diimunisasi																	
			DPT-HB-Hib1		PCV 1		bOPV1		Rotavirus 1		IPV 1		DPT-HB-Hib 3		Polio 4		MR 1		JE*	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	102.243	40.803	39,91	19.429	19,00	53.391	52,22	22.489	22,00	30.859	30,18	34.248	33,50	40.420	39,53	40.084	39,20	-	-
2	Sumatera Utara	287.086	232.051	80,83	172.642	60,14	223.370	77,81	168.488	58,69	215.998	75,24	227.646	79,30	227.322	79,18	242.361	84,42	-	-
3	Sumatera Barat	106.423	55.171	51,84	34.392	32,32	60.257	56,62	33.717	31,68	41.247	38,76	46.534	43,73	49.036	46,08	50.797	47,73	-	-
4	Riau	115.739	93.395	80,69	71.410	61,70	100.149	86,53	65.067	56,22	80.088	69,20	85.569	73,93	84.036	72,61	93.745	81,00	-	-
5	Jambi	64.397	55.687	86,47	43.603	67,71	55.774	86,61	41.881	65,04	52.570	81,63	54.409	84,49	54.500	84,63	56.397	87,58	-	-
6	Sumatera Selatan	143.216	132.932	92,82	96.842	67,62	131.571	91,87	91.826	64,12	129.822	90,65	132.890	92,79	132.823	92,74	152.078	106,19	-	-
7	Bengkulu	36.682	26.114	71,19	16.555	45,13	26.812	73,09	15.607	42,55	23.652	64,48	24.237	66,07	23.954	65,30	27.985	76,29	-	-
8	Lampung	157.603	124.675	79,11	78.924	50,08	120.022	76,15	71.277	45,23	117.812	74,75	120.274	76,31	120.530	76,48	128.116	81,29	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	26.219	17.150	65,41	12.731	48,56	18.039	68,80	11.138	42,48	16.444	62,72	16.490	62,89	16.525	63,03	18.075	68,94	-	-
10	Kepulauan Riau	37.961	30.426	80,15	26.814	70,64	34.175	90,03	28.263	74,45	26.693	70,32	27.253	71,79	27.093	71,37	28.586	75,30	-	-
11	DKI Jakarta	142.518	158.813	111,43	147.853	103,74	164.527	115,44	152.212	106,80	151.652	106,41	155.157	108,87	153.251	107,53	158.466	111,19	-	-
12	Jawa Barat	776.995	720.389	92,71	455.154	58,58	714.291	91,93	487.283	62,71	696.562	89,65	707.029	91,00	697.700	89,79	725.537	93,38	-	-
13	Jawa Tengah	560.567	402.792	71,85	359.191	64,08	401.808	71,68	379.470	67,69	392.563	70,03	396.365	70,71	394.531	70,38	435.211	77,64	-	-
14	D I Yogyakarta	46.639	42.788	91,74	26.897	57,67	0	0,00	29.583	63,43	43.040	92,28	42.445	91,01	0	0,00	43.236	92,70	28.339	60,76
15	Jawa Timur	573.225	467.130	81,49	328.900	57,38	459.764	80,21	354.262	61,80	452.602	78,96	464.223	80,98	457.575	79,82	482.854	84,23	-	-
16	Banten	188.699	220.407	116,80	199.202	105,57	220.892	117,06	208.835	110,67	212.588	112,66	218.053	115,56	216.793	114,89	228.128	120,90	-	-
17	Bali	64.242	54.450	84,76	59.892	93,23	76.554	119,17	63.190	98,36	51.037	79,44	51.458	80,10	52.077	81,06	60.537	94,23	50.066	77,93
18	Nusa Tenggara Barat	101.710	68.451	67,30	61.017	59,99	73.408	72,17	63.247	62,18	72.061	70,85	72.302	71,09	72.886	71,66	78.099	76,79	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	118.137	87.414	73,99	78.199	66,19	89.836	76,04	68.875	58,30	77.420	65,53	88.141	74,61	78.232	66,22	81.119	68,67	-	-
20	Kalimantan Barat	99.644	68.772	69,02	40.448	40,59	70.672	70,92	35.361	35,49	54.915	55,11	63.133	63,36	58.907	59,12	61.134	61,35	40.189	40,33
21	Kalimantan Tengah	50.554	35.898	71,01	19.601	38,77	37.221	73,63	18.316	36,23	29.833	59,01	32.902	65,08	32.170	63,63	34.261	67,77	-	-
22	Kalimantan Selatan	71.552	49.828	69,64	34.575	48,32	53.508	74,78	33.457	46,76	45.574	63,69	47.894	66,94	47.814	66,82	53.185	74,33	-	-
23	Kalimantan Timur	74.855	51.715	69,09	33.490	44,74	56.550	75,55	32.397	43,28	45.971	61,41	48.432	64,70	47.459	63,40	51.448	68,73	-	-
24	Kalimantan Utara	13.376	10.183	76,13	7.070	52,86	10.327	77,20	6.470	48,37	8.274	61,86	9.119	68,17	8.661	64,75	9.101	68,04	-	-
25	Sulawesi Utara	40.222	32.277	80,25	18.176	45,19	32.172	79,99	16.440	40,87	28.286	70,32	31.346	77,93	28.970	72,03	30.864	76,73	-	-
26	Sulawesi Tengah	53.126	43.486	81,85	28.404	53,47	41.224	77,60	27.068	50,95	39.831	74,97	41.923	78,91	40.887	76,96	44.427	83,63	-	-
27	Sulawesi Selatan	163.846	130.481	79,64	98.595	60,18	128.509	78,43	91.792	56,02	123.136	75,15	127.642	77,90	125.515	76,61	138.096	84,28	-	-
28	Sulawesi Tenggara	54.756	40.984	74,85	28.843	52,68	40.756	74,43	26.472	48,35	35.556	64,94	39.100	71,41	38.696	70,67	40.880	74,66	-	-
29	Gorontalo	22.135	17.529	79,19	11.656	52,66	17.570	79,38	11.401	51,51	15.406	69,60	15.797	71,37	15.702	70,94	17.865	80,71	-	-
30	Sulawesi Barat	30.086	17.070	56,74	9.069	30,14	17.704	58,85	8.801	29,25	14.099	46,86	15.018	49,92	15.209	50,55	16.252	54,02	-	-
31	Maluku	38.638	27.148	70,26	13.005	33,66	25.119	65,01	11.089	28,70	22.779	58,95	25.683	66,47	24.479	63,35	26.675	69,04	-	-
32	Maluku Utara	24.346	18.020	74,02	10.518	43,20	17.886	73,46	10.262	42,15	14.821	60,88	15.560	63,91	15.498	63,66	16.012	65,77	-	-
33	Papua	19.890	14.901	74,92	7.948	39,96	15.820	79,54	6.579	33,08	13.099	65,86	13.810	69,43	13.781	69,29	13.627	68,51	-	-
34	Papua Barat	11.797	9.473	80,30	3.855	32,68	10.115	85,75	3.640	30,86	9.535	80,83	9.806	83,12	9.848	83,48	9.231	78,25	-	-
35	Papua Selatan	11.105	11.721	105,55	4.872	43,87	12.096	108,92	7.243	65,22	8.915	80,28	9.880	88,97	9.264	83,42	8.146	73,35	-	-
36	Papua Tengah	28.574	8.032	28,11	4.591	16,07	8.668	30,34	5.021	17,57	6.740	23,59	6.954	24,34	6.425	22,49	7.246	25,36	-	-
37	Papua Pegunungan	29.230	4.155	14,21	618	2,11	5.113	17,49	537	1,84	2.154	7,37	2.929	10,02	2.881	9,86	2.516	8,61	-	-
38	Papua Barat Daya	13.160	8.104	61,58	5.983	45,46	8.106	61,59	3.658	27,80	6.213	47,21	7.010	53,27	6.933	52,68	7.142	54,27	-	-
Indonesia		4.501.193	3.629.214	80,63	2.670.964	59,34	3.631.912	80,69	2.712.714	60,27	3.407.459	75,70	3.526.839	78,35	3.459.451	76,86	3.718.064	82,60	118.594	2,63

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

*) Imunisasi JE hanya dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat

Lampiran 5.23

CAKUPAN IMUNISASI BAYI LENGKAP DAN IMUNISASI 14 ANTIGEN MENCAPAI TARGET
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Imunisasi Bayi Lengkap			Imunisasi 14 Antigen Mencapai Target
		Jumlah Bayi (<i>Surviving Infant</i>)	Jumlah	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	102.243	34.419	33,66	41,70
2	Sumatera Utara	287.086	234.204	81,58	79,00
3	Sumatera Barat	106.423	46.387	43,59	52,40
4	Riau	115.739	91.027	78,65	78,00
5	Jambi	64.397	56.693	88,04	86
6	Sumatera Selatan	143.216	142.483	99,49	91,80
7	Bengkulu	36.682	27.158	74,04	71,20
8	Lampung	157.603	128.058	81,25	75,50
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.219	18.103	69,05	69,50
10	Kepulauan Riau	37.961	28.693	75,59	79,10
11	DKI Jakarta	142.518	144.550	101,43	108,60
12	Jawa Barat	776.995	717.461	92,34	91,20
13	Jawa Tengah	560.567	424.276	75,69	74,40
14	DI Yogyakarta	46.639	42.235	90,56	87,00
15	Jawa Timur	573.225	485.849	84,76	82,10
16	Banten	188.699	216.878	114,93	115,40
17	Bali	64.242	56.660	88,20	99,80
18	Nusa Tenggara Barat	101.710	77.261	75,96	73,30
19	Nusa Tenggara Timur	118.137	74.608	63,15	72,20
20	Kalimantan Barat	99.644	55.700	55,90	61,70
21	Kalimantan Tengah	50.554	33.040	65,36	69,40
22	Kalimantan Selatan	71.552	53.323	74,52	71,20
23	Kalimantan Timur	74.855	48.302	64,53	69,50
24	Kalimantan Utara	13.376	8.644	64,62	74,80
25	Sulawesi Utara	40.222	29.713	73,87	72,50
26	Sulawesi Tengah	53.126	43.301	81,51	77,00
27	Sulawesi Selatan	163.846	136.595	83,37	78,70
28	Sulawesi Tenggara	54.756	39.444	72,04	71,50
29	Gorontalo	22.135	19.550	88,32	78,00
30	Sulawesi Barat	30.086	15.308	50,88	55,70
31	Maluku	38.638	25.213	65,25	61,00
32	Maluku Utara	24.346	15.295	62,82	69,00
33	Papua	19.890	11.886	59,76	75,90
34	Papua Barat	11.797	8.797	74,57	70,60
35	Papua Selatan	11.105	5.548	49,96	81,80
36	Papua Tengah	28.574	5.674	19,86	26,90
37	Papua Pegunungan	29.230	1.315	4,50	11,60
38	Papua Barat Daya	13.160	5.894	44,79	53,70
Indonesia		4.501.193	3.608.047	80,16	77,60

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.24

**CAKUPAN IMUNISASI ANTIGEN BARU
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Bayi (Surviving Infant)	Bayi Diimunisasi					
			PCV 2		Rotavirus 3		Imunisasi Antigen Baru	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	102.243	26.546	25,96	25057	24,51	26.546	25,96
2	Sumatera Utara	287.086	218.471	76,10	204954	71,39	218.471	76,10
3	Sumatera Barat	106.423	35.939	33,77	27389	25,74	35.939	33,77
4	Riau	115.739	79.489	68,68	58.315	50,38	79.489	68,68
5	Jambi	64.397	50.016	77,67	44194	68,63	50.016	77,67
6	Sumatera Selatan	143.216	116.998	81,69	109359	76,36	116.998	81,69
7	Bengkulu	36.682	21.769	59,35	18345	50,01	21.769	59,35
8	Lampung	157.603	106.932	67,85	80111	50,83	106.932	67,85
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.219	16.394	62,53	12429	47,40	16.394	62,53
10	Kepulauan Riau	37.961	25.565	67,35	25823	68,03	25.823	68,03
11	DKI Jakarta	142.518	159.465	111,89	153016	107,37	159.465	111,89
12	Jawa Barat	776.995	637.445	82,04	601414	77,40	637.445	82,04
13	Jawa Tengah	560.567	397.069	70,83	377362	67,32	397.069	70,83
14	D I Yogyakarta	46.639	29.784	63,86	34518	74,01	34.518	74,01
15	Jawa Timur	573.225	444.017	77,46	430611	75,12	444.017	77,46
16	Banten	188.699	217.471	115,25	208745	110,62	217.471	115,25
17	Bali	64.242	54.554	84,92	51369	79,96	54.554	84,92
18	Nusa Tenggara Barat	101.710	66.998	65,87	62126	61,08	66.998	65,87
19	Nusa Tenggara Timur	118.137	72.885	61,70	48899	41,39	72.885	61,70
20	Kalimantan Barat	99.644	49.009	49,18	25065	25,15	49.009	49,18
21	Kalimantan Tengah	50.554	27.504	54,41	18654	36,90	27.504	54,41
22	Kalimantan Selatan	71.552	43.963	61,44	37061	51,80	43.963	61,44
23	Kalimantan Timur	74.855	36.118	48,25	28618	38,23	36.118	48,25
24	Kalimantan Utara	13.376	7.855	58,72	4022	30,07	7.855	58,72
25	Sulawesi Utara	40.222	23.346	58,04	15574	38,72	23.346	58,04
26	Sulawesi Tengah	53.126	35.115	66,10	28548	53,74	35.115	66,10
27	Sulawesi Selatan	163.846	112.806	68,85	89055	54,35	112.806	68,85
28	Sulawesi Tenggara	54.756	32.972	60,22	24244	44,28	32.972	60,22
29	Gorontalo	22.135	14.882	67,23	12114	54,73	14.882	67,23
30	Sulawesi Barat	30.086	12.892	42,85	9121	30,32	12.892	42,85
31	Maluku	38.638	20.640	53,42	11551	29,90	20.640	53,42
32	Maluku Utara	24.346	13.944	57,27	9935	40,81	13.944	57,27
33	Papua	19.890	7.026	35,32	6438	32,37	7.026	35,32
34	Papua Barat	11.797	10.964	92,94	5676	48,11	10.964	92,94
35	Papua Selatan	11.105	5.186	46,70	2942	26,49	5.186	46,70
36	Papua Tengah	28.574	6.047	21,16	4825	16,89	6.047	21,16
37	Papua Pegunungan	29.230	7.558	25,86	3927	13,43	7.558	25,86
38	Papua Barat Daya	13.160	1.722	13,09	636	4,83	1.722	13,09
Indonesia		4.501.193	3.247.356	72,14	2.912.042	64,69	3.252.348	72,26

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.25

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Baduta	Baduta Diimunisasi			
			DPT-HB-Hib4		Campak/MR2	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	102.739	18.296	17,81	22.420	21,82
2	Sumatera Utara	289.185	215.909	74,66	235.959	81,59
3	Sumatera Barat	106.698	29.762	27,89	34.099	31,96
4	Riau	116.795	78.172	66,93	80.290	68,74
5	Jambi	64.688	46.307	71,59	50.568	78,17
6	Sumatera Selatan	144.479	142.270	98,47	147.730	102,25
7	Bengkulu	36.813	18.445	50,10	22.790	61,91
8	Lampung	158.612	107.205	67,59	124.321	78,38
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.296	16.073	61,12	16.767	63,76
10	Kepulauan Riau	38.084	25.869	67,93	27.035	70,99
11	DKI Jakarta	144.196	146.345	101,49	146.845	101,84
12	Jawa Barat	787.432	690.589	87,70	697.674	88,60
13	Jawa Tengah	564.413	464.110	82,23	468.402	82,99
14	D I Yogyakarta	47.200	43.509	92,18	43.501	92,16
15	Jawa Timur	578.348	468.583	81,02	486.892	84,19
16	Banten	191.336	211.340	110,45	213.986	111,84
17	Bali	64.576	55.849	86,49	56.159	86,97
18	Nusa Tenggara Barat	102.182	66.769	65,34	72.878	71,32
19	Nusa Tenggara Timur	118.484	75.611	63,82	75.306	63,56
20	Kalimantan Barat	100.519	49.914	49,66	48.581	48,33
21	Kalimantan Tengah	50.752	23.527	46,36	26.283	51,79
22	Kalimantan Selatan	71.978	48.120	66,85	50.696	70,43
23	Kalimantan Timur	69.285	35.189	50,79	41.359	59,69
24	Kalimantan Utara	13.448	7.510	55,84	8.001	59,50
25	Sulawesi Utara	40.389	24.758	61,30	23.694	58,66
26	Sulawesi Tengah	53.579	29.491	55,04	38.693	72,22
27	Sulawesi Selatan	164.345	137.181	83,47	140.092	85,24
28	Sulawesi Tenggara	55.042	33.265	60,44	34.388	62,48
29	Gorontalo	22.161	13.505	60,94	16.521	74,55
30	Sulawesi Barat	30.031	8.905	29,65	13.546	45,11
31	Maluku	38.893	19.526	50,20	20.989	53,97
32	Maluku Utara	24.755	13.003	52,53	13.015	52,58
33	Papua	20.048	10.049	50,12	10.272	51,24
34	Papua Barat	11.877	7.652	64,43	7.922	66,70
35	Papua Selatan	11.143	5.355	48,06	6.083	54,59
36	Papua Tengah	29.255	3.756	12,84	5.534	18,92
37	Papua Pegunungan	29.816	1.004	3,37	1.578	5,29
38	Papua Barat Daya	13.293	4.609	34,67	6.174	46,45
Indonesia		4.533.165	3.397.332	74,94	3.537.043	78,03

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.26

**CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYIDAN ANAK BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Sasaran Balita	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
			Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
				Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	348.719	18.495	15.229	82,34	240.256	193.197	80,41	258.751	208.426	80,55
2	Sumatera Utara	973.749	43.098	37.048	85,96	730.708	555.385	76,01	773.806	592.433	76,56
3	Sumatera Barat	428.869	28.190	25.564	90,68	295.577	261.901	88,61	323.767	287.465	88,79
4	Riau	440.880	25.152	22.074	87,76	344.826	273.544	79,33	369.978	295.618	79,90
5	Jambi	225.737	12.996	11.326	87	175.427	140.164	79,90	188.423	151.490	80,40
6	Sumatera Selatan	585.063	32.327	28.923	89,47	476.362	410.718	86,22	508.690	439.642	86,43
7	Bengkulu	116.563	7.340	6.781	92,38	91.178	77.392	84,88	98.518	84.173	85,44
8	Lampung	633.818	31.405	27.085	86,24	440.766	375.175	85,12	472.171	402.260	85,19
9	Kepulauan Bangka Belitung	107.275	8.135	7.149	87,88	82.739	69.613	84,14	90.874	76.762	84,47
10	Kepulauan Riau	168.429	9.409	8.043	85,48	95.057	81.267	85,49	104.466	89.310	85,49
11	DKI Jakarta	386.414	12.851	11.658	90,72	307.203	247.701	80,63	320.054	259.359	81,04
12	Jawa Barat	3.334.249	206.754	194.949	94,29	2.490.668	2.257.583	90,64	2.697.422	2.452.532	90,92
13	Jawa Tengah	2.039.161	145.543	135.864	93,35	1.654.602	1.500.311	90,68	1.800.145	1.636.175	90,89
14	DI Yogyakarta	158.917	11.079	10.950	98,84	135.933	126.248	92,88	147.012	137.198	93,32
15	Jawa Timur	2.701.931	161.519	150.333	93,07	1.878.437	1.737.227	92,48	2.039.956	1.887.560	92,53
16	Banten	822.224	52.494	49.342	94,00	652.271	576.791	88,43	704.765	626.133	88,84
17	Bali	193.208	13.699	12.811	93,52	157.029	140.865	89,71	170.728	153.676	90,01
18	Nusa Tenggara Barat	414.002	30.828	28.224	91,55	344.260	316.711	92,00	375.088	344.935	91,96
19	Nusa Tenggara Timur	361.317	33.391	28.027	83,94	329.515	263.710	80,03	362.906	291.737	80,39
20	Kalimantan Barat	454.952	28.377	20.140	70,97	322.178	177.506	55,10	350.555	197.646	56,38
21	Kalimantan Tengah	189.377	11.340	8.025	70,77	130.061	78.007	59,98	141.401	86.032	60,84
22	Kalimantan Selatan	309.796	22.014	19.148	86,98	228.722	201.067	87,91	250.736	220.215	87,83
23	Kalimantan Timur	298.219	19.186	12.714	66,27	201.753	106.924	53,00	220.939	119.638	54,15
24	Kalimantan Utara	62.163	3.720	2.928	78,71	42.521	28.426	66,85	46.241	31.354	67,81
25	Sulawesi Utara	105.320	9.129	8.115	88,89	95.892	79.957	83,38	105.021	88.072	83,86
26	Sulawesi Tengah	207.246	16.075	14.363	89,35	167.035	138.225	82,75	183.110	152.588	83,33
27	Sulawesi Selatan	510.823	37.423	31.078	83,05	464.277	374.301	80,62	501.700	405.379	80,80
28	Sulawesi Tenggara	227.204	14.813	10.808	72,96	161.721	102.295	63,25	176.534	113.103	64,07
29	Gorontalo	96.054	7.090	5.911	83,37	68.463	61.472	89,79	75.553	67.383	89,19
30	Sulawesi Barat	110.486	9.724	7.230	74,35	87.809	59.286	67,52	97.533	66.516	68,20
31	Maluku	137.744	9.379	7.476	79,71	105.351	74.043	70,28	114.730	81.519	71,05
32	Maluku Utara	95.191	8.271	6.352	76,80	73.753	57.801	78,37	82.024	64.153	78,21
33	Papua	34.376	6.731	3.589	53,32	67.055	17.901	26,70	73.786	21.490	29,12
34	Papua Barat	54.196	2.770	1.470	53,07	24.641	6.948	28,20	27.411	8.418	30,71
35	Papua Selatan	75.831	5.309	2.457	46,28	61.560	9.689	15,74	66.869	12.146	18,16
36	Papua Tengah	50.580	3.715	1.478	39,78	45.998	7.797	16,95	49.713	9.275	18,66
37	Papua Pegunungan	38.723	1.600	565	35,31	16.940	1.418	8,37	18.540	1.983	10,70
38	Papua Barat Daya	49.924	2.782	1.619	58,20	25.681	10.713	41,72	28.463	12.332	43,33
Indonesia		17.548.730	1.104.153	976.846	88,47	13.314.225	11.199.279	84,12	14.418.379	12.176.126	84,45

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 5.27

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran Balita	Balita Memiliki Buku KIA		Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		Balita Dilayani SDIDTK				
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah Balita Sakit Usia 2-59 Bulan Yang Berkunjung Di FKTP	Balita Sakit Usia 2-59 Bulan Dilayani MTBS Di FKTP	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(14)
1	Aceh	348.719	290.358	83,26	100.647	28,86	53.396	15,31	1.111.781	226.349	20,36
2	Sumatera Utara	973.749	774.623	79,55	292.799	30,07	148.004	15,20	1.711.759	259.930	15,18
3	Sumatera Barat	428.869	356.222	83,06	266.673	62,18	200.324	46,71	1.146.822	208.260	18,16
4	Riau	440.880	378.541	85,86	108.140	24,53	65.498	14,86	3.433.429	171.370	4,99
5	Jambi	225.737	191.293	84,74	116.621	51,66	73.418	32,52	1.022.454	112.847	11,04
6	Sumatera Selatan	585.063	531.293	90,81	378.937	64,77	317.684	54,30	1.088.161	180.355	16,57
7	Bengkulu	116.563	107.103	91,88	58.490	50,18	37.204	31,92	455.314	29.252	6,42
8	Lampung	633.818	501.699	79,16	326.469	51,51	215.112	33,94	2.688.250	318.445	11,85
9	Kep. Bangka Belitung	107.275	97.932	91,29	64.255	59,90	50.531	47,10	85.223	80.036	93,91
10	Kepulauan Riau	168.429	114.280	67,85	64.863	38,51	42.266	25,09	604.027	96.526	15,98
11	DKI Jakarta	386.414	322.867	83,55	33.642	8,71	23.260	6,02	96.384	113.542	117,80
12	Jawa Barat	3.334.249	2.862.956	85,87	2.072.738	62,17	1.298.318	38,94	4.056.286	1.881.411	46,38
13	Jawa Tengah	2.039.161	1.920.599	94,19	1.060.357	52,00	746.833	36,62	1.271.896	1.165.411	91,63
14	D I Yogyakarta	158.917	157.248	98,95	49.262	31,00	32.697	20,57	182.137	158.943	87,27
15	Jawa Timur	2.701.931	2.129.856	78,83	1.232.977	45,63	755.806	27,97	3.800.092	911.880	24,00
16	Banten	822.224	749.754	91,19	509.190	61,93	396.634	48,24	657.812	630.557	95,86
17	Bali	193.208	183.993	95,23	173.070	89,58	126.136	65,29	112.285	135.185	120,39
18	Nusa Tenggara Barat	414.002	405.416	97,93	254.355	61,44	128.541	31,05	182.999	219.888	120,16
19	Nusa Tenggara Timur	361.317	388.008	107,39	155.076	42,92	58.713	16,25	1.627.856	231.266	14,21
20	Kalimantan Barat	454.952	368.513	81,00	135.410	29,76	91.354	20,08	1.049.712	91.327	8,70
21	Kalimantan Tengah	189.377	146.707	77,47	60.963	32,19	21.713	11,47	596.786	44.511	7,46
22	Kalimantan Selatan	309.796	273.952	88,43	183.769	59,32	139.622	45,07	1.385.066	228.902	16,53
23	Kalimantan Timur	298.219	234.619	78,67	87.496	29,34	60.454	20,27	443.357	280.935	63,37
24	Kalimantan Utara	62.163	49.982	80,40	20.218	32,52	16.208	26,07	117.920	94.377	80,03
25	Sulawesi Utara	105.320	108.487	103,01	43.446	41,25	20.137	19,12	283.225	36.518	12,89
26	Sulawesi Tengah	207.246	197.083	95,10	104.225	50,29	48.893	23,59	126.806	102.500	80,83
27	Sulawesi Selatan	510.823	542.299	106,16	241.409	47,26	141.567	27,71	340.212	333.327	97,98
28	Sulawesi Tenggara	227.204	188.748	83,07	86.909	38,25	48.249	21,24	588.336	101.283	17,22
29	Gorontalo	96.054	82.819	86,22	58.753	61,17	38.505	40,09	16.885	11.402	67,53
30	Sulawesi Barat	110.486	107.719	97,50	66.829	60,49	37.510	33,95	22.790	23.953	105,10
31	Maluku	137.744	117.386	85,22	50.634	36,76	17.547	12,74	430.564	79.993	18,58
32	Maluku Utara	95.191	88.022	92,47	45.162	47,44	20.901	21,96	-	-	-
33	Papua	75.831	76.677	101,12	8.675	11,44	2.869	3,78	367.703	88.184	23,98
34	Papua Barat	34.376	28.117	81,79	12.720	37,00	2.082	6,06	362.981	52.091	14,35
35	Papua Selatan	54.246	66.852	101,12	2.760	5,09	743	1,37	149.164	7.197	4,82
36	Papua Tengah	49.924	46.624	93,39	5.636	11,29	1.654	3,31	-	-	-
37	Papua Pegunungan	50.580	15.931	31,50	4.099	8,10	1.819	3,60	11.452	86	0,75
38	Papua Barat Daya	38.723	28.229	72,90	4.929	12,73	542	1,40	5.519	993	17,99
Indonesia		17.548.780	15.232.807	86,80	8.542.603	48,68	5.482.744	31,24	31.633.445	8.709.032	27,53

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.28

**JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2025**

No	Provinsi	2023			2024			2025		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
		L+P	L+P	L+P		L+P	L+P		P+L	P+L
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	318.496	274.919	86,32	272.696	243.191	89,18	296.392	270.233	91,17
2	Sumatera Utara	867.309	697.822	80,46	738.978	590.871	79,96	790.999	703.118	88,89
3	Sumatera Barat	380.617	311.819	81,92	373.445	295.830	79,22	357.936	307.274	85,85
4	Riau	413.206	273.326	66,15	391.733	279.485	71,35	383.288	293.528	76,58
5	Jambi	210.917	154.148	73,08	196.951	134.498	68,29	193.652	146.247	75,52
6	Sumatera Selatan	580.570	510.167	87,87	547.371	505.292	92,31	540.319	506.564	93,75
7	Bengkulu	114.706	83.972	73,21	109.734	81.767	74,51	107.453	85.703	79,76
8	Lampung	573.121	461.046	80,44	507.518	415.547	81,88	507.914	436.926	86,02
9	Kepulauan Bangka	108.548	76.223	70,22	99.688	73.325	73,55	99.032	76.782	77,53
10	Kepulauan Riau	130.737	104.030	79,57	116.218	99.097	85,27	115.589	99.931	86,45
11	DKI Jakarta	422.481	327.426	77,50	357.379	312.730	87,51	329.240	306.413	93,07
12	Jawa Barat	3.383.775	2.906.128	85,88	3.092.916	2.516.051	81,35	2.918.360	2.643.893	90,60
13	Jawa Tengah	2.122.057	1.755.821	82,74	1.992.640	1.773.090	88,98	1.958.291	1.849.842	94,46
14	DI Yogyakarta	163.592	131.345	80,29	168.055	137.190	81,63	157.889	136.879	86,69
15	Jawa Timur	2.547.184	2.028.098	79,62	2.364.696	2.048.027	86,61	2.215.211	2.044.781	92,31
16	Banten	858.926	728.240	84,78	783.406	646.323	82,50	763.464	679.215	88,96
17	Bali	201.328	167.783	83,34	192.654	163.389	84,81	186.101	169.040	90,83
18	Nusa Tenggara Barat	450.056	411.543	91,44	429.655	393.208	91,52	412.972	388.510	94,08
19	Nusa Tenggara Timur	398.602	328.517	82,42	399.856	315.170	78,82	392.129	324.061	82,64
20	Kalimantan Barat	389.244	195.537	50,24	370.675	201.734	54,42	370.710	225.473	60,82
21	Kalimantan Tengah	170.160	101.352	59,56	154.233	99.760	64,68	149.496	99.812	66,77
22	Kalimantan Selatan	302.044	215.518	71,35	284.310	232.810	81,89	275.623	230.649	83,68
23	Kalimantan Timur	269.458	108.565	40,29	245.544	118.695	48,34	236.813	128.401	54,22
24	Kalimantan Utara	63.919	32.101	50,22	52.772	29.886	56,63	50.556	30.434	60,20
25	Sulawesi Utara	113.699	88.770	78,07	117.870	90.239	76,56	109.284	87.981	80,51
26	Sulawesi Tengah	210.453	150.691	71,60	199.012	150.854	75,80	198.060	167.029	84,33
27	Sulawesi Selatan	595.697	465.539	78,15	570.184	433.748	76,07	546.044	486.637	89,12
28	Sulawesi Tenggara	203.594	135.830	66,72	180.718	136.597	75,59	192.127	145.872	75,92
29	Gorontalo	85.729	72.400	84,45	84.503	78.870	93,33	82.983	77.625	93,54
30	Sulawesi Barat	114.632	68.713	59,94	110.622	76.298	68,97	107.913	74.227	68,78
31	Maluku	129.555	90.663	69,98	121.301	92.379	76,16	121.229	101.689	83,88
32	Maluku Utara	99.983	72.125	72,14	85.302	65.759	77,09	89.451	67.604	75,58
33	Papua	82.316	28.199	34,26	64.644	23.450	36,28	78.286	28.664	36,61
34	Papua Barat	32.790	11.498	35,07	26.640	10.777	40,45	29.277	12.127	41,42
35	Papua Selatan	53.177	15.298	28,77	48.146	13.228	27,47	69.979	19.050	27,22
36	Papua Tengah	53.954	12.772	23,67	50.599	11.445	22,62	48.939	12.995	26,55
37	Papua Pegunungan	14.539	3.164	21,76	15.383	3.187	20,72	17.052	3.878	22,74
38	Papua Barat Daya	27.743	11.644	41,97	22.441	12.409	55,30	30.003	14.282	47,60
Indonesia		17.258.914	13.612.752	78,87	15.940.488	12.906.206	80,96	15.530.056	13.483.369	86,82

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.29

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Balita yang Ditimbang	Balita Underweight Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang (BB/U)		Jumlah Balita yang Diukur Tinggi Badan	Balita Stunting Pendek dan Sangat Pendek (TB/U)		Jumlah Balita yang Diukur Berat Badan dan Tinggi Badan	Balita Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	270.233	23.402	8,66	270.075	19.016	7,04	269.995	12.318	4,56
2	Sumatera Utara	703.118	13.035	1,85	702.935	16.858	2,40	702.863	9.303	1,32
3	Sumatera Barat	307.274	26.929	8,76	306.736	31.692	10,33	307.155	13.397	4,36
4	Riau	293.528	11.373	3,87	293.196	8.434	2,88	293.420	7.621	2,60
5	Jambi	146.247	6.047	4,13	145.968	4.962	3,40	146.138	3.597	2,46
6	Sumatera Selatan	506.564	6.399	1,26	506.216	5.251	1,04	506.217	5.463	1,08
7	Bengkulu	85.703	2.701	3,15	85.670	3.336	3,89	85.683	1.090	1,27
8	Lampung	436.926	13.898	3,18	436.687	15.956	3,65	436.829	10.858	2,49
9	Kepulauan Bangka Belitung	76.782	3.424	4,46	76.575	2.988	3,90	76.594	1.351	1,76
10	Kepulauan Riau	99.931	4.991	4,99	99.942	3.194	3,20	99.979	2.723	2,72
11	DKI Jakarta	306.413	8.678	2,83	306.351	5.927	1,93	306.279	4.535	1,48
12	Jawa Barat	2.643.893	168.632	6,38	2.642.919	190.059	7,19	2.643.714	86.853	3,29
13	Jawa Tengah	1.849.842	185.466	10,03	1.849.255	183.959	9,95	1.849.628	92.995	5,03
14	DI Yogyakarta	136.879	15.983	11,68	136.866	16.228	11,86	136.877	6.780	4,95
15	Jawa Timur	2.044.781	158.799	7,77	2.044.817	110.108	5,38	2.044.803	105.225	5,15
16	Banten	679.215	32.005	4,71	679.145	32.972	4,85	679.084	22.009	3,24
17	Bali	169.040	5.948	3,52	168.996	6.226	3,68	169.003	2.610	1,54
18	Nusa Tenggara Barat	388.510	56.877	14,64	388.301	51.950	13,38	388.257	23.007	5,93
19	Nusa Tenggara Timur	324.061	67.727	20,90	324.020	65.336	20,16	324.011	26.931	8,31
20	Kalimantan Barat	225.473	28.181	12,50	225.244	31.624	14,04	225.311	12.342	5,48
21	Kalimantan Tengah	99.812	7.884	7,90	99.755	10.441	10,47	99.782	3.670	3,68
22	Kalimantan Selatan	230.649	25.720	11,15	230.549	23.030	9,99	230.631	12.162	5,27
23	Kalimantan Timur	128.401	17.256	13,44	128.357	20.452	15,93	128.377	7.976	6,21
24	Kalimantan Utara	30.434	2.442	8,02	30.412	2.894	9,52	30.420	887	2,92
25	Sulawesi Utara	87.981	3.415	3,88	87.906	1.689	1,92	87.951	2.030	2,31
26	Sulawesi Tengah	167.029	16.962	10,16	166.958	17.012	10,19	166.991	7.779	4,66
27	Sulawesi Selatan	486.637	39.091	8,03	485.980	39.473	8,12	486.243	16.595	3,41
28	Sulawesi Tenggara	145.872	12.966	8,89	145.797	15.179	10,41	145.812	5.172	3,55
29	Gorontalo	77.625	5.255	6,77	77.600	4.354	5,61	77.617	2.326	3,00
30	Sulawesi Barat	74.227	14.202	19,13	74.228	20.182	27,19	74.222	4.485	6,04
31	Maluku	101.689	9.619	9,46	101.647	6.162	6,06	101.679	5.296	5,21
32	Maluku Utara	67.604	6.324	9,35	67.555	4.877	7,22	67.598	3.305	4,89
33	Papua	28.664	4.453	15,54	28.638	3.994	13,95	28.638	2.343	8,18
34	Papua Barat	12.127	2.091	17,24	12.124	1.724	14,22	12.123	1.169	9,64
35	Papua Selatan	19.050	3.288	17,26	19.027	3.724	19,57	19.000	1.957	10,30
36	Papua Tengah	12.995	1.340	10,31	12.958	1.672	12,90	12.997	782	6,02
37	Papua Pegunungan	3.878	424	10,93	3.875	1.008	26,01	3.874	205	5,29
38	Papua Barat Daya	14.282	2.739	19,18	14.270	2.188	15,33	14.270	1.578	11,06
Indonesia		13.483.369	1.015.966	7,53	13.477.550	986.131	7,32	13.480.065	530.725	3,94

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.30

TATALAKSANA MASALAH GIZI PADA BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Balita Gizi Kurang	Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan		Jumlah Balita Gizi Buruk	Balita Gizi Buruk Mendapat Tatalaksana	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	11.209	5.313	47,40	291	221	75,95
2	Sumatera Utara	14.371	8.738	60,80	401	306	76,31
3	Sumatera Barat	16.699	10.287	61,60	1.141	1.062	93,08
4	Riau	7.563	4.700	62,14	237	229	96,62
5	Jambi	5.214	3.942	75,60	143	135	94,41
6	Sumatera Selatan	7.717	6.108	79,15	160	160	100,00
7	Bengkulu	1.668	1.089	65,29	55	51	92,73
8	Lampung	13.957	9.826	70,40	97	90	92,78
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.472	1.311	53,03	151	149	98,68
10	Kepulauan Riau	3.579	2.244	62,70	225	215	95,56
11	DKI Jakarta	5.537	4.519	81,61	1.036	1.029	99,32
12	Jawa Barat	111.247	58.579	52,66	5.176	4.910	94,86
13	Jawa Tengah	117.722	70.404	59,81	8.004	7.746	96,78
14	DI Yogyakarta	7.566	7.058	93,29	272	257	94,49
15	Jawa Timur	116.840	63.547	54,39	9.287	8.816	94,93
16	Banten	24.268	15.987	65,88	3.136	3.130	99,81
17	Bali	3.494	1.578	45,16	140	130	92,86
18	Nusa Tenggara Barat	31.526	12.823	40,67	1.022	785	76,81
19	Nusa Tenggara Timur	67.252	20.321	30,22	7.387	3.365	45,55
20	Kalimantan Barat	17.126	9.725	56,79	830	726	87,47
21	Kalimantan Tengah	5.450	3.428	62,90	232	150	64,66
22	Kalimantan Selatan	19.734	10.172	51,55	1.662	1.649	99,22
23	Kalimantan Timur	17.948	6.739	37,55	1.319	1.293	98,03
24	Kalimantan Utara	1.696	812	47,88	121	117	96,69
25	Sulawesi Utara	2.029	1.326	65,35	28	28	100,00
26	Sulawesi Tengah	12.251	8.461	69,06	1.111	772	69,49
27	Sulawesi Selatan	23.216	14.001	60,31	685	602	87,88
28	Sulawesi Tenggara	9.023	5.311	58,86	337	243	72,11
29	Gorontalo	3.702	1.669	45,08	341	235	68,91
30	Sulawesi Barat	13.013	2.676	20,56	1.386	632	45,60
31	Maluku	5.461	3.243	59,38	261	145	55,56
32	Maluku Utara	5.190	3.019	58,17	301	257	85,38
33	Papua	3.041	1.422	46,76	362	278	76,80
34	Papua Barat	2.192	709	32,34	155	59	38,06
35	Papua Selatan	1.792	900	50,22	743	176	23,69
36	Papua Tengah	1.264	766	60,60	262	184	70,23
37	Papua Pegunungan	280	172	61,43	31	15	48,39
38	Papua Barat Daya	1.800	1.242	69,00	686	292	42,57
Indonesia		716.109	384.167	53,65	49.214	40.639	82,58

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.31
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)			HPV		Imunisasi Usia Sekolah Dasar Lengkap	
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 5	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Aceh	97.372	97.031	96.655	18617	19,26	21.815	22,57
2	Sumatera Utara	273.499	272.471	271.792	122149	44,94	209.909	77,23
3	Sumatera Barat	90.955	90.304	90.822	35459	39,04	39.606	43,61
4	Riau	121.338	121.422	120.801	48282	39,97	108.426	89,76
5	Jambi	62.102	61.994	62.344	29988	48,10	38.152	61,20
6	Sumatera Selatan	152.986	153.958	156.889	76669	48,87	142.479	90,82
7	Bengkulu	34.837	34.710	34.761	15018	43,20	20.979	60,35
8	Lampung	153.865	154.054	156.899	68677	43,77	109.080	69,52
9	Kepulauan Bangka Belitung	23.876	23.642	23.193	10875	46,89	22.312	96,20
10	Kepulauan Riau	37.556	37.539	38.032	15810	41,57	29.792	78,33
11	DKI Jakarta	155.598	156.456	157.155	65431	41,63	129.127	82,17
12	Jawa Barat	779.135	775.509	762.238	367917	48,27	728.529	95,58
13	Jawa Tengah	536.985	535.944	539.901	258231	47,83	523.334	96,93
14	DI Yogyakarta	48.800	49.033	49.902	23076	46,24	46.818	93,82
15	Jawa Timur	556.945	560.298	583.538	265722	45,54	537.148	92,05
16	Banten	207.290	208.238	209.316	105454	50,38	168.187	80,35
17	Bali	58.886	58.624	58.831	35528	60,39	64.615	109,83
18	Nusa Tenggara Barat	100.007	100.620	104.844	45209	43,12	91.344	87,12
19	Nusa Tenggara Timur	110.393	109.605	107.913	49174	45,57	72.904	67,56
20	Kalimantan Barat	93.642	93.050	92.236	38009	41,21	57.045	61,85
21	Kalimantan Tengah	43.503	43.139	43.414	20771	47,84	35.552	81,89
22	Kalimantan Selatan	72.714	73.815	79.135	30594	38,66	54.371	68,71
23	Kalimantan Timur	66.251	65.844	64.500	29475	45,70	43.746	67,82
24	Kalimantan Utara	11.646	11.479	11.115	5857	52,69	11.462	103,12
25	Sulawesi Utara	39.350	39.617	41.102	14777	35,95	23.382	56,89
26	Sulawesi Tengah	54.893	54.779	53.954	20889	38,72	40.305	74,70
27	Sulawesi Selatan	145.182	143.202	137.612	67978	49,40	127.386	92,57
28	Sulawesi Tenggara	50.562	50.219	49.687	22257	44,79	42.866	86,27
29	Gorontalo	19.147	18.859	18.199	8814	48,43	10.985	60,36
30	Sulawesi Barat	27.522	27.269	26.618	7973	29,95	16.015	60,17
31	Maluku	31.480	30.864	29.524	8907	30,17	13.806	46,76
32	Maluku Utara	24.151	23.981	23.308	8915	38,25	14.134	60,64
33	Papua	26.870	26.801	24.232	6719	27,73	13.057	53,88
34	Papua Barat	9.858	9.666	9.270	3472	37,45	6.668	71,93
35	Papua Selatan	19.323	18.877	14.409	3881	26,93	5.250	36,44
36	Papua Tengah	20.794	21.306	25.865	3163	12,23	3.468	13,41
37	Papua Pegunungan	13.727	13.976	19.390	704	3,63	1.337	6,90
38	Papua Barat Daya	9.731	9.468	9.184	3116	33,93	5.546	60,39
Indonesia		4.382.771	4.377.663	4.398.580	1.963.557	44,64	3.630.937	82,55

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 5.32

CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Catin Terdaftar di KUA atau Rumah Ibadah Lainnya	Catina Mendapat Pelayanan Kesehatan				Catina Perempuan Anemia		Catina Perempuan Kekurangan Energi Kronik (KEK)		Catina Laki-laki IMS		Catina Perempuan IMS	
			Laki-laki	Perempuan	Total	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	27.555	12.809	17.855	30.664	47,60	954	5,34	611	3,42	240	3,44	252	2,27
2	Sumatera Utara	107.335	51.857	55.004	106.861	53,94	1.360	2,47	922	1,68	1.778	4,83	661	1,64
3	Sumatera Barat	54.577	34.116	34.659	68.775	91,60	3.607	10,41	3.273	9,44	1.347	11,81	1	16,41
4	Riau	118.936	48.945	52.305	101.250	109,01	1.028	1,97	773	1,48	106	0,27	141	0,35
5	Jambi	17.571	8.834	10.180	19.014	41,20	603	5,92	731	7,18	2	0,03	2	0,04
6	Sumatera Selatan	82.284	36.961	38.187	75.148	72,32	947	2,48	904	2,37	5	0,02	23	0,10
7	Bengkulu	18.338	6.763	6.858	13.621	50,66	212	3,09	319	4,65	1	0,12	-	0,00
8	Lampung	81.195	32.694	38.932	71.626	67,99	2.166	5,56	1.081	2,78	170	1,22	202	1,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.204	6.522	6.651	13.173	75,88	1.391	20,91	699	10,51	58	1,15	66	1,43
10	Kepulauan Riau	12.028	7.053	7.291	14.344	47,08	639	8,76	500	6,86	25	0,45	31	0,58
11	DKI Jakarta	28.158	23.253	21.977	45.230	44,84	3.488	15,87	1.438	6,54	464	2,00	317	1,52
12	Jawa Barat	327.698	179.296	209.814	389.110	64,81	11.597	5,53	11.926	5,68	619	0,47	2	1,58
13	Jawa Tengah	346.318	188.016	212.139	400.155	84,11	19.456	9,17	21.445	10,11	2.067	1,40	3	2,05
14	DI Yogyakarta	24.764	13.227	15.455	28.682	71,13	1.671	10,81	2.458	15,90	55	0,91	58	1,13
15	Jawa Timur	471.485	212.454	230.924	443.378	80,11	19.018	8,24	21.074	9,13	3.565	2,00	2	1,38
16	Banten	119.690	49.294	58.866	108.160	80,74	2.409	4,09	2.332	3,96	312	0,79	269	0,63
17	Bali	16.056	8.630	10.135	18.765	34,83	756	7,46	497	4,90	59	1,30	59	1,18
18	Nusa Tenggara Barat	29.866	17.778	18.349	36.127	68,15	1.589	8,66	1.939	10,57	176	1,14	395	2,98
19	Nusa Tenggara Timur	20.630	10.092	10.922	21.014	34,38	411	3,76	540	4,94	174	4,82	205	5,23
20	Kalimantan Barat	26.635	19.242	20.640	39.882	60,87	1.254	6,08	845	4,09	193	1,92	274	2,32
21	Kalimantan Tengah	9.657	5.858	8.511	14.369	38,66	525	6,17	614	7,21	15	0,65	42	1,46
22	Kalimantan Selatan	37.977	23.927	26.679	50.606	97,74	3.179	11,92	3,62	13,57	220	1,08	275	1,46
23	Kalimantan Timur	57.357	17.742	18.277	36.019	72,60	1.301	7,12	1.733	9,48	295	2,28	259	2,08
24	Kalimantan Utara	10.590	5.310	5.673	10.983	118,85	1.298	22,88	890	15,69	19	0,45	17	0,52
25	Sulawesi Utara	12.968	6.214	8.394	14.608	42,07	241	2,87	274	3,26	76	12,60	412	20,05
26	Sulawesi Tengah	21.017	10.848	12.479	23.327	59,74	1.819	14,58	1.441	11,55	232	4,96	105	1,93
27	Sulawesi Selatan	173.865	24.578	38.348	62.926	58,23	2.626	6,85	4.244	11,07	187	1,83	200	1,17
28	Sulawesi Tenggara	17.965	8.383	11.158	19.541	65,94	765	6,86	1	8,96	35	0,63	63	1,09
29	Gorontalo	7.320	5.484	5.666	11.150	67,78	481	8,49	395	6,97	18	0,45	49	1,48
30	Sulawesi Barat	13.596	3.296	6.742	10.038	61,59	369	5,47	659	9,77	16	0,72	17	0,40
31	Maluku	3.605	1.734	1.945	3.679	17,26	65	3,34	67	3,44	348	60,00	17	2,23
32	Maluku Utara	1.989	1.401	1.571	2.972	17,42	45	2,86	34	2,16	19	1,75	24	2,48
33	Papua	205	1	34	35	0,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
34	Papua Barat	111	111	111	222	4,02	6	5,41	7	6,31	-	0,00	3	4,05
35	Papua Selatan	548	424	486	910	15,67	53	10,91	12	2,47	1	0,30	13	3,63
36	Papua Tengah	347	123	247	370	7,26	9	3,64	2	0,81	1	1,15	4	4,35
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Indonesia		2.308.440	1.083.270	1.223.464	2.306.734	68,61	87.338	7,14	89.299	7,30	12.898	1,66	12.474	1,69

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.33

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kab/Kota	Puskesmas	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	366	42	11
2	Sumatera Utara	33	619	150	24
3	Sumatera Barat	19	280	107	38
4	Riau	12	244	130	53
5	Jambi	11	208	37	18
6	Sumatera Selatan	17	354	207	58
7	Bengkulu	10	179	75	42
8	Lampung	15	322	83	26
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	64	64	100
10	Kepulauan Riau	7	97	57	59
11	DKI Jakarta	6	44	2	5
12	Jawa Barat	27	1.115	658	59
13	Jawa Tengah	35	883	475	54
14	DI Yogyakarta	5	121	100	83
15	Jawa Timur	38	976	300	31
16	Banten	8	254	94	37
17	Bali	9	120	78	65
18	Nusa Tenggara Barat	10	177	89	50
19	Nusa Tenggara Timur	22	444	142	32
20	Kalimantan Barat	14	252	142	56
21	Kalimantan Tengah	14	207	60	29
22	Kalimantan Selatan	13	242	40	17
23	Kalimantan Timur	10	188	72	38
24	Kalimantan Utara	5	59	41	69
25	Sulawesi Utara	15	203	68	33
26	Sulawesi Tengah	13	220	34	15
27	Sulawesi Selatan	24	475	241	51
28	Sulawesi Tenggara	17	310	262	85
29	Gorontalo	6	95	21	22
30	Sulawesi Barat	6	98	34	35
31	Maluku	11	241	34	14
32	Maluku Utara	10	150	44	29
33	Papua	9	125	19	15
34	Papua Barat	7	89	12	13
35	Papua Selatan	4	85	-	-
36	Papua Tengah	8	149	9	6
37	Papua Pegunungan	8	245	-	-
38	Papua Barat Daya	6	136	19	14
Indonesia		514	10.436	4.042	38,73

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.34

CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Usia Lanjut (60+ tahun)		
		Jumlah	Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	509.301	267.961	52,61
2	Sumatera Utara	1.397.574	1.397.574	100,00
3	Sumatera Barat	630.581	515.561	81,76
4	Riau	587.371	405.207	68,99
5	Jambi	362.531	317.058	87,46
6	Sumatera Selatan	882.161	836.681	94,84
7	Bengkulu	218.488	170.098	77,85
8	Lampung	1.061.966	985.193	92,77
9	Kepulauan Riau	158.704	131.442	82,82
10	Kepulauan Bangka Belitung	178.098	111.218	62,45
11	DKI Jakarta	1.278.575	1.059.604	82,87
12	Jawa Barat	5.805.964	4.996.978	86,07
13	Jawa Tengah	5.210.127	5.016.567	96,28
14	DI Yogyakarta	593.863	433.557	73,01
15	Jawa Timur	6.333.963	5.870.844	92,69
16	Banten	549.516	1.054.779	191,95
17	Bali	541.662	527.866	97,45
18	Nusa Tenggara Barat	555.372	529.071	95,26
19	Nusa Tenggara Timur	537.817	449.197	83,52
20	Kalimantan Barat	560.477	433.509	77,35
21	Kalimantan Tengah	251.495	213.184	84,77
22	Kalimantan Selatan	411.123	348.530	84,78
23	Kalimantan Timur	243.296	217.685	89,47
24	Kalimantan Utara	53.047	45.171	85,15
25	Sulawesi Utara	311.422	302.458	97,12
26	Sulawesi Tengah	312.590	204.182	65,32
27	Sulawesi Selatan	1.095.621	876.530	80,00
28	Sulawesi Tenggara	218.266	218.266	100,00
29	Gorontalo	134.298	110.591	82,35
30	Sulawesi Barat	94.841	104.452	110,13
31	Maluku	179.345	32.149	17,93
32	Maluku Utara	117.457	84.779	72,18
33	Papua	85.362	22.389	26,23
34	Papua Barat	39.663	20.845	52,56
35	Papua Selatan	37.287	17.504	46,94
36	Papua Tengah	87.193	48.307	55,40
37	Papua Pegunungan	128.094	720	0,56
38	Papua Barat Daya	38.656	-	-
Indonesia		31.793.167	28.377.707	89,26

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.35

**PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Melaksanakan Pendekatan MTBS		Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Aceh	366	298	81,42	137	37,43
2	Sumatera Utara	619	523	84,49	188	30,37
3	Sumatera Barat	280	177	63,21	39	13,93
4	Riau	244	161	65,98	174	71,31
5	Jambi	208	185	88,94	62	29,81
6	Sumatera Selatan	354	344	97,18	228	64,41
7	Bengkulu	179	125	69,83	0	0,00
8	Lampung	322	308	95,65	164	50,93
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,00	42	65,63
10	Kepulauan Riau	97	57	58,76	57	58,76
11	DKI Jakarta	44	12	27,27	2	4,55
12	Jawa Barat	1115	1058	94,89	536	48,07
13	Jawa Tengah	883	731	82,79	460	52,10
14	DI Yogyakarta	121	121	100,00	121	100,00
15	Jawa Timur	976	937	96,00	590	60,45
16	Banten	254	253	99,61	185	72,83
17	Bali	120	120	100,00	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	177	122	68,93	133	75,14
19	Nusa Tenggara Timur	444	414	93,24	251	56,53
20	Kalimantan Barat	252	222	88,10	121	48,02
21	Kalimantan Tengah	207	147	71,01	44	21,26
22	Kalimantan Selatan	242	242	100,00	100	41,32
23	Kalimantan Timur	188	167	88,83	119	63,30
24	Kalimantan Utara	59	34	57,63	6	10,17
25	Sulawesi Utara	203	152	74,88	136	67,00
26	Sulawesi Tengah	220	162	73,64	93	42,27
27	Sulawesi Selatan	475	469	98,74	305	64,21
28	Sulawesi Tenggara	310	255	82,26	154	49,68
29	Gorontalo	95	36	37,89	11	11,58
30	Sulawesi Barat	98	80	81,63	0	0,00
31	Maluku	241	179	74,27	64	26,56
32	Maluku Utara	150	59	39,33	41	27,33
33	Papua	125	79	63,20	19	15,20
34	Papua Barat	89	22	24,72	19	21,35
35	Papua Selatan	85	63	74,12	0	0,00
36	Papua Tengah	149	3	2,01	1	0,67
37	Papua Pegunungan	245	35	14,29	10	4,08
38	Papua Barat Daya	136	20	14,71	0	0,00
Indonesia		10.436	8.436	81	4.732	45

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 5.36

CAKUPAN IBU HAMIL MENGIKUTI KELAS IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Hamil Mengikuti Kelas Ibu Hamil	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	116.530	75.789	65,04
2	Sumatera Utara	305.803	186.952	61,13
3	Sumatera Barat	104.778	31.489	30,05
4	Riau	123.437	78.149	63,31
5	Jambi	67.218	32.883	48,92
6	Sumatera Selatan	153.616	113.606	73,95
7	Bengkulu	39.776	22.331	56,14
8	Lampung	165.731	87.159	52,59
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.244	17.421	61,68
10	Kepulauan Riau	40.446	11.636	28,77
11	DKI Jakarta	150.961	56.645	37,52
12	Jawa Barat	813.959	506.232	62,19
13	Jawa Tengah	505.911	253.789	50,16
14	DI Yogyakarta	44.387	23.124	52,10
15	Jawa Timur	569.073	311.991	54,82
16	Banten	199.935	147.808	73,93
17	Bali	55.929	22.661	40,52
18	Nusa Tenggara Barat	100.167	54.059	53,97
19	Nusa Tenggara Timur	126.819	59.691	47,07
20	Kalimantan Barat	106.600	50.474	47,35
21	Kalimantan Tengah	53.778	30.553	56,81
22	Kalimantan Selatan	74.421	33.814	45,44
23	Kalimantan Timur	68.839	28.503	41,41
24	Kalimantan Utara	14.210	7.863	55,33
25	Sulawesi Utara	43.357	31.362	72,33
26	Sulawesi Tengah	57.259	48.574	84,83
27	Sulawesi Selatan	166.445	108.866	65,41
28	Sulawesi Tenggara	59.033	33.510	56,76
29	Gorontalo	24.224	7.956	32,84
30	Sulawesi Barat	32.453	9.822	30,27
31	Maluku	42.230	19.784	46,85
32	Maluku Utara	26.157	1.146	4,38
33	Papua	21.600	9.063	41,96
34	Papua Barat	12.565	4.532	36,07
35	Papua Selatan	11.843	6.237	52,66
36	Papua Tengah	30.870	3.343	10,83
37	Papua Pegunungan	32.521	1.409	4,33
38	Papua Barat Daya	14.146	1.020	7,21
Indonesia		4.605.271	2.531.246	54,96

Sumber: Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, 2025

Lampiran 6.1

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK, DAN TREATMENT COVERAGE
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut)	Treatment Coverage (TC%)
					Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
					Jumlah	%	Jumlah	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	89.561	71.478	79,8	8.056	63,8	4.570	36,2	12.626	227	18.428	68,5
2	Sumatera Utara	361.086	342.152	94,8	35.296	64,5	19.466	35,5	54.762	351	74.297	73,7
3	Sumatera Barat	121.680	112.685	92,6	9.587	61,7	5.944	38,3	15.531	266	25.037	62,0
4	Riau	113.102	134.986	119,3	10.607	63,6	6.082	36,4	16.689	248	23.272	71,7
5	Jambi	58.351	48.734	83,5	4.696	59,7	3.164	40,3	7.860	211	12.006	65,5
6	Sumatera Selatan	184.080	195.586	106,3	14.757	61,5	9.222	38,5	23.979	271	37.876	63,3
7	Bengkulu	37.703	22.093	58,6	2.365	63,0	1.389	37,0	3.754	178	7.758	48,4
8	Lampung	151.849	173.898	114,5	12.380	60,8	7.995	39,2	20.375	216	31.245	65,2
9	Kep. Bangka Belitung	24.476	27.776	113,5	2.053	64,6	1.125	35,4	3.178	208	5.036	63,1
10	Kepulauan Riau	66.734	61.753	92,5	4.245	62,1	2.587	37,9	6.832	313	13.731	49,8
11	DKI Jakarta	341.452	389.440	114,1	34.016	56,5	26.220	43,5	60.236	564	70.258	85,7
12	Jawa Barat	1.138.603	1.003.117	88,1	125.747	55,4	101.160	44,6	226.907	451	234.280	96,9
13	Jawa Tengah	522.392	581.344	111,3	50.567	56,1	39.583	43,9	90.150	238	107.488	83,9
14	DI Yogyakarta	38.010	51.841	136,4	3.335	56,2	2.595	43,8	5.930	158	7.821	75,8
15	Jawa Timur	566.375	718.049	126,8	50.232	56,1	39.368	43,9	89.600	214	116.538	76,9
16	Banten	244.450	324.003	132,5	32.761	58,2	23.536	41,8	56.297	453	50.298	111,9
17	Bali	31.517	38.184	121,2	3.364	62,2	2.045	37,8	5.409	122	6.485	83,4
18	Nusa Tenggara Barat	93.216	88.823	95,3	7.198	62,2	4.378	37,8	11.576	205	19.180	60,4
19	Nusa Tenggara Timur	87.131	89.138	102,3	6.375	57,4	4.738	42,6	11.113	196	17.928	62,0
20	Kalimantan Barat	90.150	84.382	93,6	8.850	63,8	5.019	36,2	13.869	244	18.549	74,8
21	Kalimantan Tengah	37.854	43.069	113,8	3.814	63,1	2.228	36,9	6.042	215	7.789	77,6
22	Kalimantan Selatan	73.377	70.678	96,3	7.080	60,6	4.602	39,4	11.682	273	15.098	77,4
23	Kalimantan Timur	105.202	102.354	97,3	6.827	61,1	4.340	38,9	11.167	276	21.646	51,6
24	Kalimantan Utara	17.158	17.994	104,9	1.431	63,6	820	36,4	2.251	304	3.531	63,7
25	Sulawesi Utara	69.744	44.792	64,2	6.398	66,0	3.289	34,0	9.687	359	14.351	67,5
26	Sulawesi Tengah	48.920	43.342	88,6	5.256	62,4	3.163	37,6	8.419	270	10.066	83,6
27	Sulawesi Selatan	220.995	239.062	108,2	17.419	58,9	12.142	41,1	29.561	312	45.472	65,0
28	Sulawesi Tenggara	48.176	43.321	89,9	4.360	61,4	2.743	38,6	7.103	254	9.913	71,7
29	Gorontalo	33.692	39.918	118,5	3.144	58,9	2.193	41,1	5.337	435	6.932	77,0
30	Sulawesi Barat	24.547	30.842	125,6	2.393	59,3	1.644	40,7	4.037	269	5.051	79,9
31	Maluku	45.148	32.683	72,4	3.408	58,6	2.412	41,4	5.820	299	9.290	62,6
32	Maluku Utara	23.829	20.474	85,9	2.446	62,4	1.472	37,6	3.918	289	4.903	79,9
33	Papua	56.490	35.291	62,5	3.699	55,0	3.023	45,0	6.722	634	11.624	57,8
34	Papua Barat	15.813	8.329	52,7	1.553	53,3	1.361	46,7	2.914	504	3.254	89,6
35	Papua Selatan	29.675	18.785	63,3	2.586	52,1	2.374	47,9	4.960	915	6.106	81,2
36	Papua Tengah	44.602	25.056	56,2	3.700	55,2	3.001	44,8	6.701	455	9.177	73,0
37	Papua Pegunungan	27.862	2.736	9,8	1.381	58,0	1.000	42,0	2.381	162	5.733	41,5
38	Papua Barat Daya	12.400	6.575	53,0	1.179	56,0	926	44,0	2.105	336	2.551	82,5
Indonesia		5.297.400	5.384.260	101,6	504.561	58,2	362.919	41,8	867.480	307	1.090.000	79,6

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan:

*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data 2025 per 1 Maret 2026

*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.090.000 (Global TB Report 2024)

Lampiran 6.2

PERSENTASE KASUS TUBERKULOSIS SENSITIF OBAT (SO) MENDAPAT PENGOBATAN DAN CAKUPAN KONTAK SERUMAH MENDAPAT TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TPT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kasus Tuberkulosis Sensitif Obat (SO)			Kontak Serumah yang Mendapat TPT		
		Jumlah Kasus	Mendapat Pengobatan	%	Perkiraan Jumlah Kontak Serumah	Mendapat TPT	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	12.407	11.331	91,3	28.679	216	0,8
2	Sumatera Utara	53.831	49.433	91,8	112.082	10.265	9,2
3	Sumatera Barat	15.398	14.765	95,9	38.166	3.208	8,4
4	Riau	16.497	14.968	90,7	34.557	6.733	19,5
5	Jambi	7.797	7.418	95,1	17.715	560	3,2
6	Sumatera Selatan	23.677	22.218	93,8	52.680	4.687	8,9
7	Bengkulu	3.730	3.523	94,5	10.497	822	7,8
8	Lampung	20.235	19.409	95,9	38.319	3.658	9,5
9	Kep. Bangka Belitung	3.125	3.007	96,2	6.559	420	6,4
10	Kepulauan Riau	6.760	6.432	95,1	19.574	1.509	7,7
11	DKI Jakarta	59.199	54.677	92,4	69.557	11.533	16,6
12	Jawa Barat	224.355	210.269	93,7	209.027	34.519	16,5
13	Jawa Tengah	89.157	84.913	95,2	117.322	33.242	28,3
14	DI Yogyakarta	5.860	5.551	94,7	6.979	1.951	28,0
15	Jawa Timur	88.376	82.816	93,7	140.178	63.983	45,6
16	Banten	55.600	53.161	95,6	54.234	33.051	60,9
17	Bali	5.340	5.060	94,8	9.979	2.427	24,3
18	Nusa Tenggara Barat	11.519	11.228	97,5	24.946	1.228	4,9
19	Nusa Tenggara Timur	11.040	10.543	95,5	32.278	1.492	4,6
20	Kalimantan Barat	13.715	12.854	93,7	26.778	2.126	7,9
21	Kalimantan Tengah	5.986	5.425	90,6	10.264	466	4,5
22	Kalimantan Selatan	11.557	10.563	91,4	16.735	891	5,3
23	Kalimantan Timur	11.051	10.189	92,2	26.489	1.578	6,0
24	Kalimantan Utara	2.223	2.110	94,9	5.218	1.155	22,1
25	Sulawesi Utara	9.511	8.331	87,6	22.763	1.176	5,2
26	Sulawesi Tengah	8.331	7.842	94,1	15.480	1.997	12,9
27	Sulawesi Selatan	29.167	26.644	91,3	79.213	7.288	9,2
28	Sulawesi Tenggara	7.018	6.428	91,6	16.529	171	1,0
29	Gorontalo	5.244	4.652	88,7	11.045	500	4,5
30	Sulawesi Barat	4.008	3.874	96,7	8.404	792	9,4
31	Maluku	5.738	5.354	93,3	15.512	481	3,1
32	Maluku Utara	3.831	3.450	90,1	8.471	533	6,3
33	Papua	6.456	5.725	88,7	16.199	1.231	7,6
34	Papua Barat	2.841	2.575	90,6	3.820	619	16,2
35	Papua Selatan	4.929	4.539	92,1	7.264	161	2,2
36	Papua Tengah	6.619	5.728	86,5	8.605	362	4,2
37	Papua Pegunungan	2.349	1.810	77,1	3.203	1	0,0
38	Papua Barat Daya	2.044	1.967	96,2	2.751	173	6,3
Indonesia		856.521	800.782	93,5	1.328.072	237.205	17,86

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.3

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	364	316	633	632	908	558	1.276	665	1.680	877	1.679	865	1.516	657	8.056	4.570	12.626
2	Sumatera Utara	1.661	1.355	3.261	3.258	4.295	2.730	5.722	2.588	7.057	3.272	7.431	3.514	5.869	2.749	35.296	19.466	54.762
3	Sumatera Barat	1.374	1.242	823	845	1.033	754	1.187	680	1.429	801	1.682	759	2.059	863	9.587	5.944	15.531
4	Riau	796	660	1.044	1.027	1.421	975	1.787	944	2.131	1.085	1.983	847	1.445	544	10.607	6.082	16.689
5	Jambi	582	530	402	402	520	419	669	495	816	494	882	468	825	356	4.696	3.164	7.860
6	Sumatera Selatan	996	980	1.165	1.041	1.752	1.163	2.275	1.264	2.543	1.633	2.957	1.596	3.069	1.545	14.757	9.222	23.979
7	Bengkulu	209	174	178	182	275	173	317	196	347	221	480	232	559	211	2.365	1.389	3.754
8	Lampung	1.580	1.375	810	893	1.319	967	1.686	1.006	2.132	1.291	2.210	1.234	2.643	1.229	12.380	7.995	20.375
9	Kep. Bangka Belitung	241	182	187	148	246	150	330	183	357	187	321	142	371	133	2.053	1.125	3.178
10	Kepulauan Riau	365	338	620	542	727	474	693	391	779	411	633	244	428	187	4.245	2.587	6.832
11	DKI Jakarta	3.928	3.818	4.447	5.018	5.484	4.137	4.967	3.254	5.598	4.075	5.549	3.542	4.043	2.376	34.016	26.220	60.236
12	Jawa Barat	26.489	25.221	14.221	17.942	17.100	14.279	15.571	11.422	18.221	12.945	18.134	11.426	16.011	7.925	125.747	101.160	226.907
13	Jawa Tengah	8.327	8.002	4.310	5.771	5.532	4.794	6.045	4.547	7.568	5.423	9.199	5.914	9.586	5.132	50.567	39.583	90.150
14	DI Yogyakarta	734	671	362	440	365	319	348	260	441	270	509	310	576	325	3.335	2.595	5.930
15	Jawa Timur	5.567	5.408	4.877	6.092	5.225	5.159	6.197	5.005	8.641	6.535	10.056	6.384	9.669	4.785	50.232	39.368	89.600
16	Banten	4.636	4.520	3.494	3.893	5.034	3.545	5.028	3.186	5.502	3.501	5.200	3.031	3.867	1.860	32.761	23.536	56.297
17	Bali	196	128	374	339	511	416	458	297	599	314	629	292	597	259	3.364	2.045	5.409
18	Nusa Tenggara Barat	720	646	562	507	839	567	1.036	598	1.320	744	1.303	708	1.418	608	7.198	4.378	11.576
19	Nusa Tenggara Timur	445	447	753	830	883	751	836	573	920	646	1.139	698	1.399	793	6.375	4.738	11.113
20	Kalimantan Barat	927	812	915	729	1.223	696	1.390	736	1.565	830	1.481	705	1.349	511	8.850	5.019	13.869
21	Kalimantan Tengah	405	334	339	266	499	334	608	348	713	413	695	333	555	200	3.814	2.228	6.042
22	Kalimantan Selatan	818	735	521	521	759	537	951	595	1.291	803	1.481	825	1.259	586	7.080	4.602	11.682
23	Kalimantan Timur	979	866	721	717	973	703	1.060	586	1.183	619	1.037	504	874	345	6.827	4.340	11.167
24	Kalimantan Utara	191	154	149	133	170	126	227	115	244	132	250	91	200	69	1.431	820	2.251
25	Sulawesi Utara	144	137	676	506	875	475	914	462	1.291	708	1.297	529	1.201	472	6.398	3.289	9.687
26	Sulawesi Tengah	255	232	587	522	822	443	831	424	966	637	960	520	835	385	5.256	3.163	8.419
27	Sulawesi Selatan	994	898	1.752	1.808	2.231	1.640	2.423	1.610	3.270	2.244	3.543	2.185	3.206	1.757	17.419	12.142	29.561
28	Sulawesi Tenggara	230	233	521	525	684	413	644	409	787	446	798	428	696	289	4.360	2.743	7.103
29	Gorontalo	116	94	411	386	423	302	446	274	650	457	616	409	482	271	3.144	2.193	5.337
30	Sulawesi Barat	111	106	275	278	328	235	326	233	457	287	445	288	451	217	2.393	1.644	4.037
31	Maluku	254	271	539	515	631	448	546	333	529	363	481	277	428	205	3.408	2.412	5.820
32	Maluku Utara	101	108	437	335	463	262	382	219	383	223	380	186	300	139	2.446	1.472	3.918
33	Papua	438	434	796	797	832	738	564	421	433	305	390	201	246	127	3.699	3.023	6.722
34	Papua Barat	224	243	283	345	304	272	242	195	203	113	177	120	120	73	1.553	1.361	2.914
35	Papua Selatan	575	609	600	654	410	428	382	295	309	194	204	129	106	65	2.586	2.374	4.960
36	Papua Tengah	763	712	761	695	669	518	574	465	498	313	276	202	159	96	3.700	3.001	6.701
37	Papua Pegunungan	291	234	244	232	318	190	235	169	179	100	90	58	24	17	1.381	1.000	2.381
38	Papua Barat Daya	104	130	195	203	246	199	170	124	184	110	143	86	137	74	1.179	926	2.105
Indonesia		67.130	63.355	53.245	59.969	66.329	51.289	69.343	45.567	83.216	54.022	86.720	50.282	78.578	38.435	504.561	362.919	867.480
		15,0%		13,1%		13,6%		13,2%		15,8%		15,8%		13,5%		100,0%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
) Data 2025 per 1 Maret 2026
) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.090.000 (Global TB Report 2024)

Lampiran 6.4

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	45	49	371	353	589	345	906	439	1.182	580	1.151	518	988	361	5.232	2.645	7.877
2	Sumatera Utara	363	284	1.838	1.830	2.752	1.695	3.814	1.679	4.723	2.061	4.749	2.216	3.436	1.474	21.675	11.239	32.914
3	Sumatera Barat	83	94	546	518	775	485	920	473	1.140	573	1.319	537	1.531	567	6.314	3.247	9.561
4	Riau	121	93	701	627	1.021	589	1.362	597	1.582	736	1.408	543	934	300	7.129	3.485	10.614
5	Jambi	64	52	267	246	359	261	492	345	578	334	602	293	520	220	2.882	1.751	4.633
6	Sumatera Selatan	185	155	776	666	1.181	748	1.495	839	1.681	1.059	1.887	945	1.796	853	9.001	5.265	14.266
7	Bengkulu	28	25	116	117	182	111	219	140	233	153	321	147	370	130	1.469	823	2.292
8	Lampung	138	107	445	492	783	538	1.008	530	1.224	684	1.268	690	1.340	558	6.206	3.599	9.805
9	Kep. Bangka Belitung	18	9	121	95	170	88	246	130	257	116	207	82	207	67	1.226	587	1.813
10	Kepulauan Riau	43	44	449	388	492	298	494	260	549	259	436	153	254	118	2.717	1.520	4.237
11	DKI Jakarta	253	393	2.687	2.719	3.287	2.142	3.175	1.771	3.544	2.158	3.239	1.729	1.996	891	18.181	11.803	29.984
12	Jawa Barat	824	1.122	7.474	8.720	9.798	6.894	9.194	5.840	10.453	6.474	9.535	5.258	7.130	3.052	54.408	37.360	91.768
13	Jawa Tengah	322	388	2.515	3.416	3.517	2.704	3.974	2.669	4.906	3.055	5.360	2.948	4.777	1.992	25.371	17.172	42.543
14	DI Yogyakarta	40	36	219	257	208	172	253	156	301	133	309	160	323	128	1.653	1.042	2.695
15	Jawa Timur	324	454	2.938	3.486	3.407	2.855	4.291	3.060	6.133	4.262	6.789	3.817	5.799	2.387	29.681	20.321	50.002
16	Banten	187	262	1.950	1.976	3.145	1.860	3.159	1.752	3.291	1.819	2.904	1.483	1.933	789	16.569	9.941	26.510
17	Bali	23	18	256	209	357	254	304	181	419	203	446	166	393	146	2.198	1.177	3.375
18	Nusa Tenggara Barat	49	52	385	291	575	343	768	409	982	546	951	480	940	323	4.650	2.444	7.094
19	Nusa Tenggara Timur	76	86	509	556	565	504	548	383	591	369	664	360	721	345	3.674	2.603	6.277
20	Kalimantan Barat	89	80	692	510	922	502	1.072	546	1.169	628	1.089	505	916	321	5.949	3.092	9.041
21	Kalimantan Tengah	37	43	245	181	374	233	470	255	544	294	456	213	340	102	2.466	1.321	3.787
22	Kalimantan Selatan	51	51	317	302	484	289	623	351	802	457	834	385	611	204	3.722	2.039	5.761
23	Kalimantan Timur	53	48	463	383	652	379	721	354	785	402	704	294	513	171	3.891	2.031	5.922
24	Kalimantan Utara	10	8	98	83	120	78	174	79	180	102	187	61	151	44	920	455	1.375
25	Sulawesi Utara	47	41	447	340	599	322	649	320	964	488	913	362	760	249	4.379	2.122	6.501
26	Sulawesi Tengah	48	50	411	360	561	314	579	322	710	420	587	289	450	186	3.346	1.941	5.287
27	Sulawesi Selatan	147	121	1.182	1.153	1.545	1.092	1.721	1.090	2.234	1.471	2.278	1.265	1.909	860	11.016	7.052	18.068
28	Sulawesi Tenggara	39	39	368	347	502	289	471	275	548	298	493	267	408	146	2.829	1.661	4.490
29	Gorontalo	36	30	321	308	337	252	366	216	504	352	441	275	343	139	2.348	1.572	3.920
30	Sulawesi Barat	15	18	203	199	254	181	228	170	315	169	275	147	240	95	1.530	979	2.509
31	Maluku	42	48	386	332	447	315	401	231	374	249	325	169	275	122	2.250	1.466	3.716
32	Maluku Utara	24	30	358	268	366	213	301	173	304	162	280	140	201	80	1.834	1.066	2.900
33	Papua	94	100	570	556	563	463	358	259	270	184	244	92	140	62	2.239	1.716	3.955
34	Papua Barat	39	46	186	234	194	172	152	114	129	54	90	53	61	26	851	699	1.550
35	Papua Selatan	115	129	361	369	237	220	215	142	144	80	94	53	37	26	1.203	1.019	2.222
36	Papua Tengah	151	159	488	444	413	311	325	231	259	140	137	90	51	26	1.824	1.401	3.225
37	Papua Pegunungan	64	39	124	128	178	92	126	85	92	54	36	27	8	4	628	429	1.057
38	Papua Barat Daya	16	23	129	129	169	120	110	77	111	63	66	35	57	25	658	472	1.130
Indonesia		4.303	4.826	31.912	33.588	42.080	28.723	45.684	26.943	54.207	31.641	53.074	27.247	42.859	17.589	274.119	170.557	444.676
		2,1%		14,7%		15,9%		16,3%		19,3%		18,1%		13,6%		100,0%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
) Data 2025 per 1 Maret 2026
) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.090.000 (Global TB Report 2024)

Lampiran 6.5

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Diobati dan Dilaporkan ¹⁾			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Dilaporkan ¹⁾			Angka Kesembuhan (<i>Cure Rate</i>) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap (<i>Complete Rate</i>) Semua Kasus Tuberkulosis						Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Success Rate/SR</i>) Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Aceh	4.558	2.323	6.881	7.296	4.189	11.485	1.119	24,6	616	26,5	1.735	25,2	4.912	67,3	2.923	69,8	7.835	68,2	6.031	82,7	3.539	84,5	9.570	83,3	6.031	52,5
2	Sumatera Utara	16.615	8.157	24.772	29.644	16.238	45.882	6.761	40,7	3.357	41,2	10.118	40,8	16.742	56,5	9.782	60,2	26.524	57,8	23.503	79,3	13.139	80,9	36.642	79,9	23.503	51,2
3	Sumatera Barat	5.633	3.037	8.670	8.869	5.903	14.772	2.859	50,8	1.722	56,7	4.581	52,8	4.654	52,5	3.547	60,1	8.201	55,5	7.513	84,7	5.269	89,3	12.782	86,5	7.513	50,9
4	Riau	6.114	2.982	9.096	9.822	5.671	15.493	2.432	39,8	1.199	40,2	3.631	39,9	5.979	60,9	3.770	66,5	9.749	62,9	8.411	85,6	4.969	87,6	13.380	86,4	8.411	54,3
5	Jambi	2.628	1.570	4.198	4.266	2.891	7.157	1.282	48,8	858	54,6	2.140	51,0	2.353	55,2	1.708	59,1	4.061	56,7	3.635	85,2	2.566	88,8	6.201	86,6	3.635	50,8
6	Sumatera Selatan	7.879	4.332	12.211	13.571	8.048	21.619	2.857	36,3	1.605	37,0	4.462	36,5	9.176	67,6	5.692	70,7	14.868	68,8	12.033	88,7	7.297	90,7	19.330	89,4	12.033	55,7
7	Bengkulu	1.138	587	1.725	1.955	1.154	3.109	297	26,1	170	29,0	467	27,1	1.161	59,4	744	64,5	1.905	61,3	1.458	74,6	914	79,2	2.372	76,3	1.458	46,9
8	Lampung	5.692	3.392	9.084	10.672	7.265	17.937	2.856	50,2	1.713	50,5	4.569	50,3	6.834	64,0	5.021	69,1	11.855	66,1	9.690	90,8	6.734	92,7	16.424	91,6	9.690	54,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.079	545	1.624	1.853	1.118	2.971	600	55,6	330	60,6	930	57,3	941	50,8	664	59,4	1.605	54,0	1.541	83,2	994	88,9	2.535	85,3	1.541	51,9
10	Kepulauan Riau	2.624	1.457	4.081	4.077	2.682	6.759	1.160	44,2	669	45,9	1.829	44,8	2.129	52,2	1.575	58,7	3.704	54,8	3.289	80,7	2.244	83,7	5.533	81,9	3.289	48,7
11	DKI Jakarta	15.659	9.990	25.649	32.378	25.693	58.071	6.018	38,4	4.122	41,3	10.140	39,5	18.694	57,7	16.517	64,3	35.211	60,6	24.712	76,3	20.639	80,3	45.351	78,1	24.712	42,6
12	Jawa Barat	47.294	33.240	80.534	114.206	94.048	208.254	18.658	39,5	14.010	42,1	32.668	40,6	78.543	68,8	68.976	73,3	147.519	70,8	97.201	85,1	82.986	88,2	180.187	86,5	97.201	46,7
13	Jawa Tengah	23.132	15.926	39.058	47.503	37.905	85.408	12.114	52,4	9.125	57,3	21.239	54,4	27.848	58,6	24.063	63,5	51.911	60,8	39.962	84,1	33.188	87,6	73.150	85,6	39.962	46,8
14	DI Yogyakarta	1.395	820	2.215	3.380	2.701	6.081	627	44,9	399	48,7	1.026	46,3	2.181	64,5	1.978	73,2	4.159	68,4	2.808	83,1	2.377	88,0	5.185	85,3	2.808	46,2
15	Jawa Timur	26.704	18.333	45.037	45.441	36.357	81.798	15.820	59,2	11.560	63,1	27.380	60,8	23.559	51,8	21.257	58,5	44.816	54,8	39.379	86,7	32.817	90,3	72.196	88,3	39.379	48,1
16	Banten	14.092	8.568	22.660	30.407	22.416	52.823	5.560	39,5	3.529	41,2	9.089	40,1	21.931	72,1	17.142	76,5	39.073	74,0	27.491	90,4	20.671	92,2	48.162	91,2	27.491	52,0
17	Bali	1.933	1.060	2.993	3.044	1.977	5.021	1.199	62,0	730	68,9	1.929	64,5	1.211	39,8	959	48,5	2.170	43,2	2.410	79,2	1.689	85,4	4.099	81,6	2.410	48,0
18	Nusa Tenggara Barat	4.247	2.436	6.683	6.581	4.174	10.755	2.518	59,3	1.520	62,4	4.038	60,4	3.190	48,5	2.182	52,3	5.372	49,9	5.708	86,7	3.887	88,7	9.410	87,5	5.708	53,1
19	Nusa Tenggara Timur	3.226	2.187	5.413	5.511	3.896	9.407	1.321	40,9	911	41,7	2.232	41,2	3.352	60,8	2.503	64,2	5.855	62,2	4.673	84,8	3.414	87,6	8.087	86,0	4.673	49,7
20	Kalimantan Barat	5.026	2.617	7.643	8.085	4.714	12.799	2.051	40,8	1.076	41,1	3.127	40,9	4.799	59,4	3.068	65,1	7.867	61,5	6.850	84,7	4.144	87,9	10.994	85,9	6.850	53,5
21	Kalimantan Tengah	1.970	1.002	2.972	3.270	1.952	5.222	742	37,7	424	42,3	1.166	39,2	1.739	53,2	1.112	57,0	2.851	54,6	2.481	75,9	1.536	78,7	4.017	76,9	2.481	47,5
22	Kalimantan Selatan	3.278	1.765	5.043	6.751	4.513	11.264	1.419	43,3	866	49,1	2.285	45,3	3.777	55,9	2.809	62,2	6.586	58,5	5.196	77,0	3.675	81,4	8.871	78,8	5.196	46,1
23	Kalimantan Timur	3.407	1.775	5.182	6.283	4.123	10.406	1.426	41,9	820	46,2	2.246	43,3	3.709	59,0	2.702	65,5	6.411	61,6	5.135	81,7	3.522	85,4	8.657	83,2	5.135	49,3
24	Kalimantan Utara	864	418	1.282	1.216	714	1.930	309	35,8	157	37,6	466	36,3	551	45,3	362	50,7	913	47,3	860	70,7	519	72,7	1.379	71,5	860	44,6
25	Sulawesi Utara	4.264	2.172	6.436	5.532	2.896	8.428	1.478	34,7	798	36,7	2.276	35,4	2.965	53,6	1.685	58,2	4.650	55,2	4.443	80,3	2.483	85,7	6.926	82,2	4.443	52,7
26	Sulawesi Tengah	3.124	1.867	4.991	4.851	3.117	7.968	839	26,9	496	26,6	1.335	26,7	3.037	62,6	2.089	67,0	5.126	64,3	3.876	79,9	2.585	82,9	6.461	81,1	3.876	48,6
27	Sulawesi Selatan	10.564	7.147	17.711	15.182	10.761	25.943	5.072	48,0	3.609	50,5	8.681	49,0	7.444	49,0	5.648	52,5	13.092	50,5	12.516	82,4	9.257	86,0	21.773	83,9	12.516	48,2
28	Sulawesi Tenggara	2.331	1.443	3.774	3.656	2.368	6.024	1.025	44,0	650	45,0	1.675	44,4	1.961	53,6	1.334	56,3	3.295	54,7	2.986	81,7	1.984	83,8	4.970	82,5	2.986	49,6
29	Gorontalo	1.774	1.255	3.029	2.554	1.903	4.457	749	42,2	578	46,1	1.327	43,8	1.467	57,4	1.151	60,5	2.618	58,7	2.216	86,8	1.729	90,9	3.945	88,5	2.216	49,7
30	Sulawesi Barat	1.485	995	2.480	2.202	1.636	3.838	687	50,0	496	49,8	1.239	50,0	1.157	52,5	963	58,9	2.120	55,2	1.900	86,3	1.459	89,2	3.359	87,5	1.900	49,5
31	Maluku	1.881	1.260	3.141	2.930	2.055	4.985	574	30,5	359	28,5	933	29,7	1.916	65,4	1.447	70,4	3.363	67,5	2.490	85,0	1.806	87,9	4.296	86,2	2.490	49,9
32	Maluku Utara	1.454	847	2.301	2.050	1.255	3.305	420	28,9	248	29,3	668	29,0	1.075	52,4	746	59,4	1.821	55,1	1.495	72,9	994	79,2	2.489	75,3	1.495	45,2
33	Papua	1.618	1.380	2.998	3.082	2.675	5.757	687	42,5	624	45,2	1.311	43,7	1.668	54,1	1.509	56,4	3.177	55,2	2.355	76,4	2.133	79,7	4.488	78,0	2.355	40,9
34	Papua Barat	743	551	1.294	1.413	1.165	2.578	258	34,7	198	35,9	456	35,2	773	54,7	680	58,4	1.453	56,4	1.031	73,0	878	75,4	1.909	74,0	1.031	40,0
35	Papua Selatan	1.032	856	1.888	2.211	2.140	4.351	404	39,1	356	41,6	760	40,3	1.328	60,1	1.394	65,1	2.722	62,6	1.732	78,3	1.750	81,8	3.482	80,0	1.732	39,8
36	Papua Tengah	1.306	966	2.272	2.906	2.413	5.319	529	40,5	406	42,0	935	41,2	1.639	56,4	1.507	62,5	3.146	59,1	2.168	74,6	1.913	79,3	4.081	76,7	2.168	40,8
37	Papua Pegunungan	246	149	395	725	532	1.257	60	24,4	32	21,5	92	23,3	342	47,2	268	50,4	610	48,5	402	55,4	300	56,4	702	55,8	402	32,0
38	Papua Barat Daya	498	327	825	971	739	1.710	163	32,7	120	36,7	283	34,3	474	48,8	386	52,2	860	50,3	637	65,6	506	68,5	1.143	66,8	637	37,3
Indonesia		238.507	149.734	388.241	456.346	335.997	792.343	105.006	44,0	70.458	47,1	175.464	45,2	277.211	60,7	221.863	66,0	499.074	63,0	382.217	83,8	292.321	87,0	674.538	85,1	382.217	48,2

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemkes RI, 2026

Keterangan:

¹⁾ Kasus Tuberkulosis terdapat dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang diemikan di RS, BSKPM/BPKPM/BPA, Lembaga Pemasarakan,

Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

²⁾ Data Hasil Pengobatan TBC Kohort Tahun 2024 per 1 Maret 2026

Lampiran 6.6

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Balita	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita												Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia								Kasus Pneumonia yang mendapatkan antibiotik	Persentase Kasus Pneumonia yang mendapatkan pengobatan sesuai standar	
				Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah				%	Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia				Total					CFR (%)
				< 1 Tahun		1-<5 tahun		< 1 Tahun		1-<5 tahun		L	P	L+P	< 1 Tahun		1-<5 tahun		L	P	L+P					
				L	P	L	P	L	P	L	P				L		P	L				P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	Aceh	509.498	22.724	403	286	1.254	1.000	75	57	124	97	1.856	1.440	3.296	14,50	0	0	0	1	0	1	1	0,03	858	26,03	
2	Sumatera Utara	1.436.728	42.958	867	715	1.966	1.640	175	102	244	185	3.252	2.642	5.894	13,72	9	6	3	3	12	9	21	0,36	5.878	99,73	
3	Sumatera Barat	525.306	20.539	1.576	1.114	3.529	2.902	52	41	69	53	5.226	4.110	9.336	45,45	2	0	1	0	3	0	3	0,03	9.336	100,00	
4	Riau	584.347	15.602	190	116	487	370	33	11	50	69	760	566	1.326	8,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.264	95,32	
5	Jambi	324.317	10.216	256	202	398	304	11	4	3	5	668	515	1.183	11,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.094	92,48	
6	Sumatera Selatan	727.323	26.256	1.157	1.161	3.176	2.825	240	211	400	400	4.973	4.597	9.570	36,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.540	89,24	
7	Bengkulu	184.995	3.700	397	386	378	244	8	5	55	46	838	681	1.519	41,05	2	0	0	0	2	0	2	0,13	446	29,36	
8	Lampung	796.362	17.759	1.336	1.074	3.027	2.740	247	162	282	269	4.892	4.245	9.137	51,45	1	0	0	0	1	0	1	0,01	8.992	98,41	
9	Kep. Bangka Belitung	131.783	7.973	307	290	888	728	36	24	39	28	1.270	1.070	2.340	29,35	1	0	0	0	1	0	1	0,04	2.305	98,50	
10	Kepulauan Riau	193.573	7.704	178	117	382	310	7	6	7	5	574	438	1.012	13,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	982	97,04	
11	DKI Jakarta	724.371	30.713	7.717	5.641	15.479	13.496	124	47	71	48	23.391	19.232	42.623	138,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42.623	100,00	
12	Jawa Barat	3.983.453	184.036	21.887	18.095	43.898	39.550	2.385	1.743	4.147	3.760	72.317	63.148	135.465	73,61	17	16	12	16	29	32	61	0,05	133.932	98,87	
13	Jawa Tengah	2.848.978	102.848	10.873	8.947	34.429	29.946	1.008	724	2.183	1.762	48.493	41.379	89.872	87,38	21	16	16	16	12	37	28	65	0,07	88.013	97,93
14	DI Yogyakarta	241.352	10.426	2.499	1.679	5.870	4.483	1.686	1.194	2.866	2.067	12.921	9.423	22.344	214,31	4	5	5	1	9	6	15	0,07	19.051	85,26	
15	Jawa Timur	2.936.228	130.662	12.017	12.026	35.858	32.928	288	237	269	206	48.432	45.397	93.829	71,81	16	3	62	11	78	14	92	0,10	93.829	100,00	
16	Banten	969.232	39.932	4.793	4.303	11.264	10.101	189	136	300	240	16.546	14.780	31.326	78,45	1	0	0	0	1	0	1	0,00	30.926	98,72	
17	Bali	324.623	6.655	526	297	1.034	800	28	19	23	22	1.611	1.138	2.749	41,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.680	97,49	
18	Nusa Tenggara Barat	514.661	32.835	3.764	3.021	6.531	5.801	508	354	791	687	11.594	9.863	21.457	65,35	2	1	0	0	2	1	3	0,01	21.384	99,66	
19	Nusa Tenggara Timur	578.002	24.738	1.156	877	1.373	1.266	118	102	131	134	2.778	2.379	5.157	20,85	2	0	0	0	2	0	2	0,04	5.157	100,00	
20	Kalimantan Barat	502.827	10.660	488	319	626	566	56	49	37	44	1.207	978	2.185	20,50	10	9	4	1	14	10	24	1,10	2.039	93,32	
21	Kalimantan Tengah	253.540	11.080	333	193	522	408	103	79	150	142	1.108	822	1.930	17,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.698	87,98	
22	Kalimantan Selatan	362.691	20.057	2.646	2.109	5.184	4.321	482	412	503	520	8.815	7.362	16.177	80,66	2	0	1	0	3	0	3	0,02	15.889	98,22	
23	Kalimantan Timur	336.541	9.625	809	600	1.933	1.453	24	23	56	46	2.822	2.122	4.944	51,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.569	92,42	
24	Kalimantan Utara	66.556	1.904	272	188	591	417	7	4	19	17	889	626	1.515	79,57	0	0	2	0	2	0	2	0,13	1.488	98,22	
25	Sulawesi Utara	201.744	5.407	31	23	66	44	-	2	-	-	97	69	166	3,07	1	0	0	0	1	0	1	0,60	164	98,80	
26	Sulawesi Tengah	267.554	13.886	1.388	1.011	2.905	2.330	157	104	268	231	4.718	3.676	8.394	60,45	0	1	0	0	0	1	1	0,01	7.773	92,60	
27	Sulawesi Selatan	806.093	30.551	1.604	1.099	3.889	2.899	577	400	1.202	903	7.272	5.301	12.573	41,15	9	6	4	3	13	9	22	0,17	11.822	94,03	
28	Sulawesi Tenggara	271.765	10.436	345	244	700	572	14	8	26	16	1.085	840	1.925	18,45	0	0	0	1	0	1	1	0,05	1.797	93,35	
29	Gorontalo	109.411	5.295	491	372	1.041	840	59	33	55	59	1.646	1.304	2.950	55,71	1	0	0	0	1	0	1	0,03	2.880	97,63	
30	Sulawesi Barat	147.548	7.200	178	100	341	289	17	9	23	19	559	417	976	13,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	616	63,11	
31	Maluku	188.446	7.048	227	174	409	361	7	6	10	7	653	548	1.201	17,04	2	1	0	1	2	2	4	0,33	1.166	97,09	
32	Maluku Utara	124.408	2.849	192	170	372	320	10	4	6	10	580	504	1.084	38,05	0	1	0	0	0	1	1	0,09	1.036	95,57	
33	Papua	100.734	2.821	199	178	276	207	34	36	39	51	548	472	1.020	36,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	588	57,65	
34	Papua Barat	58.153	1.675	125	84	256	212	7	4	5	3	393	303	696	41,55	2	0	0	3	2	3	5	0,72	688	98,85	
35	Papua Selatan	55.214	1.546	335	244	359	285	69	49	81	76	844	654	1.498	96,90	1	4	2	1	3	5	8	0,53	983	65,62	
36	Papua Tengah	150.323	4.209	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
37	Papua Pegunungan	148.122	4.147	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
38	Papua Barat Daya	65.767	1.841	69	56	132	114	5	1	3	6	209	177	386	0,00	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	386	N/A
Indonesia		22.752.569	890.513	81.631	67.511	190.823	167.072	8.846	6.402	14.537	12.233	295.837	253.218	549.055	61,66	106	69	112	54	218	123	341	0,06	532.872	97,05	

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Keterangan: N/A : tidak ada pelaporan data

Lampiran 6.7

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (Tes HIV)
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2	5	2	17	3	58	6	188	35	15	5	285	53	338	114.959
2	Sumatera Utara	16	15	12	8	161	20	517	56	1.571	376	214	75	2.491	550	3.041	368.076
3	Sumatera Barat	1	-	1	1	17	2	109	4	351	57	26	9	505	73	578	124.714
4	Riau	4	2	1	1	45	5	203	13	520	139	70	28	843	188	1.031	199.120
5	Jambi	2	5	1	2	16	3	47	8	161	49	20	12	247	79	326	71.407
6	Sumatera Selatan	5	1	2	4	45	9	169	22	456	135	56	23	733	194	927	214.518
7	Bengkulu	-	-	2	-	11	3	43	3	100	21	7	7	163	34	197	50.609
8	Lampung	3	7	4	4	48	13	204	29	551	172	75	24	885	249	1.134	168.642
9	Kep. Bangka Belitung	1	2	1	1	12	-	53	13	130	44	17	8	214	68	282	39.210
10	Kepulauan Riau	2	2	5	2	42	5	132	22	434	136	57	28	672	195	867	84.163
11	DKI Jakarta	10	11	10	16	161	38	763	83	2.320	554	272	115	3.536	817	4.353	612.919
12	Jawa Barat	45	45	36	42	419	106	1.559	290	4.331	1.611	505	223	6.895	2.317	9.212	1.310.119
13	Jawa Tengah	16	22	19	26	245	52	714	149	2.447	1.140	820	407	4.261	1.796	6.057	1.053.498
14	DI Yogyakarta	1	5	2	1	60	-	215	16	397	96	108	43	783	161	944	100.201
15	Jawa Timur	44	51	38	39	302	88	1.062	380	3.964	2.465	1.425	754	6.835	3.777	10.612	1.067.641
16	Banten	6	12	7	5	106	20	397	51	1.161	339	131	54	1.808	481	2.289	405.309
17	Bali	3	3	8	2	49	26	297	95	874	378	181	108	1.412	612	2.024	108.398
18	Nusa Tenggara Barat	6	4	3	-	29	10	110	17	342	113	27	13	517	157	674	170.882
19	Nusa Tenggara Timur	12	3	6	6	32	23	153	73	563	268	71	39	837	412	1.249	115.023
20	Kalimantan Barat	8	4	7	3	41	15	168	38	518	182	86	43	828	285	1.113	122.361
21	Kalimantan Tengah	6	3	1	1	17	8	61	25	204	95	44	20	333	152	485	57.643
22	Kalimantan Selatan	5	1	2	6	21	7	101	30	307	114	50	18	486	176	662	137.235
23	Kalimantan Timur	5	6	3	4	66	27	164	63	549	281	93	33	880	414	1.294	166.844
24	Kalimantan Utara	3	1	-	1	6	3	34	14	95	34	14	3	152	56	208	28.149
25	Sulawesi Utara	3	4	3	4	75	16	206	26	316	89	47	23	650	162	812	47.832
26	Sulawesi Tengah	2	1	2	2	41	10	147	29	371	83	34	10	597	135	732	60.828
27	Sulawesi Selatan	4	6	5	9	155	23	463	45	922	193	108	21	1.657	297	1.954	213.562
28	Sulawesi Tenggara	2	7	3	1	44	14	121	19	287	63	25	14	482	118	600	69.426
29	Gorontalo	-	-	2	-	16	4	68	2	113	15	11	4	210	25	235	35.999
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	7	3	28	5	68	12	5	2	108	22	130	30.326
31	Maluku	5	6	3	3	40	23	132	61	251	153	40	17	471	263	734	47.166
32	Maluku Utara	4	5	-	2	33	31	129	57	277	109	19	9	462	213	675	41.466
33	Papua	37	29	12	21	68	195	261	495	795	928	94	62	1.267	1.730	2.997	70.389
34	Papua Barat	17	10	1	4	32	68	111	193	284	315	39	25	484	615	1.099	36.069
35	Papua Selatan	3	1	-	-	9	23	37	35	83	86	15	3	147	148	295	47.154
36	Papua Tengah	16	16	7	32	77	266	231	312	534	492	41	33	906	1.151	2.057	76.012
37	Papua Pegunungan	2	4	1	8	9	53	35	79	172	168	13	7	232	319	551	7.118
38	Papua Barat Daya	4	4	4	3	16	35	43	80	162	146	22	10	251	278	529	21.286
Indonesia		305	300	219	266	2.590	1.250	9.345	2.938	27.169	11.686	4.897	2.332	44.525	18.772	63.297	7.696.273
		1,0%		0,8%		6,1%		19,4%		61,4%		11,4%		100%			

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
Data per 20 Januari 2026

Lampiran 6.8

JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	279	352	338
2	Sumatera Utara	3.105	3.250	3.041
3	Sumatera Barat	579	654	578
4	Riau	914	1.007	1.031
5	Jambi	261	313	326
6	Sumatera Selatan	813	986	927
7	Bengkulu	176	173	197
8	Lampung	889	1.220	1.134
9	Kepulauan Bangka Belitung	248	277	282
10	Kepulauan Riau	930	949	867
11	DKI Jakarta	5.569	5.027	4.353
12	Jawa Barat	7.953	9.893	9.212
13	Jawa Tengah	5.142	6.191	6.057
14	DI Yogyakarta	905	928	944
15	Jawa Timur	9.500	10.460	10.612
16	Banten	2.251	2.434	2.289
17	Bali	2.799	1.998	2.024
18	Nusa Tenggara Barat	504	627	674
19	Nusa Tenggara Timur	1.201	1.255	1.249
20	Kalimantan Barat	1.184	1.309	1.113
21	Kalimantan Tengah	494	485	485
22	Kalimantan Selatan	723	674	662
23	Kalimantan Timur	1.172	1.375	1.294
24	Kalimantan Utara	199	209	208
25	Sulawesi Utara	632	869	812
26	Sulawesi Tengah	217	705	732
27	Sulawesi Selatan	1.823	2.120	1.954
28	Sulawesi Tenggara	389	646	600
29	Gorontalo	124	277	235
30	Sulawesi Barat	75	134	130
31	Maluku	467	861	734
32	Maluku Utara	242	592	675
33	Papua	2.074	2.275	2.997
34	Papua Barat	933	827	1.099
35	Papua Selatan	159	194	295
36	Papua Tengah	1.575	1.311	2.057
37	Papua Pegunungan	456	559	551
38	Papua Barat Daya	343	291	529
Indonesia		57.299	63.707	63.297

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Data per 20 Januari 2026

Lampiran 6.9

PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	ODHIV Baru Ditemukan	ODHIV Baru Ditemukan dan Mendapatkan Pengobatan ARV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	338	268	79,3
2	Sumatera Utara	3.041	2.669	87,8
3	Sumatera Barat	578	504	87,2
4	Riau	1.031	831	80,6
5	Jambi	326	279	85,6
6	Sumatera Selatan	927	773	83,4
7	Bengkulu	197	172	87,3
8	Lampung	1.134	946	83,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	282	231	81,9
10	Kepulauan Riau	867	746	86,0
11	DKI Jakarta	4.353	3.816	87,7
12	Jawa Barat	9.212	6.900	74,9
13	Jawa Tengah	6.057	5.069	83,7
14	DI Yogyakarta	944	815	86,3
15	Jawa Timur	10.612	8.238	77,6
16	Banten	2.289	1.868	81,6
17	Bali	2.024	1.697	83,8
18	Nusa Tenggara Barat	674	562	83,4
19	Nusa Tenggara Timur	1.249	1.050	84,1
20	Kalimantan Barat	1.113	893	80,2
21	Kalimantan Tengah	485	390	80,4
22	Kalimantan Selatan	662	527	79,6
23	Kalimantan Timur	1.294	1.073	82,9
24	Kalimantan Utara	208	172	82,7
25	Sulawesi Utara	812	694	85,5
26	Sulawesi Tengah	732	601	82,1
27	Sulawesi Selatan	1.954	1.766	90,4
28	Sulawesi Tenggara	600	541	90,2
29	Gorontalo	235	212	90,2
30	Sulawesi Barat	130	114	87,7
31	Maluku	734	467	63,6
32	Maluku Utara	675	481	71,3
33	Papua	2.997	1.779	59,4
34	Papua Barat	1.099	803	73,1
35	Papua Selatan	295	192	65,1
36	Papua Tengah	2.057	1.357	66,0
37	Papua Pegunungan	551	469	85,1
38	Papua Barat Daya	529	365	69,0
Indonesia		63.297	50.330	79,5

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Data per 20 Januari 2026

Lampiran 6.10

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)														
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	1	0	1	1	3	2	17	1	70	11	9	1	101	16	117
2	Sumatera Utara	6	5	5	2	45	4	178	13	735	141	122	42	1.091	207	1.298
3	Sumatera Barat	0	0	1	1	3	1	24	1	163	17	15	3	206	23	229
4	Riau	1	0	0	1	12	1	56	1	204	33	34	11	307	47	354
5	Jambi	1	2	1	2	3	2	12	4	58	17	10	3	85	30	115
6	Sumatera Selatan	1	1	0	3	11	2	42	1	192	46	19	9	265	62	327
7	Bengkulu	0	0	2	0	2	0	8	1	30	3	3	5	45	9	54
8	Lampung	0	1	4	3	10	3	54	5	204	43	36	6	308	61	369
9	Kep. Bangka Belitung	1	2	1	1	1	0	9	1	41	13	6	3	59	20	79
10	Kepulauan Riau	0	0	5	1	8	2	40	1	153	44	34	16	240	64	304
11	DKI Jakarta	4	8	7	10	45	3	185	17	908	262	167	82	1.316	382	1.698
12	Jawa Barat	18	13	15	19	88	13	374	43	1.594	459	207	83	2.296	630	2.926
13	Jawa Tengah	6	4	9	10	37	8	146	29	967	299	394	170	1.559	520	2.079
14	DI Yogyakarta	0	2	0	1	3	0	21	0	120	19	49	11	193	33	226
15	Jawa Timur	19	20	14	19	70	10	261	55	1.602	678	692	301	2.658	1.083	3.741
16	Banten	3	5	1	2	22	3	89	9	415	109	58	21	588	149	737
17	Bali	1	1	2	2	13	5	71	18	318	125	116	63	521	214	735
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	7	1	23	3	118	20	12	6	161	30	191
19	Nusa Tenggara Timur	7	1	4	2	10	3	47	16	220	69	32	14	320	105	425
20	Kalimantan Barat	3	2	3	2	12	1	55	5	194	49	44	16	311	75	386
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	0	2	2	11	3	87	29	24	7	126	41	167
22	Kalimantan Selatan	3	1	1	2	2	1	23	2	127	39	31	4	187	49	236
23	Kalimantan Timur	1	2	2	2	12	1	31	4	155	67	25	11	226	87	313
24	Kalimantan Utara	1	0	0	1	1	0	7	3	31	6	10	0	50	10	60
25	Sulawesi Utara	3	3	1	3	20	0	57	8	126	29	21	13	228	56	284
26	Sulawesi Tengah	0	1	2	0	4	1	41	9	136	23	19	4	202	38	240
27	Sulawesi Selatan	0	3	2	3	24	3	123	5	411	65	60	9	620	88	708
28	Sulawesi Tenggara	2	2	3	1	13	3	43	3	108	20	15	5	184	34	218
29	Gorontalo	0	0	1	0	2	0	22	0	38	4	5	0	68	4	72
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	11	0	25	2	3	1	40	3	43
31	Maluku	0	0	0	1	9	4	37	10	77	30	11	4	134	49	183
32	Maluku Utara	2	1	0	1	10	7	27	17	88	39	16	5	143	70	213
33	Papua	17	11	7	9	22	55	84	126	284	245	30	26	444	472	916
34	Papua Barat	10	8	0	3	10	22	37	59	105	91	12	8	174	191	365
35	Papua Selatan	1	0	0	0	1	7	11	11	43	33	2	0	58	51	109
36	Papua Tengah	9	10	4	9	28	105	100	111	231	175	16	17	388	427	815
37	Papua Pegunungan	1	0	0	5	2	24	19	35	91	89	7	3	120	156	276
38	Papua Barat Daya	1	0	1	0	2	2	13	15	69	48	10	3	96	68	164
Indonesia		125	109	100	122	570	301	2.409	645	10.538	3.491	2.376	986	16.118	5.654	21.772
		1,1%		1,0%		4,0%		14,0%		64,4%		15,4%		100%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Data per 20 Januari 2026

Kasus Baru AIDS (Kasus HIV Stadium 3 dan 4)

Lampiran 6.11

JUMLAH KEMATIAN PADA KASUS AIDS YANG DITEMUKAN PADA TAHUN YANG SAMA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)														
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	0	0	1	0	1	0	5	0	17	1	1	0	25	1	26
2	Sumatera Utara	1	1	0	0	3	0	13	1	106	10	21	7	144	19	163
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	1	0	2	0	32	1	8	0	43	1	44
4	Riau	0	0	0	0	0	0	4	0	28	9	5	2	37	11	48
5	Jambi	0	0	0	0	2	2	2	0	7	3	4	1	15	6	21
6	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1	0	4	0	35	9	3	2	43	12	55
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	1	7	2	9
8	Lampung	0	0	1	1	0	1	4	1	26	4	3	1	34	8	42
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	0	1	10	2	12
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	3	1	19	10	9	4	31	15	46
11	DKI Jakarta	2	1	0	2	0	1	9	3	99	44	29	13	139	64	203
12	Jawa Barat	3	2	2	2	6	2	17	5	212	56	49	8	289	75	364
13	Jawa Tengah	0	0	1	2	6	2	19	8	157	59	94	37	277	108	385
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	13	1	28	4	32
15	Jawa Timur	1	3	1	3	7	2	26	6	221	101	133	47	389	162	551
16	Banten	0	1	0	0	2	1	15	2	71	15	16	6	104	25	129
17	Bali	0	1	1	0	0	0	2	1	32	9	10	10	45	21	66
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	1	0	2	0	22	4	2	0	28	4	32
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	1	0	8	1	32	10	8	1	50	12	62
20	Kalimantan Barat	0	0	2	0	0	0	3	1	31	9	14	2	50	12	62
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	0	0	1	0	8	3	2	1	12	4	16
22	Kalimantan Selatan	1	1	0	0	0	0	5	1	33	11	12	2	51	15	66
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	7	1	25	15	4	2	36	18	54
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	2	0	8	1	9
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	1	0	4	1	12	5	3	3	21	9	30
26	Sulawesi Tengah	0	0	1	0	1	0	5	1	23	4	3	1	33	6	39
27	Sulawesi Selatan	0	1	0	0	2	0	20	1	73	12	19	1	114	15	129
28	Sulawesi Tenggara	0	2	0	0	1	0	4	1	20	4	2	0	27	7	34
29	Gorontalo	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	7	2	9
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	9	0	9
31	Maluku	0	0	0	0	1	1	3	1	7	3	3	1	14	6	20
32	Maluku Utara	0	0	0	0	1	1	4	1	14	5	1	1	20	8	28
33	Papua	0	2	0	2	0	7	2	8	30	25	3	4	35	48	83
34	Papua Barat	1	0	0	0	1	0	2	7	3	10	0	0	7	17	24
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	1	3	7	5	0	0	8	8	16
36	Papua Tengah	0	1	1	0	2	9	7	7	14	13	1	0	25	30	55
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	0	4	4	8
38	Papua Barat Daya	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5	1	6
Indonesia		12	16	13	13	42	30	206	65	1472	479	479	160	2224	763	2987
		0,9		0,9		2,4		9,1		65,3		21,4		100,0		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
Data per 20 Januari 2026

Lampiran 6.12

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru				Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2025
		2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	33	88	130	117	1.035
2	Sumatera Utara	458	893	1.316	1.298	8.571
3	Sumatera Barat	123	156	238	229	3.208
4	Riau	232	263	345	354	4.111
5	Jambi	19	36	93	115	1.129
6	Sumatera Selatan	464	320	332	327	3.163
7	Bengkulu	116	62	57	54	842
8	Lampung	178	233	351	369	2.350
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	62	84	79	857
10	Kepulauan Riau	167	289	352	304	3.525
11	DKI Jakarta	141	1.229	1.820	1.698	15.761
12	Jawa Barat	563	2.575	3.239	2.926	17.401
13	Jawa Tengah	1.484	2.008	2.058	2.079	21.845
14	DI Yogyakarta	109	174	250	226	2.420
15	Jawa Timur	666	2.434	3.713	3.741	32.212
16	Banten	506	622	711	737	5.976
17	Bali	851	1.680	779	735	13.619
18	Nusa Tenggara Barat	403	148	189	191	1.964
19	Nusa Tenggara Timur	223	358	465	425	3.864
20	Kalimantan Barat	396	333	415	386	4.509
21	Kalimantan Tengah	107	142	192	167	1.012
22	Kalimantan Selatan	162	233	256	236	1.598
23	Kalimantan Timur	229	269	389	313	3.400
24	Kalimantan Utara	75	64	86	60	1.024
25	Sulawesi Utara	81	196	312	284	3.335
26	Sulawesi Tengah	127	105	261	240	1.687
27	Sulawesi Selatan	629	413	741	708	6.553
28	Sulawesi Tenggara	64	70	196	218	1.239
29	Gorontalo	33	54	90	72	511
30	Sulawesi Barat	12	20	56	43	172
31	Maluku	21	76	189	183	1.293
32	Maluku Utara	159	155	223	213	1.622
33	Papua	858	261	819	916	27.576
34	Papua Barat	177	184	184	365	3.503
35	Papua Selatan	-	57	75	109	235
36	Papua Tengah	-	740	433	815	1.985
37	Papua Pegunungan	-	79	0	276	357
38	Papua Barat Daya	-	40	97	164	306
Indonesia		9.901	17.121	21.536	21.772	205.770

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Data per 20 Januari 2026

Lampiran 6.13

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	117	0	0,0%
2	Sumatera Utara	1.298	6	0,5%
3	Sumatera Barat	229	1	0,4%
4	Riau	354	2	0,6%
5	Jambi	115	4	3,5%
6	Sumatera Selatan	327	5	1,5%
7	Bengkulu	54	0	0,0%
8	Lampung	369	1	0,3%
9	Kepulauan Bangka Belitung	79	0	0,0%
10	Kepulauan Riau	304	1	0,3%
11	DKI Jakarta	1.698	20	1,2%
12	Jawa Barat	2.926	19	0,6%
13	Jawa Tengah	2.079	10	0,5%
14	DI Yogyakarta	226	2	0,9%
15	Jawa Timur	3.741	15	0,4%
16	Banten	737	7	0,9%
17	Bali	735	2	0,3%
18	Nusa Tenggara Barat	191	1	0,5%
19	Nusa Tenggara Timur	425	0	0,0%
20	Kalimantan Barat	386	0	0,0%
21	Kalimantan Tengah	167	2	1,2%
22	Kalimantan Selatan	236	0	0,0%
23	Kalimantan Timur	313	2	0,6%
24	Kalimantan Utara	60	0	0,0%
25	Sulawesi Utara	284	1	0,4%
26	Sulawesi Tengah	240	0	0,0%
27	Sulawesi Selatan	708	3	0,4%
28	Sulawesi Tenggara	218	0	0,0%
29	Gorontalo	72	0	0,0%
30	Sulawesi Barat	43	1	2,3%
31	Maluku	183	0	0,0%
32	Maluku Utara	213	0	0,0%
33	Papua	916	2	0,2%
34	Papua Barat	365	0	0,0%
35	Papua Selatan	109	0	0,0%
36	Papua Tengah	815	1	0,1%
37	Papua Pegunungan	276	0	0,0%
38	Papua Barat Daya	164	1	0,6%
Indonesia		21.772	109	0,5%

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Data per 20 Januari 2026

Lampiran 6.14

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Diare					
		Dilayani		Mendapat Oralit (Semua Umur)		Mendapat Oralit dan Zinc (Balita)	
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	45.312	14.676	39.914	88,1	13.572	92,5
2	Sumatera Utara	89.714	21.475	80.574	89,8	18.302	85,2
3	Sumatera Barat	62.735	15.696	61.648	98,3	15.648	99,7
4	Riau	43.692	10.742	40.356	92,4	9.611	89,5
5	Jambi	27.184	6.758	25.572	94,1	5.790	85,7
6	Sumatera Selatan	82.864	27.596	81.686	98,6	26.904	97,5
7	Bengkulu	10.009	2.942	8.789	87,8	2.597	88,3
8	Lampung	71.367	19.373	70.148	98,3	18.422	95,1
9	Kep. Bangka Belitung	18.045	5.924	17.021	94,3	5.646	95,3
10	Kepulauan Riau	22.096	4.290	20.959	94,9	4.153	96,8
11	DKI Jakarta	176.223	46.563	164.954	93,6	44.937	96,5
12	Jawa Barat	626.513	188.734	603.356	96,3	181.747	96,3
13	Jawa Tengah	496.665	127.352	434.169	87,4	113.598	89,2
14	DI Yogyakarta	57.667	9.755	52.282	90,7	9.017	92,4
15	Jawa Timur	533.305	173.776	526.833	98,8	171.365	98,6
16	Banten	171.736	51.888	163.111	95,0	50.272	96,9
17	Bali	51.202	11.903	48.874	95,5	11.394	95,7
18	Nusa Tenggara Barat	95.194	37.510	90.608	95,2	35.784	95,4
19	Nusa Tenggara Timur	46.218	22.719	43.132	93,3	21.500	94,6
20	Kalimantan Barat	42.273	13.732	37.142	87,9	12.174	88,7
21	Kalimantan Tengah	23.811	8.149	21.185	89,0	6.837	83,9
22	Kalimantan Selatan	48.431	16.018	44.036	90,9	14.926	93,2
23	Kalimantan Timur	50.961	14.479	45.595	89,5	13.058	90,2
24	Kalimantan Utara	12.518	4.766	11.680	93,3	4.457	93,5
25	Sulawesi Utara	12.696	3.618	11.436	90,1	3.175	87,8
26	Sulawesi Tengah	34.626	11.763	31.046	89,7	10.984	93,4
27	Sulawesi Selatan	137.848	43.741	103.083	74,8	32.204	73,6
28	Sulawesi Tenggara	34.311	12.697	27.719	80,8	10.648	83,9
29	Gorontalo	11.675	4.828	10.527	90,2	4.476	92,7
30	Sulawesi Barat	23.598	7.334	20.572	87,2	6.634	90,5
31	Maluku	23.536	11.222	19.361	82,3	8.951	79,8
32	Maluku Utara	16.396	6.849	14.553	88,8	6.155	89,9
33	Papua	9.722	4.646	6.975	71,7	4.020	86,5
34	Papua Barat	6.458	3.613	5.649	87,5	3.272	90,6
35	Papua Selatan	21.503	10.832	16.406	76,3	9.246	85,4
36	Papua Tengah	4.791	2.517	3.965	82,8	2.041	81,1
37	Papua Pegunungan	1.773	991	1.394	78,6	762	76,9
38	Papua Barat Daya	5.481	2.903	4.586	83,7	2.453	84,5
Indonesia		3.250.149	984.370	3.010.896	92,6	916.732	93,13

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	100,0
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,0
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	8	88,9
34	Papua Barat	7	6	85,7
35	Papua Selatan	4	4	100,0
36	Papua Tengah	8	2	25,0
37	Papua Pegunungan	8	2	25,0
38	Papua Barat Daya	6	6	100,0
Indonesia		514	500	97,3

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.16

KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.554.076	26	31	57	130	62	192	156	93	249	4,5
2	Sumatera Utara	15.442.676	4	1	5	77	40	117	81	41	122	0,8
3	Sumatera Barat	5.676.344	2	2	4	37	28	65	39	30	69	1,2
4	Riau	6.728.053	4	3	7	103	37	140	107	40	147	2,2
5	Jambi	3.674.667	6	2	8	37	15	52	43	17	60	1,6
6	Sumatera Selatan	8.837.301	5	7	12	159	104	263	164	111	275	3,1
7	Bengkulu	2.059.421	1	1	2	15	10	25	16	11	27	1,3
8	Lampung	8.521.201	9	4	13	95	41	136	104	45	149	1,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.542.443	0	1	1	30	32	62	30	33	63	4,1
10	Kepulauan Riau	2.183.292	1	1	2	22	15	37	23	16	39	1,8
11	DKI Jakarta	11.135.191	16	11	27	312	162	474	328	173	501	4,5
12	Jawa Barat	50.917.001	41	58	99	1.410	668	2.078	1.451	726	2.177	4,3
13	Jawa Tengah	38.233.933	43	35	78	970	493	1.463	1.013	528	1.541	4,0
14	DI Yogyakarta	4.488.914	3	26	29	1	13	14	4	39	43	1,0
15	Jawa Timur	41.814.499	72	43	115	1.420	808	2.228	1.492	851	2.343	5,6
16	Banten	12.547.647	48	39	87	524	275	799	572	314	886	7,1
17	Bali	4.352.360	9	7	16	82	37	119	91	44	135	3,1
18	Nusa Tenggara Barat	5.731.107	26	18	44	173	89	262	199	107	306	5,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.742.564	11	19	30	294	135	429	305	154	459	8,0
20	Kalimantan Barat	5.590.019	0	1	1	35	16	51	35	17	52	0,9
21	Kalimantan Tengah	2.890.317	6	9	15	60	32	92	66	41	107	3,7
22	Kalimantan Selatan	4.231.827	5	1	6	72	37	109	77	38	115	2,72
23	Kalimantan Timur	3.834.983	5	5	10	95	31	126	100	36	136	3,5
24	Kalimantan Utara	749.367	2	0	2	33	12	45	35	12	47	6,3
25	Sulawesi Utara	2.601.016	7	6	13	239	155	394	246	161	407	15,6
26	Sulawesi Tengah	3.156.102	12	10	22	177	92	269	189	102	291	9,2
27	Sulawesi Selatan	9.563.127	27	44	71	459	286	745	486	330	816	8,5
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	5	4	9	123	73	196	128	77	205	7,5
29	Gorontalo	1.194.301	0	0	0	140	77	217	140	77	217	18,2
30	Sulawesi Barat	1.462.887	12	5	17	125	57	182	137	62	199	13,6
31	Maluku	1.841.492	16	14	30	308	177	485	324	191	515	28,0
32	Maluku Utara	1.285.374	17	20	37	482	249	731	499	269	768	59,7
33	Papua	1.067.971	82	128	210	484	311	795	566	439	1.005	94,1
34	Papua Barat	578.696	84	118	202	380	187	567	464	305	769	132,9
35	Papua Selatan	542.674	21	16	37	108	56	164	129	72	201	37,0
36	Papua Tengah	991.989	11	17	28	171	98	269	182	115	297	29,9
37	Papua Pegunungan	783.221	3	3	6	3	3	6	6	6	12	1,5
38	Papua Barat Daya	553.575	30	41	71	296	175	471	326	216	542	97,9
Indonesia		280.822.874	672	751	1.423	9.681	5.188	14.869	10.353	5.939	16.292	5,8
Proporsi Jenis Kelamin			47,2	52,8		65,1	34,9		63,5	36,5		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: Data per 24 April 2026

Lampiran 6.17

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 1, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru											
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 1		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	5.554.076	249	229	92,0	3,0	1,2	17	6,8	3,1	19	7,6	0	0,0
2	Sumatera Utara	15.442.676	122	102	83,6	8,0	6,6	12	9,8	0,8	7	5,7	0	0,0
3	Sumatera Barat	5.676.344	69	50	72,5	8,0	11,6	11	15,9	1,9	1	1,4	0	0,0
4	Riau	6.728.053	147	124	84,4	16,0	10,9	7	4,8	1,0	11	7,5	0	0,0
5	Jambi	3.674.667	60	52	86,7	3,0	5,0	5	8,3	1,4	5	8,3	0	0,0
6	Sumatera Selatan	8.837.301	275	252	91,6	14,0	5,1	9	3,3	1,0	13	4,7	0	0,0
7	Bengkulu	2.059.421	27	17	63,0	3,0	11,1	7	25,9	3,4	3	11,1	0	0,0
8	Lampung	8.521.201	149	111	74,5	29,0	19,5	9	6,0	1,1	2	1,3	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.542.443	63	47	74,6	8,0	12,7	8	12,7	5,2	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	2.183.292	39	37	94,9	1,0	2,6	1	2,6	0,5	1	2,6	0	0,0
11	DKI Jakarta	11.135.191	501	409	81,6	62,0	12,4	30	6,0	2,7	22	4,4	0	0,0
12	Jawa Barat	50.917.001	2.177	1.722	79,1	286,0	13,1	169	7,8	3,3	120	5,5	2	1,7
13	Jawa Tengah	38.233.933	1.541	1.289	83,6	136,0	8,8	116	7,5	3,0	59	3,8	2	3,4
14	DI Yogyakarta	4.488.914	43	33	76,7	4,0	9,3	6	14,0	1,3	0	0,0	0	0,0
15	Jawa Timur	41.814.499	2.343	1.787	76,3	339,0	14,5	217	9,3	5,2	117	5,0	7	6,0
16	Banten	12.547.647	886	736	83,1	71,0	8,0	79	8,9	6,3	86	9,7	5	5,8
17	Bali	4.352.360	135	111	82,2	13,0	9,6	11	8,1	2,5	4	3,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.731.107	306	296	96,7	3,0	1,0	7	2,3	1,2	17	5,6	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.742.564	459	398	86,7	29,0	6,3	32	7,0	5,6	18	3,9	2	11,1
20	Kalimantan Barat	5.590.019	52	44	84,6	3,0	5,8	5	9,6	0,9	5	9,6	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	2.890.317	107	85	79,4	11,0	10,3	11	10,3	3,8	8	7,5	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	4.231.827	115	90	78,3	12,0	10,4	13	11,3	3,1	3	2,6	0	0,0
23	Kalimantan Timur	3.834.983	136	122	89,7	12,0	8,8	2	1,5	0,5	6	4,4	0	0,0
24	Kalimantan Utara	749.367	47	44	93,6	0,0	0,0	3	6,4	4,0	0	0,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	2.601.016	407	388	95,3	7,0	1,7	12	2,9	4,6	27	6,6	1	3,7
26	Sulawesi Tengah	3.156.102	291	276	94,8	5,0	1,7	10	3,4	3,2	27	9,3	1	3,7
27	Sulawesi Selatan	9.563.127	816	722	88,5	54,0	6,6	40	4,9	4,2	51	6,3	0	0,0
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	205	197	96,1	6,0	2,9	2	1,0	0,7	16	7,8	0	0,0
29	Gorontalo	1.194.301	217	187	86,2	19,0	8,8	11	5,1	9,2	11	5,1	0	0,0
30	Sulawesi Barat	1.462.887	199	195	98,0	0,0	0,0	4	2,0	2,7	10	5,0	0	0,0
31	Maluku	1.841.492	515	480	93,2	24,0	4,7	11	2,1	6,0	69	13,4	1	1,4
32	Maluku Utara	1.285.374	768	744	96,9	13,0	1,7	11	1,4	8,6	134	17,4	2	1,5
33	Papua	1.067.971	1.005	986	98,1	10,0	1,0	9	0,9	8,4	239	23,8	2	0,8
34	Papua Barat	578.696	769	731	95,1	22,0	2,9	16	2,1	27,6	195	25,4	2	1,0
35	Papua Selatan	542.674	201	194	96,5	3,0	1,5	4	2,0	7,4	32	15,9	1	3,1
36	Papua Tengah	991.989	297	269	90,6	19,0	6,4	9	3,0	9,1	50	16,8	0	0,0
37	Papua Pegunungan	783.221	12	8	66,7	4,0	33,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
38	Papua Barat Daya	553.575	542	522	96,3	13,0	2,4	7	1,3	12,6	94	17,3	2	2,1
Indonesia		280.822.874	16.292	14.086	86,5	1.273	7,8	933	5,7	3,3	1.482	9,1	30	2,0

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026
Keterangan: Data per 24 April 2026

Lampiran 6.18

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar pada Anak			Kasus Terdaftar pada Dewasa			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5.554.076	6	16	22	42	294	336	0,60	Belum Eliminasi
2	Sumatera Utara	15.442.676	0	9	9	3	125	128	0,08	Belum Eliminasi
3	Sumatera Barat	5.676.344	0	1	1	2	66	68	0,12	Belum Eliminasi
4	Riau	6.728.053	1	14	15	3	166	169	0,25	Belum Eliminasi
5	Jambi	3.674.667	1	6	7	4	58	62	0,17	Belum Eliminasi
6	Sumatera Selatan	8.837.301	1	14	15	12	280	292	0,33	Belum Eliminasi
7	Bengkulu	2.059.421	1	2	3	1	23	24	0,12	Belum Eliminasi
8	Lampung	8.521.201	0	3	3	7	180	187	0,22	Belum Eliminasi
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.542.443	0	2	2	0	93	93	0,60	Belum Eliminasi
10	Kepulauan Riau	2.183.292	0	2	2	1	45	46	0,21	Belum Eliminasi
11	DKI Jakarta	11.135.191	2	23	25	13	589	602	0,54	Belum Eliminasi
12	Jawa Barat	50.917.001	13	121	134	43	2.269	2.312	0,45	Belum Eliminasi
13	Jawa Tengah	38.233.933	3	39	42	57	1.627	1.684	0,44	Belum Eliminasi
14	DI Yogyakarta	4.488.914	0	0	0	3	53	56	0,12	Belum Eliminasi
15	Jawa Timur	41.814.499	11	136	147	78	2.646	2.724	0,65	Belum Eliminasi
16	Banten	12.547.647	5	91	96	40	854	894	0,71	Belum Eliminasi
17	Bali	4.352.360	1	4	5	12	143	155	0,36	Belum Eliminasi
18	Nusa Tenggara Barat	5.731.107	1	17	18	18	284	302	0,53	Belum Eliminasi
19	Nusa Tenggara Timur	5.742.564	2	19	21	18	526	544	0,95	Belum Eliminasi
20	Kalimantan Barat	5.590.019	0	5	5	0	55	55	0,10	Belum Eliminasi
21	Kalimantan Tengah	2.890.317	2	7	9	5	97	102	0,35	Belum Eliminasi
22	Kalimantan Selatan	4.231.827	0	4	4	4	139	143	0,34	Belum Eliminasi
23	Kalimantan Timur	3.834.983	0	6	6	6	142	148	0,39	Belum Eliminasi
24	Kalimantan Utara	749.367	0	2	2	0	45	45	0,60	Belum Eliminasi
25	Sulawesi Utara	2.601.016	0	28	28	10	400	410	1,58	Belum Eliminasi
26	Sulawesi Tengah	3.156.102	3	24	27	9	251	260	0,82	Belum Eliminasi
27	Sulawesi Selatan	9.563.127	9	41	50	40	747	787	0,82	Belum Eliminasi
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	3	10	13	18	232	250	0,92	Belum Eliminasi
29	Gorontalo	1.194.301	0	14	14	0	228	228	1,91	Belum Eliminasi
30	Sulawesi Barat	1.462.887	1	11	12	8	192	200	1,37	Belum Eliminasi
31	Maluku	1.841.492	5	81	86	19	513	532	2,89	Belum Eliminasi
32	Maluku Utara	1.285.374	3	145	148	15	731	746	5,80	Belum Eliminasi
33	Papua	1.067.971	67	279	346	112	1.172	1.284	12,02	Belum Eliminasi
34	Papua Barat	578.696	56	174	230	113	607	720	12,44	Belum Eliminasi
35	Papua Selatan	542.674	7	59	66	20	291	311	5,73	Belum Eliminasi
36	Papua Tengah	991.989	6	68	74	24	355	379	3,82	Belum Eliminasi
37	Papua Pegunungan	783.221	0	0	0	9	21	30	0,38	Belum Eliminasi
38	Papua Barat Daya	553.575	15	102	117	52	579	631	11,40	Belum Eliminasi
Indonesia		280.822.874	225	1.579	1.804	821	17.118	17.939	0,64	Eliminasi

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: Data per 24 April 2026

Lampiran 6.19

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT / RFT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Kusta (PB)		Kusta (MB)	
		Tahun 2024		Tahun 2023	
		Penderita PB ^a	RFT PB (%)	Penderita MB ^b	RFT MB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Aceh	43	88	250	96
2	Sumatera Utara	5	100	144	90
3	Sumatera Barat	5	100	53	96
4	Riau	8	75	129	80
5	Jambi	7	86	57	88
6	Sumatera Selatan	14	79	197	93
7	Bengkulu	0	0	11	82
8	Lampung	10	90	127	99
9	Kep. Bangka Belitung	4	100	50	96
10	Kepulauan Riau	29	100	28	96
11	DKI Jakarta	33	100	489	94
12	Jawa Barat	103	87	1.395	94
13	Jawa Tengah	64	98	1.232	87
14	DI Yogyakarta	8	100	33	94
15	Jawa Timur	90	97	2.089	95
16	Banten	87	94	714	88
17	Bali	6	33	76	97
18	Nusa Tenggara Barat	43	98	213	93
19	Nusa Tenggara Timur	15	93	368	96
20	Kalimantan Barat	4	100	41	93
21	Kalimantan Tengah	5	100	62	87
22	Kalimantan Selatan	11	73	94	87
23	Kalimantan Timur	11	100	141	87
24	Kalimantan Utara	2	100	21	81
25	Sulawesi Utara	19	84	425	89
26	Sulawesi Tengah	39	100	284	99
27	Sulawesi Selatan	50	92	680	91
28	Sulawesi Tenggara	15	93	219	92
29	Gorontalo	5	100	158	92
30	Sulawesi Barat	19	100	126	83
31	Maluku	7	100	348	79
32	Maluku Utara	45	98	621	86
33	Papua	268	84	854	63
34	Papua Barat	101	67	282	60
35	Papua Selatan	11	64	147	71
36	Papua Tengah	48	46	181	66
37	Papua Pegunungan	6	100	10	80
38	Papua Barat Daya	80	56	313	36
Indonesia		1.317	84	12.662	86

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan:

- a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2025, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2024 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
- b = Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2025, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2023 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Keterangan: Data per 24 April 2026

Lampiran 6.20

KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus Non Polio AFP	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.480.456	120	8,1	91,8
2	Sumatera Utara	4.161.475	538	12,9	93,9
3	Sumatera Barat	1.443.206	130	9,0	84,3
4	Riau	1.789.166	77	4,3	55,6
5	Jambi	946.226	117	12,4	78,3
6	Sumatera Selatan	2.266.924	178	7,9	75,8
7	Bengkulu	533.224	23	4,3	73,1
8	Lampung	2.346.578	141	6,0	68,4
9	Kep. Bangka Belitung	368.619	18	4,9	70,0
10	Kepulauan Riau	569.624	51	9,0	90,6
11	DKI Jakarta	2.288.916	192	8,4	81,9
12	Jawa Barat	11.710.597	476	4,1	93,9
13	Jawa Tengah	8.254.886	696	8,4	94,8
14	DI Yogyakarta	736.849	33	4,5	69,6
15	Jawa Timur	8.667.951	479	5,5	83,6
16	Banten	3.042.950	148	4,9	61,6
17	Bali	919.034	74	8,1	69,6
18	Nusa Tenggara Barat	1.532.740	69	4,5	63,4
19	Nusa Tenggara Timur	1.662.861	155	9,3	89,3
20	Kalimantan Barat	1.434.476	86	6,0	68,4
21	Kalimantan Tengah	691.912	42	6,1	69,6
22	Kalimantan Selatan	1.118.493	39	3,5	46,6
23	Kalimantan Timur	991.862	50	5,0	67,9
24	Kalimantan Utara	181.605	21	11,6	90,5
25	Sulawesi Utara	605.059	33	5,5	73,0
26	Sulawesi Tengah	809.736	35	4,3	54,5
27	Sulawesi Selatan	2.235.461	79	3,5	95,1
28	Sulawesi Tenggara	773.549	39	5,0	77,3
29	Gorontalo	298.121	8	2,7	50,0
30	Sulawesi Barat	418.737	39	9,3	89,7
31	Maluku	497.879	12	2,4	85,7
32	Maluku Utara	362.194	18	5,0	68,0
33	Papua	346.507	21	6,1	83,3
34	Papua Barat	154.479	3	1,9	60,0
35	Papua Selatan	213.801	7	3,3	62,5
36	Papua Tengah	385.323	6	1,6	33,3
37	Papua Pegunungan	320.797	1	0,3	33,3
38	Papua Barat Daya	161.883	3	1,9	75,0
Indonesia		66.724.156	4.257	6,4	85,3

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.21

JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD31)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Difteri				Pertusis			Tetanus Neonatorum				Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus			Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	12	18	30	0	43	36	79	1	1	2	1	2.581	2.564	5.145
2	Sumatera Utara	17	10	27	5	15	19	34	1	0	1	1	1.494	1.487	2.981
3	Sumatera Barat	11	12	23	4	138	128	266	0	0	0	0	1.632	1.661	3.293
4	Riau	7	5	12	0	41	44	85	3	0	3	1	485	440	925
5	Jambi	0	5	5	0	3	5	8	1	2	3	2	139	171	310
6	Sumatera Selatan	5	1	6	0	151	159	310	0	1	1	0	381	363	744
7	Bengkulu	0	0	0	0	5	6	11	0	0	0	0	36	35	71
8	Lampung	1	3	4	0	9	10	19	0	0	0	0	227	277	504
9	Kep. Bangka Belitung	2	1	3	0	30	20	50	0	0	0	0	75	73	148
10	Kepulauan Riau	1	0	1	0	16	8	24	0	0	0	0	101	86	187
11	DKI Jakarta	24	14	38	0	37	52	89	0	0	0	0	3.906	3.024	6.930
12	Jawa Barat	59	44	103	6	342	298	640	5	0	5	3	3.682	3.913	7.595
13	Jawa Tengah	10	8	18	0	63	42	105	0	0	0	0	3.188	4.005	7.193
14	DI Yogyakarta	4	5	9	0	68	73	141	0	0	0	0	727	869	1.596
15	Jawa Timur	200	153	353	8	80	92	172	9	9	18	9	5.538	5.471	11.009
16	Banten	11	7	18	2	69	63	132	4	3	7	4	3.061	2.862	5.923
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	336	659
18	Nusa Tenggara Barat	0	3	3	1	1	3	4	1	0	1	1	241	283	524
19	Nusa Tenggara Timur	3	2	5	0	0	4	4	0	0	0	0	134	113	247
20	Kalimantan Barat	6	12	18	0	43	28	71	1	1	2	1	1.567	1.388	2.955
21	Kalimantan Tengah	1	5	6	0	1	0	1	0	0	0	0	75	86	161
22	Kalimantan Selatan	2	2	4	0	15	13	28	0	0	0	0	297	328	625
23	Kalimantan Timur	15	20	35	0	24	10	34	0	2	2	1	351	346	697
24	Kalimantan Utara	1	0	1	0	5	4	9	0	0	0	0	213	254	467
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	6	3	9	0	0	0	0	57	41	98
26	Sulawesi Tengah	2	3	5	0	27	24	51	1	0	1	0	442	460	902
27	Sulawesi Selatan	1	7	8	0	13	11	24	0	1	1	1	612	598	1.210
28	Sulawesi Tenggara	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	224	178	402
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	525	453	978
30	Sulawesi Barat	1	2	3	1	0	0	0	0	1	1	0	113	107	220
31	Maluku	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	17	23	40
32	Maluku Utara	2	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	67	54	121
33	Papua	0	0	0	0	7	4	11	0	0	0	0	29	19	48
34	Papua Barat	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	22	51
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	23
36	Papua Tengah	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	10	9	19
37	Papua Pegunungan	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
38	Papua Barat Daya	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
Indonesia		400	352	752	29	1.255	1.162	2.417	28	22	50	25	32.593	32.415	65.008
Case Fatality Rate (%)					3,9							50,0			

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.22

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Total Kasus	Meninggal	Case Fatality Rate (%)	Faktor Risiko																				Status Rawat				
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS			
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2 +	TT1	Tidak Diimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
1	Aceh	2	1	50,0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0
2	Sumatera Utara	1	1	100,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Sumatera Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	3	1	33,3	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0
5	Jambi	3	2	66,7	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
6	Sumatera Selatan	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
7	Bengkulu	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	5	3	60,0	0	4	1	0	0	0	0	5	0	0	1	3	0	1	1	3	1	0	5	0	0	0	0	5	0
13	Jawa Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	18	9	50,0	6	8	2	1	1	3	5	9	1	3	5	10	0	0	7	9	1	1	9	2	4	3	16	2	0
16	Banten	7	4	57,1	0	3	3	0	1	1	2	3	1	0	0	6	1	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	6	1
17	Bali	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	100,0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	2	1	50,0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	2	1	50,0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
27	Sulawesi Selatan	1	1	100,0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	2	0	0,0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	0
30	Sulawesi Barat	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
31	Maluku	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		50	25	50,0	8	25	7	6	4	6	11	29	4	4	10	28	5	3	12	20	9	9	28	5	10	7	43	4	

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.23

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	764	708	414	307	336	440	398	467	482	409	290	130	5.145
2	Sumatera Utara	219	263	209	157	245	250	296	455	315	339	122	111	2.981
3	Sumatera Barat	58	61	38	33	45	62	99	157	405	850	779	706	3.293
4	Riau	16	20	8	11	10	32	47	152	285	233	87	24	925
5	Jambi	13	14	15	14	19	24	67	40	59	17	12	16	310
6	Sumatera Selatan	35	49	41	39	70	49	91	63	81	76	87	63	744
7	Bengkulu	8	8	4	1	4	3	2	5	8	19	5	4	71
8	Lampung	32	36	13	10	10	4	14	41	84	96	117	47	504
9	Kep. Bangka Belitung	11	14	7	4	8	12	21	14	13	25	14	5	148
10	Kepulauan Riau	10	12	10	16	5	8	14	18	24	52	16	2	187
11	DKI Jakarta	174	179	191	210	230	313	434	584	1.037	1.406	1.384	788	6.930
12	Jawa Barat	441	450	384	475	534	470	651	708	907	1.099	921	555	7.595
13	Jawa Tengah	611	694	553	488	622	602	699	614	646	597	571	496	7.193
14	DI Yogyakarta	189	146	128	108	121	133	94	103	160	148	150	116	1.596
15	Jawa Timur	736	741	616	585	847	862	1.125	1.575	1.831	1.063	655	373	11.009
16	Banten	131	150	158	177	197	195	306	397	773	1.120	1.316	1.003	5.923
17	Bali	24	29	47	23	22	76	69	78	131	91	48	21	659
18	Nusa Tenggara Barat	21	58	23	30	63	36	49	61	64	34	43	42	524
19	Nusa Tenggara Timur	7	6	15	10	12	22	24	19	43	22	58	9	247
20	Kalimantan Barat	40	41	32	42	94	113	195	305	514	698	472	409	2.955
21	Kalimantan Tengah	25	21	13	9	7	9	12	11	12	18	19	5	161
22	Kalimantan Selatan	89	70	53	46	64	65	57	56	54	34	29	8	625
23	Kalimantan Timur	42	38	17	15	66	47	38	64	79	63	133	95	697
24	Kalimantan Utara	10	17	16	32	25	28	43	45	46	59	75	71	467
25	Sulawesi Utara	13	11	5	2	4	8	11	5	4	4	27	4	98
26	Sulawesi Tengah	75	60	28	30	36	28	39	84	94	127	171	130	902
27	Sulawesi Selatan	57	58	51	36	45	27	55	92	119	152	222	296	1.210
28	Sulawesi Tenggara	14	9	10	39	20	25	40	43	49	82	53	18	402
29	Gorontalo	33	22	44	41	83	121	113	149	142	144	62	24	978
30	Sulawesi Barat	8	11	11	5	12	23	16	32	39	24	20	19	220
31	Maluku	0	2	2	1	5	7	4	3	7	6	3	0	40
32	Maluku Utara	12	6	12	10	7	6	26	9	12	6	8	7	121
33	Papua	0	5	1	2	5	3	5	2	3	6	10	6	48
34	Papua Barat	1	5	2	2	3	4	1	4	9	14	6	0	51
35	Papua Selatan	1	0	0	2	3	1	4	5	2	4	0	1	23
36	Papua Tengah	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
38	Papua Barat Daya	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
Indonesia		3.929	4.024	3.175	3.013	3.879	4.108	5.159	6.460	8.534	9.138	7.985	5.604	65.008

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.24

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	9	267	227	2.179	221	2.028	67	344	38	327	0	0	5.145	562	10,9
2	Sumatera Utara	36	201	305	1.090	341	1.044	153	260	142	386	0	0	2.981	977	32,8
3	Sumatera Barat	7	198	266	1.166	429	1.322	148	261	165	346	0	0	3.293	1.015	30,8
4	Riau	6	42	89	274	166	385	51	88	57	136	0	0	925	369	39,9
5	Jambi	8	24	56	83	52	69	48	54	46	80	0	0	310	210	67,7
6	Sumatera Selatan	24	86	153	212	137	172	100	118	88	156	0	0	744	502	67,5
7	Bengkulu	1	10	12	18	12	14	9	11	11	18	0	0	71	45	63,4
8	Lampung	6	35	112	168	99	142	45	53	58	106	0	0	504	320	63,5
9	Kep. Bangka Belitung	3	22	42	63	22	29	12	16	10	18	0	0	148	89	60,1
10	Kepulauan Riau	2	21	29	59	34	59	13	20	14	28	0	0	187	92	49,2
11	DKI Jakarta	230	1.254	1.196	2.641	958	1.634	418	559	494	842	0	0	6.930	3.296	47,6
12	Jawa Barat	121	961	1.020	2.549	1.033	1.840	450	658	648	1.587	0	0	7.595	3.272	43,1
13	Jawa Tengah	163	617	1.302	1.747	1.278	1.564	796	994	1.202	2.271	0	0	7.193	4.741	65,9
14	DI Yogyakarta	65	225	307	443	258	364	114	170	133	394	0	0	1.596	877	54,9
15	Jawa Timur	137	1.262	1.409	4.977	1.007	2.791	411	650	564	1.329	0	0	11.009	3.528	32,0
16	Banten	88	810	771	2.514	647	1.462	205	317	366	820	0	0	5.923	2.077	35,1
17	Bali	16	104	101	178	72	134	46	57	108	186	0	0	659	343	52,0
18	Nusa Tenggara Barat	8	42	96	167	96	124	54	76	64	115	0	0	524	318	60,7
19	Nusa Tenggara Timur	6	22	76	81	41	47	27	32	28	65	0	0	247	178	72,1
20	Kalimantan Barat	23	297	285	1.119	371	1.044	126	219	114	276	0	0	2.955	919	31,1
21	Kalimantan Tengah	4	23	19	47	20	50	10	11	14	30	0	0	161	67	41,6
22	Kalimantan Selatan	6	86	60	203	67	134	48	68	61	134	0	0	625	242	38,7
23	Kalimantan Timur	16	128	107	259	71	151	32	57	43	102	0	0	697	269	38,6
24	Kalimantan Utara	14	87	57	207	32	81	17	26	15	66	0	0	467	135	28,9
25	Sulawesi Utara	4	8	25	32	27	29	7	8	10	21	0	0	98	73	74,5
26	Sulawesi Tengah	6	92	134	303	127	240	64	88	88	179	0	0	902	419	46,5
27	Sulawesi Selatan	21	141	197	478	147	290	71	107	98	194	0	0	1.210	534	44,1
28	Sulawesi Tenggara	3	36	83	131	44	80	24	34	54	121	0	0	402	208	51,7
29	Gorontalo	9	140	76	423	63	257	25	65	35	93	0	0	978	208	21,3
30	Sulawesi Barat	2	19	21	66	24	45	13	27	26	63	0	0	220	86	39,1
31	Maluku	3	12	13	19	2	4	2	3	0	2	0	0	40	20	50,0
32	Maluku Utara	7	29	37	53	14	21	6	10	3	8	0	0	121	67	55,4
33	Papua	2	9	11	13	10	12	6	6	2	8	0	0	48	31	64,6
34	Papua Barat	3	10	17	20	6	12	3	4	0	5	0	0	51	29	56,9
35	Papua Selatan	1	4	3	7	5	6	0	0	1	6	0	0	23	10	43,5
36	Papua Tengah	0	1	0	13	0	5	0	0	0	0	0	0	19	0	0,0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,0
38	Papua Barat Daya	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	66,7
Indonesia		1.060	7.327	8.718	24.006	7.933	17.685	3.621	5.471	4.800	10.519	0	0	65.008	26.132	40,2

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.25

JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		>14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	3	33	25	539	36	524	6	93	7	51	0	0	1.240	77	6,2
2	Sumatera Utara	7	49	70	325	109	366	19	53	11	44	0	0	837	216	25,8
3	Sumatera Barat	0	15	28	149	69	255	17	33	6	17	0	0	469	120	25,6
4	Riau	1	8	16	58	44	95	9	17	7	11	0	0	189	77	40,7
5	Jambi	0	2	2	7	1	3	1	1	0	1	0	0	14	4	28,6
6	Sumatera Selatan	1	2	8	22	13	30	2	5	4	9	0	0	68	28	41,2
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	Lampung	0	0	8	11	4	6	0	0	4	4	0	0	21	16	76,2
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	2	5	1	1	0	0	1	1	0	0	7	4	57,1
10	Kepulauan Riau	0	2	9	31	6	26	3	7	2	5	0	0	71	20	28,2
11	DKI Jakarta	37	238	224	699	208	454	51	72	19	51	0	0	1.514	539	35,6
12	Jawa Barat	16	253	215	894	181	506	44	75	27	57	0	0	1.785	483	27,1
13	Jawa Tengah	10	61	71	192	73	125	33	48	43	83	0	0	509	230	45,2
14	DI Yogyakarta	1	15	18	36	16	23	8	10	6	23	0	0	107	49	45,8
15	Jawa Timur	13	224	211	1.050	154	536	29	80	33	76	0	0	1.966	440	22,4
16	Banten	4	52	64	271	57	148	12	19	8	19	0	0	509	145	28,5
17	Bali	1	17	10	35	10	33	4	7	10	17	0	0	109	35	32,1
18	Nusa Tenggara Barat	0	4	5	22	6	18	3	5	3	8	0	0	57	17	29,8
19	Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,0
20	Kalimantan Barat	0	31	42	192	72	211	11	26	3	12	0	0	472	128	27,1
21	Kalimantan Tengah	0	1	3	12	2	15	0	0	1	3	0	0	31	6	19,4
22	Kalimantan Selatan	1	23	10	85	20	63	3	15	4	11	0	0	197	38	19,3
23	Kalimantan Timur	1	28	8	63	6	41	2	11	5	18	0	0	161	22	13,7
24	Kalimantan Utara	4	19	11	62	3	17	4	6	4	22	0	0	126	26	20,6
25	Sulawesi Utara	0	0	1	3	5	5	0	0	0	0	0	0	8	6	75,0
26	Sulawesi Tengah	0	23	49	118	42	92	17	24	13	33	0	0	290	121	41,7
27	Sulawesi Selatan	2	27	47	200	35	122	11	22	22	49	0	0	420	117	27,9
28	Sulawesi Tenggara	0	9	19	44	12	32	3	6	16	45	0	0	136	50	36,8
29	Gorontalo	0	8	8	56	9	43	6	10	7	14	0	0	131	30	22,9
30	Sulawesi Barat	0	4	2	28	7	19	2	7	8	15	0	0	73	19	26,0
31	Maluku	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	4	3	75,0
32	Maluku Utara	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0,0
33	Papua	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	0	0	6	2	33,3
34	Papua Barat	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3	75,0
35	Papua Selatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0
36	Papua Tengah	0	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	13	0	0,0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
38	Papua Barat Daya	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0
Indonesia		104	1.153	1.188	5.224	1.205	3.818	301	653	274	701	0	0	11.549	3.072	26,6

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.26

KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI TARGET KINERJA SURVEILANS PD3I
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Mencapai Target	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	100,0
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1
7	Bengkulu	10	6	60,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kep. Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	25	92,6
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	37	97,4
16	Banten	8	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	21	95,5
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	13	86,7
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3
27	Sulawesi Selatan	24	21	87,5
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,2
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0
31	Maluku	11	6	54,5
32	Maluku Utara	10	7	70,0
33	Papua	9	7	77,8
34	Papua Barat	7	6	85,7
35	Papua Selatan	4	4	100,0
36	Papua Tengah	8	1	12,5
37	Papua Pegunungan	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	2	33,3
Indonesia		514	464	90,3

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2025

Lampiran 6.27

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	Incidence Rate per 100.000 Penduduk	Meninggal	CFR (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.442.891	2.089	38,38	7	0,3
2	Sumatera Utara	15.785.839	4.601	29,15	14	0,3
3	Sumatera Barat	5.914.296	2.454	41,49	15	0,6
4	Riau	6.811.158	4.700	69,00	35	0,7
5	Jambi	3.768.482	1.424	37,79	10	0,7
6	Sumatera Selatan	8.928.515	4.436	49,68	20	0,5
7	Bengkulu	2.138.044	918	42,94	11	1,2
8	Lampung	9.522.913	9.603	100,84	24	0,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.550.821	1.624	104,72	12	0,7
10	Kepulauan Riau	2.213.456	2.053	92,75	10	0,5
11	DKI Jakarta	10.677.975	10.175	95,29	37	0,4
12	Jawa Barat	50.759.003	45.275	89,20	142	0,3
13	Jawa Tengah	38.233.933	10.479	27,41	93	0,9
14	DI Yogyakarta	3.781.549	2.021	53,44	8	0,4
15	Jawa Timur	42.089.271	22.402	53,22	138	0,6
16	Banten	12.537.436	6.999	55,82	13	0,2
17	Bali	4.461.267	10.438	233,97	13	0,1
18	Nusa Tenggara Barat	5.731.107	3.736	65,19	13	0,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.742.564	2.148	37,40	8	0,4
20	Kalimantan Barat	5.766.030	2.101	36,44	8	0,4
21	Kalimantan Tengah	2.844.992	1.130	39,72	8	0,7
22	Kalimantan Selatan	4.323.330	606	14,02	2	0,3
23	Kalimantan Timur	4.267.598	6.178	144,77	14	0,2
24	Kalimantan Utara	749.367	576	76,86	2	0,3
25	Sulawesi Utara	2.721.438	1.562	57,40	14	0,9
26	Sulawesi Tengah	3.156.102	1.198	37,96	4	0,3
27	Sulawesi Selatan	9.563.127	4.629	48,40	9	0,2
28	Sulawesi Tenggara	2.836.738	1.180	41,60	8	0,7
29	Gorontalo	1.242.238	679	54,66	7	1,0
30	Sulawesi Barat	1.525.335	1.268	83,13	2	0,2
31	Maluku	1.970.563	182	9,24	1	0,5
32	Maluku Utara	1.373.824	410	29,84	0	0,0
33	Papua	1.073.637	378	35,21	1	0,3
34	Papua Barat	491.895	538	109,37	0	0,0
35	Papua Selatan	515.717	142	27,53	0	0,0
36	Papua Tengah	1.017.614	227	22,31	0	0,0
37	Papua Pegunungan	1.080.522	0	0,00	0	0,0
38	Papua Barat Daya	539.781	239	44,28	0	0,0
Indonesia		283.150.368	170.798	60,32	703	0,41

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 6.28

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota Terjangkit					
			2023		2024		2025	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	23	22	95,65	23	100,00	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	33	100,00	33	100,00	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	6	85,71	7	100,00	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	21	95,45	22	100,00	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	100,00	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82	9	81,82	7	63,64
32	Maluku Utara	10	10	100,00	9	90,00	7	70,00
33	Papua	9	5	55,56	5	55,56	4	44,44
34	Papua Barat	7	5	71,43	5	71,43	3	42,86
35	Papua Selatan	4	0	0,00	0	0,00	1	25,00
36	Papua Tengah	8	1	12,50	2	25,00	1	12,50
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00	2	25,00	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00	5	83,33	1	16,67
Indonesia		514	478	93,00	488	94,94	475	92,41

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.29

KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 Penduduk
				Mikroskopis	Rapid Diagnostic Test (RDT)	Total		L	P	L+P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	5.625.960	73.498	26.759	46.739	73.498	100,00%	309	36	345	344	99,71%	0,06
2	Sumatera Utara	15.785.839	69.855	26.244	43.611	69.855	100,00%	3.707	2.103	5.810	4.697	80,84%	0,37
3	Sumatera Barat	5.914.296	25.756	2.702	23.053	25.755	100,00%	107	8	115	112	97,39%	0,02
4	Riau	6.811.158	26.018	5.050	20.968	26.018	100,00%	1.881	988	2.869	2.773	96,65%	0,42
5	Jambi	3.768.482	40.362	15.596	24.754	40.350	99,97%	69	13	82	82	100,00%	0,02
6	Sumatera Selatan	8.928.515	55.284	23.245	32.039	55.284	100,00%	38	4	42	42	100,00%	0,00
7	Bengkulu	2.138.044	13.901	2.418	11.483	13.901	100,00%	10	1	11	11	100,00%	0,01
8	Lampung	9.522.913	59.903	19.879	40.024	59.903	100,00%	1.196	689	1.885	1.885	100,00%	0,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.550.821	19.551	5.811	13.737	19.548	99,98%	18	4	22	22	100,00%	0,01
10	Kepulauan Riau	2.213.456	15.905	6.924	8.981	15.905	100,00%	434	143	577	577	100,00%	0,26
11	DKI Jakarta	10.677.975	10.531	2.540	7.976	10.516	99,86%	449	54	503	484	96,22%	0,05
12	Jawa Barat	50.759.003	18.744	6.484	12.260	18.744	100,00%	721	64	785	696	88,66%	0,02
13	Jawa Tengah	38.233.933	46.067	20.094	25.749	45.843	99,51%	656	59	715	656	91,75%	0,02
14	DI Yogyakarta	3.781.549	22.456	12.701	9.686	22.387	99,69%	118	43	161	104	64,60%	0,04
15	Jawa Timur	42.089.271	15.965	6.961	9.004	15.965	100,00%	690	97	787	759	96,44%	0,02
16	Banten	12.537.436	7.755	1.145	6.610	7.755	100,00%	159	15	174	168	96,55%	0,01
17	Bali	4.461.267	13.950	8.061	5.889	13.950	100,00%	39	10	49	46	93,88%	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	5.731.107	100.736	61.663	39.072	100.735	100,00%	115	34	149	147	98,66%	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	5.742.564	1.353.245	629.884	723.361	1.353.245	100,00%	2.497	1.837	4334	4.249	98,04%	0,75
20	Kalimantan Barat	5.766.030	41.202	6.832	34.370	41.202	100,00%	78	9	87	87	100,00%	0,02
21	Kalimantan Tengah	2.844.992	23.786	5.193	18.593	23.786	100,00%	324	28	352	322	91,48%	0,12
22	Kalimantan Selatan	4.323.330	27.808	2.590	25.218	27.808	100,00%	199	13	212	190	89,62%	0,05
23	Kalimantan Timur	4.267.598	60.342	5.594	54.718	60.312	99,95%	934	101	1035	940	90,82%	0,24
24	Kalimantan Utara	749.367	8.965	1.136	7.829	8.965	100,00%	56	4	60	47	78,33%	0,08
25	Sulawesi Utara	2.721.438	40.238	20.482	19.756	40.238	100,00%	692	324	1016	873	85,93%	0,37
26	Sulawesi Tengah	3.156.102	89.840	1.970	87.869	89.839	100,00%	955	357	1.312	1.286	98,02%	0,42
27	Sulawesi Selatan	9.563.127	49.653	7.561	42.092	49.653	100,00%	1.605	433	2038	2.015	98,87%	0,21
28	Sulawesi Tenggara	2.836.738	25.022	7.083	17.939	25.022	100,00%	514	148	662	541	81,72%	0,23
29	Gorontalo	1.242.238	99.532	22.166	77.366	99.532	100,00%	2.205	142	2347	2.347	100,00%	1,89
30	Sulawesi Barat	1.525.335	14.223	2.495	11.728	14.223	100,00%	94	16	110	110	100,00%	0,07
31	Maluku	1.970.563	101.893	45.628	55.603	101.231	99,35%	2.055	1.253	3308	2.932	88,63%	1,68
32	Maluku Utara	1.373.824	28.838	11.448	17.390	28.838	100,00%	214	83	297	297	100,00%	0,22
33	Papua	1.073.637	1.825.220	592.792	1.231.733	1.824.525	99,96%	172.976	130.955	303931	287.040	94,44%	283,09
34	Papua Barat	587.645	383.497	109.293	274.204	383.497	100,00%	6.957	4.703	11.660	11.210	96,14%	19,84
35	Papua Selatan	549.651	451.971	121.587	329.255	450.842	99,75%	49.185	40.877	90062	81.004	89,94%	163,85
36	Papua Tengah	1.492.286	1.490.034	472.888	1.016.559	1.489.447	99,96%	120.313	84.755	205.068	193.057	94,14%	137,42
37	Papua Pegunungan	1.484.858	102.235	59.513	41.865	101.378	99,16%	31.214	24.495	55709	49.428	88,73%	37,52
38	Papua Barat Daya	636.434	172.890	45.898	126.423	172.321	99,67%	4.481	3.135	7.616	6.554	86,06%	11,97
Indonesia		284.438.782	7.026.671	2.426.310	4.595.506	7.021.816	99,93%	408.264	298.033	706.297	658.134	93,18%	2,48

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 6.30

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria				% Kabupaten/Kota Mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	23	0	0	0	100%
2	Sumatera Utara	26	2	5	0	79%
3	Sumatera Barat	19	0	0	0	100%
4	Riau	12	0	0	0	100%
5	Jambi	8	3	0	0	73%
6	Sumatera Selatan	17	0	0	0	100%
7	Bengkulu	10	0	0	0	100%
8	Lampung	14	0	1	0	93%
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	0	0	86%
10	Kepulauan Riau	7	0	0	0	100%
11	DKI Jakarta	6	0	0	0	100%
12	Jawa Barat	27	0	0	0	100%
13	Jawa Tengah	34	1	0	0	97%
14	DI Yogyakarta	5	0	0	0	100%
15	Jawa Timur	38	0	0	0	100%
16	Banten	8	0	0	0	100%
17	Bali	9	0	0	0	100%
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	0	0	80%
19	Nusa Tenggara Timur	11	7	3	1	50%
20	Kalimantan Barat	12	2	0	0	86%
21	Kalimantan Tengah	12	1	1	0	86%
22	Kalimantan Selatan	12	1	0	0	92%
23	Kalimantan Timur	5	5	0	0	50%
24	Kalimantan Utara	4	1	0	0	80%
25	Sulawesi Utara	10	4	1	0	67%
26	Sulawesi Tengah	8	2	3	0	62%
27	Sulawesi Selatan	23	0	1	0	96%
28	Sulawesi Tenggara	15	2	0	0	88%
29	Gorontalo	5	1	0	0	83%
30	Sulawesi Barat	5	1	0	0	83%
31	Maluku	4	3	2	2	36%
32	Maluku Utara	6	3	1	0	60%
33	Papua	0	0	0	9	0%
34	Papua Barat	1	0	1	5	14%
35	Papua Selatan	0	0	0	4	0%
36	Papua Tengah	0	2	2	4	0%
37	Papua Pegunungan	0	0	2	6	0%
38	Papua Barat Daya	2	0	0	4	33%
Indonesia		412	44	23	35	80%

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.31

ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021- 2025

No	Provinsi	API				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0,06	0,02	0,03	0,07	0,06
2	Sumatera Utara	0,17	0,35	0,33	0,42	0,37
3	Sumatera Barat	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
4	Riau	0,13	0,25	0,42	0,40	0,42
5	Jambi	0,01	0,07	0,05	0,01	0,02
6	Sumatera Selatan	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7	Bengkulu	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
8	Lampung	0,06	0,08	0,13	0,28	0,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,07	0,08	0,04	0,01	0,01
10	Kepulauan Riau	0,02	0,02	0,01	0,14	0,26
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,03	0,03	0,05
12	Jawa Barat	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
13	Jawa Tengah	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
14	DI Yogyakarta	0,01	0,04	0,02	0,03	0,04
15	Jawa Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
16	Banten	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
17	Bali	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	0,07	0,09	0,06	0,04	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	1,69	2,79	1,25	1,57	0,75
20	Kalimantan Barat	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
21	Kalimantan Tengah	0,06	0,08	0,05	0,05	0,12
22	Kalimantan Selatan	0,07	0,11	0,08	0,07	0,05
23	Kalimantan Timur	0,61	0,87	0,95	0,40	0,24
24	Kalimantan Utara	0,05	0,15	0,20	0,19	0,08
25	Sulawesi Utara	0,28	0,42	0,47	0,46	0,37
26	Sulawesi Tengah	0,02	0,05	0,21	0,37	0,42
27	Sulawesi Selatan	0,10	0,19	0,19	0,20	0,21
28	Sulawesi Tenggara	0,13	0,21	0,21	0,19	0,23
29	Gorontalo	0,04	0,04	1,30	1,29	1,89
30	Sulawesi Barat	0,07	0,17	0,23	0,21	0,07
31	Maluku	0,45	0,61	0,87	1,18	1,68
32	Maluku Utara	0,10	0,18	0,18	0,15	0,22
34	Papua	80,05	113,07	156,59	216,67	283,09
33	Papua Barat	7,56	12,68	17,86	13,52	19,84
35	Papua Selatan	-	-	82,07	105,13	163,85
36	Papua Tengah	-	-	103,40	114,25	137,42
37	Papua Pegunungan	-	-	7,64	25,89	37,52
38	Papua Barat Daya	-	-	12,47	11,51	11,97
Indonesia		1,12	1,61	1,50	1,93	2,48

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.32

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis Tahun Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Aceh	411	0	0	0	348
2	Sumatera Utara	46	5	0	1	50
3	Sumatera Barat	83	3	2	15	66
4	Riau	108	5	0	3	110
5	Jambi	199	0	0	0	199
6	Sumatera Selatan	109	0	0	5	104
7	Bengkulu	60	0	0	0	60
8	Lampung	23	1	0	0	17
9	Kepulauan Bangka Belitung	79	1	2	8	70
10	Kepulauan Riau	75	0	0	0	77
11	DKI Jakarta	19	0	1	0	18
12	Jawa Barat	253	10	6	23	222
13	Jawa Tengah	290	5	6	15	211
14	DI Yogyakarta	2	0	0	0	2
15	Jawa Timur	147	0	0	0	147
16	Banten	59	0	0	0	59
17	Bali	4	1	0	1	4
18	Nusa Tenggara Barat	6	0	0	0	6
19	Nusa Tenggara Timur	955	11	2	57	951
20	Kalimantan Barat	143	0	0	0	137
21	Kalimantan Tengah	47	0	0	4	40
22	Kalimantan Selatan	17	0	0	0	17
23	Kalimantan Timur	63	2	1	3	61
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	15	0	0	1	14
26	Sulawesi Tengah	100	11	5	4	102
27	Sulawesi Selatan	36	1	0	5	32
28	Sulawesi Tenggara	42	2	0	1	43
29	Gorontalo	4	0	0	0	4
30	Sulawesi Barat	64	0	0	0	64
31	Maluku	34	0	1	5	28
32	Maluku Utara	26	0	0	0	26
33	Papua	1.023	2	0	0	654
34	Papua Barat	60	0	0	0	60
35	Papua Selatan	224	0	0	0	224
36	Papua Tengah	368	0	0	0	55
37	Papua Pegunungan	117	0	0	0	117
38	Papua Barat Daya	290	0	0	0	114
Indonesia		5.601	60	26	151	4.513

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.33

JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%,
DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	12	11	91,7	1	8,3	1	8,3
2	Sumatera Utara	9	9	100,0	0	0,0	3	33,3
3	Sumatera Barat	10	10	100,0	0	0,0	7	70,0
4	Riau	10	10	100,0	0	0,0	3	30,0
5	Jambi	5	5	100,0	0	0,0	2	40,0
6	Sumatera Selatan	9	9	100,0	0	0,0	1	11,1
7	Bengkulu	5	5	100,0	0	0,0	1	20,0
8	Lampung	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,4	2	28,6	3	42,9
10	Kepulauan Riau	3	3	100,0	0	0,0	0	0,0
11	DKI Jakarta	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A
12	Jawa Barat	11	11	100,0	0	0,0	8	72,7
13	Jawa Tengah	9	9	100,0	0	0,0	3	33,3
14	DI Yogyakarta	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A
15	Jawa Timur	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A
16	Banten	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0
17	Bali	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A
19	Nusa Tenggara Timur	18	18	100,0	0	0,0	2	11,1
20	Kalimantan Barat	9	8	88,9	0	0,0	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	11	9	81,8	2	18,2	3	27,3
22	Kalimantan Selatan	8	8	100,0	0	0,0	2	25,0
23	Kalimantan Timur	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
24	Kalimantan Utara	4	3	75,0	1	25,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A
26	Sulawesi Tengah	9	9	100,0	0	0,0	1	11,1
27	Sulawesi Selatan	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0
28	Sulawesi Tenggara	12	12	100,0	0	0,0	3	25,0
29	Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0	4	66,7
30	Sulawesi Barat	4	4	100,0	0	0,0	1	25,0
31	Maluku	8	8	100,0	0	0,0	0	0,0
32	Maluku Utara	6	6	100,0	0	0,0	1	16,7
33	Papua	9	6	66,7	2	22,2	3	33,3
34	Papua Barat	6	1	16,7	4	66,7	0	0,0
35	Papua Selatan	4	2	50,0	2	50,0	2	50,0
36	Papua Tengah	5	2	40,0	1	20,0	0	0,0
37	Papua Pegunungan	5	0	0,0	4	80,0	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	1	16,7	1	16,7	0	0,0
Indonesia		236	206	87,3	20	8,5	63	26,7

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Provinsi yang seluruh kabupaten/kota nya bukan endemis filariasis : DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara

Lampiran 6.34

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023 - 2025

No	Provinsi	2023			2024			2025		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	1.434	1.036	-	1.493	1.046	-	1.817	1.212	2
2	Sumatera Utara	10.360	7.848	20	11.377	8.448	14	15.174	11.434	29
3	Sumatera Barat	6.638	4.636	7	7.335	5.206	3	9.085	6.622	9
4	Riau	4.858	4.065	2	5.548	4.823	5	7.062	5.998	1
5	Jambi	1.511	1.278	1	1.641	1.165	-	1.920	1.279	3
6	Sumatera Selatan	4.183	3.820	4	4.674	4.489	5	6.621	5.480	4
7	Bengkulu	2.147	1.945	1	2.122	1.912	1	2.354	2.087	-
8	Lampung	3.043	2.656	-	3.152	2.702	-	4.249	3.834	-
9	Kepulauan Bangka Belitung*	168	94	-	286	193	-	432	321	-
10	Kepulauan Riau*	17	4	-	116	70	-	229	2	-
11	DKI Jakarta*	4.795	2.363	-	4.894	2.362	-	4.730	1.991	-
12	Jawa Barat	3.646	2.398	1	3.055	1.983	-	8.406	5.048	-
13	Jawa Tengah*	1.026	285	-	1.236	369	-	1.753	582	-
14	DI Yogyakarta*	307	132	-	204	63	-	381	321	-
15	Jawa Timur*	682	343	-	721	245	-	1.156	388	-
16	Banten	932	869	-	790	666	-	1.263	1.038	-
17	Bali	72.522	47.043	9	57.943	32.565	7	69.412	50.384	16
18	Nusa Tenggara Barat	3.102	2.718	4	4.156	3.892	10	3.753	3.677	5
19	Nusa Tenggara Timur	19.321	18.078	35	30.267	28.579	46	39.167	37.844	30
20	Kalimantan Barat	6.970	6.353	16	8.261	7.401	9	12.059	11.199	16
21	Kalimantan Tengah	2.179	1.739	2	1.938	1.791	-	2.584	2.315	-
22	Kalimantan Selatan	662	551	-	898	714	-	1.403	1.109	2
23	Kalimantan Timur	3.076	2.869	-	3.412	3.287	-	4.763	4.213	-
24	Kalimantan Utara	465	351	-	505	379	-	717	408	-
25	Sulawesi Utara	9.153	5.287	18	7.713	4.571	11	11.112	6.799	18
26	Sulawesi Tengah	4.211	4.092	3	4.393	4.176	1	5.661	5.479	7
27	Sulawesi Selatan	10.120	10.070	11	10.630	10.591	4	12.599	11.906	2
28	Sulawesi Tenggara	1.328	1.327	-	1.077	959	-	2.252	1.736	-
29	Gorontalo	1.015	925	-	1.075	994	2	1.293	1.177	-
30	Sulawesi Barat	1.180	1.137	1	1.505	1.431	-	1.859	1.321	-
31	Maluku	2.780	2.176	11	2.313	1.680	4	4.001	3.074	12
32	Maluku Utara	179	139	-	629	479	-	772	691	-
34	Papua*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		184.010	138.627	146	185.359	139.231	122	240.039	190.969	156
Persentase VAR/GHPR		75,34%			75,11%			79,56%		

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

, VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati

* daerah bebas rabies

- : tidak ada kasus

Lampiran 6.35

**JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 - 2025**

No	Provinsi	2023			2024			2025		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DKI Jakarta	15	0	0	22	5	22,73	70	3	4,29
2	Jawa Barat	54	6	11,11	62	8	12,90	289	38	13,15
3	Jawa Tengah	884	139	15,72	545	66	12,11	840	127	15,12
4	DI Yogyakarta	377	32	8,49	168	13	7,74	674	38	5,64
5	Jawa Timur	1090	17	1,56	487	6	1,23	455	20	4,40
6	Banten	30	7	23,33	67	9	13,43	152	25	16,45
7	Maluku	5	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Kalimantan Utara	35	1	2,86	15	2	13,33	11	1	9,09
9	Sulawesi Selatan	26	3	11,54	21	5	23,81	78	6	7,69
10	Sumatera Selatan	0	0	0	2	0	0,00	0	0	0,00
11	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
12	Kalimantan Timur	28	0	0	41	2	4,88	58	7	12,07
13	Kalimantan Selatan	0	0	0	15	1	6,67	2	1	50,00
14	Bali	0	0	0	3	0	0,00	1	0	0,00
15	Gorontalo	0	0	0	57	4	7,02	10	1	10,00
16	Kalimantan Barat	0	0	0	1	0	0,00	3	0	0,00
17	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00
18	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	11	1	9,09
19	Riau	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00
20	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00
21	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
Indonesia		2545	205	8,06	1506	121	8,03	2643	267	10,10

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 6.36
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN RESPON TERHADAP SINYAL KEWASPADAAN
DI SKDR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Respon terhadap Sinyal Kewaspadaan	
		Respon Alert	< 24 Jam minimal 80%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	100%	35%
2	Sumatera Utara	100%	100%
3	Sumatera Barat	100%	100%
4	Riau	100%	100%
5	Jambi	100%	100%
6	Sumatera Selatan	100%	100%
7	Bengkulu	100%	86%
8	Lampung	100%	100%
9	Kepulauan Bangka Belitung	100%	100%
10	Kepulauan Riau	100%	100%
11	DKI Jakarta	100%	100%
12	Jawa Barat	100%	100%
13	Jawa Tengah	100%	100%
14	DI Yogyakarta	100%	100%
15	Jawa Timur	100%	100%
16	Banten	100%	74%
17	Bali	100%	100%
18	Nusa Tenggara Barat	93%	79%
19	Nusa Tenggara Timur	100%	57%
20	Kalimantan Barat	100%	100%
21	Kalimantan Tengah	100%	100%
22	Kalimantan Selatan	100%	100%
23	Kalimantan Timur	80%	40%
24	Kalimantan Utara	100%	100%
25	Sulawesi Utara	100%	100%
26	Sulawesi Tengah	85%	62%
27	Sulawesi Selatan	100%	71%
28	Sulawesi Tenggara	100%	100%
29	Gorontalo	100%	100%
30	Sulawesi Barat	100%	45%
31	Maluku	100%	73%
32	Maluku Utara	100%	100%
33	Papua	100%	100%
34	Papua Barat	71%	29%
35	Papua Selatan	100%	67%
36	Papua Tengah	25%	0%
37	Papua Pegunungan	63%	13%
38	Papua Barat Daya	100%	25%
Indonesia		97%	82%

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.37

SITUASI PENYAKIT INFEKSI POTENSI KLB DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Jenis Penyakit	Jumlah Laporan Kasus per Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Diare Akut	366.774	303.410	304.714	304.974	283.764	355.278	327.313	395.490	333.873	320.211	394.337	285.782
2	Malaria Konfirmasi	36.902	35.369	39.334	34.086	36.193	48.668	42.821	48.459	38.009	38.231	41.747	26.973
3	Suspek Dengue	92.844	69.622	66.302	56.418	55.208	64.418	48.517	54.467	42.988	42.535	47.229	34.037
4	Pneumonia	71.449	65.316	64.779	55.713	51.147	64.126	51.430	79.265	71.315	73.082	88.767	65.093
5	Diare Berdarah/ Disentri	6.417	5.261	5.093	4.981	4.342	5.642	5.030	5.775	4.855	4.669	6.108	4.316
6	Suspek Demam Tifoid	96.352	78.092	71.118	67.291	65.106	82.747	70.340	93.358	83.295	86.600	101.635	65.212
7	Sindrom Jaundice Akut	1.776	1.552	1.681	1.480	1.560	1.754	1.568	2.098	1.642	1.764	2.258	1.661
8	Suspek Chikungunya	3.284	2.271	1.850	2.256	2.359	2.847	2.058	1.617	1.339	1.082	1.423	1.254
9	Suspek Flu Burung Pada Manusia	22	6	7	2	2	8	3	22	17	5	6	-
10	Suspek Campak	5.480	5.261	4.342	3.928	4.538	6.067	5.818	9.599	11.190	13.091	18.001	14.989
11	Kasus Observasi Difteri	162	163	134	141	103	169	113	159	172	132	130	119
12	Suspek Pertusis	491	407	273	249	206	302	301	312	291	313	449	254
13	Acute Flacid Paralysis (AFP)	412	505	417	364	506	567	556	521	377	384	413	161
14	Gigitan Hewan Penular Rabies	14.902	12.774	15.898	15.711	15.985	20.328	17.619	21.265	17.542	15.893	18.971	14.941
15	Suspek Antrax	-	-	3	11	-	4	-	3	6	1	-	-
16	Suspek Leptospirosis	370	437	496	394	427	514	360	387	372	331	542	417
17	Suspek Kolera	22	14	10	18	18	20	14	21	3	15	20	8
18	Suspek Meningitis/Encephalitis	675	504	579	491	494	665	576	706	525	550	720	513
19	Suspek Tetanus Neonatorum	16	5	9	18	22	19	4	10	4	10	10	4
20	Suspek Tetanus	364	304	290	243	283	369	302	345	328	299	396	341
21	Penyakit Serupa Influenza (<i>Influenza Like Illness</i> /ILI)	185.694	145.641	140.397	129.788	116.263	149.908	131.968	170.220	145.166	153.958	188.294	124.679
22	Suspek HFMD	1.283	1.598	1.474	1.299	1.740	2.459	1.371	2.872	3.376	4.075	4.625	2.645
23	ISPA	1.016.035	1.046.962	976.728	954.390	882.752	1.243.243	1.172.944	1.731.565	1.553.875	1.636.220	1.962.746	1.279.246
Indonesia		1.901.726	1.775.474	1.695.928	1.634.246	1.523.018	2.050.122	1.881.026	2.618.536	2.310.560	2.393.451	2.878.827	1.922.645

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.38

SITUASI PENYAKIT INFEKSI EMERGING DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	Jumlah Provinsi Terdampak	Jumlah Kabupaten/Kota Terdampak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	Penyakit virus Hanta	17	2	6	11	1. Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 2. Kab. Ciamis, Jawa Barat 3. Kota Bandung, Jawa Barat 4. Kab. Bantul, DIY 5. Kab. Sleman, DIY 6. Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 7. Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 8. Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 9. Kota Kupang, NTT 10. Kota Padang, Sumatera Barat 11. Kota Tangerang, Banten
2	Legionellosis	49	2	4	5	1. Kab. Bandung, Jawa Barat 2. Kota Bandung, Jawa Barat 3. Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 4. Kota Batam, Kep. Riau 5. Kota Denpasar, Bali

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.39

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia ≥ 15 Tahun			Mendapat Pelayanan Kesehatan					
					Laki-laki		Perempuan		Total	
		Laki-laki	Perempuan	Total	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	600.001	602.195	1.202.196	250.200	41,7	251.115	41,7	501315,8	41,7
2	Sumatera Utara	1.680.978	1.690.088	3.371.066	537.913	32,0	540.828	32,0	1078741,0	32,0
3	Sumatera Barat	650.261	646.355	1.296.616	292.618	45,0	290.860	45,0	583477,2	45,0
4	Riau	742.854	713.524	1.456.378	148.571	20,0	142.705	20,0	291275,5	20,0
5	Jambi	415.259	403.195	818.454	70.594	17,0	68.543	17,0	139137,2	17,0
6	Sumatera Selatan	981.264	950.598	1.931.861	137.377	14,0	133.084	14,0	270460,6	14,0
7	Bengkulu	237.480	227.918	465.398	28.498	12,0	27.350	12,0	55847,7	12,0
8	Lampung	1.060.962	1.020.175	2.081.137	106.096	10,0	102.018	10,0	208113,7	10,0
9	Kep. Bangka Belitung	175.917	166.922	342.839	14.073	8,0	13.354	8,0	27427,1	8,0
10	Kepulauan Riau	241.314	235.398	476.711	14.479	6,0	14.124	6,0	28602,7	6,0
11	DKI Jakarta	1.215.157	1.217.670	2.432.827	911.368	75,0	913.253	75,0	1824620,3	75,0
12	Jawa Barat	5.712.259	5.611.779	11.324.038	2.856.130	50,0	2.805.889	50,0	5662018,9	50,0
13	Jawa Tengah	4.345.165	4.348.759	8.693.924	2.085.679	48,0	2.087.404	48,0	4173083,3	48,0
14	DI Yogyakarta	433.292	449.671	882.963	303.305	70,0	314.769	70,0	618074,1	70,0
15	Jawa Timur	4.799.997	4.892.185	9.692.183	2.495.999	52,0	2.543.936	52,0	5039935,1	52,0
16	Banten	1.396.128	1.357.273	2.753.401	767.870	55,0	746.500	55,0	1514370,5	55,0
17	Bali	511.735	515.512	1.027.248	332.628	65,0	335.083	65,0	667710,9	65,0
18	Nusa Tenggara Barat	608.064	609.463	1.217.526	121.613	20,0	121.893	20,0	243505,3	20,0
19	Nusa Tenggara Timur	587.248	595.866	1.183.114	105.705	18,0	107.256	18,0	212960,5	18,0
20	Kalimantan Barat	644.927	611.224	1.256.151	96.739	15,0	91.684	15,0	188422,6	15,0
21	Kalimantan Tengah	322.928	301.465	624.393	38.751	12,0	36.176	12,0	74927,2	12,0
22	Kalimantan Selatan	468.004	461.399	929.403	84.241	18,0	83.052	18,0	167292,5	18,0
23	Kalimantan Timur	492.229	457.734	949.963	68.912	14,0	64.083	14,0	132994,9	14,0
24	Kalimantan Utara	87.086	77.565	164.651	8.709	10,0	7.756	10,0	16465,1	10,0
25	Sulawesi Utara	312.949	300.801	613.750	68.849	22,0	66.176	22,0	135025,0	22,0
26	Sulawesi Tengah	349.161	331.285	680.446	59.357	17,0	56.318	17,0	115675,8	17,0
27	Sulawesi Selatan	1.046.812	1.078.212	2.125.023	261.703	25,0	269.553	25,0	531255,8	25,0
28	Sulawesi Tenggara	302.937	295.388	598.325	45.441	15,0	44.308	15,0	89748,7	15,0
29	Gorontalo	137.568	136.226	273.794	24.762	18,0	24.521	18,0	49282,9	18,0
30	Sulawesi Barat	162.595	158.318	320.913	26.015	16,0	25.331	16,0	51346,1	16,0
31	Maluku	215.199	211.879	427.078	25.824	12,0	25.426	12,0	51249,4	12,0
32	Maluku Utara	151.630	141.743	293.373	15.163	10,0	14.174	10,0	29337,3	10,0
33	Papua	111.526	99.341	210.868	8.922	8,0	7.947	8,0	16869,4	8,0
34	Papua Barat	66.601	59.017	125.618	4.662	7,0	4.131	7,0	8793,3	7,0
35	Papua Selatan	51.214	46.182	97.397	15.979	31,2	14.409	31,2	30387,7	31,2
36	Papua Tengah	172.810	148.210	321.019	6.740	3,9	5.780	3,9	12519,8	3,9
37	Papua Pegunungan	181.600	155.978	337.578	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0
38	Papua Barat Daya	72.095	65.524	137.620	10.959	15,2	9.960	15,2	20918,2	15,2
Indonesia		31.745.206	31.392.035	63.137.242	12.452.440	39,2	12.410.749	19,7	24.863.189	39,4

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.40

JUMLAH PENDUDUK YANG DIDETEKSI DINI DIABETES MELITUS (DM)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran DD Gula Darah 2025 (90%)	Target DD Gula Darah 2025 (60%)	Capaian Deteksi Dini	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	3.286.824	1.972.095	471.604	23,9
2	Sumatera Utara	9.206.621	5.523.974	3.031.894	54,9
3	Sumatera Barat	3.515.416	2.109.249	1.099.473	52,1
4	Riau	3.986.064	2.391.637	776.356	32,5
5	Jambi	2.226.294	1.335.777	553.021	41,4
6	Sumatera Selatan	5.262.452	3.157.471	1.075.054	34,0
7	Bengkulu	1.274.482	764.689	216.838	28,4
8	Lampung	5.672.506	3.403.505	1.758.001	51,7
9	Kep. Bangka Belitung	940.972	564.583	309.479	54,8
10	Kepulauan Riau	1.309.377	785.627	193.677	24,7
11	DKI Jakarta	6.626.221	3.975.733	1.636.481	41,2
12	Jawa Barat	30.681.346	18.408.808	4.131.452	22,4
13	Jawa Tengah	23.494.428	14.096.657	7.545.006	53,5
14	DI Yogyakarta	2.375.981	1.425.589	286.367	20,1
15	Jawa Timur	26.187.832	15.712.699	6.687.977	42,6
16	Banten	7.475.612	4.485.368	2.655.278	59,2
17	Bali	2.785.182	1.671.110	427.013	25,6
18	Nusa Tenggara Barat	3.311.968	1.987.180	886.864	44,6
19	Nusa Tenggara Timur	3.217.843	1.930.706	766.581	39,7
20	Kalimantan Barat	3.425.899	2.055.538	341.121	16,6
21	Kalimantan Tengah	1.700.846	1.020.507	373.695	36,6
22	Kalimantan Selatan	2.547.682	1.528.610	789.331	51,6
23	Kalimantan Timur	2.588.078	1.552.847	554.440	35,7
24	Kalimantan Utara	451.286	270.771	74.565	27,5
25	Sulawesi Utara	1.664.841	998.904	130.640	13,1
26	Sulawesi Tengah	1.852.776	1.111.665	482.862	43,4
27	Sulawesi Selatan	5.747.589	3.448.553	1.907.733	55,3
28	Sulawesi Tenggara	1.632.946	979.766	724.352	73,9
29	Gorontalo	743.825	446.295	670.866	150,3
30	Sulawesi Barat	876.646	525.988	138.379	26,3
31	Maluku	1.154.029	692.418	238.934	34,5
32	Maluku Utara	801.598	480.959	345.924	71,9
33	Papua	589.426	353.655	78.521	22,2
34	Papua Barat	342.419	205.451	31.798	15,5
35	Papua Selatan	276.047	165.629	64.724	39,1
36	Papua Tengah	880.553	528.332	46.452	8,8
37	Papua Pegunungan	909.194	545.517	3.839	0,7
38	Papua Barat Daya	372.838	223.702	27.499	12,3
Indonesia		171.395.939	102.837.564	41.534.091	40,4

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.41

**PERSENTASE DIABETES MELITUS DALAM PENGENDALIAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Sasaran Pasien (Dilakukan Pemeriksaan Gula Darah)	Terdiagnosis DM		Penyandang DM Terkendali	
			Jumlah	%	Jumlah	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	32.463	25.845	79,61	42	0,2
2	Sumatera Utara	77.821	218.118	280,28	195	0,1
3	Sumatera Barat	25.605	21.223	82,89	34	0,2
4	Riau	36.277	35.691	98,38	405	1,1
5	Jambi	12.389	34.013	274,54	113	0,3
6	Sumatera Selatan	37.751	72.779	192,79	291	0,4
7	Bengkulu	7.937	10.983	138,38	13	0,1
8	Lampung	39.552	72.784	184,02	113	0,2
9	Kep. Bangka Belitung	11.574	2.765	23,89	0	0,0
10	Kepulauan Riau	12.322	14.134	114,71	9	0,1
11	DKI Jakarta	115.354	437	0,38	0	0,0
12	Jawa Barat	294.608	52.629	17,86	35	0,1
13	Jawa Tengah	242.261	41.217	17,01	60	0,1
14	DI Yogyakarta	38.129	1.629	4,27	0	0,0
15	Jawa Timur	318.718	60.845	19,09	1143	1,9
16	Banten	83.336	383.828	460,58	13241	3,4
17	Bali	25.932	21.268	82,01	226	1,1
18	Nusa Tenggara Barat	26.474	39.913	150,76	251	0,6
19	Nusa Tenggara Timur	14.200	14.149	99,64	33	0,2
20	Kalimantan Barat	25.057	12.813	51,14	1	0,0
21	Kalimantan Tengah	13.896	14.706	105,83	47	0,3
22	Kalimantan Selatan	21.899	41.098	187,67	84	0,2
23	Kalimantan Timur	35.267	42.832	121,45	80	0,2
24	Kalimantan Utara	3.902	1.588	40,70	0	0,0
25	Sulawesi Utara	19.758	18.179	92,01	18	0,1
26	Sulawesi Tengah	18.335	27.842	151,85	58	0,2
27	Sulawesi Selatan	51.608	80.547	156,07	320	0,4
28	Sulawesi Tenggara	11.500	16.877	146,76	11	0,1
29	Gorontalo	7.615	27.182	356,95	734	2,7
30	Sulawesi Barat	5.425	13.077	241,05	349	2,7
31	Maluku	4.390	6.947	158,25	12	0,2
32	Maluku Utara	4.100	3.318	80,93	0	0,0
33	Papua	4.681	2.335	49,88	0	0,0
34	Papua Barat	2.276	2.040	89,63	3	0,1
35	Papua Selatan	2.069	3.090	149,35	2	0,1
36	Papua Tengah	3.999	1.474	36,86	10	0,7
37	Papua Pegunungan	1.710	17	0,99	0	0,0
38	Papua Barat Daya	2.223	727	32,70	3	0,4
Indonesia		1.692.413	1.440.939	85,14	17.936	1,2

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.42

PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA ≥18 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran Usia ≥18 Tahun	Sasaran (60%)	Deteksi Dini Obesitas		Obesitas		
				Jumlah	%	Jumlah	Proporsi (%)	Prevalensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	3.855.211	2.313.127	638.098	27,59	123.348	19,3	3,2
2	Sumatera Utara	10.826.097	6.495.658	4.133.932	63,64	558.300	13,5	5,2
3	Sumatera Barat	4.177.182	2.506.309	1.462.926	58,37	199.059	13,6	4,8
4	Riau	4.676.970	2.806.182	1.030.320	36,72	167.510	16,3	3,6
5	Jambi	2.640.134	1.584.080	701.097	44,26	89.906	12,8	3,4
6	Sumatera Selatan	6.232.600	3.739.560	1.343.280	35,92	142.105	10,6	2,3
7	Bengkulu	1.501.682	901.009	287.818	31,94	31.185	10,8	2,1
8	Lampung	6.734.015	4.040.409	2.094.510	51,84	197.467	9,4	2,9
9	Kep. Bangka Belitung	1.107.462	664.477	351.581	52,91	54.535	15,5	4,9
10	Kepulauan Riau	1.539.887	923.932	270.956	29,33	67.132	24,8	4,4
11	DKI Jakarta	7.907.040	4.744.224	2.029.059	42,77	328.447	16,2	4,2
12	Jawa Barat	36.652.525	21.991.515	4.890.061	22,24	729.737	14,9	2,0
13	Jawa Tengah	28.315.374	16.989.224	9.195.072	54,12	1.233.986	13,4	4,4
14	DI Yogyakarta	2.889.419	1.733.651	414.141	23,89	78.393	18,9	2,7
15	Jawa Timur	31.656.189	18.993.713	7.967.886	41,95	1.086.887	13,6	3,4
16	Banten	8.894.589	5.336.753	3.122.312	58,51	422.677	13,5	4,8
17	Bali	3.348.614	2.009.168	574.536	28,60	92.518	16,1	2,8
18	Nusa Tenggara Barat	3.924.841	2.354.905	1.051.146	44,64	90.294	8,6	2,3
19	Nusa Tenggara Timur	3.781.648	2.268.989	1.293.954	57,03	107.481	8,3	2,8
20	Kalimantan Barat	4.049.346	2.429.608	443.902	18,27	76.914	17,3	1,9
21	Kalimantan Tengah	2.015.080	1.209.048	518.646	42,90	83.697	16,1	4,2
22	Kalimantan Selatan	2.998.380	1.799.028	1.007.299	55,99	171.674	17,0	5,7
23	Kalimantan Timur	3.072.409	1.843.445	694.576	37,68	169.855	24,5	5,5
24	Kalimantan Utara	529.775	317.865	95.554	30,06	24.621	25,8	4,6
25	Sulawesi Utara	1.994.551	1.196.731	237.145	19,82	51.073	21,5	2,6
26	Sulawesi Tengah	2.188.693	1.313.216	648.139	49,36	98.078	15,1	4,5
27	Sulawesi Selatan	6.849.686	4.109.812	2.468.989	60,08	320.307	13,0	4,7
28	Sulawesi Tenggara	1.913.683	1.148.210	951.071	82,83	119.343	12,5	6,2
29	Gorontalo	881.915	529.149	772.581	146,00	103.677	13,4	11,8
30	Sulawesi Barat	1.024.466	614.680	186.910	30,41	33.027	17,7	3,2
31	Maluku	1.367.746	820.648	381.759	46,52	50.081	13,1	3,7
32	Maluku Utara	938.348	563.009	452.186	80,32	74.679	16,5	8,0
33	Papua	673.714	404.228	108.633	26,87	25.039	23,0	3,7
34	Papua Barat	402.922	241.753	47.503	19,65	14.719	31,0	3,7
35	Papua Selatan	306.718	184.031	78.645	42,73	14.422	18,3	4,7
36	Papua Tengah	1.042.497	625.498	58.259	9,31	13.891	23,8	1,3
37	Papua Pegunungan	1.107.735	664.641	5.055	0,76	776	15,4	0,1
38	Papua Barat Daya	442.986	265.792	33.047	12,43	8.338	25,2	1,9
Indonesia		204.462.129	122.677.277	52.042.584	42,42	7.255.178	13,9	3,5

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.43

REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran WUS 30-69 tahun	Target DNA HPV	Deteksi Dini Kanker Serviks				Deteksi Dini Kanker Payudara		
				Pemeriksaan DNA HPV	DNA HPV positif	DNA HPV + yang dilakukan IVA	% Cakupan	Target Pemeriksaan SADANIS	Capaian Pemeriksaan	% Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	1.324.171	165.484	654	1	1	0,40	794.503	29.438	3,71
2	Sumatera Utara	3.730.456	483.447	9.909	23	19	2,05	2.238.274	270.539	12,09
3	Sumatera Barat	1.410.790	182.806	2.789	5	5	1,53	846.474	122.130	14,43
4	Riau	1.615.929	209.253	6.070	32	28	2,90	969.557	54.429	5,61
5	Jambi	918.735	119.075	4.189	60	58	3,52	551.241	24.913	4,52
6	Sumatera Selatan	2.149.103	278.666	15.791	28	28	5,67	1.289.462	127.858	9,92
7	Bengkulu	515.520	66.806	17	9	8	0,03	309.312	15.485	5,01
8	Lampung	2.322.809	301.163	22.129	38	37	7,35	1.393.685	69.505	4,99
9	Kep. Bangka Belitung	376.918	48.841	7.322	0	0	14,99	226.151	31.406	13,89
10	Kepulauan Riau	547.679	70.885	488	3	3	0,69	328.607	12.325	3,75
11	DKI Jakarta	2.807.405	365.323	161.610	606	606	44,24	1.684.443	41.573	2,47
12	Jawa Barat	12.787.588	1.659.181	87.597	168	154	5,28	7.672.553	512.753	6,68
13	Jawa Tengah	9.935.191	1.290.347	89.034	622	596	6,90	5.961.115	886.642	14,87
14	DI Yogyakarta	1.008.140	131.028	9.092	22	22	6,94	604.884	29.132	4,82
15	Jawa Timur	11.252.736	1.462.683	66.490	490	458	4,55	6.751.642	998.769	14,79
16	Banten	3.131.737	405.994	53.244	82	64	13,11	1.879.042	216.252	11,51
17	Bali	1.172.176	152.291	13.172	120	118	8,65	703.306	34.662	4,93
18	Nusa Tenggara Barat	1.395.369	180.754	5.498	28	28	3,04	837.221	52.090	6,22
19	Nusa Tenggara Timur	1.285.857	166.299	4.362	13	12	2,62	771.514	59.234	7,68
20	Kalimantan Barat	1.368.039	177.183	5.184	40	39	2,93	820.823	23.031	2,81
21	Kalimantan Tengah	679.442	87.966	3.108	27	24	3,53	407.665	31.363	7,69
22	Kalimantan Selatan	1.058.623	137.276	8.738	22	10	6,37	635.174	35.871	5,65
23	Kalimantan Timur	1.090.855	139.949	13.358	47	46	9,54	654.513	17.583	2,69
24	Kalimantan Utara	172.679	22.352	1.101	0	0	4,93	103.607	6.984	6,74
25	Sulawesi Utara	674.977	87.633	328	7	2	0,37	404.986	15.218	3,76
26	Sulawesi Tengah	738.243	95.623	3.318	48	48	3,47	442.946	20.711	4,68
27	Sulawesi Selatan	2.362.419	306.178	31.696	18	12	10,35	1.417.451	151.824	10,71
28	Sulawesi Tenggara	644.566	83.349	3.654	1	1	4,38	386.740	80.410	20,79
29	Gorontalo	500.051	64.792	75	6	6	0,12	300.031	28.216	9,40
30	Sulawesi Barat	341.145	44.115	105	0	0	0,24	204.687	10.759	5,26
31	Maluku	455.863	75.601	626	0	0	0,83	273.518	17.513	6,40
32	Maluku Utara	310.349	40.277	214	0	0	0,53	186.209	31.464	16,90
33	Papua	226.376	29.238	200	0	0	0,68	135.826	9.691	7,13
34	Papua Barat	130.465	16.846	0	0	0	0,00	78.279	1.528	1,95
35	Papua Selatan	101.145	13.099	0	0	0	0,00	60.687	11.337	18,68
36	Papua Tengah	358.550	46.550	0	0	0	0,00	215.130	4.242	1,97
37	Papua Pegunungan	375.139	48.589	0	0	0	0,00	225.083	478	0,21
38	Papua Barat Daya	145.746	18.863	0	0	0	0,00	87.448	2.199	2,51
Indonesia		71.422.981	9.275.804	631.162	2.566	2.433	6,80	42.853.789	4.089.557	9,54

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Keterangan : Sasaran = perempuan usia 30-69 tahun

Lampiran 6.44

KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menerapkan KTR	
			Jumlah	Cakupan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	15	65,2
2	Sumatera Utara	33	20	60,6
3	Sumatera Barat	19	17	89,5
4	Riau	12	5	41,7
5	Jambi	11	9	81,8
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	15	14	93,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	31	88,6
14	DI Yogyakarta	5	4	80,0
15	Jawa Timur	38	27	71,1
16	Banten	8	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	12	54,5
20	Kalimantan Barat	14	11	78,6
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	8	53,3
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	10	58,8
29	Gorontalo	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	4	66,7
31	Maluku	11	8	72,7
32	Maluku Utara	10	7	70,0
33	Papua	9	4	44,4
34	Papua Barat	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	3	75,0
36	Papua Tengah	8	-	0,0
37	Papua Pegunungan	8	2	25,0
38	Papua Barat Daya	6	4	66,7
Indonesia		514	396	77,0

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.45

KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menyelenggarakan UBM	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	15	65,2
2	Sumatera Utara	33	22	66,7
3	Sumatera Barat	19	14	73,7
4	Riau	12	3	25,0
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	12	70,6
7	Bengkulu	10	7	70,0
8	Lampung	15	12	80,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	42,9
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	23	85,2
13	Jawa Tengah	35	14	40,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	37	97,4
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	19	86,4
20	Kalimantan Barat	14	5	35,7
21	Kalimantan Tengah	14	6	42,9
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	4	40,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	1	6,7
26	Sulawesi Tengah	13	6	46,2
27	Sulawesi Selatan	24	13	54,2
28	Sulawesi Tenggara	17	5	29,4
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	3	27,3
32	Maluku Utara	10	4	40,0
33	Papua	9	-	0,0
34	Papua Barat	7	-	0,0
35	Papua Selatan	4	-	0,0
36	Papua Tengah	8	-	0,0
37	Papua Pegunungan	8	-	0,0
38	Papua Barat Daya	6	1	16,7
Indonesia		514	302	58,8

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.46

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTMDI ≥ 80% PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan PANDU	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	6	26,1
2	Sumatera Utara	33	16	48,5
3	Sumatera Barat	19	4	21,1
4	Riau	12	4	33,3
5	Jambi	11	5	45,5
6	Sumatera Selatan	17	4	23,5
7	Bengkulu	10	2	20,0
8	Lampung	15	8	53,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	-	0,0
10	Kepulauan Riau	7	1	14,3
11	DKI Jakarta	6	5	83,3
12	Jawa Barat	27	3	11,1
13	Jawa Tengah	35	9	25,7
14	Di Yogyakarta	5	-	0,0
15	Jawa Timur	38	6	15,8
16	Banten	8	6	75,0
17	Bali	9	4	44,4
18	Nusa Tenggara Barat	10	2	20,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,3
20	Kalimantan Barat	14	-	0,0
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,3
22	Kalimantan Selatan	13	7	53,8
23	Kalimantan Timur	10	3	30,0
24	Kalimantan Utara	5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0
26	Sulawesi Tengah	13	5	38,5
27	Sulawesi Selatan	24	9	37,5
28	Sulawesi Tenggara	17	1	5,9
29	Gorontalo	6	4	66,7
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	-	0,0
32	Maluku Utara	10	-	0,0
33	Papua	9	-	0,0
34	Papua Barat	7	-	0,0
35	Papua Selatan	4	-	0,0
36	Papua Tengah	8	-	0,0
37	Papua Pegunungan	8	-	0,0
38	Papua Barat Daya	6	-	0,0
Indonesia		514	127	24,7

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.47

**DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA (SKRINING PTM PRIORITAS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Sasaran	Target (70%)	Capaian Skrining Indera Penglihatan		Capaian Skrining Indera Pendengaran	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
1	Aceh	2.904.745	1.045.696	429.776	41,1	411.891	39,4
2	Sumatera Utara	8.142.946	2.931.444	2.593.114	88,5	3.010.173	102,7
3	Sumatera Barat	3.068.363	1.104.601	1.237.437	112,0	1.373.707	124,4
4	Riau	3.532.640	1.271.745	628.022	49,4	709.458	55,8
5	Jambi	1.957.000	704.515	345.928	49,1	401.849	57,0
6	Sumatera Selatan	4.657.193	1.676.583	1.120.977	66,9	1.219.558	72,7
7	Bengkulu	1.109.950	399.577	172.533	43,2	190.619	47,7
8	Lampung	4.959.830	1.785.532	1.421.372	79,6	1.471.755	82,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	807.674	290.760	297.919	102,5	350.582	120,6
10	Kepulauan Riau	1.146.074	412.583	205.489	49,8	214.064	51,9
11	DKI Jakarta	5.678.164	2.044.137	474.273	23,2	525.521	25,7
12	Jawa Barat	26.634.646	9.588.460	4.005.789	41,8	4.614.674	48,1
13	Jawa Tengah	20.179.716	7.264.684	7.270.860	100,1	8.349.832	114,9
14	DI Yogyakarta	2.023.329	728.397	218.230	30,0	261.171	35,9
15	Jawa Timur	22.362.892	8.050.624	7.473.024	92,8	8.289.162	103,0
16	Banten	6.577.280	2.367.817	2.323.604	98,1	2.509.393	106,0
17	Bali	2.362.687	850.563	528.436	62,1	523.278	61,5
18	Nusa Tenggara Barat	2.958.362	1.065.006	570.656	53,6	649.033	60,9
19	Nusa Tenggara Timur	2.919.107	1.050.867	828.839	78,9	958.861	91,2
20	Kalimantan Barat	2.991.655	1.076.989	214.038	19,9	243.359	22,6
21	Kalimantan Tengah	1.475.027	531.002	370.533	69,8	401.842	75,7
22	Kalimantan Selatan	2.250.624	810.217	586.418	72,4	581.513	71,8
23	Kalimantan Timur	2.237.600	805.531	316.082	39,2	341.031	42,3
24	Kalimantan Utara	388.671	139.920	80.308	57,4	87.171	62,3
25	Sulawesi Utara	1.436.947	517.294	127.679	24,7	154.680	29,9
26	Sulawesi Tengah	1.639.553	590.233	414.211	70,2	415.700	70,4
27	Sulawesi Selatan	4.988.652	1.795.901	1.898.758	105,7	2.020.871	112,5
28	Sulawesi Tenggara	1.454.535	523.624	862.884	164,8	987.505	188,6
29	Gorontalo	644.870	232.150	673.779	290,2	728.553	313,8
30	Sulawesi Barat	781.151	281.212	133.012	47,3	149.358	53,1
31	Maluku	1.013.741	364.942	228.278	62,6	262.121	71,8
32	Maluku Utara	709.283	255.337	381.072	149,2	427.235	167,3
33	Papua	544.644	196.068	88.047	44,9	98.006	50,0
34	Papua Barat	300.476	108.168	21.443	19,8	24.555	22,7
35	Papua Selatan	271.228	97.641	92.083	94,3	107.409	110,0
36	Papua Tengah	765.152	275.450	53.730	19,5	55.351	20,1
37	Papua Pegunungan	766.906	276.082	5.174	1,9	6.161	2,2
38	Papua Barat Daya	324.358	116.766	26.633	22,8	30.633	26,2
Indonesia		148.967.671	104.277.370	38.720.440	37,1	43.157.635	41,4

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.48

**PERSENTASE ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran ODGJ Berat	Total Kasus ODGJ Berat	% ODGJ Berat Mendapatkan Layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	11.815	9.536	80,71
2	Sumatera Utara	22.100	18.165	82,19
3	Sumatera Barat	12.420	11.651	93,81
4	Riau	10.217	5.933	58,07
5	Jambi	6.030	4.562	75,66
6	Sumatera Selatan	17.857	10.969	61,43
7	Bengkulu	2.993	1.545	51,62
8	Lampung	16.189	9.295	57,42
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.636	788	29,89
10	Kepulauan Riau	1.992	979	49,15
11	DKI Jakarta	17.085	10.419	60,98
12	Jawa Barat	71.063	44.182	62,17
13	Jawa Tengah	95.585	37.783	39,53
14	D I Yogyakarta	13.235	2.551	19,27
15	Jawa Timur	79.970	43.325	54,18
16	Banten	16.299	16.900	103,69
17	Bali	13.384	4.818	36,00
18	Nusa Tenggara Barat	14.901	5.208	34,95
19	Nusa Tenggara Timur	4.594	9.528	207,40
20	Kalimantan Barat	12.109	6.533	53,95
21	Kalimantan Tengah	4.267	2.111	49,47
22	Kalimantan Selatan	6.053	4.597	75,95
23	Kalimantan Timur	4.694	1.534	32,68
24	Kalimantan Utara	1.349	257	19,05
25	Sulawesi Utara	5.171	2.001	38,70
26	Sulawesi Tengah	6.628	2.295	34,63
27	Sulawesi Selatan	21.995	14.198	64,55
28	Sulawesi Tenggara	3.688	2.509	68,03
29	Gorontalo	1.863	1.304	69,99
30	Sulawesi Barat	3.051	1.674	54,87
31	Maluku	1.379	924	67,01
32	Maluku Utara	1.236	553	44,74
33	Papua	1.181	722	61,13
34	Papua Barat	823	124	15,07
35	Papua Selatan	605	348	57,52
36	Papua Tengah	1.642	320	19,49
37	Papua Pegunungan	1.633	0	0,00
38	Papua Barat Daya	891	115	12,91
Indonesia		510.623	290.256	56,84

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.49

**JUMLAH ORANG YANG MENJADI FIRST AIDER PERTOLONGAN PERTAMA PADA LUKA PSIKOLOGIS (P3LP)
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025**

No	Provinsi	Sasaran	Total First Aider P3LP	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	36.600	17.311	47,30
2	Sumatera Utara	61.900	8.104	13,09
3	Sumatera Barat	28.000	3.949	14,10
4	Riau	23.900	6.349	26,56
5	Jambi	20.800	3.342	16,07
6	Sumatera Selatan	35.000	10.088	28,82
7	Bengkulu	17.900	1.685	9,41
8	Lampung	32.000	5.534	17,29
9	Kepulauan Bangka Belitung	6.400	2.767	43,23
10	Kepulauan Riau	9.600	3.635	37,86
11	DKI Jakarta	4.400	23.005	522,84
12	Jawa Barat	110.600	50.313	45,49
13	Jawa Tengah	88.100	99.446	112,88
14	D I Yogyakarta	12.100	11.379	94,04
15	Jawa Timur	97.300	33.534	34,46
16	Banten	25.300	7.486	29,59
17	Bali	12.000	4.958	41,32
18	Nusa Tenggara Barat	17.700	5.463	30,86
19	Nusa Tenggara Timur	43.500	2.794	6,42
20	Kalimantan Barat	24.900	3.151	12,65
21	Kalimantan Tengah	20.400	1.336	6,55
22	Kalimantan Selatan	24.200	4.307	17,80
23	Kalimantan Timur	18.800	3.095	16,46
24	Kalimantan Utara	5.800	710	12,24
25	Sulawesi Utara	19.900	1.344	6,75
26	Sulawesi Tengah	21.900	4.027	18,39
27	Sulawesi Selatan	47.400	19.478	41,09
28	Sulawesi Tenggara	30.800	4.473	14,52
29	Gorontalo	9.500	1.019	10,73
30	Sulawesi Barat	9.800	5.712	58,29
31	Maluku	24.000	1.031	4,30
32	Maluku Utara	15.000	1.589	10,59
33	Papua	12.200	487	3,99
34	Papua Barat	7.600	187	2,46
35	Papua Selatan	8.500	124	1,46
36	Papua Tengah	12.100	151	1,25
37	Papua Pegunungan	15.500	104	0,67
38	Papua Barat Daya	9.800	212	2,16
Indonesia		1.021.200	353.679	34,63

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.50

LAYANAN REHABILITASI MEDIS PENYALAHGUNAAN NAPZA
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2025

No	Provinsi	Sasaran Penduduk Penyalahguna NAPZA 2025	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Medis di Fasyankes IPWL		Puskesmas yang Mampu Memberikan Layanan Rehabilitasi Medis Penyalah Guna NAPZA (IPWL)		Kabupaten/Kota yang Memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Layanan Rehabilitasi Medis NAPZA	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	5976	366	23	166	2,8	48	13,1	10	43,5
2	Sumatera Utara	16758	619	33	686	4,1	75	12,1	7	21,2
3	Sumatera Barat	6446	280	19	293	4,5	26	9,3	5	26,3
4	Riau	7240	241	12	271	3,7	11	4,6	2	16,7
5	Jambi	4069	208	11	488	12,0	25	12,0	7	63,6
6	Sumatera Selatan	9604	354	17	285	3,0	68	19,2	2	11,8
7	Bengkulu	2314	179	10	185	8,0	0	0,0	0	-
8	Lampung	10346	322	15	74	0,7	54	16,8	14	93,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	1704	64	7	81	4,8	34	53,1	7	100,0
10	Kepulauan Riau	2370	96	7	511	21,6	13	13,5	3	42,9
11	DKI Jakarta	12094	44	6	978	8,1	19	43,2	4	66,7
12	Jawa Barat	56295	1106	27	362	0,6	217	19,6	12	44,4
13	Jawa Tengah	43220	881	35	187	0,4	9	1,0	5	14,3
14	D I Yogyakarta	4389	121	5	539	12,3	3	2,5	1	20,0
15	Jawa Timur	48182	973	38	61	0,1	62	6,4	15	39,5
16	Banten	13688	253	8	1782	13,0	6	2,4	1	12,5
17	Bali	5107	120	9	385	7,5	90	75,0	6	66,7
18	Nusa Tenggara Barat	6053	177	10	460	7,6	6	3,4	1	10,0
19	Nusa Tenggara Timur	5882	440	22	22	0,4	5	1,1	2	9,1
20	Kalimantan Barat	6245	249	14	184	2,9	14	5,6	2	14,3
21	Kalimantan Tengah	3104	205	14	208	6,7	1	0,5	1	7,1
22	Kalimantan Selatan	4620	242	13	86	1,9	11	4,5	4	30,8
23	Kalimantan Timur	4723	188	10	415	8,8	21	11,2	7	70,0
24	Kalimantan Utara	819	58	5	46	5,6	7	12,1	1	20,0
25	Sulawesi Utara	3051	201	15	8	0,3	9	4,5	5	33,3
26	Sulawesi Tengah	3383	219	13	61	1,8	1	0,5	1	7,7
27	Sulawesi Selatan	10564	474	24	1	0,0	44	9,3	11	45,8
28	Sulawesi Tenggara	2974	308	17	15	0,5	0	0,0	0	-
29	Gorontalo	1361	95	6	93	6,8	2	2,1	1	16,7
30	Sulawesi Barat	1595	98	6	455	28,5	0	0,0	0	-
31	Maluku	2123	241	11	0	0,0	9	3,7	1	9,1
32	Maluku Utara	1458	150	10	0	0,0	0	0,0	0	-
33	Papua	1048	123	9	0	0,0	0	0,0	0	-
34	Papua Barat	624	80	7	0	0,0	0	0,0	0	-
35	Papua Selatan	484	85	4	0	0,0	0	0,0	0	-
36	Papua Tengah	1596	125	8	0	0,0	0	0,0	0	-
37	Papua Pegunungan	1678	179	8	0	0,0	0	0,0	0	-
38	Papua Barat Daya	684	104	6	0	0,0	0	0,0	0	-
Indonesia		313.872	10.268	514	9.388	3,0	890	8,7	138	26,8

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.51

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA
TAHUN 2025

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Banjir	10	4	17	1	6	4	3	0	5	4	27	2	83
2	Letusan Gunung Api	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
3	Gempa Bumi	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	6
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	1	0	0	3	2	1	1	0	2	0	4	0	14
6	Banjir Bandang	1	1	0	0	2	1	0	0	1	1	2	0	9
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Angin Puting Beliung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4
9	Gelombang Pasang/Badai	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Banjir dan Tanah Longsor	3	0	4	3	2	2	1	0	3	1	21	0	40
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		16	6	22	8	14	8	5	3	13	8	56	2	161
1	Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penyakit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Keracunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gagal Teknologi	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Jumlah Bencana Berdampak Krisis Kesehatan 2023		16	7	22	9	14	8	6	4	14	8	56	2	166

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.52

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2025

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banjir	83	22	479	97	18.916	694.932
2	Letusan Gunung Api	3	3	0	11	1.703	7.400
3	Gempa Bumi	6	4	2	13	615	163
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	14	6	62	29	1.661	3.755
6	Banjir Bandang	9	7	27	18	927	3.927
7	Kekeringan	1	1	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	4	4	0	0	9	81
9	Gelombang Pasang/Badai	1	1	0	0	0	0
10	Banjir dan Tanah Longsor	40	11	827	695	77.338	533.222
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		161	59	1.397	863	101.169	1.243.480
1	Kebakaran	0	0	0	0	0	0
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	1	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0
6	Penyakit	1	1	0	252	609	0
7	Keracunan	0	0	0	0	0	0
8	Gagal Teknologi	3	3	65	33	76	750
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		5	5	65	285	685	750
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		0	0	0	0	0	0
Indonesia		166		1.462	1.148	101.854	1.244.230

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.53

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	20	564	456	4.939	1.077.305
2	Sumatera Utara	18	376	42	72.958	62.018
3	Sumatera Barat	18	267	119	336	13.202
4	Riau	3	0	0	0	610
5	Jambi	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	2	0	0	2	133
8	Lampung	3	0	0	356	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	15	33	12	5.721	31.691
13	Jawa Tengah	11	73	36	2.874	6.653
14	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	8	67	35	1.385	1.229
16	Banten	1	0	0	0	0
17	Bali	7	18	52	785	1.162
18	Nusa Tenggara Barat	5	5	27	1.307	842
19	Nusa Tenggara Timur	3	8	7	532	5.535
20	Kalimantan Barat	9	2	0	6.808	19.783
21	Kalimantan Tengah	3	1	0	142	0
22	Kalimantan Selatan	1	0	0	0	23
23	Kalimantan Timur	1	7	0	0	26
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	0	0	0	1.410
26	Sulawesi Tengah	6	5	15	720	3.688
27	Sulawesi Selatan	8	0	5	1.181	3.982
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	5	2	252	618	385
30	Sulawesi Barat	1	4	4	5	0
31	Maluku	2	0	0	0	0
32	Maluku Utara	2	2	7	1.039	10.591
33	Papua Barat	1	0	0	0	0
34	Papua	4	0	0	3	30
35	Papua Barat Daya	1	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0
37	Papua Selatan	1	0	0	0	345
38	Papua Pegunungan	4	28	79	143	3.587
Indonesia		166	1.462	1.148	101.854	1.244.230

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 6.54

JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No.	Provinsi	Jumlah Kejadian Bencana																				Jumlah	
		Banjir	Letusan Gunung Api	Gempa Bumi	Gempa Bumi dan Tsunami	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Kekeringan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang/Badai	Banjir dan Tanah Longsor	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecelakaan Transportasi Darat	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	Kecelakaan Industri	Penyakit	Keracunan	Gagal Teknologi	Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial		Aksi Teror dan Sabotase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2	Sumatera Utara	8	0	0	0	1	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
3	Sumatera Barat	13	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
4	Riau	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	Lampung	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	5	0	0	0	5	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
13	Jawa Tengah	3	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11
14	D.I.Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
16	Banten	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	Bali	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
18	Nusa Tenggara Barat	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
20	Kalimantan Barat	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
21	Kalimantan Tengah	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
22	Kalimantan Selatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Sulawesi Tengah	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
27	Sulawesi Selatan	4	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	Maluku	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
32	Maluku Utara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	Papua	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
35	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Selatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total		83	3	6	0	14	9	1	4	1	40	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	166

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian RI, 2025

Lampiran 7.1

KUALITAS AIR MINUM PADA SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Kualitas Air Minum pada Sarana Air Minum Memenuhi Syarat		Jumlah Perusahaan Daerah Air Minum	Jumlah Perusahaan Penyedia Air Minum Swasta	Jumlah Sarana Air Minum Komunal	Total Sarana Air Minum	SAM yang Diperiksa dan Kualitasnya Memenuhi Syarat	%
			Jumlah	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	0	0,00	73	0	495	568	31	5,46
2	Sumatera Utara	33	6	18,18	36	31	1.073	1.140	175	15,35
3	Sumatera Barat	19	3	15,79	151	0	1.675	1.826	261	14,29
4	Riau	12	2	16,67	77	60	856	993	256	25,78
5	Jambi	11	5	45,45	54	9	494	557	266	47,76
6	Sumatera Selatan	17	7	41,18	37	10	1.573	1.620	610	37,65
7	Bengkulu	10	2	20,00	3	2	110	115	104	90,43
8	Lampung	15	2	13,33	56	10	1.497	1.563	136	8,70
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0,00	24	2	247	273	73	26,74
10	Kepulauan Riau	7	1	14,29	28	2	267	297	161	54,21
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	17	1	0	18	18	100,00
12	Jawa Barat	27	17	62,96	257	22	2.113	2.392	1.058	44,23
13	Jawa Tengah	35	17	48,57	224	6	4.968	5.198	3.160	60,79
14	DI Yogyakarta	5	1	20,00	10	0	782	792	229	28,91
15	Jawa Timur	38	14	36,84	282	6	3.800	4.088	2.324	56,85
16	Banten	8	8	100,00	53	6	154	213	186	87,32
17	Bali	9	7	77,78	132	0	493	625	467	74,72
18	Nusa Tenggara Barat	10	2	20,00	75	2	297	374	280	74,87
19	Nusa Tenggara Timur	22	2	9,09	159	3	1.399	1.561	565	36,19
20	Kalimantan Barat	14	4	28,57	104	50	808	962	412	42,83
21	Kalimantan Tengah	14	10	71,43	84	0	1	85	69	81,18
22	Kalimantan Selatan	13	4	30,77	112	17	913	1.042	182	17,47
23	Kalimantan Timur	10	7	70,00	168	99	234	501	327	65,27
24	Kalimantan Utara	5	3	60,00	35	0	179	214	142	66,36
25	Sulawesi Utara	15	2	13,33	12	0	204	216	2	0,93
26	Sulawesi Tengah	13	3	23,08	67	0	1.456	1.523	756	49,64
27	Sulawesi Selatan	24	9	37,50	213	23	2.162	2.398	1.255	52,34
28	Sulawesi Tenggara	17	1	5,88	60	39	704	803	211	26,28
29	Gorontalo	6	1	16,67	49	0	185	234	24	10,26
30	Sulawesi Barat	6	0	0,00	29	0	147	176	23	13,07
31	Maluku	11	0	0,00	12	4	616	632	74	11,71
32	Maluku Utara	10	2	20,00	33	0	228	261	65	24,90
33	Papua	9	3	33,33	8	0	86	94	74	78,72
34	Papua Barat	7	0	0,00	1	0	0	1	0	0,00
35	Papua Selatan	4	0	0,00	3	0	1	4	1	25,00
36	Papua Tengah	8	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00	0	0	17	17	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00	3	0	31	34	4	11,76
Indonesia		514	151	29,38	2.741	404	30.265	33.410	13.981	41,85

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 7.2

KUALITAS AIR MINUM DALAM SURVEILANS KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA (SURVEILANS KAMRT) MEMENUHI SYARAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dengan Hasil Surveilans Kualitas Air Minum tingkat Rumah Tangga Memenuhi Syarat		Jumlah Sampel Rumah Tangga dalam Surveilans KAMRT	Jumlah Rumah Tangga dengan Kualitas Air Minum dalam Surveilans KAMRT Memenuhi Syarat	%
			Jumlah	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	9	39,13	1.978	475	24,01
2	Sumatera Utara	33	5	15,15	4.619	1.645	35,61
3	Sumatera Barat	19	6	31,58	3.820	1.223	32,02
4	Riau	12	5	41,67	6.134	1.747	28,48
5	Jambi	11	7	63,64	3.329	1.632	49,02
6	Sumatera Selatan	17	8	47,06	6.550	2.721	41,54
7	Bengkulu	10	2	20,00	2.401	771	32,11
8	Lampung	15	6	40,00	5.585	1.879	33,64
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0,00	1.438	255	17,73
10	Kepulauan Riau	7	2	28,57	2.643	865	32,73
11	DKI Jakarta	6	1	16,67	2.108	545	25,85
12	Jawa Barat	27	18	66,67	26.415	9.833	37,23
13	Jawa Tengah	35	22	62,86	22.196	7.996	36,02
14	DI Yogyakarta	5	1	20,00	3.625	1.011	27,89
15	Jawa Timur	38	15	39,47	19.579	6.118	31,25
16	Banten	8	6	75,00	6.004	1.914	31,88
17	Bali	9	9	100,00	3.504	2.246	64,10
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	4.403	1.123	25,51
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,27	8.126	2.686	33,05
20	Kalimantan Barat	14	6	42,86	2.702	821	30,38
21	Kalimantan Tengah	14	4	28,57	3.098	717	23,14
22	Kalimantan Selatan	13	3	23,08	3.476	1.112	31,99
23	Kalimantan Timur	10	7	70,00	4.291	1.646	38,36
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00	1.340	635	47,39
25	Sulawesi Utara	15	0	0,00	580	49	8,45
26	Sulawesi Tengah	13	5	38,46	3.903	1.248	31,98
27	Sulawesi Selatan	24	9	37,50	10.116	3.458	34,18
28	Sulawesi Tenggara	17	3	17,65	3.321	981	29,54
29	Gorontalo	6	1	16,67	1.340	295	22,01
30	Sulawesi Barat	6	1	16,67	1.737	284	16,35
31	Maluku	11	4	36,36	3.777	1.226	32,46
32	Maluku Utara	10	3	30,00	2.411	680	28,20
33	Papua	9	1	11,11	1.331	210	15,78
34	Papua Barat	7	0	0,00	124	1	0,81
35	Papua Selatan	4	0	0,00	1.236	196	15,86
36	Papua Tengah	8	0	0,00	200	12	6,00
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00	0	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00	382	83	21,73
Indonesia		514	180	35,02	179.822	60.339	33,55

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 7.3

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023-2025

No	Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	89,74	90,08	92,06
2	Sumatera Utara	92,19	92,94	93,24
3	Sumatera Barat	85,59	86,85	87,26
4	Riau	90,47	92,24	92,17
5	Jambi	80,02	82,16	82,46
6	Sumatera Selatan	87,19	87,23	86,82
7	Bengkulu	73,08	72,10	70,47
8	Lampung	82,78	84,51	85,13
9	Kepulauan Bangka Belitung	81,64	82,97	83,54
10	Kepulauan Riau	92,10	94,71	94,60
11	DKI Jakarta	99,42	99,96	99,98
12	Jawa Barat	93,86	94,90	95,84
13	Jawa Tengah	93,76	95,43	95,73
14	DI Yogyakarta	96,69	96,91	97,33
15	Jawa Timur	96,01	96,93	97,30
16	Banten	92,95	94,01	96,03
17	Bali	98,31	98,32	98,75
18	Nusa Tenggara Barat	96,03	96,13	96,29
19	Nusa Tenggara Timur	88,35	88,55	89,86
20	Kalimantan Barat	82,08	82,13	84,32
21	Kalimantan Tengah	77,72	78,71	80,58
22	Kalimantan Selatan	76,29	77,34	78,27
23	Kalimantan Timur	87,90	89,11	88,45
24	Kalimantan Utara	90,19	89,42	91,59
25	Sulawesi Utara	94,37	94,46	94,86
26	Sulawesi Tengah	86,85	87,86	87,55
27	Sulawesi Selatan	92,12	92,23	93,25
28	Sulawesi Tenggara	94,80	95,31	94,91
29	Gorontalo	96,00	96,13	95,95
30	Sulawesi Barat	79,86	80,14	83,00
31	Maluku	92,98	93,32	92,83
32	Maluku Utara	89,01	88,92	90,01
33	Papua	66,49	85,84	87,70
34	Papua Barat	81,57	82,38	82,95
35	Papua Selatan	-	71,90	71,28
36	Papua Tengah	-	81,53	83,21
37	Papua Pegunungan	-	30,64	32,89
38	Papua Barat Daya	-	81,68	80,64
Indonesia		91,72	92,64	93,22

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2026

Lampiran 7.4

JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana						KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi	
				Akses Sanitasi Aman	Akses Sanitasi Layak Sendiri	Akses Layak Bersama	Akses Belum Layak	BABStertutup	BABSTerbuka	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	23	1.550.461	318.250	988.395	105.009	54.310	84.497	0	1.550.461	100,00
2	Sumatera Utara	33	3.761.487	193.577	2.862.683	135.647	224.247	149.385	199.306	3.565.539	94,79
3	Sumatera Barat	19	1.431.749	99.715	1.031.176	121.403	55.171	119.229	3.313	1.426.694	99,65
4	Riau	12	1.786.751	225.816	1.407.014	91.160	37.053	22.583	3.898	1.783.626	99,83
5	Jambi	11	975.678	24.586	761.039	66.434	75.196	24.755	14.424	952.010	97,57
6	Sumatera Selatan	17	1.955.219	257.523	1.310.911	101.154	152.235	75.633	33.707	1.897.456	97,05
7	Bengkulu	10	553.086	99.739	358.276	18.485	25262	32182	9131	533944	96,54
8	Lampung	15	2.456.884	241.384	2.002.641	90.606	81.668	35.666	4.114	2.451.965	99,80
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	483.079	19.868	447.439	7.250	6.219	582	1.721	481.358	99,64
10	Kepulauan Riau	7	594.988	42.100	500.123	10.485	8.070	31.937	1.460	592.715	99,62
11	DKI Jakarta	6	2.589.189	431.720	1.749.954	285.520	15.043	106.480	472	2.588.717	99,98
12	Jawa Barat	27	15.081.028	1.744.572	10.396.654	1.222.760	1.051.451	664.368	0	15079805	99,99
13	Jawa Tengah	35	12.045.575	1.501.395	8.983.138	1.048.248	510.434	2.360	0	12045575	100,00
14	DI Yogyakarta	5	1.270.734	160.695	1.055.138	46.884	7.576	0	0	1270293	99,97
15	Jawa Timur	38	12.855.261	995.879	10.425.312	745.914	688.156	0	0	12855261	100,00
16	Banten	8	3.621.690	1.379.486	1.765.826	243.733	59.334	57.019	116.291	3.505.398	96,79
17	Bali	9	1.135.817	186.664	858.496	73.385	8.213	882	8.177	1.127.640	99,28
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.504.763	52.287	1.167.762	194.671	90.043	0	0	1504763	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.287.857	15.644	904.187	141.136	184.018	17.268	22.528	1.262.253	98,01
20	Kalimantan Barat	14	1.530.115	12.333	1.022.117	84.776	102.675	219.017	88.742	1.440.918	94,17
21	Kalimantan Tengah	14	698.241	65.109	438.678	15.152	40.300	74.363	63.531	633.602	90,74
22	Kalimantan Selatan	13	1.029.879	66.845	791.820	51.270	22.365	77.485	14.082	1.009.785	98,05
23	Kalimantan Timur	10	1.189.605	178.748	897.682	25.353	27.466	46.037	3.206	1.175.286	98,80
24	Kalimantan Utara	5	209.469	4.180	156.755	5.068	5.347	17.149	2.379	188.499	89,99
25	Sulawesi Utara	15	333.204	42.177	171.482	37.800	33719	35650	12376	320828	96,29
26	Sulawesi Tengah	13	857.205	11.450	689.802	73.921	19.763	23.266	43.072	818.202	95,45
27	Sulawesi Selatan	24	2.523.063	140.425	2.101.599	92.521	167.242	21.276	0	2523063	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	663.652	9.644	502.449	91.162	16.992	33.791	9.225	654.038	98,55
29	Gorontalo	6	345.033	602	224.372	83.718	809	497	35164	309998	89,85
30	Sulawesi Barat	6	372.838	0	291.971	43.460	4.110	10.473	21.055	350.014	93,88
31	Maluku	11	396.283	58.650	251.689	16.242	14.437	20.609	23.052	361.627	91,25
32	Maluku Utara	10	316.008	686	188.787	38.801	47.996	12.539	21.880	288.809	91,39
33	Papua	9	277.237	332	64.069	9.936	100.212	58.610	1.838	233.159	84,10
34	Papua Barat	7	51.025	2.391	25.105	2.224	1.279	2.553	1.090	33.552	65,76
35	Papua Selatan	4	129.400	17.474	49.742	9.462	10488	1705	40248	88871	68,68
36	Papua Tengah	8	80.981	11.096	35.328	1.486	535	3.731	30.528	52.176	64,43
37	Papua Pegunungan	8	5.067	131	1.072	1.477	1482	175	839	4337	85,59
38	Papua Barat Daya	6	42.268	2.313	10.552	4.598	1.257	3.791	1.900	22.511	53,26
Indonesia		514	77.991.869	8.615.486	56.891.235	5.438.311	3.952.173	2.087.543	832.749	76.984.748	98,71

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 7.5

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA/KELURAHAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota STBM		Jumlah Desa/Kelurahan *	Desa/ Kelurahan STBM	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Aceh	23	0	0,00	6.500	969	14,91
2	Sumatera Utara	33	0	0,00	6.110	833	13,63
3	Sumatera Barat	19	1	5,26	1.265	459	36,28
4	Riau	12	0	0,00	1.862	147	7,89
5	Jambi	11	0	0,00	1.585	207	13,06
6	Sumatera Selatan	17	0	0,00	3.259	344	10,56
7	Bengkulu	10	0	0,00	1.513	280	18,51
8	Lampung	15	1	6,67	2.651	424	15,99
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0,00	393	109	27,74
10	Kepulauan Riau	7	0	0,00	419	96	22,91
11	DKI Jakarta	6	0	0,00	267	62	23,22
12	Jawa Barat	27	0	0,00	5.957	1.605	26,94
13	Jawa Tengah	35	5	14,29	8.563	2.253	26,31
14	DI Yogyakarta	5	4	80,00	438	300	68,49
15	Jawa Timur	38	7	18,42	8.494	2.125	25,02
16	Banten	8	1	12,50	1.552	384	24,74
17	Bali	9	1	11,11	716	395	55,17
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	1.166	889	76,24
19	Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	3.442	308	8,95
20	Kalimantan Barat	14	0	0,00	2.145	23	1,07
21	Kalimantan Tengah	14	0	0,00	1.571	36	2,29
22	Kalimantan Selatan	13	0	0,00	2.016	171	8,48
23	Kalimantan Timur	10	0	0,00	1.038	213	20,52
24	Kalimantan Utara	5	0	0,00	482	52	10,79
25	Sulawesi Utara	15	0	0,00	1.839	45	2,45
26	Sulawesi Tengah	13	0	0,00	2.017	64	3,17
27	Sulawesi Selatan	24	0	0,00	3.059	301	9,84
28	Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	2.285	0	0,00
29	Gorontalo	6	0	0,00	729	7	0,96
30	Sulawesi Barat	6	0	0,00	648	0	0,00
31	Maluku	11	0	0,00	1.235	43	3,48
32	Maluku Utara	10	0	0,00	1.185	0	0,00
33	Papua	9	0	0,00	999	0	0,00
34	Papua Barat	7	0	0,00	824	0	0,00
35	Papua Selatan	4	0	0,00	690	0	0,00
36	Papua Tengah	8	0	0,00	1.208	0	0,00
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00	2.627	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00	1.013	16	1,58
Indonesia		514	30	5,84	83.762	13.160	15,71

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Lampiran 7.6

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023-2025**

No	Provinsi	2023	2024	2025
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Aceh	78,85	81,10	82,21
2	Sumatera Utara	84,18	85,73	87,47
3	Sumatera Barat	70,97	72,82	74,59
4	Riau	84,58	86,32	91,21
5	Jambi	83,04	83,97	85,88
6	Sumatera Selatan	80,54	82,36	85,50
7	Bengkulu	80,28	83,01	85,75
8	Lampung	84,58	85,44	87,29
9	Kepulauan Bangka Belitung	93,21	94,16	96,45
10	Kepulauan Riau	91,10	91,23	90,96
11	DKI Jakarta	93,50	94,01	93,98
12	Jawa Barat	74,88	75,10	76,20
13	Jawa Tengah	85,20	86,72	87,51
14	DI Yogyakarta	96,42	96,71	96,94
15	Jawa Timur	83,72	85,56	88,26
16	Banten	86,41	87,93	90,71
17	Bali	95,70	96,83	98,20
18	Nusa Tenggara Barat	85,11	86,80	88,29
19	Nusa Tenggara Timur	75,67	77,66	80,80
20	Kalimantan Barat	79,89	81,56	88,37
21	Kalimantan Tengah	76,31	78,15	83,14
22	Kalimantan Selatan	82,89	83,70	86,80
23	Kalimantan Timur	91,21	91,65	92,57
24	Kalimantan Utara	84,22	85,17	86,00
25	Sulawesi Utara	85,91	87,31	87,72
26	Sulawesi Tengah	75,80	77,40	79,62
27	Sulawesi Selatan	93,69	93,83	94,19
28	Sulawesi Tenggara	88,99	90,62	91,96
29	Gorontalo	81,72	82,99	84,70
30	Sulawesi Barat	80,73	82,52	85,98
31	Maluku	78,17	80,51	83,09
32	Maluku Utara	80,64	82,32	84,12
33	Papua	43,00	80,57	76,71
34	Papua Barat	76,30	79,00	78,55
35	Papua Selatan	-	60,85	65,06
36	Papua Tengah	-	41,44	39,73
37	Papua Pegunungan	-	12,61	16,34
38	Papua Barat Daya	-	77,84	79,56
Indonesia		82,36	83,60	85,37

Sumber: Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2026

Lampiran 7.7

PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MEMENUHI SYARAT IKL DAN UJI KUALITAS LINGKUNGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025

No	Provinsi	TFU Teraftar							TFU Yang Dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat IKL dan Uji Kualitas Lingkungan													
		Sarana Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)	Pasar	Terminal	Pelabuhan	Bandara	Akomodasi	Total	Sarana Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)		Pasar		Terminal		Pelabuhan		Bandara		Akomodasi		Jumlah Total	
									Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	719	22	2	12	3	23	781	395	54,94	2	9,09	2	100,00	0	0,00	0	0,00	22	95,65	421	53,91
2	Sumatera Utara	1.282	45	4	5	2	2	1.340	691	53,90	6	13,33	2	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	700	52,24
3	Sumatera Barat	1.137	64	2	4	1	15	1.223	589	51,80	2	3,13	1	50,00	2	50,00	0	0,00	8	53,33	602	49,22
4	Riau	991	43	2	26	1	19	1.082	566	57,11	3	6,98	1	50,00	1	3,85	1	100,00	12	63,16	584	53,97
5	Jambi	490	8	1	5	1	0	505	326	66,53	3	37,50	1	100,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	331	65,54
6	Sumatera Selatan	545	30	6	3	0	12	596	353	64,77	9	30,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	10	83,33	374	62,75
7	Bengkulu	301	21	0	4	1	7	334	159	52,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	85,71	165	49,40
8	Lampung	925	24	1	3	1	5	959	477	51,57	5	20,83	1	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00	488	50,89
9	Kepulauan Bangka Belitung	383	5	0	6	0	35	429	280	73,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	80,00	308	71,79
10	Kepulauan Riau	608	8	0	21	2	9	648	299	49,18	1	12,50	0	0,00	5	23,81	1	50,00	5	55,56	311	47,99
11	DKI Jakarta	612	29	2	5	1	21	670	537	87,75	16	55,17	2	100,00	1	20,00	0	0,00	19	90,48	575	85,82
12	Jawa Barat	6.119	88	21	4	1	46	6.279	2.946	48,15	23	26,14	5	23,81	0	0,00	0	0,00	41	89,13	3.015	48,02
13	Jawa Tengah	4.782	156	22	9	2	108	5.079	3.498	73,15	79	50,64	10	45,45	0	0,00	0	0,00	97	89,81	3.684	72,53
14	DI Yogyakarta	859	26	1	1	1	12	900	671	78,11	10	38,46	1	100,00	0	0,00	0	0,00	8	66,67	690	76,67
15	Jawa Timur	10.545	229	16	8	2	82	10.882	8.180	77,57	103	44,98	12	75,00	0	0,00	0	0,00	81	98,78	8.376	76,97
16	Banten	2.682	48	2	4	0	39	2.775	1.889	70,43	20	41,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	79,49	1.940	69,91
17	Bali	600	41	3	3	1	27	675	534	89,00	29	70,73	2	66,67	0	0,00	0	0,00	27	100,00	592	87,70
18	Nusa Tenggara Barat	910	18	0	8	0	9	945	599	65,82	2	11,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00	610	64,55
19	Nusa Tenggara Timur	1.651	63	0	12	0	23	1.749	906	54,88	3	4,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	60,87	923	52,77
20	Kalimantan Barat	924	10	0	1	0	5	940	488	52,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	60,00	491	52,23
21	Kalimantan Tengah	685	15	0	4	0	14	718	280	40,88	3	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,14	284	39,55
22	Kalimantan Selatan	787	20	2	5	1	5	820	342	43,46	6	30,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	3	60,00	352	42,93
23	Kalimantan Timur	1.010	18	4	11	3	25	1.071	615	60,89	7	38,89	1	25,00	3	27,27	0	0,00	21	84,00	647	60,41
24	Kalimantan Utara	201	9	0	5	0	7	222	134	66,67	2	22,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	85,71	142	63,96
25	Sulawesi Utara	242	9	1	9	0	1	262	136	56,20	2	22,22	0	0,00	1	11,11	0	0,00	1	100,00	140	53,44
26	Sulawesi Tengah	683	23	0	9	0	3	718	424	62,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67	426	59,33
27	Sulawesi Selatan	2.100	115	5	10	1	57	2.288	1.214	57,81	10	8,70	4	80,00	0	0,00	0	0,00	22	38,60	1.250	54,63
28	Sulawesi Tenggara	1.361	99	3	5	1	119	1.588	781	57,38	16	16,16	2	66,67	0	0,00	0	0,00	99	83,19	898	56,55
29	Gorontalo	170	4	2	3	1	1	181	132	77,65	1	25,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	1	100,00	137	75,69
30	Sulawesi Barat	689	32	1	0	0	0	722	295	42,82	2	6,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	297	41,14
31	Maluku	579	5	1	8	0	157	750	262	45,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	61,78	359	47,87
32	Maluku Utara	471	9	3	8	0	37	528	218	46,28	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	30	81,08	249	47,16
33	Papua	198	2	0	2	1	13	216	92	46,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	30,77	96	44,44
34	Papua Barat	63	2	0	3	1	0	69	21	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	30,43
35	Papua Selatan	163	2	0	3	1	11	180	68	41,72	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9,09	70	38,89
36	Papua Tengah	2	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	Papua Pegunungan	44	0	0	0	0	0	44	22	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	50,00
38	Papua Barat Daya	35	0	0	5	0	4	44	10	28,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00	14	31,82
Indonesia		46.548	1.342	107	234	30	953	49.214	29.429	63,22	366	27,27	51	47,66	17	7,26	2	6,67	719	75,45	30.584	62,14

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

**PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN SIAP SAJI MEMENUHI SYARAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	TPP Terdaftar	TPP Memenuhi Syarat (IKL, Peningkatan Kapasitas, Pemeriksaan Pangan)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	4.163	35	0,84
2	Sumatera Utara	8.924	1.432	16,05
3	Sumatera Barat	15.659	8.888	56,76
4	Riau	7.669	1.071	13,97
5	Jambi	3.843	2.463	64,09
6	Sumatera Selatan	5.678	4.773	84,06
7	Bengkulu	3.789	2.581	68,12
8	Lampung	10.268	4.034	39,29
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.687	2.065	56,01
10	Kepulauan Riau	7.035	2.866	40,74
11	DKI Jakarta	9.320	7.461	80,05
12	Jawa Barat	4.858	2.738	56,36
13	Jawa Tengah	27.938	15.973	57,17
14	DI Yogyakarta	5.082	3.354	66,00
15	Jawa Timur	13.176	2.009	15,25
16	Banten	8.217	1.137	13,84
17	Bali	10.823	6.750	62,37
18	Nusa Tenggara Barat	10.501	6.347	60,44
19	Nusa Tenggara Timur	5.050	2.045	40,50
20	Kalimantan Barat	5.391	1.743	32,33
21	Kalimantan Tengah	4.288	1.323	30,85
22	Kalimantan Selatan	14.875	8.714	58,58
23	Kalimantan Timur	8.054	1.149	14,27
24	Kalimantan Utara	1.527	460	30,12
25	Sulawesi Utara	3.325	1.636	49,20
26	Sulawesi Tengah	4.908	2.274	46,33
27	Sulawesi Selatan	16.822	5.666	33,68
28	Sulawesi Tenggara	6.230	2.780	44,62
29	Gorontalo	3.009	144	4,79
30	Sulawesi Barat	2.362	141	5,97
31	Maluku	5.049	1.619	32,07
32	Maluku Utara	2.006	326	16,25
33	Papua	1.796	1.182	65,81
34	Papua Barat	1.549	965	62,30
35	Papua Selatan	1.068	633	59,27
36	Papua Tengah	0	0	0,00
37	Papua Pegunungan	117	43	36,75
38	Papua Barat Daya	512	299	58,40
Indonesia		248.568	109.119	43,90

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 7.9

**PERSENTASE HASIL PENGUKURAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG MEMENUHI SYARAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Target Responden (Rumah Tangga)	Rumah Tangga yang Dilakukan Pengukuran		Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	10.950	3	0,03	0	0,00
2	Sumatera Utara	18.480	858	4,64	608	70,86
3	Sumatera Barat	8.400	1.066	12,69	843	79,08
4	Riau	7.140	1.993	27,91	1.195	59,96
5	Jambi	6.240	944	15,13	610	64,62
6	Sumatera Selatan	10.440	1.992	19,08	1.544	77,51
7	Bengkulu	5.370	154	2,87	91	59,09
8	Lampung	9.570	97	1,01	67	69,07
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.920	194	10,10	135	69,59
10	Kepulauan Riau	2.820	1.585	56,21	1.309	82,59
11	DKI Jakarta	9.450	1.431	15,14	907	63,38
12	Jawa Barat	33.000	13.603	41,22	6.607	48,57
13	Jawa Tengah	26.400	7.665	29,03	5.345	69,73
14	DI Yogyakarta	3.630	2.047	56,39	1.445	70,59
15	Jawa Timur	29.160	11.941	40,95	6.236	52,22
16	Banten	7.530	3.978	52,83	1.466	36,85
17	Bali	3.600	149	4,14	113	75,84
18	Nusa Tenggara Barat	5.280	1.016	19,24	690	67,91
19	Nusa Tenggara Timur	12.990	663	5,10	343	51,73
20	Kalimantan Barat	7.470	400	5,35	210	52,50
21	Kalimantan Tengah	6.120	2.189	35,77	1.718	78,48
22	Kalimantan Selatan	7.230	125	1,73	49	39,20
23	Kalimantan Timur	5.640	2.189	38,81	1.718	78,48
24	Kalimantan Utara	1.740	201	11,55	170	84,58
25	Sulawesi Utara	5.970	8	0,13	0	0,00
26	Sulawesi Tengah	6.540	0	0,00	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	14.220	2.251	15,83	1.555	69,08
28	Sulawesi Tenggara	9.180	1.643	17,90	1.107	67,38
29	Gorontalo	2.850	269	9,44	158	58,74
30	Sulawesi Barat	2.940	114	3,88	108	94,74
31	Maluku	6.840	683	9,99	467	68,37
32	Maluku Utara	4.470	14	0,31	1	7,14
33	Papua	3.570	27	0,76	11	40,74
34	Papua Barat	2.280	15	0,66	14	93,33
35	Papua Selatan	2.370	0	0,00	0	0,00
36	Papua Tengah	3.510	0	0,00	0	0,00
37	Papua Pegunungan	4.440	0	0,00	0	0,00
38	Papua Barat Daya	2.730	3	0,11	3	100,00
Indonesia		312.480	61.510	19,68	36.843	59,90

Sumber: Ditjen Dampakulanan Danohit Komohor DI 2026

Lampiran 7.10

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023-2025**

No	Provinsi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	65,91	67,76	71,15
2	Sumatera Utara	70,95	73,47	76,89
3	Sumatera Barat	59,85	62,29	63,70
4	Riau	71,53	74,80	80,22
5	Jambi	64,12	66,21	68,42
6	Sumatera Selatan	61,82	63,21	65,74
7	Bengkulu	54,74	56,52	57,97
8	Lampung	63,15	65,96	68,78
9	Kepulauan Bangka Belitung	32,57	30,72	33,13
10	Kepulauan Riau	54,21	57,19	59,03
11	DKI Jakarta	38,80	39,00	37,71
12	Jawa Barat	54,17	56,25	58,46
13	Jawa Tengah	68,85	71,76	74,74
14	DI Yogyakarta	85,79	86,68	88,31
15	Jawa Timur	70,74	73,40	76,68
16	Banten	63,06	64,94	69,14
17	Bali	84,26	85,99	85,73
18	Nusa Tenggara Barat	66,31	67,74	71,49
19	Nusa Tenggara Timur	42,70	46,88	62,27
20	Kalimantan Barat	64,16	65,70	74,26
21	Kalimantan Tengah	56,49	59,92	66,44
22	Kalimantan Selatan	57,50	60,60	63,40
23	Kalimantan Timur	75,82	76,77	76,87
24	Kalimantan Utara	71,43	69,65	74,86
25	Sulawesi Utara	72,39	74,21	76,84
26	Sulawesi Tengah	59,60	62,59	65,19
27	Sulawesi Selatan	71,88	71,86	78,67
28	Sulawesi Tenggara	74,01	76,67	80,11
29	Gorontalo	70,75	72,04	75,75
30	Sulawesi Barat	59,28	59,95	66,28
31	Maluku	63,61	66,13	69,15
32	Maluku Utara	68,17	68,05	74,49
33	Papua	29,01	62,15	58,41
34	Papua Barat	56,92	58,22	59,11
35	Papua Selatan	-	38,34	43,88
36	Papua Tengah	-	26,79	30,95
37	Papua Pegunungan	-	4,44	9,53
38	Papua Barat Daya	-	58,25	57,76
Indonesia		63,15	65,25	68,40

Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, Badan Pusat Statistik, 2025

Lampiran 7.11

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	1	4,35
2	Sumatera Utara	33	4	12,12
3	Sumatera Barat	19	12	63,16
4	Riau	12	0	0,00
5	Jambi	11	2	18,18
6	Sumatera Selatan	17	5	29,41
7	Bengkulu	10	1	10,00
8	Lampung	15	1	6,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	1	14,29
10	Kepulauan Riau	7	1	14,29
11	DKI Jakarta	6	2	33,33
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	29	82,86
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	34	89,47
16	Banten	8	3	37,50
17	Bali	9	8	88,89
18	Nusa Tenggara Barat	10	2	20,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,55
20	Kalimantan Barat	14	0	0,00
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,29
22	Kalimantan Selatan	13	4	30,77
23	Kalimantan Timur	10	5	50,00
24	Kalimantan Utara	5	2	40,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	2	15,38
27	Sulawesi Selatan	24	20	83,33
28	Sulawesi Tenggara	17	3	17,65
29	Gorontalo	6	1	16,67
30	Sulawesi Barat	6	0	0,00
31	Maluku	11	0	0,00
32	Maluku Utara	10	1	10,00
33	Papua	9	1	11,11
34	Papua Barat	7	0	0,00
35	Papua Selatan	4	0	0,00
36	Papua Tengah	8	0	0,00
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00
Indonesia		514	195	37,94

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026

Lampiran 7.12

**JUMLAH FASYANKES YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN LINGKUNGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2025**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas) minimal 50% memenuhi layanan air, sanitasi, kelola limbah, higiene dan kebersihan sesuai standar peraturan yang berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	16	69,57	257
2	Sumatera Utara	33	15	45,45	416
3	Sumatera Barat	19	17	89,47	245
4	Riau	12	12	100,00	211
5	Jambi	11	8	72,73	134
6	Sumatera Selatan	17	14	82,35	312
7	Bengkulu	10	6	60,00	116
8	Lampung	15	15	100,00	347
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	81
10	Kepulauan Riau	7	5	71,43	90
11	DKI Jakarta	6	4	66,67	139
12	Jawa Barat	27	23	85,19	1.082
13	Jawa Tengah	35	34	97,14	1.114
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	187
15	Jawa Timur	38	38	100,00	1.321
16	Banten	8	8	100,00	348
17	Bali	9	9	100,00	170
18	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00	172
19	Nusa Tenggara Timur	22	5	22,73	181
20	Kalimantan Barat	14	8	57,14	184
21	Kalimantan Tengah	14	6	42,86	106
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,31	204
23	Kalimantan Timur	10	9	90,00	183
24	Kalimantan Utara	5	3	60,00	35
25	Sulawesi Utara	15	10	66,67	145
26	Sulawesi Tengah	13	3	23,08	102
27	Sulawesi Selatan	24	17	70,83	364
28	Sulawesi Tenggara	17	8	47,06	173
29	Gorontalo	6	2	33,33	49
30	Sulawesi Barat	6	4	66,67	62
31	Maluku	11	1	9,09	46
32	Maluku Utara	10	2	20,00	42
33	Papua	9	2	22,22	45
34	Papua Barat	7	0	0,00	14
35	Papua Selatan	4	0	0,00	26
36	Papua Tengah	8	0	0,00	20
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00	9
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00	17
Indonesia		514	337	65,56	8.749

Sumber: Ditjen Penanggulangan Penyakit, Kemenkes RI, 2026;

Lampiran 7.13

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE KESEHATAN (PEMBUDAYAAN GERMAS)

TAHUN 2025

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan GERMAS)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	33	16	48,48
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	8	66,67
5	Jambi	11	4	36,36
6	Sumatera Selatan	17	8	47,06
7	Bengkulu	10	9	90,00
8	Lampung	15	10	66,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,43
10	Kepulauan Riau	7	3	42,86
11	DKI Jakarta	6	1	16,67
12	Jawa Barat	27	17	62,96
13	Jawa Tengah	35	27	77,14
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	35	92,11
16	Banten	8	5	62,50
17	Bali	9	8	88,89
18	Nusa Tenggara Barat	10	5	50,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	5	22,73
20	Kalimantan Barat	14	9	64,29
21	Kalimantan Tengah	14	8	57,14
22	Kalimantan Selatan	13	8	61,54
23	Kalimantan Timur	10	5	50,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	3	20,00
26	Sulawesi Tengah	13	5	38,46
27	Sulawesi Selatan	24	12	50,00
28	Sulawesi Tenggara	17	6	35,29
29	Gorontalo	6	4	66,67
30	Sulawesi Barat	6	2	33,33
31	Maluku	11	2	18,18
32	Maluku Utara	10	2	20,00
33	Papua	9	1	11,11
34	Papua Barat	7	0	0,00
35	Papua Selatan	4	3	75,00
36	Papua Tengah	8	0	0,00
37	Papua Pegunungan	8	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	0	0,00
Indonesia		514	270	52,53

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, 2026

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2026

